



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah Daerah disusun dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa rencana pembangunan jangka menengah Daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
21. Kabupaten/Kota Lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah akhir periode perencanaan.

BAB II RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

asal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari:
 - a. Visi, Misi dan Program Bupati terpilih tahun 2024; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan pembangunan dan Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
 - b. RTRW Daerah; dan
 - c. RPJMD Kabupaten/Kota Lainnya.

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut.
 - a. bab I berisi Pendahuluan;
 - b. bab II berisi Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. bab III berisi Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V berisi Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;

- b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.
 - (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup paling sedikit terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
- (2) RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH (4-168/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum

Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd., S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700822 199803 1007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Pembangunan Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah Kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan umum, Program Pembangunan Daerah, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xvii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-5

**1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
 Pembangunan Lainnya I-7**

 1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sragen 2025-2045 .. I-8

 1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN 2025-2029 I-9

 1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah
 2025-2029 I-10

 1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan RTRW I-10

 1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan KLHS I-11

1.4 Maksud dan Tujuan I-11

 1.4.1 Maksud I-11

 1.4.2 Tujuan I-11

1.5 Sistematika Penulisan I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

 2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1

 2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam II-3

 2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-17

 2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan II-21

 2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas II-29

 2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-36

 2.1.7 Demografi II-45

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-50

 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-50

 2.2.2 Kesehatan untuk Semua II-86

 2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata II-104

 2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif II-108

 2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-109

 2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan
 Masyarakat Inklusif II-110

 2.2.7 Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pembangunan Gender .. II-110

 2.2.8 Perlindungan Anak II-112

2.3	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-114
2.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-114
2.3.2	IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-116
2.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.....	II-120
2.3.4	Transformasi Digital	II-129
2.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-130
2.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. II-	131
2.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro.....	II-136
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-140
2.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas	II-140
2.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substantial.....	II-145
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....	II-147
2.5	Gambaran Keuangan Daerah	II-149
2.6	Permasalahan dan Isu Strategis	II-230
2.6.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-230
2.6.2	Isu Strategis	II-234
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	III-1
3.1	Visi dan Misi.....	III-1
3.1.1	Visi.....	III-1
3.1.2	Misi	III-2
3.2	Tujuan dan Sasaran	III-10
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV-1
4.2	Urusan Wajib Bukan pelayanan Dasar.....	IV-9
4.3	Urusan Pemerintahan Pilihan.....	IV-19
4.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	IV-22
4.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	IV-23
4.6	Unsur Pengawas Urusan Pemerintah	IV-24
4.7	Unsur Kewilayahan	IV-25
4.8	Unsur Pemerintahan Umum	IV-25
4.9	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-161
4.9.1	Indikator Kinerja Utama Daerah.....	IV-161
4.9.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)	IV-161
BAB V	PENUTUP	V-1
5.1	Kesimpulan.....	V-1
5.2	Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ...	V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2024 II-2

Tabel 2. 2 Tinggi Wilayah dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2024..... II-3

Tabel 2. 3 Nama Waduk, Luas, Kapasitas, dan Kondisi Air di Kabupaten Sragen II-8

Tabel 2. 4 Jumlah dan Rata Rata Curah Hujan Menurut Kecamatan Tahun 2024..... II-10

Tabel 2. 5 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Sragen Tahun 2024..... II-13

Tabel 2. 6 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen tahun 2024..... II-13

Tabel 2. 7 Luas Tanaman, Produktivitas, dan Produksi Tebu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen tahun 2024..... II-14

Tabel 2. 8 Populasi Ternak dan Jenis Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen tahun 2024..... II-15

Tabel 2. 9 Produksi Perikanan Menurut Jenis Ikan dan Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2024 II-16

Tabel 2. 10 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Sragen II-18

Tabel 2. 11 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Sragen II-19

Tabel 2. 12 Sebaran Mata Air Kabupaten Sragen..... II-26

Tabel 2. 13 Usia Pakai dan Tipe Pengelolaan Sampah TPA di Kabupaten Sragen Tahun 2024..... II-33

Tabel 2. 14 Nama Fasilitas dan Lokasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Sragen..... II-33

Tabel 2. 15 Timbulan Sampah Kabupaten Sragen Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 II-34

Tabel 2. 16 Target RPPLH Indikator Persampahan Kabupaten Sragen II-34

Tabel 2. 17 Target Pengelolaan Sampah Kabupaten Sragen..... II-35

Tabel 2. 18 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2019-2023 II-39

Tabel 2. 19 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sragen II-40

Tabel 2. 20 Aspek Emisi GRK Kabupaten Sragen Tahun 2013-2020..... II-42

Tabel 2. 21 Aspek Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2020 II-44

Tabel 2. 22 Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 II-45

Tabel 2. 23 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sragen Berdasarkan Kecamatan II-47

Tabel 2. 24 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sragen II-48

Tabel 2. 25 Target RKPD dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-51

Tabel 2. 26 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024..... II-52

Tabel 2. 27 Target dan Capaian IPM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 II-55

Tabel 2. 28 IPM Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024 II-55

Tabel 2. 29 Pertumbuhan IPM Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 II-56

Tabel 2. 30 Pertumbuhan IPM Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 II-56

Tabel 2. 31 Pertumbuhan PKP/tahun Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 (Ribu Rupiah) II-59

Tabel 2. 32 Pertumbuhan PKP/tahun Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 (Ribu Rupiah) II-60

Tabel 2. 33 Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Sragen Beserta Kompositnya Tahun 2020-2024 II-61

Tabel 2. 34 Target RKPD dan Capaian TPT Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 II-68

Tabel 2. 35 Capaian TPT Kabupaten Sragen dan wilayah Sekitar Tahun 2020-2024 II-69

Tabel 2. 36 Pertumbuhan TPT Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 II-70

Tabel 2. 37 Pertumbuhan TPT Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 II-70

Tabel 2. 38 Pertumbuhan Jumlah Penganggur di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024..... II-71

Tabel 2. 39 Persentase Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024 II-71

Tabel 2. 40 Persentase Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-72

Tabel 2. 41 Jumlah Penganggur Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 II-72

Tabel 2. 42 Perubahan Jumlah Penganggur Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19..... II-72

Tabel 2. 43 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024..... II-74

Tabel 2. 44 Target dan Capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-76

Tabel 2. 45 Perubahan Miskin Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 II-77

Tabel 2. 46 Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 II-77

Tabel 2. 47 Gini Ratio Kabupaten Sragen Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19	II-82
Tabel 2. 48 Target dan Capaian Gini Ratio Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2. 49 Gini Ratio Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024	II-83
Tabel 2. 50 Perubahan Gini Ratio Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Sebelum dan Setelah Covid-19	II-85
Tabel 2. 51 Perubahan Gini Ratio Jawa Tengah dan Nasional Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19	II-85
Tabel 2. 52 Posyandu yang Dibina Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-91
Tabel 2. 53 Data sumber daya manusia (SDM) kesehatan Kabupaten Sragen per rumpun dengan berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024	II-92
Tabel 2. 54 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kab. Sragen Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024	II-93
Tabel 2. 55 Jumlah Infeksi HIV/AIDS Tahun 2020-2024.....	II-97
Tabel 2. 56 Distribusi PDRB Non Pertambangan dan Penggalan Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (%)	II-122
Tabel 2. 57 Daftar Desa Mandiri Energi di Kabupaten Sragen	II-123
Tabel 2. 58 Lokasi Semburan Gas Rawa di Kabupaten Sragen	II-125
Tabel 2. 59 Data Biogas di Kabupaten Sragen	II-125
Tabel 2. 60 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Penangkapan Tahun 2024	II-127
Tabel 2. 61 Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Sragen	II-127
Tabel 2. 62 Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Kabupaten Sragen Tahun 2023.....	II-128
Tabel 2. 63 Potensi EBT Kabupaten Sragen	II-129
Tabel 2. 64 Kondisi Jalan Kabupaten Sragen.....	II-131
Tabel 2. 65 Jumlah RTLH Kabupaten Sragen	II-133
Tabel 2. 66 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Sragen.....	II-135
Tabel 2. 67 Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-150
Tabel 2. 68 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-162
Tabel 2. 69 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-170
Tabel 2. 70 Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024.....	II-175
Tabel 2. 71 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 ...	II-178

Tabel 2. 72 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen	
Tahun 2020-2024	II-195
Tabel 2. 73 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-199
Tabel 2. 74 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Sragen	
Tahun 2026-2030	II-211
Tabel 2. 75 Proyeksi Pendapatan Daerah 2026-2030.....	II-214
Tabel 2. 76 Proyeksi Belanja Daerah 2026-2030.....	II-219
Tabel 2. 77 Proyeksi Pembiayaan Daerah 2026-2030	II-224
Tabel 2. 78 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen	
Tahun 2026-2030	II-228
Tabel 2. 79 Pemetaan permasalahan pembangunan lintas sektor.....	II-231
Tabel 2. 80 Perumusan Isu Strategis Daerah.....	II-255
Tabel 3. 1 Penyandingan Visi dan Misi RPJMD Sragen, RPJMD Provinsi Jawa	
Tengah, dan RPJMN Tahun 2025-2029	III-9
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2026 –	
2030.....	III-12
Tabel 3. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Tahunan Kabupaten Sragen.....	III-51
Tabel 3. 4 Strategi dan arah Kebijakan.....	III-68
Tabel 3. 5 Program Program Unggulan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029..	III-76
Tabel 3. 6 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Tahun	
2025-2029.....	III-79
Tabel 3. 7 Indikasi Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah	
dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	III-88
Tabel 3. 8 Penekanan Indikasi Intervensi di Wilayah Pengembangan	
Subosukawonosraten dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah	III-91
Tabel 3. 9 Dukungan Program RPJMD Sragen Tahun 2025-2029 terhadap	
Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029	III-96
Tabel 3. 10 Dukungan Program RPJMD Sragen Tahun 2025-2029 terhadap Proyek	
Strategis Nasional (PSN) RPJMN Tahun 2025-2029.....	III-101
Tabel 3. 11 Dukungan Program RPJMD Sragen Tahun 2025-2029 terhadap	
Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.....	III-103
Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program	
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	IV-27
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-161
Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan	
Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029	IV-163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur dan Tahapan Proses Penyusunan RPJMD I-2

Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-8

Gambar 1. 3 Keterkaitan Antara Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan
RPJPD Kabupaten Sragen I-9

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Sragen II-2

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Sragen..... II-4

Gambar 2. 3 Peta Morfologi Kabupaten Sragen..... II-6

Gambar 2. 4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sragen II-7

Gambar 2. 5 Peta Cadangan Air Tanah Kabupaten Sragen II-9

Gambar 2. 6 Peta Hidrologi Kabupaten Sragen II-10

Gambar 2. 7 Peta Curah Hujan Kabupaten Sragen..... II-11

Gambar 2. 8 Peta Geologi Kabupaten Sragen..... II-12

Gambar 2. 9 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Sragen II-19

Gambar 2. 10 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan
Kabupaten Sragen II-20

Gambar 2. 11 Capaian Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen Tahun
2020-2024..... II-21

Gambar 2. 12 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sragen
tahun 2020-2024 II-22

Gambar 2. 13 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Sragen,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 II-23

Gambar 2. 14 Akses Air Minum Masyarakat Kabupaten Sragen
Tahun 2021-2024 II-24

Gambar 2. 15 Cakupan Pelayanan Jaringan Perpipaan Air Minum (%) Tahun
2021-2024..... II-25

Gambar 2. 16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, Provinsi
Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2020-2024..... II-30

Gambar 2. 17 Capaian Nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sragen
tahun 2020-2024 II-30

Gambar 2. 18 Cakupan Pelayanan Sanitasi Kabupaten Sragen II-31

Gambar 2. 19 Capaian Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sragen, Provinsi
Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2019-2023..... II-36

Gambar 2. 20 Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Sragen
tahun 2020-2024 II-40

Gambar 2. 21 Emisi GRK Kabupaten Sragen Tahun 2013-2020..... II-41

Gambar 2. 22 Emisi GRK Kabupaten Sragen Tahun 2013-2020..... II-42

Gambar 2. 23 Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2020..... II-44

Gambar 2. 24 Emisi GRK Nasional Tahun 2013-2020	II-44
Gambar 2. 25 Piramida Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2024	II-46
Gambar 2. 26 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sragen 2020-2024.....	II-46
Gambar 2. 27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-51
Gambar 2. 28 Rerata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional dalam Lima Tahun Terakhir (2020-2024).....	II-53
Gambar 2. 29 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-54
Gambar 2. 30 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	II-57
Gambar 2. 31 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-58
Gambar 2. 32 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-58
Gambar 2. 33 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Perkapita Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)	II-59
Gambar 2. 34 Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Sragen dan Wilayah sekitar Tahun 2024.....	II-62
Gambar 2. 35 Penurunan Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2023-2024	II-62
Gambar 2. 36 Jumlah Pengangguran Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2024.....	II-63
Gambar 2. 37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2024.....	II-64
Gambar 2. 38 Perubahan TPAK di Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar Tahun 2024.....	II-64
Gambar 2. 39 TPAK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024.....	II-65
Gambar 2. 40 TPAK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020- 2024.....	II-65
Gambar 2. 41 TPAK Kabupaten Sragen Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	II-66
Gambar 2. 42 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-67
Gambar 2. 43 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2024	II-68
Gambar 2. 44 Perubahan TPT di Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar Tahun 2024.....	II-69
Gambar 2. 45 TPAK Perempuan Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 (%).....	II-73

Gambar 2. 46 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2024.....	II-75
Gambar 2. 47 Perbandingan Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	II-75
Gambar 2. 48 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota yang Lebih Tinggi Dibanding Provinsi dan Nasional, Tahun 2024	II-76
Gambar 2. 49 Indeks P1 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024.....	II-78
Gambar 2. 50 Indeks P1 Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-79
Gambar 2. 51 Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-79
Gambar 2. 52 P2 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-80
Gambar 2. 53 Indeks Gini Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-81
Gambar 2. 54 Perbandingan Gini Ratio Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2024.....	II-82
Gambar 2. 55 Perbandingan Pertumbuhan Gini Ratio Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2021-2024	II-84
Gambar 2. 56 Perbandingan Pertumbuhan Gini Ratio Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2024	II-84
Gambar 2. 57 UHH Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-86
Gambar 2. 58 Prevalensi Stunting Berdasarkan SSGI/SKI Kabupaten Sragen Tahun 2021-2024	II-88
Gambar 2. 59 Prevalensi Stunting Berdasarkan EPPGBM Kabupaten Sragen Tahun 2021-2024.....	II-88
Gambar 2. 60 Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024.....	II-89
Gambar 2. 61 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024.....	II-90
Gambar 2. 62 Proporsi tenaga Kesehatan menurut jenis	II-92
Gambar 2. 63 Jumlah Terduga Tuberkulosis, Semua Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan Jumlah Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2024.....	II-95
Gambar 2. 64 Angka Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap di Kabupaten Sragen Tahun 2024.....	II-96
Gambar 2. 65 Penemuan Penderita Pneumonia pada Balita di Kabupaten Sragen Tahun 2024.....	II-96

Gambar 2. 66 Paket Skrining Pemeriksaan Kesehatan Gratis Tahun 2025.....	II-104
Gambar 2. 67 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 .	II-105
Gambar 2. 68 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-106
Gambar 2. 69 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023.....	II-109
Gambar 2. 70 Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025	II-111
Gambar 2. 71 Perkembangan IPG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-112
Gambar 2. 72 Capaian Predikat KLA Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 ...	II-114
Gambar 2. 73 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 ...	II-115
Gambar 2. 74 PDRB Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) Kabupaten Sragen Tahun 2019-2024.....	II-116
Gambar 2. 75 PDRB Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah).....	II-117
Gambar 2. 76 Persentase Kontribusi PMTB Terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024.....	II-118
Gambar 2. 77 Nilai PMTB Berdasarkan PDRB ADHB (juta tahun) Tahun 2020-2024.....	II-119
Gambar 2. 78 Pertumbuhan PMTB Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2020-2024	II-120
Gambar 2. 79 PDRB Informasi dan Komunikasi Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) Kabupaten Sragen Tahun 2019-2024.....	II-130
Gambar 2. 80 Persentase Jalan Mantap Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-132
Gambar 2. 81 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2024.....	II-134
Gambar 2. 82 Nilai IDM Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-135
Gambar 2. 83 Tingkat Inflasi di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-137
Gambar 2. 84 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kab Sragen Tahun 2014-2023	II-138
Gambar 2. 85 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) ...	II-139
Gambar 2. 86 Tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan.....	II-140
Gambar 2. 87 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-141
Gambar 2. 88 Nilai SAKIP Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024.....	II-142
Gambar 2. 89 Indeks SPBE Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024.....	II-144
Gambar 2. 90 Jumlah Konflik di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024.....	II-145
Gambar 2. 91 Angka Kriminalitas Kabupaten Sragen tahun 2020-2024.....	II-146
Gambar 2. 92 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sragen Tahun 2023-2024.....	II-148

Gambar 2. 93 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)	II-152
Gambar 2. 94 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)	II-155
Gambar 2. 95 Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (%).....	II-157
Gambar 2. 96 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-159
Gambar 2. 97 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-160
Gambar 2. 98 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)	II-165
Gambar 2. 99 Proporsi Komponen PAD Terhadap Terhadap Total PAD (%), Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen).....	II-167
Gambar 2. 100 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)	II-172
Gambar 2. 101 Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)	II-180
Gambar 2. 102 Pertumbuhan Realisasi Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)	II-183
Gambar 2. 103 Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)	II-185
Gambar 2. 104 Pertumbuhan Realisasi Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)	II-187
Gambar 2. 105 Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)	II-189
Gambar 2. 106 Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Terduga, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)	II-191
Gambar 2. 107 Pertumbuhan Realisasi Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)	II-193
Gambar 2. 108 Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Neto dan SILPA, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)	II-197
Gambar 2. 109 Rasio Likuiditas Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024.....	II-203
Gambar 2. 110 Rasio Solvabilitas Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024	II-206
Gambar 2. 111 Rasio Aktivitas Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024.....	II-207
Gambar 2. 112 Rumusan Isu Strategis Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029	II-258
Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029.....	III-8
Gambar 3. 2 Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029.....	III-11

Gambar 3. 3 Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sragen
Tahun 2026-2030 III-24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

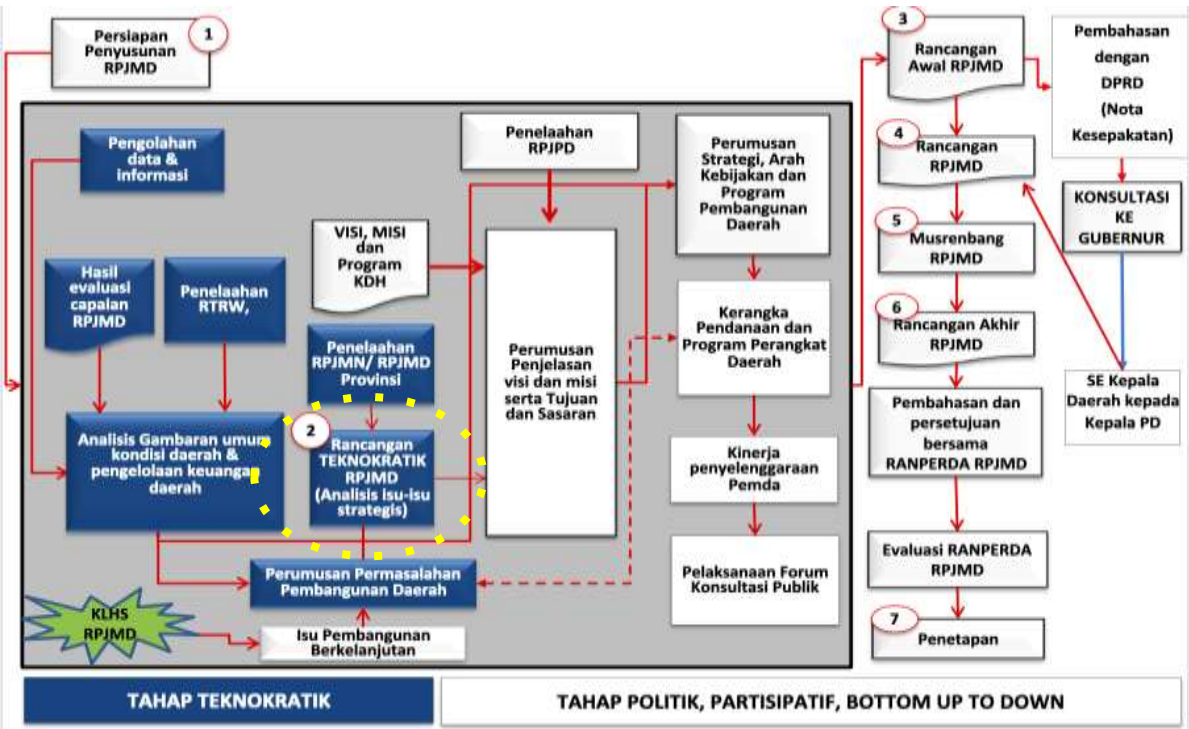
Kabupaten Sragen, sebagaimana daerah lain di Indonesia, akan memasuki periode baru dalam pembangunan daerah seiring dengan terpilihnya Kepala Daerah baru pada Pilkada tahun 2024. Kepala Daerah terpilih nantinya akan mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan visi, misi, dan program yang telah diusung dalam kampanye, yang kemudian akan dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen merupakan langkah krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi. Dalam penyusunannya, Rancangan RPJMD mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen 2025–2045, serta mempertimbangkan evaluasi capaian pembangunan dari periode sebelumnya.

Sebagai dokumen perencanaan yang strategis, RPJMD berisi rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada analisis kondisi daerah, tantangan, serta potensi yang dimiliki Kabupaten Sragen, yang diperoleh melalui pemetaan permasalahan pembangunan dan identifikasi isu-isu strategis. Pendekatan ilmiah digunakan dalam analisis ini, termasuk metode analisis pohon masalah, guna memastikan bahwa perencanaan yang disusun mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Perangkat Daerah, DPRD, akademisi, serta masyarakat, guna memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya bersifat teknokratik, tetapi juga inklusif dan responsif terhadap

aspirasi publik. Tahapan ini merupakan bagian dari mekanisme perencanaan yang transparan dan akuntabel sebelum RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Berikut gambar alur yang menjelaskan tahapan proses penyusunan RPJMD:



Gambar 1. 1 Alur dan Tahapan Proses Penyusunan RPJMD

RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 menegaskan bahwa RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Penguatan Pondasi Sragen Tangguh dengan Fokus Sragen Berdaya Saing." Fokus utama mencakup peningkatan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Tema ini menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Provinsi Jawa Tengah mengusung tema "Penumpu Ketahanan Pangan dan Rantai Nilai Industri Nasional," dengan visi yang tertera dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 yaitu mewujudkan "Jawa Tengah sebagai pusat pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan". Dalam kurun waktu 2025-2045, upaya pembangunan Jawa Tengah difokuskan pada pencapaian kemandirian pangan dengan memastikan akses pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), serta peningkatan produktivitas industri pengolahan berbasis teknologi, riset, inovasi, dan ramah lingkungan. Pembangunan industri akan berbasis pada potensi lokal, penguatan rantai pasok antar-industri, serta didukung oleh infrastruktur

konektivitas dan logistik yang memadai. Meskipun demikian, prioritas pembangunan saat ini tetap berfokus pada pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengurangan pengangguran, dan pengendalian inflasi.

Dalam konteks Kabupaten Sragen, berdasarkan highlight indikasi intervensi pilar transformasi ekonomi pada RPJMN Tahun 2025-2029, pembangunan diarahkan pada peningkatan kemandirian kawasan perdesaan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat guna percepatan pengentasan kemiskinan. Selain itu, harmonisasi dan kolaborasi kewenangan serta pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah akan dioptimalkan guna mempercepat pembangunan daerah afirmasi atau daerah dengan pertumbuhan lambat.

Untuk menjamin sinergi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta menghindari trade-off kebijakan, RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031. Dokumen RTRW menetapkan Kabupaten Sragen sebagai daerah yang maju dan berdaya saing dengan basis pertanian, industri, dan pariwisata. Strategi utama mencakup pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan, peningkatan kapasitas industri berbasis bahan baku lokal, serta pengembangan pariwisata yang selaras dengan pelestarian lingkungan.

Strategi pembangunan Kabupaten Sragen akan difokuskan pada sektor pertanian dan agropolitan yang terfokus di sentra utama penghasil produksi komoditas pertanian, utamanya padi, dan melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai dukungan peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan, industri dan infrastruktur, pariwisata, serta prasarana dan lingkungan.

Di bidang pertanian, upaya peningkatan produksi dan pengolahan hortikultura menjadi prioritas, diikuti dengan pengembangan pusat pengolahan hasil pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan melalui penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Sementara itu, dalam sektor industri, pembangunan akan diarahkan pada pengembangan kawasan industri yang memiliki aksesibilitas tinggi, termasuk pembangunan dry port guna mendukung proyek strategis nasional serta penguatan jaringan infrastruktur kawasan industri.

Sektor pariwisata juga menjadi salah satu fokus utama, dengan mengembangkan wisata buatan dan wisata berbasis lingkungan, serta

peningkatan fasilitas pendukung bagi Kawasan Cagar Budaya Sangiran. Selain itu, pada aspek prasarana dan lingkungan, perhatian diberikan pada peningkatan kualitas jaringan jalan dan sistem telekomunikasi, penguatan sistem sanitasi dan pengelolaan sumber daya air, serta penetapan kawasan lindung sebagai bagian dari mitigasi bencana.

Sebagai bagian dari evaluasi RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu diterapkan, antara lain penguatan sinkronisasi antar-dokumen perencanaan, optimalisasi monitoring serta evaluasi kebijakan, penyusunan program dan indikator yang selaras dengan visi dan misi daerah, serta peningkatan efisiensi pelaksanaan program pembangunan. Indikator utama yang menjadi acuan mencakup sektor pendidikan dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sektor kesehatan dengan peningkatan usia harapan hidup serta penurunan angka stunting, sektor tata kelola pemerintahan melalui indeks reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, sektor ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita, serta sektor sosial yang mencakup pengurangan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, peningkatan indeks infrastruktur dan indeks kualitas lingkungan hidup juga menjadi bagian dari evaluasi pembangunan.

Dalam sektor pendidikan, kebijakan yang akan dilaksanakan mencakup peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, penghapusan angka putus sekolah, serta inisiasi pendidikan muatan lokal bertema "Pertanian dan Keberlanjutan." Sementara di bidang kesehatan, penguatan edukasi dan monitoring kesehatan keluarga serta penyediaan tenaga kesehatan yang sesuai dengan permasalahan utama kesehatan masyarakat akan menjadi fokus utama. Adapun dalam tata kelola pemerintahan, langkah yang akan diambil meliputi penyelarasan perencanaan pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Berdasarkan kerangka tersebut, RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 tidak hanya bertujuan mencapai target pembangunan jangka menengah, tetapi juga menjadi landasan kuat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Seluruh arah kebijakan, strategi, dan program yang dirumuskan mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memperhatikan keadilan antargenerasi. Hal ini sejalan

dengan komitmen global dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) yang telah diadopsi Indonesia, dan secara substansial diperkuat dalam RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dokumen RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan yang bersifat administratif dan teknokratik, tetapi benar-benar mampu mendorong transformasi menuju Sragen yang adaptif terhadap mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Sragen diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, serta mampu menjawab berbagai tantangan dan peluang dalam lima tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025–2029 ini memiliki dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

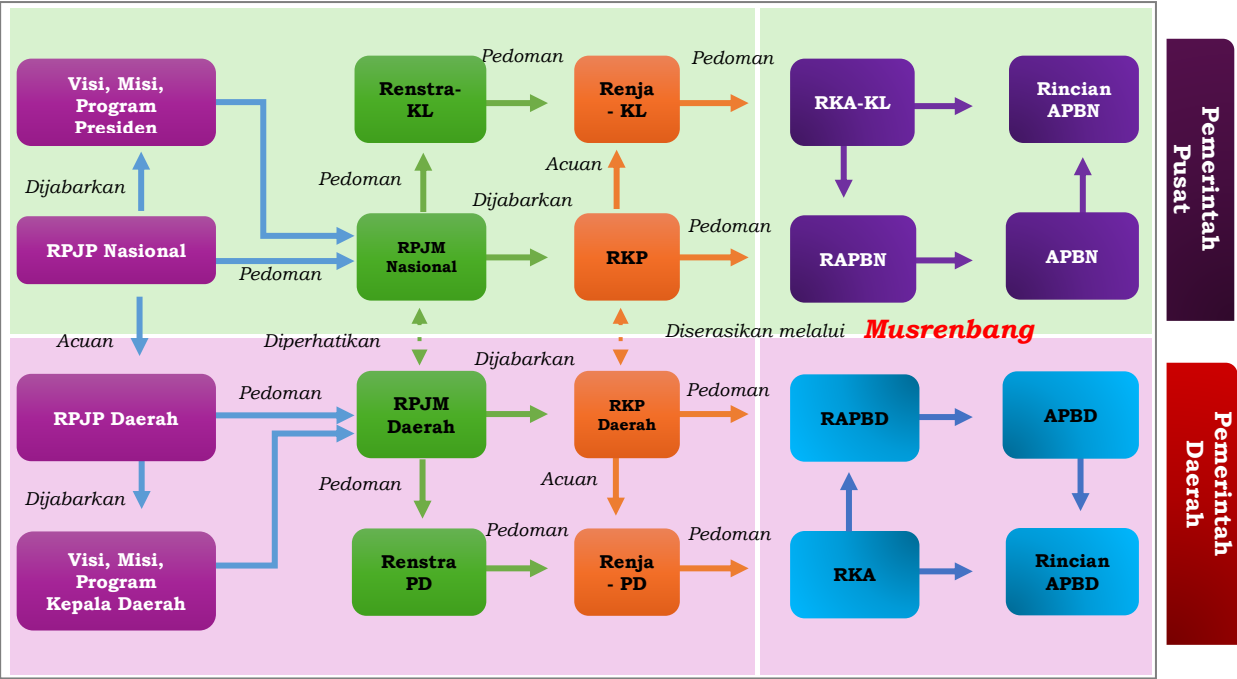
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
12. Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 6).

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan pedoman yang jelas mengenai keterpaduan antar dokumen perencanaan. Dalam regulasi tersebut, sistem perencanaan pembangunan nasional didefinisikan sebagai suatu mekanisme terpadu dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang melibatkan unsur penyelenggara negara serta partisipasi masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Regulasi ini menekankan pentingnya keterkaitan antara berbagai periode perencanaan serta sinkronisasi antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, sistem perencanaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Urgensi keterpaduan dalam perencanaan ini semakin jelas jika dikaitkan dengan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, memastikan integrasi dan sinergi antara daerah, sektor, ruang, serta tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Sistem ini juga bertujuan untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta mendorong pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan.



Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Dokumen RPJMD menjadi pijakan awal bagi sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Dokumen ini oleh karena itu telah mulai menelaah keterkaitan antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sragen, RTRW, KLHS serta Renstra, RKPD dan Renja. Telaah ini akan diulas singkat di Bab 1 dan kemudian akan diperdalam di Bab 2, terutama keterkaitannya dengan RTRW dan KLHS.

1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sragen 2025-2045

RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 telah merumuskan visi pembangunan jangka panjang, yaitu Kabupaten Sragen Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan. Visi pembangunan jangka panjang dicapai melalui lima misi, yaitu Meningkatkan Kualitas SDM yang Berbudaya dan Berkarakter, Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh, Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel, dan Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan dinamis berbasis teknologi informasi; mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; meningkatkan infrastruktur publik yang inklusif, merata dan berkualitas; meningkatkan kemandirian ekonomi yang berdaya saing berbasis potensi unggulan daerah; mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan ketahanan sosial budaya

masyarakat. Visi Kabupaten Sragen mendukung pencapaian Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.



Gambar 1. 3 Keterkaitan Antara Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Kabupaten Sragen

Dokumen RPJMD secara lebih detail akan menelaah berbagai muatan dari RPJPD Kabupaten Sragen. Muatan RPJPD yang ditelaah di dalam Rancangan RPJMD, yaitu isu-isu strategis pembangunan jangka panjang, rumusan visi dan misi, arah kebijakan tahap 1 RPJPD, arah kebijakan transformasi, sasaran pokok dan Indikator Utama Pembangunan (IUP). Telaah ini diharapkan memberikan arah yang lebih jelas bagi penyusunan RPJMD berikutnya.

1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN 2025-2029

Penyusunan dokumen RPJMD Sragen harus mempedomani dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Waktu penyusunan yang sama antar kedua dokumen tersebut merupakan momentum bagi bangunan keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah. Terdapat beberapa aspek di dalam RPJMN yang ditelaah dan diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD, antara lain permasalahan dan isu-isu strategis nasional dan global, arah kebijakan teknokratik, dan arah pembangunan kewilayahan meliputi :

- Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar:
 - Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata di KSPN Sangiran meliputi revitalisasi Museum dan Situs Purbakala Sangiran, Tawangmangu, Cetho-Sukuh;

- Preservasi layanan KA commuter line Surakarta Raya (Surakarta-Sukoharjo-Karanganyar-Sragen)
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Begawan Solo Jawa Tengah salah satunya yaitu Pembangunan PLTS terapung di Waduk Kedung Ombo yang rencana memiliki kapasitas 60 – 100 Mega watt.
- Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Pegunungan Kendeng.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Kabupaten Sragen merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dokumen RPJPD Kabupaten Sragen berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045. Dengan demikian akan terwujud keterpaduan dan integrasi perencanaan pembangunan di daerah. Secara sinergis daerah turut serta menyelesaikan isu strategis dalam pembangunan Jawa Tengah, dimana salah satu arah kebijakan pengembangan wilayah Subosukowonosraten berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 khususnya di Kabupaten Sragen sebagai berikut.

- Potensi Perekonomian dengan Pengembangan Daerah Wisata KSPN Sangiran dan sekitarnya.
- Potensi Infrastruktur dan kewilayahan dengan adanya rencana Pembangunan dry port di Kecamatan Masaran.

1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan RTRW

Pembangunan jangka menengah daerah wajib memperhatikan dokumen rencana tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, terutama tentang struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis dan indikasi program.

Pengembangan wilayah berdasarkan RTRW diarahkan untuk mendukung integrasi potensi dan peran strategis Kabupaten Sragen dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Kabupaten Sragen memiliki

kedudukan strategis sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029 (Lampiran IV), yaitu :

- Sebagai bagian dari kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Solo–Sragen–Karanganyar sesuai dengan RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, dimana keberadaan KSPN sangiran merupakan magnet utama bagi strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Sragen.
- serta sebagai bagian dari kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo sesuai dengan RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, dimana keberadaan komoditas pertanian sangat didukung dan dipertahankan.

Selain itu, Kabupaten Sragen juga memiliki posisi penting dalam Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten, sebagaimana selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, yang menempatkan Sragen sebagai simpul penguatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi kawasan, serta pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar antarwilayah.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan KLHS

Penyusunan Dokumen RPJMD disertai dengan penyusunan KLHS dalam rangka memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Isu-isu strategis yang teridentifikasi di dalam KLHS akan diintegrasikan dan dielaborasikan dengan permasalahan pembangunan daerah, sehingga memunculkan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Sragen lima tahun ke depan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan perencanaan pembangunan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam periode 2025 - 2029.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD adalah sebagai berikut.

1. Tersedianya dokumen yang menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program.
2. Tersedianya dokumen yang menjadi landasan bagi pelaksanaan substansi RPJMD secara utuh, yaitu tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program.
3. Tersedianya dokumen yang menjadi landasan dalam kerangka pendanaan dan arah kebijakan keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.
4. Tersedianya dokumen yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Sragen 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Bagian ini juga memuat gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menjelaskan terkait visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Bagian ini memuat upaya yang harus dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk strategi dan arah kebijakan. Bab ini juga memetakan tahapan pembangunan yang dilakukan di masing-masing tahun perencanaan serta program prioritas pembangunan daerah

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menjelaskan terkait program Perangkat Daerah yang meliputi program, indikator program, target, dan pagu indikatif program. Bagian ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang terdiri dari Indikator

Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci di setiap urusan pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II

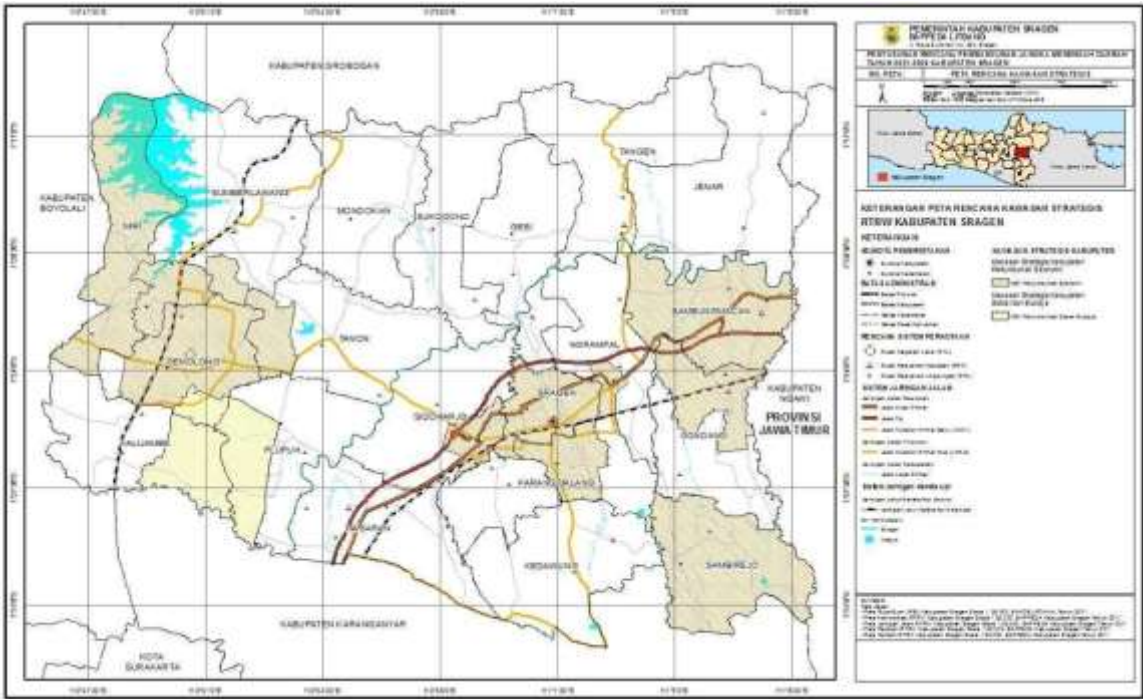
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab ini menguraikan gambaran umum terkait kondisi Kabupaten Sragen dari aspek geografi dan demografi. Kedua aspek tersebut dijelaskan secara rinci dan sistematis secara komprehensif. Gambaran aspek geografi dan demografi di Kabupaten Sragen dijabarkan sebagai berikut ini.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Sragen memiliki peran strategis sebagai wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sragen terletak pada 110°45' – 111°10' Bujur Timur dan 7°15' – 7°30' Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sragen merupakan kawasan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 109 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kabupaten Sragen mempunyai wilayah geografis yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di sebelah utara; Kabupaten Karanganyar di sebelah selatan; Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar di sebelah barat dan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Wilayah Kabupaten Sragen memiliki posisi strategis, karena menjadi pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur dan menjadi jalur transportasi utama antara Solo dan Surabaya. Kabupaten Sragen merupakan wilayah pengembangan strategis bagi Provinsi Jawa Tengah dan menjadi titik simpul transportasi regional serta merupakan wilayah bangkitan pergerakan.



Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Sragen

Sumber: RTRW Kabupaten Sragen tahun 2011-2031

Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah sebesar 994,57 km². Secara administrasi, Kabupaten Sragen terbagi menjadi 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan (196 desa, 12 kelurahan, dan 5.542 RT). Kecamatan Sumberlawang merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sragen yaitu sebesar 79,43 km² dan Kecamatan Sragen menjadi wilayah terkecil dengan luas 27,64 km². Berikut ini merupakan data luas wilayah Kabupaten Sragen di masing-masing kecamatan.

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan	Luas Wilayah	
			Km ²	Persentase terhadap Luas Kabupaten Sragen
1	Kalijambe	14	48,47	4,87
2	Plupuh	16	50,41	5,07
3	Masaran	13	46,84	4,71
4	Kedawung	10	53,06	5,33
5	Sambirejo	9	45,82	4,61
6	Gondang	9	46,83	4,71
7	Sambungmacan	9	43,81	4,40
8	Ngrampal	8	39,84	4,01
9	Karangmalang	10	46,01	4,63
10	Sragen	8	27,64	2,78
11	Sidoharjo	12	49,03	4,93
12	Tanon	16	52,69	5,30
13	Gemolong	14	39,91	4,01
14	Miri	10	56,86	5,72
15	Sumberlawang	11	79,43	7,99
16	Mondokan	9	50,73	5,10
17	Sukodono	9	47,48	4,77
18	Gesi	7	40,81	4,10

No	Kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan	Luas Wilayah	
			Km ²	Persentase terhadap Luas Kabupaten Sragen
19	Tangen	7	56,92	5,72
20	Jenar	7	71,98	7,24
Jumlah		208	994,57	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.2.1 Topografi

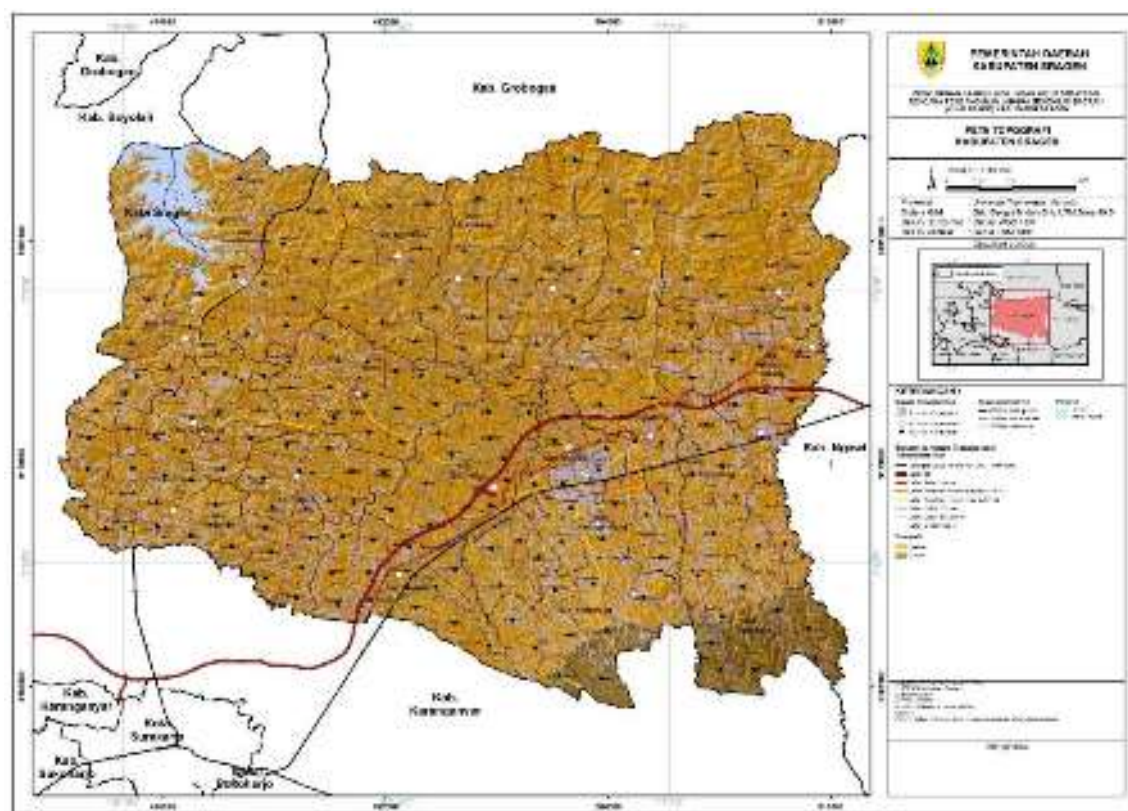
Kabupaten Sragen memiliki topografi yang terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu: 1) Daerah dataran rendah, berada pada ketinggian maksimal 93 mdpl. dengan kemiringan lereng antara 0-8%, meliputi 7 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan: Masaran, Karangmalang, Sidoharjo, Sragen, Ngrampal, Gondang dan Sambungmacan di bagian tengah; 2) Daerah perbukitan, berada pada ketinggian 97-128 mdpl. dengan kemiringan lereng 8-15% meliputi 11 kecamatan yaitu Kecamatan: Kalijambe, Plupuh, Gemolong, Miri, Tanon, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen dan Jenar; 3) Daerah kaki Gunung Lawu pada ketinggian 116-190 mdpl dengan rata-rata kelerengan >15%, meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kedawung dan Sambirejo.

Tabel 2. 2 Tinggi Wilayah dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota (Km)
1	Kalijambe	123	31,4
2	Plupuh	141	18,8
3	Masaran	93	11,1
4	Kedawung	116	7,7
5	Sambirejo	190	12,4
6	Gondang	93	13,8
7	Sambungmacan	85	11,1
8	Ngrampal	84	4,4
9	Karangmalang	86	2,7
10	Sragen	86	1,7
11	Sidoarjo	86	4,3
12	Tanon	97	14,3
13	Gemolong	128	25,9
14	Miri	115	29,3
15	Sumberlawang	126	23,7
16	Mondokan	110	20,3
17	Sukodono	86	16,8
18	Gesi	126	13,7
19	Tangen	96	13,7
20	Jenar	118	17,5
Rata-rata		109	-

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

Ketinggian wilayah Kabupaten Sragen tersebut dapat dilihat secara lebih detail secara visual pada peta berikut ini.



Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Sragen

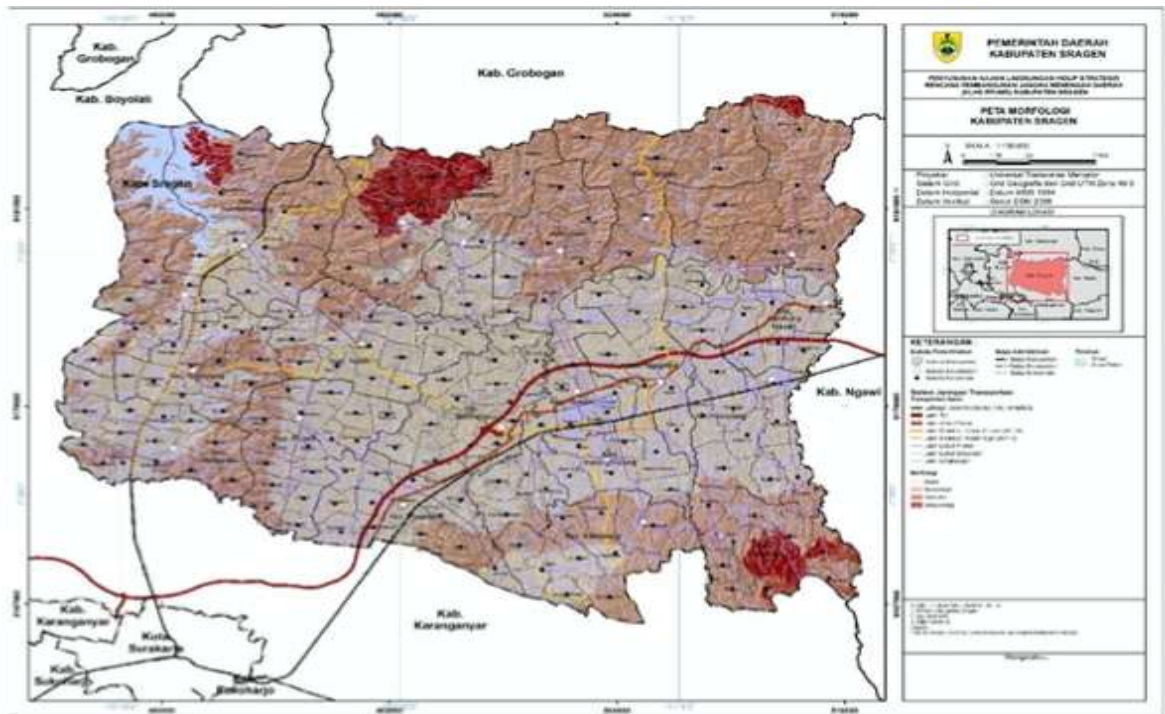
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2025-2029

Berdasarkan satuan morfologi dan karakteristik daerah, Kabupaten Sragen terbagi menjadi tiga bentuk lahan, antara lain:

- a. Bentuk Lahan Lereng Gunung Api Lawu terletak di bagian tenggara Kabupaten Sragen atau berada di lereng bagian barat laut Gunung Api Lawu, berada di Kecamatan Sambirejo dengan kemiringan lereng > 40% pada ketinggian >225 mdpl. Terbentuk dari proses vulkanisme dan tektonisme yang diawali dengan penerobosan magma dari hasil subduksi antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia sehingga membentuk gunung api strato. Secara umum, satuan batuan pada bentuk lahan lereng Gunung Api Lawu tersusun atas Batuan Vulkanik Tua Kuartar dan Vulkanik Pliosen.
- b. Bentuk Lahan Dataran Aluvial terletak di bagian tengah Kabupaten Sragen, yang dialiri oleh Sungai Bengawan Solo. Sungai ini mengalir dari bagian timur ke barat. Daerah dataran alluvial (*alluvial plain*) merupakan dataran yang terbentuk dengan proses pengendapan, baik di daerah muara maupun

daerah pedalaman. Bentuk lahan ini menempati sebagian besar wilayah di Kabupaten Sragen dengan kemiringan lereng 0-15% pada ketinggian < 75 – 100 mdpl. Terbentuk melalui proses erosi, transportasi, dan sedimentasi yang di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Material di daerah ini berupa endapan aluvium dari aktivitas sungai tersebut. Karakteristik daerah ini yaitu banyak digunakan masyarakat sebagai permukiman dan lahan pertanian. Dataran aluvial berada di Kecamatan Gondang, Kecamatan Karangmalang, Kecamatan Sambungmacan, Kecamatan Ngrampal, Kecamatan Sragen, Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Masaran, Kecamatan Plupuh.

- c. Bentuk Lahan Perbukitan Struktural terletak di bagian utara Kabupaten Sragen pada yang menempati daerah dengan ketinggian 100-225 mdpl pada kemiringan lereng 15-40%. Bentuk Lahan ini terbentuk dari proses pengangkatan, perlipatan, dan patahan oleh tenaga endogen dan eksogen. Bentuk lahan perbukitan struktural memiliki bentuk lahan dataran tinggi lembah antiklinal, lereng lembah antiklinal, perbukitan patahan, dan dome. Material penyusun daerah ini berupa sedimen pliosen dan sedimen miosen. Proses pelapukan, erosi, dan sedimentasi masih terus berlangsung dengan dipengaruhi oleh kondisi iklim. Bentuk lahan ini terletak di bagian utara dan barat Kabupaten Sragen berada pada ketinggian 100- 225 mdpl pada kemiringan lereng 15-40 %, meliputi Kawasan Situs Sangiran yang masuk wilayah Kecamatan Plupuh, Kecamatan Gesi, Kecamatan Jenar, Kecamatan Tangen, dan Kecamatan Mondokan.



Gambar 2. 3 Peta Morfologi Kabupaten Sragen

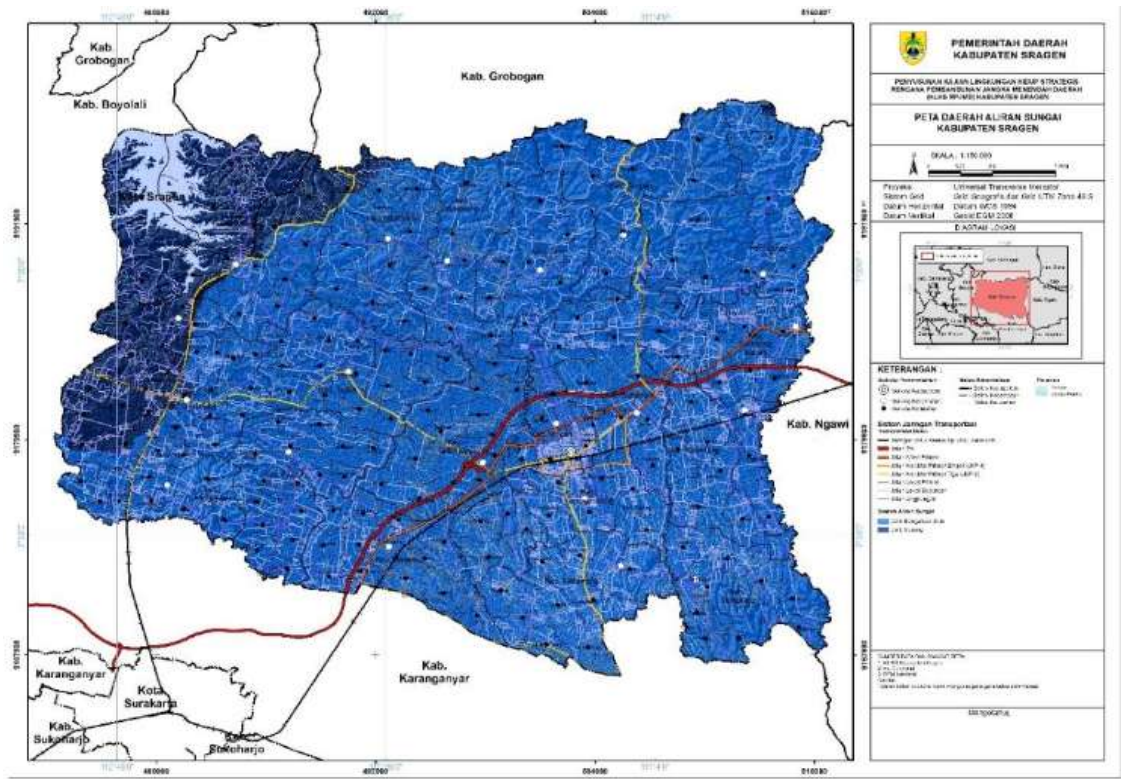
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2025-2029

2.1.2.2 Hidrologi

Keadaan hidrologi di Kabupaten Sragen dibagi menjadi 5 sub poin pembahasan yaitu sungai, mata air, waduk/embung, air bawah tanah, dan daya dukung & daya tampung air.

1. Sungai

Kabupaten Sragen dilewati oleh sungai-sungai yang mengalir dalam kesatuan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dan DAS Serang. Sungai yang mengalir dalam kesatuan DAS Bengawan Solo terdiri atas Sungai Cemoro, Sungai Grompol, Sungai Ngrejeng, Sungai Sambirejo, Sungai Dukuh, Sungai Mungkung, Sungai Sragen/Garuda, Sungai Buduran, Sungai Randu, Sungai Kedungdowo, Sungai Sudo, Sungai Kenatan, Sungai Keten, Sungai Jatisangit, Sungai Sawur, Sungai Mundu, dan Sungai Terso. Sementara itu, Sungai Serang yang merupakan sumber air genangan Waduk Kedung Ombo merupakan satu-satunya sungai yang termasuk kesatuan DAS Serang.



Gambar 2. 4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sragen

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sragen 2025-2029

2. Mata Air

Kabupaten Sragen memiliki mata air yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat sebagai sumber pemenuhan air bersih dan irigasi. Terdapat 31 mata air yang tersebar dalam 12 Kecamatan meliputi Sambirejo, Gemolong, Gondang, Kedawung, Tanon, Miri, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi, Jenar, dan Tangen. Kapasitas debit mata air terbesar yaitu mata air Gadon Jati di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang sebesar 72 liter/detik. Sementara itu, beberapa mata air memiliki kapasitas 0 liter/detik karena berada di kondisi rusak ringan.

3. Waduk/Embung

Waduk merupakan tempat pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air saat terjadi kelebihan air/ musim penghujan sehingga air itu dapat dimanfaatkan pada musim kering. Sumber air waduk terutama berasal dari aliran permukaan ditambah dengan air hujan langsung. Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2024 memiliki tujuh waduk yang tersebar di wilayah Kabupaten Sragen dengan total luas sebesar 131 Ha dan kapasitas 4.482.125 m³.

Tabel 2. 3 Nama Waduk, Luas, Kapasitas, dan Kondisi Air di Kabupaten Sragen

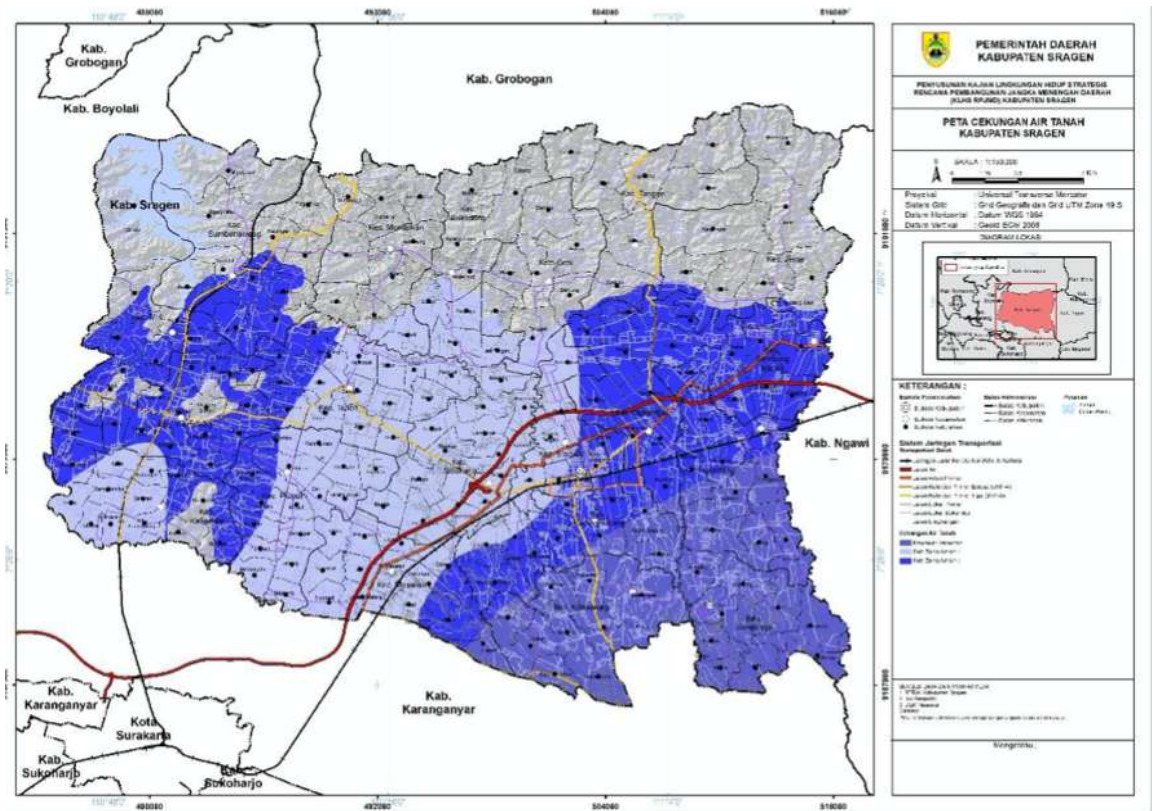
No	Nama Waduk	Kecamatan	Desa	Luas Waduk Ha	Kapasitas m³	Area Teraliri (Ha)	Kondisi Air	
							M³	%
1	Gebyar	Sambirejo	Jambeyan	10,00	701.295	1.446	701.295,00	100,00
2	Blimbing	Sambirejo	Blimbing	2,00	30.000	284	30.000,00	100,00
3	Kembangan	Karangmalang	Mojorejo	13,40	500.000	358	500.000,00	100,00
4	Botok	Kedawung	Mojodoyong	13,00	513.540	2.488	513.540,00	100,00
5	Brambang	Kedawung	Wonokerso	4,27	103.415	398	103.415,00	100,00
6	Gembong	Karangmalang	Saradan	3,34	22.875	250	22.875,00	100,00
7	Ketro	Tanon	Ketro	85,00	2.611.000	892	2.611.000,00	100,00
	Jumlah			131	4.482.125	6.116		

Sumber: DPUPR Bidang SDA Kabupaten Sragen, 2025

Dalam mendukung penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan lahan pertanian terutama pada saat musim kering. Kabupaten Sragen juga memanfaatkan air dari embung yang sudah terbangun. Ada sekitar 49 embung di Kabupaten Sragen dengan luas total 216, 45 Ha, kapasitas air tertampung 5.623.652 M3, dengan luas area yang dapat dilayani sebesar 2.034 Hektar.

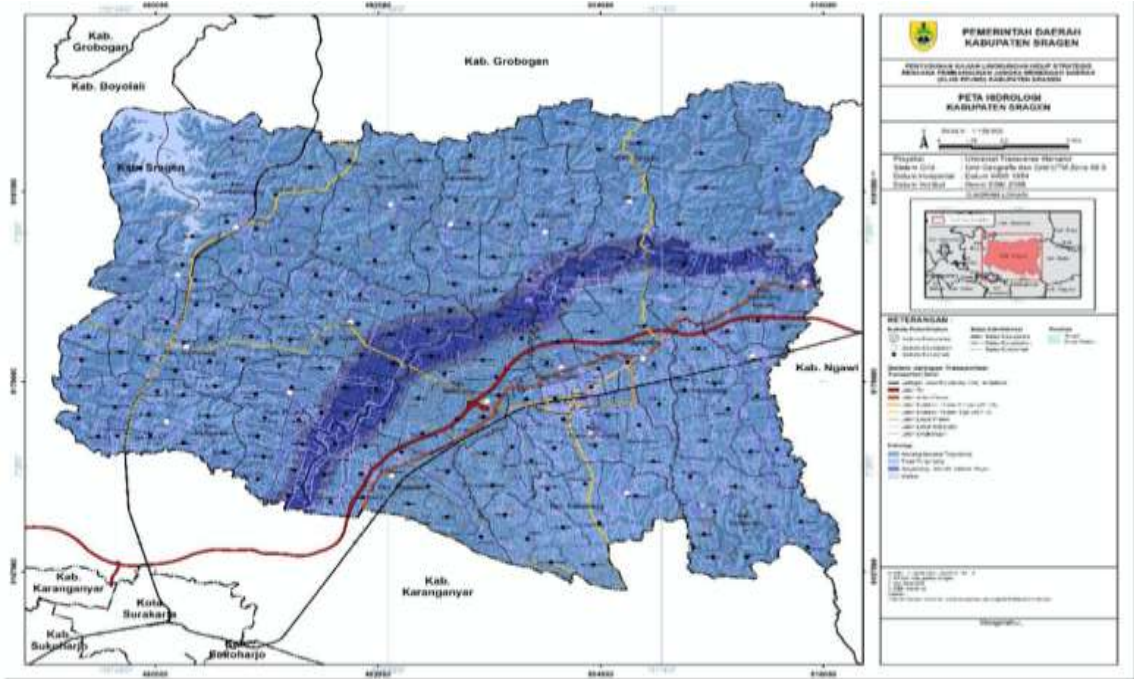
4. Air Bawah Tanah

Kabupaten Sragen memiliki dua sistem geohidrologi secara yaitu Non-CAT dan CAT Karanganyar-Boyolali. Non-CAT pada kawasan ini menempati bagian utara dengan morfologi perbukitan formasi Kerek dan Kalibeng dan litologi yang mendominasi yaitu batu gamping. CAT Karanganyar-Boyolali menempati bagian tengah dan selatan dengan luas total sebesar 63.069,528 hektare. Persebaran daerah CAT meliputi Kecamatan Gemolong, Gesi, Gondang, Jenar, Kalijambe, Karangmalang, Kedawung, Masaran, Miri, Mondokan, Ngrampal, Plupuh, Sambirejo, Sambungmacan, Sidoharjo, Sragen, Sukodono, Sumberlawang, Tangen, dan Tanon. Daerah Non CAT dapat menjadi daerah imbuhan air bawah tanah karena terletak di daerah perbukitan yang memiliki elevasi lebih tinggi dibanding daerah lainnya.



Gambar 2. 5 Peta Cadangan Air Tanah Kabupaten Sragen
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2025-2029

Sistem hidrogeologi di kawasan CAT Karanganyar-Boyolali, khususnya Kabupaten Sragen terbagi menjadi tiga yaitu akuifer bercelah/sarang dengan produktivitas kecil dan daerah air bawah tanah yang langka; akuifer dengan akuifer melalui ruang antar butir; dan akuifer melalui celah dan ruang antar butir. Akuifer bercelah/sarang dengan produktivitas kecil dan air bawah tanah langka tersebar di Kecamatan Gemolong, Gesi, Jenar, Kalijambe, Miri, Mondokan, Ngrampal, Plupuh, Sambungmacan, Sragen, Sukodono, Sumberlawang, Tangen, dan Tanon dengan luas keseluruhan sebesar 44.279,104 hektare atau sebesar 44,447 % dari luas hidrogeologi sebesar 99.376,664 hektare. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir tersebar di Kecamatan Gemolong, Gesi, Gondang, Jenar, Kalijambe, Karangmalang, Masaran, Miri, Mondokan, Ngrampal, Plupuh, Sambungmacan, Sidoharjo, Sragen, Sukodono, Sumberlawang, Tangen, dan Tanon dengan luas sebesar 39.040,988 hektare atau 39,286 % dari luas totalnya. Sedangkan, akuifer melalui celah dan ruang antar butir tersebar di Kecamatan Gondang, Jenar, Karangmalang, Kedawung, Masaran, Ngrampal, Sambirejo, dan Sambungmacan dengan luas 16.056,572 hektare atau 16,157 % dari luas keseluruhan.



Gambar 2. 6 Peta Hidrologi Kabupaten Sragen

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sragen 2025-2029

2.1.2.3 Klimatologi

Kabupaten Sragen memiliki iklim tropis, yang terdiri dari dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sragen memiliki curah hujan yang cenderung rendah hingga menengah. Berikut ini merupakan curah hujan secara rinci berdasarkan masing-masing kecamatan di Kabupaten Sragen.

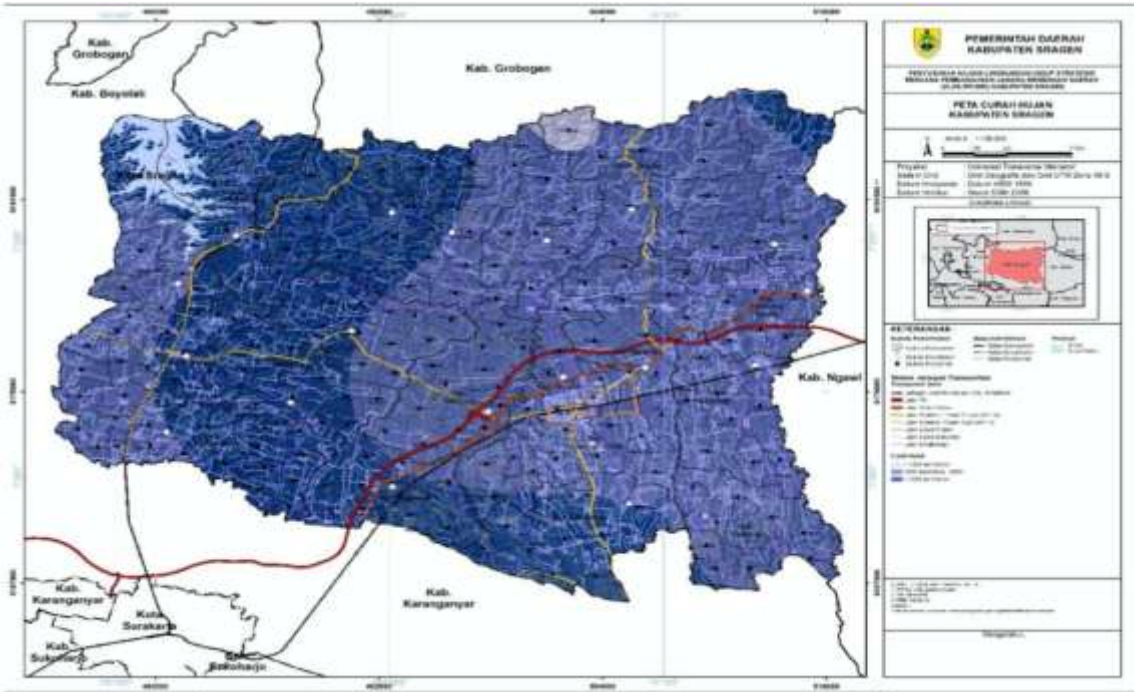
Tabel 2. 4 Jumlah dan Rata Rata Curah Hujan Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Stasiun pengamat	Jumlah (mm/hari)		Rata Rata (mm/hari)	
		Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
Kalijambe	Kalimacan	2.524	113	210	9
Plupuh	Bapang	3.543	134	295	25
Masaran	Masaran	2.488	87	207	7
	Kedung Gatot	2.446	112	203	9
	Sidodadi	2.405	116	200	10
	Gebang	3.581	121	298	10
Kedawung	Kedawung	2.438	138	203	12
	Batu Jamus	-	-	-	-
	Purworejo	2.210	120	184	10
Sambirejo	Sambirejo	2.726	136	227	11
	Gebyar	2.977	107	248	9
Gondang	Kedung Banteng	2.317	96	193	8
Sambung Macan	Kebonromo	3.641	134	303	11
Ngrampal	Kenatan	4.330	137	361	11
	Ngarum	-	-	-	-
Karangmalang	Gembong	2.507	132	209	11
Sragen	Mojo	2.600	141	217	12
Sidoharjo	Singopadu	-	-	-	-

Kecamatan	Stasiun pengamat	Jumlah (mm/hari)		Rata Rata (mm/hari)	
		Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
Tanon	Ketro	3.057	135	255	11
Gemolong	Dadapan	3.894	112	325	9
Miri	Kedung kancil	3.044	126	254	11
Sumberlawang	-	-	-	-	-
Mondokan	-	-	-	-	-
Sukodono	-	-	-	-	-
Gesi	-	-	-	-	-
Tangen	Tangen	2.482	155	207	13
Jenar	-	-	-	-	-
Rata-rata	-	2.906	124	231	11

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

Curah hujan wilayah Kabupaten Sragen tersebut dapat dilihat secara lebih detail secara visual pada peta berikut ini.



Gambar 2. 7 Peta Curah Hujan Kabupaten Sragen

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sragen 2025-2029

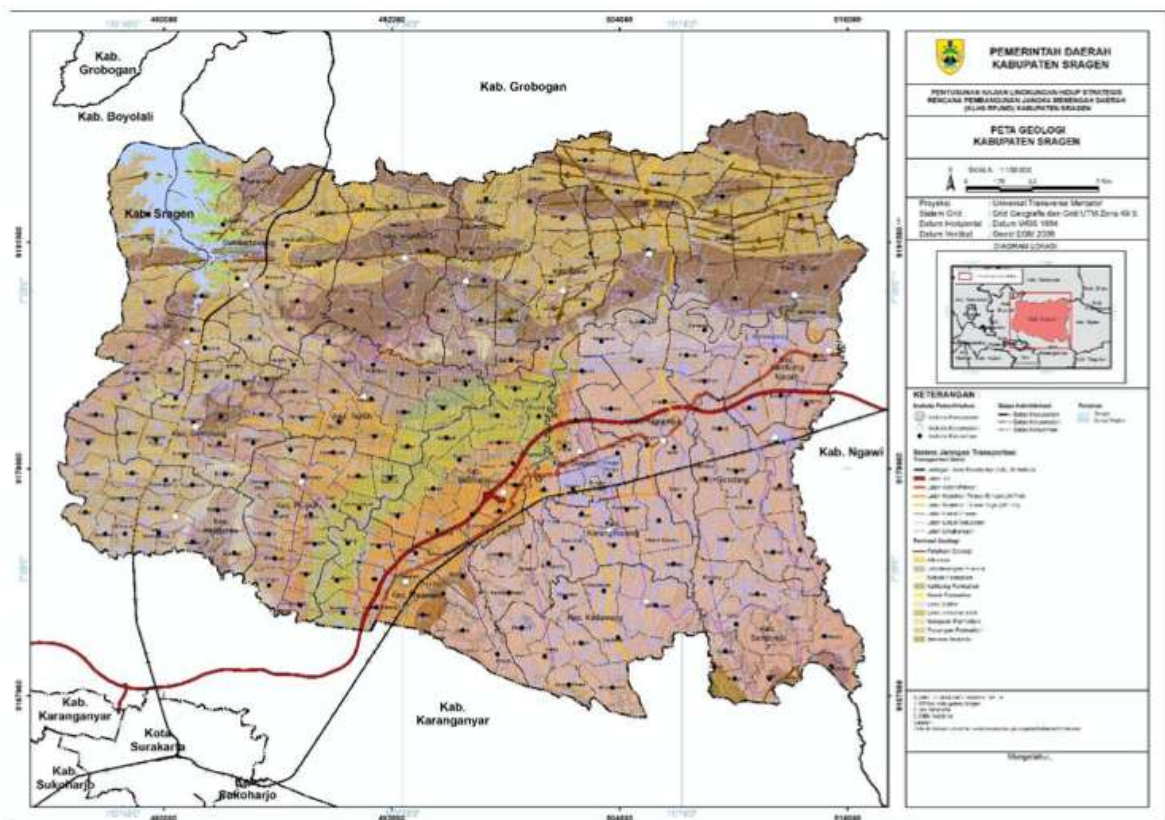
Dampak perubahan iklim telah berpengaruh terhadap perubahan pola curah hujan dan tidak terprediksinya musim. Hal ini berdampak pada penurunan cadangan air tanah dan menyebabkan kekeringan.

2.1.2.4 Geologi

Secara umum, struktur geologi di Kabupaten Sragen didominasi oleh deformasi Zona Kendeng, dan sebagian kecil struktur Gunung Lawu. Deformasi pertama pada Zona Kendeng terjadi pada akhir Pliosen (Plio–Pleistosen), deformasi merupakan manifestasi dari zona konvergen pada konsep tektonik lempeng yang diakibatkan oleh gaya kompresi

berarah relatif utara-selatan dengan tipe formasi berupa *ductile* yang pada fase terakhirnya berubah menjadi deformasi *brittle* berupa pergeseran blok-blok dasar cekungan Zona Kendeng.

Kondisi alam di Kabupaten Sragen mempunyai relief yang beraneka ragam, ada daerah pegunungan kapur yang membentang dari timur ke barat terletak di sebelah utara Bengawan Solo dan dataran rendah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen, dengan jenis tanah: *Gromusol*, *Alluvial Regosol*, *Latosol* dan *Mediteran*. Sragen berada di lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir ke arah timur. Sebelah utara berupa perbukitan, bagian dari sistem Pegunungan Kendeng. Sedangkan di selatan berupa pegunungan, lereng dari Gunung Lawu. Struktur geologi yang tidak dominan di Kabupaten Sragen terletak pada lereng Gunung Lawu, sebagian besar ditemukan di Kecamatan Sambirejo. Struktur yang berkembang di daerah ini adalah sesar turun, hal ini mutlak berada di kawasan lereng gunung, mulai dari fasies sentral gunung hingga *fasies proksimal*.



Gambar 2. 8 Peta Geologi Kabupaten Sragen

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2025-2029

2.1.2.5 Penggunaan Lahan

1. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan jenis pengembangan modern tanaman buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Berdasarkan data produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Sragen tahun 2024, bahwa cabai besar merupakan komoditas utama tanaman sayuran di Kabupaten Sragen dengan produksi sebanyak 27,496,70 kuintal, turun dari 30.970 kuintal pada tahun 2023. Buah semangka menjadi jenis tanaman buah-buahan yang menjadi komoditas utama dengan produksi sebanyak 17.724 kuintal, melonjak naik dari 6.097 kuintal pada tahun 2023.

Tabel 2. 5 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Sragen Tahun 2024

Sayuran		Buah-Buahan	
Jenis	Jumlah Produksi	Jenis	Jumlah Produksi
Cabai Besar	27.496,70 kuintal	Melon	5.211 kuintal
Bawang Merah	23.390,30 kuintal	Semangka	17.724 kuintal
Ketimun	115 kuintal		

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

2. Tanaman Pangan

Tanaman Perkebunan merupakan jenis tanaman yang dapat menunjang pangan. Tanaman perkebunan adalah tanaman yang ditanam secara khusus untuk usaha perkebunan, baik tanaman semusim maupun tahunan. Tanaman perkebunan biasanya ditanam dalam lahan yang cukup luas dan memiliki waktu penanaman yang relatif lama. Kabupaten Sragen memiliki jenis tanaman perkebunan utama berupa tebu. Pada tahun 2024, luas areal tanaman tebu di Kabupaten Sragen adalah 3.047,72 ha dengan produksi tebu sebanyak 253.551,3 ton dan tingkat produktivitas sebesar 83,19 ton/hektar. Wilayah Kecamatan Jenar merupakan wilayah dengan areal tanaman tebu terluas sebesar 2.835,78 ha dan wilayah Kecamatan Sragen menjadi wilayah yang tidak mempunyai areal tanaman tebu. Produksi tebu tertinggi berada di wilayah Kecamatan Jenar sebesar 13.168,53 ton dan wilayah Kecamatan Sidoharjo menjadi wilayah dengan produksi tebu terendah yaitu sebesar 28,56 ton. Berikut ini merupakan data detail luas tanaman tebu, produksi tebu, dan produktivitas di masing-masing wilayah kecamatan Kabupaten Sragen.

Tabel 2. 6 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Kalijambe	5.229,20	34.714	6,64
2	Plupuh	7.478,30	49.586	6,63
3	Masaran	8.232,10	54.809	6,66
4	Kedawung	6.277,00	41.516	6,61

No	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
5	Sambirejo	3.709,20	24.332	6,56
6	Gondang	7.566,70	50.736	6,71
7	Sambungmacan	6.634,80	44.276	6,67
8	Ngrampal	6.808,60	45.277	6,65
9	Karangmalang	7.317,50	49.159	6,72
10	Sragen	4.156,90	27.935	6,72
11	Sidoarjo	9.634,70	65.910	6,84
12	Tanon	9.116,40	60.953	6,69
13	Gemolong	5.254,30	33.343	6,35
14	Miri	3.258,80	20.515	6,3
15	Sumberlawang	3.800,90	23.672	6,23
16	Mondokan	2.441,90	15.228	6,24
17	Sukodono	4.205,50	26.233	6,24
18	Gesi	1.782,80	10.906	6,12
19	Tangan	1.772,80	10.842	6,12
20	Jenar	1.705,40	10.432	6,12
Kabupaten Sragen		106.384	700.374	6,58

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

3. Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan merupakan jenis tanaman yang dapat menunjang pangan. Tanaman perkebunan adalah tanaman yang ditanam secara khusus untuk usaha perkebunan, baik tanaman semusim maupun tahunan. Tanaman perkebunan biasanya ditanam dalam lahan yang cukup luas dan memiliki waktu penanaman yang relatif lama. Kabupaten Sragen memiliki jenis tanaman perkebunan utama berupa tebu. Pada tahun 2024, luas areal tanaman tebu di Kabupaten Sragen adalah 5.727,22 ha dengan produksi tebu sebanyak 24.168,10 ton dan tingkat produktivitas sebesar 4,20 ton/hektar. Wilayah Kecamatan Jenar merupakan wilayah dengan areal tanaman tebu terluas sebesar 2.835,78 ha dan wilayah Kecamatan Sragen menjadi wilayah yang tidak mempunyai areal tanaman tebu. Produksi tebu tertinggi berada di wilayah Kecamatan Jenar sebesar 13.168,53 ton dan wilayah Kecamatan Sidoharjo menjadi wilayah dengan produksi tebu terendah yaitu sebesar 28,56 ton. Berikut ini merupakan data detail luas tanaman tebu, produksi tebu, dan produktivitas di masing-masing wilayah kecamatan Kabupaten Sragen.

Tabel 2. 7 Luas Tanaman, Produktivitas, dan Produksi Tebu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Tanaman (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Kalijambe	87,80	433,40	4,94
2	P l u p u h	16,00	64,48	4,03

No	Kecamatan	Luas Tanaman (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
3	Masaran	17,04	53,70	3,15
4	Kedawung	25,00	129,47	5,18
5	Sambirejo	30,69	118,41	3,86
6	Gondang	137,52	607,12	4,41
7	Sambungmacan	129,39	565,44	4,37
8	Ngrampal	42,20	242,44	5,75
9	Karangmalang	40,10	228,59	5,70
10	S r a g e n	-	-	-
11	Sidoharjo	8,00	28,56	3,57
12	T a n o n	19,13	68,29	3,57
13	Gemolong	58,94	237,53	4,03
14	M i r i	21,03	85,78	4,08
15	Sumberlawang	29,41	147,73	5,02
16	Mondokan	290,96	1.103,26	3,79
17	Sukodono	378,86	1.281,63	3,38
18	G e s i	438,33	1.748,96	3,99
19	Tangen	1.151,04	3.854,79	3,35
20	J e n a r	2.835,78	13.168,53	4,64
Kabupaten Sragen		5.757,22	24,168.10	4,20

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

4. Peternakan

Kabupaten Sragen memiliki potensi sumber daya alam peternakan dari berbagai jenis hewan peternakan mulai dari sapi, kerbau, kambing, dan domba. Pada tahun 2024, jenis hewan ternak terbanyak di Kabupaten Sragen adalah kambing dengan jumlah 114.272 ekor, kemudian sapi sejumlah 60.181 ekor, domba sejumlah 3.836 ekor, dan babi sejumlah 2.541 ekor. Berikut ini merupakan data populasi dan jenis hewan ternak menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Sragen pada tahun 2024.

Tabel 2. 8 Populasi Ternak dan Jenis Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen tahun 2024

No	Kecamatan	Sapi Potong (ekor)	Kerbau (ekor)	Kambin g (ekor)	Domba (ekor)	Kuda (ekor)	Babi (ekor)
1	Kalijambe	3.570	-	4.952	456	-	-
2	Plupuh	3.161	-	6.410	55	2	-
3	Masaran	2.496	-	5.313	206	3	778
4	Kedawung	3.127	-	8.444	690	-	457
5	Sambirejo	2.786	-	8.801	531	-	-
6	Gondang	2.663	-	4.509	426	-	101
7	Sambungmaca n	2.865	21	5.350	169	-	45
8	Ngrampal	2.643	2	6.780	31	-	7
9	Karangmalang	3.048	-	5.291	191	10	55
10	Sragen	713	-	1.868	156	2	583

No	Kecamatan	Sapi Potong (ekor)	Kerbau (ekor)	Kambing (ekor)	Domba (ekor)	Kuda (ekor)	Babi (ekor)
11	Sidoarjo	1.468	-	2.958	73	-	450
12	Tanon	1.832	-	7.613	178	-	20
13	Gemolong	2.538	-	5.008	56	5	5
14	Miri	3.832	-	5.679	53	-	-
15	Sumberlawang	3.901	4	6.300	14	-	13
16	Mondokan	5.995	-	6.230	28	-	16
17	Sukodono	3.633	-	4.570	85	-	-
18	Gesi	2.362	-	5.778	339	-	-
19	Tangan	4.772	-	7.371	55	-	11
20	Jenar	2.776	-	5.047	44	-	-
Kabupaten Sragen		60.181	27	114.272	3.836	22	2.541

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

5. Perikanan

Kabupaten Sragen memiliki potensi sumber daya perikanan darat yang melimpah. Potensi sumber daya perikanan ini hanya terdapat di perikanan darat, karena wilayah Kabupaten Sragen tidak memiliki wilayah laut sehingga tidak terdapat potensi perikanan laut. Berdasarkan data produksi perikanan Kabupaten Sragen tahun 2024, jenis ikan nila merupakan ikan air tawar yang paling banyak diproduksi yaitu sebesar 29.488,01 ton. Wilayah Kecamatan Sumberlawang adalah lokasi utama produksi ikan nila dengan produksi sebanyak 20.837,43 ton. Jenis ikan kedua yang paling banyak diproduksi oleh Kabupaten Sragen adalah ikan mas dengan jumlah produksi sebanyak 2.927,19 ton. Berikut ini merupakan data detail produksi perikanan dan jenis ikan di Kecamatan Sragen tahun 2024

Tabel 2. 9 Produksi Perikanan Menurut Jenis Ikan dan Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2024

No	Kecamatan	Ikan Mas	Nila	Patin	Gurami
1	Kalijambe	-	-	-	-
2	Plupuh	-	-	-	-
3	Masaran	-	598,21	47,76	1.035,5
4	Kedawung	-	299,11	142,08	115,49
5	Sambirejo	-	941,31	172,55	230,95
6	Gondang	-	-	90,57	92,38
7	Sambungmacan	18,69	-	35,96	-
8	Ngrampal	0,48	-	1,29	-
9	Karangmalang	-	-	164,75	138,58
10	Sragen	-	23,03	-	3,84
11	Sidoarjo	-	-	891,47	369,55
12	Tanon	14,03	102,93	4,95	254,08
13	Gemolong	-	253,09	-	-
14	Miri	501,55	6.837,43	30,8	-
15	Sumberlawang	2.388,11	20.837,43	25,87	-
16	Mondokan	-	-	-	-
17	Sukodono	0,72	-	1,27	69,3

No	Kecamatan	Ikan Mas	Nila	Patin	Gurami
18	Gesi	-	-	-	-
19	Tangan	-	-	-	-
20	Jenar	3,6	-	6,46	-
Kabupaten Sragen		2.927,19	29.488,01	1.614,78	2.309,67

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Daya Dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara itu, Daya Tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk di dalamnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa antara Daya Dukung dan Daya Tampung akan saling berhubungan secara berkelanjutan. Artinya kondisi fisik, karakter, dan potensi (baik potensi positif ataupun negatif) yang dirangkum dalam suatu sistem kemampuan lahan selanjutnya akan diolah dan dimanfaatkan untuk makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Akan tetapi kondisi fisik wilayah itu sendiri akan memiliki batasan atau kapasitas untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup itu sendiri, dimana batasan tersebut adalah kata lain dari daya tampung. Kondisi tersebut bersifat eksisting (pada saat ini) sehingga potensi yang ada dari kondisi fisik alam yang tersedia harus diatur dalam pemanfaatannya agar dapat terikat dalam salah satu tujuan Rencana Tata Ruang, yakni pemanfaatan untuk pembangunan yang sifatnya tetap berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan yang membawa dampak negatif bagi makhluk hidup didalamnya.

Daya dukung lingkungan terdiri dari dua komponen yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung (*assimilative capacity*). Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sragen ini juga menggunakan pendekatan pendekatan jasa lingkungan. Analisis kapasitas daya dukung lingkungan hidup yang dianalisis diantaranya meliputi Daya Dukung Air dan Daya Dukung Pangan. Sementara itu,

daya tampung lingkungan mencakup analisa komponen sumber daya alam seperti kualitas air sungai, kualitas udara, dan kemampuan tanah.

2.1.3.1 Daya Dukung Air

Dalam menghitung daya dukung dan daya tampung air menggunakan Pendekatan campuran digunakan untuk menghitung daya dukung dan daya tampung air, dimana parameter pertama menggunakan pendekatan *Stock* dengan Jasa Lingkungan yang bersifat kualitatif dan pendekatan supply and demand berbasis kebutuhan dan ketersediaan secara kuantitatif. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, diketahui bahwa 13,74% wilayah Kabupaten Sragen masih dalam status belum terlampaui, sedangkan 86,26 % dalam status daya dukung daya tampung air terlampaui. Berikut adalah rincian luas wilayah Kecamatan berdasarkan status daya dukung daya tampung air.

Tabel 2. 10 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Sragen

Kecamatan	Klasifikasi Daya Dukung Daya Tampung Air		Jumlah
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
Gemolong	440,74	3.612,05	4.052,78
Gesi	246,11	3.823,05	4.069,16
Gondang	488 41	4.226,91	4.715,33
Jenar	885,76	6.321,21	7.206,98
Kalijambe	289,21	4.476,73	4.765,94
Karangmalang	226,87	4.454,14	4.681,01
Kedawung	470,34	4.730,94	5.201,29
Masaran	575,27	4.101,64	4.676,91
Miri	1.434,60	4.186,01	5.620,61
Mondokan	37,20	5.033,48	5.070,68
Ngrampal	238,96	3.737,02	3.975,98
Plupuh	100,98	4.960,88	5.061,87
Sambirejo	1.805,00	2.742,94	4.547,94
Sambungmacan	927,39	3.437,94	4.365,33
Sidoharjo	767,50	4.020,21	4.787,70
Sragen	801,85	2.089,37	2.891,23
Sukodono	280,52	4.454,56	4.735,08
Sumberlawang	1.402,50	6.571,55	7.974,05
Tangen	1.645,06	4.052,14	5.697,20
Tanon	589,76	4.691,23	5.280,99
Total Luas (ha)	13.654,04	85.724,00	99.378,04
Prosentase (%)	13,74	86,26	

Sumber: Laporan D3TLH Kabupaten Sragen, 2023

Kecamatan dengan persentase wilayah dengan status daya dukung daya tampung air belum terlampaui terbesar adalah kecamatan Sambirejo yaitu sebesar 39,69% atau sebesar 1805 ha wilayahnya masih memiliki daya dukung daya tampung air yang memadai untuk mendukung kehidupan di atasnya karena kondisi tutupan lahan terbangun masih kecil serta adanya tutupan lahan berupa perkebunan dan hutan, sehingga menyebabkan ketersediaan air tanah masih cukup.

Sedangkan untuk Kecamatan yang memiliki persentase wilayah dengan status daya dukung daya tampung air yang telah terlampaui terbesar adalah Kecamatan Mondokan, dimana 99,27% wilayahnya dalam status daya dukung daya tampung air terlampaui. Distribusi daya dukung dan daya tampung air secara spasial dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sumber: Laporan D3TLH Kabupaten Sragen, 2023

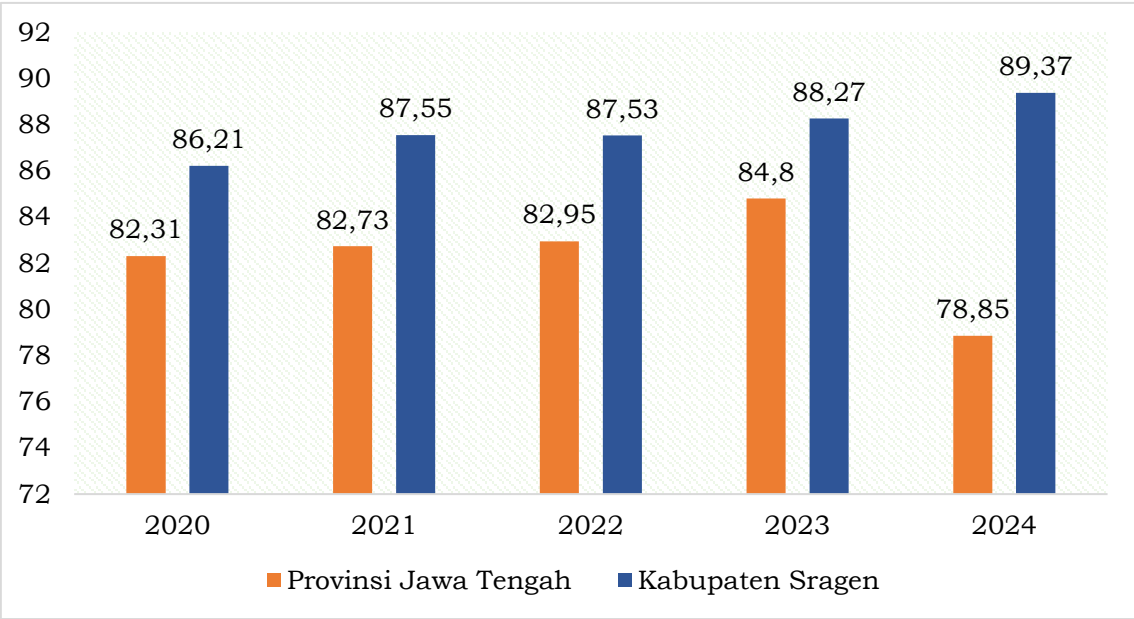
Berdasarkan perhitungan daya dukung daya tampung pangan di Kabupaten Sragen, diketahui bahwa 54,80% atau sebesar 54456,72 ha wilayah kabupaten Sragen dalam kondisi daya dukung daya tampung pangan surplus. Sedangkan 34,11% atau sebesar 33899,80 ha wilayah Kabupaten Sragen dalam kondisi daya dukung daya tampung pangan defisit, dan 11,09% atau 11021,52 ha wilayah Kabupaten Sragen dalam kondisi daya dukung daya tampung pangan seimbang. Berikut merupakan tabel rincian luas wilayah daya dukung daya tampung pangan di Kabupaten Sragen tahun 2023:

2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Bagian ini menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.

2.1.4.1 Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen menggambarkan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Perwujudan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor, melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan), dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi, menjamin stabilitas pasokan, dan harga pangan.

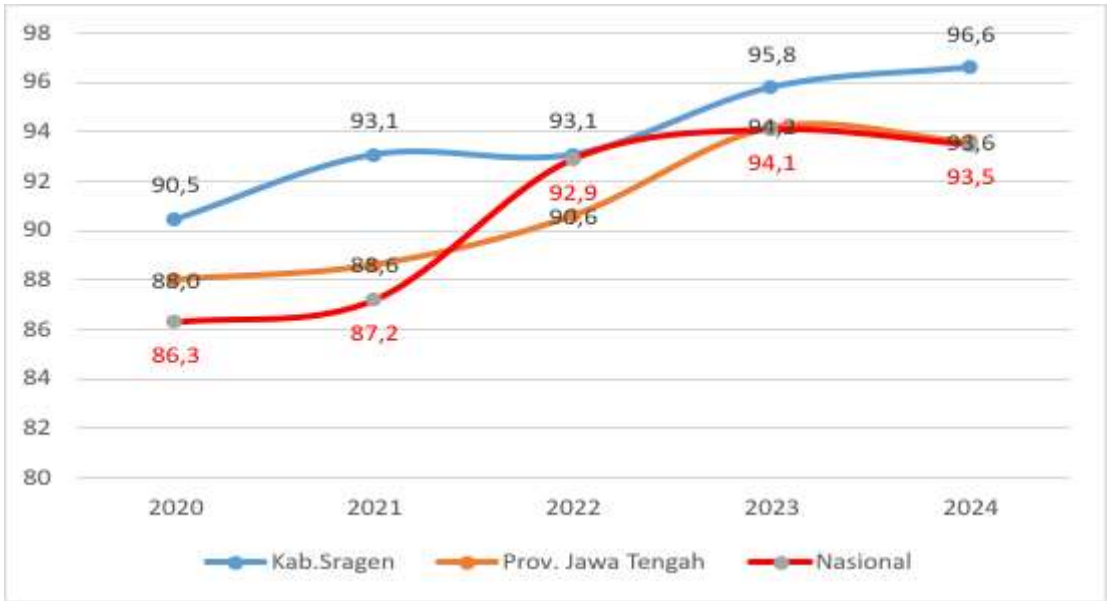


Gambar 2. 11 Capaian Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Indeks ketahanan pangan merupakan indikator untuk menghitung tingkat ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah. Capaian indeks ketahanan pangan Kabupaten Sragen tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa capaian nilai indeks ketahanan pangan selalu

berada di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan adanya kinerja positif perwujudan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sragen. Pada tahun 2024, capaian indeks ketahanan pangan Kabupaten Sragen sebesar 89,37 dan merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 2020-2024. Capaian tersebut naik sekitar 3,16 poin dibanding capaian tahun 2020 sebesar 86,21.



Gambar 2. 12 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sragen tahun 2020-2024

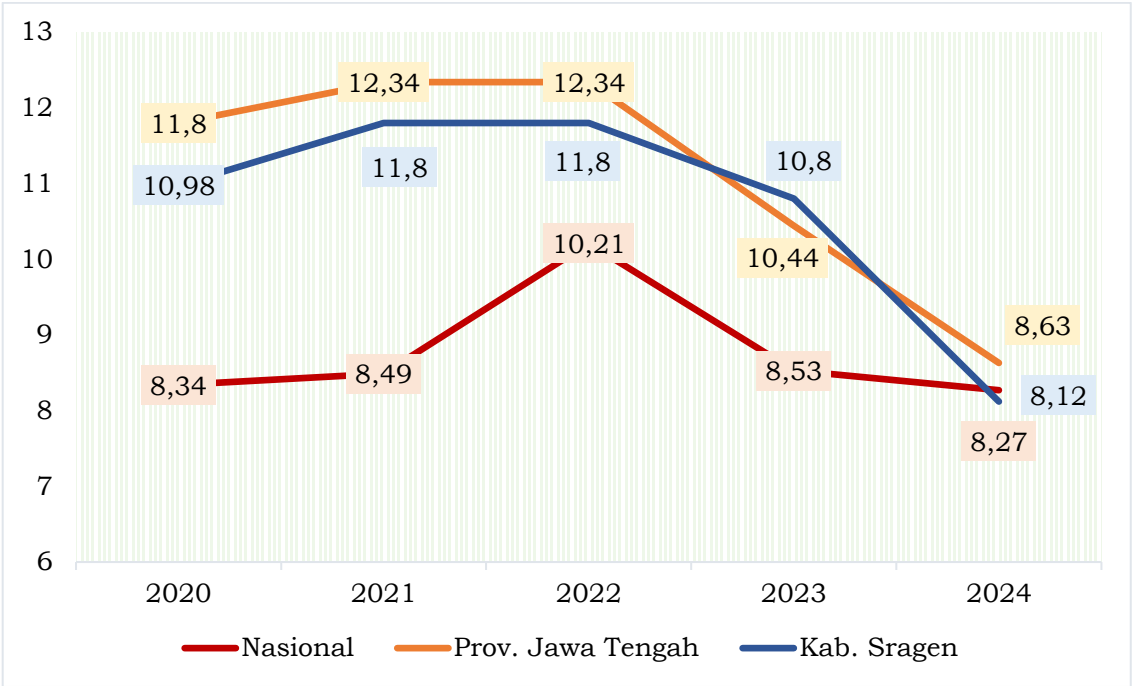
Sumber: RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 dan Tahun 2025

Skor pola pangan harapan merupakan salah satu indikator capaian target kualitas konsumsi pangan masyarakat secara nasional. Skor pola pangan harapan berguna untuk menilai situasi ketersediaan pangan yang selanjutnya menjadi dasar perencanaan konsumsi pangan. Capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Sragen menunjukkan tren yang meningkat sehingga pada tahun 2024 mencapai skor sebesar 96,6 meningkat 6,1 poin jika dibandingkan tahun 2020. Capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Sragen tahun 2024 berada di atas skor pola pangan harapan Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,6 dan Nasional sebesar 93,5.

2.1.4.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) merupakan proporsi penduduk yang

mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.



Gambar 2. 13 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

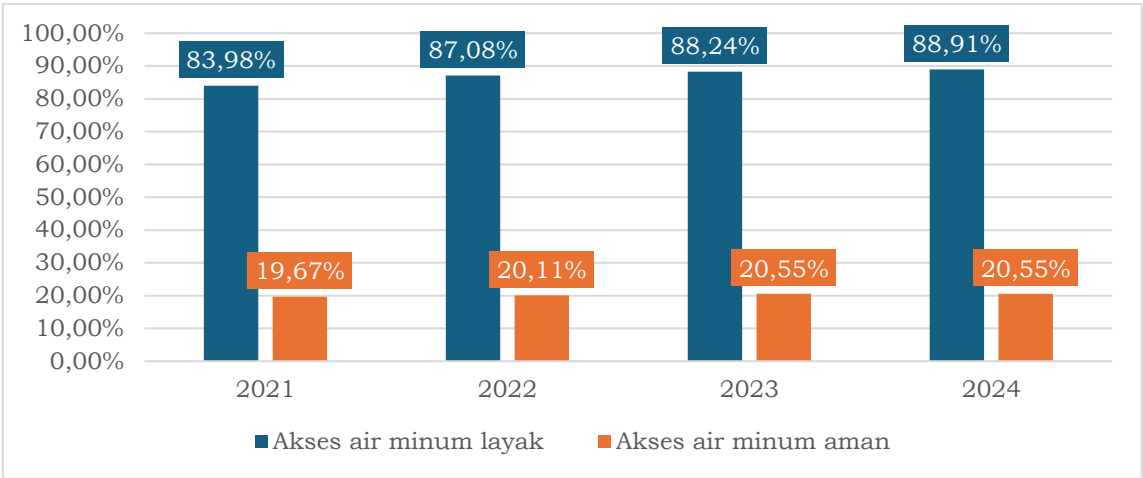
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

PoU Kabupaten Sragen pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan dari tahun 2022 dan tahun 2021 yakni mengalami penurunan sehingga mencapai 8,27 pada tahun 2024. PoU Kabupaten Sragen pada tahun 2024 menunjukkan angka yang lebih rendah jika dibandingkan PoU Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,63 dan PoU Nasional sebesar 8,27. Perbaikan PoU Kabupaten Sragen menunjukkan adanya peningkatan ketahanan pangan dan keberhasilan intervensi program pembangunan di sektor pangan dan gizi. Kondisi ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam mengurangi tingkat kekurangan gizi. Selain itu, capaian ini juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen telah mampu mengelola sumber daya pangan secara lebih efektif dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan sejalan dengan capaian nasional. Tren ini menjadi indikator positif dalam mendukung upaya Sragen sebagai bagian dari strategi “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional.”

Sehingga diperlukan langkah mengoptimalkan dan memfokuskan intevensi untuk meningkatkan sektor pertanian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di Tahun 2026.

2.1.4.3 Akses Air Minum

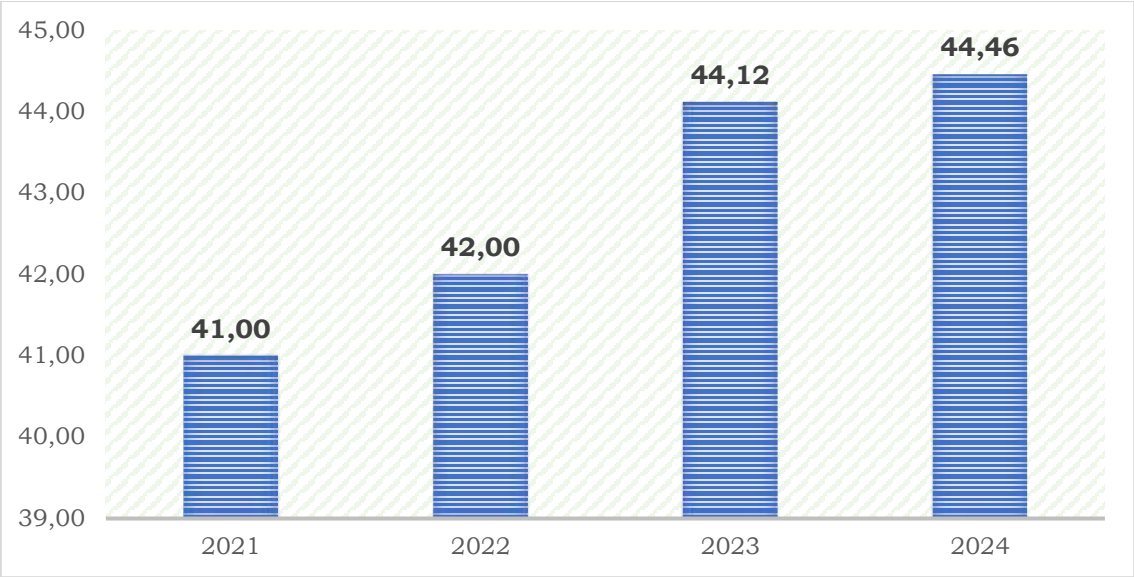
Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Sragen digambarkan dengan adanya pelayanan air minum untuk masyarakat dengan jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Pelayanan air minum perpipaan diwujudkan dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.



Gambar 2. 14 Akses Air Minum Masyarakat Kabupaten Sragen Tahun 2021-2024

Sumber: DPU Kabupaten Sragen, 2025

Cakupan pelayanan air minum aman Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2024 baru mencapai 20,55 persen, namun layanan air minum layak telah mencapai 88,91 persen. Selain masyarakat yang dapat mengakses air minum dari jaringan perpipaan, mayoritas masyarakat masih memanfaatkan air bersih yang berasal dari sumur, leding, maupun sumber lain. Kabupaten Sragen memiliki mata air yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat sebagai sumber pemenuhan air bersih. Ataupun, pada Tahun 2023, persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan adalah sebesar 63,37%. Kemudian, pada Tahun 2024 meningkat 0,53% menjadi 63,90%.



Gambar 2. 15 Cakupan Pelayanan Jaringan Perpipaan Air Minum (%) Tahun 2021-2024

Sumber: DPU Kabupaten Sragen, 2025

Cakupan layanan jaringan air minum perpipaan mengalami peningkatan sebesar 3,46 persen poin dalam kurun waktu 2021 – 2024. Selain masyarakat yang dapat mengakses air minum dari jaringan perpipaan, mayoritas masyarakat masih memanfaatkan air bersih yang berasal dari sumur, leding, maupun sumber lain. Kabupaten Sragen memiliki mata air yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat sebagai sumber pemenuhan air bersih.

Tabel 2. 12 Sebaran Mata Air Kabupaten Sragen

No	Nama Mata Air	Lokasi			Kapasitas	Pemanfaatan (lt/det)			Kondisi
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	lt/det	Irigasi	PDAM	Lain	
1	Bayanan	Jambeyan	Sambirejo	Sragen	12,00	12,00	0,00	0,00	
2	Gadon	Gading	Tanon	Sragen	40,00	40,00	0,00	0,00	
3	Kenteng Soko	Soko	Miri	Sragen	20,00	20,00	0,00	0,00	
4	Gadon Jati	Jati	Sumberlawang	Sragen	72,00	72,00	0,00	0,00	
5	Pendem Sumberlawang	Pendem	Sumberlawang	Sragen	15,00	15,00	0,00	0,00	
6	Peleman	Jekani	Mondokan	Sragen	56,00	56,00	0,00	0,00	Rusak Ringan
7	Gading Sono	Sono	Mondokan	Sragen	36,00	36,00	0,00	0,00	
8	Panji	Majenang	Sukodono	Sragen	68,00	68,00	0,00	0,00	Rusak Ringan
9	Ngrawoh	Pilangsari	Gesi	Sragen	25,00	25,00	0,00	0,00	Rusak Ringan
10	Sentono	Slendro	Gesi	Sragen	25,00	25,00	0,00	0,00	Rusak Berat
11	Kandang sapi	Kandang sapi	Jenar	Sragen	46,00	46,00	0,00	0,00	
12	Bodehan	Mlale	Jenar	Sragen	44,00	44,00	0,00	0,00	Baik
13	Gadon A	Jati	Sumberlawang	Sragen	0,00	0,00	0,00	0,00	Rusak Ringan
14	Gadon B	Gading	Tanon	Sragen	0,00	0,00	0,00	0,00	Rusak Ringan
15	Gading I	Sono	Mondokan	Sragen	0,00	0,00	0,00	0,00	Baik
16	Pendem I	Pendem	Sumberlawang	Sragen	0,00	0,00	0,00	0,00	Baik
17	Kenteng I	Soko	Miri	Sragen	0,00	0,00	0,00	0,00	Baik
18	Pompa Kecil	Kecik	Tanon	Sragen	0,00	0,00	0,00	0,00	Rusak Ringan
19	Pompa Pengkol	Pengkol	Tanon	Sragen	0,00	0,00	0,00	0,00	Rusak Ringan
20	Pompa Ngriwek	Ngriwek	Tangen	Sragen	0,00	0,00	0,00	0,00	Rusak Ringan
21	Jenalas	Jenalas	Gemolong	Sragen	10.00	0.00	0.00	10.00 (air minum)	Rusak Ringan
22	Karangpelem1	Karangpelem	Kedawung	Sragen	7.00	7.00	0.00	0.00	Rusak Ringan
23	Karangpelem2	Karangpelem	Kedawung	Sragen	10.00-20.00	0.00	0.00	10 -20 (kolam renang dan air minum)	Baik
24	Celep	Celep	Kedawung	Sragen	2.00	0.00	0.00	1 - 2	Rusak Ringan
25	Dawung	Dawung	Jenar	Sragen	2.00	0.00	0.00	2.00	Rusak Ringan
26	Bonagung	Bonagung	Tanon	Sragen	3.00	0.00	0.00	3.00	Rusak Ringan
27	Sambi	Sambi	Sambirejo	Sragen	3.00	3.00	0.00	0.00	Rusak Ringan

No	Nama Mata Air	Lokasi			Kapasitas	Pemanfaatan (lt/det)			Kondisi
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	lt/det	Irigasi	PDAM	Lain	
28	Tegalrejo	Tegalrejo	Gondang	Sragen	3.00-5.00	0.00-0.00	0.00	3 - 5	Rusak Ringan
29	Kaliwedi	Kaliwedi	Gondang	Sragen	5.00-10.00	0.00	0.00	5-10	Rusak Ringan
30	Wonotolo	Gondang	Gondang	Sragen	5.00	0.00	0.00	5.00	Rusak Ringan
31	Galeh	Galeh	Tangen	Sragen	10.00	0.00	0.00	10.00 (kolam renang)	Rusak Ringan

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

Terdapat 20 mata air yang tersebar dalam 9 Kecamatan meliputi Sambirejo, Tanon, Miri, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi, Jenar, dan Tangen. Kapasitas debit mata air terbesar yaitu mata air Gadon Jati di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang sebesar 72 liter/detik. Sementara itu, beberapa mata air memiliki kapasitas 0 liter/detik karena berada di kondisi rusak ringan.

SPAM jaringan perpipaan di Kabupaten Sragen dikelola oleh Perumda Air Minum Tirto Negoro Sragen. Sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku terdiri dari sistem perpipaan dan air bawah tanah dalam (pengeboran dan pemompaan). Sumber air baku tersebut adalah sebagai berikut.

a) Mata Air

Mata air yang dimanfaatkan untuk sumber air baku adalah Mata Air Gumeng. Untuk air baku yang berasal dari mata air, sistem pengambilan dilakukan melalui bangunan penangkap mata air/broncaptering yang berfungsi sebagai pengumpul air sebelum dialirkan ke reservoir atau langsung pelayanan. Mata air Gumeng ini digunakan untuk wilayah Sambirejo dengan kapasitas terpasang sebesar 35 lt/dt dan Gondang dengan kapasitas terpasang sebesar 45 lt/dt.

b) Air Tanah (Sumur Bor Dalam dengan Pemompaan)

Sumber air baku yang berasal dari air tanah dalam, sistem pengambilan dilakukan dengan sistem sumur bor dalam dengan pemompaan.

c) Air Permukaan (Waduk)

Selain menggunakan sumber mata air dan air tanah, Perumda Air Minum Tirto Negoro juga merencanakan penggunaan sumber air yang berasal dari air permukaan, yaitu Waduk Gondang yang direncanakan dengan Bangunan Instalasi Pengolah Air (IPA) direncanakan sebesar 100 Liter/Detik.

SPAM jaringan perpipaan dengan Lembaga Pengelola Non Perumda Air Minum di Kabupaten Sragen disediakan melalui Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat), DAK, HAMP yang dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Masing-masing unit program ini dikelola oleh KPSPAM yang dinaungi oleh Asosiasi KPSPAM di Kabupaten Sragen.

2.1.4.5 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembapan yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A. Di Kabupaten Sragen terdapat 104 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten dengan luas area sawah yang dapat dialiri seluas 8.199 Ha.

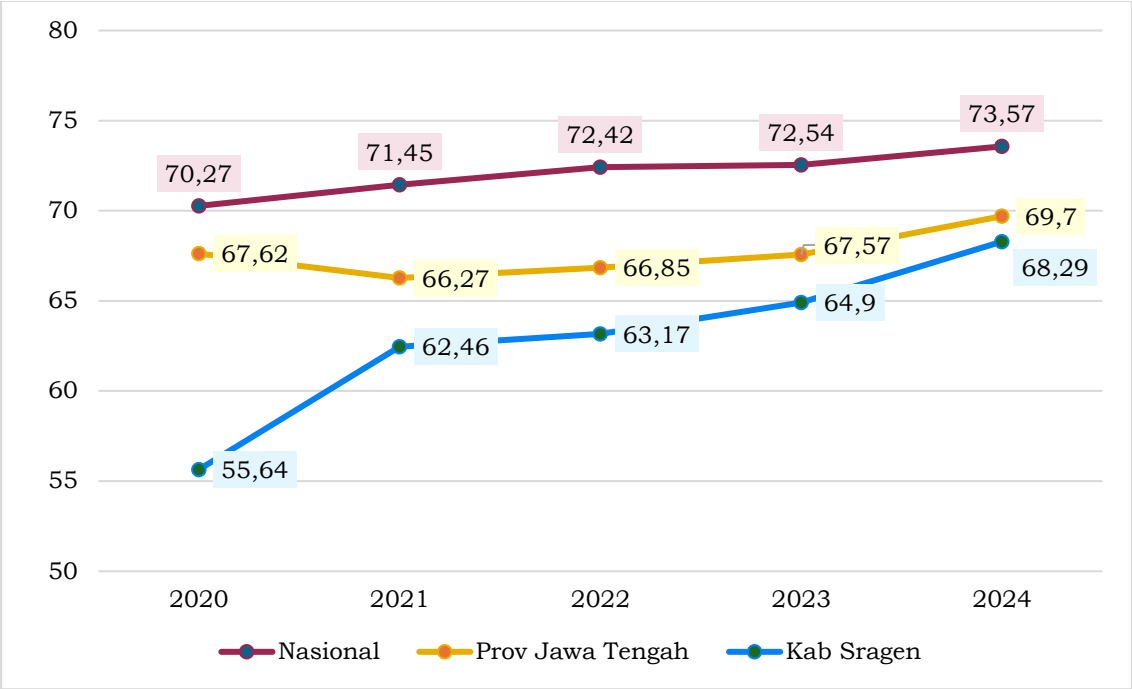
Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota mengacu pada ePAKSI Ditjen SDA Kementerian PUPR. Pada Tahun 2024, Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Sragen Tahun 2024 adalah sebesar 68,70.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Bagian ini menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.5.1 Kualitas Lingkungan Hidup

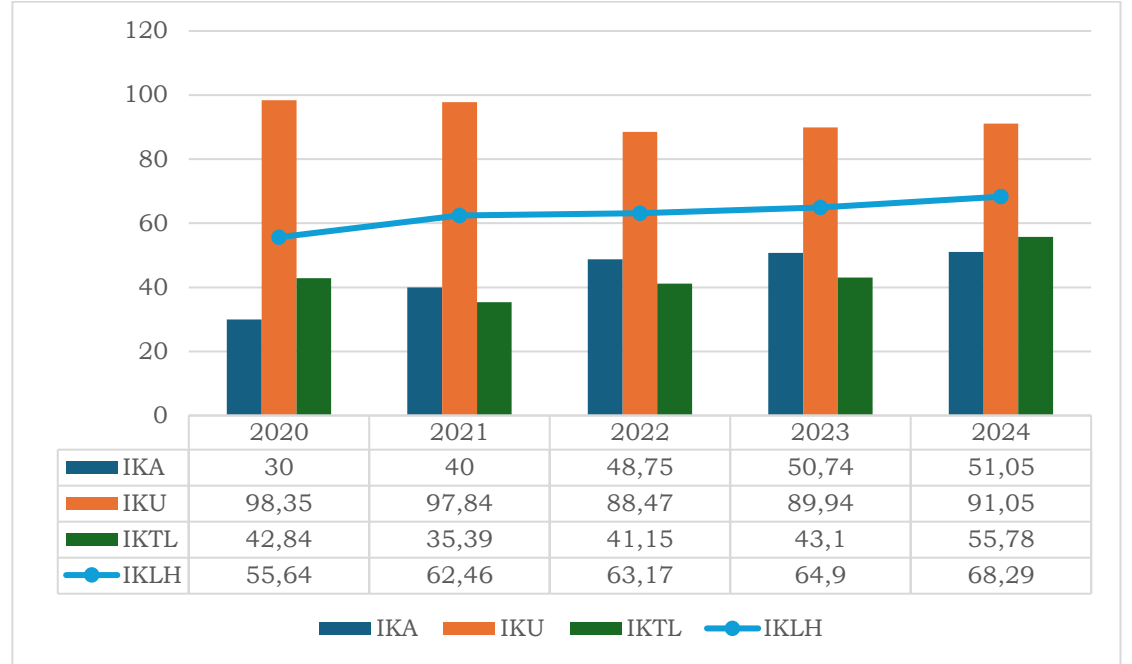
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.



Gambar 2. 16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

IKLH di Kabupaten Sragen terus mengalami tren meningkat sejak tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan yang terjadi pada capaian IKLH Kabupaten Sragen belum dapat mengimbangi capaian provinsi maupun nasional, skor IKLH Kabupaten Sragen masih lebih rendah. Berdasarkan komponen pembentuk indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sragen, indeks kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan masih memiliki capaian yang rendah.



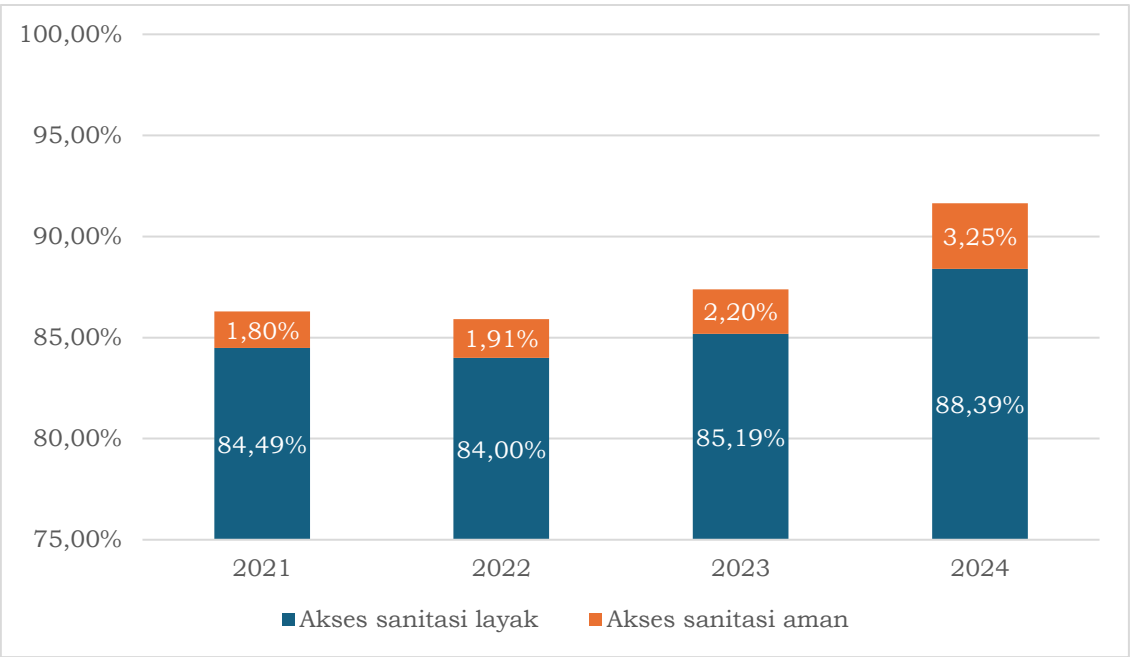
Gambar 2. 17 Capaian Nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sragen tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

Merujuk tren data dari tahun 2020 sampai tahun 2024, capaian indeks kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Sragen menjadi komponen penyusun IKLH yang masih perlu ditingkatkan. Artinya, kualitas air dan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Sragen perlu lebih dioptimalkan pengelolaannya. Berbeda halnya dengan capaian indeks kualitas udara Kabupaten Sragen yang telah mencapai skor 91,05 pada tahun 2024. Capain ini menunjukkan kualitas udara yang cukup baik. Akan tetapi, berdasarkan tren data kualitas udara, capaian nilai indeks kualitas udara pada tahun 2024 mengalami penurunan 7,3 poin jika dibandingkan tahun 2020. Oleh karenanya, perlu upaya mitigasi agar tidak terus menurun.

2.1.5.2 Akses Sanitasi

Cakupan pelayanan akses sanitasi layak dan aman Kabupaten Sragen pada Tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Namun, capaian pelayanan sanitasi aman baru mencakup 3,25 persen, sedangkan cakupan sanitasi layak telah mencapai 88,39 persen.



Gambar 2. 18 Cakupan Pelayanan Sanitasi Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sragen, 2025

Penekanan pada penyediaan infrastruktur dasar ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Salah satu infrastruktur sektor sanitasi khususnya terkait air limbah domestik di Kabupaten Sragen adalah IPLT. Saat ini pemerintah kabupaten Sragen memiliki 1 IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang dibangun pada tahun 1996 dengan luas

0,054 ha. IPLT Tanggan termasuk dalam kawasan TPA Tanggan yang terletak di Dukuh Jatisari, Desa Tanggan, Kecamatan Gesi. Upaya pengolahan limbah tinja saat ini menggunakan sistem sedimentasi/pengendapan dengan tahapan:

- a. Pre-Treatment (Bak penerima-saringan+grease trap);
- b. Pemekatan (Bak Sedimentasi);
- c. Pengolahan Cairan (Kolam anaerob-activated sludge-kolam maturasi); dan
- d. Pengolahan Padatan (Anaerobic digester-sludge drying bed-pemanfaatan padatan).

Berdasarkan hasil kajian IUWASH PLUS Tahun 2020 yaitu Implementasi Revitalisasi dan Rencana Tahapan Tindak Lanjut IPLT Tanggan Kabupaten Sragen menyatakan bahwa IPLT Tanggan memiliki kapasitas desain sebesar 19,5 m³/hari. Kapasitas tersebut merupakan total kapasitas thickener pada perhitungan daya tampung berdasarkan solid loading rate untuk 2 unit Thickener atau 9,75 m³/hari per unit Thickener. Adapun kondisi saat ini telah melebihi kapasitas yaitu 23 m³/hari berdasarkan rata-rata lumpur tinja yang masuk pada periode tanggal 1- 24 Oktober 2020. Adanya kondisi tersebut menyebabkan besarnya kapasitas penggunaan di IPLT Tanggan mempunyai capaian sebesar 117,95%, sehingga kondisi IPLT yang ada saat ini melebihi kapasitas yang ada/overcapacity. Sehingga perlu dilakukan rencana pembangunan IPLT baru.

Berdasarkan kajian feasibility study IPLT, idealnya Sragen memiliki 3 IPLT yang berada di Sragen bagian barat (wilayah Gemolong), Sragen bagian tengah (IPLT Tanggan saat ini) dan Sragen bagian timur (wilayah Gondang atau Kedawung). Saat ini pelayanan belum bisa maksimal sampai ke wilayah Sragen bagian Barat (Gemolong, Miri, Kalijambe, Sumberlawang, Plupuh) dikarenakan jarak masih terlalu jauh, sehingga untuk meminimalkan biaya perlu dibuat IPLT di sragen bagian barat dan sebagai upaya untuk perluasan area pelayanan dan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.

2.1.5.3 Pengelolaan Persampahan

Pemerintah Kabupaten Sragen secara konsisten mengelola persampahan agar kualitas lingkungan semakin baik. TPAS Tanggan

sudah menerapkan tipe pengelolaan dengan *Control Landfill* dimana pengurugan tanah di zona penimbunan sampah dilaksanakan secara rutin. Air lindi dibuang ke saluran lindi yang dialirkan ke Kolam lindi sedangkan gas metana dikumpulkan di pipa pembuangan metana. Usia TPAS Tanggan sebenarnya sudah habis pada Tahun 2019, akan tetapi ada perluasan lahan TPAS seluas 0,8 Ha pada Tahun 2022 dan pada tahun 2024 luas lahan sejumlah 5 Ha usia TPAS diperpanjang sampai dengan Tahun 2026.

Tabel 2. 13 Usia Pakai dan Tipe Pengelolaan Sampah TPA di Kabupaten Sragen Tahun 2024

No	Kecamatan	Nama TPA	Tipe Pengelolaan Sampah di TPA			Luas (Ha)	Usia TPA s.d. Tahun
			Control Landfill	Unmanaged Shallow	Unmanaged Deep		
1	Gesi	TPAS Tanggan	V	N.A	N.A	5	2026

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, 2024

Kabupaten Sragen pada tahun 2024 ini telah memiliki 263 bank sampah, 11 TPS3R, 1 unit TPST, 1 unit TPAS, dan 1 pusat daur ulang (PDU).

Tabel 2. 14 Nama Fasilitas dan Lokasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Sragen

No	Nama - Nama Fasilitas	Lokasi
1	TPS3R Jati Makmur Masaran	Jati, Masaran, Sragen
2	TPS 3R Jetak	Ngepos, Jetak, Sidoharjo, Sragen
3	TPS3R Maju Sejahtera Sine	Turi, Sine, Sragen, Sragen
4	TPS3R Mandiri Jaya Nglorog	Ngoncol, RW 07 Nglorog Sragen, Sragen
5	TPS3R Guyup Rukun Karang Tengah	Karang Tengah, Karang Tengah, Sragen, Sragen
6	TPS3R Karang Becik Plumbungan	Karang Rt 17 Plumbungan, Karangmalang, Sragen
7	TPS3R Guyup Rukun Desa Puro	Puro Asri 2, Puro, Karangmalang Sragen
8	TPS 3R Gondang	Bangunrejo, Gondang, Gondang, Sragen
9	TPS 3R Jetak, Duyungan	Jetak Gayam, Duyungan, Sidoharjo, Sragen
10	TPS 3R Sambungmacan	Karanganyar, Sambungmacan, Sragen
11	TPS 3R Banyuurip Jenar	Betek, Banyurip, Jenar, Sragen
12	TPST Manding	Sragen Kulon, Sragen, Sragen
13	PDU Kalijambe	Karangpung, Jetis, Kalijambe, Sragen
14	TPAS Tanggan	Jatisari, Tanggan, Gesi
15	Bank sampah se- kab. sragen	Jumlah: 272 Unit
16	Bank Sampah Induk	Jumlah: 2 Unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, 2024

Timbulan sampah tahunan di Provinsi Jawa Tengah juga perlu dilihat untuk membandingkan perolehan dan kontribusi timbulan sampah pada daerah kabupaten penyangga Kabupaten Sragen. Semakin tingginya kontribusi menandakan bahwa proporsi timbulan sampah daerah tersebut memiliki sumbangsih yang tinggi pula begitu juga sebaliknya. Timbulan sampah tersebut merupakan jumlah maupun akumulasi dari setiap daerah baik kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024, jumlah timbulan sampah di Provinsi Jawa Tengah mencapai 9.673,69 ton/hari atau 3.530.896,21 ton/tahun.

Reduksi sampah adalah strategi untuk menekan jumlah sampah yang timbul. Strategi 3R yaitu 3R *reuse*, *reduce*, dan *recycle* kini telah berkembang menjadi 5R yaitu *reduction*, *reuse*, *recycle*, *recover*, *revalue*. Konsep dilakukan agar sampah dapat tertangani dengan prinsip sirkular ekonomi. Prinsip 5R ini dapat dilakukan dengan pengurangan beberapa material mentah alam disertai dengan penggunaan kembali material yang bisa termanfaatkan serta adanya proses daur ulang yang terjadi dan diikuti langkah perolehan kembali dan perbaikan. Prinsip ini akan menjadikan sampah terus berputar menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara efisien dan efektif dan mendorong penggunaan energi alternatif.

Tabel 2. 15 Timbulan Sampah Kabupaten Sragen Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Wilayah	Timbulan Sampah Harian(ton)	Timbulan Sampah Tahunan(ton)
Kab Sragen	598.49	218,449.22
Prov Jawa Tengah	9,673.69	3,530,896.21
Nasional	93,738.65	34,214,607.36

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025

Target pengelolaan sampah diatur dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Sragen. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif dalam mengelola timbulan sampah yang semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Berikut ini merupakan target RPPLH indikator persampahan di Kabupaten Sragen.

Tabel 2. 16 Target RPPLH Indikator Persampahan Kabupaten Sragen

Indikator	Target RPPLH	2023-2033
Persampahan	- Meningkatkan persentase sampah perkotaan yang	- Memenuhi target nasional

Indikator	Target RPPLH	2023-2033
	tertangani (72,95% pada tahun 2022 sebagai baseline) - Meningkatkan jumlah sampah terdaur ulang (14,08 ton/hari sebagai baseline) - Menurunkan produksi sampah pada masyarakat	penanganan sampah perkotaan (80%) - Meningkatkan jumlah sampah terdaur ulang dan menginisiasi nilai tambah ekonomi - Menekan rasio produksi sampah pada masyarakat di bawah proyeksi RPJMD

Sumber: RPPLH Kabupaten Sragen, 2023

Target tersebut menjadi acuan dalam menentukan target penanganan sampah di Kabupaten Sragen. Target kuantitatif pengelolaan sampah berdasarkan data RPPLH Kabupaten Sragen sebagai berikut.

Tabel 2. 17 Target Pengelolaan Sampah Kabupaten Sragen

Indikator	Sub Indikator	Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032
Persampahan	Penanganan sampah	73	73,67	74,15	74,8	75	78,35
	Sampah tidak terkelola	27	26,33	25,85	25,20	25	21,65
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Persen)	26,36	26,54	26,72	27,81	28,91	30,02

Sumber: RPPLH Kabupaten Sragen, 2023

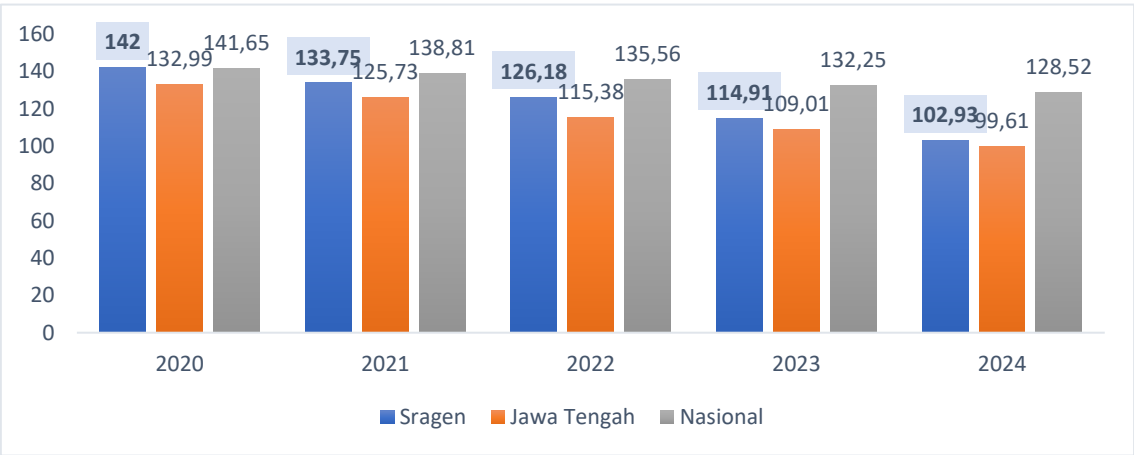
Pengelolaan sampah di Kabupaten Sragen dapat ditingkatkan dengan cara penguatan regulasi dan kebijakan penanganan sampah, pemberian *reward* dan *punishment*, peningkatan kualitas pengelolaan dan penerapan inovasi, peningkatan dukungan regional dan internasional dan peningkatan mobilisasi komunitas RT dan RW secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Bagian ini menjelaskan tentang kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan.

2.1.6.1 Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Indeks risiko bencana Kabupaten Sragen tahun 2024 sebesar 102,93 menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Sragen termasuk dalam kategori sedang. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dan positif dalam upaya penanggulangan bencana jika dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 142. Artinya terdapat pola dan tren yang menurun terkait penilaian indeks risiko bencana di Kabupaten Sragen. Namun, capaian nilai indeks risiko bencana Kabupaten Sragen masih berada di atas capaian nilai indeks risiko bencana Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kedepan, upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Sragen masih perlu terus ditingkatkan.



Gambar 2. 19 Capaian Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2019-2023

Sumber: BNPB, 2024

Risiko Bencana diukur dan/atau dinilai melalui metode pengkajian risiko bencana. Metode ini dilakukan dengan mengetahui tingkat risiko (indeks risiko bencana) dan memetakan risiko bencana daerah. Pengkajian risiko bencana terdiri dari 3 (tiga) Langkah yaitu:

- 1. Mengkaji bahaya atau ancaman bencana
- 2. Mengkaji kerentanan dan kapasitasnya
- 3. Penilaian risiko bencana

Untuk menentukan ancaman/bahaya atau risiko bencana prioritas untuk dikelola dilakukan dengan metode evaluasi risiko. Berdasarkan ISO 31000 standar pengelolaan risiko bencana terdiri dari rangkaian proses yang meliputi :

- a. Identifikasi risiko bencana;
- b. Penilaian tingkat risiko bencana;
- c. Evaluasi risiko bencana;
- d. Penanganan risiko bencana;
- e. Komunikasi dan konsultasi risiko; dan
- f. Pemantauan risiko.

Pengkajian risiko bencana menghasilkan pilihan-pilihan tindakan sebagai kebijakan dan strategi penanganan risiko dan dituangkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang telah dilegalisasi menjadi Peraturan Bupati Sragen.

Proses berikutnya adalah menganalisis dan mensinkronkan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan. Dalam proses ini, dibutuhkan regulasi tentang SPM kebencanaan dan kewenangan pihak-pihak terkait. Selain itu, juga dibutuhkan rencana strategis masing-masing pihak untuk disinkronkan dengan program yang sudah disusun dan disepakati bersama para pihak. Agar bisa padu dengan RPJMD, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur dan kodifikasi program dan sub kegiatan masing-masing pihak. Dalam hal keterlibatan unsur bukan dari unsur pemerintah yang sudah tercantum dalam kodifikasi nomenklatur, maka diberikan ruang berkontribusi dengan sumber dana non pemerintah.

Program sampai dengan sub kegiatan ini kemudian dituangkan dalam rencana aksi yang sudah mencantumkan para pihak yang terlibat, perencanaan waktu, pendanaan dan lokasi. Dalam rencana aksi ini juga menggambarkan kerangka waktu prioritas penanganan bencana. Program dan kegiatan yang direncanakan mencerminkan kerangka kerja penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, saat darurat dan pascabencana.

Sementara itu, komunikasi, konsultasi, dan pemantauan risiko bencana merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk memutakhirkan pengelolaan risiko bencana. Secara umum, manfaat langsung dari pengelolaan risiko bencana adalah terjaganya investasi dan hasil pembangunan. Kemudian, minimnya potensi

kerusakan dan kerugian akibat bencana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain hasil pembangunan, tujuan dari pengelolaan risiko bencana antara lain:

1. Menjauhkan masyarakat dari bahaya/ancaman bencana atau sebaliknya. Misalnya, dilakukan relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan risiko tinggi agar ketika ancaman bencana terjadi, tidak menimbulkan risiko besar di Masyarakat
2. Mengurangi risiko bencana dengan berbagai upaya pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan bencana baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Salah satu strategi dalam pilihan inlil adalah hidup harmoni dengan risiko bencana karena sadar bahwa masyarakat hidup dalam kawasan rawan bencana.
3. Mengalihkan risiko bencana kepada pihak ketiga. Hal ini dapat dilakukan melalui skema asuransi. Misalnya, risiko rumah rusak akibat bencana dialihkan dalam bentuk asuransi rumah, sehingga ketika rumah tersebut terdampak bencana, Masyarakat mendapat ganti rugi yang memadai untuk membangun kembali rumahnya.
4. Mencegah timbulnya risiko yang baru. Hal ini dapat dilakukan melalui kontrol yang ketat pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan investasi swasta agar tidak mengakibatkan munculnya risiko yang baru. Misalnya, pembukaan banyak lahan perkebunan di kawasan hulu sungai akan mengakibatkan munculnya ancaman bencana banjir dan longsor serta kekeringan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan indeks risiko bencana Kabupaten Sragen, salah satunya dengan mendorong pemerintah dan seluruh stakeholder serta masyarakat untuk melaksanakan upaya pra bencana yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini mengingat bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba. Risiko bencana dapat terjadi karena kurangnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, kesiapsiagaan merupakan tahapan yang strategis untuk mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Desa tangguh bencana merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, dengan membentuk desa yang

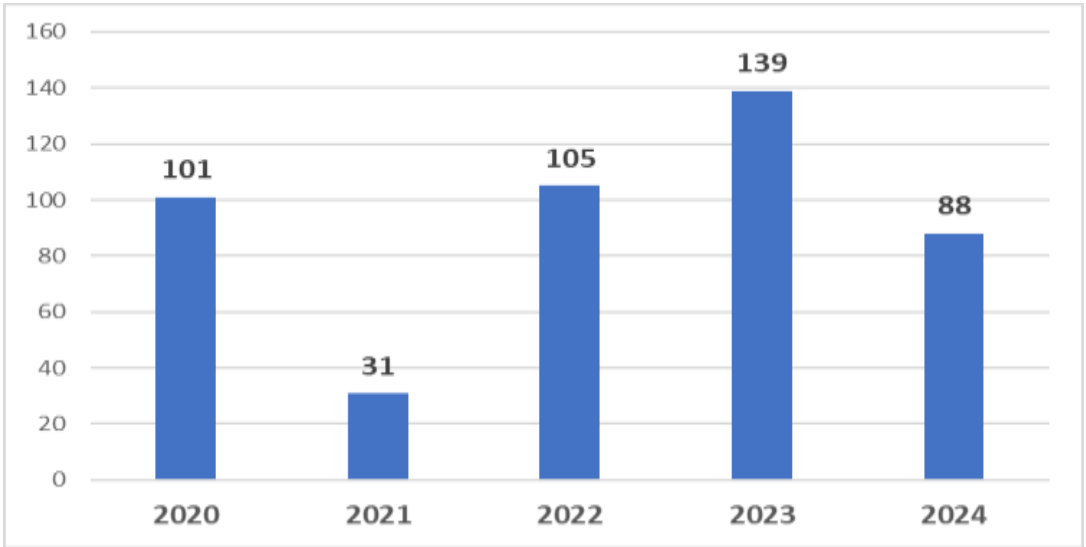
memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Indikator kunci desa tangguh bencana, yaitu penguatan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko bencana termasuk di dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat, sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Perkembangan pembentukan desa tangguh bencana (destana) di Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung mengalami penambahan tiap tahunnya.

Tabel 2. 18 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2019-2023

Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun (persen)	Jumlah Desa yang Terbentuk	JUMLAH KELOMPOK RELAWAN	JUMLAH ANGGOTA
2019	-	-	32	1106
2020	0,48	1	32	1106
2021	14,42	30	31	1083
2022	-	-	36	1202
2023	-	-	37	1251

Sumber: BPBD Kabupaten Sragen, 2024

Selain dari upaya pembentukan desa tangguh bencana, BPBD menjadi salah satu instansi yang berkaitan erat dengan kegiatan tanggap bencana. Salah satu sumber daya yang perlu dimiliki oleh BPBD adalah ketersediaan relawan yang menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan tanggap bencana. Relawan aktif BPBD Kabupaten Sragen mengalami peningkatan mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, jumlah relawan adalah 1.106 anggota yang terbagi dalam 32 kelompok. Kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.251 anggota relawan aktif yang tersebar dalam 37 kelompok relawan.



Gambar 2. 20 Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Sragen tahun 2020-2024

Sumber: BPBD Kabupaten Sragen, 2025

Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Sragen tahun 2023 menunjukkan intensitas kejadian bencana terbesar yaitu sebanyak 139 kejadian dengan kejadian bencana meliputi tanah longsor, banjir, angin kencang dan kebakaran.

2.1.6.2 Ketahanan Daerah

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk menghadapi ancaman bahaya bencana salah satunya dengan memperkuat kapasitas daerah untuk meminimalisir dampak bencana yang ditimbulkan. Tingkat kapasitas daerah diukur menggunakan indeks ketahanan daerah (IKD) yang berfokus pada 7 prioritas dalam penghitungannya, termasuk aspek kelembagaan, kajian, teknologi, dan sistem pemulihan terstruktur. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan yaitu Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Tabel 2. 19 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sragen

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	0,40	0,42	0,45	0,55	0,61

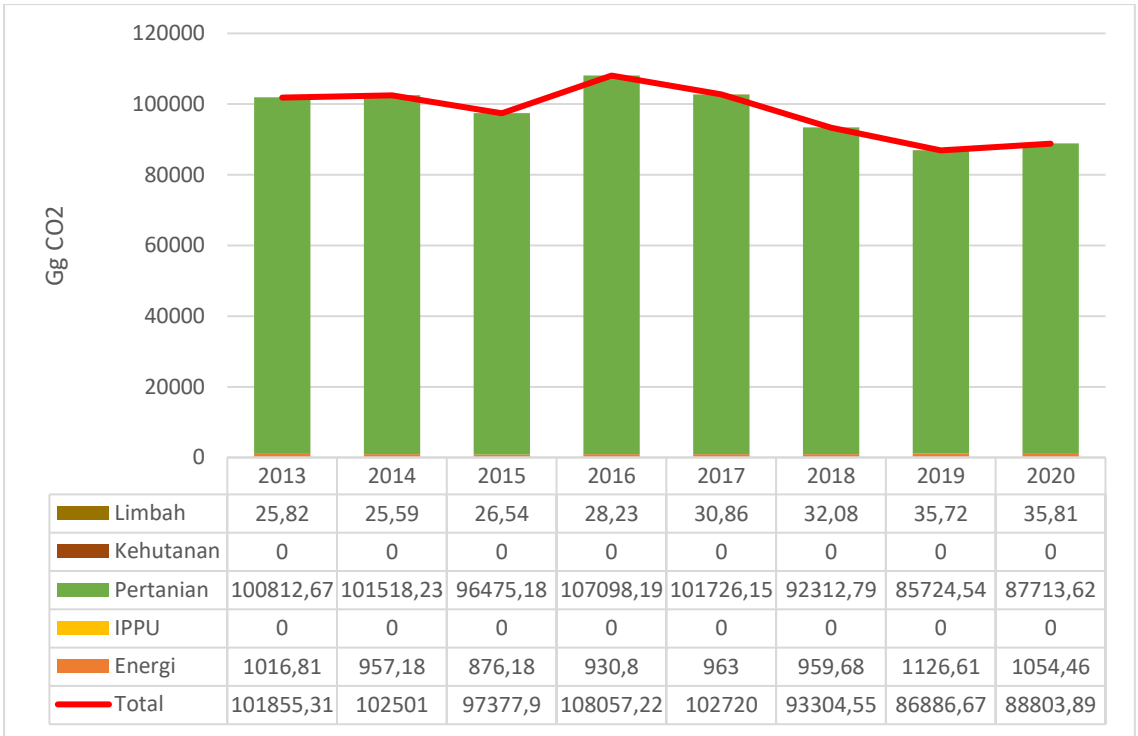
Sumber: BPBD Kabupaten Sragen, 2025

Indeks ketahanan daerah di Kabupaten Sragen pada tahun 2024 memperoleh skor 0,61 atau berkategori sedang. Artinya kapasitas daerah dalam manajemen kebencanaan telah berjalan secara baik,

namun masih memerlukan upaya tambahan untuk mengoptimalkan capaian fokus prioritas ketahanan daerah. Upaya perbaikan ketahanan daerah terus dilakukan oleh pemerintah daerah, terbukti nilai Indeks Ketahanan Daerah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024.

2.1.6.3 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi gas rumah kaca merupakan pencemaran udara yang dihasilkan oleh aktivitas penduduk yang menghasilkan gas rumah kaca seperti Karbondioksida (CO₂), Metana (CH₄), dan Nitrogen oksida (N₂O). Peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer berbanding lurus dengan peningkatan jumlah radiasi inframerah yang terjebak di atmosfer yang mendorong terjadinya pemanasan global (global warming). Kondisi tersebut menyebabkan efek gas rumah kaca, yaitu efek panas yang ditimbulkan radiasi inframerah yang berasal dari sinar matahari yang terserap dan dipancarkan kembali ke permukaan bumi oleh GRK yang terdapat pada atmosfer bumi. Emisi GRK berasal dari beberapa sector, yaitu energi, IPPU, Pertanian, dan limbah. Pada rentang tahun 2013-2020, sector pertanian merupakan sector penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca diikuti dengan sektor energi.



Gambar 2. 21 Emisi GRK Kabupaten Sragen Tahun 2013-2020



Gambar 2. 22 Emisi GRK Kabupaten Sragen Tahun 2013-2020

Sumber : https://pprk.bappenas.go.id/aksara/newdashboard/dashboard_kabupaten_kota/

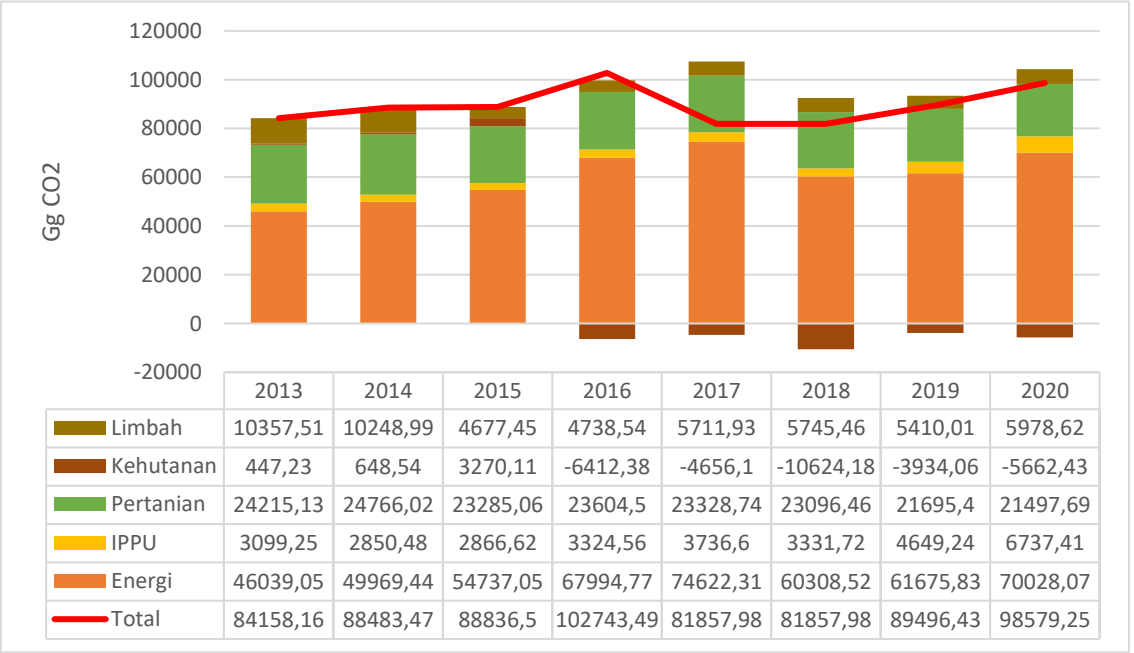
Tabel 2. 20 Aspek Emisi GRK Kabupaten Sragen Tahun 2013-2020

Aspek	2020	20211	2022	2023	2024
Energi	470,460713	1.358,543173	51.189,891173	51.205,589671	51.205,589671
Pengolahan Limbah	198,54834	1198,72785472	22.42,92785472	22.142,92785472	22.142,92785472
Lahan	862,07605	1.176,19495	-7.690,14705	-17.724,74505	-17.724,74505
Kawasan Pesisir dan Kelautan	0	0	0	0	0

Emisi GRK sector pertanian berasal dari beberapa sumber, seperti emisi metana (CH₄) dari budidaya padi sawah, emisi karbon dioksida (CO₂) akibat penambahan bahan bakar kapur dan pupuk urea, emisi dinitrogen oksida (N₂O) dari tanah, termasuk emisi N₂O tidak langsung dari penambahan N ke tanah karena penguapan/pengendapan, dan emisi non-CO₂ dari biomasa yang dibakar pada aktivitas pertanian. Dekomposisi bahan organik secara anaerobik pada lahan sawah mengemisikan gas metan ke atmosfer. Jumlah CH₄ yang diemisikan merupakan fungsi dari umur tanaman, rejim air sebelum dan selama periode budidaya, dan penggunaan bahan organik dan anorganik. Selain itu, emisi CH₄ juga dipengaruhi oleh jenis tanah, suhu, dan varietas padi. Emisi budidaya sawah di Kabupaten Sragen mengalami kecenderungan berkurang setiap tahunnya kecuali tahun 2016. Sementara itu pada sektor energi, emisi GRK berasal dari beberapa sumber, seperti pembakaran bahan bakar industri manufaktur dan konstruksi, pembakaran bahan bakar transportasi, pembakaran bahan bakar di rumah tangga/perumahan dan perkantoran, serta pembakaran bahan bakar di sektor lainnya (pertanian/perikanan). Sektor energi

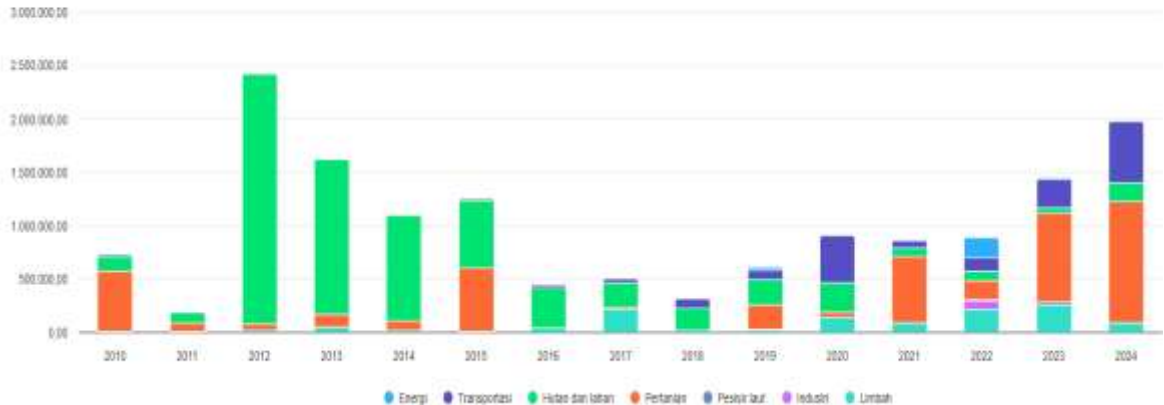
memiliki kecenderungan meningkat yang berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi energi akibat bertambahnya jumlah penduduk.

Apabila dibandingkan dengan emisi GRK Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang berlawanan. Emisi yang dihasilkan sektor pertanian di Kabupaten Sragen memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Emisi GRK sektor pertanian Kabupaten Sragen memiliki range nilai 85.000 – 110.000 Gg CO₂, sementara emisi GRK Provinsi Jawa Tengah memiliki range nilai 21.000 – 25.000 Gg CO₂. Sementara itu, emisi GRK sektor pertanian Kabupaten Sragen memiliki nilai yang mendekati nilai nasional. Kondisi ini terjadi karena Kabupaten Sragen merupakan lumbung pangan terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada Tingkat nasional, Kabupaten Sragen menjadi lumbung pangan terbesar urutan kesembilan. Luas lahan sawah di Kabupaten Sragen mencapai 40.129 Ha dan lahan kering seluas 54.026 Ha. Untuk mengurangi emisi GRK di sektor pertanian dapat dilakukan dengan melakukan beberapa mitigasi, seperti optimalisasi lahan, penerapan teknologi budidaya tanaman, pemanfaatan pupuk organik dan biopestisida, pengembangan area Perkebunan di lahan tidak berhutan/lahan terlantar/terdegradasi, pemanfaatan urine ternak dan limbah pertanian untuk biogas, dan sebagainya.



Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor

Proporsi penurunan emisi bersih berdasarkan pelaporan Rencana Aksi Daerah dari semua sektor pembangunan utama.

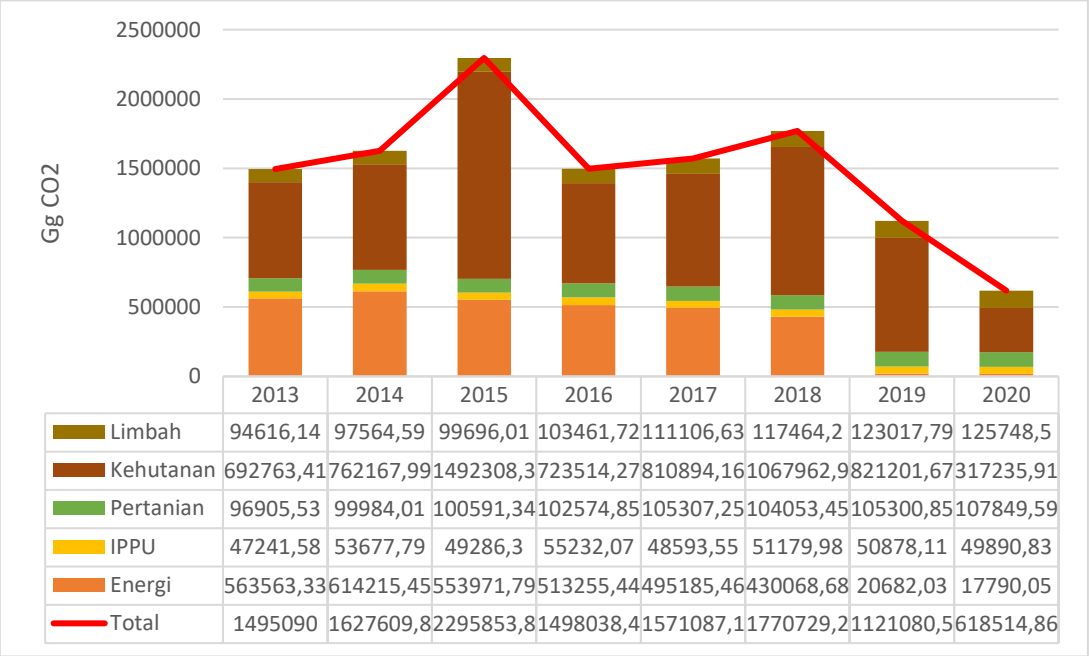


Gambar 2. 23 Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2020

Sumber : https://pprk.bappenas.go.id/aksara/newdashboard/dashboard_provinsi/

Tabel 2. 21 Aspek Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2020

Aspek	2020	2021	2022	2023	2024
Energi	826,27	2.425,68	189.262,16	19.954,63	580,24
Transportasi	450.810,53	72.999,76	123.495,73	266.665,88	575.073,30
Hutan dan Lahan	271.907,47	78.062,46	93.026,58	55.502,96	180.687,84
Pertanian	50.301,10	623.666,56	177.228,17	823.740,00	1.138.948,90
Pesisir Laut	1.311,05	3.569,60	11.567,47	30.961,45	632,21
Industri	0	0	77.027,31	0	0
Limbah	135.104,32	81.962,10	212.690,61	254.756,97	83.590,51



Gambar 2. 24 Emisi GRK Nasional Tahun 2013-2020

2.1.7 Demografi

2.1.7.1 Jumlah Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Sragen pada tahun 2024 adalah 1.004.761 jiwa yang terdiri dari 500.487 laki-laki dan 504.274 perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Sragen dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Sragen adalah 973.658 jiwa. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan atau *sex ratio* penduduk Kabupaten Sragen pada tahun 2024 adalah 99,00. Artinya, terdapat 99 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Sragen. Sex ratio penduduk Kabupaten Sragen pada tahun 2020 menunjukkan jumlah yang seimbang atau sempurna yaitu 100.

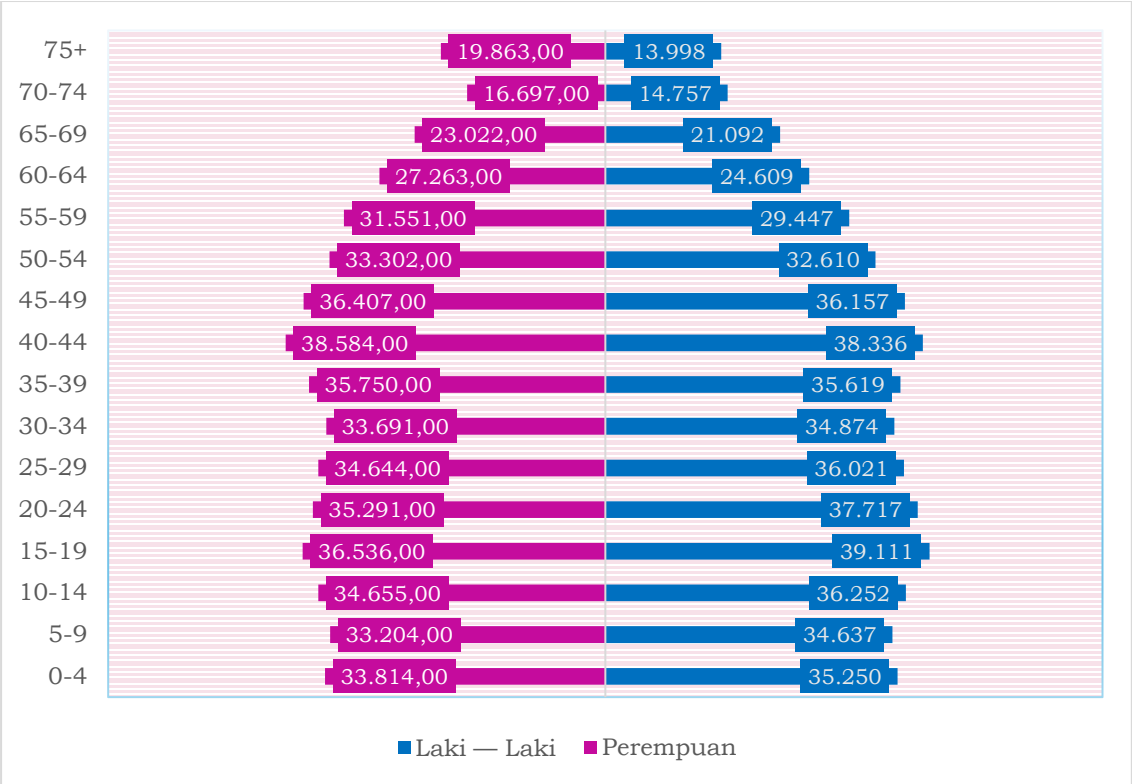
Tabel 2. 22 Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
2020	486.829	486.829	973.658	100,00
2021	490.067	493.574	983.641	99,29
2022	494.252	497.991	992.243	99,25
2023	496.948	500.537	997.485	99,29
2024	500.487	504.274	1.004.761	99,00

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

2.1.7.2 Komposisi Penduduk

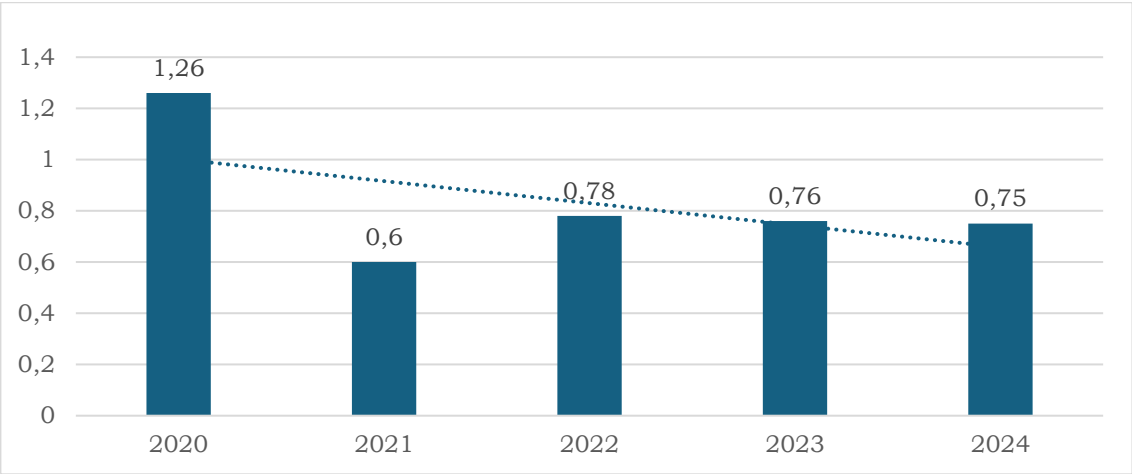
Piramida penduduk Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sragen masih didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 687.520 jiwa atau mencapai 68,43%. Kondisi ini mengarah pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta dengan meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut sangat menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Sragen.



Gambar 2. 25 Piramida Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

2.1.7.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Kabupaten Sragen memiliki laju pertumbuhan penduduk yang menurun dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 menuju 2021, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sragen mengalami penurunan signifikan sebesar 1,2 poin karena efek pandemi Covid-19.



Gambar 2. 26 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sragen 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

Angka kelahiran Total Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebesar 2,05 yang menunjukkan bahwa setiap pasangan atau keluarga

memiliki 2 orang anak, namun apabila melihat laju pertumbuhan penduduk terdapat tren penurunan angka kelahiran setiap tahunnya.

2.1.7.4 **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah terhadap luas wilayah tersebut. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk Kabupaten Sragen sebesar 1.010 jiwa. Hal ini berarti bahwa dalam 1 Km2 terdapat rata-rata 1.010 jiwa penduduk. Kepadatan penduduk Kabupaten Sragen sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Belum meratanya sebaran jumlah penduduk di masing-masing wilayah kecamatan menunjukkan masih terpusatnya kegiatan ekonomi di Kecamatan Sragen yang menjadi wilayah kecamatan terpadat.

Tabel 2. 23 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sragen Berdasarkan Kecamatan						
Kecamatan	Luas Km ²	2020	2021	2022	2023	2024
Kalijambe	48,47	1.086	1.091	1.019	1.101	1.106
Plupuh	50,41	1.010	1.022	856	1.046	1.058
Masaran	46,84	1.657	1.665	1.588	1.681	1.690
Kedawung	53,06	1.240	1.250	1.129	1.269	1.279
Sambirejo	45,82	889	896	781	911	918
Gondang	46,83	1.005	1.012	901	1.025	1.031
Sambungmacan	43,81	1.106	1.110	1.020	1.118	1.122
Ngrampal	39,84	1.066	1.075	942	1.091	1.100
Karangmalang	46,01	1.589	1.605	1.478	1.634	1.650
Sragen	27,64	2.517	2.512	2.511	2.543	2.552
Sidoharjo	49,03	1.178	1.186	1.051	1.202	1.211
Tanon	52,69	1.112	1.121	978	1.139	1.149
Gemolong	39,91	1.302	1.312	1.177	1.331	1.341
Miri	56,86	644	648	573	657	662
Sumberlawang	79,43	630	635	558	644	649
Mondokan	50,73	768	776	669	790	797
Sukodono	47,48	703	708	624	718	724
Gesi	40,81	558	563	488	572	578
Tangen	56,92	512	515	458	522	525
Jenar	71,98	409	411	375	415	418
Kabupaten Sragen	994,57	982	989	998	1.003	1.010

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

2.1.7.5 **Proyeksi Penduduk**

Proyeksi demografi berupaya untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah berdasarkan pengelompokannya, seperti data penduduk berdasarkan jumlah, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Sragen. Data tersebut dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui kondisi penduduk lanjut usia, penduduk usia sekolah, rasio

ketergantungan, dan bonus demografi. Berikut merupakan hasil proyeksi kependudukan di Kabupaten Sragen selama rentang tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 2. 24 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sragen

Kelompok Umur	Jumlah penduduk (jiwa)		Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-4	68.531	69.064	69.955	69.650	69.390	69.160	68.940
5-9	68.054	67.841	67.282	67.870	68.340	68.760	69.300
10-14	72.192	70.907	69.838	69.100	68.680	68.480	68.270
15-19	75.372	75.647	75.503	74.880	73.820	72.520	71.220
20-24	72.542	73.008	73.531	74.140	74.800	75.370	75.640
25-29	70.097	70.665	71.216	71.720	72.170	72.610	73.080
30-34	68.499	68.565	68.769	69.110	69.570	70.120	70.690
35-39	72.866	71.369	70.145	69.310	68.830	68.670	68.730
40-44	76.656	76.920	76.714	75.960	74.690	73.150	71.650
45-49	71.228	72.564	73.749	74.770	75.660	76.310	76.570
50-54	65.462	65.912	66.626	67.640	68.890	70.260	71.590
55-59	59.600	60.998	62.107	62.870	63.340	63.700	64.150
60-64	51.251	51.872	52.738	53.900	55.300	56.780	58.130
65-69	42.826	44.114	45.187	46.010	46.610	47.140	47.760
70-74	30.001	31.454	32.854	34.300	35.710	37.030	38.210
75+	32.308	33.861	35.610	37.450	39.460	41.590	43.830
Total	997.485	1.004.761	1.011.824	1.018.680	1.025.260	1.031.650	1.037.760
Sumber:	RPJPD	BPS	RPJPD	BPS	BPS	BPS	BPS

Sumber: BPS dan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2024-2045

Hasil proyeksi penduduk menunjukkan peningkatan dari segi jumlah hampir di semua kelompok umur, termasuk pada kelompok usia produktif yang berada pada usia 15-64 tahun. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan sebanyak 687.520 jiwa dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya hingga mencapai 699.490 pada tahun 2029. Implikasi dari semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif yakni semakin banyak pula penduduk usia kerja yang ada di Kabupaten Sragen. Banyaknya penduduk usia produktif yang diproyeksikan mencapai 67,40 persen pada tahun 2029 dari total keseluruhan jumlah penduduk dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut dapat diperoleh apabila jumlah penduduk usia produktif yang tersedia juga memiliki kualitas yang baik dan mampu mengoptimalkan kesempatan yang ada. Apabila kuantitas tidak sejalan dengan kualitas, maka dapat berpotensi menghadirkan permasalahan kependudukan dan turunannya di masa yang akan datang di Kabupaten Sragen.

2.1.7.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kondisi dan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama kurun waktu 3 tahun terakhir relatif stabil,

yaitu di angka 95%. Angka tersebut merupakan capaian indikator Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dengan indikator pembentuknya yaitu: Kepemilikan KTP Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk. Pada tahun 2022, Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan ditargetkan sebesar 72,13 dengan realisasi 69,13 (capaian kinerja 95,84%). Tahun 2023 dari target 74,45% dengan realisasi 71,03 (capaian kinerja 95,40%). Untuk tahun 2024 dari target 77,00% dengan realisasi 74,15% (capaian kinerja 96,30%).

Hingga tahun 2024, Persentase Kepemilikan KTP Elektronik dengan capaian 99,44%. Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dengan capaian 66,79%. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk, dengan capaian 56,21%. Beberapa penyebab belum optimalnya kepemilikan Dokumen Kependudukan antara lain : belum diberlakukannya Dokumen Administrasi Kependudukan sebagai dokumen persyaratan wajib dalam pelayanan instansi/lembaga lain, terutama Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran bagi penduduk umur lebih dari 18 tahun. Selain itu, masih rendahnya tingkat kesadaran penduduk untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan masih menjadi tantangan.

Kabupaten Sragen telah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sragen No 44 Tahun 2024 yang merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. GDPK dilakukan melalui 5 pilar:

- a. Pengendalian kuantitas penduduk, dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.
- b. Peningkatan kualitas penduduk, dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas penduduk utamanya di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- c. Pembangunan keluarga berkualitas, diwujudkan dengan menciptakan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni.

- d. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dilakukan dengan pengarahan mobilitas yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayahnya, pengelolaan urbanisasi, pencegahan terjadinya perpindahan paksa dan pemberian perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
- e. Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, dilakukan dengan penataan dan pengelolaan database kependudukan serta dengan melakukan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

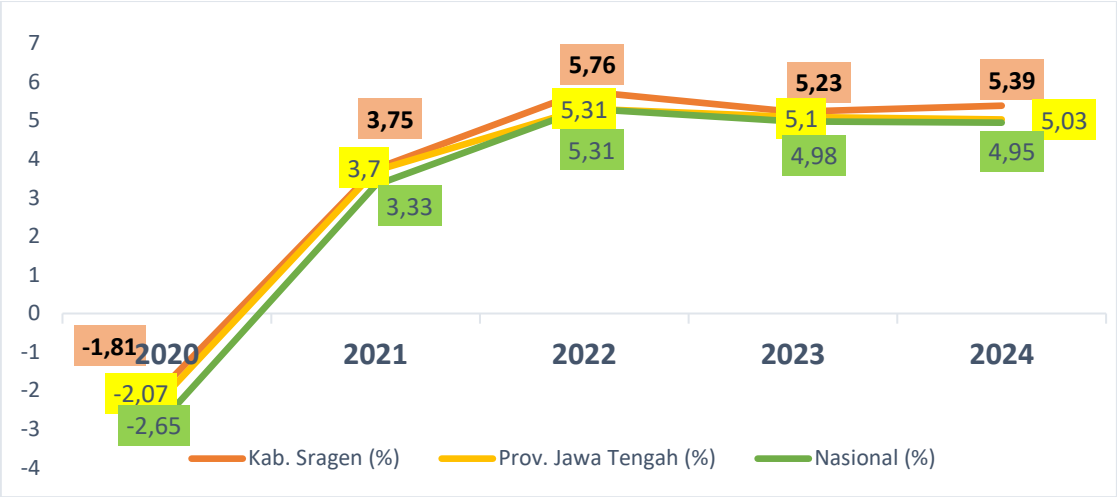
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi menggambarkan tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dan dapat menjadi indikasi bagi kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum. Kondisi ekonomi daerah dan masyarakat Kabupaten Sragen diantaranya dapat digambarkan melalui beberapa indikator makro seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka kemiskinan, Indeks Gini, dan laju inflasi. Berikut penjabaran berbagai data tersebut yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sragen.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan sebuah indikator makro pada rumpun perekonomian yang menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini berperan untuk menggambarkan tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan, dengan mengukur tingkat produktivitas suatu daerah dalam menghasilkan nilai ekonomi secara umum. Berikut adalah gambaran LPE Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional selama periode tahun 2020-2024.



Gambar 2. 27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025; BPS RI, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang cukup positif setelah pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada tahun 2020. Meskipun demikian, perekonomian Kabupaten Sragen mengalami kontraksi sebesar minus 1,81 persen pada tahun 2020. Kontraksi ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas perekonomian secara umum sebagai akibat dari kebijakan pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi penyebaran virus Covid-19. Perekonomian Kabupaten Sragen setelahnya mencatatkan capaian yang cukup positif dengan pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut.

Pada tahun 2024 sendiri, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen bahkan melampaui angka provinsi maupun nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi Kabupaten Sragen pasca pandemi berjalan dengan baik dan lebih cepat jika dibandingkan wilayah lain. Keberhasilan ini juga menunjukkan efektivitas strategi pemulihan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Sragen dan didukung oleh berbagai sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya dibandingkan dengan target RKPD, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 telah mencapai 98,00% dari target RKPD tahun 2024 sebesar 5,50. Kinerja paling rendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -1,81.

Tabel 2. 25 Target RKPD dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Target RKPD	Sragen	Jawa Tengah	Nasional
2020	6,50-6,75	-1,81	-2,65	-2,07
2021	6,50-6,75	3,75	3,32	3,70
2022	4,29	5,76	5,31	5,31
2023	5,3	5,23	4,97	5,05
2024	5,50	5,39	4,95	5,03

Sumber Data: BPS dan Bapperida, 2025

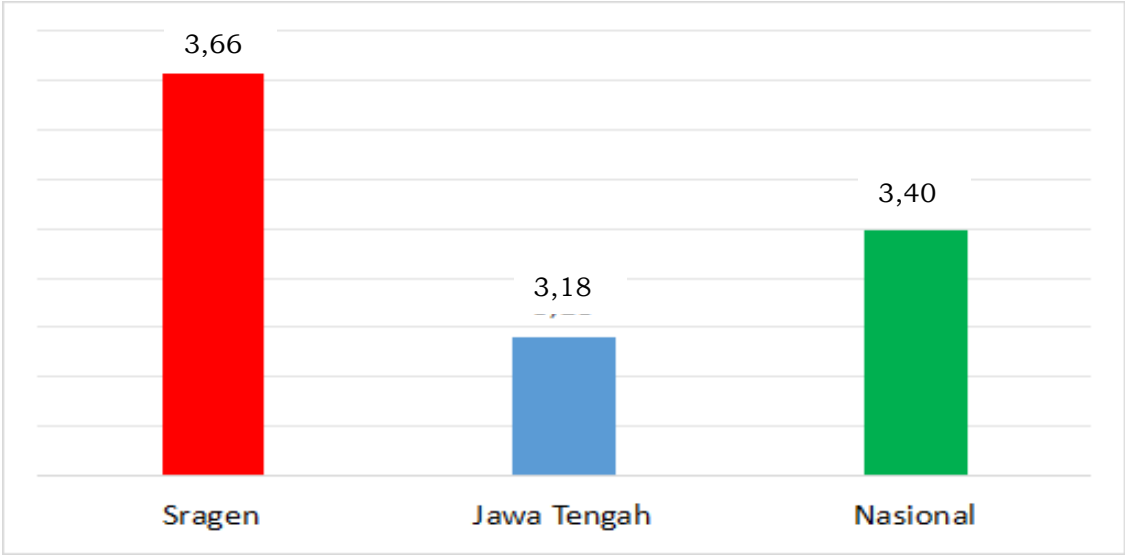
Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen beserta kabupaten sekitar menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen periode 2020-2024 relatif lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar sebagaimana terlihat dalam tabel. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar 0,25 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen 5,39 sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah 5,14. Sebaliknya, selisih paling kecil terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,01 dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen 5,23 dan rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah 5,24 seperti terlihat dalam tabel.

Tabel 2. 26 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Boyolali	-1,24	4,63	6,33	5,63	4,64
Klaten	-1,18	3,82	5,90	5,70	5,11
Sukoharjo	-1,70	3,82	5,61	5,06	4,97
Wonogiri	-1,41	3,35	5,63	4,98	4,93
Karanganyar	-1,87	3,57	5,87	5,53	5,54
Surakarta	-1,74	4,01	6,25	5,57	5,61
Sragen	-1,81	3,75	5,76	5,23	5,39
Ngawi	-1,69	2,55	3,19	4,49	4,64
Grobogan	-1,57	3,78	5,98	4,98	5,41
Rata-rata wilayah sekitar	-1,58	3,70	5,61	5,24	5,14

Sumber Data: BPS, 2025

Dalam waktu lima tahun tersebut, secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen juga relatif baik dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen selama lima tahun mencapai 3,66 sedangkan rata-rata Jawa Tengah sebesar 3,18 dan Nasional mencapai 3,40. Berikut adalah gambar rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional dalam lima tahun terakhir (2020-2024).

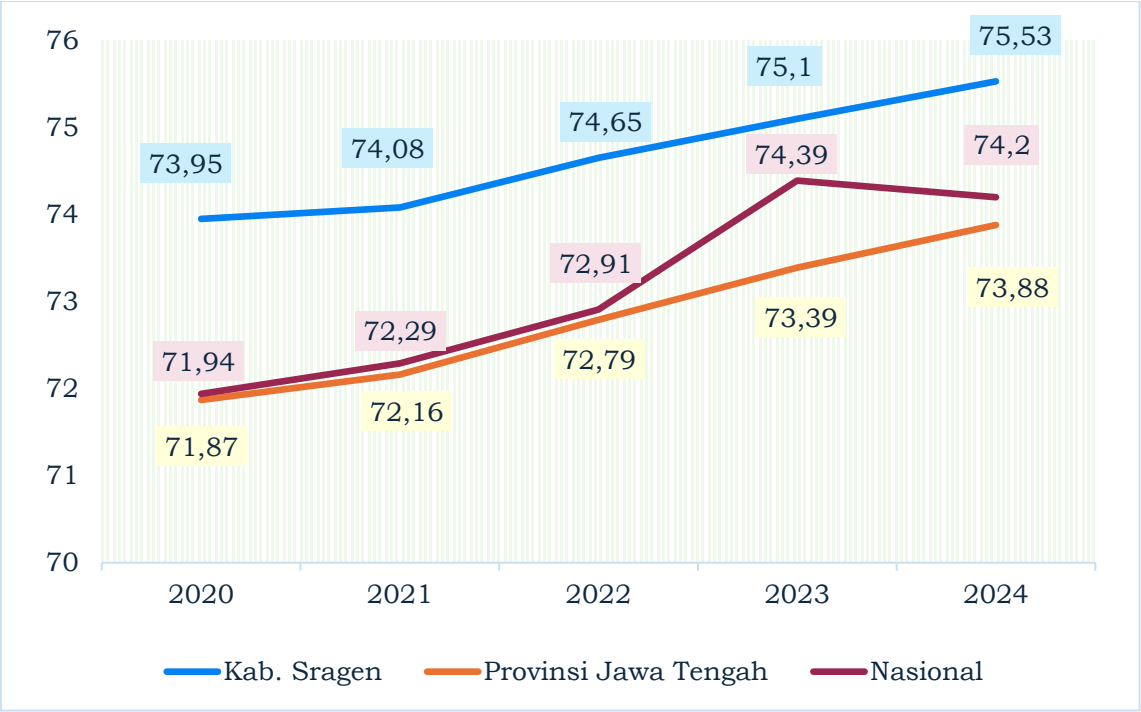


Gambar 2. 28 Rerata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional dalam Lima Tahun Terakhir (2020-2024)

Sumber Data: BPS, 2025

2.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat hasil pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. IPM dihitung dengan didasarkan pada tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dikonversi menjadi Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. UHH didasarkan pada umur panjang merupakan sesuatu yang dapat terwujud jika manusia mendapatkan nutrisi dan kesehatan yang baik. Sedangkan RLS dan HLS merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal, serta pengeluaran per kapita mencerminkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah capaian IPM Kabupaten Sragen selama periode 2020-2024.



Gambar 2. 29 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025; BPS RI, 2025

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sragen selama periode 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 1,58 poin dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,53 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi maupun nasional.

Di tingkat provinsi, IPM meningkat sebesar 2,01 poin dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,69 persen, sedangkan di tingkat nasional, kenaikan IPM tercatat sebesar 2,26 poin dengan pertumbuhan 0,78 persen. Capaian IPM Kabupaten Sragen berada di atas rata-rata provinsi dan nasional dalam lima tahun terakhir. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kondisi ini juga menandakan adanya perbaikan yang konsisten dalam kualitas hidup masyarakat.

Dibandingkan target RKPD, dari tahun 2020-2024, IPM Kabupaten Sragen selalu lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan kinerja IPM Kabupaten Sragen sangat baik. Selisih capaian terbesar (1,88) terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi IPM sebesar 74,08 sedangkan

target RKPD 72,20. Sedangkan selisih capaian terendah (0,40) terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi IPM sebesar 74,65 dan target RKPD 74,25.

Tabel 2. 27 Target dan Capaian IPM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Target RKPD	Sragen	Jawa Tengah	Nasional
2020	72,10	73,95	71,87	71,94
2021	72,20	74,08	72,16	72,29
2022	74,25	74,65	72,79	72,91
2023	74,72	75,10	73,39	74,39
2024	75,21	75,53	73,88	75,02

Sumber Data: BPS, 2025

Selanjutnya IPM Kabupaten Sragen tahun 2020-2024 dibandingkan dengan wilayah sekitar untuk melihat posisi pembangunan manusia Kabupaten Sragen di antara kabupaten/Kota lainnya sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Secara garis besar, capaian IPM Kabupaten Sragen lebih rendah dibanding rata-rata wilayah sekitar. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar 1,13 poin sedangkan selisih terendah terjadi pada 2020 sebesar 0,44.

Tabel 2. 28 IPM Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Boyolali	74,25	74,40	74,97	75,41	75,96
Klaten	75,56	76,12	76,95	77,59	78,16
Sukoharjo	76,98	77,13	77,94	78,65	79,30
Wonogiri	70,25	70,49	71,04	71,97	72,55
Karanganyar	75,86	75,99	76,58	77,31	78,11
Grobogan	69,87	70,41	70,97	71,49	72,02
Surakarta	82,21	82,62	83,08	83,54	84,40
Ngawi	70,54	71,04	71,75	73,28	73,91
Sragen	73,95	74,08	74,65	75,10	75,53
Rata-Rata	74,39	74,70	75,33	76,04	76,66

Sumber Data: BPS, 2025

Analisa pertumbuhan IPM sebelum dan sesudah pandemi covid-19 menunjukkan sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, IPM Kabupaten Sragen sebesar 73,43 sedangkan setelah pandemi covid-19 atau pada tahun 2024, IPM Kabupaten mencapai 75,53. Data IPM Kabupaten Sragen sebelum dan setelah pandemi dapat dilihat pada tabel.

Kinerja di atas lebih baik dibanding capaian provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, IPM provinsi dan nasional masing-masing 71,73 dan 71,92. Sedangkan setelah pandemi covid-19 IPM provinsi dan nasional masing-masing sebesar 73,88 dan 75,02. Dengan demikian setelah pandemi covid-19 terjadi peningkatan IPM provinsi sebesar 2,15 poin (3,00%) dan terjadi peningkatan IPM nasional sebesar 3,10 poin (4,31%). Peningkatan IPM Kabupaten Sragen setelah pandemi covid-19 sebesar 2,10 poin (2,86%) lebih besar.

Tabel 2. 29 Pertumbuhan IPM Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Uraian	Sebelum pandemi covid-19 (2019)	Setelah pandemi covid-19 (2024)	Perubahan	
			Poin	Persentase
Sragen	73,43	75,53	2,10	2,86
Provinsi	71,73	73,88	2,15	3,00
Nasional	71,92	75,02	3,10	4,31

Sumber Data: BPS, 2025

Dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan wilayah sekitar, analisis pertumbuhan sebelum dan setelah pandemi covid-19 menunjukkan pertumbuhan IPM Kabupaten Sragen sebesar 2,10 poin (2,86%) lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan IPM wilayah sekitar yang mencapai 2,51 poin (3,38%). Data pertumbuhan IPM Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 30 Pertumbuhan IPM Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Uraian	Sebelum pandemi covid-19 (2019)	Setelah pandemi covid-19 (2024)	Perubahan	
			Poin	Persentase
Boyolali	73,80	75,96	2,16	2,93
Klaten	75,29	78,16	2,87	3,81
Sukoharjo	76,84	79,30	2,46	3,20
Wonogiri	69,98	72,55	2,57	3,67
Karanganyar	75,89	78,11	2,22	2,93
Grobogan	69,86	72,02	2,16	3,09
Surakarta	81,86	84,40	2,54	3,10
Ngawi	70,41	73,91	3,50	4,97
Sragen	73,43	75,53	2,10	2,86
Rata-Rata	74,15	76,66	2,51	3,38

Sumber Data: BPS, 2025

Indikator komposit IPM terdiri dari: Umur Harapan Hidup (tahun) menggambarkan kualitas kesehatan penduduk; besarnya nilai Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) menggambarkan tingkat pendidikan; dan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi perkapita/bulan menggambarkan kesejahteraan.

1) **Umur Harapan Hidup (UHH)**

UHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data UHH di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024 UHH di Kabupaten Sragen sebesar 76,18, lebih tinggi daripada target daerah sebesar 76,15 dan lebih tinggi dibanding nilai provinsi sebesar 74,93 dan nasional sebesar 72,39. Rata-rata pertumbuhan UHH dalam tahun 2020-2024 sebesar 0,12 tahun, lebih rendah dibandingkan provinsi yang mencapai 0,14 tahun dan nasional yang mencapai 0,23 %.

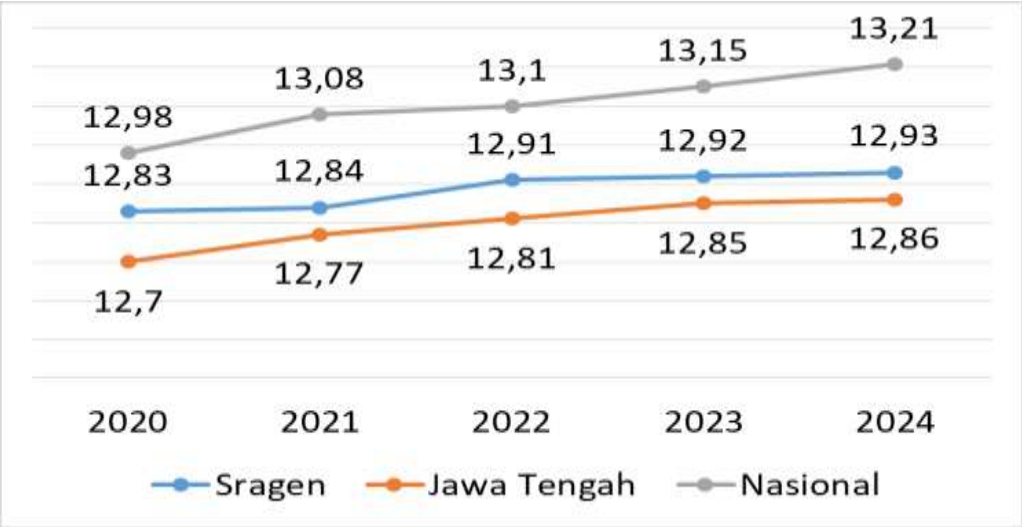


Gambar 2. 30 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber Data : BPS, 2025

2) **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Pada tahun 2024 HLS di Kabupaten Sragen sebesar 12,93, lebih rendah daripada target daerah sebesar 12,94 dan lebih rendah dibanding nilai nasional sebesar 13,21 tapi lebih tinggi dibanding nilai provinsi sebesar 12,86. Rata-rata Pertumbuhan HLS Kabupaten Sragen tahun 2020-2024 sebesar 0,02 tahun lebih rendah dibanding pertumbuhan HLS provinsi dan nasional masing-masing 0,04 tahun dan 0,06 tahun.

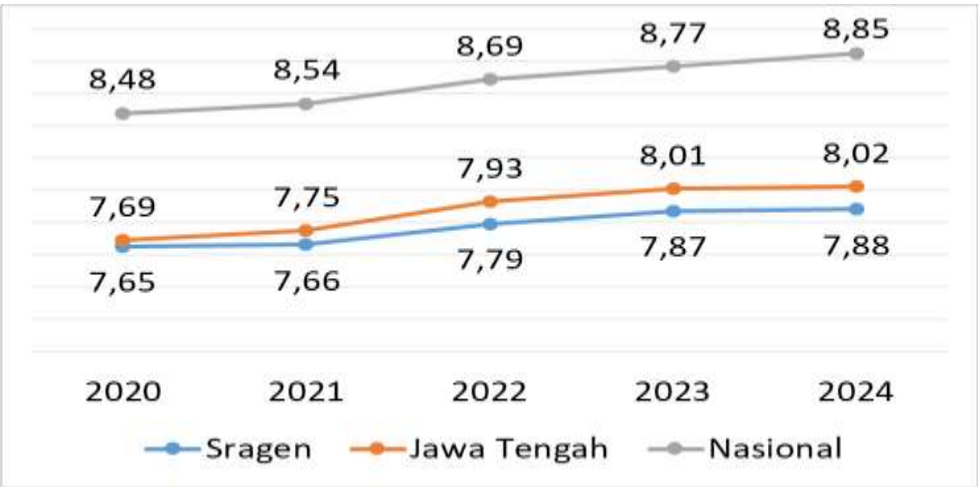


Gambar 2. 31 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber Data : BPS, 2025

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

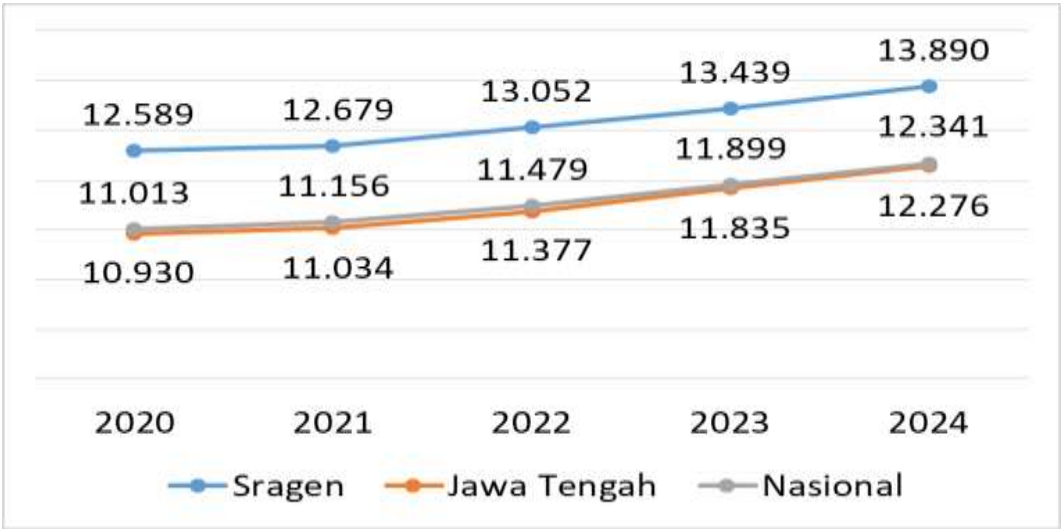
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional dari *United Nations Development Program* (UNDP). RLS Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebesar 7,87 tahun, lebih rendah daripada target daerah sebesar 8,15 dan lebih rendah dibanding nilai provinsi sebesar 8,01 dan nilai nasional sebesar 8,77. Rata-rata pertumbuhan RLS Kabupaten Sragen dalam tahun 2019-2023 sebesar 1,77%, lebih tinggi dari provinsi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,56% dan nasional sebesar 1,27%.



Gambar 2. 32 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sumber Data: BPS Jawa Tengah, 2025

4) Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Perkapita/tahun



Gambar 2. 33 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Perkapita Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

Sumber Data : BPS, 2025

Besarnya pengeluaran konsumsi perkapita dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan, dan menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita Kabupaten Sragen pada tahun 2024 sebesar Rp 13.890.000,00 lebih tinggi dibanding dengan target RKPD yaitu sebesar Rp 13.237.000,00. Pengeluaran perkapita ini telah berada di atas provinsi (Rp 12.276.000,00) dan nasional (Rp 12.341.000,00).

Analisis pertumbuhan PKP/tahun sebelum dan sesudah pandemi covid-19 menunjukkan bahwa sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, PKP/tahun Kabupaten Sragen sebesar Rp 12.720.000,00 sedangkan setelah pandemi covid-19 atau pada tahun 2024, PKP/tahun Kabupaten Sragen mencapai Rp 13.890.000,00, terjadi peningkatan PKP/tahun sebesar Rp 1.170.000,00 (9,20%). Kinerja tersebut lebih rendah dibanding capaian provinsi dan nasional.

Sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, PKP/tahun provinsi dan nasional masing-masing Rp 11.102.000 dan Rp 11.299.000. Sedangkan setelah pandemi covid-19, PKP/tahun provinsi sebesar Rp 12.276.000,00 atau naik sebesar Rp 1.174.000,00 (10,57%) dan nasional sebesar Rp 12.341.000,00 atau naik sebesar Rp 1.042.000,00 (9,22%).

Tabel 2. 31 Pertumbuhan PKP/tahun Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 (Ribu Rupiah)

Uraian	Sebelum pandemi covid-19 (2019)	Setelah pandemi covid-19 (2024)	Perubahan	
			PKP/tahun	Persentase
Sragen	12.720	13.890	1.170	9,20
Jawa Tengah	11.102	12.276	1.174	10,57
Nasional	11.299	12.341	1.042	9,22

Sumber Data: BPS, 2025

Dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan wilayah sekitar, analisis pertumbuhan sebelum dan setelah pandemi covid-19 menunjukkan pertumbuhan PKP/tahun Kabupaten Sragen sebesar Rp 1.170.000,00 (9,20%) lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan PKP/tahun wilayah sekitar yang mencapai Rp 1.187.000,00 (9,96%). Data pertumbuhan PKP/tahun Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 32 Pertumbuhan PKP/tahun Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 (Ribu Rupiah)

Kabupaten /Kota	Sebelum pandemi covid-19 (2019)	Setelah pandemi covid-19 (2024)	Perubahan	
			PKP/ tahun	Persentase
Boyolali	13.079	14.195	1.116	8,53
Klaten	12.074	13.513	1.439	11,92
Sukoharjo	11.557	12.758	1.201	10,39
Wonogiri	9.426	10.634	1.208	12,82
Karanganyar	11.569	12.732	1.163	10,05
Surakarta	15.049	16.291	1.242	8,25
Grobogan	10.350	11.548	1.198	11,57
Ngawi	11.468	12.414	946	8,25
Sragen	12.720	13.890	1.170	9,20
Rata-Rata	11.921	13.108	1.187	9,96

Sumber Data: BPS, 2025

Rata-rata pertumbuhan pengeluaran perkapita daerah Kabupaten Sragen dalam tahun 2020-2024 sebesar Rp 325.000,00, lebih rendah dari provinsi dan nasional dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing Rp 337.000,00 dan Rp 332.000,00.

Selama periode 2020-2024, ketiga aspek pembentuk IPM Kabupaten Sragen baik kesehatan pendidikan dan ekonomi meningkat menuju kondisi ideal. Namun demikian, pembangunan bidang pendidikan yang direpresentasikan oleh komponen HLS dan RLS perlu ditingkatkan dan nilainya lebih rendah dibanding nasional. Oleh karena itu, program-program pembangunan pendidikan dasar perlu ditingkatkan untuk meningkatkan HLS dan RLS agar lebih baik.

Capaian komponen-komponen pembentuk IPM Kabupaten Sragen selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 33 Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Sragen Beserta Kompositnya Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	73,95	74,08	74,65	75,1	75,53
Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,71	75,79	75,87	75,97	76,18
Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,83	12,84	12,91	12,92	12,93
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,65	7,66	7,79	7,87	7,88
Pengeluaran (Rp. Juta/kapita)	12.589	12.679	13.052	13.439	13.890

Sumber Data: BPS, 2025

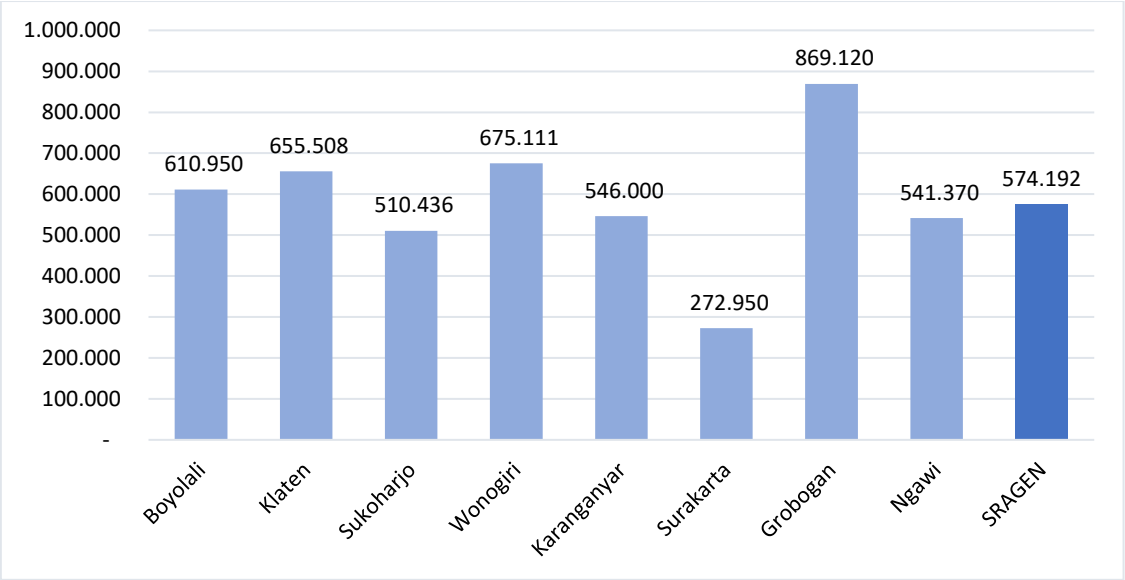
2.2.1.3 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting dalam rangka pembangunan daerah adalah berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi lapangan kerja.

Aspek kesejahteraan masyarakat ditinjau dari **ketenagakerjaan**. Angkatan kerja mencerminkan jumlah penduduk yang secara aktual siap memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah/negara. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebanyak 542.178 orang atau bertambah 48.559 orang dibanding tahun 2022. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada tahun 2023 sebanyak 521.215 orang atau bertambah 50.759 orang dibanding tahun 2022.

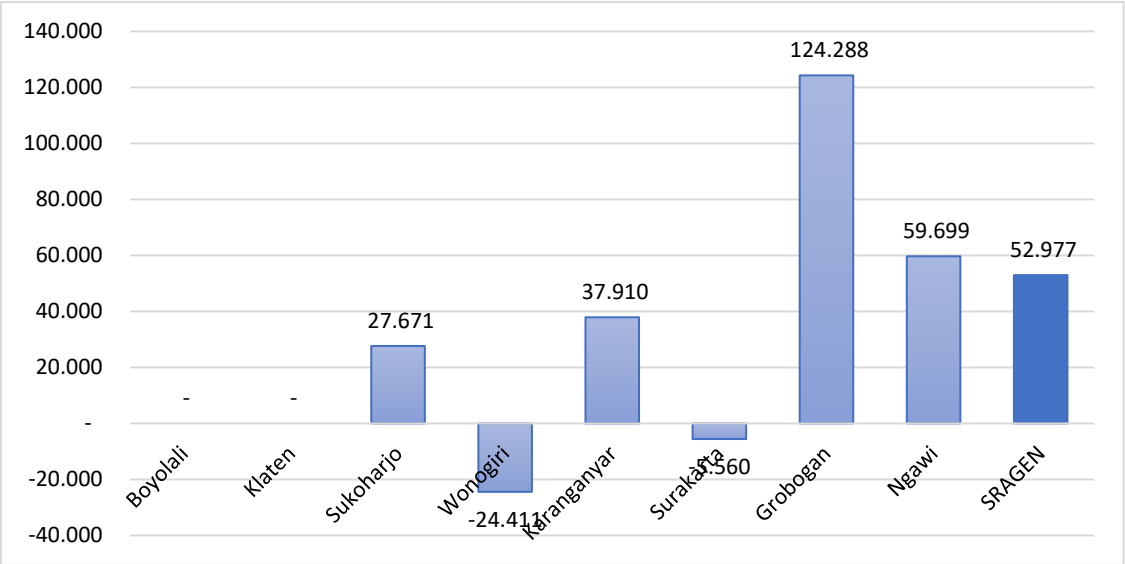
Pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sragen sebanyak 595.184 orang atau bertambah 53.006 orang dibanding tahun 2023. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada tahun 2024 sebanyak 574.192 orang atau bertambah 52.977 orang dibanding tahun 2023.

Dibanding daerah sekitar, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Sragen berada pada posisi ke-5 terbanyak. Surakarta memiliki 272.950 orang bekerja sebagai daerah dengan jumlah penduduk bekerja paling sedikit. Grobogan memiliki jumlah penduduk bekerja terbanyak atau 869.120 orang. Jumlah penduduk bekerja pada tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada gambar.



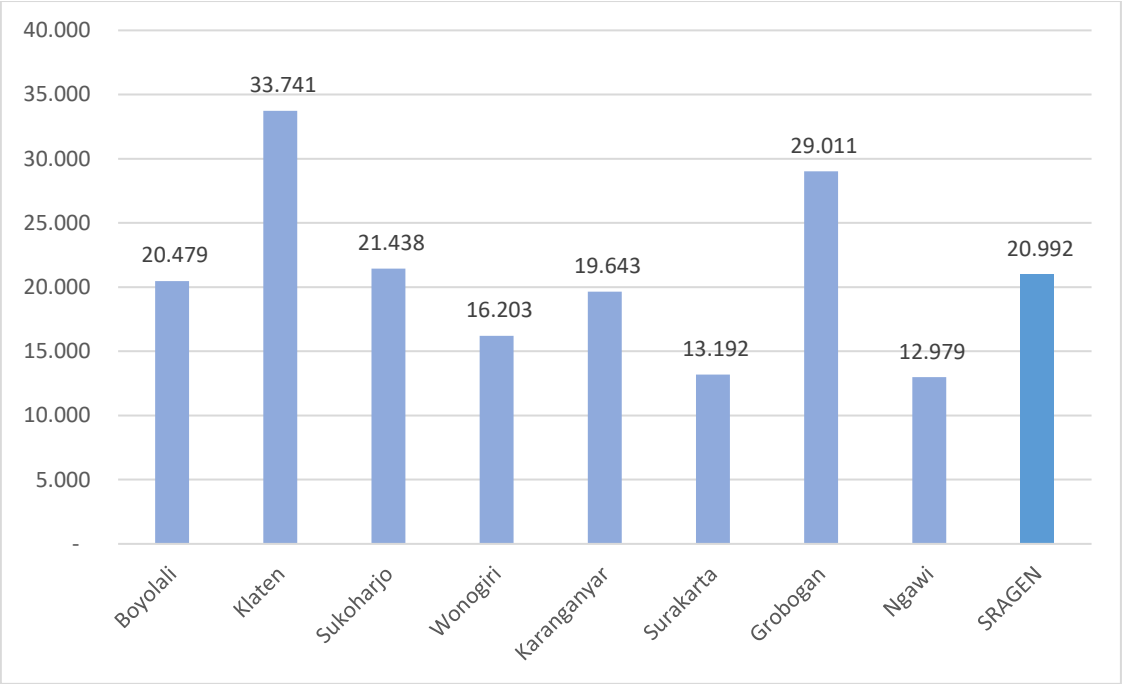
Gambar 2. 34 Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Sragen dan Wilayah sekitar Tahun 2024
Sumber Data: BPS, 2025

Pada tahun 2024, peningkatan penduduk bekerja di Kabupaten Sragen sebesar 52.977 orang termasuk tinggi dibanding daerah sekitar meski masih di bawah Grobogan yang memiliki peningkatan terbesar mencapai 124.288 orang, dan Ngawi sebesar 59.699 orang. Di antara Kabupaten/Kota wilayah sekitar, Wonogiri mengalami penurunan penduduk bekerja cukup tinggi mencapai 24.411 orang. Penurunan penduduk bekerja selengkapnya dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2. 35 Penurunan Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2023-2024
Sumber Data: BPS, 2025

Sementara itu, jumlah pengangguran di Kabupaten Sragen pada tahun 2024 sebanyak 20.992 orang, mengalami kenaikan 89 orang dibanding tahun 2023 dengan jumlah pengangguran 20.903 orang. Jumlah tersebut termasuk kategori sedang dibanding daerah sekitar. Jumlah pengangguran selengkapnya dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2. 36 Jumlah Pengangguran Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2024

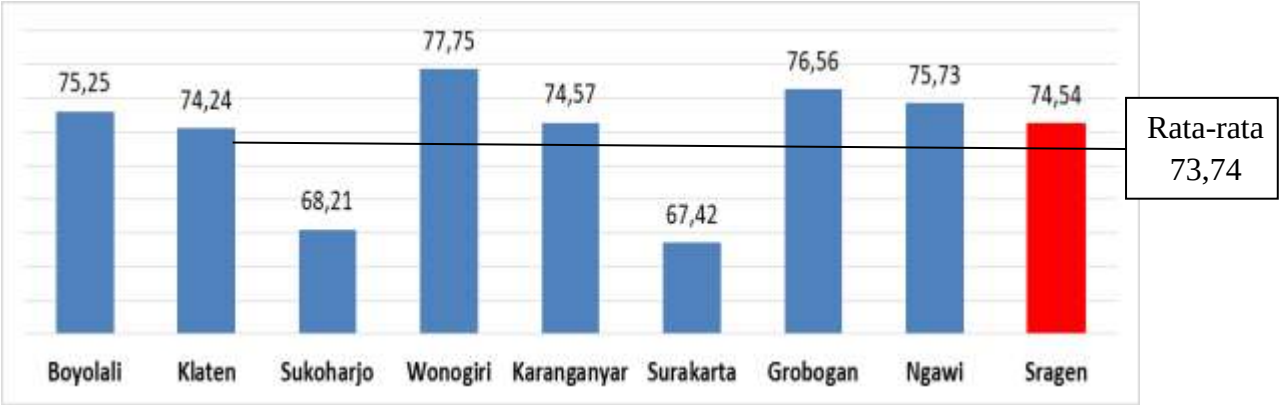
Sumber Data: BPS, 2025

Sejalan dengan naiknya jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada tahun 2023, TPAK Kabupaten Sragen mencapai 68,60 persen artinya dari jumlah penduduk angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) sebanyak 68,60 persen diantaranya bekerja, mencari kerja dan tidak bekerja sedangkan sisanya sebanyak 31,40 persen mengurus rumah tangga, sekolah atau lainnya. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Sragen mencapai 74,54 persen artinya dari jumlah penduduk angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) sebanyak 74,54 persen diantaranya bekerja, mencari kerja dan tidak bekerja sedangkan sisanya sebanyak 25,46 persen mengurus rumah tangga, sekolah atau lainnya. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

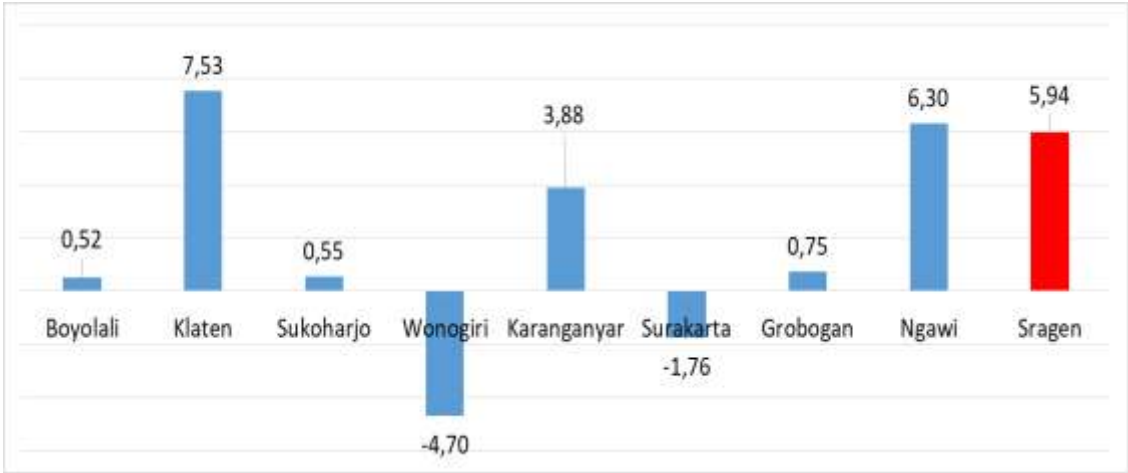
Dibandingkan wilayah sekitar, TPAK Kabupaten Sragen termasuk rendah. Nilainya berada dibawah rata-rata wilayah sekitar yang mencapai 71,70. Data TPAK selengkapnya dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2. 37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2024

Sumber Data: BPS, 2025

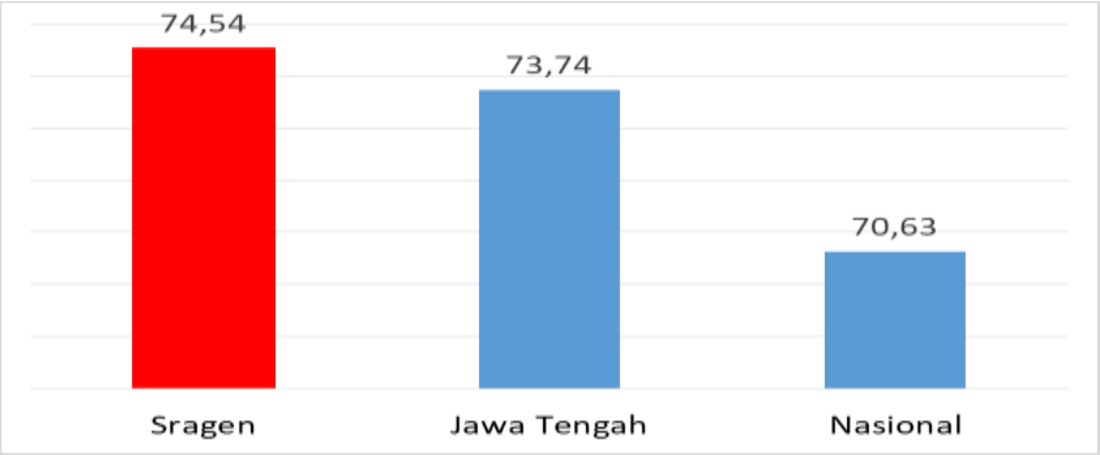
Perubahan TPAK dari tahun 2023 ke tahun 2024 menunjukkan Kabupaten Sragen dengan peningkatan sebesar 5,94 merupakan salah satu yang terbesar. Kondisi tersebut menunjukkan ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan dibanding wilayah lain. Perubahan TPAK di wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 38 Perubahan TPAK di Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar Tahun 2024

Sumber Data: BPS, 2025

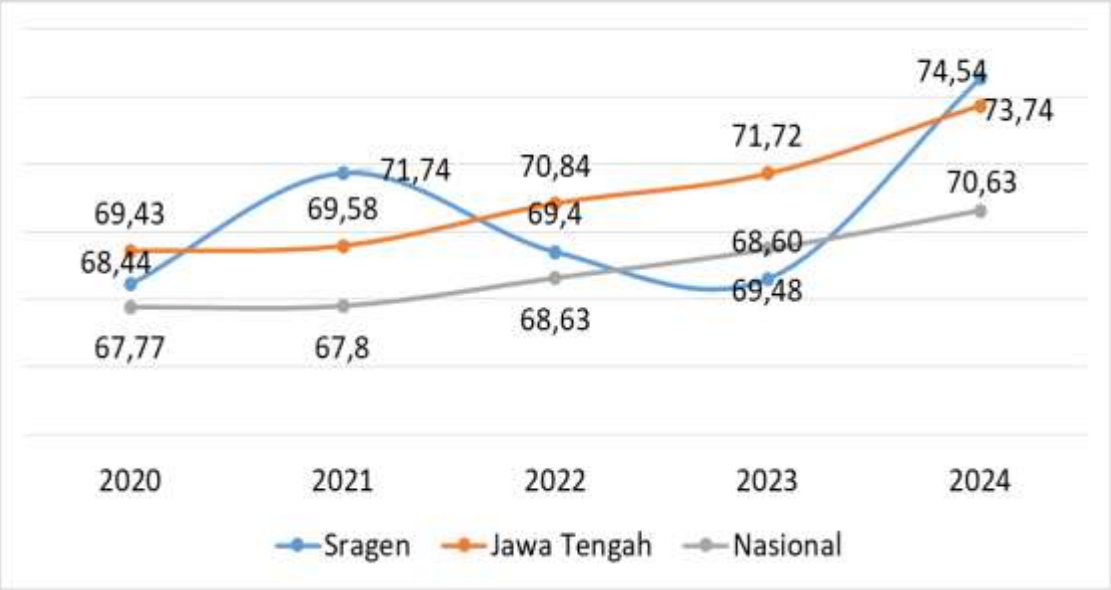
Dibandingkan TPAK Jawa Tengah dan Nasional, TPAK Kabupaten Sragen lebih tinggi. Tingginya TPAK di Kabupaten Sragen menunjukkan tingginya dukungan ketersediaan angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi seiring tingginya nilai investasi dan layanan investasi yang baik. Perbandingan TPAK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 39 TPAK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Sumber Data: BPS, 2025

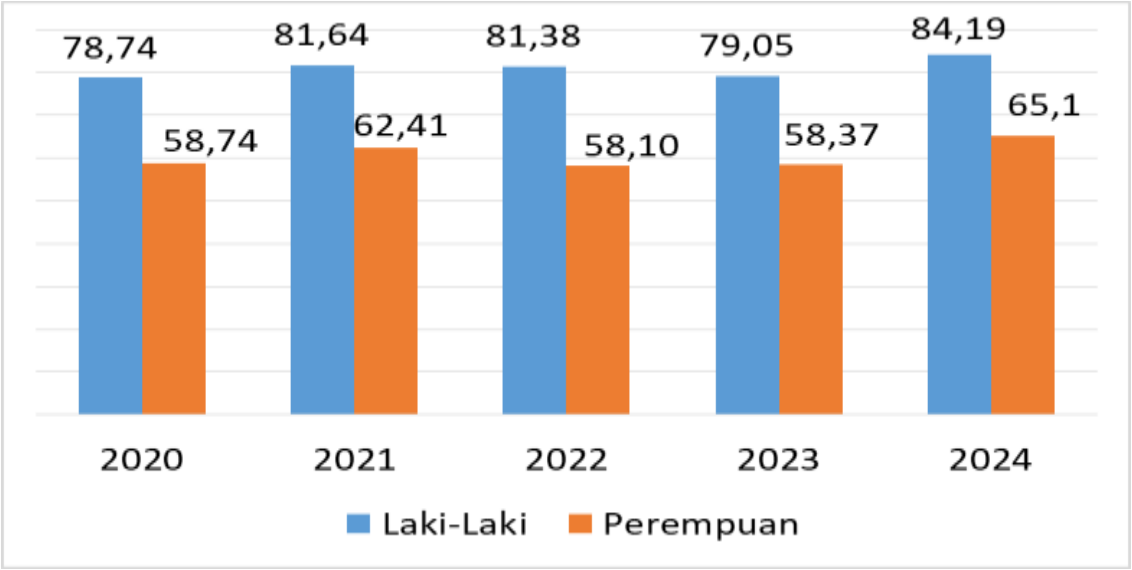
Selama periode 2020-2024, TPAK Kabupaten Sragen menunjukkan nilai yang fluktuatif. Penurunan tersebut dipicu berkurangnya usia produktif yang ada di Kabupaten Sragen. TPAK Jawa Tengah dan nasional menunjukkan peningkatan. TPAK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan nasional pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 40 TPAK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber Data: BPS, 2025

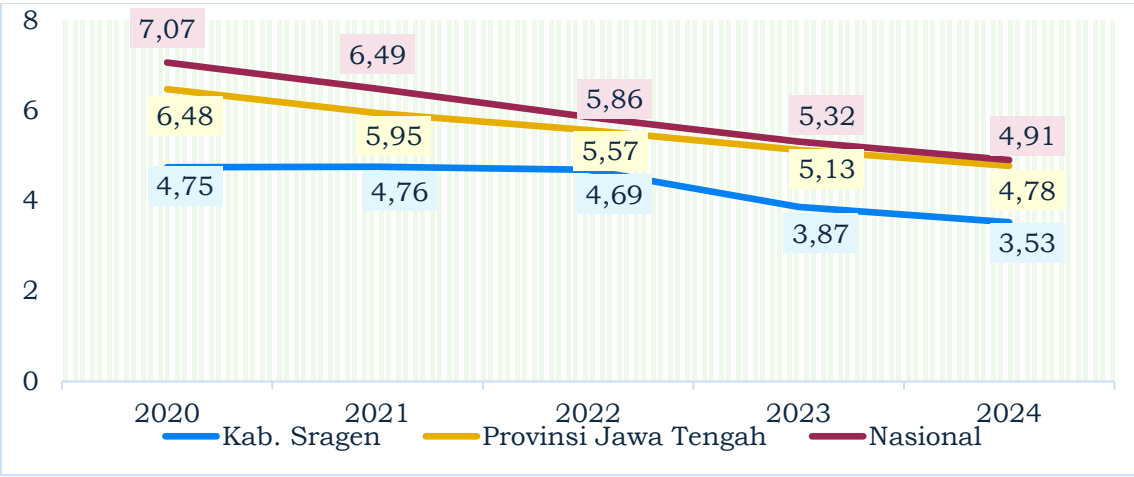
Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan yang signifikan antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada tahun 2024, TPAK laki-laki tercatat sebesar 84,19 persen sementara TPAK perempuan hanya mencapai 65,10 persen. Sesuai dengan TPAK Kabupaten, TPAK laki-laki dan perempuan juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. TPAK laki-laki pada tahun 2023 mencapai 79,05 sedangkan TPAK perempuan mencapai 58,37.



Gambar 2. 41 TPAK Kabupaten Sragen Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Sumber Data: BPS Sragen, 2025

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator makro kesejahteraan ekonomi yang mengukur proporsi antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah pengangguran suatu wilayah dalam tahun tertentu. Semakin rendah TPT suatu daerah tipikalnya mengindikasikan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat wilayah yang semakin baik dengan asumsi masyarakat yang terserap dalam pasar kerja daerah memiliki tingkat pengupahan yang sesuai dengan regulasi pengupahan daerah yang berlaku. Dengan asumsi ini, penggambaran dan interpretasi atas data TPT harus dilakukan secara hati-hati, mengingat rendahnya TPT suatu wilayah belum secara pasti menggambarkan sejahteranya masyarakat suatu wilayah. Oleh karenanya, penyajian dan interpretasi atas data TPT harus dilakukan dengan melihat indikator-indikator lain yang relevan dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat kemiskinan dan indeks gini. Berikut merupakan data TPT Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional pada tahun 2020-2024.



Gambar 2. 42 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025; BPS RI, 2025

Dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Sragen menunjukkan tren yang menurun. TPT di Kabupaten Sragen meningkat pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Secara keseluruhan, periode 2020-2024 mencatat penurunan TPT sebesar 1,22 poin dengan rata-rata penurunan sebesar 6,88 persen.

Pada periode yang sama, TPT di tingkat provinsi dan nasional juga mengalami penurunan. TPT provinsi turun sebesar 1,7 poin dengan persentase penurunan 2,85 persen, sementara TPT nasional menurun sebesar 2,16 poin dengan penurunan 8,71 persen dibandingkan dengan kondisi awal. Mengingat data awal tahun 2020 bertepatan dengan masa pandemi Covid-19, penurunan TPT ini mencerminkan pemulihan yang cukup signifikan dalam sektor ketenagakerjaan daerah.

Data ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Sragen telah cukup terserap oleh pasar kerja, mencerminkan peningkatan kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun, upaya lebih lanjut tetap diperlukan guna mengoptimalkan kondisi ini sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Sragen dapat terus ditekan hingga mencapai tingkat yang lebih minimal.

Selanjutnya dibandingkan dengan target RKPD, kinerja penurunan pengangguran Kabupaten Sragen menunjukkan kinerja yang cukup baik. Selama periode lima tahun dari tahun 2020-2024, TPT cenderung lebih tinggi daripada target RKPD. Hal tersebut utamanya disebabkan Pemerintah Kabupaten Sragen baru bisa mengendalikan

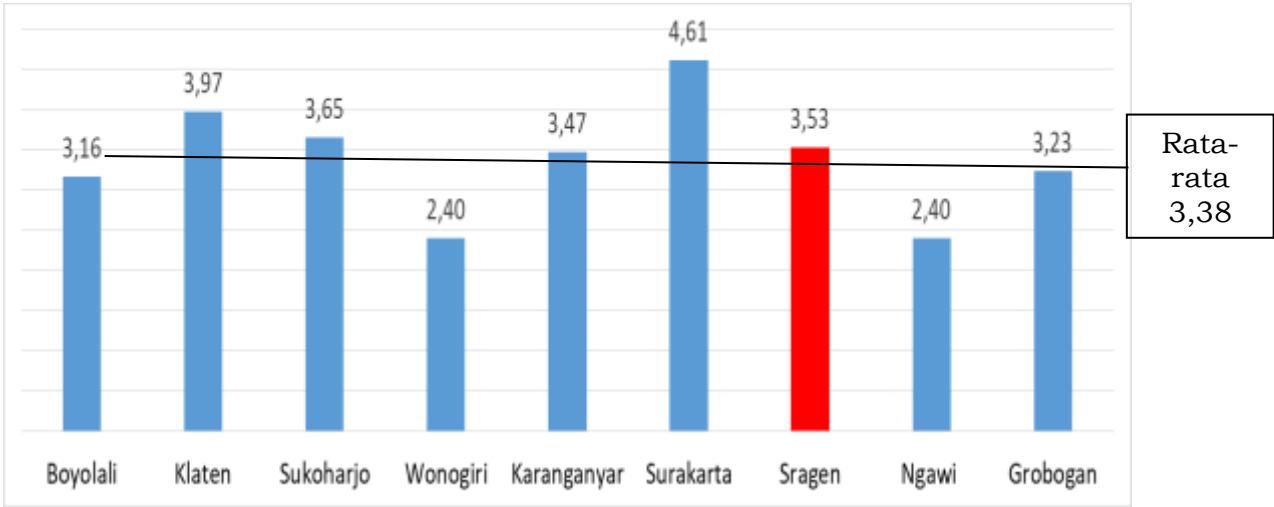
jumlah pengangguran tidak bertambah dan cenderung stabil pada kisaran 4,32% padahal dalam RKPD jumlah pengangguran ditarget selalu berkurang. Namun demikian, dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2023 dan 2024 Kabupaten Sragen berhasil mencapai target, masing-masing dengan capaian sebesar 3,87% dan 3,53%. Perkembangan target dan capaian TPT Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 34 Target RKPD dan Capaian TPT Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

TAHUN	Target RKPD	Sragen	Nasional	Jawa Tengah
2020	4,19	4,75	7,07	6,48
2021	4,03	4,76	6,49	5,95
2022	4,37	4,69	5,86	5,57
2023	4,17	3,87	5,32	5,13
2024	3,87	3,53	4,91	4,78

Sumber Data: BPS, 2025

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2024 TPT di Kabupaten Sragen mencapai 3,53%. Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sragen dari 100 penduduk usia kerja terdapat 4 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Dibandingkan sembilan wilayah sekitar, TPT Kabupaten Sragen cukup rendah atau berada pada urutan keempat terendah. Di Wilayah Solo Raya, TPT tertinggi terdapat di Surakarta mencapai 4,61% dan TPT terendah terdapat di Wonogiri mencapai 2,40%. Dibandingkan dengan nilai rata-rata wilayah sekitar, TPT Kabupaten Sragen termasuk kurang baik dengan nilai di atas rata-rata wilayah. TPT Kabupaten Sragen pada tahun 2024 mencapai 3,53% sedangkan rata-rata wilayah sebesar 3,38%.



Gambar 2. 43 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2024

Sumber Data: BPS, 2025

Perubahan TPT dari tahun 2023 ke tahun 2024 menunjukkan Kabupaten Sragen mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan. Dari 9 wilayah sekitar, 7 wilayah mengalami penurunan TPT termasuk Kabupaten Sragen sedangkan 2 wilayah yang mengalami peningkatan TPT yaitu Sukoharjo dan Wonogiri. Penurunan terendah terdapat di Ngawi sedangkan penurunan tertinggi terjadi di Karanganyar. Penurunan TPT di Kabupaten Sragen lebih tinggi daripada rata-rata wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan pemulihan kondisi lapangan kerja di Kabupaten Sragen sangat baik. Perubahan TPT di Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 44 Perubahan TPT di Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar Tahun 2024

Sumber Data: BPS, 2025

Sejak tahun 2020, jumlah pengangguran di Kabupaten Sragen cenderung turun. Nilai TPT Kabupaten Sragen pada tahun 2020 dan 2021 lebih rendah daripada rata-rata wilayah sekitar sedangkan tahun 2024 lebih tinggi.

Tabel 2. 35 Capaian TPT Kabupaten Sragen dan wilayah Sekitar Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Boyolali	5,28	5,09	4,92	4,05	3,16
Klaten	5,46	5,48	4,31	4,20	3,97
Sukoharjo	6,93	3,32	2,47	3,40	3,65
Wonogiri	4,27	2,43	1,95	1,92	2,40
Karanganyar	5,96	5,89	5,70	4,35	3,47
Surakarta	7,92	7,85	5,83	4,58	4,61
Ngawi	4,50	4,38	4,40	4,02	2,40
Grobogan	5,44	4,25	2,48	2,41	3,23
SRAGEN	4,75	4,76	4,69	3,87	3,53
Rata-Rata	5,61	4,83	4,08	3,64	3,38

Sumber Data: BPS 2025

Analisa pertumbuhan TPT sebelum dan sesudah pandemi covid-19 menunjukkan sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, TPT

Kabupaten Sragen sebesar 3,32% sedangkan setelah pandemi covid-19 khususnya tahun 2024, TPT Kabupaten mencapai 3,53%. Dengan demikian terjadi peningkatan TPT sebesar 0,21 poin (6,33%). Kinerja tersebut lebih rendah dibanding capaian provinsi dan nasional. Sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, TPT provinsi dan nasional masing-masing 4,44% dan 5,23%. Sedangkan setelah pandemi covid-19 TPT provinsi dan nasional masing-masing sebesar 4,78% dan 4,91%. Dengan demikian setelah pandemi covid-19 terjadi peningkatan TPT provinsi sebesar 0,34 poin (7,66%) dan terjadi penurunan TPT nasional sebesar 0,32 poin (6,12%).

Tabel 2. 36 Pertumbuhan TPT Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Uraian	Sebelum pandemi covid-19 (2019)	Setelah pandemi covid-19 (2024)	Perubahan	
			Poin	Persentase
Sragen	3,32	3,53	0,21	6,33
Provinsi	4,44	4,78	0,34	7,66
Nasional	5,23	4,91	-0,32	-6,12

Sumber Data: BPS, 2025

Dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan wilayah sekitar, analisa pertumbuhan sebelum dan setelah pandemi covid-19 menunjukkan pertumbuhan TPT Kabupaten Sragen sebesar 0,21 poin (6,33%) lebih besar dari rata-rata pertumbuhan TPT wilayah sekitar yang mencapai 0,001 poin (0,03%). Data pertumbuhan TPT Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 37 Pertumbuhan TPT Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Uraian	Sebelum pandemi covid-19 (2019)	Setelah pandemi covid-19 (2024)	Perubahan	
			Poin	Persentase
Boyolali	3,09	3,16	0,07	2,27
Klaten	3,54	3,97	0,43	12,15
Sukoharjo	3,39	3,65	0,26	7,67
Wonogiri	2,55	2,40	-0,15	-5,88
Karanganyar	3,12	3,47	0,35	11,22
Surakarta	4,16	4,61	0,45	10,82
Grobogan	3,54	3,23	-0,31	-8,76
Ngawi	3,60	2,40	-1,30	-35,14
Sragen	3,32	3,53	0,21	6,33
Rata-Rata	3,379	3,380	0,001	0,03

Sumber Data: BPS, 2025

Jumlah Penganggur. Pada periode 2020-2024, tingkat pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Sragen cenderung menurun. Pada tahun 2020 jumlah penganggur mencapai 22.906 orang atau tubuh 45,70% dibanding tahun 2019. Pada tahun 2024, jumlah penganggur mencapai 20.992 orang dan tumbuh 0,14% dibanding tahun 2023.

Tabel 2. 38 Pertumbuhan Jumlah Penganggur di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan jumlah penganggur (%)	45,70	5,47	-4,13	-9,50	0,14
Jumlah penganggur	22.906	24.160	23.163	20.963	20.992

Sumber Data: BPS, 2025

Berbeda dengan rata-rata wilayah sekitar, pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Sragen cenderung tumbuh positif kecuali tahun 2020 dan 2021 yang menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2021 jumlah penganggur di Kabupaten Sragen tumbuh positif 5,47% dengan rata-rata wilayah sekitar mencapai -15,18%. Sedangkan pada tahun 2024, pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Sragen mencapai 0,14% dan rata-rata wilayah sekitar mencapai -1,31%. Data pertumbuhan jumlah penganggur tahun 2020-2024 Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 39 Persentase Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bojolali	78,13	-2,09	-3,01	-11,43	-20,60
Klaten	53,25	-1,17	-18,87	2,43	6,21
Sukoharjo	107,23	-51,55	-26,37	40,69	9,74
Wonogiri	80,20	-43,98	-17,51	19,47	17,95
Karanganyar	102,49	-0,67	-5,59	-19,76	-15,10
Surakarta	90,02	-3,16	-23,94	-20,72	-1,15
Grobogan	29,01	2,45	-0,03	3,15	- 17,90
Ngawi	51,41	-21,24	-36,75	-11,19	8,91
Sragen	45,70	5,47	-4,13	-9,50	0,14
Rata-Rata	73,97	-15,18	-16,51	-2,93	-1,31

Sumber Data: BPS, 2025

Berbeda halnya dengan pertumbuhan jumlah penganggur nasional dan provinsi, pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Sragen pada Tahun 2020-2024 cenderung tumbuh positif kecuali tahun 2022 dan 2023 yang tumbuh negatif. Pada tahun 2021 jumlah penganggur di Kabupaten Sragen tumbuh positif mencapai 5,47%, provinsi mencapai -7,09% dan nasional mencapai -6,82%. Sedangkan pada tahun 2024, pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Sragen mencapai 0,14% lebih tinggi dibanding Provinsi dan Nasional yang mengalami pertumbuhan negatif masing-masing -3,04% dan -9,94%. Pertumbuhan jumlah penganggur Sragen, provinsi dan nasional tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 40 Persentase Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Sragen	45,70	5,47	-4,13	-9,50	0,14	7,54
Provinsi	48,40	-7,09	-3,88	-0,39	-3,04	6,80
Nasional	37,49	-6,82	-7,43	-6,77	-9,94	1,31

Sumber Data: BPS, 2025

Analisis pertumbuhan jumlah penganggur sebelum dan sesudah pandemi covid-19 menunjukkan sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, jumlah penganggur Kabupaten Sragen sebesar 15.721 orang sedangkan setelah pandemi covid-19 atau pada tahun 2024, jumlah Kabupaten Sragen mencapai 20.992. Dengan demikian terjadi peningkatan jumlah penganggur sebanyak 5.271 orang (33,53%).

Kinerja di atas kurang baik dibanding capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, jumlah penganggur provinsi dan nasional masing-masing 818.276 orang dan 7.104.424. Sedangkan setelah pandemi covid-19 jumlah penganggur provinsi dan nasional masing-masing sebanyak 1.047.451 orang dan 7.195.000 orang. Dengan demikian setelah pandemi covid-19 terjadi peningkatan jumlah provinsi sebanyak 229.175 orang (28,01%) dan terjadi peningkatan jumlah penganggur nasional sebanyak 90.576 orang (1,27%). Data pertumbuhan jumlah penganggur sebelum pandemi covid-19 dan setelah pandemi covid-19 di Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 41 Jumlah Penganggur Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Uraian	Sebelum pandemi covid-19 (2019)	Setelah pandemi covid-19 (2024)	Perubahan	
			Orang	Persentase
Sragen	15.721	20.992	5.271	33,53
Provinsi	818.276	1.047.451	229.175	28,01
Nasional	7.104.424	7.195.000	90.576	1,27

Sumber Data: BPS, 2025

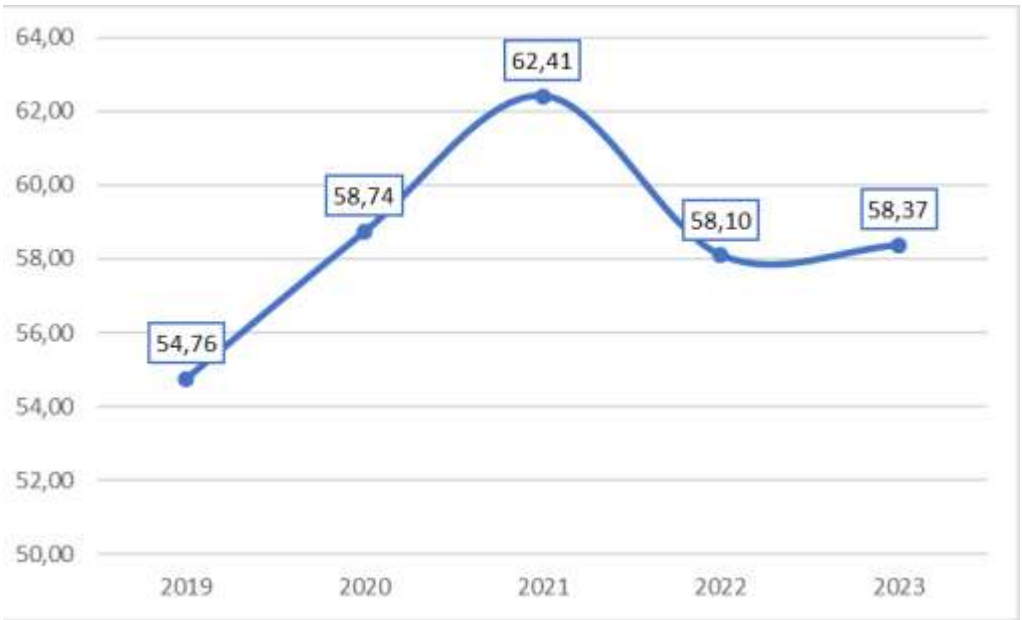
Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, persentase perubahan jumlah penganggur Kabupaten Sragen sebelum dan setelah pandemi covid-19 lebih tinggi daripada rata-rata perubahan jumlah penganggur wilayah sekitar. Rata-rata perubahan jumlah penganggur wilayah sekitar mencapai 2.758 orang atau 15,73% sedangkan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Sragen 5.271 (33,53%). Data perubahan jumlah penganggur Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 42 Perubahan Jumlah Penganggur Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Kabupaten/ Kota	Sebelum Pandemi Covid-19	Setelah Pandemi Covid-19 (2024)	Perubahan	
			Jumlah	Persentase
Boyolali	17.207	20.469	3.262	18,96
Klaten	22.834	30.525	7.691	33,68
Sukoharjo	16.325	18.631	2.306	14,13
Wonogiri	13.800	16.195	2.395	17,36
Karanganyar	15.172	19.627	4.455	29,36
Surakarta	12.039	13.204	1.165	9,68
Grobogan	25.964	29.053	3.089	11,90
Ngawi	17.790	12.979	-4.811	-27,04
Sragen	15.721	20.992	5.271	33,53
Rata-rata	17.641	21.126	2.758	15,73

Sumber Data: BPS, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Capaian TPAK perempuan kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut.



Gambar 2. 45 TPAK Perempuan Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 (%)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

2.2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur

berdasarkan tingkat pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

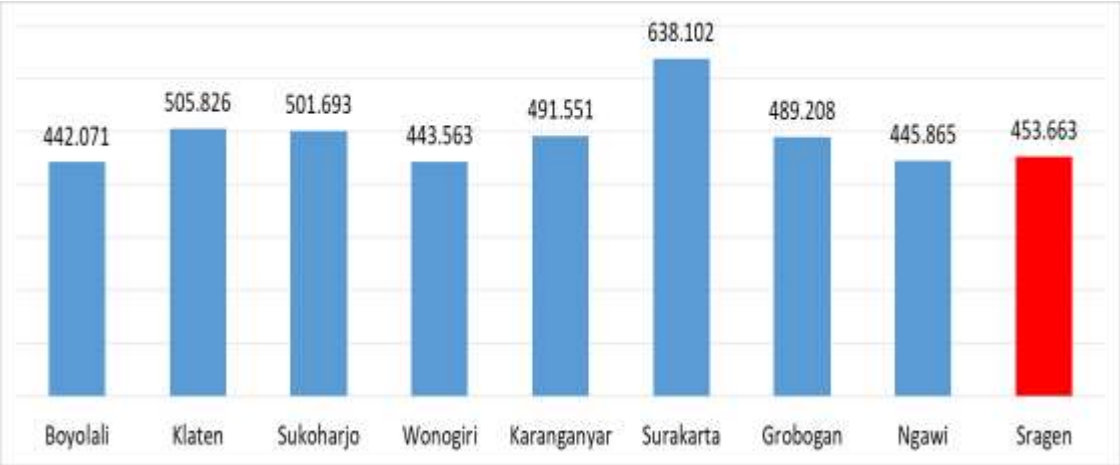
Tabel 2. 43 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp)
2020	119.400	13,38	348.890
2021	122.910	13,83	363.349
2022	115.140	12,94	389.265
2023	114.620	12,87	426 482
2024	110.650	12,41	453 663

Sumber: BPS Provinsi Jateng, 2025

Garis kemiskinan merupakan ambang batas yang menentukan seseorang menjadi miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2024 sebesar Rp 453.663 meningkat Rp 27.181 dibanding tahun 2023 sebesar Rp 426 482. Selama kurun waktu lima tahun terakhir atau sejak tahun 2020, garis kemiskinan Kabupaten Sragen selalu naik tiap tahunnya. Perkembangan persentase tingkat kemiskinan selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Dibandingkan wilayah sekitar, garis kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2024 termasuk dalam kategori menengah dan cenderung rendah. Dengan garis kemiskinan 453.663, Kabupaten Sragen memiliki garis kemiskinan di bawah rata-rata wilayah yang mencapai 490.171. Selain Kabupaten Sragen, terdapat tiga daerah lainnya yang memiliki garis kemiskinan di bawah rata-rata wilayah yaitu Boyolali, Wonogiri dan Ngawi sedangkan lima daerah yang memiliki garis kemiskinan di atas rata-rata. Hal tersebut mengindikasikan tingkat konsumsi minimal masyarakat Sragen relatif lebih rendah dibanding wilayah sekitar, dimana sebagian besar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan primer.



Gambar 2. 46 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2024

Sumber Data : BPS Jawa Tengah, 2025

Persentase penduduk miskin dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen mencapai 13,38% dan pada tahun 2024 mencapai 12,41%. Dibandingkan provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen sejak tahun 2020-2024 selalu lebih tinggi. Bahkan, persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen juga lebih tinggi dari angka nasional. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Sragen merupakan salah satu dari zona merah kemiskinan nasional dan provinsi sebagaimana terlihat pada gambar.

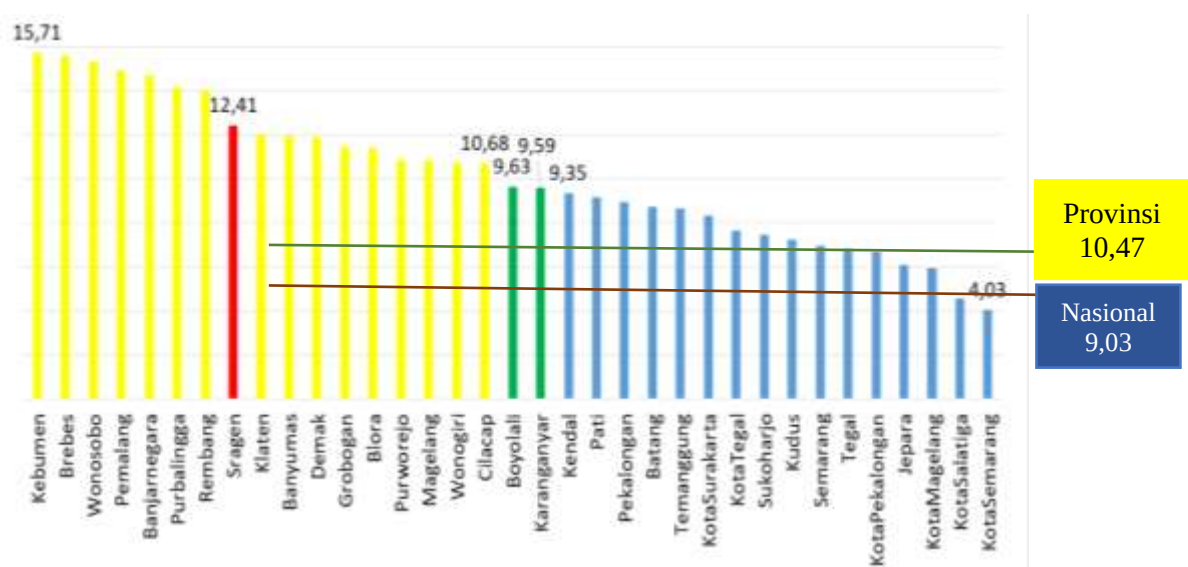


Gambar 2. 47 Perbandingan Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber Data : BPS, 2025

Gambar berikut menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen merupakan salah satu wilayah zona merah kemiskinan dengan tingkat kemiskinan melebihi tingkat kemiskinan provinsi dan nasional. Selain Kabupaten Sragen, terdapat 17 daerah lain diantaranya Wonogiri, Klaten, Kebumen, Brebes, Purbalingga dll. Dengan selisih tingkat

kemiskinan yang cukup besar dengan tingkat kemiskinan Jawa Tengah, tugas berat dihadapi Pemerintah Kabupaten Sragen untuk mengentaskan kemiskinan masyarakatnya.



Gambar 2. 48 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota yang Lebih Tinggi Dibanding Provinsi dan Nasional, Tahun 2024

Sumber Data : BPS, 2025

Selanjutnya kinerja penurunan penduduk miskin Kabupaten Sragen dibandingkan dengan target RKPD menunjukkan perlunya peningkatan kinerja pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2018 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Sragen dapat mencapai target. Di tahun tersebut, realisasi persentase penduduk miskin 13,12% dengan target RKPD 13,16% untuk tahun 2018 dan di tahun 2019 realisasinya mencapai 12,79% dengan target 12,86%. Namun demikian, pandemi Covid-19 menjadikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen naik lagi melebihi target. Sejak tahun 2020-2024, capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen lebih tinggi dari target. Data target dan capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 44 Target dan Capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Target RKPD	Sragen	Jawa Tengah	Nasional
2020	12,36	13,38	11,41	10,19
2021	12,83	13,83	11,79	9,71
2022	12,28	12,94	10,93	9,54
2023	11,73	12,87	10,77	9,36
2024	11,18	12,41	10,47	9,03

Sumber Data: BPS-Bapperida Kab. Sragen, 2025

Analisa perubahan persentase penduduk miskin sebelum dan sesudah pandemi covid-19 menunjukkan sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen sebesar 12,79 sedangkan setelah pandemi covid-19 atau pada tahun 2024, persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen mencapai 12,41.

Dengan demikian terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,38 poin (2,97%).

Capaian tersebut cukup baik dibanding capaian provinsi. Sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, persentase penduduk miskin provinsi 10,80 dan setelah pandemi covid-19 persentase penduduk miskin provinsi mencapai 10,47. Dengan demikian persentase penduduk miskin provinsi turun 0,33 poin (-3,06%). Kinerja Kabupaten Sragen juga cukup baik dibanding capaian nasional. Sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, persentase penduduk miskin nasional 9,22 dan setelah pandemi covid-19 persentase penduduk miskin provinsi mencapai 9,03. Dengan demikian persentase penduduk miskin nasional turun 0,19 poin (-2,06%). Dengan kata lain, persentase perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen setelah pandemi covid-19 lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan nasional. Data perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen, provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 45 Perubahan Miskin Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Uraian	Sebelum pandemi covid-19 (2019)	Setelah pandemi covid-19 (2024)	Perubahan	
			Poin	Persentase
Sragen	12,79	12,41	-0,38	-2,97
Provinsi	10,80	10,47	-0,33	-3,06
Nasional	9,22	9,03	-0,19	-2,06

Sumber Data: BPS, 2025

Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen sebelum dan setelah pandemi covid-19 lebih tinggi daripada rata-rata perubahan persentase penduduk miskin wilayah sekitar. Rata-rata perubahan persentase penduduk miskin wilayah sekitar -0,05 poin (-0,43%) sedangkan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen 0,38 poin (-2,97%). Data perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar sebelum dan setelah pandemi covid-19 dapat dilihat pada tabel.

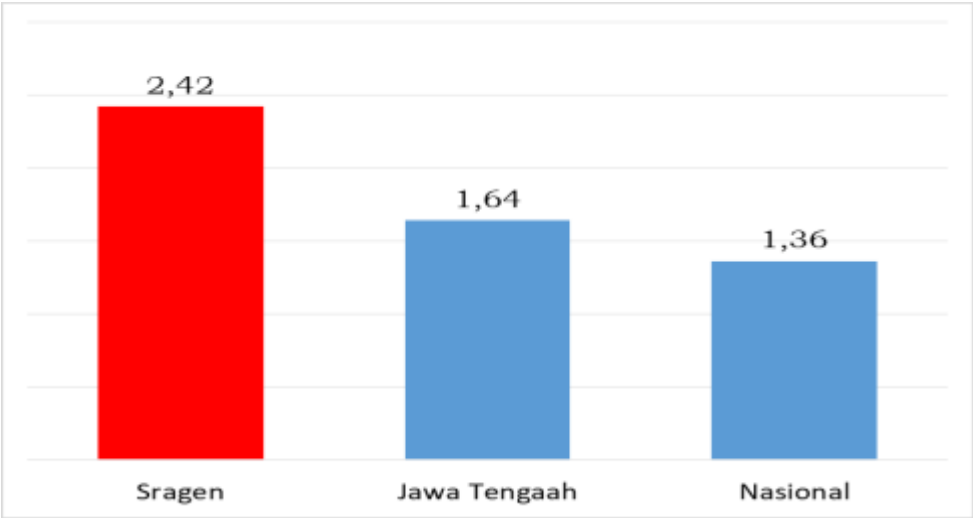
Tabel 2. 46 Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Kabupaten/ Kota	Sebelum Pandemi Covid-19 (2019)	Sebelum Pandemi Covid-19 (2024)	Perubahan	
			Jumlah	Persentase
Boyolali	9,53	9,63	0,10	1,05
Klaten	12,28	12,04	-0,24	-1,95
Sukoharjo	7,14	7,47	0,33	4,62
Wonogiri	10,25	10,71	0,46	4,49

Kabupaten/ Kota	Sebelum Pandemi Covid-19 (2019)	Sebelum Pandemi Covid-19 (2024)	Perubahan	
			Jumlah	Persentase
Karanganyar	9,55	9,59	0,04	0,42
Surakarta	8,70	8,31	-0,39	-4,48
Grobogan	11,77	11,43	-0,34	-2,89
Ngawi	14,39	14,4	0,01	0,07
Sragen	12,79	12,41	-0,38	-2,97
Rata-rata	10,71	10,67	-0,05	-0,43

Sumber Data: BPS, 2025

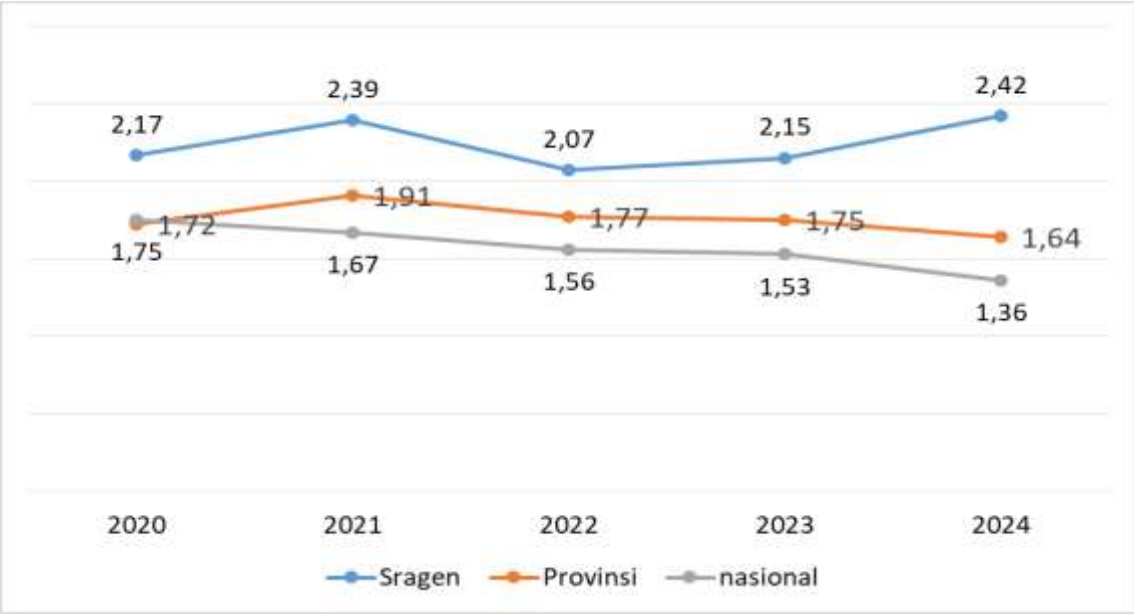
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks P1 Kabupaten Sragen pada 2024 sebesar 2,42, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 2,15. Dibandingkan indeks P1 Jawa Tengah sebesar 1,64 dan Nasional 1,36, indeks P1 Kabupaten Sragen lebih tinggi.



Gambar 2. 49 Indeks P1 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Sumber Data: BPS, 2025

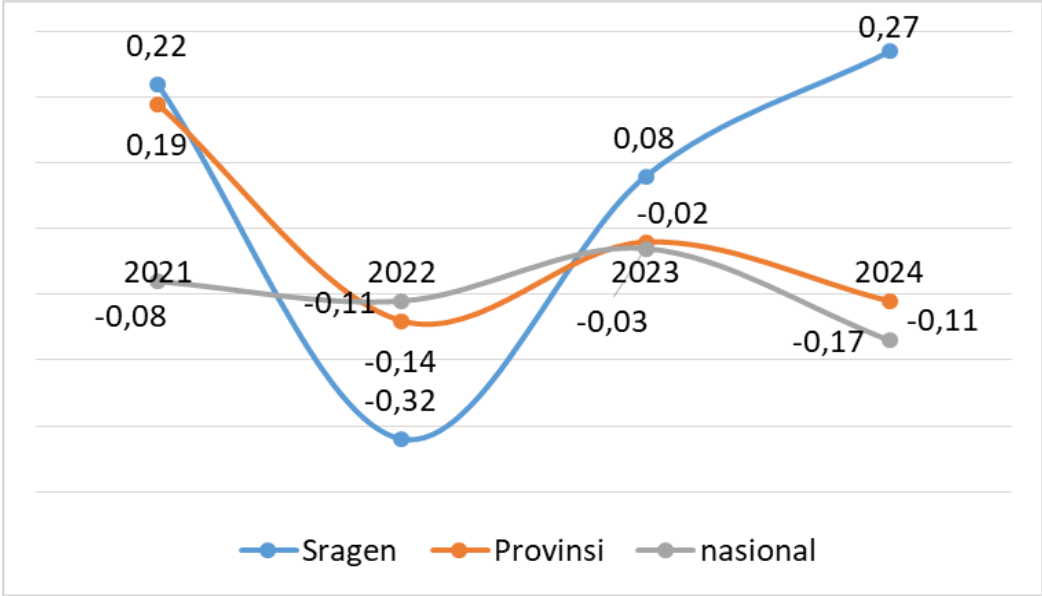
Dalam 5 tahun terakhir, Indeks P1 Kabupaten Sragen selalu lebih tinggi dibanding provinsi dan nasional dengan pola yang hampir sama. Namun demikian, dalam tahun 2020-2024 Kabupaten Sragen memiliki penurunan Indeks P1 yang lebih besar dibanding provinsi dan nasional. Pada tahun 2020 Indeks P1 Kabupaten Sragen mencapai 2,17 dan pada tahun 2024 sebesar 2,15, terjadi penurunan 0,02. Sedangkan Indeks P1 provinsi naik sebesar 0,08 dan nasional turun 0,39 dalam periode yang sama.



Gambar 2. 50 Indeks P1 Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber Data : BPS, 2025

Analisa tingkat perubahan Indeks P1 pada periode 2020-2024 menunjukkan bahwa rata-rata perubahan Indeks P1 Kabupaten Sragen bernilai positif sedangkan Provinsi dan Nasional bernilai negatif. Perubahan Indeks P1 Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada gambar.

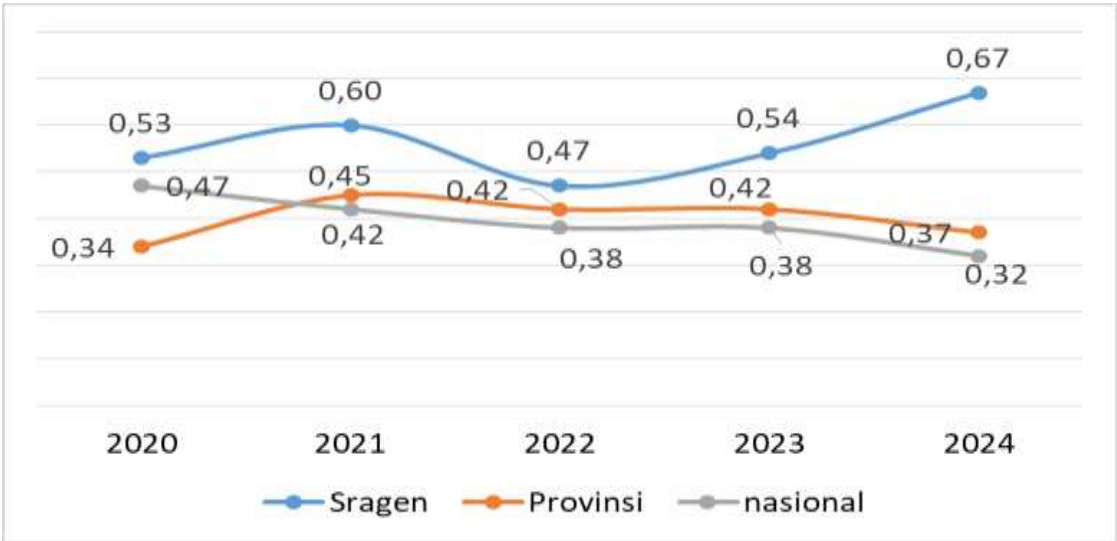


Gambar 2. 51 Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber Data : BPS, 2025

Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk miskin, dilakukan dengan melihat Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara

penduduk miskin. P2 Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebesar 0,67 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 0,54. P2 Kabupaten Sragen tersebut lebih tinggi daripada P2 Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,37 dan Nasional sebesar 0,32.



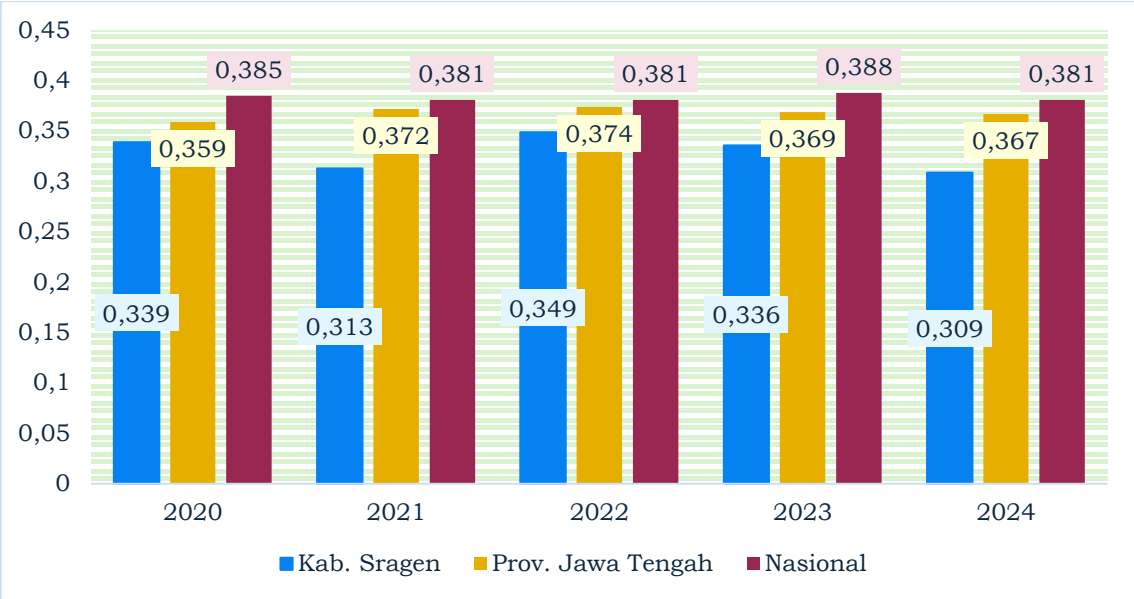
Gambar 2. 52 P2 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber Data : BPS, 2025

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Indeks Gini sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata, di mana setiap individu memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan dikuasai oleh satu individu atau kelompok.

Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga Indeks Gini agar mendekati 0, yang mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 53 Indeks Gini Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

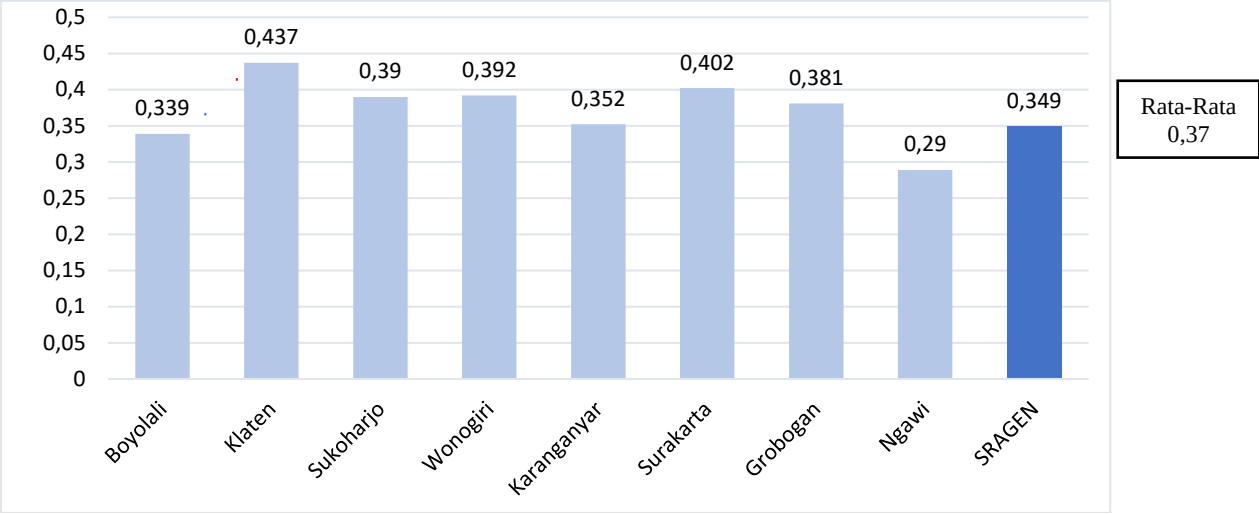
Sumber: BPS, 2025

Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Sragen dalam lima tahun terakhir secara umum menunjukkan tren penurunan, kecuali pada tahun 2022. Pada tahun 2021, indeks Gini mengalami peningkatan yang cukup tajam, tetapi kembali mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022. Secara keseluruhan, indeks Gini Kabupaten Sragen selama periode 2020-2024 mengalami penurunan sebesar 0,020 poin. Persentase penurunan ini tergolong cukup optimal jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan di tingkat nasional.

Dalam periode yang sama, indeks gini di tingkat provinsi mengalami tren yang fluktuatif namun cenderung turun, sedangkan indeks Gini nasional cenderung stagnan tanpa perubahan. Data ini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Sragen, yang mengindikasikan penurunan ketimpangan ekonomi secara umum. Tren positif ini perlu dipertahankan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di masa mendatang.

Dibandingkan dengan wilayah sekitar, gini ratio Kabupaten Sragen pada tahun 2023 lebih rendah dari rata-rata wilayah sekitar. Gini ratio rata-rata wilayah sekitar mencapai 0,358 sedangkan Kabupaten Sragen hanya 0,309. Namun demikian, Ngawi memiliki gini ratio lebih kecil dari gini ratio Kabupaten Sragen yaitu mencapai 0,289. Dengan kata lain, kinerja penurunan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sragen perlu ditingkatkan meskipun nilai gini rasionya

masih dibawah rata-rata wilayah sekitar. Data gini ratio Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar bisa dilihat pada gambar.



Gambar 2. 54 Perbandingan Gini Ratio Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2024

Sumber Data: BPS Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan analisis perubahan gini ratio sebelum dan setelah pandemi covid-19 diketahui bahwa gini ratio Kabupaten Sragen setelah pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2024 lebih rendah dibanding sebelum pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2019. Setelah pandemi covid-19 gini ratio Kabupaten Sragen turun 0,063 poin (17,40%) dibanding sebelum pandemi covid-19. Data gini ratio sebelum dan setelah pandemi covid-19 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 47 Gini Ratio Kabupaten Sragen Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Uraian	Gini Ratio
Sebelum pandemi covid-19 (2019)*	0,362
Setelah pandemi covid-19 (2024)	0,309
Perubahan	0,063
Persentase	17,40

Sumber Data: BPS, 2025

Dibandingkan target RKPD, dari tahun 2020-2024, gini ratio Kabupaten Sragen selalu mencapai target. Selisih capaian terbesar (0,036) terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi gini ratio sebesar 0,349. Sedangkan selisih capaian terendah (0,009) terjadi pada tahun 2024 dengan realisasi gini ratio sebesar 0,309.

Tabel 2. 48 Target dan Capaian Gini Ratio Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Tahun	Target RKPD	Sragen
2020	0,300 – 0,350	0,339
2021	0,300 – 0,350	0,313
2022	0,300 – 0,350	0,349
2023	0,300 – 0,350	0,336
2024	0,300 – 0,350	0,309

Sumber Data: BPS, 2025

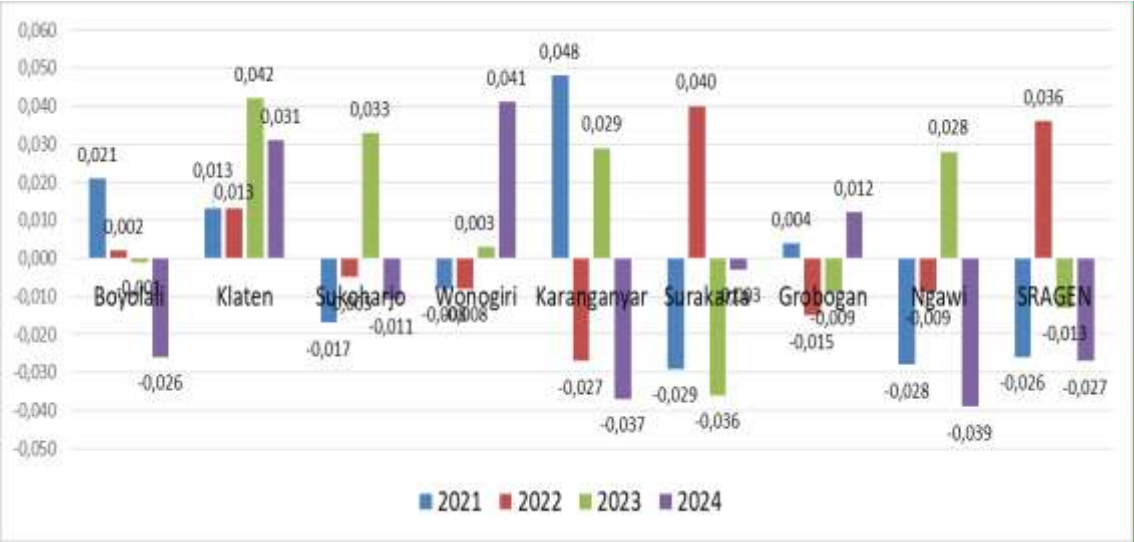
Selanjutnya gini ratio Kabupaten Sragen tahun 2020-2024 dibandingkan dengan wilayah sekitar untuk melihat ketimpangan pendapatan Kabupaten Sragen diantara wilayah sekitar. Secara umum, capaian gini ratio Kabupaten Sragen lebih rendah dibanding rata-rata wilayah. Selisih terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar 0,065 poin sedangkan selisih terendah terjadi pada 2022 sebesar 0,008 poin.

Tabel 2. 49 Gini Ratio Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Boyolali	0,343	0,364	0,366	0,365	0,339
Klaten	0,338	0,351	0,364	0,406	0,437
Sukoharjo	0,390	0,373	0,368	0,401	0,390
Wonogiri	0,364	0,356	0,348	0,351	0,392
Karanganyar	0,339	0,387	0,360	0,389	0,352
Surakarta	0,408	0,379	0,419	0,383	0,380
Grobogan	0,344	0,348	0,333	0,324	0,336
Ngawi	0,337	0,309	0,300	0,328	0,289
rata-rata	0,358	0,358	0,357	0,368	0,364
SRAGEN	0,339	0,313	0,349	0,336	0,309

Sumber Data: BPS, 2025

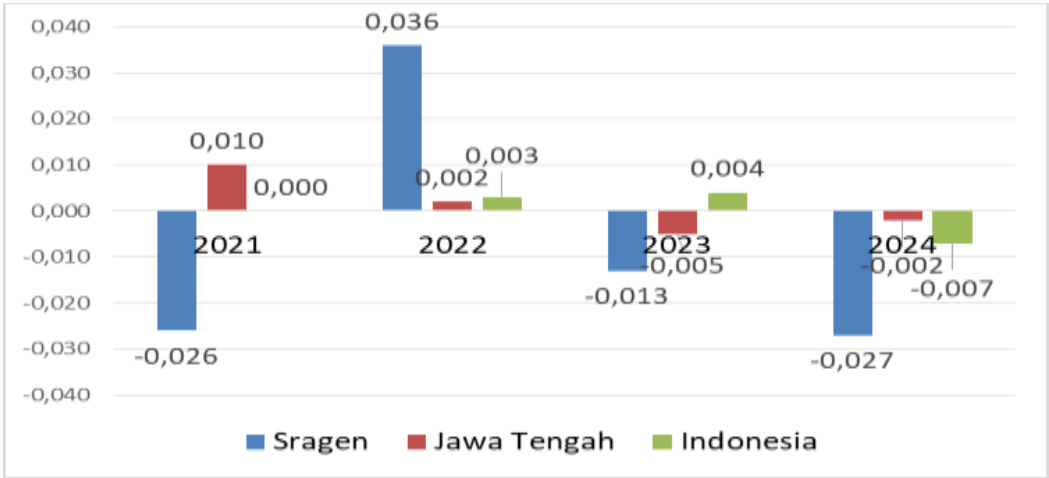
Berdasarkan gambar analisis pertumbuhan gini ratio Kabupaten Sragen dengan wilayah sekitar tahun 2020-2024 diketahui bahwa gini ratio Kabupaten Sragen mengalami pertumbuhan gini ratio signifikan. Pada tahun 2021 gini ratio Kabupaten Sragen tumbuh negatif -0,026 dan pada tahun 2024 tumbuh -0,027. Fenomena tersebut juga dialami oleh Surakarta. Pada tahun 2021 Surakarta tumbuh negatif -0,029 sedangkan pada tahun 2024 tumbuh -0,003. Oleh karena itu, kinerja program dan kegiatan pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sragen perlu ditingkatkan. Kondisi berbeda dialami Wonogiri. Pada tahun 2021 Wonogiri mengalami pertumbuhan -0,008 dan pada tahun 2024 tumbuh positif mencapai 0,041. Data perubahan gini ratio Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar tahun 2021- 2024 dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2. 55 Perbandingan Pertumbuhan Gini Ratio Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2021-2024

Sumber Data: BPS Jawa Tengah, 2025

Dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, perubahan gini ratio Kabupaten Sragen tahun 2021-2024 menunjukkan tren penurunan signifikan sedangkan Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan tren penurunan berfluktuatif. Data perubahan gini ratio Kabupaten Sragen, provinsi dan nasional tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel.



Gambar 2. 56 Perbandingan Pertumbuhan Gini Ratio Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2024

Sumber Data: BPS, 2025

Analisa perubahan gini ratio sebelum dan sesudah pandemi covid-19 menunjukkan sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, gini ratio Kabupaten Sragen sebesar 0,362 sedangkan setelah pandemi covid-19 yaitu tahun 2024 mencapai 0,309. Dengan demikian setelah pandemi covid-19 terjadi penurunan gini ratio sebesar 0,053 poin (14,64%). Dengan kata lain, terjadi penurunan ketimpangan pendapatan penduduk.

Kinerja di atas lebih baik dibanding capaian Jawa Tengah dan Nasional. Pada masa sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2019, gini

ratio Jawa Tengah dan Nasional sebesar 0,362 dan 0,381 sedangkan setelah pandemi covid-19 gini ratio Jawa Tengah mencapai 0,367 dan gini ratio mencapai 0,381. Dengan kata lain, Jawa Tengah mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan penduduk sedangkan Nasional, ketimpangannya stabil.

Tabel 2. 50 Perubahan Gini Ratio Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Sebelum dan Setelah Covid-19

Uraian	Sragen	Jawa Tengah	Nasional
Sebelum pandemi covid-19 (2019)	0,362*	0,362	0,381
Setelah pandemi covid-19 (2024)	0,309	0,367	0,381
Selisih	-0,053	0,005	0,000
Persentase	-14,64	1,38	0,00

Sumber Data: BPS, 2025

Berdasarkan gambar analisis perubahan gini ratio Kabupaten Sragen dengan wilayah sekitar sebelum dan setelah pandemi covid-19 diketahui bahwa sebelum pandemi covid-19 yaitu tahun 2020 diketahui bahwa gini ratio Kabupaten Sragen sebesar 0,339 lebih rendah dari rata-rata gini ratio wilayah sekitar yang mencapai 0,358. Demikian halnya pada tahun 2024 atau setelah pandemi covid-19. Rata-rata gini ratio wilayah sekitar pada tahun 2024 mencapai 0,364 sedangkan Kabupaten Sragen hanya 0,309. Namun demikian, perubahan gini ratio Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah covid-19 menunjukkan nilainya lebih tinggi dari wilayah sekitar. Rata-rata perubahan gini ratio wilayah sekitar sebelum dan sesudah pandemi covid-19 mencapai 0,006 atau turun 1.676% sedangkan perubahan gini ratio Kabupaten Sragen mencapai -0,030 atau naik -8,850%. Data perubahan gini ratio Kabupaten Sragen dan wilayah sekitar sebelum dan setelah pandemi covid-19 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 51 Perubahan Gini Ratio Jawa Tengah dan Nasional Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

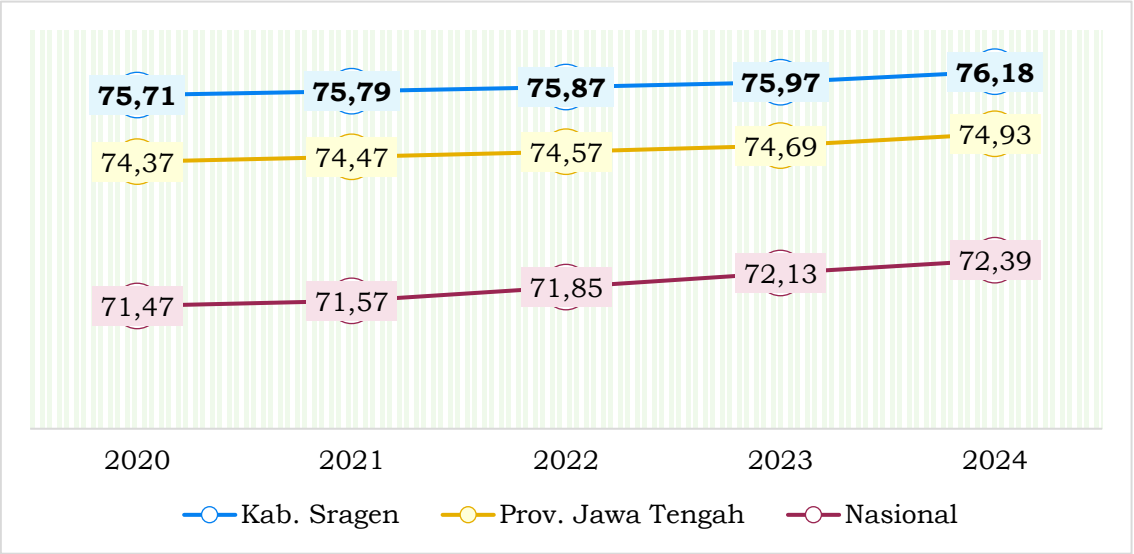
Uraian	Sebelum pandemi covid-19 (2019**)	Setelah pandemi covid-19 (2024)	Perubahan	
			Poin	Persentase
Boyolali	0,343	0,339	-0,004	-1,166
Klaten	0,338	0,437	0,099	29,290
Sukoharjo	0,390	0,390	0,000	0,000
Wonogiri	0,364	0,392	0,028	7,692
Karanganyar	0,339	0,352	0,013	3,835
Surakarta	0,408	0,380	-0,028	-6,863
Grobogan	0,344	0,336	-0,008	-2,326
Ngawi	0,337	0,289	-0,048	-14,243
Rata-rata	0,358	0,364	0,006	1,676
Sragen	0,339	0,309	-0,030	-8,850

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk semua merupakan sebuah kondisi yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dalam setiap tahap kehidupan, di berbagai wilayah, serta bagi semua kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Tingkat kesehatan masyarakat dapat diukur melalui berbagai data, seperti Usia Harapan Hidup (UHH), tingkat prevalensi stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, termasuk indikator lainnya yang relevan dengan kondisi daerah.

2.2.2.1 Umur Harapan Hidup (UHH)

UHH adalah salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesehatan suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang diperkirakan akan dijalani seseorang sejak lahir. Semakin tinggi UHH, semakin sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut. Beberapa faktor yang memengaruhi UHH meliputi akses terhadap layanan kesehatan, kecukupan gizi dan kalori, kesadaran masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta kebijakan kesehatan yang diterapkan. Berikut adalah pencapaian UHH di Kabupaten Sragen untuk periode 2020-2024.



Gambar 2. 57 UHH Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

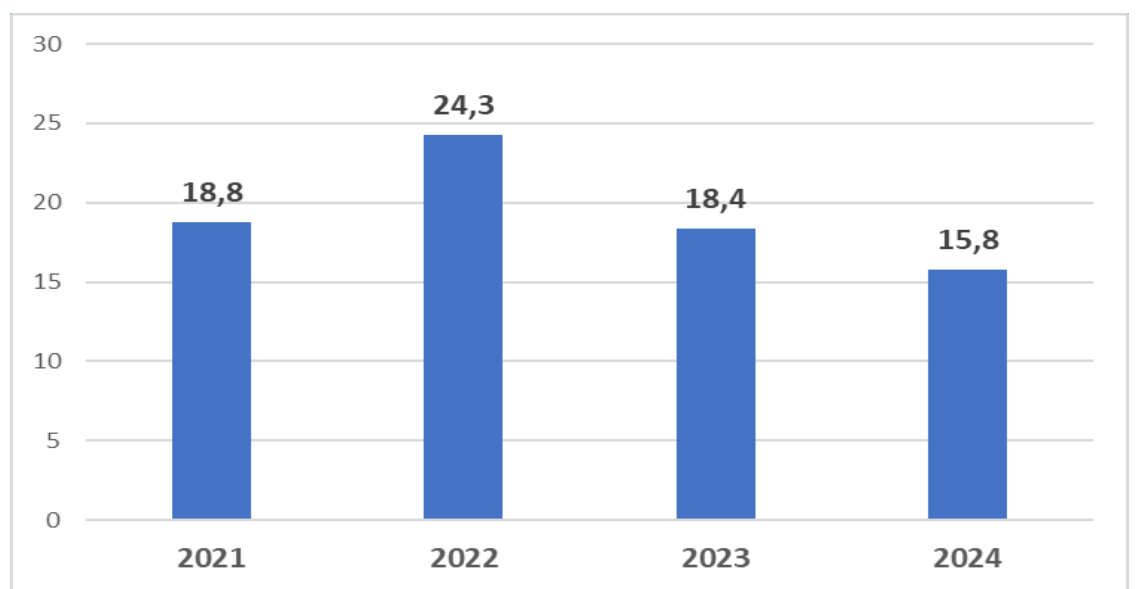
Sumber: BPS, 2025

Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sragen mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, UHH Kabupaten Sragen mengalami peningkatan

sebesar 0,47 poin. UHH Kabupaten Sragen pada tahun 2024 berada pada angka 76,18. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 76 tahun. Peningkatan UHH di Kabupaten Sragen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pada aspek layanan primer dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Capaian UHH Kabupaten Sragen juga melampaui capaian UHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Sragen selisih 1,25 poin lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan 3,79 poin lebih tinggi dibanding nasional. Artinya, perbaikan dan peningkatan pelayanan pada aspek kesehatan sudah cukup optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sragen.

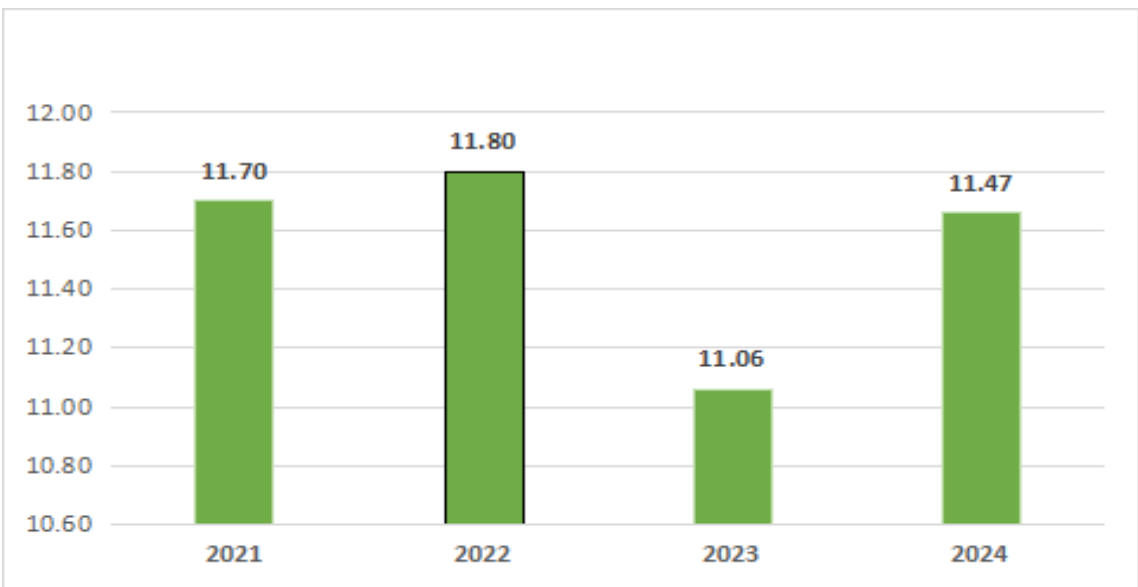
2.2.2.2 Prevalensi Stunting

Indikator penting lainnya yang perlu dianalisis adalah prevalensi stunting. Status gizi memiliki peran utama dalam mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Individu dengan status gizi yang baik lebih tahan terhadap berbagai penyakit, baik infeksi maupun penyakit degeneratif. Status gizi manusia dikategorikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan usia, yaitu anak di bawah lima tahun, anak usia 5–18 tahun, dan orang dewasa berusia lebih dari 18 tahun. Pada anak di bawah lima tahun, status gizi mencakup kategori berat badan kurang (*underweight*), tubuh pendek (*stunting*), tubuh kurus (*wasting*), dan obesitas. Sementara itu, pada anak usia 5–18 tahun, status gizi dinilai berdasarkan tinggi badan terhadap umur serta indeks massa tubuh. Sedangkan bagi individu berusia lebih dari 18 tahun, status gizi diklasifikasikan ke dalam kategori kurus, normal, kelebihan berat badan, dan obesitas. Berikut merupakan gambaran kondisi stunting di Kabupaten Sragen.



Gambar 2. 58 Prevalensi Stunting Berdasarkan SSGI/SKI Kabupaten Sragen Tahun 2021-2024

Hasil perhitungan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) atau Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2021 prevalensi stunting Kabupaten Sragen sebesar 18,8% dan di tahun 2022 naik menjadi 24,3% (kenaikan 5,5%), namun di tahun 2023 turun 5,9% atau menjadi 18,4%. Sedangkan tahun 2024 turun lagi dan mencapai 15,8%. Ini merupakan hasil kerjasama dengan berbagai lintas sektor serta komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen untuk meningkatkan cakupan layanan yang kurang maksimal dengan peningkatan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.



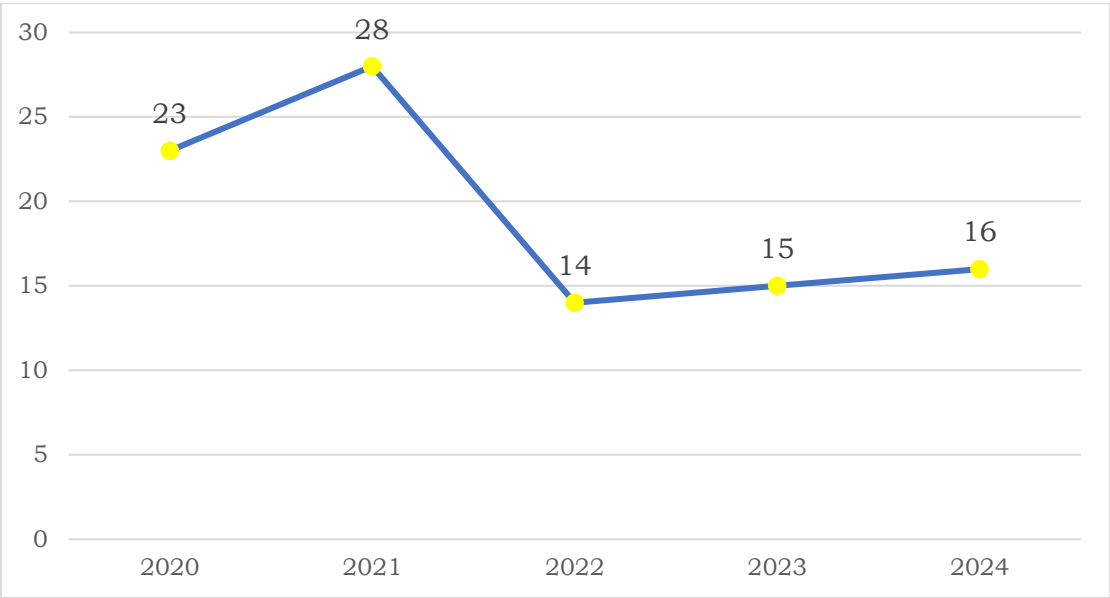
Gambar 2. 59 Prevalensi Stunting Berdasarkan EPPGBM Kabupaten Sragen Tahun 2021-2024

Data perkembangan prevalensi stunting berdasarkan EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)

cenderung fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024 dengan capaian entry data 100%.

2.2.2.3 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya perempuan yang meninggal akibat gangguan kehamilan (bukan karena kecelakaan), serta penanganan saat melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Berikut adalah jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024.



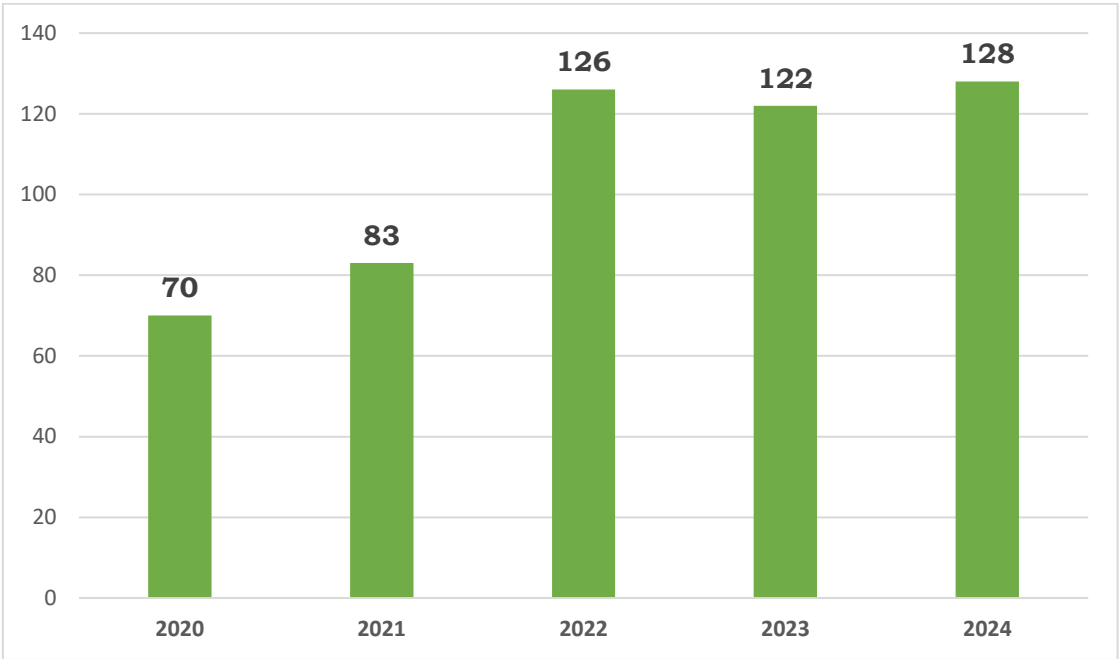
Gambar 2. 60 Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen dari mengalami tren yang fluktuatif selama tahun 2020 hingga 2024. Terjadi peningkatan signifikan dari 23 kasus pada tahun 2020 menjadi 28 kasus pada 2021. Namun, setelah itu terdapat penurunan tajam ke angka 14 kasus pada 2022. Sejak 2022, angka kematian ibu mengalami kenaikan secara bertahap, menjadi 15 kasus pada 2023 dan 16 kasus pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya intervensi atau kebijakan kesehatan yang berhasil, namun tren kenaikan kembali pada dua tahun terakhir menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan kembali program-program pencegahan kematian ibu di daerah tersebut.

2.2.2.4 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB mengindikasikan kondisi lingkungan dan kesehatan orangtua bayi

yang kurang baik, sehingga memicu terjadinya kematian di Kabupaten Sragen.



Gambar 2. 61 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Sragen mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Lonjakan signifikan terjadi pada 2022 dengan 126 kasus. Secara keseluruhan, hal ini mencerminkan kecenderungan peningkatan kasus kematian bayi yang cukup mengkhawatirkan, terutama setelah tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan memperkuat upaya pelayanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk peningkatan kualitas antenatal dan neonatal care.

2.2.2.5 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan suatu alat/tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, posyandu dan sebagainya.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap kecamatan. Adapun rasio Puskesmas terhadap penduduk di Kabupaten Sragen sebesar 1 per 40.747 penduduk, artinya rata-rata setiap 40.747 penduduk dilayani oleh 1 Puskesmas. Jumlah Puskesmas minimal 1 Puskesmas setiap

kecamatan telah terpenuhi. bahkan ada 1 kecamatan dengan 2 puskesmas.

Berikut adalah gambaran ketersediaan fasilitas kesehatan khususnya posyandu di Kabupaten Sragen selama periode 2020 hingga 2024.

Tabel 2. 52 Posyandu yang Dibina Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH POSYANDU (UNIT)
1	2020	1.597
2	2021	1.600
3	2022	1.607
4	2023	1.607
5	2024	1.610

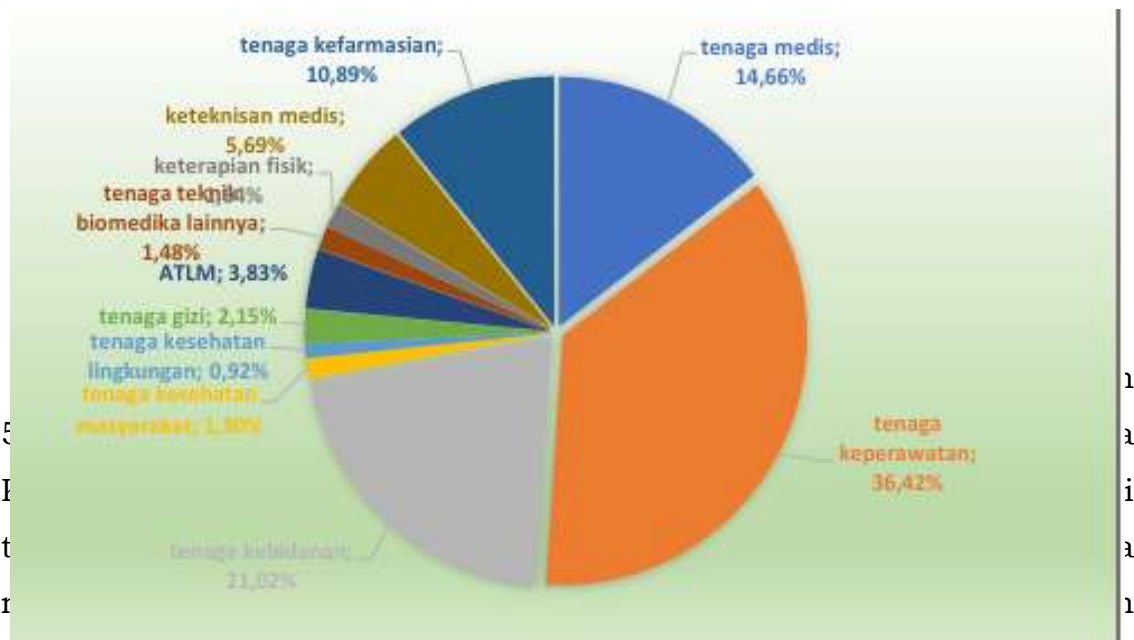
Sumber: Dinas PMD Kabupaten Sragen, 2025

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah posyandu di Kabupaten Sragen pada tahun 2024 sebanyak 1610 unit. Jumlah ini meningkat sebesar 13 unit dari tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah Sragen dalam memperluas akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Dengan bertambahnya Posyandu, pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak, semakin mudah dijangkau sehingga dapat berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.2.6 Kondisi SDM Kesehatan

Tenaga Kesehatan (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023) adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki Pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu. SDM Kesehatan dikelompokkan menjadi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi,

tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.



dengan berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Sragen tahun 2024.

Tabel 2. 53 Data sumber daya manusia (SDM) kesehatan Kabupaten Sragen per rumpun dengan berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024

No	Tenaga Kesehatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dokter Spesialis	167	116	283
2	Dokter Umum	164	273	437
3	Dokter Gigi	18	65	83
4	Dokter Gigi Spesialis	3	7	10
5	Tenaga Keperawatan	515	1.502	2.017
6	Tenaga Kebidanan	-	1.164	1.164
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	15	57	72
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan	14	37	51
9	Tenaga Gizi	9	110	119
10	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	30	182	212
11	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	43	39	82
12	Keterampilan Fisik	22	69	91
13	Keteknisan Medis	48	267	315
14	Tenaga Kefarmasian	77	526	603

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Sragen, 2024

2.2.2.7 Angka Penyandang Disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan yang

inklusif dan berkeadilan. Data ini mencerminkan keberadaan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi aksesibilitas layanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan kerja. Dengan mengetahui sebaran dan jenis disabilitas yang ada, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Selain itu, keberadaan data ini juga menjadi dasar dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan data penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen Tahun 2024.

Tabel 2. 54 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kab. Sragen Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Disabilitas Dewasa	Jumlah Disabilitas Anak
1	TANGEN	320	35
2	SRAGEN	335	35
3	SAMBUNGMACAN	231	24
4	SAMBIREJO	187	35
5	GONDANG	250	50
6	NGRAMPAL	250	67
7	KARANGMALANG	350	27
8	JENAR	213	27
9	SIDOHARJO	350	50
10	KEDAWUNG	445	35
11	SUKODONO	188	27
12	MONDOKAN	135	67
13	GESI	215	22
14	TANON	354	48
15	SUMBERLAWANG	112	12
16	MIRI	87	9
17	GEMOLONG	106	9
18	MASARAN	225	95
19	PLUPUH	190	18
20	KALIJAMBE	219	23
JUMLAH		4762	715

Sumber: Bapperida Kabupaten Sragen, 2025

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen tercatat sebanyak 5477 orang. Sebanyak 4.762 orang penyandang disabilitas dewasa dan 715 penyandang disabilitas anak yang tersebar di 20 kecamatan. Kecamatan Kedawung mencatat jumlah tertinggi disabilitas dewasa dengan 445 orang, disusul oleh Tanon (354), Sidoharjo (350), dan Karangmalang (350). Sementara itu, untuk disabilitas anak, Kecamatan Masaran menempati posisi tertinggi dengan 95 anak, diikuti oleh

Ngrampal dan Mondokan masing-masing dengan 67 anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan yang cukup besar terhadap layanan dan fasilitas inklusif, terutama di wilayah dengan angka disabilitas yang tinggi. Hal ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dan intervensi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan hak bagi seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen.

2.2.2.8 Penyakit Menular

Upaya pengendalian Penyakit menular langsung yaitu program pelayanan kesehatan Puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular/infeksi (misalnya TB, Pneumonia, AIDS, Diare, Kusta, dll). Tujuan program ini adalah menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular langsung. Kegiatan pokok program ini meliputi pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, peningkatan imunisasi, penemuan dan tata laksana penderita, peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pencegahan dan pemberantasan penyakit.

1. Tuberculosis

Tuberkulosis merupakan salah satu penyebab utama kematian dimana sebagian besar infeksi terjadi pada orang antara usia 15 dan 54 Tahun yang merupakan usia paling produktif, hal ini menyebabkan peningkatan beban sosial dan keuangan bagi keluarga pasien. Berdasarkan data dari Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun 2024, Jumlah terduga Tuberkulosis sebanyak 11.605 orang. Terduga Tuberkulosis merupakan orang yang mempunyai gejala utama pasien TB paru adalah batuk selama 2 minggu atau lebih dimana yang dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan sedangkan pada pasien dengan HIV positif, batuk sering kali bukan merupakan gejala TB yang khas, sehingga gejala batuk tidak harus selalu selama 2 minggu atau lebih. Cakupan orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 100 %

atau semua orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar.



Gambar 2. 63 Jumlah Terduga Tuberkulosis, Semua Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan Jumlah Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2024

Sumber: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Sragen, 2024

Grafik diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 jumlah Kasus (terduga/ suspek) tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami peningkatan yang cukup tajam dari Tahun 2023 yaitu sebanyak 14.657 kasus dengan jumlah penemuan semua kasus tuberkulosis sebanyak 1.535 kasus dan jumlah kasus Tuberkulosis anak 0-14 Tahun sebanyak 539 kasus. Tahun 2023 jumlah Kasus (terduga/ suspek) tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 7.891 kasus dengan jumlah penemuan semua kasus Tuberkulosis sebanyak 887 kasus dan jumlah kasus Tuberkulosis anak 0-14 Tahun sebanyak 244 kasus.



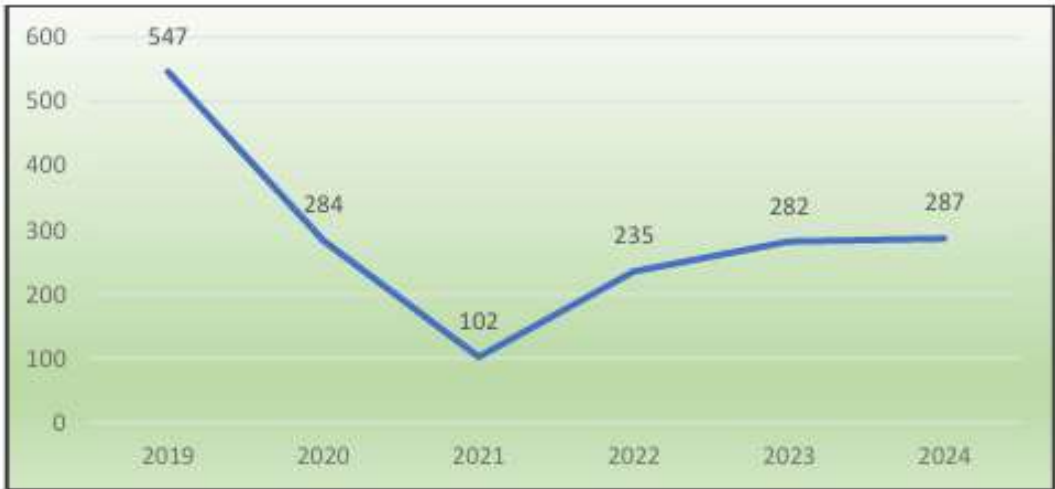
Gambar 2. 64 Angka Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap di Kabupaten Sragen Tahun 2024

Sumber: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Sragen, 2024

Pada Tahun 2024 Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis yang di temukan dan diobati sebanyak 1.192 kasus dengan Angka Succes Rate sebesar 87,8% yang terdiri dari Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru terkonfirmasi bakteriologis sebanyak 388 kasus atau sebesar 60,5% dan yang melakukan pengobatan lengkap 659 kasus atau sebesar 55,3%.

2. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli). Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Sampai saat ini program dalam pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita. Pneumonia pada balita ditandai dengan batuk dan atau kesukaran bernapas dan hasil perhitungan napas.



Gambar 2. 65 Penemuan Penderita Pneumonia pada Balita di Kabupaten Sragen Tahun 2024

Sumber: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Sragen, 2024

Jumlah kasus Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita Tahun 2024 sebanyak 287 kasus (7,8%), Tahun 2023 sebanyak 282 kasus (33,1 % dari perkiraan target), Tahun 2022 sebanyak 235 kasus (2,4 % dari perkiraan target), Tahun 2021 sebanyak 102 kasus (4 % dari perkiraan target), Tahun 2020 sebanyak 284 kasus (11 % dari perkiraan target) dan Tahun 2019 sebanyak 547 kasus (75,4 % dari perkiraan target).

3. HIV /AIDS

Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sragen selama periode 2020 hingga 2024 mencerminkan tantangan serius dalam upaya penanggulangan penyakit menular tersebut. Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi kesehatan masyarakat yang lebih intensif, mulai dari edukasi tentang perilaku berisiko, peningkatan layanan tes dan konseling HIV, hingga perluasan akses terhadap pengobatan antiretroviral untuk menekan laju infeksi dan mencegah perkembangan penyakit menjadi AIDS. Berikut merupakan data kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sragen tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2. 55 Jumlah Infeksi HIV/AIDS Tahun 2020-2024

Tahun	Infeksi HIV	Kasus AIDS	Total
2020	128	53	181
2021	141	20	161
2022	159	32	191
2023	176	30	206
2024	174	40	214
Jumlah	1438	746	2184

Sumber: Bapperida Kabupaten Sragen, 2025

Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sragen selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan. Jumlah infeksi HIV mengalami kenaikan setiap tahun, dari 128 kasus pada tahun 2020 menjadi 174 kasus pada tahun 2024. Meskipun jumlah kasus AIDS sempat menurun pada 2021, yakni hanya 20 kasus, angka tersebut kembali meningkat dan mencapai 40 kasus pada 2024. Total keseluruhan kasus HIV/AIDS dalam lima tahun terakhir mencapai 2.184 kasus, dengan 1.438 di antaranya adalah infeksi HIV dan 746 adalah kasus AIDS. Peningkatan ini mengindikasikan perlunya penguatan program pencegahan, deteksi dini, serta edukasi masyarakat untuk menekan laju penularan HIV dan mencegah berkembangnya infeksi menjadi AIDS.

4. Diare

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian di Indonesia. Target cakupan pelayanan penderita Diare Balita yang datang ke sarana kesehatan adalah 20 % dari perkiraan jumlah penderita Diare Balita (Insidens Diare Balita dikali jumlah Balita di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). Tahun 2024 jumlah penderita diare semua umur yang dilayani di sarana kesehatan sebanyak 10.423 orang, dimana yang mendapatkan Oralit sebesar 2.186 orang (99,3%).

5. Kusta

Mycobacterium leprae merupakan bakteri penyebab penyakit kusta. Penyakit infeksi kronis ini menyerang kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan atas dan mata. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Seseorang yang mempunyai satu atau lebih tanda utama kusta, yaitu :

- a. Kelainan kulit/lesi dapat berbentuk bercak putih atau kemerahan yang mati rasa
- b. Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf. Gangguan fungsi saraf bisa berupa gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motoris, atau gangguan fungsi otonom.
- c. Adanya basil tahan asam (BTA) di dalam kerokan jaringan kulit (slit skin smear)

Tanda utama Kusta Penderita tipe PB meliputi :

- a) Jumlah bercak kusta 1-5;
- b) Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi hanya 1 saraf; dan
- c) Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit negatif Basil Tahan Asam (BTA).

Sedangkan tanda utama Kusta Penderita tipe MB meliputi : a) Jumlah bercak kusta >5; b) Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi lebih dari 1 saraf; dan c) Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit positif Basil Tahan Asam (BTA).

Jumlah Kasus Baru Kusta di Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebanyak 26 kasus yang terdiri dari Pausi Basiler (Pb)/ Kusta Kering

sebanyak 2 kasus dan Multi Basiler (Mb)/ Kusta Basah sebanyak 24 kasus.

2.2.2.9 Penyakit Tidak Menular

Di Indonesia, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) PTM semakin meningkat. Hal tersebut menjadi beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Peningkatan beban akibat PTM sejalan dengan meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok dan alkohol.

Peningkatan PTM berdampak negatif pada ekonomi dan produktivitas bangsa karena pengobatan PTM seringkali memakan waktu lama dan memerlukan biaya yang besar. Beberapa jenis PTM merupakan penyakit kronik dan/atau katastropik yang dapat mengganggu ekonomi penderita dan keluarganya. Selain itu, salah satu dampak PTM adalah terjadinya kecacatan termasuk kecacatan permanen. Secara global, regional dan nasional, diproyeksikan pada Tahun 2030 akan terjadi transisi epidemiologi dimana terjadi perubahan dari angka kesakitan dan angka kematian yang dulunya disebabkan oleh penyakit menular menjadi disebabkan karena penyakit tidak menular.

Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan untuk mengendalikan faktor risiko PTM, melalui perilaku CERDIK, yaitu Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stres. Cek Kesehatan secara berkala yaitu pemeriksaan faktor risiko PTM dapat dilakukan melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM yang ada di Desa/Kelurahan, dan di Puskesmas. Kabupaten Sragen telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan 23 Mei 2019. Upaya pengendalian PTM tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh jajaran lintas sektor, baik pemerintah, swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, bahkan seluruh lapisan masyarakat. Beberapa Penyakit Tidak Menular (PTM) yang dilakukan

program upaya pencegahan dan pengendalian di Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen antara lain sebagai berikut.

1. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)

Hipertensi disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa keluhan dan penderita baru menyadari setelah terjadi komplikasi. Pengukuran tekanan darah merupakan salah satu kegiatan deteksi dini terhadap faktor risiko PTM seperti Hipertensi, Stroke, Jantung, Kelainan Fungsi Ginjal atau yang lainnya. Pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 Tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun meliputi: 1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat dan 3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Pada Tahun 2024, estimasi jumlah penderita hipertensi ≥ 15 Tahun yang menjadi sasaran SPM meningkat sebanyak 251.672 orang dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 253.756 orang (100,8%).

2. Diabetes Melitus

Pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 Tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan sesuai standar tersebut meliputi: a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan; b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi; dan c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 Tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan sesuai standar tersebut meliputi: a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan; b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi; dan c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

3. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan kanker tertinggi di dunia maupun di Indonesia. Kedua kanker di atas menjadi salah satu masalah utama pada kesehatan perempuan di dunia, terutama pada negara berkembang yang mempunyai sumber daya terbatas seperti di Indonesia. Pengendalian kanker, khususnya kanker payudara dan kanker leher rahim, dikembangkan melalui program deteksi dini (skrining). Program ini dilakukan dengan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan krioterapi untuk IVA positif untuk kanker leher rahim. Sedangkan untuk kanker payudara dilakukan pemeriksaan payudara klinis (SADANIS) atau Clinical Breast Examination (CBE) dan Periksa Payudara Sendiri (SADARI).

Tahun 2024 Dari 44.282 Wanita Usia 30-50 Tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko yang melakukan pemeriksaan IVA test sebanyak 3.207 (7,2%) ditemukan IVA positif sebanyak 177 orang atau sebesar 5,5 %, sedangkan yang melakukan pemeriksaan sadanis sebanyak 3.737 orang (0,1%) dan ditemukan Tumor/Benjolan pada 28 orang atau sebesar 0,7 %, curiga kanker payudara 4 orang (0,1%).

4. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat Kesehatan Jiwa menurut Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, berupa: pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental), memberikan informasi dan edukasi, tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila diperlukan. Standar pelayanan dilakukan oleh minimal 1 orang.

Dokter Umum/Spesialis Kedokteran Jiwa dan 1 orang Perawat/Perawat Spesialis Keperawatan Jiwa.

Sasaran ODGJ Berat di Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebanyak 2.221, dimana yang mengalami Skizofrenia sebanyak 2.087 orang dan Psikotik Akut sebanyak 138 orang dan sebesar 100 % telah mendapatkan pelayanan sesuai standar

2.2.2.10 Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Kepesertaan JKN terdiri dari :

- 1. PBI APBN
- 2. PBI APBD
- 3. Pekerja Penerima Upah (PPU)
- 4. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri
- 5. Bukan Pekerja (BP)

Sampai dengan akhir Desember 2024 pencapaian kepesertaan yang terdaftar dalam layanan JKN-KIS mencapai 99,02 % dari total jumlah penduduk di Kabupaten Sragen. Kepesertaan yang terdaftar dalam layanan JKN-KIS (PBI APBN) sebanyak 40,57 % dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebanyak 18,40 %, kemudian terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) 22,83 %, terdaftar sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 14,94 % dan sebagai Bukan Pekerja (BP) 2,27 % (lampiran tabel 17). Pencapaian kepesertaan JKN-KIS tersebut karena didukung komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (BPJS). Berdasar data BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen, tercatat per 1 Agustus 2024, capaian UHC di Kabupaten Sragen mencapai 99,20%, atau 1.009.495 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1.017.684 jiwa

2.2.2.11 Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

Program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendeteksi penyakit secara dini, mendorong gaya hidup sehat, serta menekan biaya pengendalian penyakit kronis

dan berat. Pemeriksaan dilakukan sesuai tahap kehidupan, mencakup seluruh kelompok usia mulai dari bayi hingga lansia, dan tersebar di seluruh wilayah. Akses layanan ini bagi semua kalangan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Sragen.

Masalah kesehatan memiliki dampak negatif terhadap produktivitas dan kualitas hidup. Secara global, terjadi pergeseran jenis penyakit utama dari menular ke tidak menular, akibat kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi kesehatan. Hal ini disertai peningkatan jumlah lansia dan kebutuhan layanan kesehatan. Penyakit kronis seperti stroke, jantung, diabetes, dan kanker membutuhkan biaya tinggi. Dalam 20 tahun terakhir, pengeluaran kesehatan tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Jika tren ini berlanjut, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan bisa mencapai 19% dari APBN pada 2045, yang berisiko tidak berkelanjutan tanpa penyesuaian pembiayaan atau intervensi kebijakan kesehatan.

Tingginya beban penyakit dan biaya layanan kesehatan dapat diminimalisir melalui pendekatan promotif dan preventif. Salah satu bentuk pencegahan tersebut adalah deteksi dini penyakit. Semakin cepat suatu penyakit teridentifikasi, semakin rendah biaya pengobatan dan semakin besar peluang untuk sembuh sepenuhnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan layanan pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh kelompok usia, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai langkah solusi, pemeriksaan kesehatan berperan penting dalam mendeteksi penyakit sejak dini, sehingga dapat mencegah serta mengendalikan gangguan kesehatan yang berpotensi menurunkan kualitas hidup, menimbulkan kecacatan, atau bahkan menyebabkan kematian. Hal tersebut yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang sehat. Beberapa layanan kesehatan gratis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

Balita dan Anak Usia Prasekolah	Anak Usia Sekolah dan Remaja	Dewasa 1	Dewasa 2	Lansia
				
Usia 0 - 6 Tahun	Usia 7 - 17 Tahun	Usia 18 - 39 Tahun	Usia 40 - 59 Tahun	Usia >60 Tahun
1. Hipotiroid Kongenital 2. Penyakit Jantung Bawaan Kritis 3. Hiperplasia Adrenal Kongenital 4. Defisiensi G6PD 5. Pertumbuhan 6. Perkembangan 7. Indra Pendengaran 8. Indra Penglihatan 9. Gigi dan Mulut 10. Talasemia 11. Hepar	1. Indra Pendengaran 2. Indra Penglihatan 3. Gigi dan Mulut 4. Talasemia 5. Anemia 6. Obesitas 7. Diabetes Melitus 8. Hipertensi 9. Paru-Paru 10. Kesehatan Jiwa 11. Kebugaran 12. Hepar	1. Indra Pendengaran 2. Indra Penglihatan 3. Gigi dan Mulut 4. Talasemia 5. Obesitas 6. Diabetes Melitus 7. Hipertensi 8. Faktor Risiko Jantung-Strok 9. Penyakit Ginjal Kronis 10. Paru-Paru 11. Kesehatan Jiwa 12. Kebugaran 13. Kanker Payudara 14. Kanker Leher Rahim 15. Hepar 16. Osteoporosis	1. Indra Pendengaran 2. Indra Penglihatan 3. Gigi dan Mulut 4. Obesitas 5. Diabetes Melitus 6. Hipertensi 7. Kolesterol 8. Faktor Risiko Strok 9. Faktor Risiko Jantung 10. Penyakit Ginjal Kronis 11. Paru-Paru 12. Kesehatan Jiwa 13. Kebugaran 14. Kanker Payudara 15. Kanker Leher Rahim 16. Kanker Usus 17. Hepar 18. Osteoporosis	1. Indra Pendengaran 2. Indra Penglihatan 3. Gigi dan Mulut 4. Obesitas 5. Diabetes Melitus 6. Hipertensi 7. Kolesterol 8. Faktor Risiko Strok 9. Faktor Risiko Jantung 10. Penyakit Ginjal Kronis 11. Paru-Paru 12. Kesehatan Jiwa 13. Kebugaran 14. Kanker Payudara 15. Kanker Leher Rahim 16. Kanker Usus 17. Geriatri 18. Hepar 19. Osteoporosis

Gambar 2. 66 Paket Skrining Pemeriksaan Kesehatan Gratis Tahun 2025

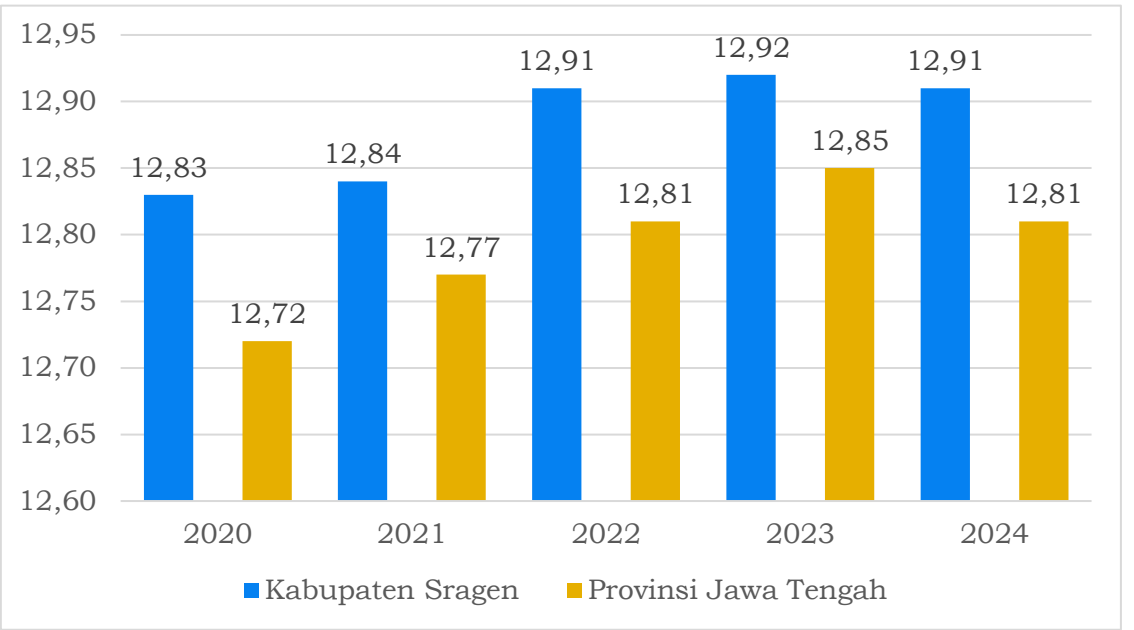
Pemeriksaan Kesehatan gratis dilakukan dengan pemberian layanan paket skrining sesuai siklus hidup (kelompok usial dan faktor risiko penyakit). Penyediaan paket skrining mencakup pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) dan biaya pemeriksaan, pengiriman sampel, dan tes konfirmasi. Untuk memastikan program ini berjalan optimal, diperlukan pula upaya penguatan sistem dan tata Kelola pemeriksaan Kesehatan gratis, antara lain melalui pembinaan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, pengembangan sistem data rutin terintegrasi, dan tata laksana untuk tindak Lanjut kasus kesehatan dari hasil pemeriksaan Kesehatan gratis.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Urusan pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. Urusan pendidikan menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana merupakan indikator makro untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah harapan masyarakat dalam

menempuh pendidikan, dan lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator makro yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di suatu daerah. Capaian Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah di suatu daerah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sragen Tahun 2020 hingga 2024.

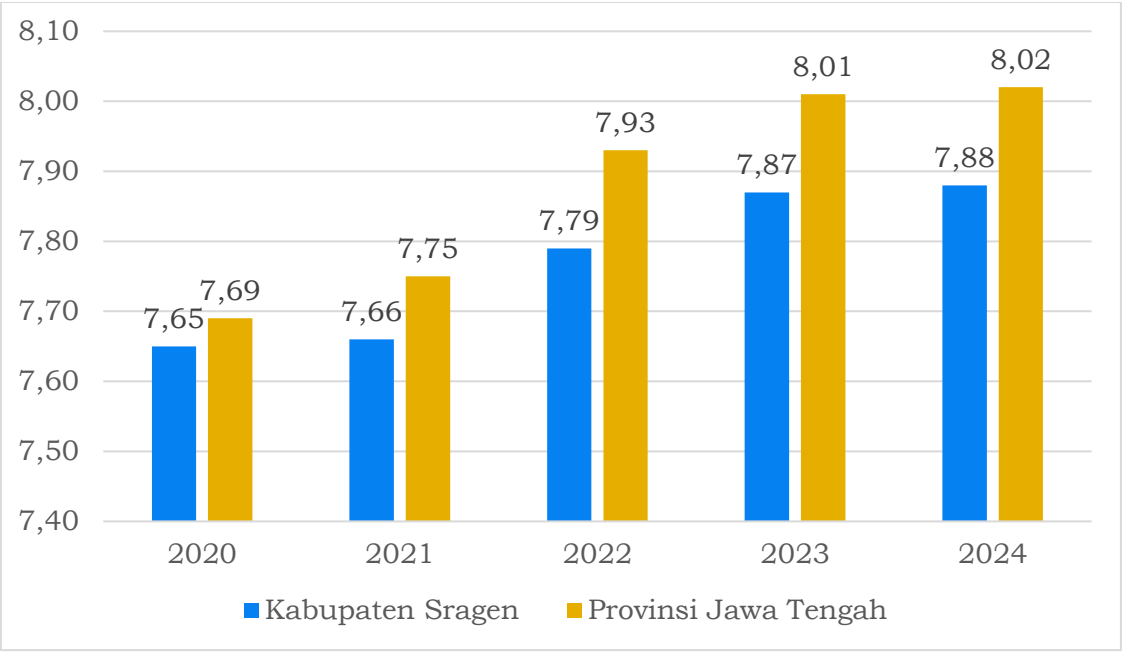


Gambar 2. 67 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sragen menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam durasi pendidikan yang dapat dinikmati oleh penduduk usia sekolah di masa depan. Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Sragen berada pada angka 12,91 tahun, yang berarti masyarakat usia sekolah memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan formal selama 12 tahun atau setara dengan jenjang kelas 3 SMA. Selain itu, capaian HLS Kabupaten Sragen secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan HLS Provinsi Jawa Tengah dalam periode yang sama. Namun demikian, upaya pembangunan pada aspek pendidikan masih perlu untuk dilakukan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. RLS menjadi bagian dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena berperan dalam menunjukkan tingkat akses dan partisipasi masyarakat terhadap sistem pendidikan. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sragen mengalami tren yang positif selama periode lima tahun terakhir. Berikut merupakan capaian Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Sragen selama periode 2020 hingga 2024



Gambar 2. 68 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sragen menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Dalam lima tahun terakhir, RLS di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan sebesar 0,23 poin. Pada tahun 2024, angka RLS Kabupaten Sragen mencapai 7,88 tahun, yang berarti rata-rata masyarakat usia sekolah telah menempuh pendidikan hingga setara dengan kelas 1 SMP. Selain itu, capaian RLS Kabupaten Sragen secara konsisten masih berada di bawah rata-rata RLS di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan masih perlu adanya percepatan dalam upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Sragen guna meningkatkan lama bersekolah masyarakat usia sekolah di Kabupaten Sragen, sehingga mendukung peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik.

Tahun 2025, melalui program 8 Astacita Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi, revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran. Hal ini dituangkan dalam program prioritas Kemendikdasmen dalam beberapa program prioritas diantaranya:

- 1) Wajib belajar 13 tahun dan pemerataan Kesempatan Pendidikan, melalui:
 - a. perluasan akses 1 tahun pra SD
 - b. perluasan akses pendidikan menengah
 - c. akselerasi penanganan Anak Tidak Sekolah/ATS
 - d. penguatan pendidikan non formal dan informal, antara lain dengan melakukan afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, rumah belajar, relawan mengajar, PAUD dan pendidikan jarak jauh
- 2) pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dengan renovasi sekolah
- 3) penguatan pendidikan literasi, numerasi dan sains teknologi melalui
 - a. pendidikan matematika, sains dan teknologi sejak dini
 - b. peningkatan kecakapan literasi
- 4) penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah
 - a. penanaman karakter 7 kebiasaan anak hebat indonesia
 - b. makan bergizi gratis (MBG) dan penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi membaca; Numerasi. Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen

Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Perlu intervensi khusus
2. Dasar
3. Cakap
4. Mahir

Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

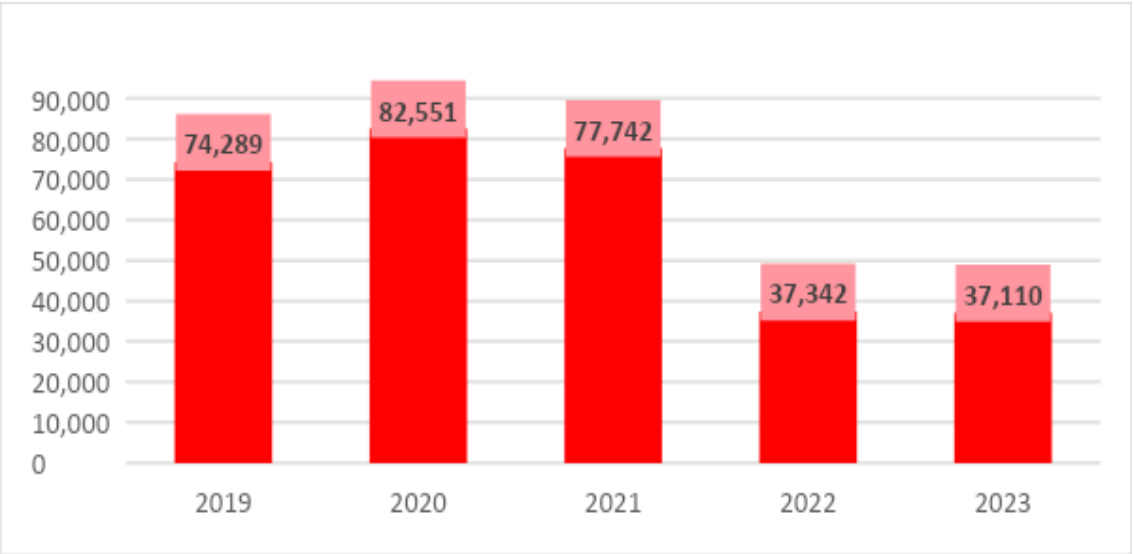
Capaian Literasi membaca SD/ Sederajat Kabupaten Sragen tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari 52,77% menjadi sebesar 63,22% pada tahun 2023. Capaian literasi membaca SMP/ sederajat tahun 2021-2023 juga mengalami peningkatan dari 65% pada tahun 2021 menjadi sebesar 74,33% pada tahun 2023. Sementara untuk capaian numerasi SD/ sederajat telah mengalami peningkatan dari 36,63% pada tahun 2021 menjadi sebesar 49,35% pada tahun 2023 dan numerasi SMP/ sederajat dari sebesar 65% pada tahun 2021 menjadi sebesar 65,33% pada tahun 2023.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa data seperti kondisi keluarga pra sejahtera di suatu daerah.

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari enam indikator kesejahteraan dasar. Indikator tersebut mencakup: 1) Makan setidaknya dua kali sehari; 2) Setiap anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, dan bepergian; 3) Rumah memiliki atap dan dinding yang layak; 4) Jika ada anggota keluarga yang sakit, mereka mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan; 5) Pasangan usia subur yang ingin mengikuti program Keluarga Berencana (KB) mengakses layanan kontrasepsi; dan 6) Semua anak berusia 7-15 tahun bersekolah. Keenam

aspek ini menjadi tolok ukur utama dalam menentukan status keluarga pra sejahtera. Berikut merupakan kondisi keluarga pra Sejahtera di Kabupaten Sragen.



Gambar 2. 69 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

Di Kabupaten Sragen, jumlah keluarga pra sejahtera menunjukkan tren penurunan dari 74.289 kepala keluarga (KK) pada tahun 2019 menjadi 37.110 KK pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2020, jumlahnya sempat meningkat hingga 82.511 KK akibat dampak pandemi COVID-19 sebelum akhirnya kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah guna memberikan jaminan sosial terutama bagi keluarga yang berada pada kelompok rentan.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Konsep Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju mencerminkan keseimbangan antara praktik keagamaan yang membawa manfaat bagi kehidupan serta perkembangan budaya yang tetap menghargai kearifan lokal, sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Beragama maslahat mengacu pada praktik keagamaan yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memberikan dampak positif dalam aspek sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Pola keberagamaan ini mendorong sikap toleransi, kepedulian, serta keharmonisan antar individu dan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, berkebudayaan maju menggambarkan proses perkembangan budaya yang tetap mempertahankan identitas dan akar

tradisionalnya, tetapi tetap terbuka terhadap perubahan global. Kemajuan budaya ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menghargai warisan leluhur tanpa terjebak dalam konservatisme yang menghambat inovasi.

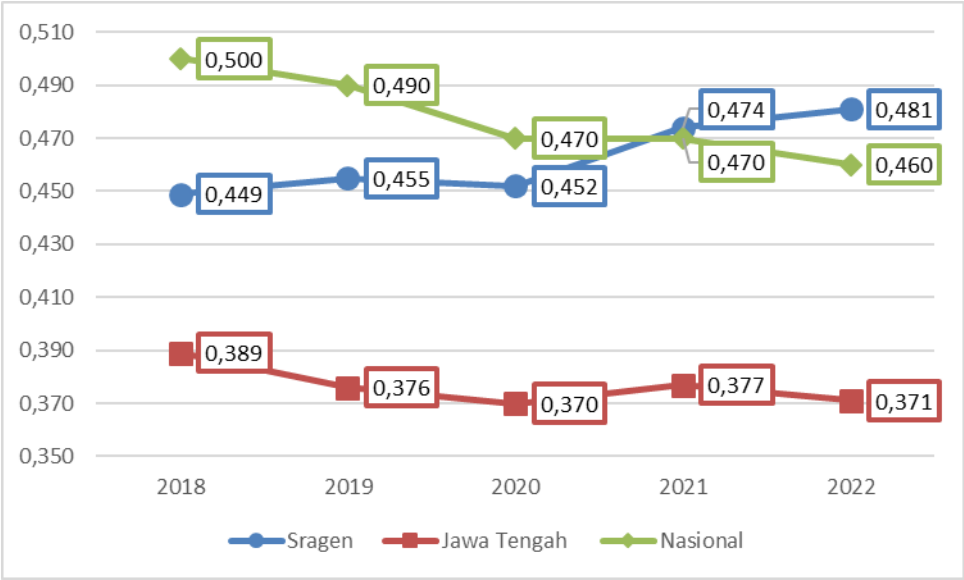
Kolaborasi antara nilai-nilai keagamaan yang membawa maslahat dan budaya yang berkembang secara dinamis menciptakan masyarakat yang harmonis, kompetitif, serta memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Keberhasilan dalam menciptakan keseimbangan ini dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

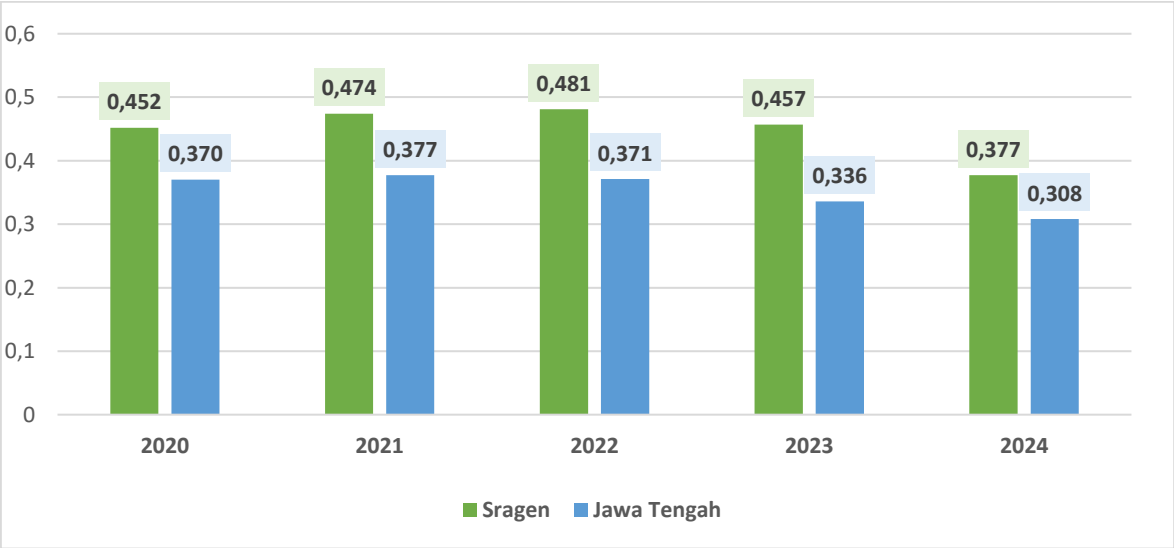
Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa data seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.2.7 Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pembangunan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG Kabupaten Sragen selama 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan makin tingginya ketimpangan gender.



Tahun 2022 dan tahun 2023 IKG Kabupaten Sragen berada diatas IKG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan tahun 2024 capaiannya 0, 377.



Gambar 2. 70 Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 *Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025*

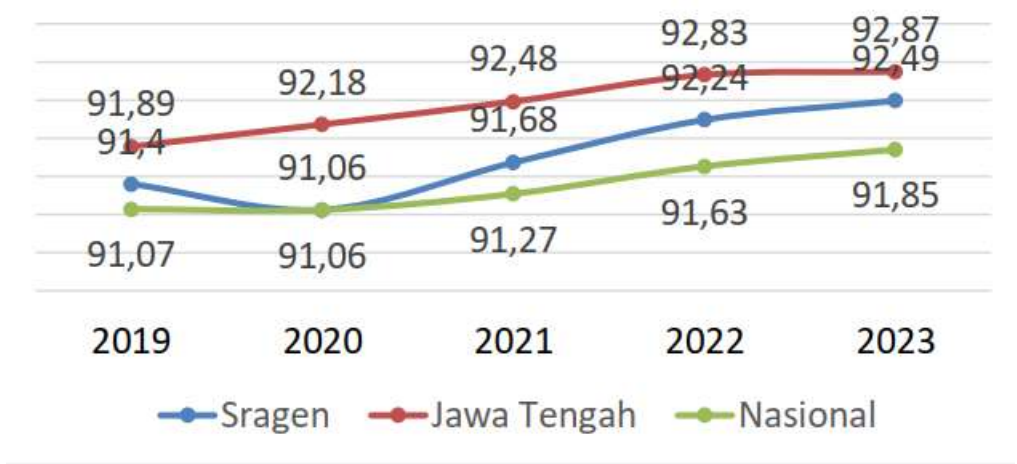
Setelah 2022, terjadi penurunan cukup tajam hingga mencapai 0,377 pada 2024, menunjukkan perbaikan dan semakin kecilnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, Sragen konsisten memiliki nilai IKG yang lebih tinggi setiap tahunnya.

2.2.7.1 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia (sama seperti definisi IPM), namun terpilih berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan

gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100. Dikatakan tidak ada kesenjangan apabila nilai IPG sama dengan IPM.

Capaian IPG Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2019-2023 cenderung turun. Pada tahun 2018 nilai IPG Kabupaten Sragen sebesar 92,97 dan pada tahun 2023 turun menjadi 92,49. Dibandingkan IPG Jawa Tengah, IPG Kabupaten Sragen lebih rendah dengan selisih 0,38, sedangkan dibandingkan IPG Nasional IPG Kabupaten Sragen lebih tinggi dengan selisih 0,64.



Gambar 2. 71 Perkembangan IPG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber Data: BPS 2024

2.2.8 Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak telah diimplementasikan di suatu wilayah. IPA mencerminkan kondisi ideal di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung potensi mereka secara optimal, baik dari aspek perlindungan sosial, hingga partisipasi. Nilai IPA yang tinggi menandakan bahwa suatu daerah telah berhasil menciptakan kebijakan dan layanan yang terhadap kebutuhan anak. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam pemenuhan hak anak yang perlu segera di atasi. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi IPA secara berkala menjadi penting sebagai dasar dalam merancang intervensi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

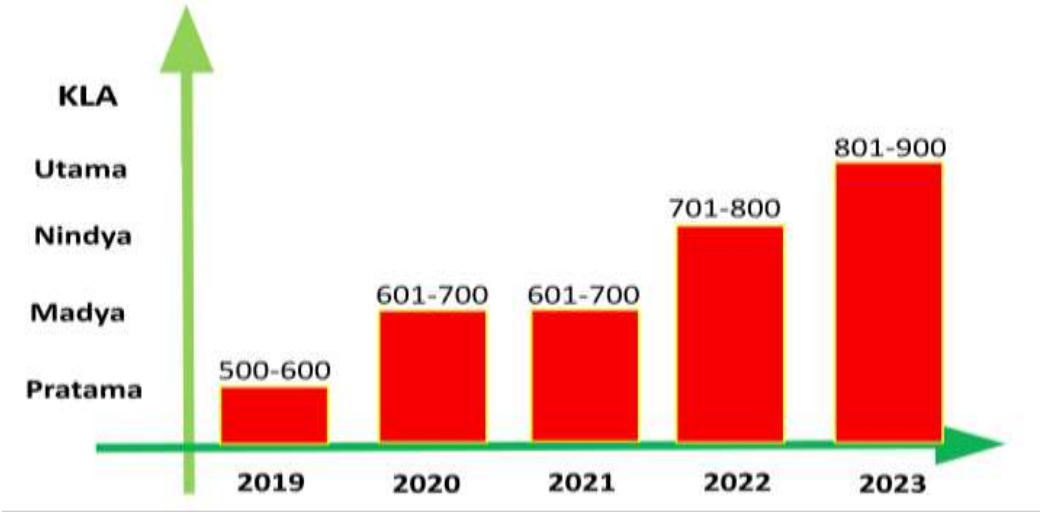
Perwujudan SDM yang berkualitas emas tentunya tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada anak. Melalui berbagai program dan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sragen

berfokus pada upaya perlindungan dan penjaminan hak-hak perempuan dan anak. Dengan adanya upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, diharapkan sekitar 250ribu anak Sragen (usia 0-18 tahun) dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan berkarakter.

Tingginya kasus-kasus yang terkait dengan isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Indonesia merupakan indikasi perlunya upaya pemerintah yang terstruktur, berkesinambungan, serta melibatkan banyak pihak. Salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa IPA Sragen tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2022). Capaian IPA pada tahun 2022 adalah 66,48 dan pada tahun 2023 menurun menjadi 65,57. Dari 5 kluster pembentuk IPA, kluster I (Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan) serta kluster IV (Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya), mempunyai kontribusi yang besar terhadap masih kurangnya capaian IPA.

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Terdapat lima klaster pembangunan dan perwujudan Kabupaten Layak Anak yaitu: 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan 5) Perlindungan Khusus Anak. Selain itu juga didukung oleh Kelembagaan, Kelana (Kecamatan Layak Anak) dan Dekela (Desa Layak Anak). Kelima klaster tersebut menjadi elemen penilaian dalam penentuan predikat KLA. Terdapat lima level predikat penilaian KLA mulai dari: 1) Pratama; 2) Madya; 3) Nindya; 4) Utama dan 5) KLA. Berikut grafik predikat KLA Kabupaten Sragen 2019-2023.



Gambar 2. 72 Capaian Predikat KLA Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023
Sumber: RKPD Kabupaten Sragen tahun 2024 dan tahun 2025

Kabupaten Sragen telah menunjukkan kemajuan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui sistem pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA). Peningkatan skor KLA dari 500-600 pada tahun 2019 (Pratama) hingga mencapai 801-900 pada tahun 2023 (Utama) menunjukkan adanya komitmen yang berkelanjutan dalam memperkuat kebijakan dan program perlindungan anak. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan dalam lima klaster utama, termasuk perlindungan khusus anak yang menjadi aspek krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

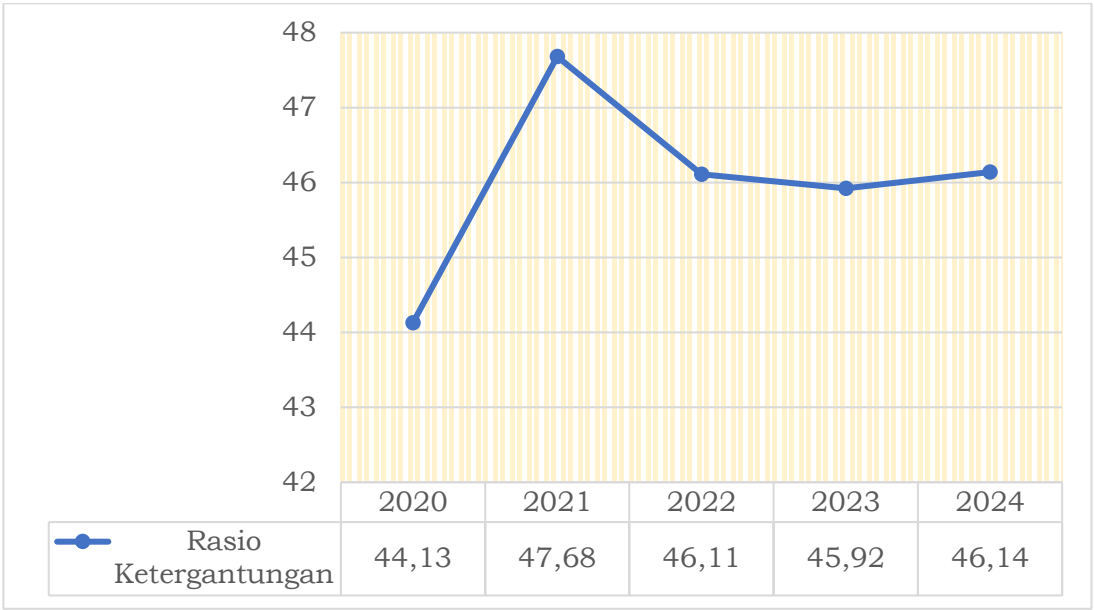
Meskipun telah mencapai predikat Utama, Kabupaten Sragen masih perlu meningkatkan berbagai aspek guna meraih kategori tertinggi, yaitu Kabupaten Layak Anak. Fokus utama ke depan mencakup penguatan mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi peran Kelana (Kecamatan Layak Anak) dan Dekela (Desa Layak Anak) dalam mendukung kebijakan perlindungan sosial yang adaptif. Dengan strategi yang berkelanjutan, diharapkan Sragen dapat memastikan setiap anak mendapatkan hak-haknya secara penuh dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing ekonomi di Kabupaten

Sragen. Kualitas SDM yang unggul bisa membantu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan efisiensi dalam berbagai sektor khususnya ekonomi yang mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Daya saing SDM ini juga ditentukan oleh beberapa aspek seperti tingkat pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kemampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan industri dan teknologi. Adanya SDM yang berkualitas tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena mampu menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengembangkan sektor jasa dan industri secara efektif. Berikut merupakan salah satu indikator yaitu rasio ketergantungan yang dapat menggambarkan kondisi daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Sragen.



Gambar 2. 73 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

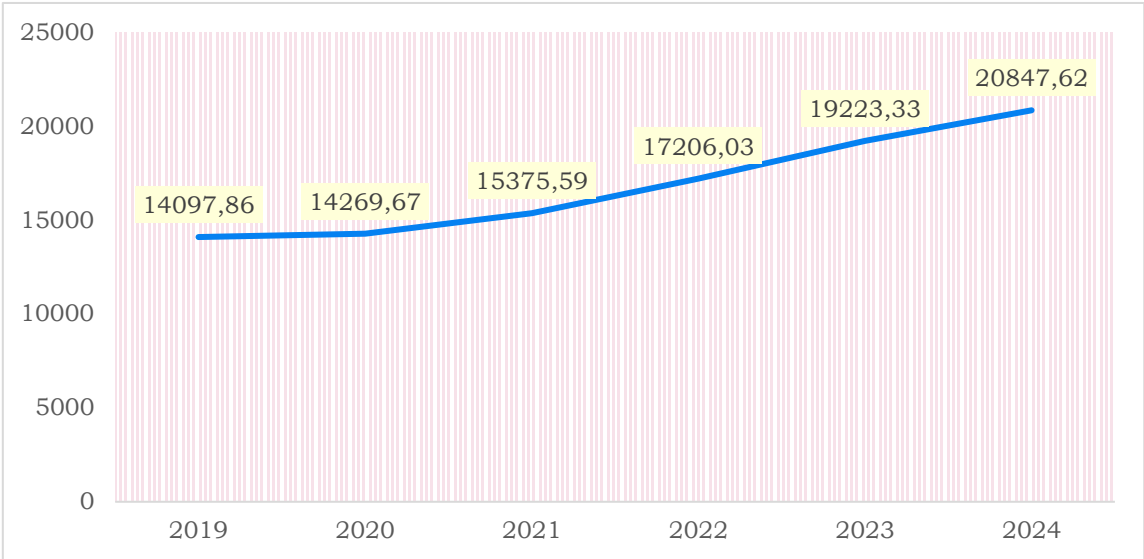
Selama periode 2020 hingga 2024, capaian rasio ketergantungan Kabupaten Sragen mengalami tren yang meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,21 persen. Artinya, jumlah penduduk usia tidak produktif yaitu usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas yang bergantung pada penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun semakin meningkat. Tren peningkatan ini juga menandakan bahwa beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif menjadi semakin berat, yang bisa berdampak kurang baik pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sragen.

2.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), inovasi, serta produktivitas ekonomi merupakan tiga elemen kunci yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan suatu negara. Pemanfaatan Iptek yang optimal dapat melahirkan berbagai inovasi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam berbagai sektor ekonomi. Dengan adanya inovasi, daya saing industri semakin meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Sragen.

2.3.2.1 PDRB Industri Pengolahan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Industri Pengolahan adalah salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian suatu daerah. Sektor ini mencakup berbagai aktivitas produksi yang mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah, seperti industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, dan berbagai industri manufaktur lainnya. Berikut adalah data tentang PDRB industri pengolahan di Kabupaten Sragen.



Gambar 2. 74 PDRB Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) Kabupaten Sragen Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

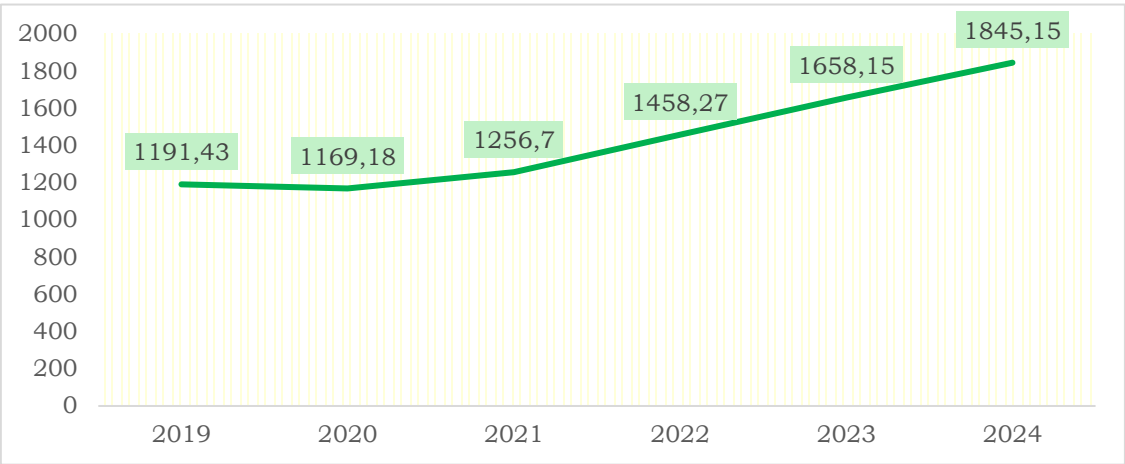
PDRB sektor industri pengolahan menunjukkan tren yang semakin meningkat di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 hingga 2024.

Sektor industri pengolahan menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi dalam struktur ekonomi Kabupaten Sragen. PDRB sektor Industri Pengolahan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, serta mendorong investasi. Perkembangan sektor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan bahan baku, teknologi produksi, infrastruktur pendukung, kebijakan industri, serta permintaan pasar domestik maupun global.

2.3.2.2 PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan kontribusi industri perhotelan, restoran, kafe, serta usaha kuliner lainnya terhadap perekonomian suatu daerah. Sektor ini berperan penting dalam mendukung industri pariwisata, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat.

PDRB pada sektor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah kunjungan wisatawan, daya beli masyarakat, kualitas layanan, serta inovasi dalam penyediaan akomodasi dan makanan. Dengan meningkatnya tren wisata kuliner dan gaya hidup modern, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama jika didukung dengan kebijakan yang mendukung investasi, pengembangan infrastruktur pariwisata, serta promosi yang efektif. Oleh karena itu, pemantauan dan pengembangan sektor ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2. 75 PDRB Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

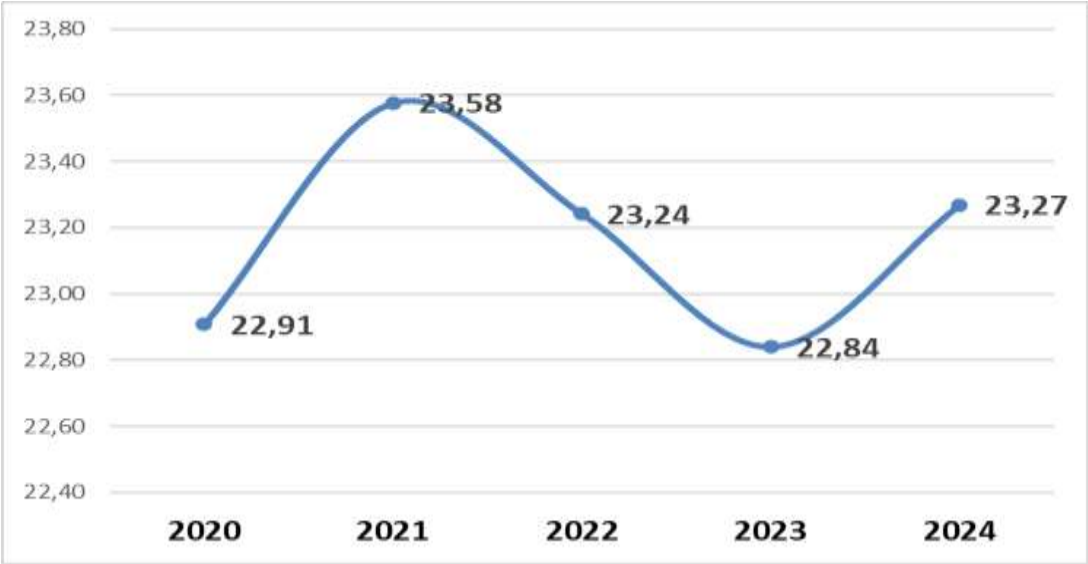
Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan tren yang semakin meningkat di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 hingga 2024. PDRB akomodasi dan makan minum dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan dan berbagai faktor pendukung dari dimensi infrastruktur, tata kelola pemerintahan, lingkungan dan sumber daya manusia. Jika diintervensi dengan kebijakan yang tepat, sektor ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

2.3.2.3 PDRB PMTB

PMTB mencerminkan pengeluaran yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah untuk membeli barang-barang modal baru yang akan digunakan dalam proses produksi. Barang-barang modal ini meliputi mesin, peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Investasi PMTB memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing bangsa.

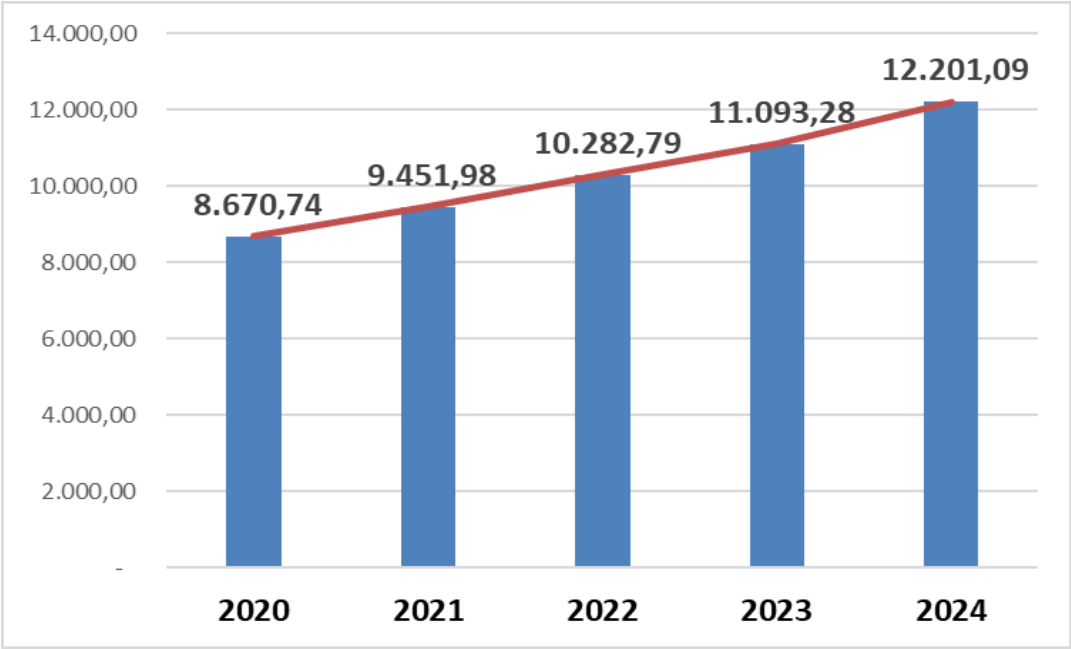
PMTB pada tahun 2024 berkontribusi 23,27% pada pembentukan PDRB ADHB. Pada periode lima tahun sejak 2020-2024 rata-rata kontribusi PMTB mencapai 23,17%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2021 mencapai 23,58% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2023 mencapai 22,84%. Kontribusi PMTB dalam pembentukan PDRB ADHB dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2. 76 Persentase Kontribusi PMTB Terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024

Sumber Data: BPS, 2025

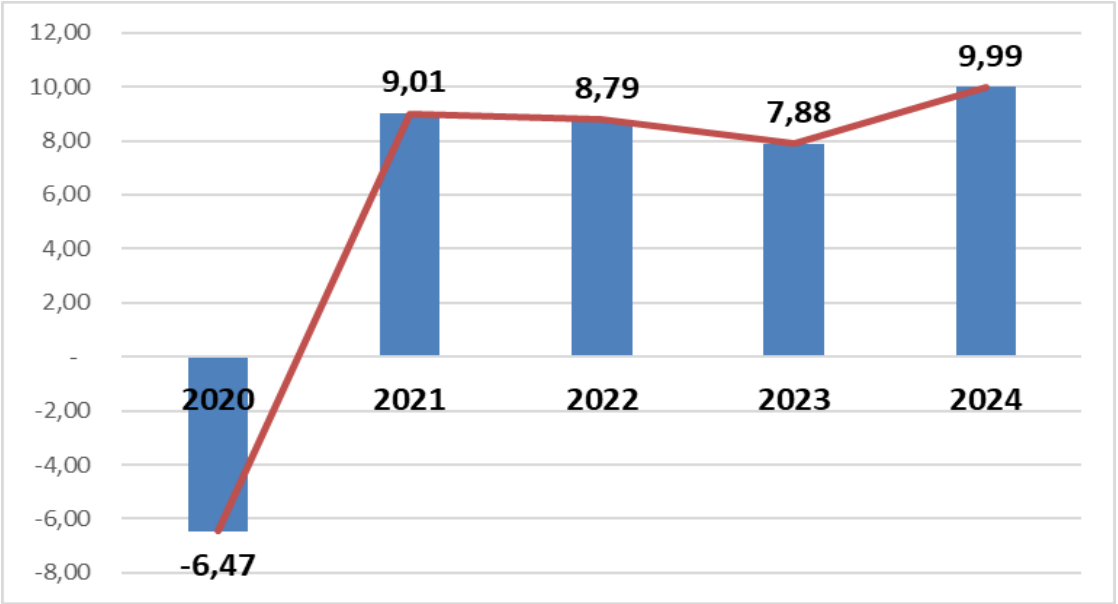
Besaran PMTB pada tahun 2024 mencapai Rp 12.201,09 Miliar dan merupakan nilai tertinggi pada periode 2020-2024 sedangkan nilai terendah terjadi tahun 2020 mencapai Rp 8.670,74 Miliar. Besaran PMTB dalam PDRB ADHB dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2. 77 Nilai PMTB Berdasarkan PDRB ADHB (juta tahun) Tahun 2020-2024

Sumber Data: BPS, 2025

Analisa pertumbuhan PMTB selama lima tahun sejak 2020-2024 menunjukkan bahwa pada periode 2019-2020 PMTB mengalami pertumbuhan terendah mencapai -6,74% sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2023-2024 mencapai 9,99%. Rendahnya pertumbuhan PMTB pada periode 2019-2020 dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan berhentinya proses produksi untuk menghindari kerumunan dan penyebaran Covid-19. Namun demikian, pada periode 2020-2021 PMTB sudah tumbuh positif meski Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Berlanjut sampai dengan periode 2023-2024, PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi. Hal tersebut mencerminkan iklim dan dukungan investasi di Kabupaten Sragen sangat baik. Pertumbuhan PMTB selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2. 78 Pertumbuhan PMTB Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2020-2024
Sumber Data: BPS, 2025

Untuk mengoptimalkan investasi PMTB, iklim investasi perlu disempurnakan, infrastruktur ditingkatkan, dan sumber daya manusia dikembangkan khususnya upaya peningkatan IPM serta mempromosikan investasi berkelanjutan.

2.3.2.4 Return on Asset Badan Usaha Milik Daerah (RoA BUMD)

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. Capaian ROA BUMD di Kabupaten Sragen mengalami penurunan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, tahun 2013 sebesar 4,19% menjadi 3,36% pada tahun 2023.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Pengertian Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru merupakan dua konsep pembangunan berkelanjutan yang saling melengkapi tetapi berbeda fokus, ekonomi hijau merupakan model ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas, dengan fokus utama pada :

1. Pengurangan emisi karbon;
2. Efisiensi sumber daya alam;
3. Inklusi sosial;
4. Perlindungan lingkungan.

Sedangkan ekonomi biru merupakan model ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi ekosistem laut, dengan fokus utama pada :

1. Pemanfaatan laut secara berkelanjutan;
2. Perlindungan ekosistem laut dan pesisir;
3. Inovasi dalam sektor kelautan;
4. Keadilan bagi masyarakat pesisir.

B. Indeks Ekonomi Hijau

Untuk mengukur sejauh mana daerah / negara bergerak menuju ekonomi hijau dibutuhkan alat ukur berupa indeks ekonomi hijau (Green Economy Index). Secara umum indikator GEI mencakup 3 dimensi utama yaitu :

1. Dimensi Lingkungan (Environmental Sustainability)
2. Dimensi Ekonomi (Economic Opportunities)
3. Dimensi Sosial (Sosial Inclusiveness)

Salah satu indikator yang dipakai untuk melihat capaian penerapan ekonomi hijau adalah PDRB Non-Tambang. PDRB Non-Tambang adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan mengecualikan sektor pertambangan dan penggalian, sehingga mencerminkan kontribusi sektor ekonomi lainnya dalam suatu wilayah. Perhitungan ini bertujuan untuk menilai kinerja ekonomi daerah tanpa pengaruh sektor ekstraktif yang cenderung fluktuatif akibat perubahan harga komoditas global. Dengan demikian, PDRB Non-Tambang memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai daya saing dan

ketahanan ekonomi suatu daerah dalam jangka panjang, terutama dalam sektor seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Berikut adalah data distribusi PDRB non tambang di Kabupaten Sragen.

Tabel 2. 56 Distribusi PDRB Non Pertambangan dan Penggalian Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (%)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,79	15,1	14,61	14,07	13,59	13,39
Industri Pengolahan	37,26	37,7	38,35	38,89	39,58	39,76
Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Konstruksi	6,68	6,37	6,67	6,57	6,6	6,68
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,32	18,03	18,07	17,87	17,76	17,5
Transportasi dan Pergudangan	2,33	1,78	1,77	2,76	2,88	2,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,15	3,09	3,13	3,3	3,41	3,52
Informasi dan Komunikasi	1,31	1,52	1,52	1,4	1,44	1,48
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,83	2,87	2,85	2,83	2,69	2,56
Real Estate	0,88	0,88	0,87	0,82	0,8	0,8
Jasa Perusahaan	0,47	0,45	0,45	0,44	0,45	0,46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,06	2,07	1,92	1,83	1,77	1,84
Jasa Pendidikan	4,64	4,71	4,5	4,19	4,08	4,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,86	0,82	0,78	0,77	0,78
Jasa lainnya	1,62	1,57	1,51	1,6	1,6	1,61
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

PDRB tanpa pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sragen didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian dari tahun 2019 hingga 2024. Industri pengolahan terus mengalami tren yang meningkat, sedangkan sektor perdagangan dan pertanian mengalami fluktuasi. PDRB sektor industri pengolahan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan nilai industri, sedangkan PDRB sektor perdagangan membutuhkan dukungan stabilitas harga dan tingkat kelancaran distribusi barang. PDRB sektor pertanian dapat ditingkatkan dengan memperhatikan faktor kapasitas produksi, kualitas produk dan kapasitas pemasaran. Berbagai faktor tersebut membutuhkan dukungan lintas dimensi, meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan lingkungan, sejalan dengan prinsip ekonomi hijau dan biru.

Selain itu, indikator yang berperan dalam penerapan ekonomi hijau dan biru adalah porsi bauran energi terbarukan. Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah serius mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Realisasi pada 2024 bauran EBT di Jateng telah mencapai 18,58 persen, dari target 21,32 persen pada 2025 berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Mengejar target itu, semua pihak dilibatkan, mulai dari perusahaan, pemuda, hingga pemerintah desa, untuk menggunakan energi ramah lingkungan. Komitmen Enhanced NDC (Nationally Determined Contribution) adalah komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim yang lebih ambisius dan komprehensif, yang merupakan pembaruan dari komitmen NDC sebelumnya. ENDC ini sejalan dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) 2050, dengan target mencapai emisi bersih nol pada tahun 2060 atau lebih cepat. NDC penurunan emisi GRK: 31,89% pada 2030 (kemampuan sendiri) dan 43,20% pada 2030 (dengan dukungan internasional). Untuk memperkuat kebijakan dan program energi terbarukan (EBT) sebagaimana prioritas Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Sragen telah melakukan berbagai upaya mendukung realisasi bauran EBT, saat ini terdapat 45 Desa Mandiri Energi Angka ini berdasarkan survey potensi EBT oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2. 57 Daftar Desa Mandiri Energi di Kabupaten Sragen

Nomor	Desa/ Kelurahan	Kategori
1	Desa Sukorejo	Mapan
2	Desa Banyuurip	Berkembang
3	Desa Dawung	Berkembang
4	Desa DUYUNGAN	Berkembang
5	Desa Jambeyan	Berkembang
6	Desa Jono	Berkembang
7	Desa KEDAWUNG	Berkembang
8	Desa Ngargosari	Berkembang
9	Desa Peleman	Berkembang
10	Desa Pendem	Berkembang
11	Desa Ploso	Berkembang
12	Desa Wonorejo	Berkembang
13	Desa BROJOL	Inisiatif
14	Desa BUMIAJI	Inisiatif
15	Desa Gabugan	Inisiatif
16	Desa GABUS	Inisiatif
17	Desa GAWAN	Inisiatif
18	Desa Gebang	Inisiatif
19	Desa JENGGRIK	Inisiatif
20	Desa KALORAN	Inisiatif
21	Desa Karanganyar	Inisiatif
22	Desa Karangasem	Inisiatif
23	Desa Karangtengah	Inisiatif
24	Desa KARANGUDI	Inisiatif
25	Desa KARUNGAN	Inisiatif
26	Desa KREBET	Inisiatif
27	Desa KRIKILAN	Inisiatif

Nomor	Desa/ Kelurahan	Kategori
28	Desa MADE WETAN	Inisiatif
29	Desa MAGERU KIDUL	Inisiatif
30	Desa Manyarejo	Inisiatif
31	Desa Masaran	Inisiatif
32	Desa MOJODOYONG	Inisiatif
33	Desa NGANTI	Inisiatif
34	Desa NGRAMPAL	Inisiatif
35	Desa NGROMBO	Inisiatif
36	Desa Pare	Inisiatif
37	Desa PELEM GADUNG	Inisiatif
38	Desa Pilangsari	Inisiatif
39	Desa PRINGANOM	Inisiatif
40	Desa Puro	Inisiatif
41	Desa Purwokarto	Inisiatif
42	Desa Purworejo	Inisiatif
43	Desa Sambi	Inisiatif
44	Desa SAMBUNGMACAN	Inisiatif
45	Desa Srimulyo	Inisiatif

EBT sudah mulai diterapkan di Kabupaten Sragen salah satunya melalui program bantuan dari Kementerian ESDM tahun 2021 yaitu bantuan-bantuan Panel Surya / PLTS untuk menggerakkan pompa pengairan persawahan di Desa Trombol Kecamatan Mondokan. PLTS dilengkapi dengan baterai 9,6 KWh yang bisa menggerakkan pompa air kapasitas 750 watt yang bisa mengalirkan air sebanyak 3 m³ per jam dan bisa beroperasi 24 jam/sehari. Bantuan Pabel Surya kedua tidak menggunakan baterai namun bisa menggerakkan pompa air kapasitas 2600 watt yang bisa mengalirkan air 6,5 m³ per jam dan bisa beroperasi selama 8 jam.

PLTS atap sudah mulai digunakan di sektor swasta yaitu di sekolah pondok pesantren Baitul Quran di Desa Dawung kecamatan Sambirejo sebanyak 45 panel dengan energi yang dihasilkan mencapai 15.000 watt dan PT. Eco Laundry Indonesia Hijau berlokasi di Desa Krikilan Kecamatan masaran menggunakan PLTS atap berskala industri dengan energi yang bisa dihemat sebesar 176.823 kwh. Dua lokasi semburan gas rawa atau biogenic shallow gas (BSG) ada di Kabupaten Sragen. Berdasar data dari Dinas ESDM Jateng, gas rawa di Sragen muncul di Desa Gabus, Kecamatan Ngrampal dan Desa Jambanan Sidoharjo sebagai pemanfaatan biogenic shallow gas (BSG) atau gas rawa juga menjadi inovasi energi hijau. Selain itu, potensi biogas yang tersebar di berbagai desa dengan total kapasitas puluhan meter kubik, berperan dalam substitusi energi fosil, pengelolaan limbah organik, dan penurunan emisi.

Tabel 2. 58 Lokasi Semburan Gas Rawa di Kabupaten Sragen

Desa	Kecamatan	Jumlah KK Pemanfaat	Tahun COD/ Beroperasi	Sumber Pendanaan
Gabus	Ngrampal	30	2021	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Jambanan	Sidoharjo	35	2023	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2. 59 Data Biogas di Kabupaten Sragen

NO	KABUPATEN/ KOTA	DESA	KECAMATAN	KAPASITAS TOTAL (m³)
1	Kab. Sragen	Manyarejo	Pupuh	18
2	Kab. Sragen	Purworejo	Gumolong	18
3	Kab. Sragen	KARUNGAN	PLUPUH	6
4	Kab. Sragen	JENGGRİK	KEDAWUNG	12
5	Kab. Sragen	BROJOL	MIRI	6
6	Kab. Sragen	GAWAN	TANON	6
7	Kab. Sragen	BROJOL	MIRI	6
8	Kab. Sragen	GABUS	NGRAMPAL	6
9	Kab. Sragen	NGANTI	GEMOLONG	6
10	Kab. Sragen	MOJODOYONG	KEDAWUNG	8
11	Kab. Sragen	KALORAN	GEMOLONG	6
12	Kab. Sragen	MOJODOYONG	KEDAWUNG	6
13	Kab. Sragen	MAGERU KIDUL	KARANG MALANG	6
14	Kab. Sragen	BUMIAJI	GONDANG	8
15	Kab. Sragen	MOJODOYONG	KEDAWUNG	8
16	Kab. Sragen	NGRAMPAL	NGRAMPAL	8
17	Kab. Sragen	KARANGANYAR	SAMBUNG MACAN	10
18	Kab. Sragen	MADE WETAN	NGRAMPAL	10
19	Kab. Sragen	NGANTI	GEMOLONG	10
20	Kab. Sragen	MOJODOYONG	KEDAWUNG	10
21	Kab. Sragen	NGANTI	GEMOLONG	12
22	Kab. Sragen	PELEM GADUNG	KARANGMALANG	12
23	Kab. Sragen	Karang Tengah	Sragen	20
24	Kab. Sragen	Jenggrik	Kedawung	20
25	Kab. Sragen	KARANGASEM	KARANG ASEM	6
26	Kab. Sragen	BUMIAJI	GONDANG	8
27	Kab. Sragen	KARANGUDI	NGRAMPAL	8
28	Kab. Sragen	MOJODOYONG	KEDAWUNG	8
29	Kab. Sragen	PRINGANOM	MASARAN	8
30	Kab. Sragen	KRIKILAN	MASARAN	10
31	Kab. Sragen	KREBET	MASARAN	10
32	Kab. Sragen	KARANGUDI	NGRAMPAL	10
33	Kab. Sragen	SAMBUNGMACAN	SAMBUNG MACAN	10
34	Kab. Sragen	DUYUNGAN	SIDOHARJO	12
35	Kab. Sragen	NGROMBO	PLUPUH	12
36	Kab. Sragen	MOJODOYONG	KEDAWUNG	12
37	Kab. Sragen	Pilangsari	Gesi	4
38	Kab. Sragen	PRINGANOM	MASARAN	8

NO	KABUPATEN/ KOTA	DESA	KECAMATAN	KAPASITAS TOTAL (m³)
39	Kab. Sragen	PRINGANOM	MASARAN	10
40	Kab. Sragen	MOJODOYONG	KEDAWUNG	10
41	Kab. Sragen	KARANGANYAR	SAMBUNG MACAN	12
42	Kab. Sragen	Karangtengah	Karangtengah	20
43	Kab. Sragen	Wonorejo	Kedawung	20
44	Kab. Sragen	Sukorejo	Sambirejo	6
45	Kab. Sragen	Sambi	Sambirejo	6
46	Kab. Sragen	Sukorejo	Sambirejo	8
47	Kab. Sragen	Srimulyo	Gondang	10
48	Kab. Sragen	Sambi	Sambirejo	6
49	Kab. Sragen	Sukorejo	Sambirejo	6
50	Kab. Sragen	Sukorejo	Sambirejo	296
51	Kab. Sragen	Sambi	Sambirejo	8
52	Kab. Sragen	Masaran	Masaran	8
53	Kab. Sragen	Sukorejo	Sambirejo	12
54	Kab. Sragen	Kedawung	Kedawung	0
55	Kab. Sragen	Ploso	Karangmalang	0
56	Kab. Sragen	Pare	Mondokan	6
57	Kab. Sragen	Sukorejo	Sambirejo	20
58	Kab. Sragen	Sukorejo	Sambirejo	40
59	Kab. Sragen	Duyungan	Sidoharjo	20
60	Kab. Sragen	Karangtengah	Sragen	20
61	Kab. Sragen	Pendem	Sumberlawang	20
62	Kab. Sragen	Sukorejo	Sambirejo	20
63	Kab. Sragen	Sukorejo	Sambirejo	8
64	Kab. Sragen	Ngargosari	Sumberlawang	20
65	Kab. Sragen	Jambeyan	Sambirejo	20
66	Kab. Sragen	Peleman	Gemolong	20
67	Kab. Sragen	Jono	Tranon	10
68	Kab. Sragen	Banyuurip	Jenar	42
69	Kab. Sragen	Gebang	Sukodono	10
70	Kab. Sragen	Pilangsari	Gesi	10
71	Kab. Sragen	Sidoharjo	Sidoharjo	10
72	Kab. Sragen	Ngandul	Sumberlawang	6
73	Kab. Sragen	Ngargotirto	Sumberlawang	10
74	Kab. Sragen	Purwosuman	Sidoharjo	10
75	Kab. Sragen	Ngandul	Sumberlawang	12

Indikator ekonomi biru di Kabupaten Sragen terutama terkait sektor perikanan, pengelolaan sumber daya air, dan ekosistem perairan, dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Non-Tambang sebagai salah satu ukuran utamanya. Penguatan ekonomi biru dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya dan tangkap secara berkelanjutan, pengelolaan kualitas air dan sumber daya perairan untuk mendukung

kegiatan ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan perikanan dan perairan guna menjaga keberlanjutan ekosistem. Sinergi ekonomi hijau dan biru ini menjadi pilar pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melestarikan sumber daya alam, menurunkan emisi, mengantisipasi dampak perubahan iklim, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi daerah, membuka peluang kerja baru, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Sragen di tingkat regional, nasional, dan global.

Kabupaten Sragen tidak memiliki laut, hasil perikanan berasal dari perairan umum daratan dengan data sebagai berikut.

Tabel 2. 60 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Penangkapan Tahun 2024

Kecamatan	Perikanan Tangkap di Laut		Perikanan Perairan Umum Daratan	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kalijambe	-	-	-	-
Plupuh	-	-	-	-
Masaran	-	-	-	-
Kedawung	-	-	-	-
Sambirejo	-	-	-	-
Gondang	-	-	-	-
Sambungmacan	-	-	267,75	5.109.940
Ngrampal	-	-	7,66	144.259
Karangmalang	-	-	-	-
Sragen	-	-	-	-
Sidoharjo	-	-	-	-
Tanon	-	-	185,33	4.194.338
Gemolong	-	-	-	-
Miri	-	-	1.159,75	26.569.064
Sumberlawang	-	-	972,48	22.212.512
Mondokan	-	-	-	-
Sukodono	-	-	10,96	209.872
Gesi	-	-	-	-
Tangen	-	-	-	-
Jenar	-	-	49,53	953.643
Kabupaten Sragen	-	-	2.653,46	59.393.628

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sragen

Capaian kinerja pelayanan persampahan Kabupaten Sragen berdasarkan cakupan layanan eksisting meliputi sistem pengurangan dan penanganan sampah. Cakupan layanan eksisting di wilayah perkotaan untuk sistem pengurangan sampah sebesar 4,0%, penanganan sampah sebesar 51,2% dan sampah tidak terkelola sebesar 44,9%. Rekapitulasi akses pengelolaan sampah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 61 Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Sragen

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	4,0 %
2	Penanganan Sampah	51,2 %
3	Sampah Tidak Terkelola	44,9 %
	Total	100 %

Sumber : Instrumen SSK, 2024

Sarana persampahan yang terdapat di Kawasan Perkotaan Sragen antara lain TPST sebanyak 1 unit di Kelurahan Sragen Kulon, TPS3R sebanyak 8 unit di Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Sine, Karangtengah, Nglorog, Plumbungan, Kroyo, dan Gondang, Rumah Kompos/PDU sebanyak 1 unit di Kecamatan Kalijambe dan Bank Sampah yang tersebar di seluruh Kecamatan. Adanya TPS3R dan TPST menunjukkan apabila kawasan ini sudah mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup. Pengangkutan sampah juga dilakukan terutama pada sarana umum, seperti sarana pendidikan, sarana perkantoran, dan sarana kesehatan.

Pengangkutan sampah di wilayah permukiman pusat kota Kawasan Perkotaan Sragen dilakukan oleh Paguyuban Lingkungan Asri (PLA) dari sumber sampah (masyarakat) menuju TPS3R dan TPST, selanjutnya menuju TPA Tanggan diangkut oleh pengangkutan skala Kabupaten oleh DLH. Terdapat pula bank sampah salah satunya berada pada sragen kulon dengan jumlah 8 unit dan 2 rumah kompos. Seluruh wilayah Kelurahan Sragen Kulon dan Sragen Tengah sudah mendapat pengangkutan sampah oleh PLA. Layanan wilayah Kelurahan Plumbungan dan Desa Puro pengangkutan sampah dari sumber sampah menuju TPS dilakukan oleh swasta. Berikut beberapa kondisi layanan sarana persampahan di Kawasan Perkotaan Sragen.

Tabel 2. 62 Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Kabupaten Sragen Tahun 2023

No.	Jenis	Jumlah	Lokasi dan Layanan
A.	Pengumpulan		
1.	TPS	-	
2.	Kontainer	8	
B.	Pengangkutan		
1.	Kendaraan roda 3	6	
2.	L300	8	Diserahkan kepada kelurahan
3.	Truck		
	a. Dump Truck	11	a. Kecamatan Sragen : 6 dump truck, 2 pick up
	b. Truck Engkel	2	b. Kecamatan Gemolong : 1 dump truck
	c. Armroll Truck	2	c. Kecamatan Karangmalang : 4 dump truck, 1 armroll truck, 1 truck engkel
4.	Pick up	2	d. Kec. Masaran, Kec. Sidoharjo, dan Kec. Sumberlawang : 1 armroll truck, 1 truck engkel
C.	Pengolahan		
1.	TPS3R	8	1. TPS3R Ds. Jati – Kec. Masaran 2. TPS3R Dk. Ngepos – Ds. Jetak, Kec. Sidoharjo

No.	Jenis	Jumlah	Lokasi dan Layanan
			3. TPS3R Kp. Turi – Kel. Sine 4. TPS3R Kp. Klitih – Kel. Karang Tengah 5. TPS3R Kp. Ngoncol – Kel. Nglorog 6. TPS3R Kp. Karang – Kel. Plumbungan 7. TPS3R Ds. Puro – Kel. Kroyo 8. TPS3R Ds. Bangunrejo – Kec. Gondang
2.	TPST	1	TPST Manding – Kel. Sragen Kulon
3.	PDU	1	PDU Ds. Banaran – Kec. Kalijambe

Sumber : DLH Kabupaten Sragen, 2023

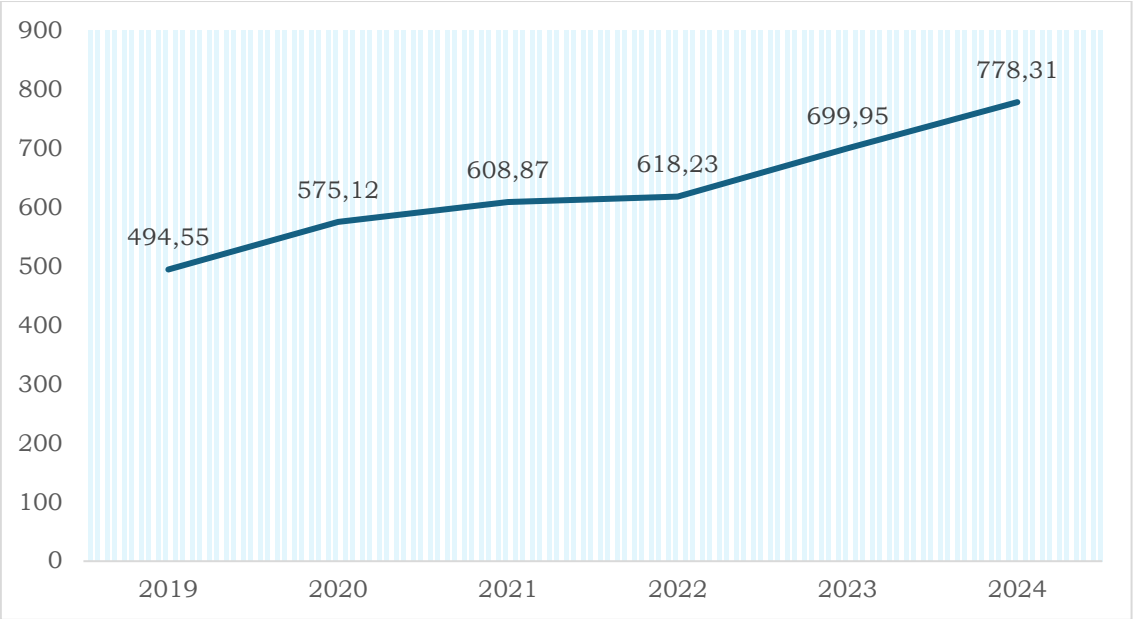
Tabel 2. 63 Potensi EBT Kabupaten Sragen

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas EBT											
		Potensi Angin		Potensi Surya		Potensi Hidro		Potensi Bioenergi					
		Potensi Angin		Potensi Surya		Potensi Hidro		Potensi Biomassa Existing Limbah Industri			Potensi Biomassa Existing Produk Utama		Potensi Biomassa Pengembangan
		Onshore	Offshore	PLTS	PLTS Terapan	PLTA ROR	PLTA Bendungan	Gulud	Kayu	Padi	Sampah Kota Teknis	Sampah Kota Teoritis	Hutan Produksi Kritis
		MW	MW	GWo	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	Ha
Jawa Tengah	Kabupaten Sragen	92,3	3.347,0	6,9	1,9	2,4	-	1,3	-	0,5	7,0	23,4	35,2

Berdasarkan tabel potensi EBT diatas Kabupaten Sragen memiliki potensi energi baru terbarukan yang masih bisa di eksplorasi yakni di sektor potensi angin onshore sebanyak 92,3 MW, Potensi Biomassa Existing samph kota sebanyak 23,4 MW dan Potensi Biomassa pengembangan hutan produksi kritis sebanyak 35,2 MW.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pengguna. Proses ini melibatkan adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, analisis data, dan Internet of Things (IoT) untuk menciptakan sistem yang lebih terhubung, otomatis, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan serta tuntutan zaman. Data proxy sementara yang digunakan untuk melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 79 PDRB Informasi dan Komunikasi Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) Kabupaten Sragen Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

PDRB sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan yang pesat sebesar 283,76 milyar rupiah dari tahun 2019 hingga 2024. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat ini memerlukan dukungan berbagai upaya kebijakan seperti peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan internet, pendidikan literasi digital dan peningkatan keamanan digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi modal yang baik bagi pertumbuhan ekonomi dan berbagai indikator makro pembangunan lainnya.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Perekonomian yang optimal membutuhkan keterhubungan yang erat antara pasar domestik dan pasar global. Dalam konteks globalisasi, muncul berbagai peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi lokal dan domestik untuk memperluas akses pasar. Bagian ini akan menganalisis hubungan antara perekonomian lokal dan perekonomian global dengan menggunakan data terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Untuk mewujudkan suatu kondisi perekonomian yang bersifat global, perlu adanya pengaturan antara berbagai negara/wilayah yang sering kali mencakup pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan, dan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Ini dibuktikan dengan Kabupaten Sragen menorehkan prestasi gemilang

tingkat Nasional dengan meraih penghargaan Anugerah Layanan Investasi atau ALI empat kali berturutan mulai tahun 2021-2024 dari Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).

Banyaknya perusahaan asing (PMA) yang berdiri dan berkembang di Sragen membuat persaingan keuangan, produksi, dan investasi dalam pasar domestic maupun global menjadi semakin ketat. Masuknya perusahaan asing ke dalam suatu negara dimana pemerintah telah memberikan ijin untuk usaha memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi sudah semakin terbuka. Ini akan mendorong laju kenaikan ekspor jasa maupun barang semakin meningkat di pasar global.

Kondisi ini juga didukung angka disparitas harga barang dan jasa di Sragen berkompetitif dengan daerah sekitar. Dengan adanya TOL lintas jawa yang melewati Kabupaten Sragen mempermudah distribusi barang yang kemudian berpengaruh pada capaian disparitas harga di Kabupaten Sragen. Selain itu, komitmen dalam menjaga tingkat inflasi lewat berbagai kebijakan juga membuat harga di Kabupaten Sragen tetap kompetitif, sehingga capaian ekspor barang jasa tetap terjaga.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Upaya mewujudkan integrasi antara wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan. Salah satu komponen infrastruktur wilayah yang sangat vital adalah jaringan jalan yang berfungsi menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan guna memperlancar mobilitas barang, jasa, dan masyarakat.

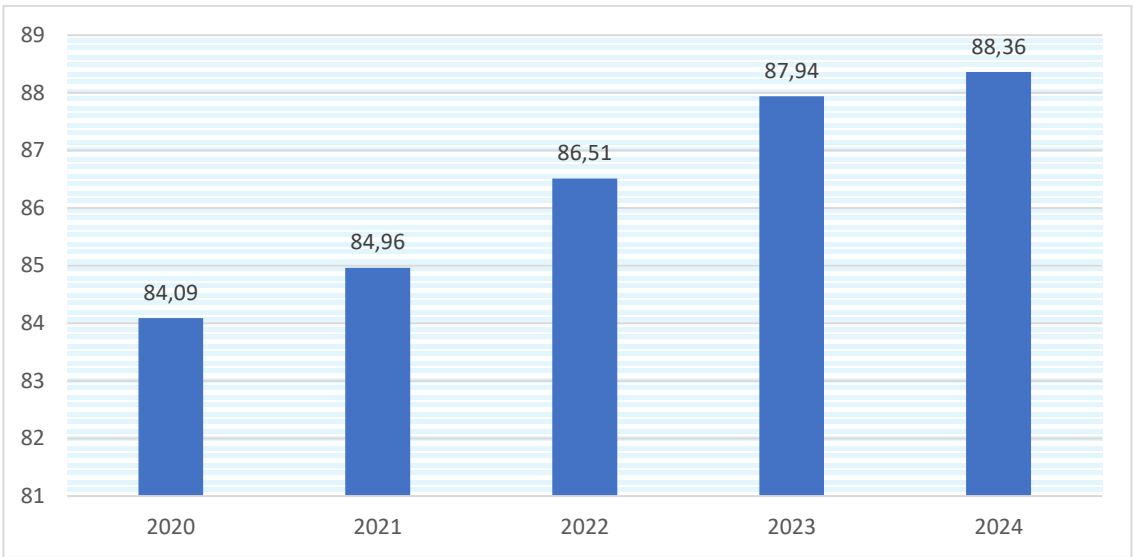
Tabel 2. 64 Kondisi Jalan Kabupaten Sragen

Kondisi	2020		2021		2022		2023		2024	
	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%
Baik	798,24	78,24	808,11	79,21	820,73	80,44	840,36	82,37	845,94	82,92
Sedang	59,71	5,85	58,67	5,75	61,89	6,07	56,86	5,57	55,57	5,45
Rusak ringan	97,33	9,54	92,09	9,03	84,46	8,28	74,66	7,32	74,92	7,34
Rusak berat	64,98	6,37	61,39	6,02	53,18	5,21	48,38	4,74	43,83	4,30
Jumlah	1.020,25	100,00	1.020,25	100,00	1.020,25	100,00	1.020,25	100,00	1.020,25	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2025

Data kondisi jalan di Kabupaten Sragen selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kinerja perbaikan infrastruktur wilayah yang semakin meningkat. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik setiap tahun, serta panjang jalan

dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang terus mengalami penurunan. Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 5,98 persen, sedangkan jalan rusak ringan dan rusak berat masing-masing mengalami penurunan sebesar 23,02 persen dan 32,55 persen.



Gambar 2. 80 Persentase Jalan Mantap Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2025

Capaian kondisi jalan yang mengalami peningkatan berimplikasi pada peningkatan kinerja jalan mantap di Kabupaten Sragen. Selama lima tahun terakhir persentase jalan dalam kondisi mantap mengalami peningkatan sebesar 4,27 persen poin. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu agenda strategis dalam pembangunan daerah, mengingat peranannya yang sangat krusial dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jalan yang memadai tidak hanya menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan wilayah, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

Perkembangan kawasan perkotaan dan perdesaan juga perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang memadai. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak merupakan salah satu prioritas nasional, sejalan dengan upaya pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar. Rumah beserta lingkungan yang aman, sehat, dan tertata menjadi kebutuhan dasar setiap individu untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif. Kebutuhan akan perumahan

sangat dipengaruhi oleh dinamika demografi; pertumbuhan jumlah penduduk secara langsung berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kabupaten Sragen memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk Tahun 2022-2023 sebesar 0,76% (SDA, 2024), artinya pertumbuhan jumlah penduduk akan berimplikasi pada pertumbuhan jumlah keluarga baru yang akan meningkatkan kebutuhan terhadap hunian layak.

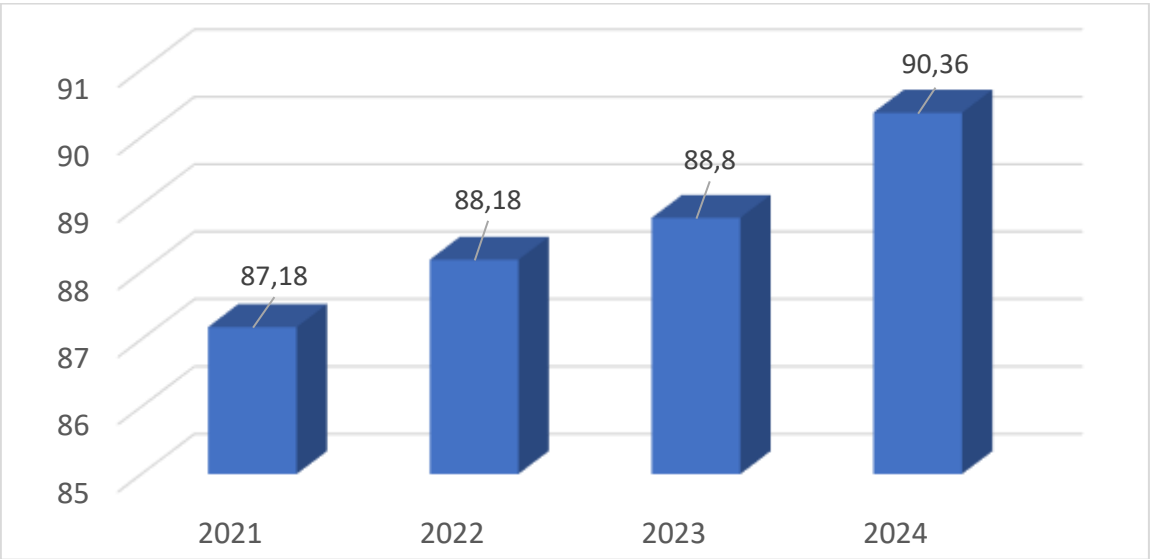
Penambahan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Sragen belum sebanding dengan penambahan penduduk. Ketidakseimbangan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian, khususnya bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Miskin (Maskin). Kelompok ini menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak, terutama disebabkan oleh keterbatasan daya beli akibat rendahnya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan rumah tangga merupakan faktor kunci yang sangat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memiliki atau mengakses hunian yang layak dan aman. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif, baik melalui penyediaan rumah subsidi, bantuan stimulan perumahan swadaya, maupun peningkatan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Tabel 2. 65 Jumlah RTLH Kabupaten Sragen

No.	Kecamatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kalijambe	2.190	2.157	2.043	1.767	1.706
2	Plupuh	2.349	2.298	2.127	2.040	1.979
3	Masaran	659	625	618	607	546
4	Kedawung	690	680	668	621	560
5	Sambirejo	926	900	825	781	720
6	Gondang	940	882	810	742	681
7	Sambungmacan	2.310	2.276	2.059	2.038	1.977
8	Ngrampal	1.073	1.009	812	941	880
9	Karangmalang	324	310	138	278	217
10	Sragen	60	35	17	13	10
11	Sidoharjo	536	520	511	496	435
12	Tanon	3.437	3.380	3.297	3.046	2.985
13	Gemolong	1.671	1.646	1.517	1.485	1.424
14	Miri	1.619	1.606	1.523	1.412	1.351
15	Sumberlawang	3.991	3.961	3.582	3.276	3.164
16	Mondokan	3.022	2.930	2.617	2.483	2.422
17	Sukodono	2.185	2.161	1.989	1.866	1.805
18	Gesi	1.560	1.544	1.412	1.365	1.304
19	Tangen	2.376	2.362	2.316	2.278	2.217
20	Jenar	2.512	2.477	2.253	2.172	2.111
JUMLAH		34.430	33.759	31.134	29.707	28.494

Sumber: Disperkimtaru, 2025

Jumlah RTLH di Kabupaten Sragen berhasil mengalami penurunan sebesar 17,24 persen selama tahun 2020 hingga 2024. Jika dilihat berdasarkan sebarannya, jumlah rumah tidak layak huni paling banyak ditemui di Kecamatan Sumberlawang, Tanon, dan Mondokan, sedangkan kecamatan dengan jumlah RTLH paling sedikit berada di Kecamatan Sragen, yakni hanya 10 unit pada tahun 2024.



Gambar 2. 81 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2024

Sumber: Disperkimtaru, 2025

Jumlah rumah tidak layak huni yang berhasil mengalami penurunan berimplikasi paa peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni. Kondisi ini ditandai dengan capaian persentase rumah layak huni yang mencapai 90,36 persen pada tahun 2024. Data dari BPS Provinsi Jawa Tengah menunjukkan capaian yang berbeda, namun menunjukkan memiliki kesamaan karena sama-sama meningkat. Menurut BPS Provinsi Jawa Tengah, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Kabupaten Sragen pada tahun 2022 berada di angka 72,45 persen. Angka ini terus meningkat di angka 78,53 persen pada tahun 2023. Rumah tangga yang menempati rumah layak huni berada di angka 81,04 persen pada tahun 2024 (BPS Provinsi Jawa Tengah). Rumah tangga yang menempati rumah layak huni ditargetkan berada di angka 92,81 pada tahun 2029. Peningkatan rumah layak huni juga didukung oleh peran multipihak terutama pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan swasta melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk penanganan RTLH.

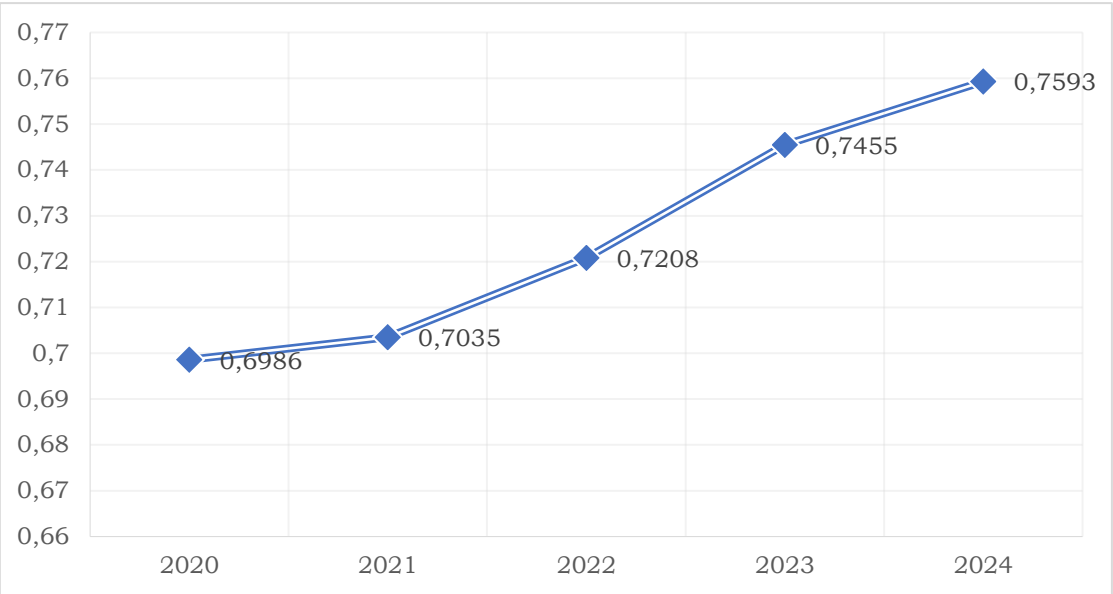
Tabel 2. 66 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 Berdasarkan Sumber Pembiayaan

Tahun	Sumber Pembiayaan						Jumlah (Unit)
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	Dana Desa	CSR	Swadaya/ lainnya	
2020	808	286	90	-	-	-	1.184
2021	207	261	-	32	14	166	680
2022	1.431	441	188	74	20	200	2.354
2023	416	672	484	123	168	183	2.046
2024	120	553	39	236	53	222	1.223

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen, 2025

Penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen didukung oleh berbagai sumber pembiayaan yang cukup beragam, antara lain berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, CSR Swasta dan pembiayaan hasil swadaya lainnya. Namun, jika dilihat dari proporsi kontribusinya, pendanaan dari pemerintah masih lebih mendominasi. Penyediaan rumah layak huni dan permukiman layak perlu terus didukung dengan pembiayaan inovatif dan kolaboratif melalui pelibatan pendanaan dari multipihak.

Upaya mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi juga perlu ditopang dengan kemajuan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan desa. Nilai dan predikat IDM mencerminkan tingkat kemandirian desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Adapun perkembangan IDM Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 82 Nilai IDM Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

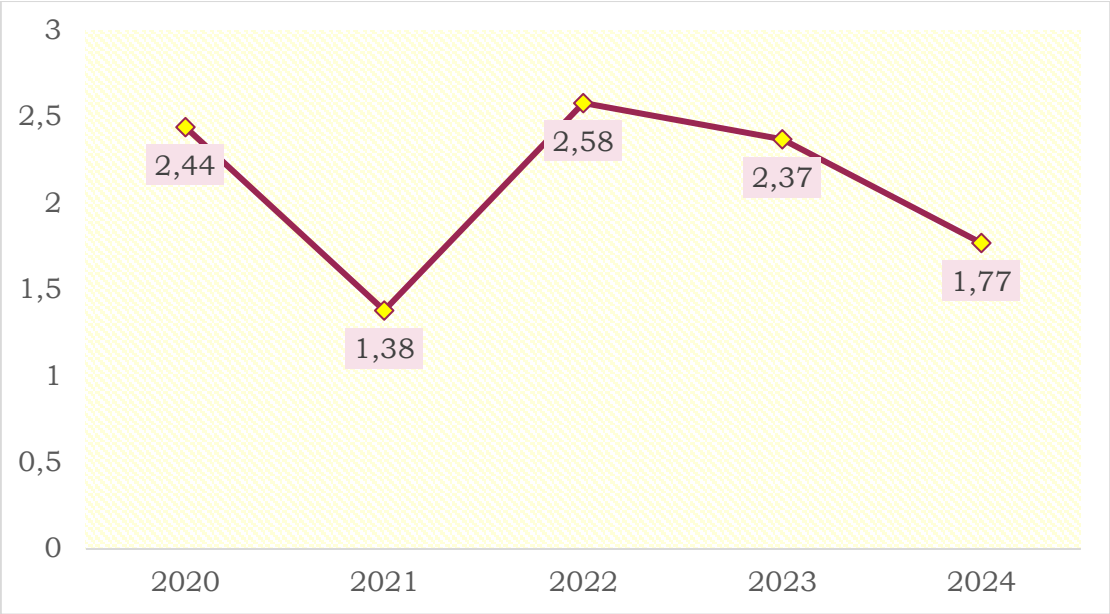
Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/>

IDM Kabupaten Sragen mengalami peningkatan sebesar 0,0607 poin selama tahun 2020 hingga 2024. Capaian ini berhasil meningkatkan predikat status desa menjadi kategori "Maju" sejak tahun 2022. Di masa mendatang, capaian ini diharapkan terus mengalami peningkatan sehingga terjadi penambahan desa dengan status "Mandiri" di Kabupaten Sragen. Semakin banyak desa berstatus "Mandiri" menunjukkan semakin banyaknya desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang sangat kuat dalam pembangunan.

IDM mulai tahun 2025 diubah menjadi ID (Indeks Desa). Perubahan ini berdasarkan Permendes 9 Tahun 2024 yang diundangkan pada Bulan Oktober 2024. Pergantian ini tidak hanya nomenklatur, tetapi juga menyentuh aspek metodologi, fokus pengukuran, dan implikasi kebijakan pembangunan desa. Perubahan ini menjadi momentum mengevaluasi arah dan strategi pembangunan desa yang selama ini diterapkan. ID menggunakan pendekatan yang lebih sederhana namun berupaya lebih komprehensif dalam menangkap dinamika pembangunan desa. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektifitas pengukuran kemajuan desa, serta memfasilitasi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro daerah dapat digambarkan melalui beberapa indikator makro ekonomi, salah satunya tingkat inflasi. Tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu, biasanya diukur secara tahunan atau bulanan. Inflasi mencerminkan perubahan daya beli masyarakat. Berikut ini merupakan tingkat inflasi di Kabupaten Sragen pada periode 2020-2024.



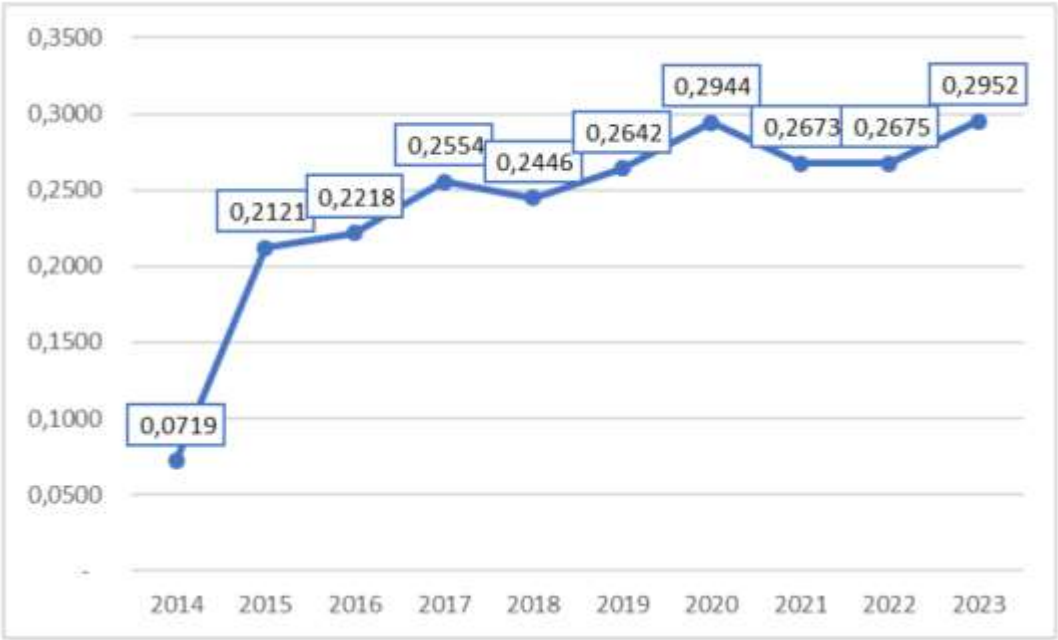
Gambar 2. 83 Tingkat Inflasi di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2025

Tingkat inflasi Kabupaten Sragen merujuk kepada nilai tingkat inflasi di Kabupaten Wonogiri. Selama periode 2020-2024 tingkat inflasi mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni mencapai 2,58. Pada tahun 2024, tingkat inflasi mencapai 1,77, capaian ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat inflasi tahunan Kota Tegal yang mencapai 2,19 pada tahun 2024. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengendalikan inflasi, terutama karena inflasi seringkali dipengaruhi oleh faktor lokal seperti harga pangan, distribusi barang, dan kebijakan daerah. Upaya strategis pemerintah dalam menekan inflasi dapat dilakukan melalui optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan pemantauan harga secara berkala dan mengambil langkah cepat untuk mengatasi kenaikan harga; memastikan kelancaran distribusi barang melalui peningkatan konektivitas daerah; melakukan operasi pasar; serta memperkuat cadangan pangan daerah.

Stabilitas ekonomi makro merupakan landasan yang vital bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Sragen. Selain dilihat dari laju inflasi, stabilitas ekonomi Sragen juga dapat dilihat dari kenaikan rasio pendapatan pajak terhadap PDRB, kenaikan total dana pihak ke-3 di Bank milik daerah terhadap PDRB serta total kredit Bank milik pemerintah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Sragen tahun 2014-2023 cenderung mengalami peningkatan, tahun 2014 sebesar 0,0719% menjadi 0,2952% pada tahun 2023.

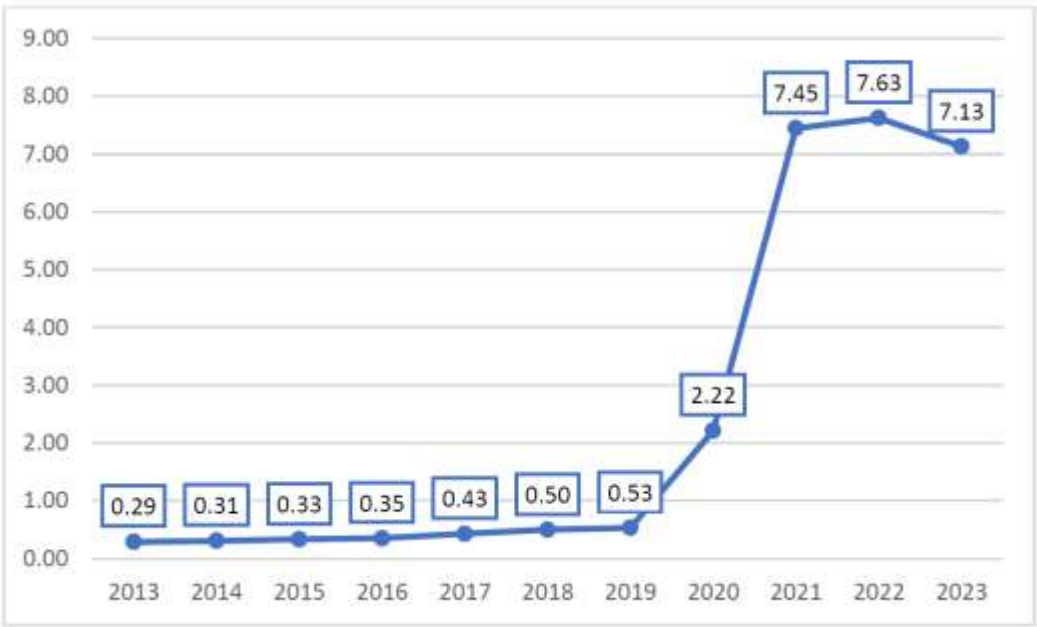


Gambar 2. 84 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kab Sragen Tahun 2014-2023

Sumber: BPS dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024

Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota.

Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) pada tahun 2013 sebesar 0,29%, meningkat menjadi 7,13 pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan bahwa supply pendanaan modal yang dipakai untuk menggerakkan perekonomian meningkat, yang kemudian harus diiringi dengan peningkatan demand penyaluran kredit. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan juga semakin meningkat, yang berarti stabilitas ekonomi makro tetap terjaga.

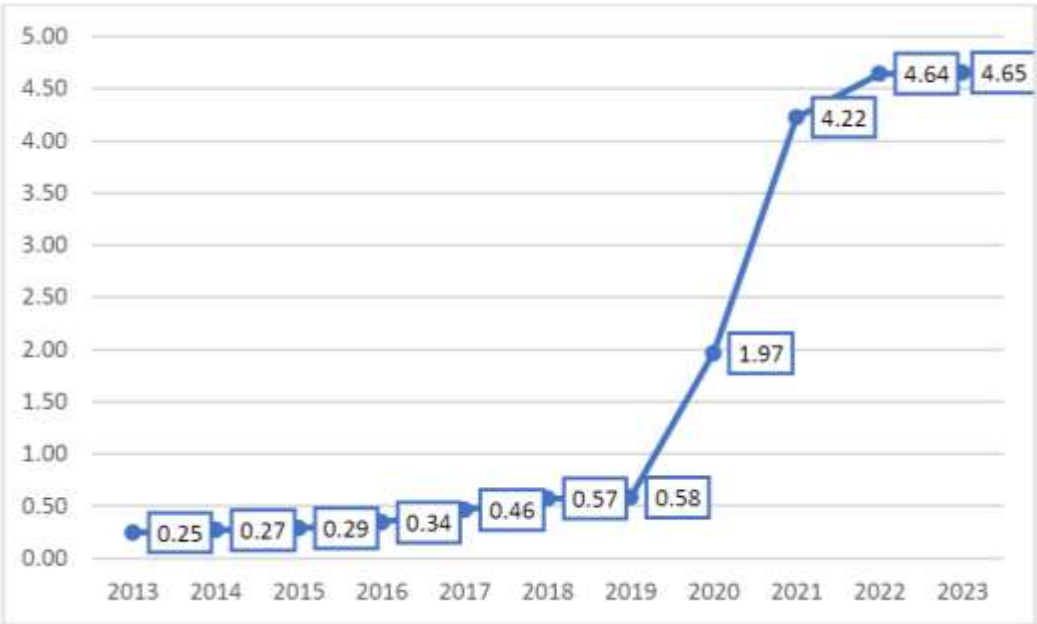


Gambar 2. 85 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)
Sumber: BPR Djoko Tingkir, BPR Syariah, BPR BKK Karangmalang, BPR Jateng, Bank Jateng Tahun 2024

Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota.

Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya

perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut. Sampai dengan tahun 2023 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) sebesar 4,65%, capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,25%.



Gambar 2. 86 Tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan

Sumber: BPR Djoko Tingkir, BPR Syariah, BPR BKK Karangmalang, BPR Jateng, Bank Jateng Tahun 2024

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas transparansi. Dalam mengukur kinerja ini diperlukan analisis terhadap berbagai capaian tata kelola pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

2.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

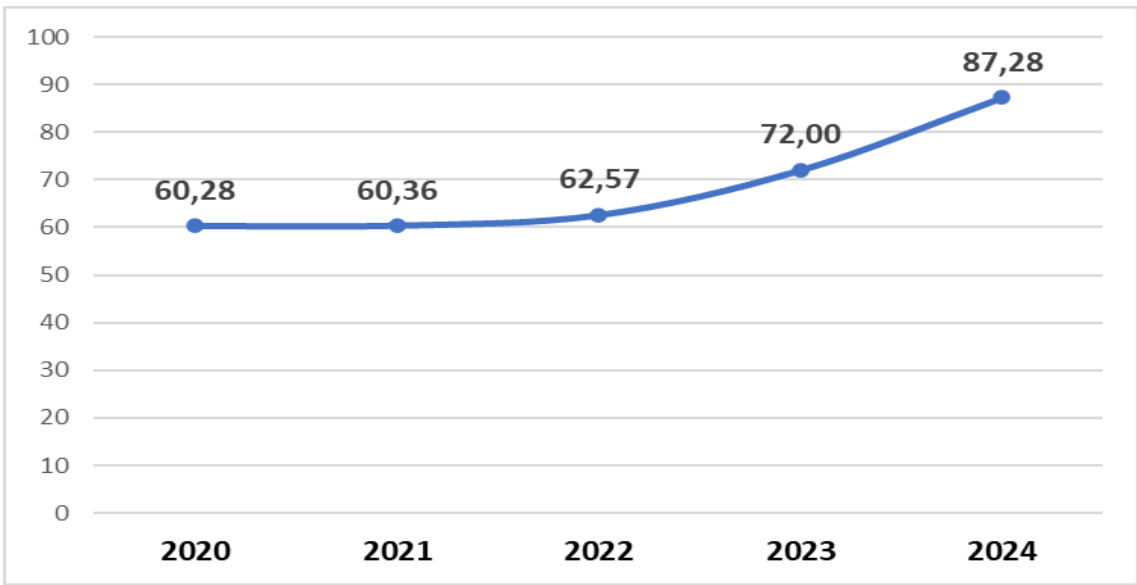
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas implementasi reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Indeks ini diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berdasarkan tiga sasaran strategis utama, yaitu: (1) peningkatan kualitas pelayanan publik, (2) peningkatan efektivitas serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan, dan (3) optimalisasi efisiensi

kelembagaan serta pengelolaan sumber daya aparatur. Berikut adalah capaian Indeks RB dalam lima tahun terakhir

Gambar 2. 87 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Sragen

Tren capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Sragen dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang stabil, terutama dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks RB tercatat sebesar 60,28 (kategori B), yang kemudian sedikit meningkat menjadi 60,36 pada tahun 2021. Kecilnya peningkatan indeks RB



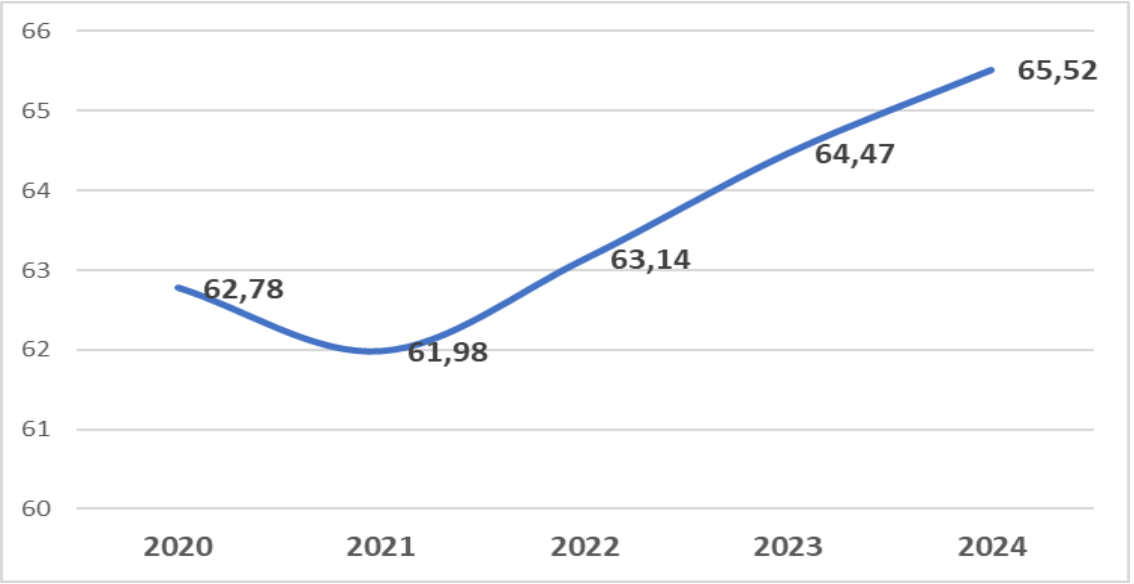
menunjukkan perlunya perbaikan yang lebih signifikan dalam implementasi reformasi birokrasi. Perubahan positif mulai terlihat pada tahun 2022 dengan lonjakan nilai indeks menjadi 62,57, menandakan efektivitas perbaikan tata kelola pemerintahan yang mulai berdampak. Upaya perbaikan berkelanjutan terus dilakukan, terutama melalui penguatan komponen pengungkit dan hasil. Sejalan dengan perubahan Road Map RB 2020–2024 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023, Kabupaten Sragen merespons dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2023. Peraturan ini bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan RB agar lebih fokus, berdampak, dan selaras dengan isu strategis serta arah pembangunan nasional.

Puncaknya terjadi pada tahun 2023, ketika indeks RB melonjak drastis ke angka 72 dengan kategori BB (Baik Sekali). Peningkatan signifikan ini mencerminkan keberhasilan strategi yang lebih fokus, penguatan kebijakan berbasis data, serta efektivitas implementasi RB General dan RB Tematik. Dengan tren ini, Kabupaten Sragen berada

pada jalur yang tepat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) RB 2023 menyoroti beberapa area yang masih perlu diperbaiki, terutama dalam perencanaan kinerja. Perbaikan ini mencakup penyusunan cascading, critical success factors, proses bisnis, dan logical framework sesuai dengan regulasi terbaru, seperti Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan nilai RB Sragen terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

2.4.1.2 Nilai SAKIP Daerah

Akuntabilitas kinerja mencerminkan tanggung jawab instansi pemerintah dalam melaporkan capaian dan kendala program secara terukur kepada pemangku kepentingan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan mekanisme terstruktur untuk menetapkan, mengukur, dan melaporkan kinerja guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan. Berorientasi pada hasil, SAKIP mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian target kinerja. Perkembangan akuntabilitas kinerja Kabupaten Sragen dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.



Gambar 2. 88 Nilai SAKIP Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024
Sumber: emonev.rkpd.sragenkab.go.id

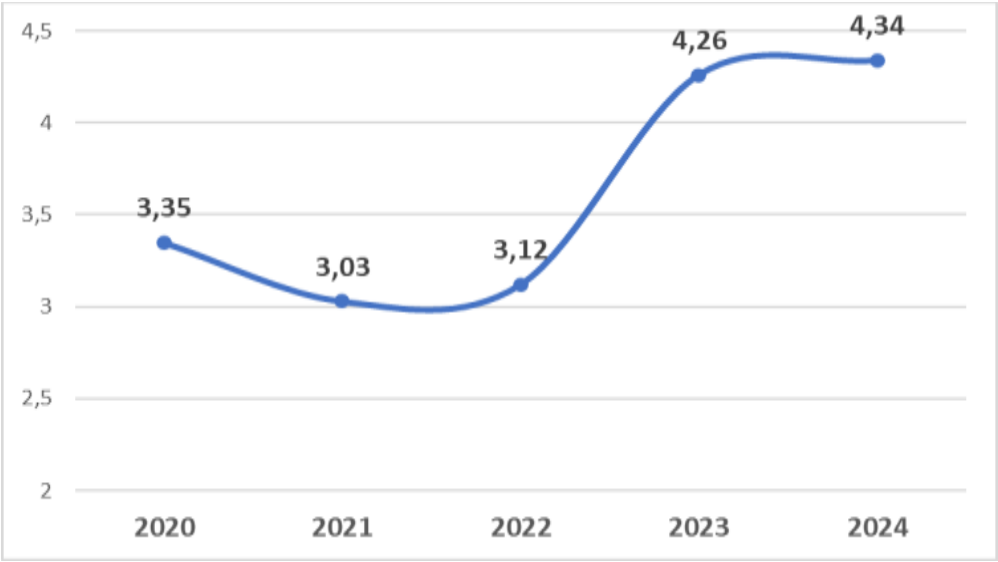
Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sragen mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, nilai SAKIP mencapai 65,52, meningkat dari 64,47 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sragen. Namun, tantangan utama masih ada, terutama terkait kesenjangan pemahaman antar OPD, khususnya di tingkat kecamatan. Evaluasi Inspektorat menunjukkan banyak kecamatan belum mencapai standar kabupaten, menandakan perlunya pembinaan teknis dan pemantauan lebih intensif. Inspektorat berperan penting dalam memberikan rekomendasi perbaikan melalui evaluasi berkelanjutan guna memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya serta anggaran daerah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan berbasis evaluasi dan pembinaan berkelanjutan menjadi strategi utama. Dalam setiap kegiatan evaluasi, Inspektorat Kabupaten Sragen memberikan rekomendasi perbaikan yang mencakup seluruh siklus SAKIP, mulai dari proses perencanaan kinerja, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan evaluasi. Dengan adanya mekanisme umpan balik yang sistematis, diharapkan setiap OPD dapat secara bertahap meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerjanya. Kendala lain adalah keterbatasan SDM di Inspektorat, yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan audit kinerja. Oleh karena itu, penguatan kapasitas APIP menjadi prioritas, melalui diklat dan bimtek berbasis kebutuhan strategis. Selain itu, pengawasan harus diperkuat dengan penyusunan PKPT berbasis risiko agar lebih fokus pada area kritis. Dengan pendekatan ini, peningkatan skor SAKIP tidak hanya menjadi indikator keberhasilan administratif, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2.4.1.3 Indeks SPBE

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden

Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.



Gambar 2. 89 Indeks SPBE Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Sumber: emonevrkpd.sragenkab.go.id

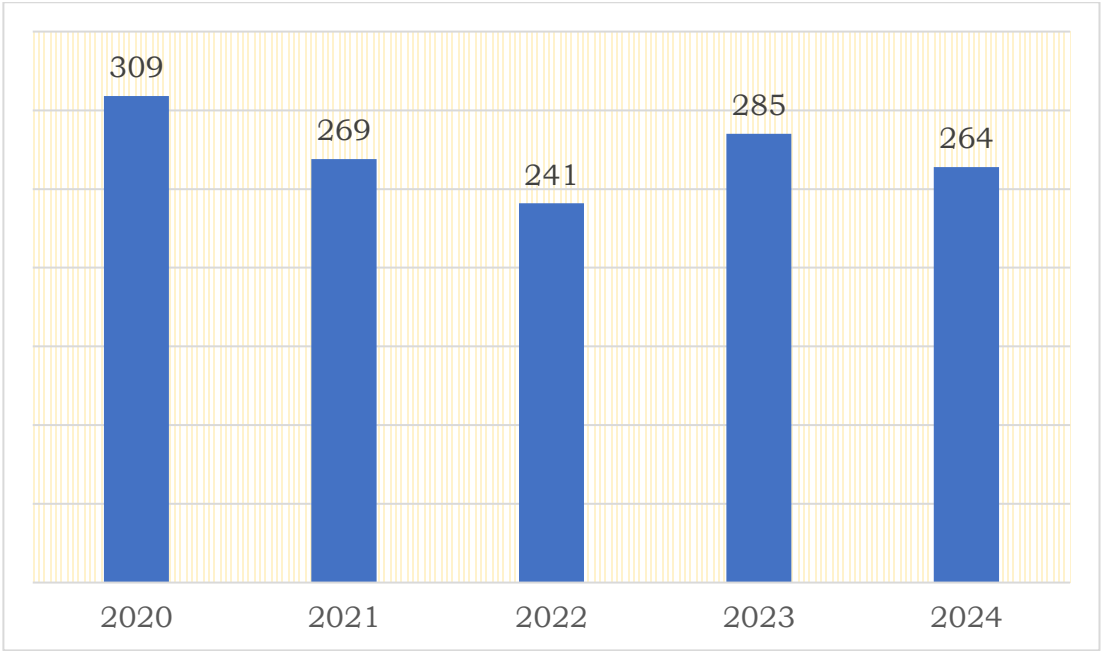
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sragen menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir. Evaluasi yang dilakukan sejak tahun 2019 mencerminkan dinamika perkembangan digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Sragen. Pada tahun 2020, indeks SPBE tercatat sebesar 3,35 dan mengalami penurunan menjadi 3,03 pada tahun 2021 sebelum kembali meningkat menjadi 3,12 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, indeks SPBE mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 4,26 dan 4,34 pada tahun 2024, yang mengantarkan Kabupaten Sragen ke dalam kategori “memuaskan.”

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tiga unsur utama penerapan SPBE, yakni kebijakan internal, tata kelola, dan

layanan digital. Transformasi digital dalam administrasi pemerintahan memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan publik. Namun, meskipun capaian tahun 2023 menunjukkan hasil yang sangat baik, masih terdapat tantangan yang perlu di atasi, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta optimalisasi integrasi layanan berbasis elektronik di berbagai sektor pemerintahan. Upaya berkelanjutan dalam aspek ini akan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substantial

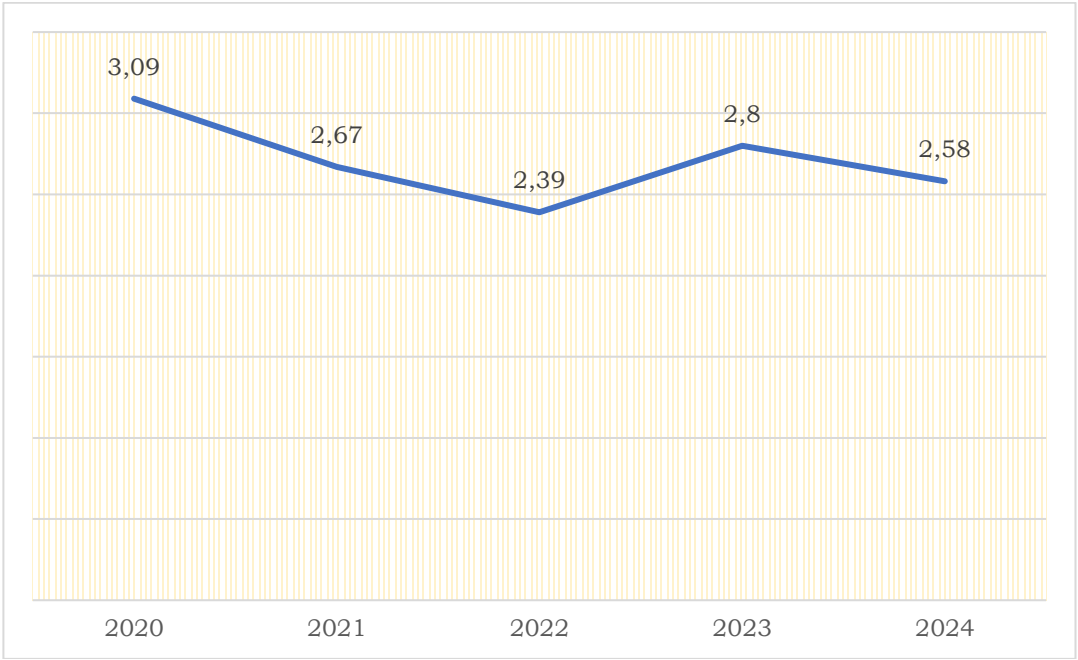
Aspek hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi merupakan aspek yang menggambarkan kondusifitas daerah. Aspek ini dinilai dari Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum dan indeks demokrasi daerah. Dalam konteks hukum berkeadilan dan keamanan nasional yang tangguh di Kabupaten Sragen, dapat dilihat dari data jumlah konflik dan angka kriminalitas sebagai berikut.



Gambar 2. 90 Jumlah Konflik di Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024
Sumber: Bappeda, diolah 2025

Tren jumlah konflik di Kabupaten Sragen selama periode 2020-2024 menunjukkan pola fluktuatif yang mengindikasikan adanya ketidakstabilan sosial. Tahun 2020 menjadi puncak tertinggi dengan 309

kasus, yang kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 241 kasus pada 2022, kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam manajemen sosial dan mitigasi konflik pada tahun tersebut. Jumlah konflik mengalami kenaikan kembali menjadi 285 kasus pada 2023; data ini menunjukkan bahwa aksi resolusi konflik di Sragen belum cukup kuat dalam meredam potensi gesekan horizontal maupun vertikal yang bisa dipicu oleh berbagai faktor, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Jumlah konflik kembali menurun menjadi 264 kasus pada 2024; kondisi ini menunjukkan bahwa konflik bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan konteks sosial masyarakat Sragen. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang bersifat preventif, berbasis data spasial konflik, serta penguatan jejaring aktor lokal dalam penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan mendesak agar tren konflik dapat ditekan secara berkelanjutan hingga tahun tahun mendatang. Guna memperoleh gambaran yang lebih holistik, berikut data angka kriminalitas di Kabupaten Sragen tahun 2020-2024:



Gambar 2. 91 Angka Kriminalitas Kabupaten Sragen tahun 2020-2024
Sumber: Bappeda, diolah 2025

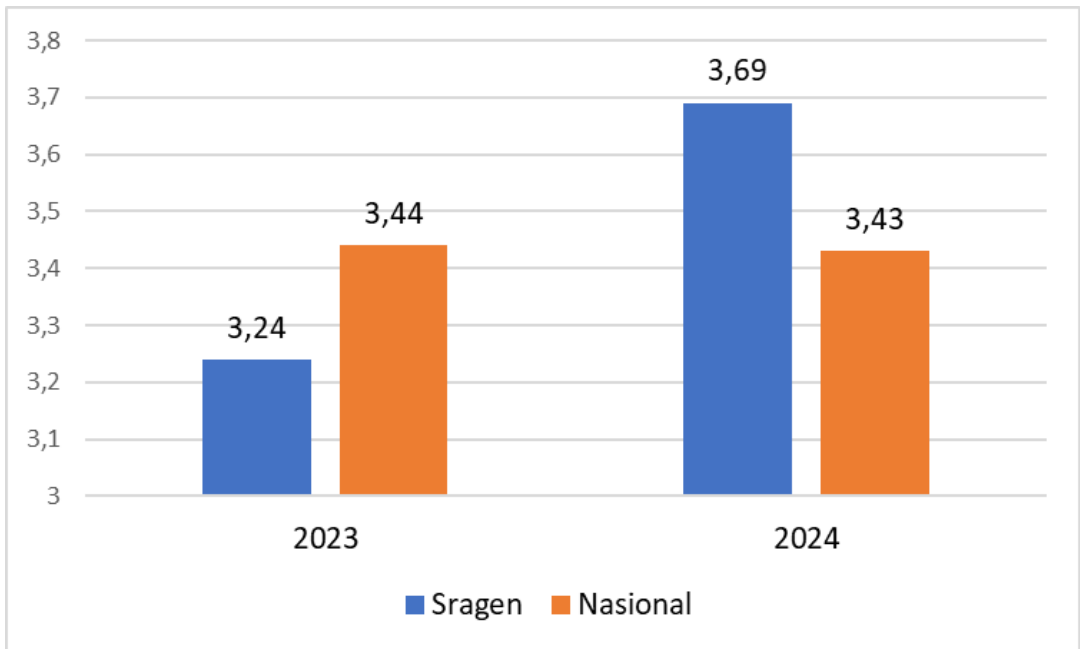
Perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Sragen sepanjang 2020-2024 merefleksikan dinamika keamanan wilayah yang masih diwarnai pola fluktuatif. Pada 2020, angka kriminalitas mencapai 3,09 per 10.000 penduduk, yang kemudian menurun secara progresif hingga titik terendah pada 2022 sebesar 2,39, menandakan adanya efektivitas intervensi keamanan dan pencegahan kejahatan dan kriminalitas pada

periode tersebut. Namun, lonjakan kembali ke 2,8 pada 2023 mengindikasikan adanya peningkatan tindak kriminalitas di Kabupaten Sragen yang terjadi karena beberapa konteks, seperti sosial ekonomi. Kondisi ini kembali menurun menjadi 2,58 pada tahun 2024 yang mengindikasikan adanya langkah-langkah pemulihan keamanan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan tren data tersebut, diperlukan penguatan sistem keamanan berbasis komunitas, penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat, serta pendekatan restoratif dalam penyelesaian kejahatan ringan sebagai strategi jangka menengah yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk menurunkan angka kriminalitas secara konsisten.

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan sektor hukum ialah IRH (Indeks Reformasi Hukum). Indeks ini mulai diimplementasikan perhitungannya sejak tahun 2023. Capaian Kabupaten Sragen menunjukkan kondisi yang positif. Pada tahun 2023 capaiannya sebesar 45,99 (kategori buruk). Untuk tahun 2024 capaiannya melonjak sangat signifikan menjadi sebesar 98,94 dengan kategori AA (istimewa). Peningkatan ini terjadi karena menguatnya koordinasi Pemkab Sragen dengan Kemenkumham, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan yang semakin baik, Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu serta Database Peraturan Perundang-undangan yang semakin tertata dengan baik.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan Pembangunan daerah. Daya saing dikaitkan dengan masalah produktivitas. Dalam konteks ini, daya saing sangat menentukan ketangguhan daerah maupun negara. Dalam konteks daerah atau dalam hal ini Kabupaten Sragen dapat dilihat dari Indeks Daya Saing Daerah sebagai berikut.



Gambar 2. 92 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sragen Tahun 2023-2024

Sumber: <https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah>

Daya saing Kabupaten Sragen mengalami peningkatan berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), dari 3,24 pada tahun 2023 menjadi 3,69 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan kemampuan mempertahankan dan meningkatkan daya saing daerah meliputi aspek infrastruktur, investasi, tata kelola pemerintahan, serta pengembangan sumber daya manusia. Daya saing suatu wilayah mencerminkan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya, menciptakan inovasi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan daya saing nasional, Kabupaten Sragen kini unggul. Pada tahun 2024, indeks daya saing nasional cenderung stagnan pada 3,43-3,44. Namun demikian, Kabupaten Sragen tetap perlu melakukan intervensi kebijakan yang lebih terarah guna meningkatkan daya saing, seperti mendorong inovasi berbasis teknologi, memperbaiki ekosistem investasi, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Optimalisasi strategi ini menjadi krusial agar Kabupaten Sragen dapat meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan dan mampu bersaing secara lebih kompetitif di tingkat nasional.

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

2.5.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen periode 2020–2024 digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan ketiga komponen tersebut, dilakukan analisis perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Analisis ini diperlukan sebagai dasar untuk proyeksi keuangan daerah. Upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sragen dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu, yang sedang berjalan, maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Sragen selama periode 2020–2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 67 Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN					
A.	Pendapatan Asli Daerah	394.464.906.604	537.265.408.211	364.484.878.491	406.014.146.980	468.236.481.059
B.	Pendapatan Transfer	1.729.362.657.925	1.710.748.439.505	1.807.631.293.551	1.893.193.353.499	1.964.791.749.612
C.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	88.997.410.000	88.707.880.000	5.723.900.000	4.238.000.000	500.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	2.212.824.974.529	2.336.721.727.716	2.177.840.072.042	2.303.445.500.479	2.433.528.230.671
2	BELANJA					
A.	Belanja Operasi	1.476.448.907.568	1.606.127.380.958	1.601.697.320.436	1.671.033.981.797	1.812.102.344.888
B.	Belanja Modal	268.507.459.807	211.772.001.931	351.881.445.556	433.411.157.251	240.526.522.306
C.	Belanja Tidak Terduga	39.713.061.242	4.140.790.850	485.416.000	193.000.000	395.940.529
D.	Belanja Transfer	345.769.047.600	338.837.601.930	352.261.373.234	400.241.729.607	401.689.857.669
	JUMLAH BELANJA	2.130.438.476.217	2.160.877.775.669	2.306.325.555.226	2.504.879.868.655	2.454.714.665.392
	Surplus/Defisit	82.386.498.312	175.843.952.047	(128.485.483.184)	(201.434.368.176)	(21.186.434.721)
3	PEMBIAYAAN					
A.	Penerimaan Pembiayaan	376.281.638.562	342.647.355.380	559.608.897.810	505.725.522.889	244.375.328.713
B.	Pengeluaran Pembiayaan	116.080.879.500	2.577.000.000	36.586.161.737	59.915.826.000	89.902.465.400
	PEMBIAYAAN NETTO	260.200.759.062	340.070.355.380	523.022.736.073	445.809.696.889	154.472.863.313
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	342.587.257.374	515.914.307.427	394.537.252.889	244.375.328.713	133.286.428.592

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sragen 2020-2024

Pendapatan daerah menunjukkan pola fluktuatif. Setelah meningkat dari Rp2,21 triliun pada 2020 menjadi Rp2,34 triliun pada 2021, pendapatan mengalami penurunan pada 2022 sebesar Rp2,17 triliun. Namun, tren kembali meningkat pada 2023 dan 2024 masing-masing menjadi Rp2,30 triliun dan Rp2,43 triliun. Fluktuasi ini mencerminkan ketidakstabilan penerimaan daerah yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebijakan fiskal, serta efektivitas pengelolaan sumber pendapatan.

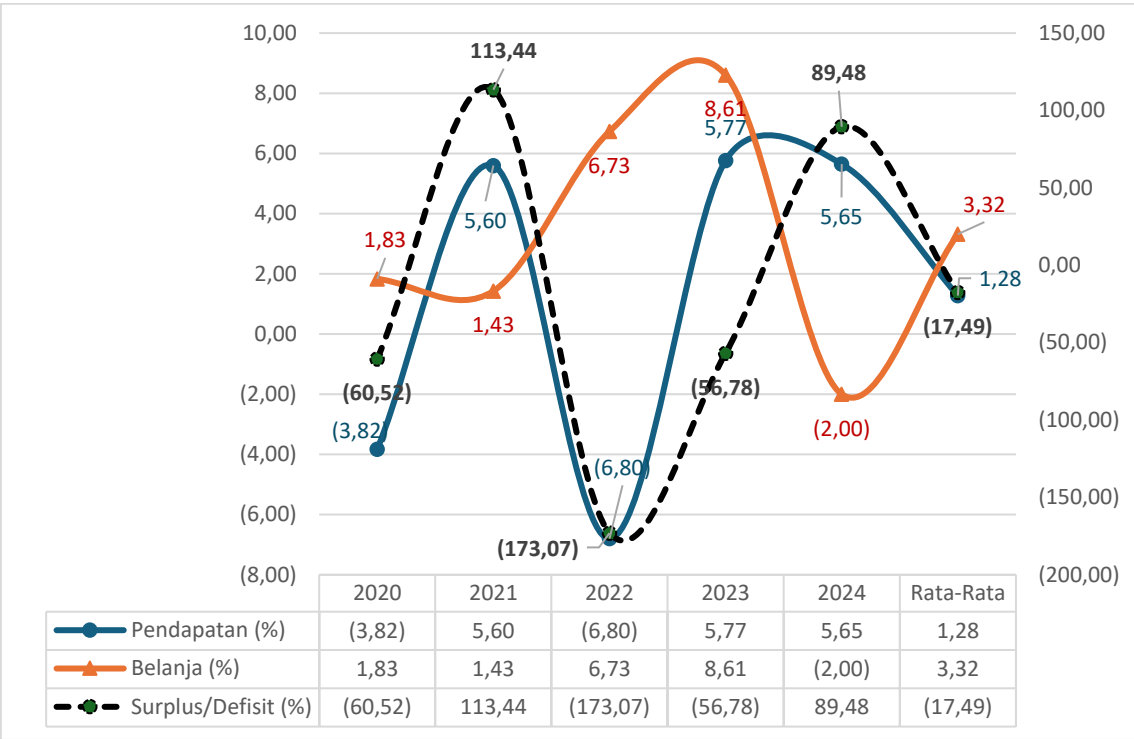
Belanja daerah cenderung meningkat secara konsisten, dari Rp2,13 triliun pada 2020 menjadi Rp2,50 triliun pada 2023. Meski mengalami sedikit penurunan pada 2024 menjadi Rp2,45 triliun, tren kenaikan belanja menunjukkan peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintahan. Namun, pertumbuhan belanja yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan menyebabkan defisit anggaran sejak 2022.

Defisit anggaran pertama kali terjadi pada 2022 sebesar Rp128,49 miliar dan meningkat menjadi Rp201,43 miliar pada 2023. Pada 2024, defisit menurun menjadi Rp21,19 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah tetap lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga diperlukan strategi pembiayaan yang tepat untuk menjaga stabilitas fiskal. Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan netto meningkat signifikan dari Rp260,20 miliar pada 2020 menjadi Rp523,02 miliar pada 2022. Meski pada 2023 turun menjadi Rp445,81 miliar, angka ini masih cukup tinggi. Pada 2024, pembiayaan netto menurun drastis menjadi Rp154,47 miliar, yang dapat mengindikasikan upaya mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal.

SILPA menunjukkan tren menurun setelah mencapai puncak pada 2021 sebesar Rp515,91 miliar. Nilai ini berkurang menjadi Rp394,54 miliar pada 2022, Rp244,38 miliar pada 2023, dan Rp133,29 miliar pada 2024. Penurunan ini dapat mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran yang lebih baik, namun juga mengindikasikan keterbatasan dana cadangan yang tersedia untuk menghadapi risiko fiskal di masa mendatang.

Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika pendapatan, belanja dan surplus/defisit, berikut ini disajikan data perkembangan

realisasi pertumbuhan dari pendapatan, belanja dan surplus/defisit Kabupaten Sragen tahun 2020-2024.



Gambar 2. 93 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Dari perspektif pertumbuhan persentase, pendapatan daerah mengalami fluktuasi signifikan dengan kontraksi sebesar minus 3,82 persen pada 2020 dan minus 6,80 persen pada 2022, sementara pertumbuhan positif tercatat pada 2021 (5,60 persen), 2023 (5,77 persen), dan 2024 (5,65 persen). Secara rata-rata, pertumbuhan pendapatan selama lima tahun hanya mencapai 1,28 persen. Sementara itu, belanja daerah menunjukkan tren meningkat dengan pertumbuhan tertinggi pada 2023 (8,61 persen) dan 2022 (6,73 persen), meskipun mengalami kontraksi sebesar minus 2,00 persen pada 2024. Rata-rata pertumbuhan belanja selama lima tahun mencapai 3,32 persen, menunjukkan peningkatan alokasi anggaran untuk program dan layanan publik.

Surplus/defisit anggaran mengalami volatilitas tinggi. Defisit signifikan terjadi pada 2020 (minus 60,52 persen), 2022 (minus 173,07 persen) dan 2023 (minus 56,78 persen), sedangkan surplus tercatat pada 2021 (113,44 persen) dan 2024 (89,48 persen). Selama lima tahun terakhir, rata-rata posisi surplus/defisit anggaran menunjukkan nilai

negatif sebesar minus 17,49 persen, yang mencerminkan kondisi ketidakseimbangan fiskal. Tingginya fluktuasi dalam posisi surplus dan defisit mempertegas perlunya strategi pengelolaan anggaran yang lebih optimal, baik melalui peningkatan pendapatan asli daerah maupun efisiensi dalam belanja. Di sisi lain, tren penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mengindikasikan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih disiplin untuk menjaga ketersediaan dana cadangan guna menjamin keberlanjutan program pembangunan.

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Sragen menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Defisit anggaran yang terjadi selama tiga tahun terakhir mengisyaratkan perlunya upaya intensif untuk meningkatkan pendapatan daerah serta melakukan optimalisasi belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran.

2.5.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan data keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen dari tahun 2020 hingga 2024, pendapatan daerah menunjukkan pola fluktuatif. Total pendapatan mengalami kenaikan dari Rp2,21 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,34 triliun pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp2,18 triliun sebelum kembali meningkat menjadi Rp2,30 triliun pada tahun 2023 dan Rp2,43 triliun pada tahun 2024.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan dinamika yang signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2021, PAD meningkat sebesar 36,23 persen dari Rp394,46 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp537,27 miliar. Namun, pada tahun 2022, PAD mengalami penurunan tajam sebesar 32,14 persen menjadi Rp364,48 miliar. Meskipun demikian, dalam dua tahun berikutnya, PAD kembali mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp406,01 miliar pada tahun 2023 dan Rp468,24 miliar pada tahun 2024. Tren fluktuatif ini mengindikasikan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah belum sepenuhnya stabil dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi daerah.

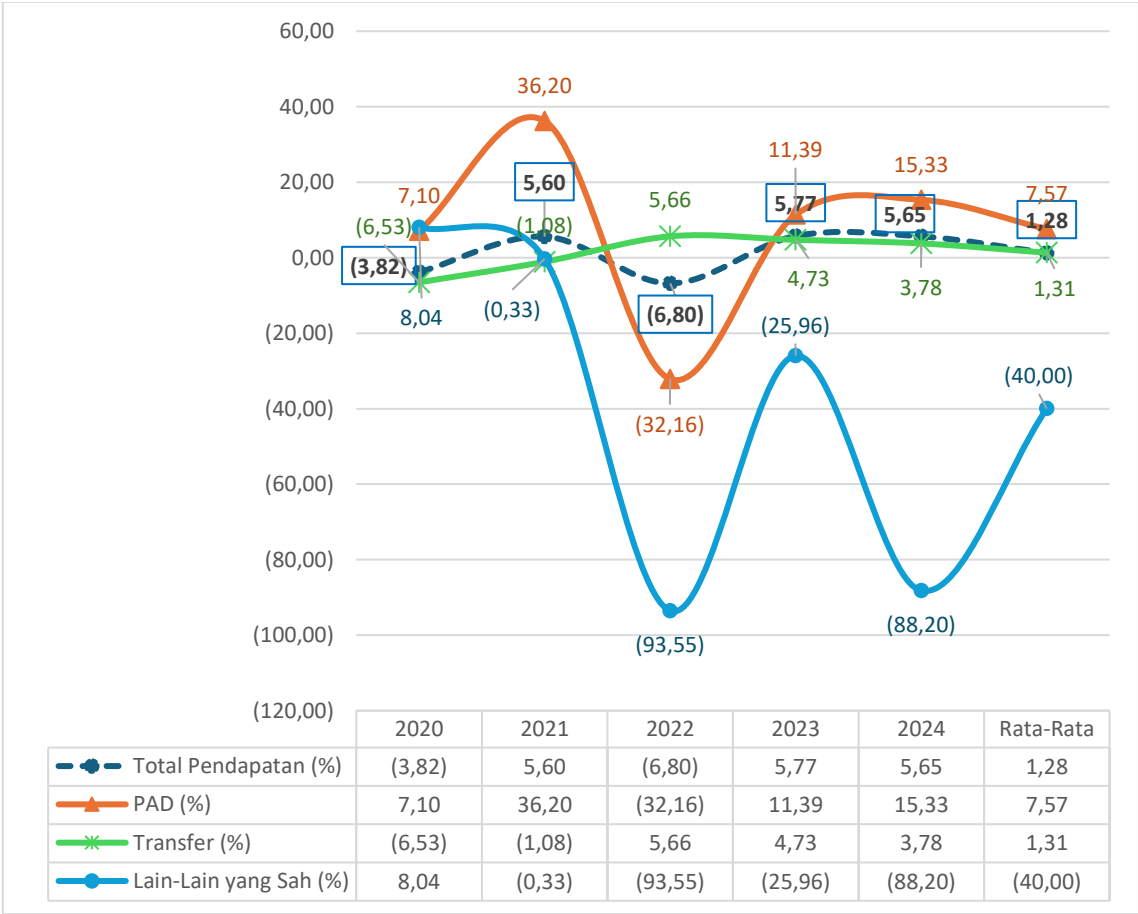
Pendapatan transfer menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Sragen. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan dari Rp1,73 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,71 triliun pada tahun 2021, pendapatan transfer kembali meningkat dalam tiga tahun berikutnya. Pada tahun 2022, pendapatan transfer mencapai Rp1,81 triliun, kemudian naik menjadi Rp1,89 triliun pada tahun 2023 dan Rp1,96 triliun pada tahun 2024. Konsistensi kenaikan pendapatan transfer menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Sementara itu, pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan drastis dalam periode yang sama. Pada tahun 2020, pendapatan dari pos ini mencapai Rp88,99 miliar dan tetap relatif stabil pada tahun 2021 dengan Rp88,71 miliar. Namun, pada tahun 2022, jumlahnya turun tajam menjadi Rp5,72 miliar dan semakin menurun pada tahun 2023 menjadi Rp4,24 miliar, hingga mencapai hanya Rp500 juta pada tahun 2024. Penurunan yang sangat signifikan ini dikarenakan adanya pergeseran rekening penerimaan BOS ke rekening DAK Non Fisik.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tren kenaikan pendapatan secara total pada tahun 2023 dan 2024, ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih cukup tinggi. Selain itu, fluktuasi yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengindikasikan perlunya strategi pengelolaan pendapatan yang lebih optimal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dalam menggali sumber pendapatan asli daerah yang lebih

stabil dan berkelanjutan guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta inovasi dalam pengelolaan aset dan potensi ekonomi lokal dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.

Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika penerimaan daerah, berikut disajikan data pertumbuhan dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah tahun 2020-2024.



Gambar 2. 94 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sragen selama periode 2020 hingga 2024, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dalam komponen pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan yang sah. PAD mengalami pertumbuhan yang paling fluktuatif dibandingkan komponen lainnya. Pada tahun 2021, PAD tumbuh signifikan sebesar 36,20 persen, namun mengalami kontraksi tajam pada tahun 2022 dengan penurunan sebesar minus 32,16 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, PAD kembali tumbuh

masing-masing sebesar 11,39 persen dan 15,33 persen. Rata-rata pertumbuhan PAD selama lima tahun mencapai 7,57 persen, yang menunjukkan adanya upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

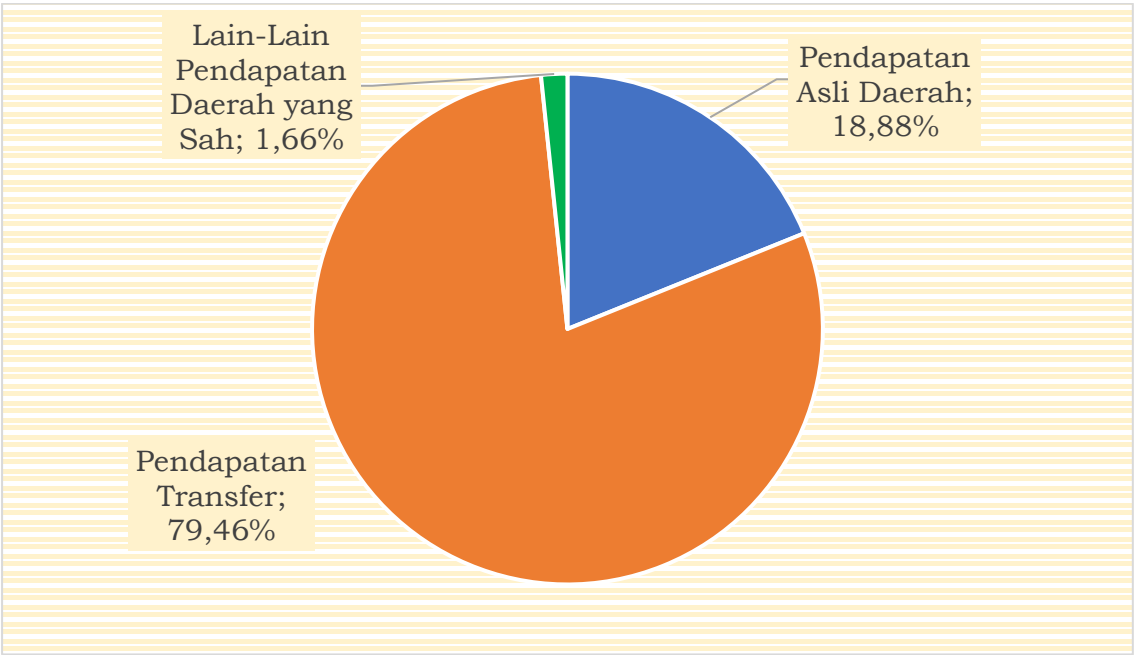
Pendapatan transfer menunjukkan tren yang lebih stabil dibandingkan PAD, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 1,31 persen. Meskipun mengalami sedikit kontraksi pada tahun 2020 (minus 6,53 persen) dan 2021 (minus 1,08 persen), pendapatan transfer kembali meningkat pada tahun 2022 (5,66 persen), 2023 (4,73 persen), dan 2024 (3,78 persen). Hal ini mencerminkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sragen terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, yang cenderung mengalami pertumbuhan moderat.

Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kontraksi yang sangat tajam selama periode 2022–2024. Setelah mengalami penurunan sebesar minus 93,55 persen pada tahun 2022, pendapatan ini terus menyusut pada tahun 2023 (minus 25,96 persen) dan 2024 (minus 88,20 persen). Secara rata-rata, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar minus 40,00 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan signifikan dalam sumber pendapatan di luar PAD dan transfer, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan kebijakan atau berkurangnya sumber pendapatan non-reguler.

Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sragen mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, dengan ketergantungan utama pada pendapatan transfer yang relatif lebih stabil dibandingkan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun PAD menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir, fluktuasi yang cukup besar mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan dan menstabilkan sumber pendapatan daerah. Lain lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan dari hibah dan bantuan keuangan dari provinsi yang tidak dapat diprediksi dan realisasinya diterima setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Berdasarkan data kontribusi komponen pendapatan daerah Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, dapat

disimpulkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer. Rata-rata kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah mencapai 79,46 persen, menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Meskipun terjadi fluktuasi dalam proporsi pendapatan transfer, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 83,00 persen dan angka terendah pada tahun 2021 sebesar 73,21 persen, kontribusi sumber pendapatan ini tetap menjadi komponen utama dalam struktur keuangan daerah.



Gambar 2. 95 Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan rata-rata kontribusi sebesar 18,88 persen terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD tertinggi tercatat pada tahun 2021, yaitu sebesar 22,99 persen, sementara proporsi terendah terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 16,74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan mandiri masih terbatas, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui penguatan sektor ekonomi lokal, peningkatan efisiensi pajak dan retribusi daerah, serta inovasi dalam pengelolaan aset daerah.

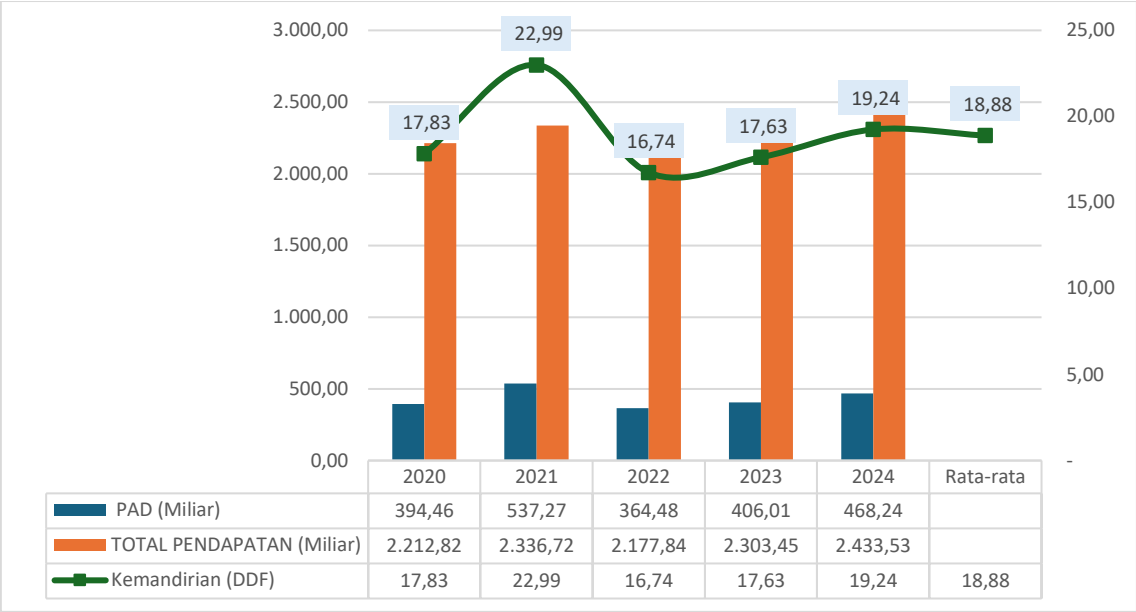
Sementara itu, komponen pendapatan lain-lain yang sah memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap total pendapatan daerah, dengan rata-rata hanya sebesar 1,66 persen. Bahkan, dalam

rentang waktu 2022 hingga 2024, kontribusi dari komponen ini semakin menurun, dari 0,26 persen pada tahun 2022 menjadi hanya 0,02 persen pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, pola kontribusi pendapatan daerah Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber utama dalam pembiayaan daerah, sementara PAD masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. Pemerintah daerah perlu melakukan strategi diversifikasi sumber pendapatan serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Untuk melihat tingkat kemandirian atau derajat desentralisasi fiskal (DDF) dan tingkat ketergantungan Kabupaten Sragen dalam menyelenggarakan pemerintahan maka perlu dilakukan analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan. Analisis derajat desentralisasi fiskal (DDF) dan rasio ketergantungan (RK) menggambarkan tingkat kemandirian dan ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain.

Untuk derajat kemandirian fiskal (DDF) daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan. Kemandirian fiskal daerah dikelompokkan menjadi: (1) Sangat Kurang ($DDF \leq 10,00$); (2) Kurang ($10,00 < DDF \leq 20,00$); (3) Sedang ($20,00 < DDF \leq 30,00$); (4) Cukup Baik ($30,00 < DDF \leq 40,00$); (5) Baik ($40,00 < DDF \leq 50,00$); dan (6) Sangat Baik ($DDF > 50,00$). Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka kemandirian daerah semakin besar. Berikut adalah grafik derajat kemandirian daerah Kabupaten Sragen 2020-2024.



Gambar 2. 96 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

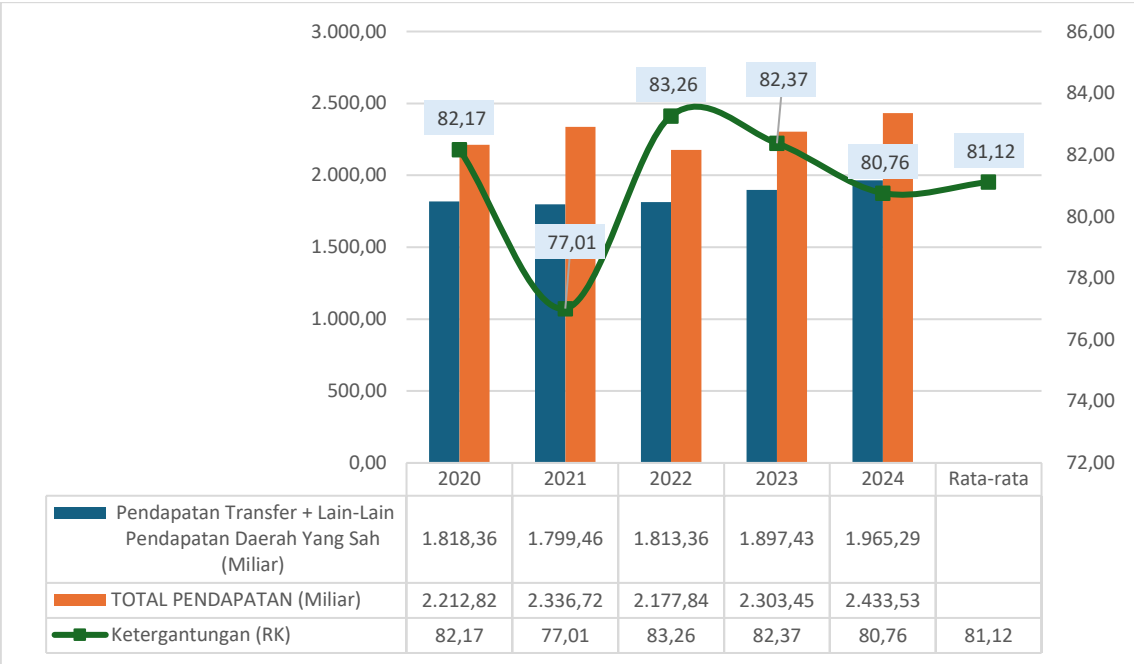
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan grafik di atas, derajat kemandirian fiskal (DDF) Kabupaten Sragen selama periode 2020-2024 tergolong dalam kategori "kurang" ($10,00 < DDF \leq 20,00$), dengan rata-rata 18,88. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi untuk membiayai kebutuhannya, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencukupi. Ketergantungan fiskal yang tinggi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya basis ekonomi lokal, kurangnya inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah, serta ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya.

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kabupaten Sragen perlu mengoptimalkan penerimaan PAD melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, peningkatan pengelolaan aset daerah, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, efektivitas belanja daerah harus ditingkatkan agar anggaran dapat digunakan lebih produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat.

Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan proporsi dana transfer ditambah dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: (1) Sangat Rendah (RK

≤ 10,00); (2) Rendah (10,00 < RK ≤ 20,00); (3) Sedang (20,00 < RK ≤ 30,00); (4) Cukup Tinggi (30,00 < RK ≤ 40,00); (5) Tinggi (40,00 < RK ≤ 50,00); dan (6) Sangat Tinggi (RK > 50,00). Semakin tinggi angka RK, semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Berikut adalah grafik rasio ketergantungan daerah Kabupaten Sragen 2020-2024.



Gambar 2. 97 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan grafik di atas, Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal Kabupaten Sragen selama periode 2020-2024 tergolong sangat tinggi (RK > 50,00), dengan rata-rata 81,12. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% pendanaan pembangunan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi, sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbatas.

Ketergantungan fiskal Kabupaten Sragen disebabkan adanya keterbatasan potensi ekonomi daerah, termasuk didalamnya, terbatasnya sektor ekonomi produktif, perlunya peningkatan pemanfaatan aset daerah, serta belum maksimalnya inovasi dalam strategi peningkatan pendapatan daerah. Ketergantungan pendapatan transfer akan berisiko terhadap keberlanjutan fiskal, terutama jika terjadi perubahan kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat yang berpotensi mengurangi alokasi dana untuk daerah

Untuk mengurangi tingkat ketergantungan ini, Kabupaten Sragen perlu meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan penerimaan PAD. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, penguatan sektor ekonomi lokal, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Penerapan strategi yang tepat memungkinkan Kabupaten Sragen meningkatkan kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana eksternal.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen yang meningkat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Untuk memahami realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah, berikut disajikan data realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2020-2024.

Tabel 2. 68 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pajak Daerah	111.442.618.797	107.148.796.972	118.341.014.121	143.361.322.953	158.035.982.944
2.	Retribusi Daerah	13.082.205.330	13.583.333.151	19.009.471.890	19.643.284.210	128.699.110.179
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.992.082.624	22.249.581.299	24.773.847.305	28.654.523.837	31.999.447.505
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	249.947.999.853	394.283.696.789	202.360.545.175	214.355.015.980	149.501.940.431
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	394.464.906.604	537.265.408.211	364.484.878.491	406.014.146.980	468.236.481.059

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sragen 2020-2024

Berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2020–2024, terdapat fluktuasi dalam penerimaan dari berbagai komponennya. Pajak daerah, sebagai salah satu sumber utama PAD, menunjukkan tren peningkatan setelah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah mencapai Rp111,44 miliar, kemudian turun menjadi Rp107,15 miliar pada tahun 2021. Selanjutnya, penerimaan pajak daerah meningkat secara konsisten menjadi Rp118,34 miliar pada tahun 2022, Rp143,36 miliar pada tahun 2023, dan Rp158,04 miliar pada tahun 2024. Tren positif ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta efektivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah.

Pendapatan dari retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan, terutama pada tahun 2024. Pada tahun 2020, realisasi retribusi daerah sebesar Rp13,08 miliar, meningkat menjadi Rp13,58 miliar pada tahun 2021 dan Rp19,00 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2023, penerimaan relatif stabil di angka Rp19,64 miliar, namun pada tahun 2024 terjadi lonjakan tajam menjadi Rp128,70 miliar. Kenaikan ini terjadi karena adanya pengalihan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari kategori Lain-lain PAD yang Sah ke "Retribusi Daerah" sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) No. 1 Tahun 2022.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan tren kenaikan yang stabil. Pada tahun 2020, realisasi mencapai Rp19,99 miliar dan terus meningkat menjadi Rp22,25 miliar pada tahun 2021, Rp24,77 miliar pada tahun 2022, Rp28,65 miliar pada tahun 2023, hingga Rp31,99 miliar pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam manajemen aset daerah yang mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

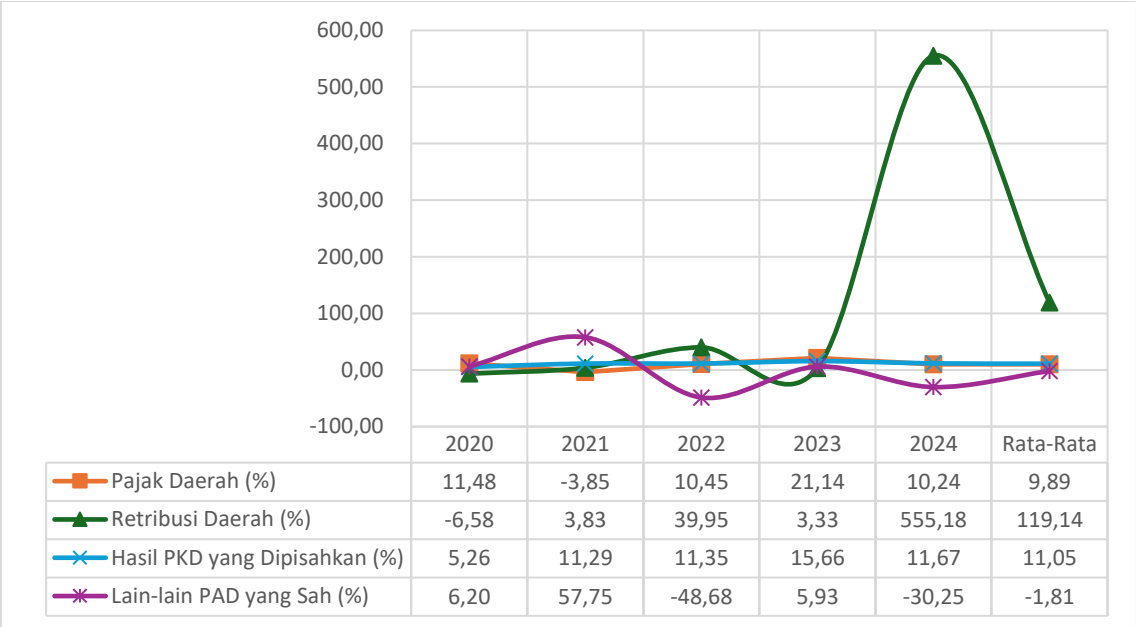
Kategori Lain-lain PAD yang Sah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, realisasi mencapai Rp249,95 miliar, kemudian meningkat tajam menjadi Rp394,28 miliar pada tahun 2021 dikarenakan adanya kenaikan penerimaan BLUD RSUD (pembayaran penanganan COVID). Pada tahun 2022, pendapatan dari komponen ini mengalami penurunan drastis menjadi Rp202,36 miliar, sedikit

meningkat menjadi Rp214,35 miliar pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi Rp149,50 miliar pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, PAD Kabupaten Sragen tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup variatif antar komponen. Pajak daerah mengalami tren peningkatan yang stabil setelah sempat menurun pada 2021, mencerminkan perbaikan kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kesadaran wajib pajak. Retribusi daerah melonjak tajam pada 2024 akibat penyesuaian klasifikasi pendapatan BLUD sesuai UU HKPD. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga menunjukkan tren positif, mengindikasikan peningkatan efektivitas pengelolaan aset. Sementara itu, kategori Lain-lain PAD yang Sah mengalami fluktuasi signifikan, terutama akibat dampak pandemi dan penyesuaian pencatatan keuangan. Secara keseluruhan, PAD Kabupaten Sragen memperlihatkan potensi pertumbuhan dengan tantangan pengelolaan yang tetap perlu diperhatikan.

Dari sisi pertumbuhan, pajak daerah secara konsisten menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 9,89 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 21,14 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari sektor pajak tertentu, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada tahun 2021, pajak daerah mengalami penurunan sebesar minus 3,85 persen sebagai dampak penerimaan dari piutang jalan tol di tahun 2020.

Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika penerimaan daerah, berikut disajikan data pertumbuhan dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020–2024.



Gambar 2. 98 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Dari sisi pertumbuhan, pajak daerah secara konsisten menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 9,89 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 21,14 persen, yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari sektor pajak tertentu, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Retribusi daerah menunjukkan pertumbuhan yang sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 119,14 persen. Pada tahun 2022, retribusi daerah meningkat sebesar 39,95 persen, tetapi pertumbuhan melambat pada tahun 2023 dengan hanya 3,33 persen. Lonjakan tajam terjadi pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 555,18 persen, yang mengindikasikan dampak dari perubahan kebijakan pemerintah terkait pemindahan pos pendapatan BLUD ke kategori retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan pertumbuhan stabil dengan rata-rata 11,05 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 15,66 persen, yang mengindikasikan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap PAD yang mencakup Bank Jateng, PD BRR BKK Karangmalang, PT BRR Syariah Sukowat Sragen, PD BRR Djoko Tingkir, PDAM Sragen, PD Bengkel

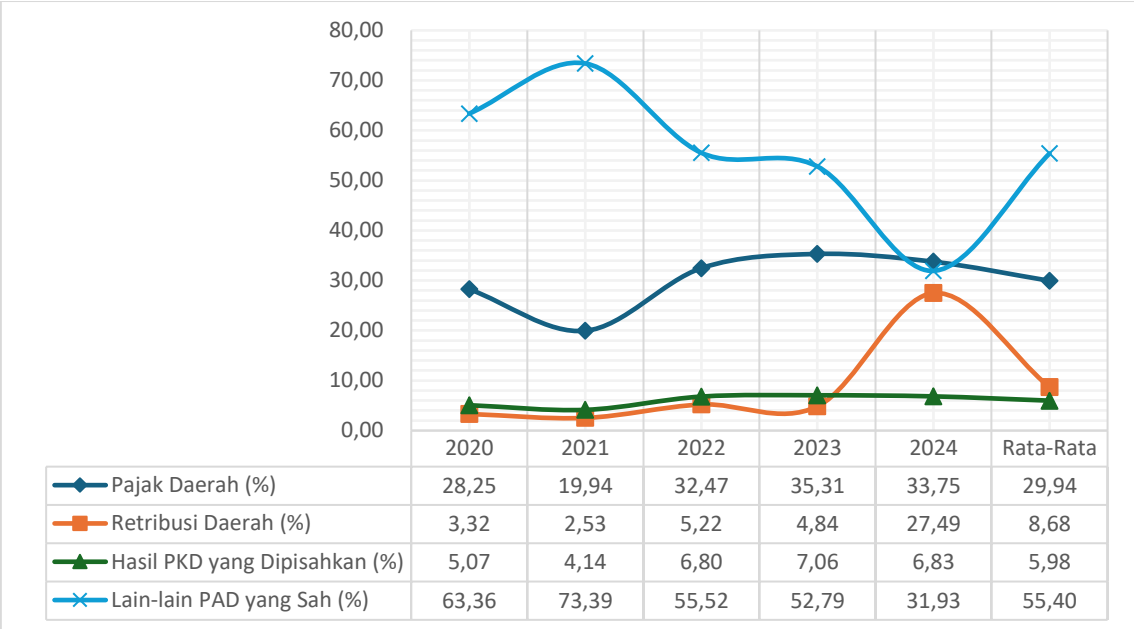
Terpadu, Perumda Percetakan dan Penerbitan Sragen, dan PT Gentrade Sragen.

Sementara itu, kategori Lain-lain PAD yang Sah mengalami pertumbuhan yang sangat fluktuatif dengan rata-rata minus 1,81 persen per tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 57,75 persen, tetapi diikuti oleh penurunan tajam pada tahun 2022 sebesar minus 48,68 persen dan tahun 2024 sebesar minus 30,25 persen. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh perubahan regulasi atau berkurangnya pendapatan dari sumber lain yang sah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan PAD Kabupaten Sragen menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan positif. Pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, sementara retribusi daerah mengalami lonjakan drastis pada tahun 2024. Namun, kategori Lain-lain PAD yang Sah cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam strategi optimalisasi sumber pendapatan daerah.

Untuk meningkatkan keberlanjutan pendapatan daerah, pemerintah perlu menjaga stabilitas penerimaan retribusi dan mengatasi fluktuasi tajam dalam kategori "Lain-lain PAD yang Sah." Strategi yang dapat dipertimbangkan meliputi optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta diversifikasi sumber pendapatan guna memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sragen.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD), berikut disajikan grafik proporsi komponen PAD terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2020-2024.



**Gambar 2. 99 Proporsi Komponen PAD Terhadap Terhadap Total PAD (%),
Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)**

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total PAD Pemerintah Kabupaten Sragen, terlihat adanya fluktuasi kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan selama periode 2020 hingga 2024. Pajak Daerah menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan kontribusi terendah pada tahun 2021 sebesar 19,94 persen dan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 35,31 persen. Secara rata-rata, Pajak Daerah memberikan kontribusi sebesar 29,94 persen per tahun terhadap total PAD.

Retribusi Daerah mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 27,49 persen, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 2,53 persen hingga 5,22 persen. Rata-rata kontribusi Retribusi Daerah terhadap total PAD selama periode tersebut adalah 8,68 persen. Kenaikan tajam pada tahun 2024 dapat mengindikasikan adanya kebijakan baru akibat penyesuaian klasifikasi pendapatan BLUD sesuai UU HKPD.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PKD) menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kontribusi berkisar antara 4,14 persen hingga 7,06 persen. Rata-rata kontribusinya selama lima tahun adalah 5,98 persen, menunjukkan bahwa sektor ini belum menjadi sumber pendapatan utama bagi PAD Kabupaten Sragen. Sementara itu, Lain-lain PAD yang Sah memiliki kontribusi terbesar dibandingkan komponen lainnya, dengan rata-rata kontribusi sebesar

55,40 persen per tahun. Namun, trennya mengalami penurunan dari 73,39 persen pada tahun 2021 menjadi 31,93 persen pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan perubahan struktur pendapatan daerah, dengan pergeseran ke sumber PAD lainnya seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara keseluruhan, struktur PAD Kabupaten Sragen masih didominasi oleh Lain-lain PAD yang Sah, meskipun mengalami penurunan kontribusi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, peningkatan kontribusi dari Retribusi Daerah dan Pajak Daerah pada tahun 2024 dapat menjadi indikasi adanya upaya optimalisasi pendapatan daerah dari sektor-sektor yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengevaluasi kebijakan pengelolaan PAD agar lebih seimbang dan tidak terlalu bergantung pada satu sumber utama.

2. Pendapatan Transfer

Dalam sistem keuangan daerah, pendapatan transfer merupakan salah satu sumber utama penerimaan yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer dari Pemerintah Pusat mencakup dana perimbangan, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Sementara itu, transfer antar-daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan penerimaan yang dibagikan antar-pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan bantuan keuangan adalah alokasi dana yang diberikan oleh satu pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu. Secara keseluruhan, pendapatan transfer berperan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar-daerah serta memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah transfer pusat yang besar menandakan kapasitas fiskal daerah masih tidak dapat memenuhi kebutuhan fiskalnya. Kapasitas fiskal yang rendah dapat disebabkan peranan pajak dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi dan juga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat. Mendominasinya transfer dalam pendapatan daerah diharapkan membuat daerah mampu mengalokasikannya pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong adanya peningkatan investasi yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik, sehingga akan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan daerah.

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Sragen dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat tren pertumbuhan dalam penerimaan transfer secara keseluruhan. Total pendapatan transfer menunjukkan peningkatan dari Rp1,73 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,95 triliun pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan alokasi dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2. 69 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemerintah Pusat	1.567.927.724.917	1.527.768.793.026	1.607.320.298.551	1.688.823.352.255	1.755.264.049.216
1.1	DBH	30.630.429.867	38.765.724.777	35.689.395.438	34.678.320.216	30.471.263.000
1.2	DAU	991.204.614.000	984.484.500.000	979.305.029.339	1.031.504.587.630	1.093.111.750.474
1.3	DAK Fisik	89.753.643.548	80.332.177.249	99.606.545.557	54.716.830.323	72.521.796.541
1.4	DAK Non Fisik	240.065.892.502	220.747.080.000	295.616.217.217	331.208.114.086	326.418.176.201
1.5	DID	45.170.016.000	28.073.662.000	14.431.466.000	23.002.021.000	16.365.948.000
1.6	Dana Desa	171.103.129.000	175.365.649.000	182.671.645.000	213.713.479.000	216.375.115.000
2	Antar – Daerah	161.434.933.008	182.979.646.479	200.310.995.000	204.370.001.244	209.527.700.396
2.1	Bagi Hasil	134.344.347.567	174.684.467.479	184.776.461.000	189.747.812.244	191.330.567.896
2.2	Bantuan Keuangan	27.090.585.441	8.295.179.000	15.534.534.000	14.622.189.000	18.197.132.500
	Total Pendapatan Transfer	1.729.362.657.925	1.710.748.439.505	1.807.631.293.551	1.893.193.353.499	1.964.791.749.612

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sragen 2020-2024

Komponen terbesar dari pendapatan transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat, yang mengalami kenaikan dari Rp1,56 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,78 triliun pada tahun 2024. Dana Alokasi Umum (DAU) tetap menjadi sumber utama dalam struktur pendapatan transfer, dengan peningkatan dari Rp991,2 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,09 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kebutuhan fiskal daerah secara merata.

Di sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan fluktuasi, terutama pada DAK Fisik yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp54,7 miliar sebelum kembali meningkat menjadi Rp72,5 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, DAK Non-Fisik mengalami peningkatan signifikan dari Rp240 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp326,4 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan dukungan terhadap sektor-sektor tertentu seperti pendidikan dan kesehatan.

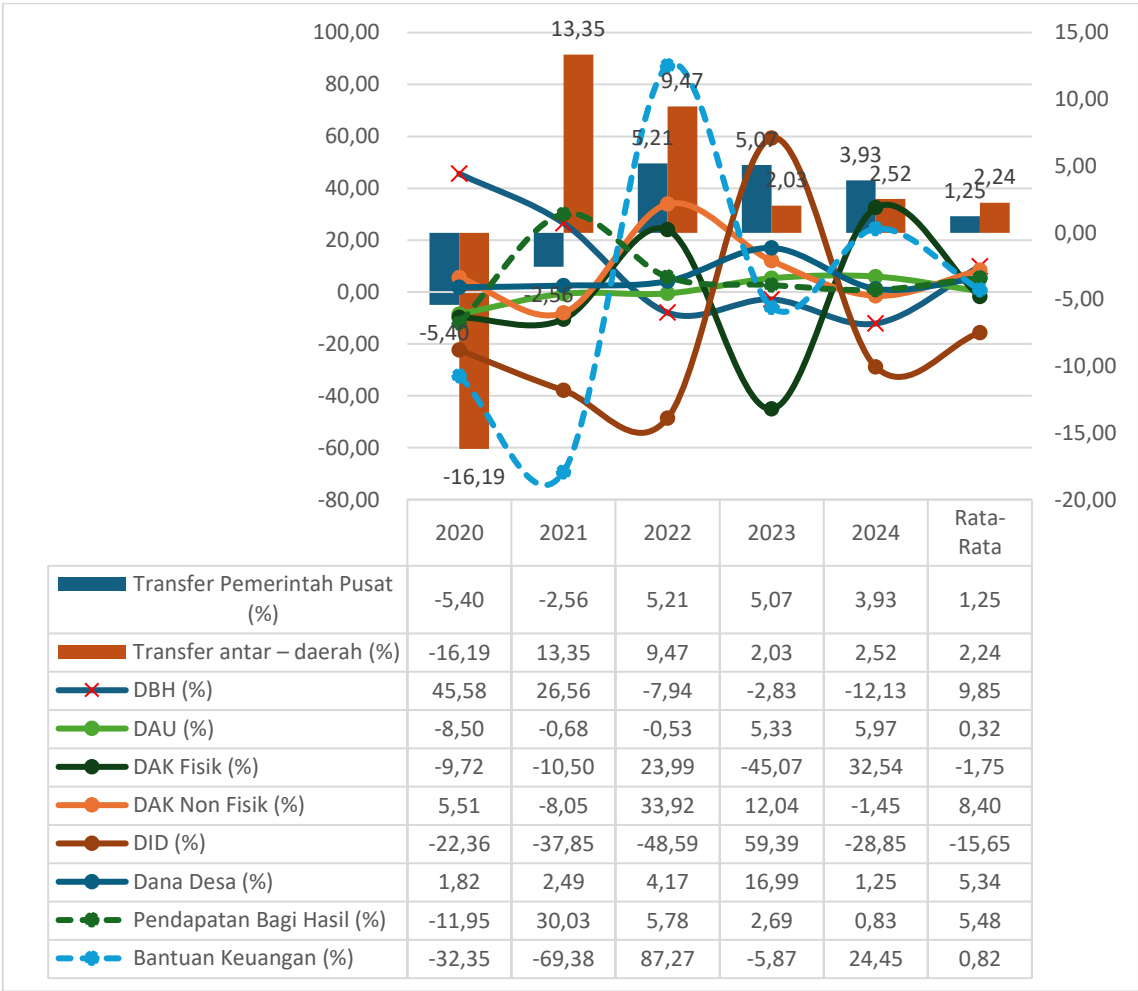
Dana Insentif Daerah (DID) justru mengalami tren menurun, dari Rp45,17 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp16,37 miliar pada tahun 2024, yang dapat mencerminkan perlunya evaluasi terhadap kinerja indikator fiskal dan pelayanan publik yang menjadi dasar pemberian DID. Sementara itu, Dana Desa menunjukkan peningkatan yang konsisten dari Rp171,10 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp216,38 miliar pada tahun 2024, yang mendukung penguatan pembangunan di tingkat desa.

Pendapatan transfer antar-daerah juga mengalami pertumbuhan, dari Rp161,43 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp209,53 miliar pada tahun 2024. Komponen terbesar dalam kategori ini adalah dana bagi hasil antar-daerah, yang mencerminkan kerja sama dan distribusi pendapatan antara pemerintah daerah. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lain juga mengalami fluktuasi, namun relatif kecil kontribusinya terhadap total pendapatan transfer.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa komponen pendapatan transfer, secara umum Kabupaten Sragen mengalami pertumbuhan dalam penerimaan transfer daerah. Hal ini

mencerminkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah yang didukung oleh kebijakan transfer pemerintah pusat serta penguatan kerja sama dengan daerah lain. Optimalisasi pemanfaatan dana transfer ini menjadi kunci dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen terhadap total Pendapatan Transfer, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2020-2024.



Gambar 2. 100 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data pertumbuhan komponen pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Sragen, terlihat bahwa pertumbuhan transfer dari pemerintah pusat menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Secara rata-rata, pertumbuhan transfer pemerintah pusat hanya sebesar 1,25 persen per tahun. Meskipun pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan sebesar 5,21 persen dan 5,07 persen, tren

negatif pada tahun 2020 dan 2021 mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam alokasi dana dari pemerintah pusat.

Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,85 persen per tahun, meskipun cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi DBH terhadap pendapatan transfer tidak selalu stabil dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan fiskal dan realisasi penerimaan negara. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pertumbuhan rata-rata yang sangat kecil, yaitu 0,32 persen, dengan penurunan pada tahun 2020 dan 2021, diikuti oleh peningkatan moderat pada tahun 2023 dan 2024.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan perbedaan tren antara DAK Fisik dan Non-Fisik. DAK Fisik mengalami pertumbuhan yang sangat fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 1,75 persen. Penurunan drastis pada tahun 2023 sebesar minus 45,07 persen diikuti oleh lonjakan pada tahun 2024 sebesar 32,54 persen mengindikasikan adanya kebijakan alokasi yang tidak konsisten. Di sisi lain, DAK Non-Fisik mengalami pertumbuhan lebih stabil dengan rata-rata 4,40 persen, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2024.

Dana Desa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil dengan rata-rata 5,34 persen per tahun, meskipun pada tahun 2023 terdapat lonjakan signifikan sebesar 16,99 persen. Dana Insentif Daerah menunjukkan tren negatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 15,65 persen, terutama karena penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan tajam sebesar 59,39 persen, yang mungkin disebabkan oleh kebijakan insentif tertentu yang diterapkan pada tahun tersebut.

Berdasarkan data pertumbuhan pendapatan transfer antar daerah Pemerintah Kabupaten Sragen selama periode 2020–2024, terlihat adanya pola pertumbuhan yang berbeda antara Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dengan rata-rata sebesar 5,48 persen per tahun. Meskipun sempat mengalami kontraksi sebesar minus 11,95 persen pada tahun 2020, indikator ini pulih dengan pertumbuhan

tertinggi sebesar 30,03 persen pada 2021, diikuti oleh pertumbuhan positif meskipun melambat pada tahun-tahun berikutnya.

Sebaliknya, Bantuan Keuangan mencerminkan volatilitas yang sangat tinggi. Pertumbuhan negatif tajam terjadi pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar minus 32,35 persen dan minus 69,38 persen, sebelum melonjak signifikan sebesar 87,27 persen pada tahun 2022. Namun, pertumbuhan kembali menurun pada tahun 2023 (minus 5,87 persen), dan meningkat lagi pada 2024 sebesar 24,45 persen. Fluktuasi yang ekstrem ini menyebabkan rata-rata pertumbuhan Bantuan Keuangan hanya sebesar 0,82 persen selama lima tahun, mencerminkan ketidakpastian dan ketergantungan yang tinggi pada alokasi dari pemerintah daerah lain. Hal ini menunjukkan perlunya strategi perencanaan keuangan yang adaptif untuk mengantisipasi dinamika sumber penerimaan tersebut.

Secara keseluruhan, komponen pendapatan transfer Kabupaten Sragen mengalami pertumbuhan yang beragam. Beberapa komponen, seperti Dana Insentif Daerah dan DAK Fisik, menunjukkan volatilitas yang tinggi, sedangkan DAU dan DBH cenderung lebih stabil meskipun mengalami beberapa penurunan dalam periode tertentu. Ketidakstabilan dalam pertumbuhan ini dapat mengindikasikan perlunya strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan guna mengantisipasi fluktuasi pendapatan transfer di masa mendatang.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup seluruh pendapatan daerah kecuali PAD dan pendapatan transfer. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: hibah; dana darurat; dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 70 Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendapatan Hibah	88.997.410.000	88.707.880.000	5.723.900.000	4.238.000.000	-
2.	Dana Darurat					500.000.000
3.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	88.997.410.000	88.707.880.000	5.723.900.000	4.238.000.000	500.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sragen 2020-2024

Berdasarkan data realisasi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Sragen, terlihat bahwa komponen pendapatan hibah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan hibah tercatat sebesar Rp88,99 miliar dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp88,70 miliar. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi Rp5.72 miliar, dan semakin menurun pada tahun 2023 dengan realisasi hanya Rp4.23 miliar. Pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi pendapatan hibah.

Selain itu, dalam kategori dana darurat, tidak terdapat realisasi pendapatan dari tahun 2020 hingga 2023. Namun, pada tahun 2024, terdapat pencatatan Dana Darurat sebesar Rp500 juta. Sementara itu, kategori lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memiliki realisasi dalam lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, total lain-lain pendapatan daerah yang sah mengikuti tren penurunan yang sama dengan pendapatan hibah, mengingat kategori ini menjadi penyumbang utama dalam kelompok pendapatan tersebut. Penurunan yang drastis terutama sejak tahun 2022 dapat mengindikasikan adanya perubahan kebijakan terkait penerimaan hibah atau berkurangnya sumber pendanaan dari hibah. Hal ini dapat berdampak pada kapasitas fiskal daerah dalam mendanai program-program pembangunan yang sebelumnya bergantung pada sumber hibah. Oleh karena itu, perlu adanya strategi diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap hibah dan memastikan kesinambungan keuangan daerah.

2.5.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Amanat Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Belanja Daerah harus diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, belanja ini harus berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Belanja Daerah juga harus mengacu

pada Analisis Standar Belanja (ASB) serta standar harga satuan regional agar lebih efektif dan efisien.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hal ini mencerminkan peran Belanja Daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, guna mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta penyediaan layanan bagi masyarakat.

Untuk memahami lebih lanjut dinamika pengeluaran daerah, berikut disajikan gambaran mengenai perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen selama periode 2020–2024.

Tabel 2. 71 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	BELANJA					
2.1	Belanja Operasi	1.476.448.907.568	1.606.127.380.958	1.601.697.320.436	1.671.033.981.797	1.812.102.344.888
2.1.1	Belanja Pegawai	955.085.523.590	1.036.711.438.806	1.001.431.523.701	989.650.909.979	1.125.816.588.799
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	421.283.615.989	491.994.262.010	504.214.290.252	563.223.159.554	563.699.102.346
2.1.3	Belanja Bunga	4.636.738.547		385.050.905	2.271.775.621	2.356.503.080
2.1.4	Belanja Subsidi	-		102.070.000	2.499.260.000	999.880.000
2.1.5	Belanja Hibah	86.512.829.442	66.477.230.142	82.357.146.408	90.473.076.643	106.108.270.663
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.930.200.000	10.944.450.000	13.207.239.170	22.915.800.000	13.122.000.000
2.2	Belanja Modal	268.507.459.807	211.772.001.931	351.881.445.556	433.411.157.251	240.526.522.306
2.2.1	Belanja Modal Tanah	11.794.865.879	11.004.366.860	22.964.878.400	3.284.942.000	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.961.937.102	76.752.869.622	100.023.477.642	71.041.690.789	61.561.336.908
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.469.872.265	66.063.808.337	119.543.651.478	189.137.439.525	85.611.180.448
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.654.547.988	56.704.928.961	107.321.930.466	157.517.337.087	88.354.432.100
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.626.236.573	1.246.028.151	2.027.507.570	12.320.147.850	4.566.355.350
2.2.6	Aset Lainnya				109.600.000	433.217.500
2.3	Belanja Tak Terduga	39.713.061.242	4.140.790.850	485.416.000	193.000.000	395.940.529
2.3.1	Belanja Tak Terduga	39.713.061.242	4.140.790.850	485.416.000	193.000.000	395.940.529
2.4	Belanja Transfer	345.769.047.600	338.837.601.930	352.261.373.234	400.241.729.607	401.689.857.669
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.548.068.600	3.911.562.100	4.332.978.700	2.801.232.700	3.380.584.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	341.220.979.000	334.926.039.830	347.928.394.534	397.440.496.907	398.309.273.669
	JUMLAH BELANJA	2.130.438.476.217	2.160.877.775.669	2.306.325.555.226	2.504.879.868.655	2.454.714.665.392

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sragen 2020-2024

Berdasarkan data realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Sragen dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan dalam beberapa komponen belanja daerah. Secara umum, total belanja daerah mengalami tren meningkat dari Rp2,13 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,50 triliun pada tahun 2023, meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi Rp2,45 triliun.

Komponen belanja operasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari Rp1,47 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,81 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh naiknya belanja pegawai, yang mengalami lonjakan dari Rp955,08 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,12 triliun pada tahun 2024. Selain itu, belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan, meskipun dengan pertumbuhan yang lebih moderat, dari Rp421,28 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp563,69 miliar pada tahun 2024.

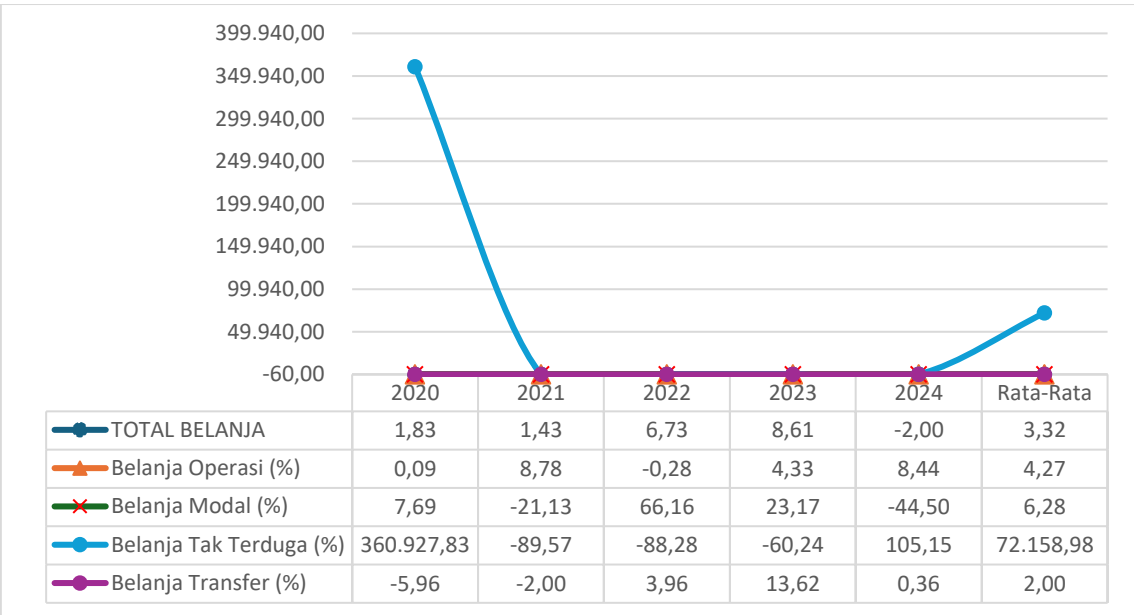
Belanja modal mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, belanja modal tercatat sebesar Rp268,50 miliar, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi Rp211,77 miliar. Namun, belanja modal kembali meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp433,41 miliar sebelum mengalami penurunan tajam menjadi Rp240,52 miliar pada tahun 2024. Penurunan belanja modal pada tahun 2024 dapat mencerminkan kebijakan penghematan atau pergeseran prioritas dalam alokasi anggaran daerah.

Belanja tak terduga menunjukkan tren menurun secara signifikan dari Rp39,71 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp395,94 juta pada tahun 2024. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh penurunan kebutuhan darurat atau perubahan strategi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Sementara itu, belanja transfer juga mengalami peningkatan, dari Rp345,76 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp398,30 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan entitas lainnya. Namun, belanja bagi hasil cenderung mengalami fluktuasi, dengan realisasi tertinggi sebesar Rp4,54 miliar pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat menjadi Rp3,38 miliar pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, tren belanja Pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek utama, terutama belanja operasi dan transfer, yang mencerminkan fokus pada pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan dan distribusi anggaran kepada daerah atau sektor terkait. Namun, penurunan belanja modal pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terkait kebijakan investasi daerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tetap berkelanjutan.

Berdasarkan data pertumbuhan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sragen, terlihat adanya fluktuasi dalam persentase pertumbuhan total belanja selama periode 2020 hingga 2024. Secara rata-rata, total belanja mengalami pertumbuhan sebesar 3,32 persen per tahun, meskipun pada tahun 2024 tercatat mengalami kontraksi sebesar minus 2,00 persen.



Gambar 2. 101 Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Belanja operasi menunjukkan tren yang relatif stabil dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,27 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 8,78 persen, sementara pada tahun 2022 sempat mengalami sedikit penurunan sebesar minus 0,28 persen. Namun, kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 4,33 persen dan 8,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2023 dan 2024 telah melakukan penyesuaian pasca COVID-19.

Sementara itu, belanja modal mengalami volatilitas yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,28 persen per tahun. Pada tahun 2022, belanja modal mengalami lonjakan signifikan sebesar 66,16 persen, yang mengindikasikan adanya peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur atau pengadaan aset tetap. Namun, pada tahun 2021 dan 2024, belanja modal mengalami kontraksi cukup tajam masing-masing sebesar minus 21,13 persen dan minus 44,50 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan alokasi anggaran atau keterbatasan sumber daya keuangan daerah.

Belanja tak terduga menunjukkan angka pertumbuhan yang ekstrem, dengan rata-rata mencapai 72.158,98 persen. Hal ini disebabkan oleh lonjakan signifikan pada tahun 2020 yang mencapai 360.927,83 persen, kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebutuhan darurat seperti penanganan pandemi COVID-19. Setelahnya, belanja tak terduga mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing sebesar minus 89,57 persen dan minus 88,28 persen, sebelum kembali meningkat sebesar 105,15 persen pada tahun 2024. Variabilitas yang tinggi pada komponen belanja ini menunjukkan bahwa penggunaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi darurat dan kebijakan pemerintah daerah dalam merespons situasi yang tidak terduga.

Di sisi lain, belanja transfer mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,00 persen per tahun, dengan tren yang cenderung meningkat sejak tahun 2022. Pada tahun 2023, belanja transfer mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,62 persen, yang kemungkinan besar mencerminkan peningkatan alokasi dana bagi hasil atau bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan entitas lainnya. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, belanja transfer justru mengalami kontraksi masing-masing sebesar minus 5,96 persen dan minus 2,00 persen.

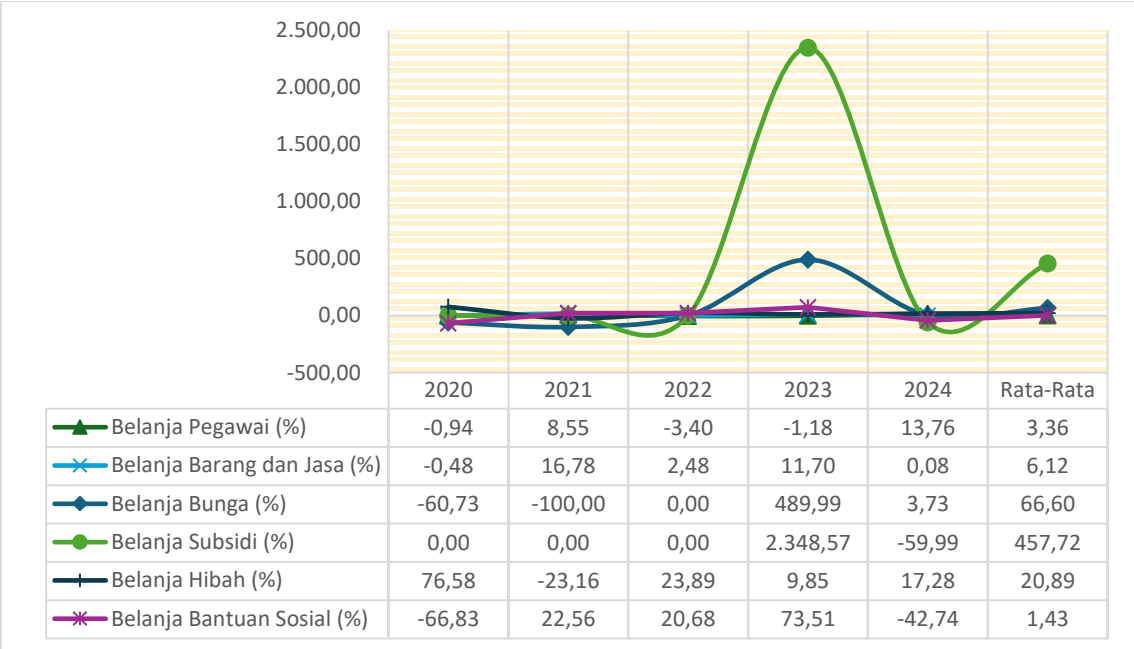
Secara keseluruhan, pola pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Sragen menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, kebijakan fiskal, serta kebutuhan belanja strategis dalam rangka pembangunan daerah. Konsistensi dalam belanja operasi mengindikasikan stabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, sementara fluktuasi pada belanja modal dan belanja tak terduga menggarisbawahi pentingnya perencanaan anggaran yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Untuk memahami lebih lanjut kontribusi dari masing-masing komponen belanja daerah, berikut adalah analisis terhadap: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan bagian terbesar dalam struktur belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Operasi didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bunga, belanja subsidi, serta belanja bantuan sosial. Tren Belanja Operasi dalam lima tahun terakhir dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik serta efektivitas pengelolaan anggaran. Peningkatan atau penurunan pada belanja ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan operasional pemerintahan, kebijakan efisiensi anggaran, serta kondisi ekonomi daerah.

Berdasarkan data pertumbuhan realisasi komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Sragen dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan pada berbagai jenis belanja. Secara umum, belanja pegawai mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,36 persen per tahun, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 13,76 persen. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar minus 3,40 persen dan minus 1,18 persen, belanja pegawai tetap menunjukkan tren pertumbuhan dalam jangka panjang. Peningkatan belanja pegawai ini dapat mencerminkan adanya kenaikan gaji, tunjangan, atau penyesuaian anggaran untuk mendukung kebutuhan pegawai daerah.



Gambar 2. 102 Pertumbuhan Realisasi Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Belanja barang dan jasa juga menunjukkan tren yang relatif positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,12 persen per tahun. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 16,78 persen, sementara pada tahun 2024 hanya meningkat sebesar 0,08 persen, menunjukkan perlambatan yang mungkin disebabkan oleh efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa atau perubahan prioritas alokasi anggaran.

Komponen belanja bunga mengalami volatilitas yang sangat tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 66,60 persen per tahun. Pada tahun 2020, belanja bunga mengalami penurunan signifikan sebesar minus 60,73 persen dan mencapai titik terendah pada tahun 2021 dengan kontraksi minus 100 persen. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan drastis sebesar 489,99 persen sebelum kembali menurun menjadi 3,73 persen pada tahun 2024. Variasi yang ekstrem ini menunjukkan adanya faktor tertentu, seperti perubahan kebijakan utang daerah atau pembayaran kewajiban bunga dalam periode tertentu.

Belanja subsidi juga mengalami fluktuasi yang tajam, terutama pada tahun 2023, di mana terjadi lonjakan sebesar 2.348,57 persen. Namun, pada tahun 2024, belanja subsidi mengalami kontraksi sebesar minus 59,99 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 457,72 persen per tahun, belanja subsidi tampaknya sangat dipengaruhi oleh

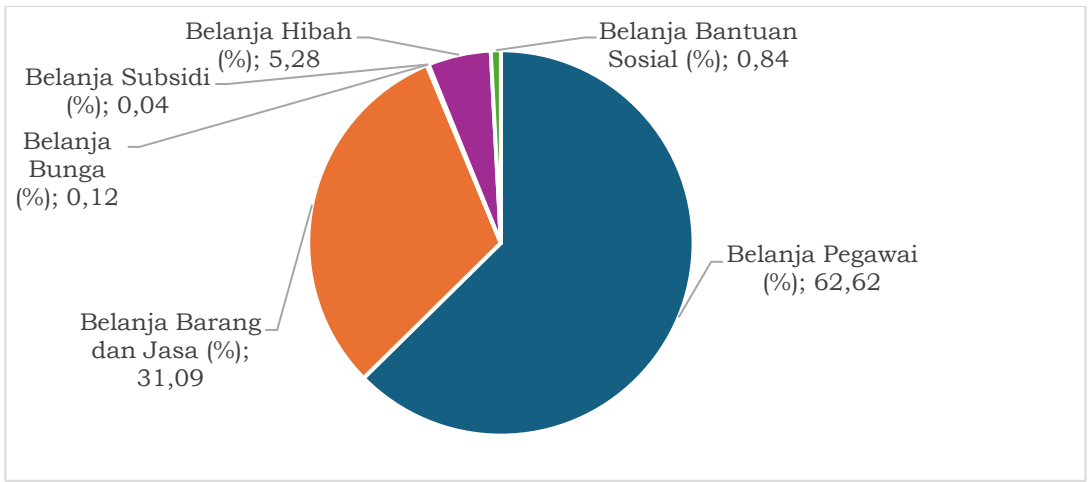
kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada sektor tertentu.

Belanja hibah menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 20,89 persen per tahun, meskipun mengalami penurunan sebesar minus 23,16 persen pada tahun 2021. Setelahnya, belanja hibah kembali meningkat dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 23,89 persen pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya kebijakan peningkatan hibah kepada organisasi atau kelompok masyarakat tertentu guna mendukung program pembangunan daerah.

Sementara itu, belanja bantuan sosial mengalami fluktuasi yang cukup besar, dengan rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 1,43 persen per tahun. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2020 sebesar minus 66,83 persen, sementara peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 73,51 persen. Pada tahun 2024, belanja bantuan sosial kembali mengalami kontraksi sebesar minus 42,74 persen. Variabilitas yang tinggi ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial sangat bergantung pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan sosial.

Secara keseluruhan, pertumbuhan belanja operasi Pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan adanya pola yang tidak stabil pada beberapa komponen, terutama belanja bunga, subsidi, dan bantuan sosial. Stabilitas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menjaga kesinambungan operasionalnya, meskipun terdapat dinamika pada sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih terencana dan adaptif untuk mengoptimalkan penggunaan belanja operasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan data rata-rata kontribusi komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Sragen per tahun, dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja operasi, yaitu sebesar 62,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran operasional daerah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah, termasuk gaji, tunjangan, serta kompensasi lainnya.



Gambar 2. 103 Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Komponen belanja barang dan jasa menempati urutan kedua dengan kontribusi rata-rata sebesar 31,09 persen. Anggaran ini digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan, seperti pengadaan barang habis pakai, jasa konsultansi, pemeliharaan aset, serta biaya operasional lainnya. Besarnya alokasi pada komponen ini mencerminkan pentingnya pengeluaran barang dan jasa dalam mendukung pelaksanaan program dan layanan publik di daerah.

Sementara itu, belanja hibah memiliki kontribusi rata-rata sebesar 5,28 persen, yang menunjukkan alokasi dana yang relatif kecil dibandingkan dengan belanja pegawai dan barang serta jasa. Belanja hibah umumnya digunakan untuk memberikan bantuan kepada organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, atau kelompok sosial lainnya yang berperan dalam mendukung pembangunan daerah.

Adapun belanja bunga hanya menyumbang 0,12 persen dari total belanja operasi, yang mengindikasikan bahwa beban bunga dari utang pemerintah daerah relatif rendah. Belanja subsidi memiliki kontribusi yang lebih kecil lagi, yaitu 0,04 persen, yang mencerminkan rendahnya ketergantungan daerah terhadap skema subsidi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, belanja bantuan sosial berkontribusi sebesar 0,84 persen, yang digunakan untuk mendukung kelompok masyarakat rentan dalam bentuk program kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, struktur belanja operasi Pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan dominasi pengeluaran untuk belanja

pegawai dan barang serta jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran daerah lebih banyak digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik dibandingkan dengan pengeluaran lain seperti subsidi, hibah, atau bantuan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas belanja operasi guna memastikan alokasi anggaran yang lebih optimal dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

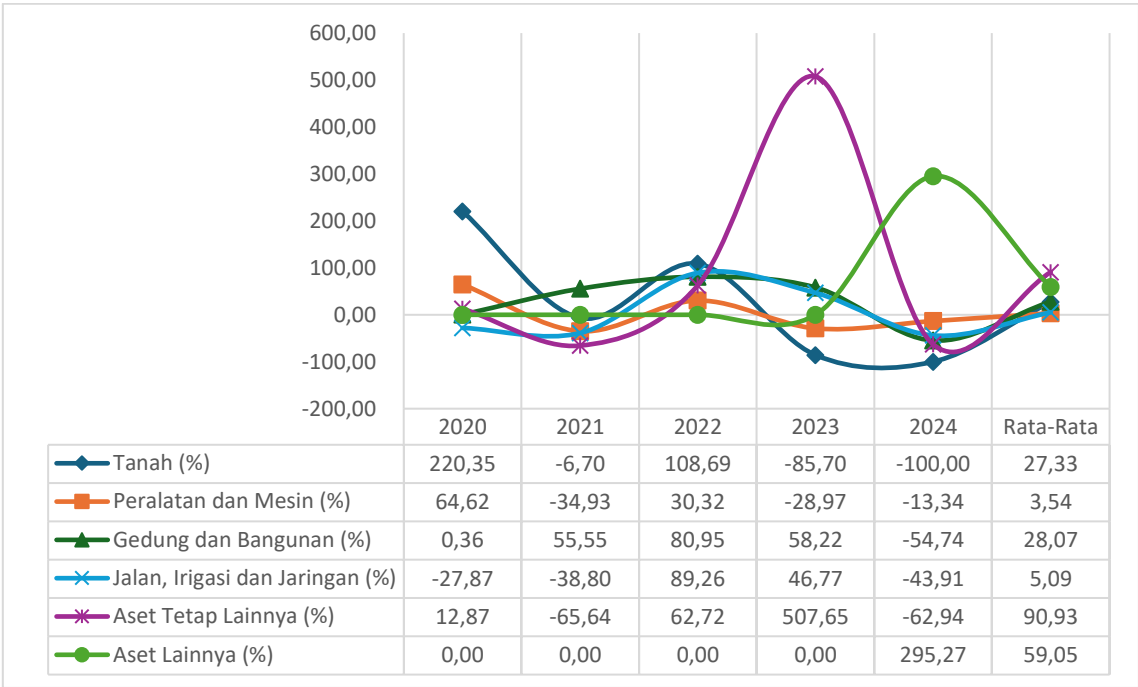
2. Belanja Modal

Belanja Modal mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur, sarana dan prasarana publik, serta pengadaan peralatan. Besaran dan pola perubahan Belanja Modal setiap tahun menunjukkan prioritas pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah serta efisiensi dalam pengelolaan investasi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; belanja modal aset tetap lainnya; dan belanja modal aset Lainnya

Fluktuasi dalam alokasi Belanja Modal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pembangunan, kapasitas fiskal daerah, serta realisasi proyek-proyek strategis. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur, sehingga analisis terhadap Belanja Modal akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan dan implementasi belanja daerah.

Berdasarkan data pertumbuhan realisasi komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Sragen, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan di setiap kategori aset. Belanja modal untuk tanah mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2020 sebesar 220,35 persen, tetapi mengalami penurunan berturut-turut hingga mencapai minus 100 persen pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan belanja modal untuk

tanah tercatat sebesar 27,33 persen, yang mencerminkan pola investasi yang tidak konsisten dalam pembelian aset tanah.



Gambar 2. 104 Pertumbuhan Realisasi Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Belanja modal untuk peralatan dan mesin menunjukkan tren yang cenderung tidak stabil, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 64,62 persen, namun mengalami penurunan hingga minus 34,93 persen pada tahun 2021. Meskipun sempat mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 sebesar 30,32 persen, tren negatif kembali terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Rata-rata pertumbuhan dalam kategori ini hanya mencapai 3,54 persen, menunjukkan adanya pengeluaran yang relatif rendah dan tidak merata dalam pengadaan peralatan dan mesin.

Belanja modal untuk gedung dan bangunan menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan peningkatan signifikan pada tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 80,95 persen, sementara pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis sebesar minus 54,74 persen. Rata-rata pertumbuhan sebesar 28,07 persen mencerminkan adanya investasi yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur fisik di Kabupaten Sragen, meskipun mengalami kontraksi di tahun terakhir.

Belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan menunjukkan pola pertumbuhan yang berfluktuasi. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dengan angka masing-masing sebesar minus 27,87 persen dan minus 38,80 persen, tetapi pada tahun 2022 dan 2023, belanja modal dalam kategori ini meningkat signifikan masing-masing sebesar 89,26 persen dan 46,77 persen. Namun, kembali terjadi penurunan pada tahun 2024 sebesar minus 43,91 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,09 persen, kategori ini mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam pembangunan infrastruktur dasar.

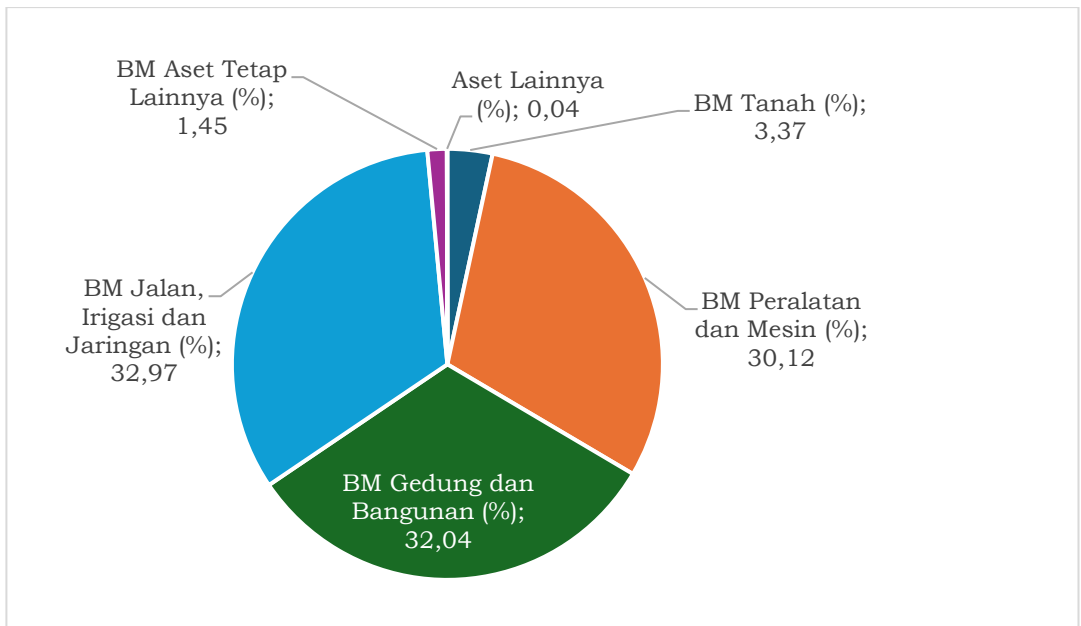
Belanja modal untuk aset tetap lainnya menunjukkan fluktuasi yang sangat ekstrem, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 507,65 persen, sementara tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan signifikan, terutama pada tahun 2021 (minus 65,64 persen) dan 2024 (minus 62,94 persen). Rata-rata pertumbuhan sebesar 90,93 persen menunjukkan adanya investasi yang cukup besar di kategori ini, meskipun dengan pola pengeluaran yang tidak stabil.

Belanja modal untuk aset lainnya menunjukkan pola pertumbuhan yang sangat unik, di mana pada tahun 2020 hingga 2023 tidak ada pertumbuhan, tetapi pada tahun 2024 mengalami lonjakan hingga 295,27 persen. Hal ini menyebabkan rata-rata pertumbuhan mencapai 59,05 persen, yang menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran untuk kategori ini lebih terfokus pada tahun-tahun tertentu dibandingkan secara merata setiap tahun.

Secara keseluruhan, belanja modal Pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan pola pengeluaran yang fluktuatif dengan kecenderungan lonjakan belanja pada tahun-tahun tertentu, diikuti oleh kontraksi tajam di tahun berikutnya. Pola ini mengindikasikan adanya tantangan dalam perencanaan anggaran belanja modal yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Stabilitas investasi dalam berbagai kategori aset menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan daerah secara optimal.

Berdasarkan data rata-rata kontribusi komponen belanja modal Pemerintah Kabupaten Sragen, terlihat bahwa alokasi terbesar dalam belanja modal dialokasikan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 32,97 persen per tahun.

Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi guna mendukung mobilitas masyarakat serta sektor pertanian dan ekonomi lokal.



Gambar 2. 105 Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Selain itu, Belanja Modal Gedung dan Bangunan juga memiliki kontribusi yang signifikan, yaitu 32,04 persen. Pengalokasian anggaran ini menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun dan meningkatkan sarana serta prasarana publik, seperti perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Sementara itu, Belanja Modal Peralatan dan Mesin berkontribusi sebesar 30,12 persen, yang mencerminkan investasi pada pengadaan alat dan perlengkapan guna menunjang operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Belanja Modal Tanah memiliki kontribusi yang relatif kecil, yaitu 3,37 persen, yang mengindikasikan bahwa akuisisi atau pengadaan lahan tidak menjadi prioritas utama dalam struktur belanja modal daerah. Adapun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya menunjukkan angka yang sangat rendah, masing-masing 1,45 persen dan 0,04 persen, yang menunjukkan bahwa kategori ini tidak memiliki peran signifikan dalam struktur belanja modal.

Secara keseluruhan, pola distribusi belanja modal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen lebih

mengutamakan pembangunan infrastruktur dan pengadaan fasilitas penunjang operasional pemerintahan daripada pengadaan tanah atau aset lainnya. Namun, diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas dari belanja modal ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

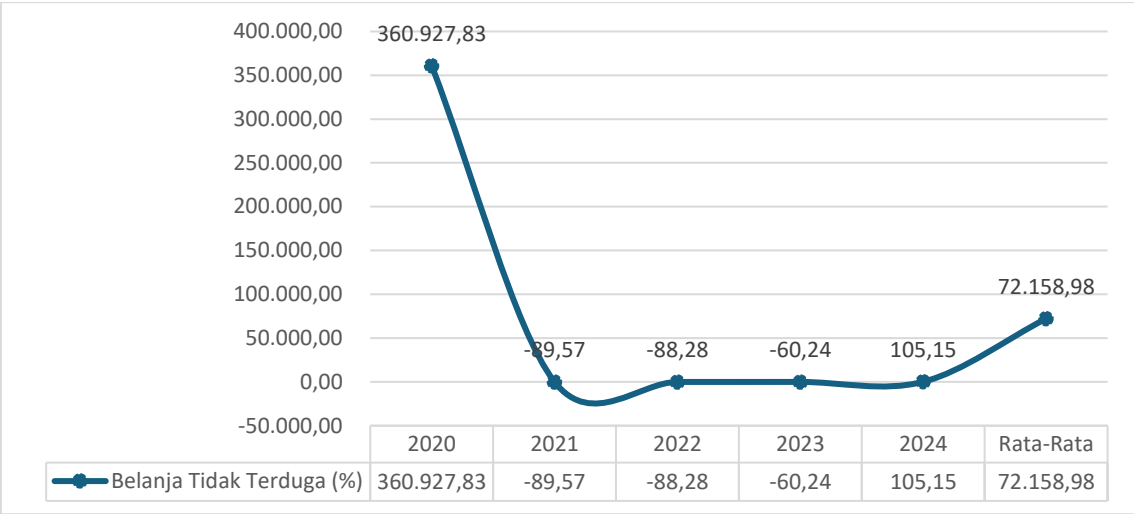
3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi dalam perencanaan anggaran, seperti bencana alam, keadaan darurat, atau kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah. Pos ini memiliki karakteristik yang unik karena jumlah dan realisasinya sangat bergantung pada kondisi yang terjadi dalam suatu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi dan realisasi Belanja Tak Terduga mengalami fluktuasi, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan penanggulangan bencana, dinamika kondisi ekonomi dan sosial, serta perubahan regulasi yang mengatur penggunaan dana darurat. Analisis terhadap komponen ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi situasi yang tidak terduga serta efektivitas penggunaan anggaran dalam keadaan darurat.

Berdasarkan data pertumbuhan realisasi belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Sragen, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, belanja tak terduga mengalami lonjakan luar biasa sebesar 360.927,83 persen. Kenaikan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kebutuhan darurat, seperti penanganan pandemi COVID-19 atau bencana alam yang memerlukan alokasi dana mendesak. Namun, setelah tahun 2020, belanja tak terduga mengalami penurunan drastis, dengan pertumbuhan negatif berturut-turut pada tahun 2021 (minus 89,57 persen), 2022 (minus 88,28 persen), dan 2023 (minus 60,24 persen). Penurunan ini

mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan dalam pengelolaan anggaran, di mana belanja tak terduga dapat dikurangi setelah kondisi darurat berkurang.



Gambar 2. 106 Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Terduga, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Pada tahun 2024, belanja tak terduga kembali mengalami kenaikan sebesar 105,15 persen. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti antisipasi terhadap kejadian tidak terduga atau perencanaan keuangan yang lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Secara rata-rata, pertumbuhan belanja tak terduga dalam periode tersebut tercatat sebesar 72.159 persen, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, belanja tak terduga masih memiliki peran penting dalam struktur keuangan daerah.

Fluktuasi belanja tak terduga ini mencerminkan dinamika kebutuhan keuangan daerah dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas alokasi belanja tak terduga dalam mendukung stabilitas fiskal dan respons pemerintah daerah terhadap kondisi darurat serta kebijakan anggaran yang lebih berkelanjutan.

4. Belanja Transfer

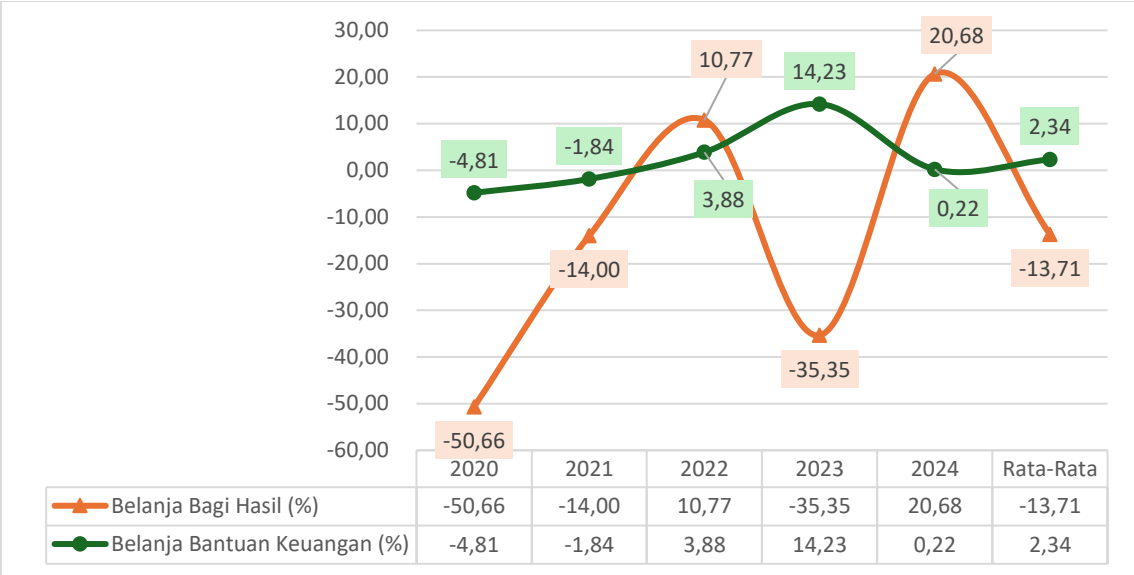
Belanja Transfer merupakan belanja yang dialokasikan kepada pemerintah desa dan entitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Transfer dana ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kapasitas pemerintahan

desa, serta memperkuat layanan publik di tingkat lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Tren Belanja Transfer dalam lima tahun terakhir menunjukkan bagaimana pola distribusi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan desa serta efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal. Besaran alokasi Belanja Transfer dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kebutuhan pembangunan di tingkat desa.

Belanja transfer, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen mengalami dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Analisis terhadap tren perubahan dalam lima tahun terakhir memberikan gambaran mengenai pola alokasi anggaran daerah dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data pertumbuhan realisasi belanja transfer Pemerintah Kabupaten Sragen, terdapat fluktuasi dalam komponen belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan selama periode 2020 hingga 2024. Belanja bagi hasil mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 sebesar minus 50,66 persen, diikuti dengan tren negatif pada tahun 2021 (minus 14,00 persen) dan 2023 (minus 35,35 persen). Meskipun sempat mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2022 (10,77 persen) dan 2024 (20,68 persen), rata-rata pertumbuhan belanja bagi hasil selama lima tahun terakhir masih menunjukkan angka negatif, yaitu sebesar minus 13,71 persen.



Gambar 2. 107 Pertumbuhan Realisasi Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Sementara itu, belanja bantuan keuangan menunjukkan tren yang lebih stabil dibandingkan belanja bagi hasil. Pada tahun 2020 dan 2021, belanja ini mengalami sedikit penurunan sebesar minus 4,81 persen dan minus 1,84 persen. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, terjadi pertumbuhan positif masing-masing sebesar 3,88 persen dan 14,23 persen. Meskipun pada tahun 2024 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,22 persen, secara rata-rata, belanja bantuan keuangan tetap mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,34 persen.

Secara keseluruhan, dinamika belanja transfer ini menunjukkan bahwa belanja bagi hasil cenderung mengalami ketidakstabilan dengan pertumbuhan rata-rata yang masih negatif. Sebaliknya, belanja bantuan keuangan memiliki kecenderungan yang lebih stabil dan mencatatkan pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi distribusi dana bagi hasil serta perlunya kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan belanja transfer di Kabupaten Sragen.

2.5.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan mencakup seluruh transaksi keuangan pemerintah yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran daerah, yang harus dibayar atau akan diterima kembali dalam sistem penganggaran pemerintah. Tujuan utama pembiayaan adalah menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sumber penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana

cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, serta penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, investasi daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (3) mengatur bahwa terdapat enam sumber penerimaan pembiayaan, yaitu: (1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA); (2) pencairan dana cadangan; (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) penerimaan pinjaman daerah; (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan (6) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, sistematika APBD terdiri dari pendapatan dikurangi belanja, yang menghasilkan surplus atau defisit. Jika terjadi defisit, maka pembiayaan menjadi instrumen untuk menutup kekurangan tersebut, sementara jika terjadi surplus, pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran strategis yang mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan data realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Sragen dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar Rp559,61 miliar, yang sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. Namun, pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan mengalami penurunan signifikan menjadi Rp244,38 miliar, yang disebabkan oleh menurunnya SiLPA dan tidak ada penerimaan pinjaman daerah.

Tabel 2. 72 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	376.281.638.562	342.647.355.380	559.608.897.810	505.725.522.889	244.375.328.713
3.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	376.281.638.562	342.647.355.380	515.914.283.227	394.537.252.889	244.375.328.713
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah			43.694.614.583	111.188.270.000	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	116.080.879.500	2.577.000.000	36.586.161.737	59.915.826.000	89.823.415.400
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			11.586.161.737		86.902.465.400
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	25.000.000.000	2.577.000.000	25.000.000.000	2.850.000.000	3.000.000.000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan				57.065.826.000	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	91.080.879.500				
	PEMBIAYAAN NETTO	260.200.759.062	340.070.355.380	523.022.736.073	445.809.696.889	154.472.863.313
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	342.587.257.374	515.914.307.427	394.537.252.889	244.375.328.713	133.286.428.592

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sragen 2020-2024

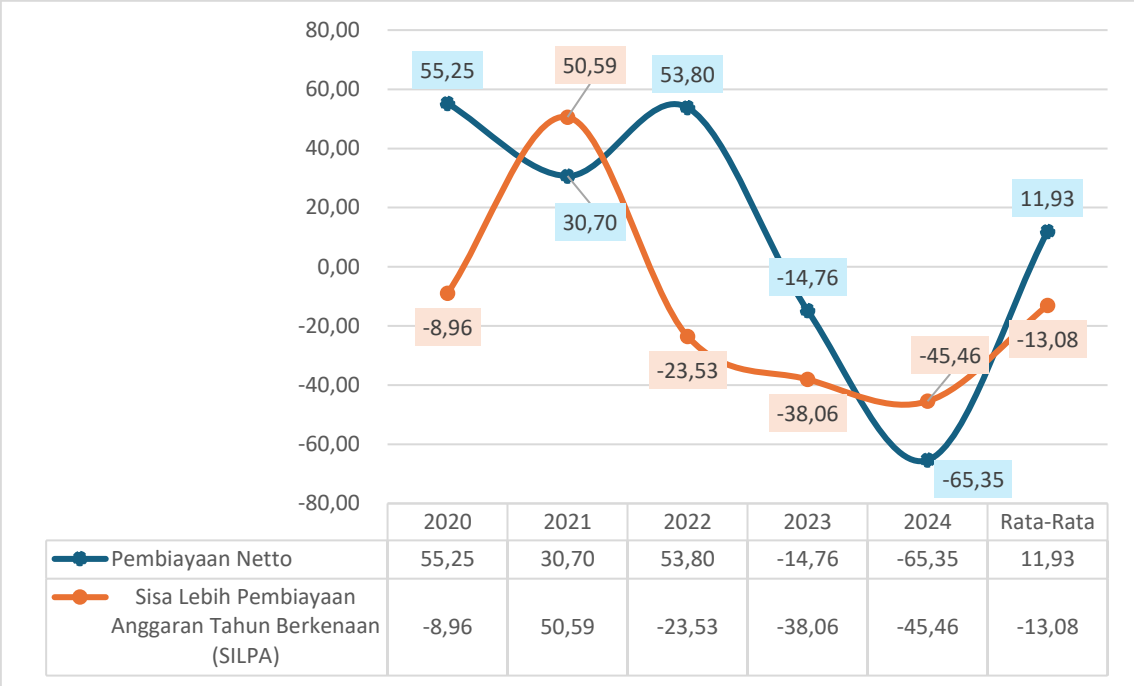
Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp116,08 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk pemberian pinjaman daerah dan penyertaan modal pemerintah. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, komposisi pengeluaran berubah, dengan adanya alokasi untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sejak tahun 2022 dan pembentukan dana cadangan pada tahun 2023. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan dalam pengeluaran pembiayaan menjadi Rp89,82 miliar, dengan proporsi terbesar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang.

Secara keseluruhan, pembiayaan netto menunjukkan tren yang bervariasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar Rp523,02 miliar sebelum menurun pada tahun 2024 menjadi Rp154,47 miliar. Hal ini sejalan dengan perubahan dalam komponen penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Sementara itu, SILPA mengalami tren penurunan sejak tahun 2022, dari Rp515,91 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp133,28 miliar pada tahun 2024, yang mencerminkan semakin berkurangnya surplus pembiayaan dalam APBD Kabupaten Sragen.

Penurunan nilai SILPA dalam beberapa tahun terakhir dapat menunjukkan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran atau meningkatnya ketergantungan pada pembiayaan eksternal untuk menutup defisit. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan pembiayaan yang lebih optimal guna memastikan keberlanjutan fiskal daerah, terutama dalam mengendalikan beban utang dan menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan data pertumbuhan realisasi pembiayaan netto dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Pemerintah Kabupaten Sragen, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pembiayaan netto mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020 sebesar 55,25 persen dan terus mengalami kenaikan hingga 2022, meskipun terjadi perlambatan pada tahun 2021 sebesar 30,70 persen. Namun, pada tahun 2023, pembiayaan netto mengalami kontraksi sebesar minus 14,76 persen, dan pada tahun 2024 penurunan semakin tajam mencapai minus 65,35 persen. Secara rata-rata,

pertumbuhan pembiayaan netto masih menunjukkan angka positif sebesar 11,93 persen.



Gambar 2. 108 Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Netto dan SILPA, Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Di sisi lain, realisasi SILPA menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, SILPA tercatat mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 8,96 persen. Meskipun pada tahun 2021 meningkat tajam hingga 50,59 persen, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami kontraksi yang cukup dalam. Pada tahun 2022, SILPA mengalami penurunan sebesar minus 23,53 persen, disusul dengan penurunan yang lebih besar pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar minus 38,06 persen dan minus 45,46 persen. Secara rata-rata, pertumbuhan SILPA menunjukkan angka negatif sebesar minus 13,08 persen, yang mengindikasikan penurunan kapasitas pembiayaan daerah untuk menghasilkan surplus anggaran.

Tren ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penurunan signifikan dalam pembiayaan netto dan SILPA pada tahun 2023 dan 2024 dapat menjadi indikasi meningkatnya beban pembiayaan atau berkurangnya sumber penerimaan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mengelola pembiayaan daerah agar stabilitas fiskal tetap terjaga dan keberlanjutan keuangan daerah dapat dipertahankan.

2.5.1.4 Neraca Daerah

Menurut peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah atau disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peran penting komponen LKPD dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah sebagai keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah provinsi dalam hal aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca daerah akan memberikan informasi berharga kepada pejabat pemerintah daerah, legislatif daerah, kreditur/debitur daerah, dan masyarakat umum tentang keadaan kekayaan dan kewajiban daerah, termasuk masalah ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca Daerah menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut diterbitkan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat dan dapat diukur dalam satuan uang. Kewajiban (utang) dimana ini adalah utang yang timbul melalui keadaan masa lampau yang penyelesaiannya melibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dapat dijelaskan yakni adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Keberadaan Neraca Daerah pada dokumen perencanaan ini dinilai sangat berperan penting untuk pemerintahan Kabupaten Sragen dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah pada setiap tahunnya terdapat dampak pada perubahan kondisi keuangan baik pada posisi aset, kewajiban maupun pada ekuitas. Sehingga untuk mengetahui sebuah posisi keuangan daerah Kabupaten Sragen, telah disajikan perkembangan data Neraca Daerah Kabupaten Sragen pada beberapa tahun (2020-2024).

Tabel 2. 73 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET	4.087.577.565.236,06	4.223.594.001.345,34	4.246.346.568.875,25	4.295.087.502.679,34	4.257.410.146.586,54
1.1	ASET LANCAR	448.549.932.385,42	575.658.005.154,96	464.064.853.861,72	319.366.726.424,21	216.983.223.835,37
	Kas	342.706.603.543,14	515.914.387.609,00	394.537.252.889,00	244.382.455.054,00	133.291.533.829,00
	Piutang	72.233.879.482,24	24.829.617.958,44	23.399.773.041,46	33.625.276.783,21	40.715.183.556,79
	Persediaan	33.493.689.369,04	34.450.981.158,27	45.838.096.735,26	41.108.500.198,00	42.744.651.863,52
	Beban Dibayar Dimuka	115.759.991,00	463.018.429,25	289.731.196,00	250.494.389,00	231.854.586,06
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	317.122.809.174,25	301.822.508.907,72	344.224.421.308,08	367.135.573.230,15	373.641.593.670,02
	Non Permanen					
	Permanen	317.122.809.174,25	301.822.508.907,72	344.224.421.308,08	367.135.573.230,15	373.641.593.670,02
1.3	ASET TETAP	3.084.885.753.256,34	3.115.592.332.429,64	3.262.368.702.838,41	3.421.464.300.181,27	3.471.971.465.333,25
	Tanah	795.100.839.423,00	811.689.408.053,00	849.070.306.453,00	841.724.315.153,00	869.064.988.403,00
	Peralatan dan Mesin	691.302.226.894,79	765.242.915.510,32	856.764.924.616,26	917.946.639.326,58	916.040.096.518,17
	Gedung dan Bangunan	1.035.271.784.209,49	1.120.799.572.804,40	1.240.097.216.829,32	1.402.361.226.099,56	1.494.528.819.976,34
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.020.300.329.870,40	2.073.879.598.859,40	2.177.379.777.149,29	2.337.296.024.498,25	2.453.246.939.012,21
	Aset tetap Lainnya	85.571.144.059,97	87.903.956.009,97	73.313.250.849,97	67.203.218.951,04	57.814.488.552,58
	Konstruksi dalam pengerjaan	3.406.940.954,00	11.479.608.050,00	11.111.627.450,00	12.449.152.950,00	26.183.999.850,00
	Akumulasi Penyusutan	(1.546.067.512.155,31)	(1.755.402.726.857,44)	(1.945.368.400.509,43)	(2.157.516.276.797,16)	(2.344.907.866.979,05)
1.4	ASET LAINNYA	237.019.070.420,06	230.521.154.853,02	175.688.590.867,04	161.238.910.843,71	164.324.949.994,90
	Kemitraan dengan pihak ketiga	1.268.025.000,00	1.268.025.000,00	1.268.025.000,00	1.268.025.000,00	988.800.000,00
	Aset tak berwujud	3.131.165.778,21	3.455.986.539,02	4.688.604.502,17	10.969.407.075,73	9.500.191.336,73
	Aset Lain-lain	232.619.879.641,85	225.797.143.314,00	169.731.961.364,87	145.818.272.767,98	153.835.958.658,17
	Dana Transfer TDF				3.183.206.000,00	
1.5	PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	25.881.992.000,00	30.488.913.753,00

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Properti Investasi Tanah				25.881.992.000,00	28.263.783.250,00
	Properti Investasi Gedung dan Bangunan					3.897.943.823,00
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung					(1.672.813.320,00)
1.6	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Cadangan					
2	KEWAJIBAN	37.550.159.968,14	34.106.781.852,35	46.205.899.701,53	107.405.691.025,04	20.416.158.337,32
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	37.550.159.968,14	34.106.781.852,35	46.205.899.701,53	107.405.691.025,04	20.416.158.337,32
	Utang perhitungan pihak ketiga	18.123.589,14				
	Utang Bunga			980.776.384,00	777.020.221,00	
	Pendapatan diterima dimuka	1.737.166.534,00	2.838.636.949,35	2.665.336.621,53	2.456.123.890,04	2.736.690.703,32
	Utang belanja	35.787.425.889,00	30.596.497.384,00	9.760.837.504,00	17.262.955.173,00	17.674.362.397,00
	Utang jangka pendek lainnya	7.443.956,00	671.647.519,00	18.929.009,00	7.126.341,00	5.105.237,00
	Utang Pihak ketiga lainnya			32.780.020.183,00	86.902.465.400,00	0,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank					
3	EKUITAS	4.050.027.405.267,92	4.189.487.219.492,99	4.200.140.669.173,72	4.187.681.811.654,30	4.236.993.988.249,22
	Ekuitas	4.050.027.405.267,92	4.189.487.219.492,99	4.200.140.669.173,72	4.187.681.811.654,30	4.236.993.988.249,22
4	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.087.577.565.236,06	4.223.594.001.345,34	4.246.346.568.875,25	4.295.087.502.679,34	4.257.410.146.586,54

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sragen 2020-2024

Berdasarkan data laporan posisi keuangan yang telah diaudit dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dilakukan analisis terhadap perkembangan aset, kewajiban, dan ekuitas. Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Sragen menunjukkan dinamika perkembangan yang mencerminkan kondisi keuangan dan pengelolaan aset daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Total aset daerah mengalami pertumbuhan dari sebesar Rp4,08 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,26 triliun pada tahun 2024, meskipun pada tahun terakhir terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023. Perubahan nilai aset ini mencerminkan dinamika akumulasi dan pengelolaan sumber daya daerah yang dipengaruhi oleh pengeluaran operasional, investasi jangka panjang, serta fluktuasi kas dan piutang.

Komponen aset lancar mengalami tren penurunan signifikan sejak tahun 2021. Dari posisi tertinggi sebesar Rp575,66 miliar pada tahun 2021, turun drastis menjadi Rp216,98 miliar pada tahun 2024. Penurunan terbesar terjadi pada pos kas, yang anjlok dari Rp515,91 miliar pada tahun 2021 menjadi hanya Rp133,29 miliar pada tahun 2024. Hal ini dapat mencerminkan peningkatan belanja daerah yang tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan kas, atau kurang optimalnya manajemen kas. Di sisi lain, piutang dan persediaan menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil, sementara beban dibayar dimuka tidak memberikan kontribusi signifikan secara nominal.

Investasi jangka panjang meningkat secara konsisten dari Rp301,82 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp373,64 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan adanya alokasi dana daerah ke dalam investasi permanen yang potensial meningkatkan pendapatan di masa mendatang, atau memperkuat struktur keuangan jangka panjang pemerintah daerah.

Aset tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur neraca daerah, dengan tren yang cenderung meningkat dari Rp3,08 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,47 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh kenaikan nilai pada pos gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan, yang menunjukkan investasi pada infrastruktur publik. Namun demikian, nilai akumulasi penyusutan juga meningkat signifikan dari Rp1,54 triliun pada tahun

2020 menjadi Rp2,34 triliun pada tahun 2024, yang mengindikasikan terjadinya depresiasi aset yang cukup besar seiring berjalannya waktu.

Aset lainnya relatif stabil dengan nilai antara Rp175 hingga Rp237 miliar, meskipun pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan tajam. Aset tak berwujud meningkat pesat, terutama pada tahun 2023 yang mencapai lebih dari Rp10 miliar, menunjukkan adanya pengembangan sistem atau perangkat lunak sebagai aset daerah.

Pada pos Properti Investasi untuk periode tahun 2020 hingga 2024, tidak terdapat nilai properti investasi yang tercatat pada tahun 2020 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun awal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen belum memiliki atau belum mengakui properti yang dikategorikan sebagai investasi. Namun, pada tahun 2023 mulai dicatatkan nilai properti investasi sebesar Rp25,88 miliar, seluruhnya berupa properti investasi dalam bentuk tanah. Pada tahun 2024, nilai properti investasi meningkat menjadi Rp30,49 miliar. Kenaikan ini berasal dari dua sumber utama, yaitu peningkatan nilai properti investasi tanah menjadi Rp28,26 miliar, serta pencatatan baru properti investasi gedung dan bangunan sebesar Rp3,89 miliar. Dari nilai gedung tersebut, telah diperhitungkan akumulasi penyusutan sebesar Rp1,67 miliar, sebagai bentuk pengakuan atas penurunan nilai manfaat ekonomis aset akibat pemakaian dan waktu. Peningkatan ini mencerminkan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen yang mulai menaruh perhatian pada optimalisasi aset tetap untuk mendukung pendapatan jangka panjang serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Dari sisi kewajiban, terjadi fluktuasi yang signifikan. Kewajiban jangka pendek sempat melonjak tajam pada tahun 2023 mencapai Rp107,4 miliar, yang terutama berasal dari utang pihak ketiga lainnya, namun kembali turun drastis pada tahun 2024 menjadi Rp20,4 miliar. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan utang atau telah diselesaikannya kewajiban yang jatuh tempo.

Sementara itu, ekuitas daerah sebagai selisih antara aset dan kewajiban menunjukkan tren yang cenderung meningkat secara konsisten, dari Rp4,05 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,24 triliun pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan kondisi keuangan yang relatif

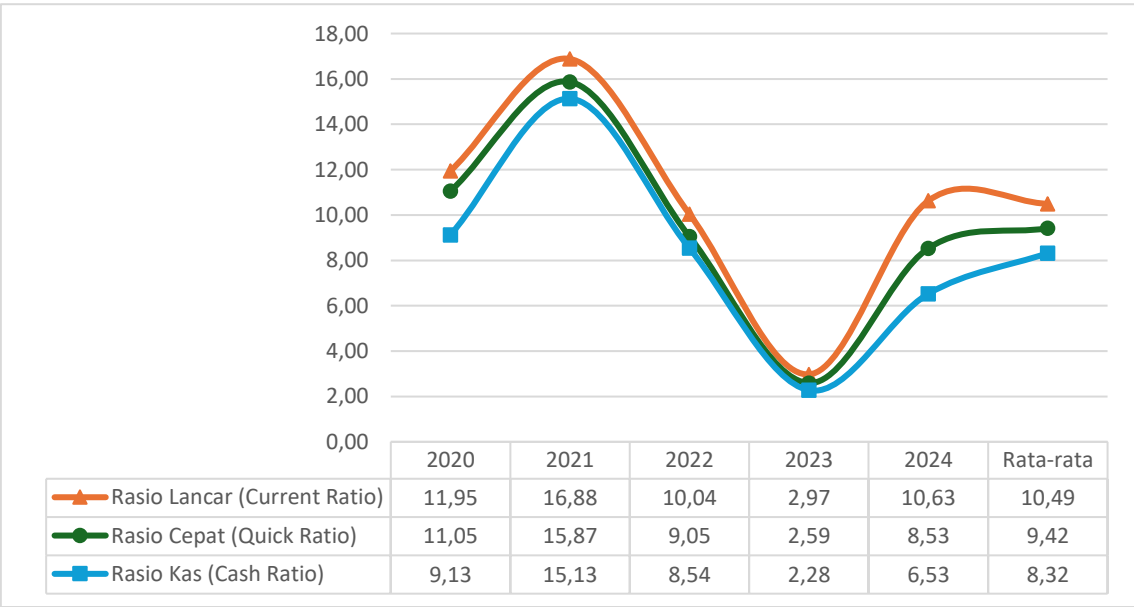
sehat dan kuat, meskipun efisiensi pengelolaan kas dan peningkatan kualitas aset tetap perlu mendapat perhatian.

Secara keseluruhan, Neraca Daerah Kabupaten Sragen menunjukkan adanya pertumbuhan nilai aset yang moderat, penguatan ekuitas, namun diiringi oleh penurunan signifikan dalam kas dan aset lancar. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan dalam perencanaan keuangan jangka menengah, terutama dalam menjaga likuiditas dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan kewajiban daerah.

Analisis neraca juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas dalam mengelola utang, serta efektivitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban lainnya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

1. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah aset pemerintah daerah dapat dikonversi menjadi kas guna membayar kewajiban jangka pendek. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).



Gambar 2. 109 Rasio Likuiditas Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*), dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi signifikan dalam kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas.

Rasio Lancar yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya menunjukkan rata-rata sebesar 10,49, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar 16,88 dan terendah pada tahun 2023 sebesar 2,97. Angka ini masih menunjukkan posisi likuid yang baik secara umum, namun penurunan tajam pada tahun 2023 mengindikasikan potensi tekanan kas atau pengelolaan aset lancar yang kurang optimal di tahun tersebut.

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mempertimbangkan persediaan. Persediaan sering kali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas, sehingga rasio ini lebih mencerminkan kondisi likuiditas yang sebenarnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan. Rasio Cepat, yang mengeliminasi persediaan dari aset lancar untuk menunjukkan likuiditas yang lebih konservatif, menunjukkan pola yang hampir serupa. Rata-rata rasio cepat selama lima tahun adalah 9,42, dengan nilai tertinggi juga terjadi pada

tahun 2021 (15,87) dan terendah pada tahun 2023 (2,59). Penurunan ini menggambarkan bahwa aset likuid (selain persediaan) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mengalami penurunan substansial di tahun tersebut.

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas mengukur sejauh mana kas dan setara kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini memberikan gambaran paling konservatif mengenai likuiditas pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara langsung. Rasio Kas, yang hanya memperhitungkan kas dalam mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek secara langsung, menunjukkan rata-rata sebesar 8,32. Rasio ini juga mengalami penurunan tajam dari 15,13 pada tahun 2021 menjadi hanya 2,28 pada tahun 2023, sebelum sedikit membaik menjadi 6,53 pada tahun 2024. Pola ini memperkuat indikasi bahwa pada tahun 2023 terdapat tekanan signifikan terhadap posisi kas pemerintah daerah.

Secara umum, meskipun rata-rata likuiditas Kabupaten Sragen masih berada dalam kategori sangat sehat, adanya penurunan tajam pada tahun 2023 di seluruh indikator likuiditas perlu menjadi perhatian. Hal ini dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas jangka pendek, yang mungkin bersifat sementara namun memerlukan tindak lanjut kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas keuangan jangka pendek. Upaya penguatan pengelolaan kas, pengendalian belanja, serta optimalisasi penerimaan daerah menjadi strategi penting untuk menjaga rasio likuiditas tetap dalam batas aman.

2. Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset daerah dibiayai oleh utang dan seberapa mampu daerah melunasi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu Rasio Hutang

terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*).



Gambar 2. 110 Rasio Solvabilitas Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Solvabilitas Kabupaten Sragen sangat kuat, ditunjukkan dengan rendahnya beban utang terhadap aset dan modal. Tren penurunan utang menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang berhati-hati dan tidak bergantung pada pinjaman untuk operasional atau investasi.

a. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini mengukur proporsi aset daerah yang didanai oleh utang. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko solvabilitas daerah karena ketergantungan yang tinggi terhadap utang. Nilai 0,012 (atau 1,2 persen) menunjukkan bahwa hanya 1,2 persen dari total aset yang berasal dari utang, yang berarti beban utang daerah relatif sangat kecil.

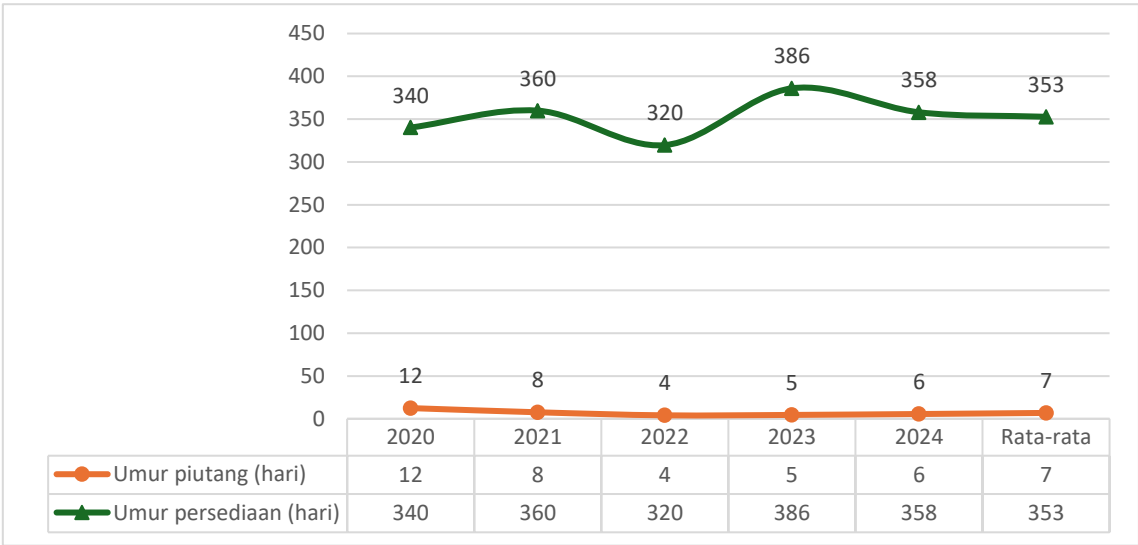
b. Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara sumber pendanaan dari hutang dan sumber internal. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai aktivitasnya. Nilai rata-rata 0,012 (atau 1,2 persen), ini berarti kabupaten memiliki modal yang sangat dominan dibandingkan dengan utangnya, menunjukkan solvabilitas yang sangat baik.

Secara umum, rasio solvabilitas yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen berada dalam posisi keuangan yang relatif aman dan tidak berisiko tinggi terhadap permasalahan likuiditas jangka panjang akibat beban utang. Namun, di sisi lain, rasio ini juga dapat mencerminkan bahwa kapasitas penggunaan pembiayaan utang dalam mendukung pembangunan daerah masih sangat terbatas atau belum dimaksimalkan secara optimal. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan, diperlukan evaluasi mendalam terkait kebijakan pembiayaan agar keseimbangan antara efisiensi fiskal dan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif dapat tercapai secara proporsional.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, khususnya dalam mengelola piutang dan persediaan. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu umur piutang dan umur persediaan.



Gambar 2. 111 Rasio Aktivitas Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data Rasio Aktivitas Kabupaten Sragen Tahun 2020–2024, dapat disampaikan bahwa efektivitas pengelolaan piutang dan persediaan masih menunjukkan pola yang perlu menjadi perhatian, terutama pada aspek persediaan.

a. Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang dari pihak ketiga. Semakin lama umur piutang, semakin besar risiko ketidakmampuan daerah dalam mengkonversi piutang menjadi kas. Umur piutang yang tinggi dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Rata-rata umur piutang selama lima tahun tercatat sebesar 7 hari, dengan kecenderungan menurun dari 12 hari pada tahun 2020 menjadi 4 hari pada 2022, kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 6 hari pada tahun 2024. Penurunan umur piutang ini menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan dan penagihan piutang daerah, yang mencerminkan peningkatan efektivitas pengumpulan penerimaan dari pihak ketiga atau wajib bayar. Semakin pendek umur piutang menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen mampu mengoptimalkan likuiditasnya dengan meminimalisasi piutang tak tertagih atau keterlambatan penerimaan.

b. Umur Persediaan

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menghabiskan persediaan yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Semakin tinggi angka umur persediaan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau penggunaan yang produktif.

Umur persediaan menunjukkan tren yang relatif tinggi dan cenderung meningkat. Rata-rata umur persediaan selama periode 2020–2024 tercatat sebesar 353 hari, dengan umur tertinggi pada tahun 2023 sebesar 386 hari dan terendah pada tahun 2022 sebesar 320 hari. Umur persediaan yang berada di atas 300 hari mengindikasikan bahwa perputaran barang atau persediaan berjalan sangat lambat. Hal ini mencerminkan potensi inefisiensi dalam pengelolaan logistik dan inventaris barang milik daerah, serta dapat menyebabkan peningkatan biaya penyimpanan atau risiko usang dan kadaluarsa pada jenis barang tertentu.

Secara umum, meskipun pengelolaan piutang menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun pengelolaan persediaan masih memerlukan perbaikan agar rotasi barang dapat berlangsung lebih optimal dan tidak membebani keuangan daerah. Diperlukan evaluasi terhadap kebijakan pengadaan barang, kebutuhan operasional, serta sistem distribusi logistik guna meningkatkan efisiensi aktivitas operasional pemerintah daerah.

2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sragen memberikan gambaran mengenai perkiraan pendapatan yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026 hingga 2030. Proyeksi ini didasarkan pada analisis trend dari data historis selama lima tahun terakhir untuk setiap objek pendapatan. Selain itu, proyeksi ini juga mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Sragen, kebijakan terkait pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro setempat, sehingga diharapkan hasil proyeksi tersebut lebih realistis.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Sragen bertujuan memberikan informasi tentang perkiraan jumlah belanja yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026 hingga 2030, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan anggaran keuangan. Proyeksi ini didasarkan pada tren belanja daerah yang dianalisis dari data historis lima tahun terakhir untuk setiap jenis belanja. Selain itu, proyeksi ini juga mempertimbangkan kecenderungan perilaku belanja di Kabupaten Sragen, kebijakan terkait belanja daerah, serta kondisi ekonomi makro setempat.

Proyeksi pembiayaan daerah memberikan informasi mengenai perkiraan jumlah pembiayaan daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2026 hingga 2030. Komposisi pembiayaan daerah ini didasarkan pada realisasi data historis yang mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2020-2024, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2026-2030. Analisis

bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah periode 2026-2030.

Tabel 2. 74 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Sragen Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	468.236.481.059	517.877.212.587	535.853.117.258	554.454.986.696	573.710.779.133	593.649.783.913
1.2	Pendapatan Transfer	1.964.791.749.612	1.886.319.569.674	1.931.361.765.465	1.977.822.864.896	1.979.822.864.896	1.981.822.864.896
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	500.000.000	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	2.433.528.230.671	2.404.196.782.261	2.467.214.882.723	2.532.277.851.592	2.553.533.644.029	2.575.472.648.809
2.	BELANJA						
2.1	Belanja Operasi	1.812.102.344.888	1.817.096.551.037	1.753.462.214.837	1.772.558.413.332	1.847.558.413.332	1.834.701.204.500
2.2	Belanja Modal	240.526.522.306	254.160.231.224	372.812.667.886	403.779.438.260	305.035.230.697	334.831.444.309
2.3	Belanja Tidak Terduga	395.940.529	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	401.689.857.669	390.940.000.000	390.940.000.000	390.940.000.000	440.940.000.000	440.940.000.000
	JUMLAH BELANJA	2.454.714.665.392	2.472.196.782.261	2.527.214.882.723	2.577.277.851.592	2.603.533.644.029	2.620.472.648.809
	SURPLUS/DEFISIT	(21.186.434.721,00)	(68.000.000.000)	(60.000.000.000)	(45.000.000.000)	(50.000.000.000)	(45.000.000.000)
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	244.375.328.713	70.000.000.000	65.000.000.000	50.000.000.000	55.000.000.000	50.000.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	89.902.465.400	2.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	154.472.863.313	68.000.000.000	60.000.000.000	45.000.000.000	50.000.000.000	45.000.000.000

Sumber: diolah dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, 2025

Berdasarkan data proyeksi kerangka pendanaan Kabupaten Sragen untuk tahun 2026 hingga 2030, menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara konsisten merancang struktur pendapatan dan belanja yang relatif seimbang, meskipun tetap terdapat defisit anggaran setiap tahunnya. Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan moderat, dari Rp2,40 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp2,58 triliun pada tahun 2030. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat dari Rp517,88 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp593,65 miliar pada tahun 2030. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar-daerah masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan, meskipun trennya cenderung stagnan, berkisar sekitar Rp1,88 hingga Rp1,98 triliun.

Di sisi belanja, alokasi anggaran juga menunjukkan peningkatan bertahap, dari Rp2,47 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp2,62 triliun pada tahun 2030. Komponen belanja terbesar masih didominasi oleh belanja operasi, yang mencerminkan kebutuhan rutin dan pelayanan dasar pemerintah daerah. Belanja modal sempat mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2028, namun kembali mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Adapun belanja tidak terduga dan belanja transfer dipertahankan secara stabil sepanjang periode proyeksi.

Seluruh proyeksi menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen akan mengalami defisit anggaran tahunan berkisar antara Rp45 miliar hingga Rp68 miliar. Namun demikian, defisit tersebut sepenuhnya dapat ditutup melalui pembiayaan netto yang dirancang seimbang dengan kebutuhan defisit setiap tahun. Dengan demikian, proyeksi kerangka pendanaan ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang berhati-hati dan terukur, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.

2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan memiliki peran penting dalam perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah. Adanya estimasi pendapatan yang akurat, pemerintah dapat menyusun rencana pengeluaran secara lebih efektif, memastikan anggaran yang disusun realistis, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya sesuai dengan prioritas

pembangunan dan program yang direncanakan. Selain itu, proyeksi pendapatan juga berfungsi sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas fiskal serta menghindari potensi defisit anggaran. Keakuratan proyeksi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi risiko keuangan di masa depan dan mengambil langkah-langkah preventif guna memitigasi dampak negatifnya.

Dalam menyusun proyeksi pendapatan, pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tren historis penerimaan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pencapaian dan pertumbuhan pendapatan, kondisi ekonomi makro, serta kebijakan dan strategi pendapatan daerah yang akan diterapkan. Berdasarkan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, proyeksi yang dihasilkan diharapkan lebih realistis dan dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan fiskal. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 75 Proyeksi Pendapatan Daerah 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	468.236.481.059	517.877.212.587	535.853.117.258	554.454.986.696	573.710.779.133	593.649.783.913
1.1.1	Pajak Daerah	158.035.982.944	205.852.500.000	216.145.125.000	226.952.381.250	238.300.000.313	250.215.000.328
1.1.2	Retribusi Daerah	128.699.110.179	268.315.124.455	273.681.426.944	279.155.055.483	284.738.156.592	290.432.919.724
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.999.447.505	33.690.921.080	35.807.524.921	37.924.128.762	40.040.732.603	42.157.336.444
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	149.501.940.431	10.018.667.052	10.219.040.393	10.423.421.201	10.631.889.625	10.844.527.417
1.2	Pendapatan Transfer	1.964.791.749.612	1.886.319.569.674	1.931.361.765.465	1.977.822.864.896	1.979.822.864.896	1.981.822.864.896
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.755.264.049.216	1.763.968.149.000	1.807.361.765.465	1.851.822.864.896	1.851.822.864.896	1.851.822.864.896
1.2.2	Transfer antar – daerah	209.527.700.396	122.351.420.674	124.000.000.000	126.000.000.000	128.000.000.000	130.000.000.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	500.000.000	0	0	0	0	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	-					
1.3.1	Dana Darurat	500.000.000					
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-					
	JUMLAH PENDAPATAN	2.433.528.230.671	2.404.196.782.261	2.467.214.882.723	2.532.277.851.592	2.553.533.644.029	2.575.472.648.809

Sumber: diolah dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, 2025

Berdasarkan data proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sragen untuk periode 2026 hingga 2030, total pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil meskipun mengalami sedikit penurunan pada awal periode. Pada tahun 2024, total pendapatan daerah berada pada angka sebesar Rp2,43 triliun, kemudian diproyeksikan menurun menjadi Rp2,40 triliun pada tahun 2026. Namun, setelah itu pendapatan daerah kembali menunjukkan peningkatan secara bertahap hingga mencapai Rp2,58 triliun pada tahun 2030.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren pertumbuhan positif yang cukup signifikan. Dari Rp468,24 miliar pada tahun 2024, PAD diproyeksikan meningkat menjadi Rp593,65 miliar pada tahun 2030. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan pada komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah mengalami lonjakan dari Rp158,03 miliar menjadi Rp250,21 miliar dalam periode lima tahun, sementara retribusi daerah naik dari Rp128,70 miliar menjadi Rp290,43 miliar. Di sisi lain, komponen lain-lain PAD yang sah justru mengalami penurunan drastis dari Rp149,50 miliar menjadi sekitar Rp10,84 miliar pada akhir periode, yang menunjukkan adanya pergeseran sumber dominan PAD ke sektor yang lebih terukur dan potensial seperti pajak dan retribusi.

Sementara itu, Pendapatan Transfer yang merupakan kontributor terbesar terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan cenderung stagnan. Nilainya justru menurun dari Rp1,96 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,89 triliun pada tahun 2026, lalu perlahan meningkat hingga mencapai Rp1,98 triliun pada tahun 2030. Sebagian besar transfer masih berasal dari pemerintah pusat, dengan nilai yang cenderung konstan, sedangkan transfer antar daerah justru menunjukkan tren penurunan dari Rp209,52 miliar menjadi Rp130 miliar dalam lima tahun.

Adapun komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang sebelumnya memberikan kontribusi sebesar Rp500 juta pada tahun 2024, tidak lagi diproyeksikan memberikan kontribusi sejak tahun 2026 hingga 2030. Hal ini menandakan bahwa sumber pendapatan ini bersifat tidak berulang (*non-recurring*) dan sangat terbatas.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan daerah Kabupaten Sragen dalam lima tahun ke depan menunjukkan arah kebijakan fiskal yang mengarah pada peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan PAD, khususnya melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, perlu diwaspadai kecenderungan stagnasi pada pendapatan transfer dan menurunnya transfer antar daerah, yang dapat menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pendanaan pembangunan daerah secara jangka panjang.

Dalam rangka mewujudkan proyeksi pertumbuhan pendapatan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Sragen perlu mengambil langkah-langkah konkret dan terukur. Oleh karena itu, untuk mencapai target proyeksi pendapatan tersebut diperlukan kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sragen di masa mendatang diarahkan pada:

1. Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak, termasuk kewajiban Kabupaten/Kota dalam pendataan, sosialisasi, penanganan tunggakan, serta alokasi anggaran dari opsen pajak.
2. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui peningkatan efisiensi pemungutan, perbaikan sistem pendataan dan penggalian potensi, sosialisasi kepada wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan dari retribusi, seperti retribusi pasar dan parkir tepi jalan umum dengan penyesuaian tarif secara berkala.
3. Peningkatan manajemen aset daerah melalui inventarisasi aset, pemanfaatan optimal, serta pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan baru, misalnya melalui penyewaan atau pengembangan aset strategis.
4. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal

dengan mendorong efisiensi, peningkatan layanan, serta eksplorasi peluang bisnis baru.

5. Diversifikasi sumber pendapatan dengan mengembangkan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, melalui promosi destinasi wisata, penyelenggaraan event lokal, serta pengembangan produk unggulan daerah.
6. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif pajak, serta pembangunan infrastruktur pendukung guna menarik investor.
7. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan data secara lebih efisien dan transparan.
8. Peningkatan sinergi dengan perusahaan swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih terstruktur, termasuk kontribusi dalam bentuk dana hibah atau penyediaan infrastruktur publik.
9. Kerja sama dengan sektor swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan layanan publik.
10. Pengembangan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan pajak serta retribusi daerah melalui evaluasi dan penyusunan kebijakan yang lebih adaptif. Kesepuluh, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi daerah.
11. Promosi dan pengembangan sektor pariwisata dengan meningkatkan promosi destinasi lokal serta penyelenggaraan acara atau festival untuk menarik wisatawan guna memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah.

Melalui berbagai strategi tersebut, diharapkan Kabupaten Sragen dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mengoptimalkan

sumber-sumber pendapatan guna mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.5.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk berbagai tujuan yang esensial dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi belanja membantu pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran tahunan dengan mengestimasi kebutuhan pengeluaran. Ini memastikan bahwa dana yang tersedia dialokasikan secara efektif dan efisien. Melalui proyeksi belanja yang akurat, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Proyeksi belanja memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran, mencegah pemborosan, dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Sementara itu, Efisiensi belanja daerah sangat penting untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara optimal demi meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 76 Proyeksi Belanja Daerah 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.	BELANJA						
2.1	Belanja Operasi	1.812.102.344.888	1.817.096.551.037	1.753.462.214.837	1.772.558.413.332	1.847.558.413.332	1.834.701.204.500
2.1.1	Belanja Pegawai	1.125.816.588.799	1.181.981.033.013	1.093.043.359.894	1.102.139.558.389	1.107.139.558.389	1.129.282.349.557
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	563.699.102.346	540.000.000.000	550.000.000.000	560.000.000.000	560.000.000.000	590.000.000.000
2.1.3	Belanja Bunga	2.356.503.080	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	999.880.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2.1.5	Belanja Hibah	106.108.270.663	60.441.710.000	75.745.046.919	75.745.046.919	145.745.046.919	75.745.046.919
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	13.122.000.000	33.673.808.024	33.673.808.024	33.673.808.024	33.673.808.024	38.673.808.024
2.2	Belanja Modal	240.526.522.306	254.160.231.224	372.812.667.886	403.779.438.260	305.035.230.697	334.831.444.309
2.2.1	Tanah	0	0	10.000.000.000	0	12.000.000.000	0
2.2.2	Peralatan dan Mesin	61.561.336.908	61.778.622.938	64.778.622.938	77.778.622.938	60.778.622.938	73.778.622.938
2.2.3	Gedung dan Bangunan	85.611.180.448	61.059.481.494	96.437.828.952	94.437.828.952	85.667.055.831	78.634.337.762
2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.354.432.100	125.000.000.000	195.000.000.000	224.692.681.170	139.445.157.524	175.000.000.000
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	4.566.355.350	5.685.700.350	5.890.864.264	6.096.028.178	6.301.192.092	6.506.356.007
2.2.6	Aset Lainnya	433.217.500	636.426.442	705.351.732	774.277.022	843.202.312	912.127.602
2.3	Belanja Tidak Terduga	395.940.529	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	395.940.529	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	401.689.857.669	390.940.000.000	390.940.000.000	390.940.000.000	440.940.000.000	440.940.000.000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.380.584.000	10.940.000.000	10.940.000.000	10.940.000.000	10.940.000.000	10.940.000.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	398.309.273.669	380.000.000.000	380.000.000.000	380.000.000.000	430.000.000.000	430.000.000.000
	JUMLAH BELANJA	2.454.714.665.392	2.472.196.782.261	2.527.214.882.723	2.577.277.851.592	2.603.533.644.029	2.620.472.648.809

Sumber: diolah dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, 2025

Berdasarkan data proyeksi belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2026 hingga 2030, terdapat tren peningkatan nominal belanja dari tahun ke tahun, meskipun tidak signifikan dalam setiap tahunnya. Total belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Rp2,472 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp2,620 triliun pada tahun 2030. Kenaikan ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah, dengan proporsi di atas 70 persen dari total belanja setiap tahunnya. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi, belanja operasi menunjukkan kecenderungan stabil, dengan peningkatan dari Rp1,817 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,834 triliun pada tahun 2030. Komponen terbesar dari belanja operasi adalah belanja pegawai yang terus mendominasi, mencerminkan kebutuhan akan pembiayaan gaji dan tunjangan ASN yang stabil, yang naik dari Rp1,181 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,129 triliun pada tahun 2030. Meskipun terdapat sedikit penurunan nominal di tengah periode, tren umumnya menunjukkan stabilitas.

Belanja modal menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis, mencerminkan pola investasi fisik daerah yang menyesuaikan dengan prioritas pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2026, belanja modal diproyeksikan sebesar Rp254 miliar, meningkat menjadi Rp403 miliar pada tahun 2028, sebelum menurun menjadi Rp305 miliar pada 2029, dan naik kembali menjadi Rp334 miliar pada tahun 2030. Peningkatan pada tahun 2028 mencerminkan adanya proyek-proyek pembangunan besar seperti jalan, irigasi, dan jaringan yang memerlukan alokasi anggaran yang lebih tinggi.

Belanja tidak terduga ditetapkan sebesar Rp10 miliar setiap tahun dari 2026 hingga 2030, menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menyiapkan dana kontingensi untuk kondisi darurat. Sementara itu, belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan bantuan keuangan juga menunjukkan tren stabil dengan proyeksi meningkat dari Rp390 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp440 miliar pada tahun 2030.

Hal ini mencerminkan peran strategis Kabupaten Sragen dalam mendukung pendanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan desa.

Secara keseluruhan, proyeksi belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2026–2030 menunjukkan kecenderungan fiskal yang terkendali dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan proyeksi belanja daerah yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Sragen perlu menetapkan kebijakan pengelolaan belanja yang konkret, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan. Kebijakan belanja daerah untuk periode 2026–2030 diarahkan pada sejumlah prinsip utama sebagai berikut.

- a. Perencanaan keuangan berpedoman pada prinsip efisiensi dalam penganggaran program dan kegiatan serta sinkronisasi dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- b. Penganggaran harus memperhatikan kemampuan fiskal, terutama pada belanja wajib dan mengikat serta perkiraan defisit/SILPA merujuk pada Peraturan Menteri keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- c. Penganggaran belanja yang bersifat *mandatory* mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan dilakukan pembaruan jika terjadi perubahan regulasi.
- d. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) perlu diterapkan agar setiap alokasi belanja menghasilkan output yang jelas dan terukur. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memprioritaskan program dan kegiatan yang memiliki dampak nyata serta signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
- e. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dengan mengoptimalkan struktur organisasi serta meningkatkan kinerja aparatur.
- f. Penguatan fungsi pengawasan internal melalui peningkatan peran inspektorat daerah perlu dilakukan guna mencegah penyalahgunaan anggaran dan inefisiensi. Selain itu, transparansi

dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus diterapkan dengan cara mempublikasikan laporan keuangan secara berkala agar dapat diakses oleh masyarakat.

- g. Penggunaan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Evaluasi dan penyesuaian kontrak juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian harga serta kualitas barang dan jasa yang diperoleh oleh pemerintah daerah.
- h. Inventarisasi dan penataan aset secara berkala dapat membantu mengidentifikasi aset yang kurang produktif atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset, seperti bangunan, lahan, dan fasilitas lainnya, untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.
- i. Pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan hemat energi dan sumber daya dalam operasional pemerintahan, seperti pengelolaan listrik, air, dan bahan bakar secara lebih efisien. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses administrasi serta mengurangi biaya operasional yang tidak perlu.
- j. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintah daerah perlu dilakukan guna meningkatkan keterampilan dan efektivitas dalam menjalankan tugas. Selain itu, penerapan sistem manajemen kinerja yang objektif dapat mendorong peningkatan produktivitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah.
- k. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar program dan kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi mereka. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan oleh masyarakat juga diperlukan untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal dan transparan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat membelanjakan secara efektif dan efisien secara signifikan, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

2.5.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Proyeksi ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran tahunan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, baik untuk menutup defisit anggaran maupun untuk mendanai proyek-proyek strategis. Melalui proyeksi pembiayaan, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengelola utang secara lebih efisien, termasuk dalam menentukan jumlah pinjaman yang diperlukan serta jadwal pelunasan utangnya. Selain itu, proyeksi pembiayaan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko keuangan yang mungkin timbul, seperti risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Dengan proyeksi yang akurat, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa sumber pembiayaan yang digunakan tidak menimbulkan beban yang berlebihan terhadap anggaran di masa mendatang.

Pertimbangan utama dalam penyusunan proyeksi pembiayaan daerah didasarkan pada analisis tren data historis dari tahun 2020 hingga 2024 untuk setiap objek pembiayaan. Di samping itu, proyeksi juga disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro, kebijakan penyelesaian kewajiban daerah, kebijakan efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan daerah, serta kewajiban kepada pihak ketiga yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, termasuk kebijakan defisit anggaran. Melalui pendekatan tersebut, proyeksi pembiayaan diharapkan lebih realistis dan akuntabel. Adapun proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 77 Proyeksi Pembiayaan Daerah 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	244.375.328.713	70.000.000.000	65.000.000.000	50.000.000.000	55.000.000.000	50.000.000.000
3.1.1	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	244.375.328.713	70.000.000.000	65.000.000.000	50.000.000.000	55.000.000.000	50.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	89.902.465.400	2.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3.1.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	86.902.465.400					
3.1.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3.1.3	Pembentukan Dana Cadangan	0					
	PEMBIAYAAN NETTO	154.472.863.313	68.000.000.000	60.000.000.000	45.000.000.000	50.000.000.000	45.000.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	133.286.428.592					

Sumber: diolah dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, 2025

Berdasarkan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026 hingga 2030, terlihat adanya tren penurunan pada komponen penerimaan pembiayaan. Pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan mencapai Rp244,38 miliar, yang seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Namun, pada tahun 2026 hingga 2030, nilai penerimaan ini diproyeksikan menurun secara bertahap, dari Rp70 miliar pada 2026 menjadi Rp50 miliar pada 2028 dan 2030. Penurunan ini mencerminkan kemungkinan berkurangnya akumulasi surplus anggaran sebelumnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan di masa mendatang.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan yang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp89,90 miliar—sebagian besar digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo—menurun drastis mulai tahun 2026 menjadi hanya Rp2 miliar hingga Rp5 miliar per tahun. Dalam proyeksi tahun 2026–2030, pengeluaran ini seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, yang menunjukkan pergeseran fokus dari kewajiban pembayaran utang menuju penguatan aset dan investasi produktif.

Pertimbangan terhadap kedua komponen tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan netto Kabupaten Sragen diproyeksikan mengalami penurunan dari Rp68 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp45 miliar pada tahun 2028 dan 2030. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan pembiayaan dengan kondisi keuangan yang lebih terkendali. Tidak adanya nilai proyeksi untuk SiLPA setelah tahun 2024 mencerminkan pendekatan perencanaan anggaran yang lebih konservatif, dengan asumsi bahwa seluruh pembiayaan akan terserap sesuai kebutuhan dan tidak menyisakan kelebihan anggaran di akhir tahun.

Secara keseluruhan, proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Sragen menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih disiplin dan efisien, dengan orientasi pada pembiayaan yang berkelanjutan dan penguatan struktur ekonomi daerah melalui penyertaan modal. Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan daerah ke depan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada.

- a. Diversifikasi Sumber Pembiayaan. Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan alternatif pendanaan melalui sumber non-pemerintah. Merujuk pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dimungkinkan pendanaan inovatif melalui sinergi pendanaan dan pembiayaan utang daerah seperti pinjaman, obligasi, dan sukuk daerah. Skema pendanaan meliputi hibah, pinjaman daerah, KPBU, BUMD, BLUD, CSR, filantropi, ziswaf, dan lainnya untuk membiayai proyek-proyek strategis, dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal dan kemampuan bayar. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai dan mengelola proyek-proyek infrastruktur serta pelayanan publik secara lebih efisien.
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah. Inventarisasi dan penilaian aset daerah secara berkala menjadi langkah penting dalam mengetahui nilai dan potensi aset yang dimiliki. Pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui skema penyewaan, kerja sama pengelolaan, atau penjualan aset yang tidak produktif agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan daerah.
- c. Efisiensi dan Pengendalian Pengeluaran. Pemerintah daerah harus menerapkan disiplin anggaran dan pengendalian belanja guna memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunan. Selain itu, praktik penghematan energi dan sumber daya perlu diterapkan untuk mengurangi biaya operasional pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
- d. Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keuangan daerah, penerapan kebijakan fiskal yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Penyusunan Perencanaan Fiskal Jangka Menengah (PFJM) dapat membantu memastikan keberlanjutan fiskal dengan

menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membangun cadangan dana darurat guna menghadapi situasi krisis atau keadaan darurat yang memerlukan pembiayaan mendesak.

Melalui penerapan kebijakan pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.5.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama tahun 2026-2030. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sragen tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 78 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	2.433.528.230.671	2.404.196.782.261	2.467.214.882.723	2.532.277.851.592	2.553.533.644.029	2.575.472.648.809
2	Penerimaan Pembiayaan	244.375.328.713	70.000.000.000	65.000.000.000	50.000.000.000	55.000.000.000	50.000.000.000
	Total Penerimaan	2.677.903.559.384	2.474.196.782.261	2.532.214.882.723	2.582.277.851.592	2.608.533.644.029	2.625.472.648.809
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	2.677.903.559.384	2.474.196.782.261	2.532.214.882.723	2.582.277.851.592	2.608.533.644.029	2.625.472.648.809
3	PRIORITAS I (70 %)		1.731.937.747.583	1.772.550.417.906	1.807.594.496.114	1.825.973.550.820	1.837.830.854.166
	a. Belanja pegawai		1.181.981.033.013	1.093.043.359.894	1.102.139.558.389	1.107.139.558.389	1.129.282.349.557
	b. Pengeluaran Pembiayaan		2.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	c. Belanja wajib dan mengikat lainnya		547.956.714.570	674.507.058.012	700.454.937.725	713.833.992.431	703.548.504.609
4	PRIORITAS II (20 %)		494.839.356.452	506.442.976.545	516.455.570.318	521.706.728.806	525.094.529.762
5	PRIORITAS III (10 %)		247.419.678.226	253.221.488.272	258.227.785.159	260.853.364.403	262.547.264.881

Sumber: diolah dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, 2025

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sragen selama periode 2026–2030 menunjukkan kecenderungan peningkatan secara bertahap. Total kapasitas riil yang merupakan penjumlahan antara pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp2,47 triliun pada tahun 2026 dan meningkat menjadi Rp2,63 triliun pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan adanya optimisme terhadap kemampuan fiskal daerah dalam mengelola sumber daya keuangan, baik dari pendapatan asli daerah, transfer pusat, maupun pembiayaan. Dalam perencanaan pengeluaran, kapasitas keuangan daerah dibagi ke dalam tiga kelompok prioritas.

1. Prioritas I, memperoleh alokasi terbesar yaitu 70 persen dari kapasitas riil. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, dengan fokus untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan. Nilainya meningkat dari sekitar Rp1,73 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,84 triliun pada tahun 2030. Di dalamnya, belanja pegawai tetap mendominasi dengan tren kenaikan dari Rp1,18 triliun menjadi Rp1,13 triliun pada akhir periode, walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2027.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Adapun Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mencakup:
 - a. Alokasi dana bagi keagamaan, olahraga dan pengembangan budaya.
 - b. Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, adaptif, inovatif dan dinamis.
 - c. Pendidikan dan kesehatan universal.
 - d. Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat rentan, tenaga pendidik sekolah, pendidik agama, pendidik pesantren dan pengelola tempat ibadah.
 - e. Revitalisasi pusat perekonomian.
 - f. Sragen berdikari pangan.

g. Sragen *Super Regency*.

h. *Super Village*.

Program-program prioritas tersebut pada dasarnya beririsan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar dan belanja wajib (*mandatory spending*) yang dialokasikan dalam kelompok Prioritas I (70% dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah)

3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan kapasitas keuangan Kabupaten Sragen mencerminkan perencanaan fiskal yang relatif konservatif namun tetap progresif, dengan penekanan utama pada stabilitas belanja wajib dan kesinambungan pembangunan daerah secara berimbang. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran agar pertumbuhan fiskal yang positif ini dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan melalui analisis seluruh urusan pemerintahan berdasarkan capaian kinerja maupun hasil diskusi kelompok terfokus dengan seluruh Perangkat Daerah. Selanjutnya dilakukan pemetaan permasalahan dengan menyusun pohon masalah yang terdiri dari masalah pokok, masalah, dan akar masalah, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis.

Tabel 2. 79 Pemetaan permasalahan pembangunan lintas sektor

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlunya Transformasi Sosial	Kualitas Sumber Daya Manusia	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah masih relatif rendah	masih rendahnya angka partisipasi sekolah akibat masih adanya ATS
			Belum meratanya layanan pendidikan dasar
			Aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas masih belum optimal
			Rendahnya numerasi dan literasi jenjang SD dan SMP
			Masih kurangnya pemenuhan jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
			masih kurangnya akses pendidikan mulai dari jenjang PAUD sampai pendidikan menengah
		Belum optimalnya derajat Kesehatan masyarakat	tingginya angka kematian ibu dan bayi
			masih tingginya prevalensi stunting
			meningkatnya angka kesakitan terutama akibat penyakit tidak menular
			kurangnya PHBS
			belum optimalnya sanitasi Aman
	Kemiskinan dan Pengangguran	Sebaran penduduk belum merata	pusat-pusat kegiatan penduduk masih teraglomerasi di satu titik tertentu
		Angka kemiskinan masih tinggi	belum optimalnya kegiatan ekonomi penduduk
			adanya budaya & pola pikir penduduk miskin yang kurang tepat
		Pendapatan perkapita masyarakat masih relatif rendah	banyaknya penduduk bekerja sebagai Buruh Petani
			masih adanya angka pengangguran
			angkatan kerja berpendidikan rendah
Transformasi Ekonomi	Kemandirian Ekonomi	Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan	rendahnya nilai tambah sektor pertanian
			Belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, modernisasi pertanian, integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian, pengelolaan pertanian.
			Belum optimalnya kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu menghasilkan produk nilai tambah tinggi, pengembangan industri
			Belum optimalnya standarisasi produk unggulan daerah, kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan, iklim

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kemitraan pasar produk unggulan daerah, serta sistem distribusi produk perdagangan.
			Belum optimalnya kualitas produk unggulan UMKM, akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan, inovasi, standar produk, dan manajemen usaha, digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM, kapasitas dan kompetensi pelaku, pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, serta kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.
			Belum optimalnya promosi pariwisata, kondisi destinasi wisata termasuk kondisi sarana prasarana destinasi wisata, diversifikasi daya tarik pariwisata, infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, integrasi antar destinasi wisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah.
		Belum optimalnya kemandirian desa	Pendapatan perkapita masyarakat masih relatif rendah
			peran lembaga ekonomi desa belum berkontribusi optimal dalam pembangunan ekonomi masyarakat
		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan relatif tinggi	kandungan gizi dan nutrisi pangan yang dikonsumsi tidak ideal
		Iklim investasi yang baik belum optimal	belum meratanya ketersediaan infrastruktur pendukung
			minimnya insentif dan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah kepada investor
			belum optimalnya promosi dan sosialisasi mengenai potensi daerah
	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, IPLT, sanitasi layak dan air minum belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat
			Belum adanya keselarasan pembangunan infrastruktur daerah dengan kelestarian lingkungan
			belum semua wilayah memiliki akses jalan yang baik untuk menghubungkan ke pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, termasuk wilayah pedesaan
		Masih adanya rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh perkotaan	karena kondisi kemiskinan dan sebaran penduduk yang belum merata

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Adanya beberapa titik kemacetan	rendahnya kapasitas jalan terutama di wilayah perkotaan
Transformasi Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja masih relatif rendah	belum optimalnya kualitas perencanaan dalam mendorong capaian akuntabilitas kinerja
			belum optimalnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan
		Kemampuan keuangan daerah masih relatif rendah	potensi pendapatan belum dikelola secara optimal
		Penerapan Sistem Merit belum optimal	pelaksanaan manajemen kinerja ASN berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi kinerja belum dilaksanakan secara optimal
		Pemanfaatan statistik sektoral dalam pembangunan belum optimal	penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan dengan baik
			ketersediaan data valid dan <i>up to date</i> dalam sistem satu data belum dilaksanakan secara baik
		Digitalisasi dan Keamanan informasi belum dilakukan secara maksimal	kelemahan infrastruktur teknologi digital dalam merespon peningkatan ancaman kejahatan siber
Kerangka Implementasi transformasi	Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Belum Optimalnya Pengurangan Risiko Bencana		upaya pemenuhan layanan pemerintahan secara cepat dan efisien untuk merespon disrupsi teknologi
		Perubahan siklus hidrologi dan masih tingginya indeks resiko bencana	perubahan pola curah hujan dan tidak terprediksinya musim
			penurunan cadangan air tanah
			Masih rendahnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
		Rendahnya kualitas tutupan lahan dan kualitas air	pola penggunaan lahan
			terjadinya pencemaran sumber air
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan	meningkatnya aktivitas penduduk
			pengelolaan sampah masih belum dilakukan secara optimal

2.6.2 Isu Strategis

2.6.2.1 Penelaahan Isu Global

1. Perubahan Iklim

Peningkatan suhu udara di bumi telah mengancam keberlangsungan makhluk hidup. Sampai pada tahun 2022 kenaikan suhu di bumi sebesar 0,89 *derajat celcius* dibandingkan dengan suhu tahun 1900 (NOAA, 2023). Suhu di bumi akan terus mengalami kenaikan hingga diperkirakan melampaui 1,5 derajat celcius pada tahun 2100. Kenaikan suhu bumi ini diakibatkan oleh peningkatan GRK yang signifikan hingga menyebabkan menipisnya lapisan atmosfer karena berbagai aktivitas kegiatan manusia. Kenaikan GRK menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kenaikan permukaan air laut sebesar 0,7-0,9 cm/tahun. Perubahan iklim ini berakibat pada terjadinya kerugian ekonomi yang cukup signifikan di beberapa sektor seperti sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan.

Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat jika tidak mengubah paradigma pembangunan. Mayoritas pembangunan dan aktivitas perekonomian saat ini masih bertumpu pada energi fosil, bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam, serta penanganan polusi dan limbah yang tidak memadai. Jika hal ini terus dilakukan akan berakibat pada peningkatan emisi GRK bahkan sampai dua kali lipat pada tahun 2045 mencapai 2,27 GtCO₂e. Pemimpin dunia termasuk Indonesia telah bersepakat untuk menanggulangi perubahan iklim dunia ini melalui penandatanganan Perjanjian Paris pada tahun 2016. *Paris Agreement* merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim. Konvensi ini berlaku mulai dari 4 November 2016. Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk menjaga peningkatan suhu rata-rata global agar tetap terkendali. Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu di atas tingkat pra-industrialisasi.

Selain itu, persetujuan paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim yang

selanjutnya disebut persetujuan Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim. Implementasi perjanjian Paris memerlukan transformasi ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian Paris ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Perjanjian Paris memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau *nationally determined contributions*. Kontribusi penurunan tersebut harus meningkat setiap periode, dan negara berkembang perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan ambisi tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan perjanjian Paris, kontribusi nasional yang ditetapkan oleh Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. NDC Indonesia perlu ditingkatkan secara berkala. Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen jika ada kerja sama internasional pada tahun 2030. Target tersebut akan dicapai melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri, dan penggunaan produk, serta pertanian. Terdapat 5 komponen utama dalam konsep implementasi NDC, yaitu Mitigasi, Adaptasi serta *Lost & Damage, Means of Implementation* (Pendanaan, Teknologi, *Capacity Building*), *Measurement-Reporting-Verification* Gas Rumah Kaca (MRV GRK), dan *Transparency Framework*.

2. Krisis Air, Pangan, dan Energi

Krisis pangan merupakan kondisi kelangkaan pangan yang dialami oleh masyarakat di suatu wilayah. Penyebab terjadinya krisis pangan adalah kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, deforestasi, serta konflik sosial dan perang. FAO menjelaskan bahwa krisis pangan mengakibatkan kondisi bahaya pangan akut dan malnutrisi yang meningkat secara tajam serta

berdampak mulai dari skala regional, nasional, dan global. FAO dan WFP telah mengidentifikasi penyebab ancaman terjadinya krisis pangan global, diantaranya: 1) Pandemi Covid-19; 2) Perubahan iklim dan perlambatan produksi pangan; 3) Perang antara Rusia dan Ukraina. Perang tersebut berakibat pada terganggunya rantai pasok perdagangan dunia antara lain: 1) Berkurangnya pasokan energi dunia, Rusia merupakan supplier utama minyak dan gas, dimana jalur distribusi gas dari Rusia ke Eropa melewati Ukraina; dan 2) Rusia dan Ukraina merupakan pemasok utama bahan pangan global seperti bunga matahari, gandum, dan jagung. Terjadinya penurunan produksi pangan akibat perang antara Rusia dan Ukraina ini akan berdampak pada kenaikan harga pangan, kenaikan biaya produksi pangan, serta terganggunya distribusi pangan serta keseimbangan ekspor dan impor.

Ancaman krisis pangan global ini harus segera diantisipasi dan ditanggulangi. Salah satu strategi utama untuk menghadapi krisis pangan adalah perwujudan ketahanan pangan. Forum pertemuan pemimpin negara G20 pada tahun 2022 juga memberikan perhatian terhadap ancaman krisis dan kerawanan pangan global ini. Salah satu poin deklarasi G20 ini adalah komitmen untuk mengambil tindakan mendesak untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kelaparan dan malnutrisi, khususnya mengatasi kerentanan negara-negara berkembang dengan percepatan transformasi pertanian yang berkelanjutan dan tangguh serta sistem pangan dan rantai pasokan. Dalam upaya mengatasi krisis dan kerawanan pangan tersebut, berbagai negara G20 telah bersepakat untuk berkomitmen menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi, keuangan, dan risiko kerawanan pangan. Negara-negara G20 telah bersiap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat terkait ketahanan pangan dan gizi dengan bekerja sama dan menghasilkan berbagai inisiatif penanggulangan risiko kerawanan pangan.

Beberapa inisiatif global telah dikeluarkan oleh berbagai organisasi baik di level regional maupun internasional. Selain itu, terdapat beberapa inisiatif mandiri dari berbagai negara anggota G20 untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan. Berbagai inisiatif tersebut diantaranya: 1) *UN Global Crisis Response Group* (GCRG); 2) *The G7 Global Alliance for Food Security* (GAFS); 3) *The Global Agriculture and*

Food Security Program (GASFSP); 4) *International Finance Institutions Action Plan*; dan 5) *Global Development Initiative*. Bank Dunia juga telah berkomitmen untuk menyediakan 30 juta USD dalam pendanaan proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan. FAO memberikan komitmennya dengan perbaikan sistem informasi distribusi dan pemasaran melalui *G20 Agricultural Market Information System*. Presiden Indonesia mengambil beberapa strategi untuk berkontribusi dalam penanggulangan ancaman krisis dan kerawanan pangan global. Beberapa langkah strategis tersebut dengan meningkatkan kapasitas produksi guna menstabilkan harga pangan, menekan laju inflasi, menurunkan impor dan meningkatkan ekspor pangan. Indonesia menerapkan strategi ini pada beberapa komoditas pangan strategis melalui sistem agribisnis pangan agar tercapai efisiensi serta peningkatan daya saing.

3. Perkembangan Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di beberapa bidang seperti komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Kemajuan di bidang teknologi informasi menciptakan berbagai kemudahan pertukaran dan lalu lintas arus informasi lebih cepat dan transparan, membuat dunia tanpa batas. Pertukaran informasi dimungkinkan dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai media cetak maupun elektronika. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan saat ini, telah menjadi sebuah kekuatan otonom yang justru ‘membelenggu’ perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dengan daya pengaruhnya yang sangat besar, karena ditopang pula oleh sistem-sistem sosial yang kuat, dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi telah menjadi pengarah hidup manusia.

Perkembangan teknologi membawa masuk ke era revolusi industri generasi keempat. Revolusi Industri Generasi ke 4 ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, *editing* genetik dan perkembangan *neuroteknologi* yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Pada revolusi industri keempat, semua mesin dihubungkan melalui sistem internet atau dikenal dengan *cyber*. Tantangan revolusi industri generasi ke 4 adalah menuntut kepekaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

untuk adaptif. Era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Tren perkembangan teknologi, preferensi konsumen, regulasi dan pergeseran lingkungan bisnis mengatur pola usaha. Perubahan lingkungan secara teknologi maupun dari sisi ekonomis, berdampak pada kinerja keuangan dan kelangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Dunia usaha berpotensi mengurangi beberapa aktivitas bisnis sehingga berdampak pada pengangguran. Revolusi teknologi akan dapat memperbaiki kualitas hidup. Pada saat yang sama, revolusi ini juga destruktif termasuk terhadap pekerja. Contoh digital teknologi memberikan peluang bagi bisnis, masyarakat, dan bagi pemerintah, tapi juga ada ancaman kalau tidak bisa mengontrolnya, terutama yang terkait masalah kecakapan pekerja, karena potensial memperdalam kesenjangan dan penyalahgunaan informasi. Era revolusi industri generasi 4 yang serba cepat menuntut pemerintah juga harus siap dengan perubahan ekspektasi konsumen yang harus diimbangi dengan inovasi, perbaikan produk, dan jasa. Antisipasi dari pemerintah adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

Perkembangan teknologi, keamanan siber, dan isu privasi data akan terus memerlukan perhatian global, terutama dengan peningkatan penggunaan teknologi canggih. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital dalam berbagai sektor akan memunculkan tantangan baru terkait etika, regulasi, dan dampak sosial. Diperlukan komitmen pemerintah untuk cepat menyesuaikan kondisi yang terjadi, baik di sektor perdagangan, manufaktur, dan pertanian, yang tidak relevan dengan sistem yang sekarang. Pemerintah daerah perlu melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas peluang. Pemerintah daerah juga perlu melakukan rekonfigurasi untuk kebijakan yang relevan dengan kondisi sekarang. Kemanfaatan kemajuan teknologi sudah dapat dinikmati masyarakat melalui inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun teknologi juga mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Oleh karena itu untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintah di suatu

negara harus membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi.

4. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut

menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil, menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

5. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new lifestyle*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual-*metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

2.6.2.2 Penelaahan Isu Nasional

1. Transformasi Sosial

Transformasi sosial pada tahun 2025-2029 diarahkan pada upaya penguatan pondasi transformasi sosial. Transformasi Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, *resilien*, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan

dihadapkan pada tantangan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif maupun lansia. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Selain itu, disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Pada bidang pendidikan masih terdapat beberapa tantangan, belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan yang belum memadai, dan keterbatasan guru berkualitas yang belum terdistribusi secara merata. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global juga masih rendah.

Aspek perlindungan sosial berfokus untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Tantangan yang dihadapi yaitu masih rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, risiko bencana alam dan non alam, perubahan iklim, transisi besar lainnya, terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk.

2. Transformasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi Indonesia jangka menengah dalam rangka keluar dari jebakan negara pendapatan menengah dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas akan menghadapi berbagai isu dan

tantangan struktural. Industrialisasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan peranannya cenderung mengalami penurunan. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi penawaran (*supply*) seperti inefisiensi faktor produksi, kompleksitas dan nilai tambah produk yang masih rendah, struktur industri yang belum kuat, serta kemampuan adopsi teknologi, pemanfaatan RD&D (*Research, Development, and Demonstration*) dan penerapan standarisasi yang masih terbatas ataupun dari sisi permintaan (*demand*).

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia menjadi tantangan besar dalam memperluas kelas pendapatan menengah karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah. Akibatnya, laju peningkatan nilai tambah di beberapa subsektor industri padat karya pun relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum Indonesia masih berada pada era *Industrial Revolution 2.0*. Di sisi lain, perkembangan teknologi industri semakin masif, sehingga perlu akselerasi peningkatan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja industri.

Hal tersebut terjadi juga di sektor pertanian, bahkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah pada sektor pertanian relatif tinggi. Selain itu, sektor pertanian masih memiliki tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi. Lambatnya regenerasi petani serta degradasi kualitas lahan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dihadapkan pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang belum berkualitas karena SDM, dukungan fasilitas, serta sarana dan prasarana yang terbatas.

Sektor UMKM dan koperasi masih terkendala dalam meningkatkan kapasitasnya, terutama dari sisi permodalan dan adopsi teknologi sehingga menghambat UMKM dan koperasi untuk naik kelas. BUMN sebagai agen pembangunan masih bersifat eksklusif dalam melaksanakan penugasan pembangunan. Diharapkan BUMN dan UMKM dapat bersinergi dalam mendukung pembangunan sehingga dapat lebih berdampak, inklusif, dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diharapkan dapat mendorong

Indonesia berperan di pasar global dihadapkan pada berbagai isu antara lain masih belum optimalnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, terbatasnya pasar bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia domestik maupun global, masih rendahnya pemanfaatan keuangan syariah dalam mendukung perekonomian, serta regulasi dan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah baik pusat maupun daerah yang belum optimal.

Upaya pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi perlu diakselerasi utamanya pada isu ketergantungan pada energi fosil dan rendahnya pemanfaatan potensi energi terbarukan, emisi GRK pada sektor pembangkit dan transportasi yang sangat tinggi, keterbatasan dukungan pendanaan dan investasi, keterbatasan infrastruktur kelistrikan, serta keterbatasan infrastruktur gas bumi untuk sektor industri. Pendekatan ekonomi hijau dan biru belum mencapai posisi yang kuat. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya karena membutuhkan biaya dan teknologi tinggi untuk implementasinya. Percepatan digitalisasi dihadapkan pada tantangan keberagaman geografi dan karakteristik daerah yang berbeda sehingga pelaksanaannya masih perlu terus didorong secara kolaboratif. Kesenjangan dan karakteristik antar daerah dan wilayah yang berbeda juga menyebabkan pengintegrasian ekonomi domestik masih perlu intervensi lebih jauh untuk optimalisasinya. Selain itu, rendahnya akses hunian layak dan layanan perkotaan yang menimbulkan permukiman kumuh dan *urban sprawl* berdampak pada belum optimalnya kualitas urbanisasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping masih juga terdapat ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

3. Transformasi Tata Kelola

Tata kelola merupakan konsep penting dalam diskursus pembangunan dan telah diterima secara universal sebagai elemen krusial dalam menentukan strategi pembangunan. Ruang lingkup tata kelola dalam RPJMN 2025-2029 meliputi wilayah politik, administrasi, dan hukum. Tata kelola tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, namun juga terkait dengan bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan

ekonomi. Transformasi tata kelola diperlukan untuk merespon munculnya kecenderungan besar (*global megatrends*) dan adanya perubahan lingkungan strategis di level global maupun nasional, terutama terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, transformasi tata kelola menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral.

Akan tetapi masih terdapat berbagai persoalan tata kelola, baik yang menyangkut wilayah birokrasi, politik dan hukum. Reformasi Birokrasi masih bersifat prosedural dan administratif sehingga belum dapat mencegah terjadinya praktik- praktik koruptif. Hal tersebut terlihat dari adanya kecenderungan penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada dua tahun terakhir. Selain itu, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga, serta pembagian kewenangan yang belum ideal, telah menghasilkan inefisiensi birokrasi. Intervensi politik atas birokrasi juga menjadi persoalan menonjol dalam tata kelola pemerintahan. Konteks dan lingkungan politik menjadi penentu dalam proses transformasi tata kelola. Pada akhirnya, persoalan-persoalan tersebut menjadi kendala utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan

Penjaminan kepastian hukum melalui pemerintahan yang efektif dan responsif maka arah kebijakan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis. Dalam bidang hukum, kelembagaan dan praktik penegakan hukum belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM, rendahnya kepatuhan hukum masyarakat karena minimnya literasi dan pemberdayaan, serta akses terhadap keadilan yang terbatas.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, perkembangan teknologi dan teknologi informasi menjadi ancaman sekaligus peluang dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang demokrasi, belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan konstitusionalisme yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural akibat politik uang dan politisasi SARA dalam

pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan. Dalam bidang politik luar negeri, dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, seperti konflik intra dan antarnegara, disrupsi rantai pasok global dan tren *global economic decoupling*. Kondisi eksternal diiringi dengan belum terselesaikannya perundingan batas wilayah negara serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.

Stabilitas ekonomi makro masih menghadapi tantangan dalam 5 tahun ke depan. Secara eksternal, perlambatan ekonomi mitra dagang utama, divergensi ekonomi global, tekanan inflasi global, kebijakan suku bunga acuan *higher for longer*, perubahan iklim, serta tren digitalisasi. Dari sisi domestik, rendahnya penerimaan perpajakan, belum optimalnya kualitas Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Belanja Transfer ke Daerah, serta imbal hasil obligasi yang relatif masih tinggi dibanding negara sekawasan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal. Terakhir, dangkalnya pendalaman sektor keuangan, belum optimalnya fungsi intermediasi sektor keuangan, terbatasnya peran sektor keuangan nonbank, ketimpangan inklusi dan literasi keuangan, belum optimalnya pengembangan keuangan syariah, dan lemahnya perlindungan konsumen/ investor menjadi tantangan bagi sektor keuangan dalam menyediakan likuiditas yang memadai untuk pembiayaan pembangunan.

5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Peningkatan populasi Indonesia dihadapkan pada isu penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Petani dan nelayan yang merupakan produsen pangan menghadapi masalah serius berupa stagnasi kesejahteraan. Isu pengelolaan sampah juga perlu diwaspadai, mengingat daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA) diprediksi akan penuh pada 2028.

Saat ini, Indonesia berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan intensitasnya di lima sektor kunci, yakni energi, lahan, kelautan dan pesisir, industri, dan pengelolaan limbah. Pada sektor energi, pemenuhan ketahanan energi masih menghadapi tantangan dalam segi penyediaan, akses, maupun harga. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dari aspek pendanaan, regulasi, inovasi, hingga kelembagaan diharapkan dapat menggantikan peran energi fosil. Dampak perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan intensitas bencana lingkungan, terutama di sektor air, laut dan pesisir, pertanian, serta kesehatan. Ancaman kelangkaan air muncul dari rendahnya efisiensi pengelolaan dan daya rusak sumber daya air. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit menular dan masalah pertumbuhan anak.

2.6.2.3 Penelaahan Isu Strategis Regional Jawa dan Regional Provinsi Jawa Tengah

1. Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah

- a. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- b. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- c. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana;
- d. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
- e. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri Masyarakat;
- f. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

2. Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Sragen tahun 2025-2045

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Pertumbuhan Ekonomi
- c. Kemiskinan
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka
- e. Tata Kelola Pemerintahan
- f. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana

2.6.2.4 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

Isu-isu pembangunan jangka panjang Kabupaten Sragen telah dirumuskan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045. Isu-isu ini secara garis besar terkait kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, perekonomian, lingkungan hidup, dan SDM yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis regional, nasional, dan global. Berikut ini beberapa isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045.

1. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)

Kualitas sumberdaya manusia terlihat dari Capaian IPM Kabupaten Sragen tahun 2013 sebesar 69,95 meningkat menjadi 75,53 pada tahun 2024 di atas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,88 dan IPM nasional sebesar 74,20 pada tahun 2024. Sumber daya manusia merupakan kunci kemajuan pembangunan suatu wilayah. Peningkatan SDM dilakukan dengan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan perekonomian pada masyarakat. Hal ini akan mewujudkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2024 sebesar 5,39%. Struktur perekonomian Kabupaten Sragen didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi dan jasa pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen harus didukung oleh potensi lokal, sehingga daerah memiliki ketergantungan yang rendah dengan daerah lain. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

karena UMKM merupakan pondasi perekonomian baik secara lokal maupun nasional.

Infrastruktur akan mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan tahun 2024 persentase jalan mantap di Kabupaten Sragen sebesar 88,36%. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang dan mobilisasi masyarakat dalam beraktifitas.

Kondisi infrastruktur pelayanan dasar terlihat dari akses terhadap air bersih dan sanitasi. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan tahun sebesar 19,67% pada tahun 2021, meningkat menjadi 20,11% pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 20,55% pada tahun 2023 dan 2024. Rumah tangga di Kabupaten Sragen dengan akses sanitasi aman pada tahun 2021 sebesar 1,80%, meningkat menjadi 1,91% pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 2,20% pada tahun 2023 serta 3,25% pada tahun 2024.

3. Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen selama kurun waktu tahun 2013-2024 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 dan 2021, hal ini karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen pada tahun 2013 sebesar 15,93% menurun menjadi sebesar 12,79% pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin meningkat pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 13,38% dan 13,83%, pada tahun 2022 menurun menjadi 12,94%, pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 12,87% dan pada tahun 2024 turun menjadi 12,41%. Dengan demikian, penurunan dari 2023 ke 2024 sebesar 0,46%.

Kemiskinan di Kabupaten Sragen disebabkan oleh budaya dan pola pikir masyarakat miskin yang konsumtif seperti membeli makanan jadi, tidak memiliki keterampilan, tingkat pendidikan rendah dan selalu

bergantung terhadap pihak lain. Hal ini tentunya menjadi tantangan pemerintah dalam menangani kemiskinan. Selain itu permasalahan terkait data mikro kemiskinan belum disepakati dan kolaborasi program antar Perangkat Daerah perlu ditingkatkan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin. Pengurangan beban masyarakat miskin seperti transportasi, sanitasi dasar, perumahan, kesehatan dan pendidikan belum secara merata diperoleh masyarakat miskin.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan sesuai Inpres No. 8 Tahun 2025 yang meliputi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui antara lain:
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan rencana aksi berupa : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.
 - Program Pengelolaan Pendidikan, dengan rencana aksi berupa : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama serta Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui antara lain:
 - Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan rencana aksi berupa : Perluasan Kesempatan Kerja, Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan rencana aksi berupa : Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil.
3. Penurunan kantong kemiskinan melalui antara lain:

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan rencana aksi berupa : Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya.
- Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan rencana aksi berupa : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan.

Dalam rangka intervensi program, Kabupaten Sragen menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat yang saat ini menggunakan kompleks Sragen Technopark sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.

Selain Inpres 8 tahun 2025, Kabupaten Sragen dalam menjamin kualitas kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan juga mendasarkan pada Permendagri 53 Tahun 2020. Dimana strategi Penanggulangan Kemiskinan yang digunakan antara lain :

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Strategi di atas, dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan pentahapan/fokus pembangunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2026 difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, dimana hal ini sesuai dengan strategi pengurangan beban pengeluaran, tahun 2027 berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dimana hal ini sesuai dengan strategi peningkatan pendapatan, kemudian tahun 2028 fokus pada Peningkatan Pemerataan Ekonomi dimana hal ini sesuai dengan strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan, kemudian tahun 2029 menjadi episentrum ekonomi, dimana hal ini berarti sragen telah wilayah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dimana hal ini sesuai dengan strategi Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha

ekonomi mikro dan kecil serta tahun 2030 fokus pada terwujudnya sragen Berkemajuan, Sejahtera dan Merata, dimana hal ini telah terwujud seluruh strategi yang ada.

Kemudian, tata kelola dan basis data kemiskinan juga menjadi fokus penguatan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Tata kelola kemiskinan mencakup berbagai aspek seperti kebijakan, program, dan koordinasi antar lembaga dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Sedangkan basis data kemiskinan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi program-program tersebut, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kemiskinan. Untuk tata kelola dari segi koordinasi, saat ini sudah dibentuk SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang beranggotakan seluruh OPD dan Kecamatan beserta beberapa CSR sesuai arahan dalam Permendagri 53 Tahun 2020. Dalam hal kebijakan dan program, Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki 8 Program Unggulan Bupati, dimana beberapa diantaranya terkait langsung dengan kemiskinan, yaitu :

- a. Program unggulan “Pendidikan dan kesehatan universal”, dengan rencana aksi yaitu :
 - Pemberian seragam Gratis untuk SD dan SMP.
 - Program beasiswa perguruan tinggi pada jurusan vokasi D1/D3 bagi siswa KK miskin.
 - Penambahan armada bus sekolah gratis, yang menjangkau berbagai penjuru Kabupaten Sragen.
 - Pemberian Jaminan Kesehatan di Desa prioritas miskin.
 - Program Sekolah Dasar Unggul di Desa Prioritas miskin.
- b. Program unggulan “Peningkatan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Rentan, Tenaga Pendidik Sekolah, Pendidik Agama, Pendidik Pesantren Dan Pengelola Tempat Ibadah”, dengan rencana aksi yaitu :
 - Pajak bumi dan bangunan gratis bagi guru berpenghasilan rendah, pahlawan, masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya.
 - Bantuan jatah hidup lansia, janda yang punya tanggungan, penyandang disabilitas.
- c. Program Unggulan “Super Village”, dengan rencana aksi yaitu :
 - Penyediaan Wifi Gratis untuk desa prioritas miskin.

- Perbaikan RTLH di Desa Prioritas miskin.
- Program gratis magang di Luar Negeri bagi KK miskin.

Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu antar stakeholder terkait (multisektor). Sebagaimana telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya bahwa TKPK merupakan kumpulan lembaga multisektor yang bersinergi dan bergerak bersama untuk menanggulangi kemiskinan.

Hal ini dilakukan agar tuntas sampai ke akar masalah dari kemiskinan. Jika ini dilakukan maka penurunan angka kemiskinan terjadi secara signifikan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode 2013-2023 TPT Kabupaten Sragen cenderung mengalami penurunan dan berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. TPT terendah Kabupaten Sragen terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,32%. Namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,75% karena dampak Covid-19. Setelah itu kembali mengalami penurunan sampai tahun 2022 dan menjadi 4,69% dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 3,87% serta turun menjadi 3,53% pada tahun 2024.

Upaya pengurangan pengangguran perlu terus ditingkatkan, sehingga mampu berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut seperti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja, kolaborasi dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri sehingga kompetensi yang diajarkan di sekolah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Hasil pengukuran dan pemantauan tingkat reformasi birokrasi, berguna untuk perbaikan dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Capaian IRB Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebesar 72,00 dan pada tahun 2024 mencapai 87,28.

Reformasi birokrasi bukanlah proses yang cepat dan sederhana, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi landasan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Birokrasi yang efisien dan dapat dipercaya dapat meningkatkan iklim investasi dan bisnis. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Reformasi birokrasi diharapkan mampu mengarah pada pencapaian kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Survei Penilaian Integritas adalah sebuah instrumen atau metode yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat integritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau lingkungan tertentu. Survei semacam ini dirancang untuk menilai aspek-aspek seperti kejujuran, etika, transparansi, perilaku yang adil, dan kepatuhan terhadap standar etika atau kode etik tertentu. Survei ini biasanya melibatkan serangkaian pertanyaan atau indikator yang ditujukan kepada individu atau kelompok dalam organisasi untuk mengukur persepsi mereka tentang tingkat integritas di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi area-area di mana integritas mungkin kurang atau perlu diperbaiki, serta memperoleh masukan untuk memperbaiki kebijakan, prosedur, atau budaya organisasi yang berkaitan dengan integritas. Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten Sragen tahun 2022 sebesar 80,60 meningkat menjadi 80,79 pada tahun 2023 dan turun menjadi 77,99 pada tahun 2024.

Capaian inovasi daerah berdasarkan indeks inovasi daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebesar 70,82, mengalami peningkatan menjadi 84,57 pada tahun 2023 dan 93,98 pada tahun 2024.

6. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan. IKLH di Kabupaten Sragen menunjukkan perbaikan yang signifikan dari 60,46 pada tahun 2021 meningkat menjadi 64,90 pada tahun 2023 dan 68,29 pada tahun 2024. Pelestarian lingkungan hidup perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia. Pelestarian lingkungan juga membantu menjaga keberlanjutan

sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati.

Konflik SARA dilatarbelakangi karena adanya sekelompok masyarakat yang hidup di daerah tertentu dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat mendorong suatu kelompok menjadi saling tersinggung sehingga memicu munculnya konflik antara kelompok masyarakat dengan budaya berbeda. Upaya terhadap konflik SARA ada berbagai macam, diantaranya ada tindak pidana yang masuk kedalam tahap penghentian, dan program penguatan pendidikan karakter yang masuk kedalam tahap pencegahan. jumlah kejadian konflik SARA tidak ditemukan pada Tahun 2013-2024.

Indeks risiko bencana Kabupaten Sragen dari tahun 2015 sebesar 142 dan tetap 142 sampai 2020, mulai tahun 2021 IRB turun menjadi 139,53 pada tahun 2021, kembali menurun menjadi 135,53 tahun 2022 dan kembali turun menjadi 129,34 pada tahun 2023 dan 121,42 pada tahun 2024. Indeks risiko bencana mengukur tingkat risiko terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, badai, dan lainnya. Upaya mitigasi bencana yang efektif akan mengurangi dampak bencana. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan komunitas lokal, dalam upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan indeks risiko bencana. Upaya pencegahan bencana, perencanaan darurat, dan reaksi cepat adalah kunci dalam mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat dari risiko bencana yang ada.

2.6.2.5 Isu Strategis Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

Perumusan isu strategis Kabupaten Sragen menggunakan konsep *dynamis governance* dan pembangunan berkelanjutan. Konsep *dynamis governance* berkaitan dengan cara berpikir strategis yang terdiri dari berpikir ke depan (*think ahead*), berpikir lintas (*think Across*), dan berpikir lagi (*think again*). Sementara pembangunan berkelanjutan mengacu pada pilar SDGs sebagai instrumen memetakan isu strategis, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan tata kelola. Adapun instrumen yang digunakan adalah *crosstab* atau tabel tabulasi silang untuk mempermudah perumusan isu strategis Rantek RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2025-2029.

Tabel 2. 80 Perumusan Isu Strategis Daerah

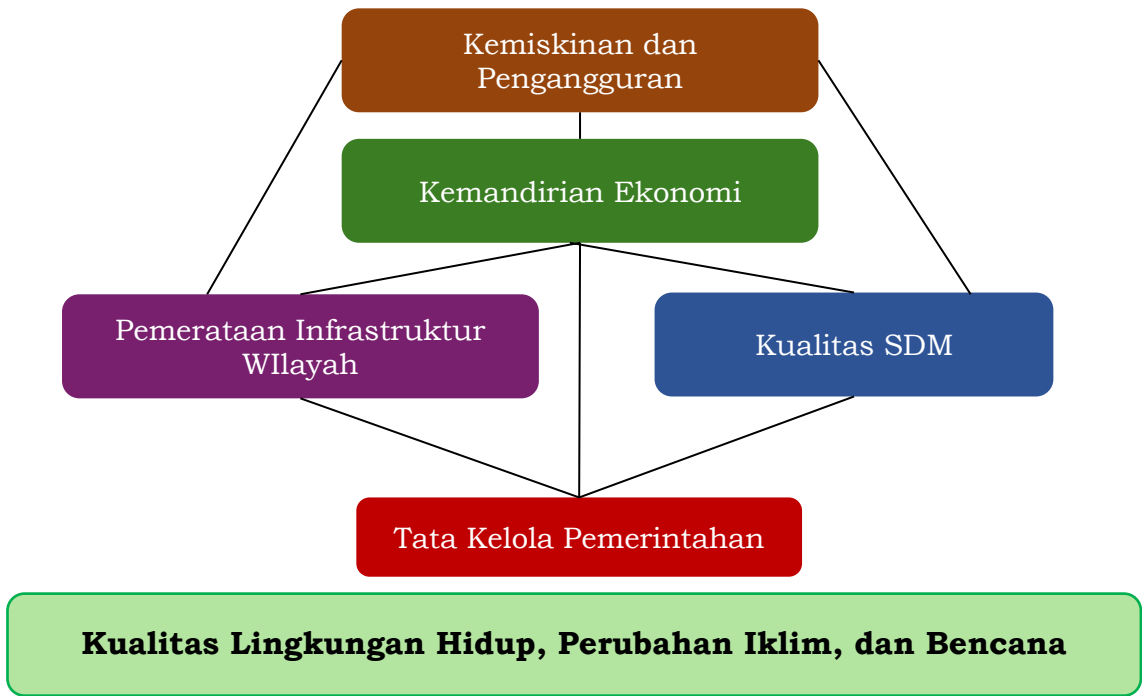
Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025- 2029	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rumusan Isu 2025-2029
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
(1) Potensi sektor-sektor unggulan (Industri pengolahan, Perdagangan, Pertanian) (2) Potensi produksi komoditas pertanian (padi, tanaman hortikultura, perikanan, dan peternakan); (3) Potensi Pariwisata (Museum Sangiran) (4) Potensi agro industri; (5) Ketersediaan sumber daya manusia produktif; (6) Potensi desa	(1) Berkurangnya kontribusi dan melambatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (2) Kunjungan wisatawan ke objek wisata unggulan mengalami penurunan dan berfluktuasi. (3) Pendapatan perkapita masyarakat masih relatif rendah. (4) Belum optimalnya kemandirian desa. (5) Iklim investasi yang baik belum optimal. (6) Prevelansi ketidakcukupan konsumsi pangan relatif tinggi.	Ketimpangan dan kemiskinan	1) Pertumbuhan Kelas Menengah; 2) Krisis Pangan, Air, dan Energi	Transformasi Ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kemandirian Ekonomi Daerah
(1) Luas wilayah, (2) Jumlah penduduk.	(1) Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan. (2) Masih adanya rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh perkotaan. (3) Adanya beberapa titik kemacetan.	Jangkauan pelayanan	1) Krisis Pangan, Air, dan Energi; 2)Perkembangan teknologi	Transformasi ekonomi	Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025- 2029	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rumusan Isu 2025-2029
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
Ketersediaan sumber daya manusia	(1) Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah masih relatif rendah. (2) Belum optimalnya literasi dan numerasi masyarakat. (3) Kasus stunting relatif tinggi. (4) Masih rendahnya kelompok budaya dan kesenian yang aktif	Kualitas sumber daya manusia	1)Perkembangan Teknologi; 2) Demografi Global; 3) Pertumbuhan Kelas Menengah	Transformasi Sosial	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia
1) Jumlah Penduduk 2) Bonus Demografi	(1) Sebaran penduduk belum merata. (2) Angka kemiskinan masih tinggi. (3) Pendapatan perkapita masyarakat masih relatif rendah.	Ketimpangan dan kemiskinan	1) Demografi Global; 2) Penduduk kelas menengah	1)Transformasi Sosial; 2)Transformasi ekonomi	Kemiskinan	Kemiskinan dan Pengangguran
Kapasitas dan Kapabilitas ASN	(1) Akuntabilitas kinerja masih relatif rendah. (2) Kemampuan keuangan daerah masih relatif rendah. (3) Penerapan Sistem Merit belum optimal. (4) Pemanfaatan statistik sektoral dalam pembangunan belum optimal.	Tata kelola pemerintahan	Perkembangan Teknologi	1)Transformasi Tata kelola; 2) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan	Tata kelola pemerintahan dinamis	Tata Kelola Pemerintahan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025- 2029	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rumusan Isu 2025-2029
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
	(5) Digitalisasi dan Keamanan informasi belum dilakukan secara maksimal.					
(1) Potensi sumber daya alam; (2) Lingkungan hidup, (3) Tingkat resiliensi masyarakat (4) Kewenangan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon darurat bencana	(1) Perubahan siklus hidrologi. (2) Rendahnya kualitas tutupan lahan dan kualitas air (3) Belum optimalnya pengelolaan persampahan. (4) Belum optimalnya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.	Kualitas lingkungan hidup, Kebencanaan dan perubahan iklim, Alih fungsi lahan	1) Perubahan Iklim; 2) Kiris Pangan, Air, dan Energi	1) Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi; 2) PRB sebagai agenda prioritas nasional (RPJMN, RKP).	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana	Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Pengurangan Risiko Bencana

Sumber: Analisis Data, 2025

Berdasarkan rumusan kertas kerja, teridentifikasi berbagai isu strategis Kabupaten Sragen tahun 2025-2029. Isu strategis saling mempengaruhi sehingga memerlukan intervensi secara Tematik, Holistik, Integrasi, dan Spasial (THIS).



Gambar 2. 112 Rumusan Isu Strategis Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

Sumber: Olahan dari Berbagai Sumber, 2024

1. Kemandirian Ekonomi Daerah

Kemandirian Ekonomi Daerah merupakan upaya untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Sragen ke depan dengan penekanan pada upaya pengoptimalan sumber daya dan potensi ekonomi daerah dengan pelibatan partisipasi aktif masyarakat sejak dari unit ekonomi terkecil. Pengembangan sumber-sumber potensi ekonomi daerah perlu dilakukan dengan penguatan *research and development* serta rekayasa teknologi untuk peningkatan produktivitas. Dalam rangka pembangunan ekonomi, peran aktif, inovasi, dan sinergi dengan masyarakat menjadi kunci untuk memanfaatkan potensi ekonomi sebagai salah satu elemen dasar pengungkit kesejahteraan masyarakat.

Struktur perekonomian Kabupaten Sragen didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi dan jasa pendidikan. Sektor

Pertanian dan Industri Pengolahan diharapkan menjadi *trigger* kemandirian ekonomi Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen perlu secara optimal mengoptimalkan kedua sektor ini. Potensi sektor pertanian dan industri pengolahan cukup tinggi di Kabupaten Sragen, dan sebagian besar penduduk sragen bekerja di sektor pertanian lebih dari 50-an persen. Namun demikian sektor ini memiliki berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk fluktuasi harga dan iklim. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan yang dihadapi Kabupaten Sragen kedepan.

Mengoptimalkan peran sektor pertanian dan industri pengolahan serta kemandirian kawasan pedesaan adalah langkah yang tepat. Namun Optimalisasi sektor ini perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dan kelestarian alam. Langkah ini telah selaras dengan Amahan Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah, yaitu *Penumpu Ketahanan Pangan dan Rantai Nilai Industri Nasional*” dan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 adalah *Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan*. Pada tahun 2025-2045, Jawa Tengah akan memfokuskan pada peningkatan produktivitas industri pengolahan, meliputi pengembangan industri berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan. Pembangunan akan disesuaikan dengan potensi lokal, pengembangan industri bahan baku lokal, penguatan integrasi rantai pasok antar-industri didukung ketersediaan infrastruktur konektivitas, dan logistik pendukung industri, hilirisasi Industri, serta peningkatan penumbuhan kawasan industri atau kawasan peruntukan industri baru. Berdasarkan *highlight* indikasi intervensi pilar transformasi ekonomi pada Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029, Kabupaten Sragen diarahkan salah satunya adalah *peningkatan kemandirian kawasan pedesaan*.

2. Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Pemerataan infrastruktur Wilayah di Kabupaten Sragen merupakan isu strategis yang perlu ditangani secara optimal. Saat ini pemerataan pembangunan wilayah di Kabupaten Sragen belum merata terutama di wilayah pedesaan. Sebagai contoh persentase penduduk yang mendapat akses air minum layak di Kabupaten Sragen pada tahun 2024 baru mencapai sebesar 88,91%. Persentase penduduk yang

terlayani sanitasi layak tahun 2024 mencapai 88,39%. Sampai dengan tahun 2024 persentase jalan mantap di Kabupaten Sragen sebesar 88,36%. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang dan mobilisasi masyarakat dalam beraktivitas. Kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Sragen terutama berada di pedesaan. Untuk itu, pemerataan infrastruktur wilayah perlu dilakukan secara optimal. Tidak hanya pemerataan perekonomian masyarakat, melalui infrastruktur dapat mengintervensi penanggulangan permasalahan yang terjadi selama ini, termasuk penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Kemudahan akses terhadap berbagai infrastruktur layanan dasar menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya perwujudan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah. Layanan infrastruktur dasar tersebut harus mampu mengakomodir semua unsur masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar harus selaras dengan daya dukung serta kelestarian lingkungan, sehingga tidak terjadi *trade off* antara pembangunan infrastruktur dan kerusakan alam. Pemenuhan infrastruktur layanan dasar di Kabupaten Sragen juga menjadi fokus pemerintah pusat sebagaimana tercantum dalam Rantek RPJMN 2025-2029.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi isu strategis Kabupaten Sragen. Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan. Sumber daya manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Berbagai indikator keberhasilan pembangunan menempatkan sumber daya manusia sebagai penerima manfaat dan ukuran keberhasilan pembangunan. Sebagai modal dasar, peningkatan sumber daya manusia harus terus dilakukan terutama melalui peningkatan pengetahuan dan kesehatan. Hal ini menjadi langkah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu memiliki daya saing, sehingga potensi sumber daya manusia ini dapat menjadi sumber berbagai inovasi serta kreativitas untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan. Kabupaten Sragen diharapkan lebih maju dengan mengedepan kualitas SDM yang mumpuni.

4. Kemiskinan dan Pengangguran

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen selama kurun waktu tahun 2013-2024 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 dan 2021, hal ini karena dampak pandemi *Covid 19*. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen pada tahun 2013 sebesar 15,93% menurun menjadi sebesar 12,79% pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin meningkat pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 13,38% dan 13,83%, pada tahun 2022 menurun menjadi 12,94%. Pada tahun 2023 menurun menjadi 12,87% dan pada tahun 2024 menurun menjadi 12,41%. Kemiskinan di Kabupaten Sragen disebabkan oleh budaya dan pola pikir masyarakat miskin yang konsumtif seperti membeli makanan jadi, tidak memiliki keterampilan, tingkat pendidikan rendah dan selalu bergantung terhadap pihak lain.

Hal ini tentunya menjadi tantangan pemerintah dalam menangani kemiskinan. Selain itu permasalahan terkait data mikro kemiskinan belum disepakati dan kolaborasi program antar Perangkat Daerah perlu ditingkatkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin. Pengurangan beban masyarakat miskin seperti transportasi, sanitasi dasar, perumahan, kesehatan dan pendidikan belum secara merata diperoleh masyarakat miskin. Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu antar stakeholder terkait. Hal ini dilakukan agar tuntas sampai ke akar masalah dari kemiskinan. Jika ini dilakukan maka penurunan angka kemiskinan terjadi secara signifikan.

Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif. Hal ini membutuhkan komitmen bersama mulai dari pembenahan sistem pendataan kemiskinan terpadu yang valid dan *up to date* berbasis digital, pemberian pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan sehingga menciptakan kemandirian, sampai pada penyusunan kesinambungan berbagai program dan kegiatan dalam

penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan selain menjadi fokus penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, juga menjadi fokus penanganan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana termuat pada dokumen Rantek RPJMN 2025-2029. Salah satu upaya percepatan penuntasan kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode 2013-2024 TPT Kabupaten Sragen cenderung mengalami penurunan dan berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. TPT terendah Kabupaten Sragen terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,32%. Namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,75% karena dampak Covid-19. Setelah itu kembali mengalami penurunan sampai tahun 2022 dan menjadi 4,69%. Pada tahun 2023 menurun menjadi 3,87% dan turun menjadi 3,53% pada tahun 2024.

Upaya pengurangan pengangguran perlu terus ditingkatkan, sehingga mampu berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut seperti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja, kolaborasi dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri sehingga kompetensi yang diajarkan di sekolah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Seiring dengan majunya pertanian modern dan industri pengolahan, pengangguran di Kabupaten Sragen dapat ditanggulangi secara signifikan

5. Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan merupakan upaya untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan secara sinergis, dinamis, dan berkelanjutan. Hal ini penting agar kerja sama lintas sektoral dan lintas jenjang pemerintahan dapat dilakukan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berbagai sinergitas dan kolaborasi tersebut harus dibarengi dengan akuntabilitas dan transparansi anggaran sehingga akan tercipta birokrasi kuat dengan mutu pelayanan yang tinggi. Selain itu, kemandirian keuangan di Kabupaten Sragen perlu ditingkatkan,

mengingat kebutuhan pembiayaan semakin meningkat di tahun mendatang. Berdasarkan *highlight* indikasi intervensi pilar transformasi ekonomi pada Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029, Kabupaten Sragen salah satunya diarahkan untuk mengupayakan harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan antara Pusat dan Daerah guna mempercepat pembangunan daerah afirmasi/lambat tumbuh pada pilar transformasi tata kelola.

6. Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Bencana

Pemanasan global dan perubahan iklim telah berdampak nyata pada seluruh aspek kehidupan. Pembangunan wilayah Kabupaten Sragen ke depan harus mampu menyelaraskan berbagai agenda pembangunan dan upaya pelestarian lingkungan. Sehingga akan tercipta keselarasan pembangunan dan menciptakan daya resiliensi terhadap dampak perubahan iklim dan berbagai potensi bencana. Berbagai aktivitas pembangunan dan intervensi kebijakan perlu mempertimbangkan aspek ekologi dan kelestarian lingkungan sehingga ada keseimbangan antara pembangunan, penduduk, dan alam.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sragen 2025-2029 disusun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dielaborasi dengan kebutuhan dan isu strategis pembangunan daerah yang harus direspon. Rumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini didasarkan pula pada RPJPD Kabupaten Sragen tahun 2025-2045, yang pada periode pembangunan jangka panjang ini memiliki tema pembangunan berupa “Kabupaten Sragen Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan”. Berangkat dari berbagai dasar tersebut, visi RPJMD Kabupaten Sragen 2025-2029, yaitu:

***“Sragen yang Berkemajuan,
Sejahtera, dan Merata”***

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut.

- 1. Berkemajuan**, merupakan perwujudan bagi pembangunan Kabupaten Sragen yang berkesinambungan dan semakin progresif. Berkemajuan menggambarkan Sragen sebagai daerah yang terus berkembang dan maju dalam berbagai aspek, termasuk infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia didorong agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik dan sektor ekonomi juga menjadi pijakan. Transformasi Sragen akan semakin diperkuat dan terintegrasi antar berbagai sektor pembangunan pada masa depan. Sragen diharapkan memiliki perekonomian dan sumber daya manusia yang berdaya saing, serta tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang inovatif dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya dan peluang yang dimiliki. Kondisi dinamis dan cenderung disruptif harus diantisipasi dengan membangun daerah yang

tangguh. Ketangguhan yang memiliki makna berupa kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika masa depan.

2. Sejahtera, merupakan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar, memiliki pendapatan tinggi serta rendahnya pengangguran dan kemiskinan. Sejahtera mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sragen melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat tercipta lapangan kerja yang luas, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Melalui kata kunci ini, Sragen diharapkan dapat menjamin kehidupan sosial yang harmonis dan aman bagi seluruh warga.

3. Merata, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen, baik di perkotaan maupun perdesaan. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan akses yang adil terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Merata juga mendorong Sragen untuk dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata menunjukkan tekad, semangat dan optimisme bersama seluruh masyarakat Kabupaten Sragen menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Dengan visi ini, Kabupaten Sragen berkomitmen untuk membangun daerah yang modern, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh warga.

3.1.2 Misi

Misi RPJMD merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan guna mencapai visi. Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan yaitu **"Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata"**, terdapat lima misi yang akan dilaksanakan yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Manusia Berkarakter yang Adaptif dengan Kemajuan dan Disrupsi Sosial-Teknologi

Misi ini memberikan penekanan pada pentingnya upaya pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam aspek intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Pada era digital dan globalisasi, kemajuan teknologi serta perubahan sosial yang cepat menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kualitas manusia di Kabupaten Sragen perlu dilakukan dengan mencakup peningkatan pendidikan, keterampilan, serta nilai-nilai moral dan budaya yang menjadi landasan dalam menghadapi berbagai perubahan. Adanya upaya Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral maupun sosial yang berlaku.

Selain itu, misi ini juga turut memberikan penekanan terhadap pentingnya adaptasi terhadap kemajuan teknologi karena menjadi aspek kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Sragen berupaya menciptakan masyarakat yang inovatif, kreatif, serta memiliki daya saing tinggi di berbagai sektor. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan ekosistem pendidikan berbasis teknologi, peningkatan literasi digital, serta pemberdayaan tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri modern. Dengan adanya strategi ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Sragen tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu secara aktif menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Misi 2 : Menguatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif

Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi pilar utama dalam menjawab kompleksitas tantangan pembangunan Kabupaten Sragen. Misi ini hadir sebagai fondasi untuk mempercepat terciptanya pemerintahan yang dinamis, adaptif terhadap perubahan, serta mampu merangkul seluruh potensi masyarakat dan stakeholder. Fokus utamanya adalah membangun sistem birokrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga responsif terhadap aspirasi publik dan kolaboratif dalam mengakselerasi pembangunan.

Transformasi ini bertujuan menciptakan penguatan kualitas tata kelola melalui pendekatan yang gesit dalam pengambilan keputusan, responsif dalam merespon kebutuhan masyarakat, dan kolaboratif dalam melakukan sinergi peran pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi indikator utama tujuan yang mendukung ketercapaian misi ini secara langsung.

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola yang berorientasi pada kinerja tinggi dan pelayanan prima. Hal ini diwujudkan melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) sebagai instrumen evaluasi efektivitas program, serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, yang dihitung menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan harapan dapat menjadi cerminan langsung kualitas layanan publik yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada rakyat.

Di bidang tata kelola keuangan daerah, prinsip transparansi dan akuntabilitas akan menjadi landasan utama dalam upaya memastikan pertumbuhan pendapatan yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah-langkah ini dirancang untuk menjamin penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Transformasi digital juga menjadi prioritas penguatan tata kelola pemerintahan melalui percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Digitalisasi akan diterapkan secara menyeluruh, mulai dari pelayanan publik terpadu hingga sistem pengawasan berbasis data yang memungkinkan pengambilan keputusan secara lebih terukur. Integrasi data antar Perangkat Daerah akan dioptimalkan guna mengurangi *redudancy* kebijakan, juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berbasis data dan analisis yang komprehensif. Dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi yang semakin terintegrasi, efektivitas pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan, sekaligus mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Sragen akan mengedepankan prinsip profesionalisme melalui penerapan sistem merit sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia atau aparatur birokrasi. Rekrutmen pegawai akan dilakukan secara objektif dan berbasis kompetensi, sementara pengembangan kapasitas pegawai akan diarahkan pada peningkatan kompetensi teknis maupun kepemimpinan. Sistem promosi akan berbasis kinerja guna memastikan bahwa setiap aparatur memiliki dorongan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan etos pelayanan publik akan diperkuat sehingga aparatur birokrasi Kabupaten Sragen dapat berfungsi secara optimal sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Sragen menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang tidak hanya mampu bekerja secara cepat dan efisien, tetapi juga memiliki ketepatan dalam perumusan kebijakan serta implementasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif, dan kolaboratif, Kabupaten Sragen akan semakin siap dalam menghadapi dinamika pembangunan serta memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Misi 3 : Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan dan Pasar Global

Kabupaten Sragen memiliki potensi besar untuk menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan pembangunan kewilayahan dan pasar global. Kabupaten Sragen adalah salah satu daerah strategis di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sragen terus mengembangkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, industri, pariwisata hingga berbagai sektor ekonomi potensial lainnya. Kabupaten Sragen dengan sumber daya alam yang melimpah dan dukungan infrastruktur yang semakin berkembang, wilayah ini mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Integrasi pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan kewilayahan menjadi faktor utama dalam mendorong keseimbangan

pembangunan di Kabupaten Sragen. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur, konektivitas antardaerah, dan pemberdayaan masyarakat agar setiap kecamatan dapat berkembang secara merata. Selain itu, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi prioritas guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif di Kabupaten Sragen.

Kabupaten Sragen juga berupaya memperkuat keterhubungannya dengan pasar global dalam menghadapi era globalisasi. Kabupaten Sragen secara berkesinambungan melakukan upaya peningkatan kualitas produk unggulan, pemanfaatan riset dan teknologi, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Berbagai upaya tersebut dijalankan agar Kabupaten Sragen dapat menembus pasar internasional dan memperluas jangkauan ekspor. Kabupaten Sragen dengan daya saing yang semakin meningkat, memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari rantai ekonomi global yang dinamis dan kompetitif.

Kabupaten Sragen dapat berkembang menjadi pusat ekonomi yang kuat dan berdaya saing tinggi dengan cara mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan kewilayahan, dan akses ke pasar global. Keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan menjadi kunci utama untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan. Kabupaten Sragen siap menjadi kabupaten yang maju, mandiri, dan berkontribusi dalam perekonomian nasional maupun global dengan strategi pembangunan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak.

Misi 4 : Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Mendukung Pemajuan Kebudayaan, Kelestarian Lingkungan dan Interaksi Sosial yang Humanis

Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi agenda vital dalam mendukung perwujudan Sragen yang semakin maju dan sejahtera. Pembangunan infrastruktur pada misi ini diarahkan untuk mendukung kemantapan konektivitas wilayah guna memperlancar mobilitas penduduk, barang, dan jasa, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang layak aman. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan

untuk menciptakan ruang-ruang publik yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga menjadi wadah bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup serta penguatan identitas dan karakter masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip pemanfaatan ruang yang berkelanjutan agar selaras dengan rencana tata ruang dan mendukung kelestarian lingkungan. Proyek infrastruktur dirancang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, serta sumber daya alam. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

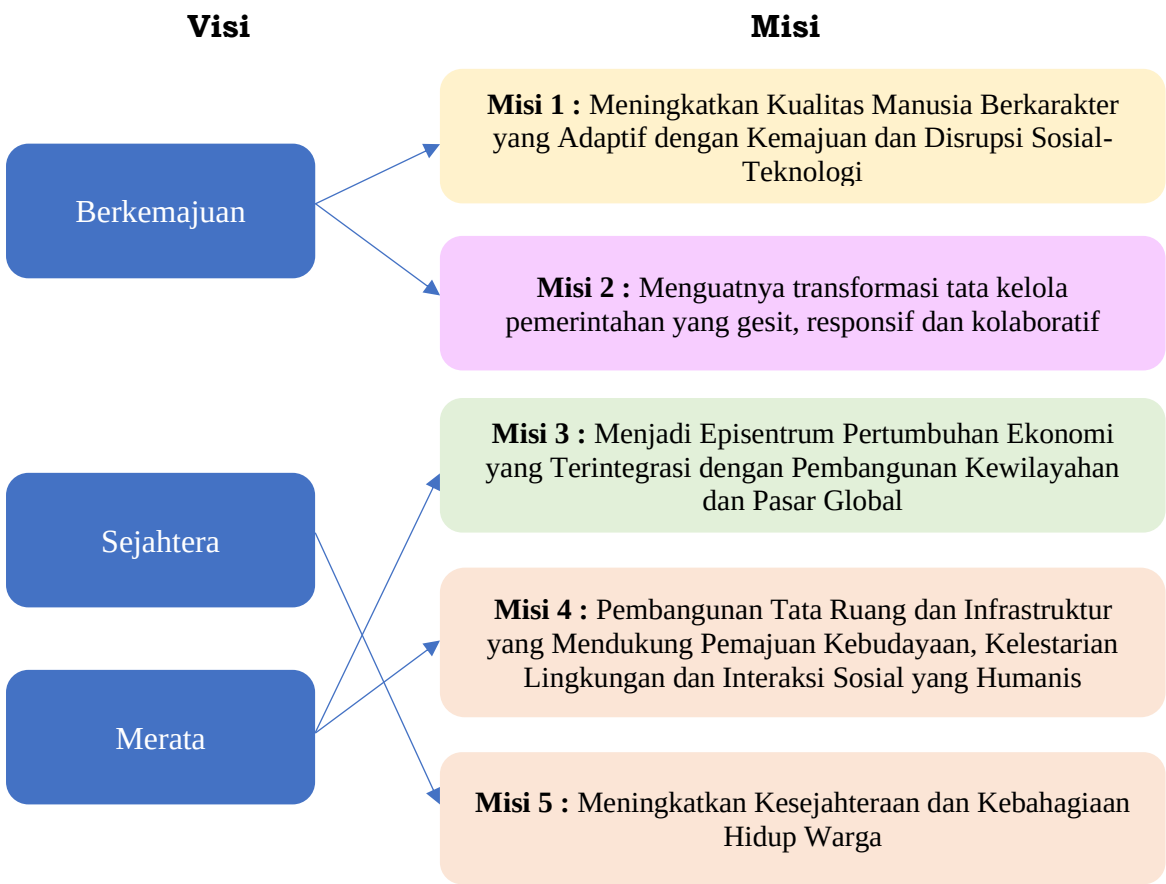
Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Hidup Warga

Misi berikut dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya untuk masyarakat rentan, tenaga pendidik formal maupun non formal, serta pengelola tempat ibadah. Selain itu misi ini juga merujuk pada kemajuan desa yang ditandai dengan kualitas serta kuantitas pelayanan pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan infrastruktur publik yang memadai. Kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari pembangunan pada tingkatan desa bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan hidup masyarakat menjadi fokus pada pelaksanaan misi berikut.

Peningkatan pelayanan publik pedesaan dengan menerapkan digitalisasi serta memperluas rentang kendali pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan layanan pedesaan. Ketersediaan fasilitas publik berupa taman sebagai ruang terbuka hijau, fasilitas internet, ataupun *sport center* yang dapat digunakan masyarakat juga menjadi fokus pembangunan pedesaan. Pengembangan BUMDes sebagai wujud kemandirian desa juga perlu dikembangkan. Pemberian beasiswa untuk siswa maupun mahasiswa berprestasi sekaligus pemberian insentif untuk tenaga pendidik juga menjadi fokus pengembangan desa.

Harapannya dengan beberapa fokus pengembangan desa tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat di Kabupaten Sragen.

Lima misi yang dirumuskan memiliki keterkaitan dengan kata kunci yang tertuang dalam rumusan visi, sehingga dapat mendukung terwujudnya pencapaian dan target Pembangunan pada akhir periode RPJMD. Keterkaitan antara visi dan misi dengan tujuan dapat diilustrasikan sebagaimana berikut.



Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa setiap misi yang dirumuskan memiliki keterkaitan dengan setiap kata kunci yang terdapat pada Visi RPJMD Kabupaten Sragen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya sinergitas antara kondisi yang ingin dicapai dengan cara yang akan dilakukan. Selain itu, visi dan misi RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 juga dirumuskan dengan memerhatikan visi dan misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 juga dirumuskan dengan memerhatikan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 1 Penbandingan Visi dan Misi RPJMD Sragen, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMN Tahun 2025-2029

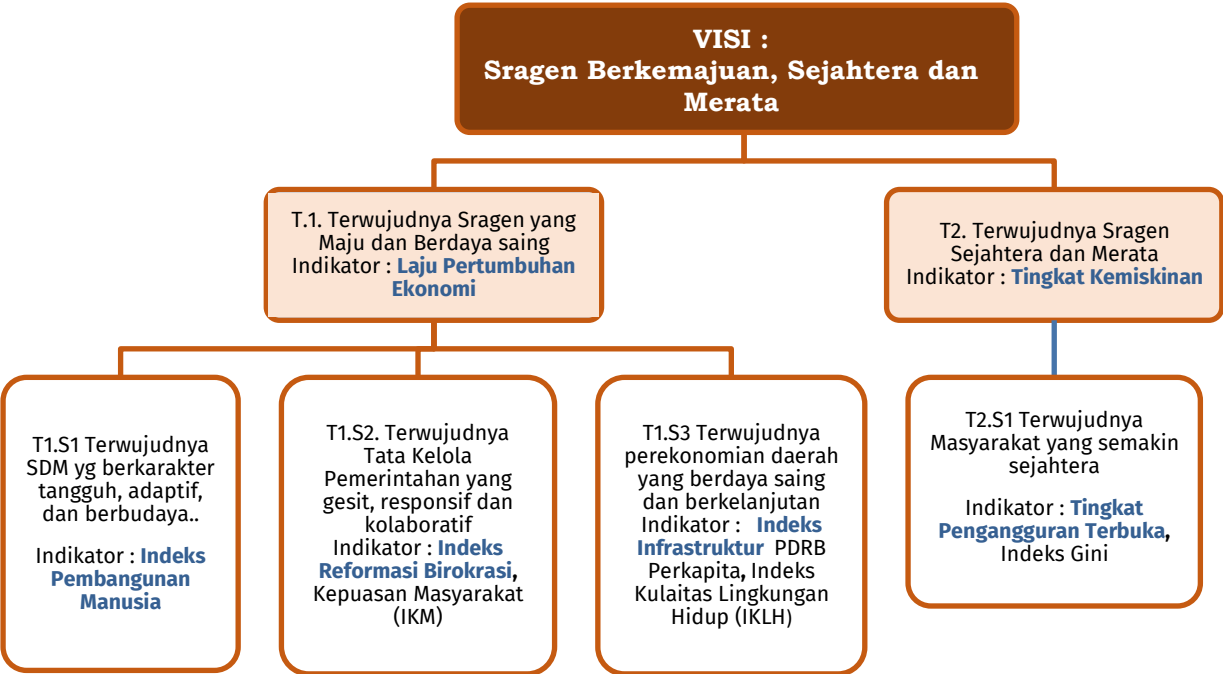
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029	RPJM Nasional Tahun 2025-2029
Visi: Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045	Visi: “Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata”	Visi: Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045
Misi 1: Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif, dan Berwawasan Global	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Berkarakter yang Adaptif dengan Kemajuan dan Disrupsi Sosial-Teknologi	Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran serta perempuan, pemuda (generasi milenial, generasi Z) dan penyandang disabilitas
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas	Misi 2: Menguatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
		Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, dan Hak Asasi Manusia
Misi 6: Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	Misi 3: Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan dan Pasar Global	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan		Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029	RPJM Nasional Tahun 2025-2029
yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan		nilai tambah di dalam negeri
		Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	Misi 4: Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Mendukung Pemajuan Kebudayaan, Kelestarian Lingkungan dan Interaksi Sosial yang Humanis	Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur
Misi 5 : Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	Misi 5: Meningkatkan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Hidup Warga	Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sragen dirumuskan dengan merujuk pada visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih. Tujuan pembangunan mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemajuan daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, sasaran pembangunan dirancang sebagai parameter keberhasilan yang menggambarkan tercapainya tujuan melalui hasil nyata dari program-program pembangunan yang telah dijalankan. Sasaran ini diwujudkan dalam bentuk pencapaian indikator kinerja yang

mencerminkan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat. Berikut ini merupakan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sragen yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.



Gambar 3. 2 Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah dirumuskan, Pemerintah Kabupaten Sragen memandang perlu adanya pengelolaan risiko yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Manajemen risiko menjadi bagian penting untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian, baik yang berasal dari faktor internal organisasi maupun dari dinamika eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan.

Risiko-risiko yang mungkin timbul antara lain dapat berupa keterbatasan sumber daya (anggaran, SDM, sarana dan prasarana), perubahan kebijakan di tingkat pusat/provinsi, fluktuasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga potensi bencana alam dan non-alam. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi dan respons yang tepat guna menjaga kesinambungan pencapaian sasaran strategis daerah. Sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pengelolaan risiko tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen akan menyusun Rencana Tindak Pengelolaan (RTP) Risiko Strategis Pemerintah Daerah secara terpisah. Dokumen ini mengakomodir identifikasi risiko utama terhadap masing-

masing tujuan dan sasaran, analisis tingkat risiko, serta strategi pengendalian dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. RTP ini akan menjadi acuan penting dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah agar lebih adaptif dan tanggap terhadap perubahan.

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2026 – 2030

Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sragen Berkemajuan, Sejahtera dan Merata	Terwujudnya Sragen yang Maju dan Berdayasaing		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,39	5,50 - 5,86	5,5- 6,0	6,50 - 7,08	7,10 - 7,63	7,60 - 8,12	7,90 - 8,34
		Terwujudnya SDM yg berkarakter tangguh, adaptif, dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	75,53	76	76,71	77,21	77,43	78,57	78,63
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	87,14	87,29	87,67	88,17	88,77	89,47	90
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	87	88,31	89,4	90	91	92
		Terwujudnya perekonomian daerah yang berdayasaing dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Angka	76,18	76,97	77,51	78,05	78,61	79,08	79,67
			PDRB Perkapita	Juta Rupiah	52,19	56,37	61,37	69,37	79,37	84,66	86,61
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,29	72,63	72,67	72,72	72,76	72,80	72,85
	Terwujudnya Sragen Sejahtera dan Merata		Tingkat kemiskinan	Persen	12,41	12,07- 11,65	11,50- 11,18	11,10- 10,92	10,85- 10,35	10,30- 9,77	9,50 - 9,20
		Terwujudnya Masyarakat yang semakin sejahtera	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,53	3,55 - 3,17	3,41 - 3,11	3,30 - 3,00	3,18 - 2,88	3,06 - 2,76	2,95 - 2,65
			Indeks Gini	angka	0,309	0,308	0,307	0,306	0,305	0,304	0,303

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 disusun sebagai panduan strategis pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD 2025–2029 merupakan rumusan langkah-langkah besar yang bersifat jangka menengah untuk

mencapai sasaran pembangunan daerah dan panduan menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Sasaran 1 : Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter tangguh, adaptif, dan berbudaya

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya SDM yang berkarakter tangguh, adaptif, dan berbudaya sebagai berikut.

1. Peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas, melalui arah kebijakan :

- a. Pemenuhan Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan peningkatan akses pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan serta pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
- b. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS
- c. Penguatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang, mulai dari PAUD, dasar, menengah hingga pendidikan non formal/kesetaraan
- d. Perluasan layanan PAUD yang terintegrasi
- e. Penguatan pendidikan karakter termasuk pencegahan dan penanganan bullying.
- f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di sekolah negeri dan swasta secara proporsional
- g. Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya Sragen, termasuk pencegahan dan penanganan bullying
- h. Percepatan digitalisasi pendidikan terutama di sekolah yang belum terjangkau internet
- i. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- j. Pengembangan dan penerapan kurikulum adaptif berbasis potensi lokal seperti pertanian, batik, dan budaya tradisional
- k. Perbaikan tata kelola pendidikan daerah yang berbasis pada data perencanaan dan hasil evaluasi kinerja satuan pendidikan

- l. Optimalisasi koordinasi lintas pemerintah dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan
- m. Penguatan akses pendidikan vokasi untuk peningkatan kompetensi SDM
- n. Pengembangan sekolah model transformatif, Sekolah Rakyat dan Unggulan
- o. Optimalisasi peran pendidikan non-formal terintegrasi dengan pondok pesantren

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui arah kebijakan :

- a. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara promotif, preventif dan kuratif
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan
- c. Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia produktif dan lanjut usia, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan zoonosis
- d. Peningkatan pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
- e. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi orang dengan HIV, Tuberkulosis dan malaria
- f. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit HIV/AIDS
- g. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian malaria
- h. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan isu kesehatan
- i. Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
- j. Pengendalian penduduk dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga
- k. Penanggulangan gizi makro dan mikro, percepatan permasalahan stunting dan kelebihan gizi
- l. Peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan/dukungan Universal Health Coverage

3. Peningkatan daya saing pemuda melalui arah kebijakan :

- a. Peningkatan penyadaran pemuda dalam kewirausahaan;

- b. Peningkatan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda

4. Peningkatan daya saing olahraga dan kebugaran melalui arah kebijakan:

- a. Peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga
- b. Peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga
- c. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang mudah murah dan menarik bagi masyarakat
- d. Penguatan sarana dan prasarana olahraga unggulan
- e. Pembinaan atlet potensial

5. Peningkatan budaya literasi melalui arah kebijakan :

- a. Penguatan ekosistem tata kelola literasi yang lebih baik
- b. Penyusunan regulasi dan kebijakan dukungan budaya literasi
- c. Penyusunan mekanisme koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi literasi
- d. Optimalisasi dana CSR dan Filantropi untuk pembudayaan literasi
- e. Pengarusutamaan literasi dalam kurikulum pendidikan atau pelatihan;
- f. Promosi dan publikasi literasi
- g. Penyediaan bahan dan koleksi literasi yang menarik, beragam, adaptif dan terjangkau
- h. Peningkatan kapasitas SDM perpustakaan
- i. Pengembangan kerjasama perpustakaan

6. Peningkatan pembangunan berbasis gender melalui arah kebijakan :

- a. Peningkatan pengarusutamaan gender
- b. Peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan

7. Peningkatan ketahanan keluarga, melalui arah kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas keluarga melalui pengendalian pertumbuhan penduduk yang terencana, seimbang, dan berkelanjutan
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan bagi Perempuan dan Anak

- c. Membangun lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya keluarga harmonis, sehat, dan sejahtera.

8. Peningkatan pemajuan kebudayaan, melalui arah kebijakan:

- a. Peningkatan ekspresi budaya berbasis nilai kearifan lokal dengan optimalisasi perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.
- b. Peningkatan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kesejahteraan Masyarakat.
- c. Penguatan tata kelola kebudayaan yang diarahkan pada ketersediaan data/informasi kebudayaan yang berkualitas; dan peningkatan kapasitas lembaga dan SDM kebudayaan.
- d. Penguatan internalisasi nilai budaya, keagamaan, dan kearifan lokal dengan pendidikan, keluarga maupun masyarakat

Sasaran 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan gesit, responsif, dan kolaboratif sebagai berikut.

1. Peningkatan birokrasi yang berintegritas, responsif, transparan, dan akuntabel, melalui arah kebijakan :

- a. Penguatan Reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah
- b. Penguatan kolaborasi antar OPD dan stakeholder pembangunan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja berbasis perencanaan berkualitas dan manajemen kinerja lintas sector
- d. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, berbasis risiko serta riset dan inovasi;
- e. Peningkatan Partisipasi dan Transparansi Publik dalam Perumusan Kebijakan melalui arah kebijakan yaitu peningkatan ruang partisipasi publik yang bermakna dalam pembangunan dan perumusan kebijakan

- f. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahapan perumusan kebijakan melalui forum konsultasi publik, musrenbang, dan mekanisme partisipatif lainnya.
- g. Peningkatan kualitas kebijakan daerah
- h. Optimalisasi mekanisme kolaborasi legislatif dan eksekutif dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.
- i. Memperkuat transparansi proses perumusan kebijakan dengan penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan tepat waktu
- j. Membangun budaya kerja aparatur yang berintegritas, melayani, responsif, dan adaptif.
- k. Pembangunan budaya kerja birokrasi yang dinamis, responsif, dan *“work with society”*
- l. Penguatan manajemen ASN berbasis meritokrasi
- m. Peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan
- n. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahapan perumusan kebijakan melalui forum konsultasi publik, musrenbang, dan mekanisme partisipatif lainnya.
- o. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan berbasis digital dan e-government
- p. Penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi;
- q. Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan berbasis pemantauan informasi dan data secara real time
- r. Penguatan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- s. Penataan sistem arsip dinamis dan statis sesuai standar nasional.

2. Penguatan peran kecamatan sebagai simpul integrasi pembangunan lintas sektor, melalui arah kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan
- b. Peningkatan koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan

- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berkelanjutan
- d. Mendorong sinergi antara kecamatan, desa/kelurahan, serta lembaga masyarakat

3. Optimalisasi kapasitas fiskal dan kualitas belanja daerah melalui arah kebijakan :

- a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan PAD dan peningkatan kualitas belanja daerah
- b. Peningkatan PAD berbasis optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan peningkatan kapasitas BUMD
- c. Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah

Sasaran 3 : Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai berikut.

1. Penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, melalui arah kebijakan :

- a. Optimalisasi lumbung pangan daerah dan peningkatan cadangan pangan
- b. Penguatan cadangan pangan utama, diversifikasi pangan lokal, dan keamanan pangan
- c. Penguatan sistem informasi pangan untuk mendukung perencanaan berbasis satu data

2. Pengembangan kawasan pertanian, peternakan dan perikanan terpadu dan agroindustri berkelanjutan, melalui arah kebijakan:

- a. Revitalisasi sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas (irigasi, embung, konservasi air)
- b. Peningkatan produksi pertanian. peternakan dan perikanan budidaya
- c. Hilirisasi pada sektor pertanian (pertanian, perkebunan, peternakan, serta kelautan dan perikanan)

- d. Pengembangan kawasan pertanian terpadu, agroindustri, dan agrowisata
- e. Peningkatan daya saing komoditas melalui hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (pascapanen, pengolahan, pengemasan)

3. Penguatan kelembagaan pangan dan sistem distribusi daerah, melalui arah kebijakan :

- a. Penguatan sistem rantai pasok pangan lokal serta stabilisasi harga melalui kelembagaan distribusi
- b. Peningkatan ketercukupan dan keberlanjutan sumber daya air untuk produksi pangan
- c. Integrasi kelembagaan pangan desa dengan BUMDes dan koperasi untuk memperkuat distribusi dan harga pangan
- d. Pemanfaatan potensi pangan lokal untuk mendukung kemandirian dan mengurangi ketergantungan impor
- e. Penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi energi dalam proses produksi pangan

4. Pengembangan pariwisata unggulan berbasis kearifan lokal, melalui arah kebijakan:

- a. Revitalisasi destinasi wisata unggulan seperti Sangiran, Gunung Kemukus, Waduk Kedung Ombo, dan Desa Wisata Batik
- b. Digitalisasi promosi dan manajemen pariwisata melalui integrasi platform reservasi, informasi destinasi, dan media promosi
- c. Pengembangan pariwisata syariah dan wisata berbasis komunitas desa
- d. Pengembangan desa wisata
- e. Peningkatan konektivitas infrastruktur menuju dan sekitar kawasan wisata (jalan, transportasi, logistik)
- f. Penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya local
- g. Peningkatan identitas wisata Sragen melalui event budaya, kriya, dan makanan khas

- h. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah
- i. ekonomi kreatif;
- j. Dukungan kebijakan untuk ekonomi syariah dan wisata ramah muslim

5. Penguatan ekosistem UMKM, koperasi, dan industri kecil menengah melalui arah kebijakan:

- a. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta fasilitasi pembentukan koperasi sehat (termasuk Koperasi Merah Putih)
- b. Penguatan kualitas produk UMKM dari pengolahan sampai pengemasan
- c. Peningkatan akses permodalan, perizinan, dan marketplace digital untuk UMKM
- d. Penguatan sentra industri kecil dan menengah serta akselerasi kawasan industri terpadu
- e. Hilirisasi dan diversifikasi produk lokal berbasis riset dan kemitraan dengan perguruan tinggi
- f. Integrasi koperasi dengan industri dan UMKM sebagai agregator produksi, distribusi, hingga pembiayaan

6. Peningkatan iklim investasi dan akselerasi kawasan industri terpadu melalui arah kebijakan :

- a. Peningkatan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum
- b. Peningkatan layanan terpadu untuk memudahkan investor masuk ke kawasan industri dan agroindustri
- c. Peningkatan daya tarik investasi merata di berbagai sektor ekonomi

7. Penguatan konektivitas ekonomi daerah, melalui arah kebijakan:

- a. Revitalisasi sarana dan prasarana perekonomian, termasuk pasar multipurpose dan logistik desa
- b. Peningkatan akses jalan produksi, pasar desa, dan balai ekonomi desa sebagai simpul kegiatan produktif
- c. Pemerataan Pembangunan infrastruktur kawasan industri, pariwisata, dan sentra ekonomi lokal untuk menarik investasi.

- d. Peningkatan akses internet ke seluruh wilayah
- e. Peningkatan Kualitas Layanan Perhubungan
- f. Peningkatan aksesibilitas antarwilayah
- g. Peningkatan infrastruktur menuju destinasi wisata unggulan untuk memperkuat keterhubungan regional
- h. Penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi energi dalam pembangunan kawasan industri

8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan sumber daya alam, melalui arah kebijakan :

- a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah
- b. Mendorong integrasi pengelolaan sampah dari hulu (rumah tangga) hingga hilir (TPA)
- c. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan RTH yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- d. Peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
- e. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
- f. Peningkatan sanitasi aman sarana dan prasarana (IPLT, tangki septik kedap, penyedotan secara berkala)
- g. Memperkuat pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui pemantauan kualitas lingkungan
- h. Peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim melalui penguatan implementasi ekonomi hijau dan penurunan intensitas emisi GRK

9. Peningkatan kondusivitas dan stabilitas wilayah, melalui arah kebijakan :

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban umum.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan peraturan daerah.

- c. Penguatan mitigasi bencana serta respon terhadap darurat bencana dan keselamatan masyarakat
- d. Memperkuat integritas dan peran partai politik dalam kemajuan demokrasi;
- e. Penguatan nilai-nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila

Sasaran 4: Terwujudnya Masyarakat yang semakin sejahtera

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera sebagai berikut.

1. Pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial, melalui arah kebijakan :

- a. Mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial
- b. Meningkatkan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan social.

2. Perluasan Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja, melalui arah kebijakan :

- a. Penguatan sistem informasi pasar kerja (SIPK)
- b. Memperluas akses pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri.
- c. Memperluas akses dan kualitas pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.
- d. Mendorong sertifikasi kompetensi dan pengakuan keterampilan tenaga kerja.
- e. Menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri kecil, menengah, dan ekonomi kreatif.
- f. Mendorong investasi padat karya di sektor potensial.
- g. Memperkuat sinergi pemerintah, swasta, dan UMKM dalam penciptaan lapangan kerja baru.

3. Peningkatan kemandirian desa, melalui arah kebijakan :

- a. Pemenuhan kebutuhan layanan dasar desa
- b. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;

- c. Peningkatan fasilitas publik desa: pusat perekonomian desa, ruang terbuka hijau, dan fasilitas olahraga
- d. Peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi unggulan lokal
- e. Penguatan peran dan pemberdayaan BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal
- f. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara kolaboratif dan multisektor
- g. Pengembangan kawasan pedesaan berbasis potensi tematik yang terintegrasi dengan simpul pertumbuhan ekonomi

4. Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia desa, melalui arah kebijakan:

- a. Menyediakan program pelatihan kerja dan sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan pasar
- b. Menyediakan program beasiswa dan magang di luar negeri bagi KK miskin
- c. Mendorong pengembangan kewirausahaan muda berbasis UMKM dan industri kreatif
- d. Menumbuhkan sumber penghidupan masyarakat berkelanjutan melalui pelatihan berbasis teknologi dan sektor unggulan daerah

5. Transformasi desa miskin, melalui:

- a. ndampingan transformasi desa miskin dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sanitasi
- b. Fasilitasi percepatan bantuan sosial dan program perlindungan sosial di tingkat desa
- c. Monitoring dan evaluasi langsung pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
- d. Meningkatkan kolaborasi stakeholder dalam penyediaan bantuan sosial
- e. Menyediakan jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan berbasis data terpadu
- f. Mendorong integrasi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi mikro
- g. Kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman (air bersih, sanitasi, listrik)

- h. Sinkronisasi pengentasan kemiskinan desa dan rumah layak huni

Selanjutnya dalam menentukan prioritas serta arah pelaksanaan strategi dan kebijakan setiap tahun selama periode lima tahun, disusunlah tahapan kebijakan pembangunan. Tahapan ini memuat prioritas pembangunan tahunan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun fokus kebijakan pembangunan di Kabupaten Sragen periode 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut.



Gambar 3. 3 Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2026-2030

Penjabaran Tahap Pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2025-2029 sebagai berikut.

A. Arah Kebijakan Tahun 2026

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2026 Fokus diarahkan pada **“Penguatan fondasi ketahanan pangan dalam mendukung perekonomian daerah”** Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut melalui :

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, peternakan, pangan, kehutanan, dan perikanan
2. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pendukung pertanian.
3. Diversifikasi Pangan dan Pertanian
4. Penguatan Kelembagaan Petani dan Kemitraan

5. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
6. Penguatan peran lembaga perekonomian desa dalam mendukung ketahanan pangan desa
7. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi

Pada tahap pertama ini juga diarahkan untuk **“Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya

- a. Peningkatan sarana prasarana sekolah
- b. Penguatan kualitas pendidikan berbasis karakter dan kompetensi
- c. Penguatan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi sarpras pendidikan
- d. Peningkatan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua lapisan Masyarakat
- e. Penguatan pendidikan karakter dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan bullying
- f. Penguatan budaya dan identitas lokal Sragen melalui seni dan budaya
- g. Peningkatan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- h. Penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata
- i. Pemetaan kebutuhan prasarana dan sarana di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan
- j. Penguatan kualitas dan keterampilan kader kesehatan
- k. Peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- l. Penguatan sistem informasi kesehatan terintegrasi
- m. Penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter SDM
- n. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan

- o. Penguatan kapasitas pemuda, serta penguatan kewirausahaan pemuda
- p. Penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat
- q. Peningkatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar stakeholder, pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat;
- r. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
- s. Penguatan pembangunan berbasis gender
- t. Penguatan ketahanan keluarga

2. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif

- a. Penguatan Pelayanan publik yang merata dan inklusif melalui digitalisasi layanan dan optimalisasi pelayanan berbasis kecamatan/desa.
- b. Penguatan Perencanaan pembangunan berbasis satu data, riset, dan manajemen resiko dengan memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran
- c. Penguatan meritokrasi melalui pemetaan jabatan berbasis kompetensi dan kinerja, serta peningkatan kualitas data kepegawaian.
- d. Pemetaan dan pengembangan kompetensi ASN berbasis tujuan pembangunan daerah serta peningkatan integritas birokrasi.
- e. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, termasuk peningkatan kapabilitas APIP, pemetaan risiko, dan titik rawan korupsi.
- f. Penguatan integritas dan peran partai politik dalam memperkuat demokrasi lokal dan pembangunan berkelanjutan.
- g. Penguatan kelembagaan yang efektif dan berdaya saing
- h. Penguatan landasan kebijakan berbasis data dan teknologi informasi.
- i. Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD serta peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja publik.
- j. Penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta mendorong inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- k. Penguatan pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan
- l. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan public

3. Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

- a. Penguatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah
- b. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan melalui inovasi dan pemanfaatan sumber daya local
- c. Pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste) dari hulu ke hilir melalui edukasi, regulasi, dan inovasi teknologi pasca-panen
- d. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan (irigasi, embung, konservasi air) untuk menjamin kontinuitas produksi pangan
- e. Penguatan sistem rantai pasok pangan lokal serta stabilisasi harga melalui penguatan kelembagaan distribusi dan pengawasan pasar
- f. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah.
- g. Penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah
- h. Penguatan sektor pariwisata unggulan daerah
- i. Penguatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM)
- j. Penguatan daya saing dan kapasitas UMKM serta wirausaha baru
- k. Penguatan nilai tambah dan pemasaran produk unggulan daerah
- l. Penguatan pondasi sektor industri pengolahan dengan pemetaan potensi maupun kelembagaan, dan peningkatan kapasitas dasar pelaku industri Penguatan pondasi sektor perdagangan

- m. Penguatan ekosistem investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif
- n. Penguatan kolaborasi multipihak dalam pembangunan ekonomi
- o. Penguatan akses layanan jasa keuangan masyarakat, terutama untuk petani, pelaku UMKM, dan komunitas, guna mendorong ekonomi yang merata dan inklusif.
- p. Penguatan kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam
- q. Penguatan upaya pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan
- r. Peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM
- s. Penguatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik penguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air.
- t. Penguatan integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral lainnya
- u. Penguatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
- v. Penguatan lembaga dan kapasitas institusi penanggulangan bencana serta kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
- w. Penguatan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat dengan peningkatan peran satlinmas, tokoh agama, dan pemuda
- x. Penguatan kondusivitas dan stabilitas wilayah.

4. Penguatan Landasan Pembentukan Masyarakat yang Sejahtera

- a. Penyiapan transformasi desa melalui penyediaan akses pelayanan dasar yang merata dan inklusif.
- b. Pembentukan klaster ekonomi berbasis desa yang mengoptimalkan potensi lokal

- c. Mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar menjadi penggerak ekonomi lokal.
- d. Penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- e. Penguatan peran masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM
- f. Penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan profesionalisme aparatur desa.
- g. Pemberdayaan masyarakat desa melalui program kewirausahaan dan ekonomi lokal
- h. Penyediaan jaminan sosial bagi lansia, difabel, dan keluarga miskin
- i. Penguatan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial
- j. Memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin.
- k. Penguatan produktivitas tenaga kerja.
- l. Penguatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal
- m. Pemetaan kompetensi tenaga kerja pada sektor unggulan yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan penguatan kapasitas lembaga pelatihan dan kualitas instruktur.
- n. Peningkatan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa
- o. Peningkatan konektivitas digital di seluruh wilayah Sragen untuk memudahkan akses informasi, pendidikan, dan pelayanan publik secara online
- p. Penguatan Sistem Pendataan dan Basis Data Terpadu kemiskinan berbasis spasial/desa.
- q. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- r. Penguatan Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat Desa

B. Arah Kebijakan Tahun 2027

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2027 Fokus diarahkan pada **“Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ditopang SDM unggul, tata kelola dinamis**

dan pembangunan wilayah terintegrasi”. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut melalui:

1. Pengembangan UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui akses pembiayaan, pemasaran digital, dan pendampingan.
2. Mendorong investasi yang ramah lingkungan dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja lokal.
3. Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah
4. Mengembangkan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal seperti pertanian modern, pariwisata berkelanjutan, dan industri pengolahan.
5. Peningkatan daya tarik pariwisata berbasis karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga
6. Penguatan Sumber Daya Manusia Unggul melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk memperkuat daya saing tenaga kerja.
7. Memperkuat literasi digital, kewirausahaan, dan soft skills bagi angkatan kerja muda.
8. Mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis digital (e-government) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.
9. Memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan evidence-based policy.
10. Mendorong pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Pada tahap kedua ini juga diarahkan untuk **“Sragen yang berkelanjutan”** dalam dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya

- a. Pemerataan peningkatan sarana prasarana sekolah
- b. Peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penguasaan teknologi digital dan penyusunan media pembelajaran interaktif
- c. Peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi

- d. Peningkatan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan melalui pemerataan layanan pendidikan, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
- e. Peningkatan kualitas data dan pemetaan objek budaya lokal Sragen, termasuk tradisi, situs sejarah, dan kesenian
- f. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan seperti sanggar seni, balai budaya, dan ruang kreatif untuk generasi muda
- g. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan primer dan lanjutan
- h. Peningkatan kompetensi SDM kesehatan
- i. Peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- j. Peningkatan akses layanan kesehatan primer dan lanjutan di wilayah pinggiran dan perdesaan Sragen
- k. Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi dan berbasis digital
- l. peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter SDM
- m. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan
- n. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
- o. Peningkatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar stakeholder, pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat;
- p. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
- q. Peningkatan pembangunan berbasis gender
- r. Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
- s. Peningkatan ketahanan keluarga

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif

- a. Peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat secara daring dan terintegrasi dan optimalisasi pelayanan hingga tingkat kecamatan/desa.

- b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja, riset dan manajemen risiko berbasis kinerja serta integritas
- c. Peningkatan tata kelola data yang terintegrasi dan berbasis sistem informasi.
- d. Penguatan ekosistem riset dan inovasi pada sektor unggulan daerah serta penguatan kolaborasi riset dan inovasi.
- e. Peningkatan kualitas manajemen ASN, asesmen kinerja dan kompetensi ASN sebagai dasar distribusi dan rotasi jabatan berbasis kebutuhan.
- f. Peningkatan kapasitas aparatur berbasis gap analysis antara kompetensi yang dimiliki dan kompetensi yang dibutuhkan, disertai nilai-nilai etika dan integritas
- g. Pemanfaatan teknologi dalam meminimalisir celah korupsi dan memperkuat akuntabilitas kinerja
- h. Peningkatan integritas dan peran partai politik dalam memperkuat demokrasi lokal dan pembangunan berkelanjutan.
- i. Penguatan penyusunan kebijakan daerah berbasis analisis hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan aspirasi warga
- j. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi digitalisasi pajak dan retribusi serta pengelolaan aset daerah.
- k. Peningkatan kualitas kapasitas fiskal dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kualitas belanja daerah.
- l. Pemanfaatan dashboard monitoring kinerja dan keuangan yang real-time untuk mempercepat respons pengambilan Keputusan
- m. Eksplorasi pembiayaan kreatif seperti kerjasama publik-swasta, social finance, dan pendanaan berbasis hasil
- n. Peningkatan kualitas kelembagaan yang efektif dan berdaya saing
- o. Penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; serta mendorong inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- p. Peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan

- q. Peningkatan kualitas aparatur daerah melalui pelatihan etika pelayanan publik, inovasi, dan keterbukaan informasi.

3. Peningkatan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

- a. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal;
- b. Peningkatan produktivitas sektor perdagangan
- c. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif
- d. Peningkatan ekosistem investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif
- e. Peningkatan kolaborasi multipihak dalam pembangunan ekonomi
- f. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah
- g. Peningkatan kerja sama dan pengembangan potensi pariwisata.
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah.
- i. Peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM)
- j. Peningkatan daya saing wirausaha baru
- k. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk unggulan daerah
- l. Peningkatan pertumbuhan penanaman modal
- m. Pengembangan pariwisata sebagai motor ekonomi inklusif berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat seperti Situs Sangiran, Gunung Kemukus, Waduk Kedung Ombo, Desa Wisata Batik dan lainnya
- n. Penguatan digitalisasi sektor pariwisata untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta peningkatan daya saing destinasi
- o. Penguatan identitas destinasi wisata Sragen
- p. Peningkatan sinergi antar pelaku usaha, pemerintah, dan komunitas dalam tata kelola destinasi
- q. Penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan UMKM

- r. Peningkatan aksesibilitas menuju Sangiran dan integrasi dengan jalur wisata Solo–Karanganyar–Sragen untuk memperkuat kunjungan lintas daerah
- s. Digitalisasi promosi dan manajemen pariwisata melalui integrasi platform reservasi, informasi destinasi, dan media promosi digital
- t. Diversifikasi ekonomi lokal, UMKM halal, dan digitalisasi sistem keuangan
- u. Peningkatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital
- v. Penguatan kemitraan strategis dengan kampus melalui program magang mahasiswa, pelatihan SDM desa wisata (content creator), serta pendampingan tata kelola destinasi dan usaha pariwisata
- w. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui penguatan tata kelola persampahan dan pencegahan pencemaran.
- x. Peningkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik penguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air.
- y. Penguatan integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral lainnya
- z. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
- aa. Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku
- bb. Peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- cc. Peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
- dd. Penguatan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat dengan peningkatan peran satlinmas, tokoh agama, dan pemuda
- ee. Peningkatan kondusivitas dan stabilitas wilayah melalui sinergitas lintas daerah, pemetaan daerah rawan, penegakan hukum daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban

4. Peningkatan masyarakat yang sejahtera

- a. Peningkatan akses pelayanan dasar untuk mewujudkan transformasi desa.

- b. Peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Peningkatan kualitas tata kelola dan kompetensi SDM Lembaga desa
- d. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan
- e. Peningkatan peran masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM
- f. Peningkatan profesionalisme aparatur desa melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, dan sertifikasi.
- g. Peningkatan penyediaan jaminan sosial bagi lansia, difabel, dan keluarga miskin
- h. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- i. Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- j. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja
- k. Pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa
- l. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas digital di seluruh wilayah Sragen untuk memudahkan akses informasi, pendidikan, dan pelayanan publik secara online
- m. Peningkatan Sistem Pendataan dan Basis Data Terpadu kemiskinan berbasis spasial/desa.
- n. Integrasi Data Sosial dengan Perencanaan Pembangunan
- o. Integrasi Program Lintas Perangkat Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan pengembangan inovasi desa sesuai potensi lokal.
- p. Mendorong inovasi desa sesuai potensi lokal.
- q. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- r. Peningkatan Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat Desa

C. Arah Kebijakan Tahun 2028

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2028 Fokus diarahkan pada **“Peningkatan Pemerataan Ekonomi yang ditopang pelayanan dasar berkualitas tata kelola inklusif dan**

pemerataan infrastruktur". Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut melalui:

1. Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM pada sektor-sektor unggulan daerah yang berorientasi pada pemerataan pendapatan, peningkatan akses pasar bagi pelaku UMKM, serta pengembangan ekonomi lokal yang berbasis potensi desa.
2. Percepatan dan pemerataan kinerja produktivitas sektor- sektor unggulan daerah yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, koperasi dan UMKM, pertanian
3. Penguatan UMKM dan ekonomi lokal melalui akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan pemasaran.
4. Peningkatan dan pemerataan Pelayanan Dasar Berkualitas
 - a. Pendidikan: peningkatan mutu guru, penyediaan sarana prasarana sekolah yang merata, dan pemerataan akses Pendidikan.
 - b. Kesehatan: penguatan layanan puskesmas dan rumah sakit, pemerataan tenaga medis, dan peningkatan layanan Kesehatan.
 - c. Air bersih & sanitasi: perluasan jaringan air minum, pembangunan sarana sanitasi layak, dan pengelolaan lingkungan yang sehat.
5. Transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik.
6. Penguatan lembaga desa/kelurahan agar mampu mengelola potensi lokal secara berkelanjutan.
7. Kebijakan pro-kelompok rentan yang memastikan penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok miskin mendapat prioritas layanan.
8. Pembangunan infrastruktur dasar secara merata dan berkelanjutan.
9. Mendorong keberlanjutan pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Pada tahap ketiga ini juga diarahkan untuk **"Sragen yang Merata"** dalam dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Akselerasi Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya

- a. Pemerataan prasarana pendidikan di wilayah minim layanan, terutama di kecamatan pinggiran dan desa terpencil.
- b. Peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran digital dan platform pembelajaran daring untuk memperluas akses dan kualitas pembelajaran.
- c. Peningkatan kualitas manajemen sekolah melalui penguatan tata kelola kelembagaan, kepemimpinan instruksional, dan pengembangan budaya kerja kolaboratif.
- d. Dukungan terhadap sekolah inklusi dan ramah anak untuk menjamin hak pendidikan bagi semua, termasuk anak berkebutuhan khusus
- e. Pemerataan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan, baik layanan primer maupun lanjutan, terutama di wilayah yang masih terbatas aksesnya
- f. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk SDM kesehatan cadangan
- g. Penguatan sistem distribusi tenaga kesehatan agar lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan wilayah
- h. Peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- i. Pengelolaan dan pemanfaatan data kebudayaan untuk mendukung pengembangan kebijakan pelestarian budaya yang berbasis bukti
- j. Pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan seperti sanggar seni, balai budaya, dan ruang kreatif untuk generasi muda
- k. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter SDM yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya
- l. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan
- m. Optimalisasi peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
- n. Pemerataan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan ke seluruh wilayah
- o. Peningkatan pembangunan berbasis gender

- p. Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
- q. Peningkatan ketahanan keluarga

2. Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif

- a. Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi tinggi dan terintegrasi dengan digital service center untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan Masyarakat
- b. Peningkatan kualitas keselarasan perencanaan berbasis kinerja, risiko, dan riset, terutama dalam menyusun program-program pembangunan desa dan Kawasan
- c. Penguatan perlindungan dan penegakan disiplin ASN dengan tetap menjamin kesejahteraan dan meningkatkan budaya kerja berbasis kinerja serta integritas
- d. Peningkatan kepatuhan pengawasan dan pengendalian berbasis risiko yang berorientasi kinerja
- e. Penguatan analisis evaluasi produk hukum daerah, termasuk pengawasan implementasinya dan pemutakhiran jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH)
- f. Penguatan integritas dan peran partai politik dalam pendidikan politik dan konsolidasi demokrasi.
- g. Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreartif daerah.
- h. Peningkatan kualitas belanja daerah yang pro-rakyat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan
- i. Penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif.
- j. Peningkatan kulaitas kelembagaan yang efektif dan berdaya saing
- k. Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta penguatan keamanan dan pemanfaatan data kependudukan.
- l. Peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi kearsipan.

3. Akselerasi Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

- a. Akselerasi produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal;
- b. Akselerasi produktivitas sektor perdagangan

- c. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif
- d. Akselerasi penguatan pertumbuhan penanaman modal
- e. Pengembangan kolaborasi multipihak dalam pembangunan ekonomi
- f. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah
- g. Pengembangan potensi dan kerja sama pariwisata.
- h. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas keterhubungan antar daerah.
- i. Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan koperasi sehat, pembubaran koperasi tidak aktif, dan penguatan sistem manajemen berbasis akuntabilitas dan transparansi
- j. Peningkatan integrasi koperasi dengan industri dan UMKM dengan koperasi sebagai agregator produksi, distribusi, hingga pembiayaan
- k. Konsolidasi koperasi sektor strategis seperti koperasi pangan, koperasi petani, koperasi pekerja, dan koperasi pariwisata
- l. Optimalisasi potensi lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan darat, serta kerajinan rakyat dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi
- m. Pengembangan akses jalan produksi, pasar desa, dan balai ekonomi desa sebagai simpul kegiatan ekonomi produktif
- n. Diversifikasi produk berbasis potensi lokal dan riset terapan dari perguruan tinggi.
- o. Penguatan hilirisasi sektor pertanian dan pangan, seperti pengolahan padi, jagung, cabai, dan hortikultura menjadi produk turunan siap konsumsi (kemasan/olahan)
- p. Peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
- q. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui penguatan tata kelola persampahan dan pencegahan pencemaran.
- r. Pengarusutamaan ekonomi sirkular dengan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam daur ulang limbah,

serta pengembangan ekosistem pasar hijau berbasis produk daur ulang

- s. Akselerasi kawasan industri terpadu skala kabupaten, dengan dukungan infrastruktur dasar, layanan perizinan terpadu, dan konektivitas logistik
- t. Penguatan keterkaitan hulu-hilir antara sektor pertanian dan industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk local
- u. Penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi energi dalam proses produksi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan
- v. Peninkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik

enguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air.
- w. Peningkatan integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral lainnya
- x. Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku
- y. Peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- z. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
- aa. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
- bb. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat dengan peningkatan peran satlinmas, tokoh agama, dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- cc. Peningkatan kondusivitas dan stabilitas wilayah melalui Penguatan sinergi lintas daerah, pemetaan daerah rawan, penegakan hukum daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban

4. Akselerasi Masyarakat yang Sejahtera

- a. Akselerasi peningkatan akses pelayanan dasar untuk mewujudkan transformasi desa.

- b. Akselerasi manajerial dan digitalisasi pengelolaan BUMDes agar mampu mengelola potensi ekonomi lokal secara profesional dan transparan
- c. Pengembangan unit usaha berbasis produk unggulan desa dan teknologi tepat guna
- d. Peningkatan kualitas kelembagaan BUMDesma sebagai jejaring ekonomi antar desa dalam satu kawasan (misal: Kawasan Sragen Timur/Selatan)
- e. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
- f. Pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- g. Akselerasi perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin.
- h. Akselerasi produktivitas tenaga kerja.
- i. Perluasan dan pemerataan cakupan bantuan sosial berbasis data kemiskinan terpadu (DTKS) untuk kelompok rentan: lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan anak
- j. Peningkatan akses pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha dan vokasi bagi masyarakat miskin dan perempuan, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan
- k. Pengembangan rumah data kemiskinan desa dan dashboard monitoring kesejahteraan berbasis spasial
- l. Integrasi Data Sosial dengan Perencanaan Pembangunan dan Perumusan Kebijakan
- m. Peningkatan Integrasi Program Lintas Perangkat Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan
- n. Pengembangan inovasi desa sesuai potensi lokal.
- o. Peningkatan Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat Desa

D. Arah Kebijakan Tahun 2029

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2029 Fokus diarahkan pada **“Menjadi Episentrum ekonomi yang ditopang SDM berkarakter, tata kelola inovatif dan berdaya saing serta infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan”**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut melalui:

1. Pemantapan sektor unggulan industri pengolahan, pertanian modern, pariwisata berkelanjutan yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
2. Pemantapan sektor pariwisata untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta peningkatan daya saing destinasi wisata.
3. Pemantapan UMKM dan koperasi melalui akses pembiayaan, teknologi, dan pasar.
4. Pemantapan Sumber Daya Manusia Berkarakter melalui Peningkatan kualitas Pendidikan, penguatan literasi digital dan penguatan karakter berbasis nilai-nilai lokal akan diintegrasikan untuk menghasilkan generasi yang siap bersaing di era global.
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berdaya saing
 - a. Reformasi birokrasi berkelanjutan dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik berbasis digital.
 - b. akselerasi ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas.
 - c. Penerapan sistem pemerintahan inovatif dan adaptif yang berorientasi pada pelayanan publik prima
6. Pemerataan Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan difokuskan pada keberlanjutan fungsi infrastruktur yang sudah dibangun, perawatan berkala, dan pengembangan fasilitas baru yang ramah lingkungan.

Pada tahap keempat ini juga diarahkan untuk **“Sragen yang Maju dan Sejahtera”** dalam dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Pemantapan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya

- a. Pemantapan prasarana pendidikan di wilayah minim layanan, terutama di kecamatan pinggiran dan desa terpencil.
- b. Pemantapan Mutu Pendidikan Berbasis Literasi dan Numerasi
- c. Pemantapan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran digital dan platform pembelajaran daring untuk memperluas akses dan kualitas pembelajaran.

- d. Pemantapan kualitas manajemen sekolah melalui penguatan tata kelola kelembagaan, kepemimpinan instruksional, dan pengembangan budaya kerja kolaboratif.
- e. Peningkatan sekolah inklusi dan ramah anak untuk menjamin hak pendidikan bagi semua, termasuk anak berkebutuhan khusus
- f. Pemantapan prasarana dan sarana kesehatan, baik layanan primer maupun lanjutan, terutama di wilayah yang masih terbatas aksesnya
- g. Pemantapan sistem distribusi tenaga kesehatan agar lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan wilayah
- h. Peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- i. Pemantapan Sistem Kesehatan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi
- j. j Modernisasi peralatan layanan primer dan lanjutan, serta peningkatan kompetensi tenaga medis di wilayah terpencil
- k. Peningkatan Cakupan Pembiayaan Kesehatan Milik Pemerintah dan Swasta
- l. Penguatan Jejaring Pelayanan Kesehatan Daerah dan Nasional
- m. Optiumalisasi Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya
- n. Peningkatan Peran SDM dan Lembaga Kebudayaan dalam Pemajuan Kebudayaan
- o. Penguatan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan
- p. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, pemerataan sarpras olahraga masyarakat, peningkatan kualitas SDM keolahragaan, peningkatan pembinaan atlet potensial;
- q. Peningkatan ekosistem literasi masyarakat melalui pemantapan sarpras literasi dan kualitas SDM perpustakaan yang berdaya saing
- r. Peningkatan daya saing pemuda.
- s. Penguatan pembangunan berbasis gender
- t. Penguatan Peran Perempuan dalam pembangunan.
- u. Peningkatan perlindungan terhadap hak Anak.
- v. Penguatan ketahanan keluarga

2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif

- a. Pemantapan Layanan Publik Cepat Tanggap dan Inklusif
- b. Penerapan big data planning, pemodelan spasial, dan pendekatan foresight dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah
- c. Pemantapan eformasi manajemen ASN melalui mutasi dan promosi berbasis kinerja, kompetensi, dan integritas
- d. Penyediaan akses self-learning platform dan pelatihan berbasis kebutuhan unit kerja
- e. Pemantapan Sistem Pengawasan dan Pencegahan Korupsi
- f. Penyusunan kebijakan berbasis regulatory impact analysis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan efisiensi birokrasi
- g. Pemantapan penataan kelembagaan berbasis fungsi dan beban kerja serta penerapan governance framework yang kuat
- h. Peningkatan Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Daerah
- i. Perluasan Akses Layanan Jasa Keuangan Masyarakat
- j. Pemantapan peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta penguatan keamanan dan pemanfaatan data kependudukan.
- k. Pemantapan kualitas pengelolaan digitalisasi kearsipan.

3. Pemantapan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

- a. Pemantapan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal;
- b. Pemantapan produktivitas sektor perdagangan
- c. Pemantapan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif
- d. Optimalisasi pertumbuhan penanaman modal
- e. Pemantapan kolaborasi multipihak dalam pembangunan ekonomi
- f. Pemantapan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah

- g. Pemantapan potensi dan kerja sama pariwisata.
- h. Pemertaaan infrastruktur dan aksesibilitas keterhubungan antar daerah.
- i. Optimalisasi kelembagaan koperasi melalui pembinaan koperasi sehat, pembubaran koperasi tidak aktif, dan penguatan sistem manajemen berbasis akuntabilitas dan transparansi
- j. Optimalisasi integrasi koperasi dengan industri dan UMKM dengan koperasi sebagai agregator produksi, distribusi, hingga pembiayaan
- k. Pemantapan potensi lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan darat, serta kerajinan rakyat dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi
- l. Pemantapan hilirisasi sektor pertanian dan pangan, seperti pengolahan padi, jagung, cabai, dan hortikultura menjadi produk turunan siap konsumsi (kemasan/olahan)
- m. Pemantapan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis Kawasan
- n. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui penguatan tata kelola persampahan dan pencegahan pencemaran.
- o. Optimalisasi kawasan industri terpadu skala kabupaten, dengan dukungan infrastruktur dasar, layanan perizinan terpadu, dan konektivitas logistik
- p. Penguatan keterkaitan hulu-hilir antara sektor pertanian dan industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk local
- q. Penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi energi dalam proses produksi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan
- r. pengembangan infrastruktur hijau dan adaptif terhadap perubahan iklim;
- s. Optimalisasi integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral lainnya
- t. Pemerataan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku
- u. Optimalisasi pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

- v. Pemerataan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
- w. Pemantapan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
- x. Pemantapan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat dengan peningkatan peran satlinmas, tokoh agama, dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- y. Peningkatan kondusivitas dan stabilitas wilayah melalui Penguatan sinergi lintas daerah, pemetaan daerah rawan, penegakan hukum daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban

4. Pemantapan Masyarakat yang Sejahtera

- a. Pemantapan akses pelayanan dasar untuk mewujudkan transformasi desa.
- b. Pemantapan manajerial dan digitalisasi pengelolaan BUMDes agar mampu mengelola potensi ekonomi lokal secara profesional dan transparan
- c. Peningkatan kompetensi pengelola BUMDes dan pembentukan model bisnis BUMDes yang adaptif terhadap pasar
- d. Pendampingan pelaku ekonomi kreatif di desa dalam mengembangkan produk khas berbasis budaya lokal dan sumber daya desa
- e. Pemantapan kelembagaan BUMDesma sebagai wadah kerjasama antar desa dalam skala ekonomi dan logistik produksi
- f. Pemantapan Perlindungan Sosial Adaptif untuk Kelompok Rentan
- g. Pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
- h. Pemantapan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- i. Pemantapan jaminan sosial bagi lansia, difabel, dan keluarga miskin.
- j. Pemantapan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- k. Integrasi Program Lintas Perangkat Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan

1. Pemantapan Integrasi Program Lintas Perangkat Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan

E. Arah Kebijakan Tahun 2030

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2030 Fokus diarahkan pada **“Terwujudnya Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera dan Merata”**. Pada tahap kelima ini juga **“Perwujudan secara komperhensif”** akan dapat dicapai dengan prioritas daerah meliputi:

1. Perwujudan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya

- a. Sarana dan Prasarana pendidikan minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai penopang kualitas pembelajaran serta mendukung ekosistem pembelajaran yang inovatif, inklusi dan berdaya saing.
- b. Tata kelola pendidikan akuntabel, transparansi dan berorientasi mutu;
- c. Terwujudnya Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan peningkatan akses pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan serta pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
- d. Guru dan tenaga kependidikan berkompeten dan memiliki kapasitas, berintegritas, berkarakter sebagai inovator dan learning facilitator serta penggerak komunitas belajar;
- e. Guru memiliki kompetensi dalam pemanfaatan media pembelajaran digital dan platform pembelajaran daring untuk memperluas akses dan kualitas pembelajaran.
- f. Manajemen sekolah berkualitas dengan tata kelola kelembagaan, kepemimpinan instruksional, dan pengembangan budaya kerja kolaboratif dan berdaya saing.
- g. Perwujudan sekolah inklusi dan ramah anak untuk menjamin hak pendidikan bagi semua, termasuk anak berkebutuhan khusus
- h. Sarana Prasarana kesehatan baik layanan primer maupun lanjutan yang Inklusif.
- i. Sistem distribusi tenaga kesehatan merata dan responsif terhadap kebutuhan wilayah

- j. Kapasitas sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan yang optimal dan inklusif.
- k. Kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merata dan berkeadilan.
- l. Cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang merata
- m. Sistem Kesehatan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi
- n. Jejaring Pelayanan Kesehatan Daerah dan Nasional
- o. Tata kelola kebudayaan dan ketersediaan data/informasi kebudayaan yang berkualitas
- p. Warisan budaya termanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- q. Terciptanya Kerjasama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan
- r. Perwujudan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, pemerataan sarpras olahraga masyarakat, peningkatan kualitas SDM keolahragaan, pembinaan atlet potensial;
- s. Perwujudan ekosistem literasi masyarakat, sarpras literasi dan kualitas SDM perpustakaan yang berdaya saing
- t. Pemuda berdaya saing dan berperan dalam pembangunan.
- u. Perwujudan pembangunan berbasis gender
- v. Perwujudan ketahanan keluarga

2. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif

- a. Pelayanan publik berkualitas prima
- b. Perwujudan kualitas perencanaan berbasis kinerja, risiko dan riset yang berkelanjutan
- c. Perwujudan manajemen ASN berbasis meritokrasi
- d. Perwujudan kompetensi yang mengedepankan profesionalitas dan nilai-nilai integritas
- e. Perwujudan pengawasan dan pengendalian berbasis risiko yang efektif, efisien serta rendah korupsi
- f. Perwujudan Regulasi yang efektif dan tidak tumpang tindih
- g. Perwujudan Kelembagaan daerah maju, berdaya saing dan berkelanjutan
- h. Regulasi yang inklusif, efektif dan berkelanjutan.

- i. Perwujudan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi
- j. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah
- k. Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas
- l. Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan yang berkualitas.
- m. Pengelolaan dan pemanfaatan kearsipan digital yang maju dan handal.

3. Perwujudan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

- a. Perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, berbasis potensi dan sektor unggulan daerah;
- b. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan transparan
- c. Terciptanya kolaborasi multipihak dalam pembangunan ekonomi
- d. Pemantapan infrastruktur dan aksesibilitas keterhubungan antar daerah.
- e. Perwujudan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing
- f. Perwujudan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;)
- g. Perwujudan industri hijau dan efisiensi energi dalam proses produksi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan
- h. Perwujudan infrastruktur hijau dan adaptif terhadap perubahan iklim;
- i. Perwujudan kesesuaian rencana tata ruang dan rencana sektoral lainnya
- j. Perwujudan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan yang merata dan berkeadilan.
- k. Perwujudan Infrastruktur dan aksesibilitas merata dan berkeadilan.
- l. Perwujudan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
- m. Perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat dengan peningkatan peran satlinmas, tokoh agama, dan

- pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
- n. Perwujudan kondusivitas dan stabilitas wilayah melalui Penguatan sinergi lintas daerah, pemetaan daerah rawan, penegakan hukum daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban

4. Perwujudan Masyarakat yang Sejahtera

- a. Perwujudan transformasi Desa.
- b. Perwujudan desa mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat
- c. Perwujudan perlindungan sosial inklusif
- d. Tata Kelola Pemerintahan desa dan berkualitas
- e. Kualitas, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun global.
- f. Tingkat pengangguran menurun dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Tabel 3. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Tahunan Kabupaten Sragen

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
T.1 : Terwujudnya Sragen yang Berdaya Saing dan Maju	Penguatan fondasi ketahanan pangan dalam mendukung perekonomian daerah	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ditopang SDM unggul, tata kelola dinamis dan pembangunan wilayah terintegrasi.	Peningkatan Pemerataan Ekonomi yang ditopang pelayanan dasar berkualitas tata kelola inklusif dan pemerataan infrastruktur	Menjadi episentrum ekonomi yang ditopang SDM berkarakter, tata kelola inovatif dan berdaya saing serta infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan	Terwujudnya Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera dan Merata
T1.S1. Terwujudnya SDM yg berkarakter tangguh, adaptif, dan berbudaya.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya	Akselerasi Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya	Pemantapan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya	Perwujudan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya
	a. Peningkatan sarana prasarana sekolah b. Penguatan kualitas pendidikan berbasis karakter dan kompetensi c. Penguatan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sarpras pendidikan d. Peningkatan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua lapisan Masyarakat e. Penguatan pendidikan karakter dengan meningkatkan kapasitas guru dalam	a. Pemerataan peningkatan sarana prasaran sekolah b. Peningkatan kompetensi guru, khususnya teknologi digital dan penyusunan media pembelajaran interaktif c. Peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi d. Peningkatan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan melalui pemerataan layanan pendidikan, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);	a. Pemerataan prasarana pendidikan di wilayah minim layanan, terutama di kecamatan pinggiran dan desa terpencil. b. Peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran digital dan platform pembelajaran daring untuk memperluas akses dan kualitas pembelajaran. c. Peningkatan kualitas manajemen sekolah melalui penguatan tata kelola kelembagaan, kepemimpinan instruksional, dan pengembangan budaya kerja kolaboratif.	a. Pemantapan prasarana pendidikan di wilayah minim layanan, terutama di kecamatan pinggiran dan desa terpencil. b. Pemantapan Mutu Pendidikan Berbasis Literasi dan Numerasi c. Pemantapan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran digital dan platform pembelajaran daring untuk memperluas akses dan kualitas pembelajaran. d. Pemantapan kualitas manajemen sekolah melalui penguatan tata kelola kelembagaan, kepemimpinan	a. Sarana dan Prasarana pendidikan minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai penopang kualitas pembelajaran serta mendukung ekosistem pembelajaran yang inovatif, inklusi dan berdaya saing. b. Tata kelola pendidikan akuntabel, transparansi dan berorientasi mutu; c. Terwujudnya Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan peningkatan akses pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
	pencegahan serta penanganan bullying f. Penguatan budaya dan identitas lokal Sragen melalui seni dan budaya g. Peningkatan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; h. Penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata i. Pemetaan kebutuhan prasarana dan sarana di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan j. Penguatan kulalitas dan keterampilan kader Kesehatan k. Peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) l. Penguatan sistem informasi kesehatan terintegrasi m. Penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter SDM n. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan	e. Peningkatan kualitas data dan pemetaan objek budaya lokal Sragen, termasuk tradisi, situs sejarah, dan kesenian f. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan seperti sanggar seni, balai budaya, dan ruang kreatif untuk generasi muda g. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan primer dan lanjutan h. Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan i. Peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) j. Peningkatan akses layanan kesehatan primer dan lanjutan di wilayah pinggiran dan perdesaan Sragen k. Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi dan berbasis digital l. peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter SDM m. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta	d. Dukungan terhadap sekolah inklusi dan ramah anak untuk menjamin hak pendidikan bagi semua, termasuk anak berkebutuhan khusus e. Pemerataan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan, baik layanan primer maupun lanjutan, terutama di wilayah yang masih terbatas aksesnya f. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk SDM kesehatan cadangan g. Penguatan sistem distribusi tenaga kesehatan agar lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan wilayah h. Peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) i. Pengelolaan dan pemanfaatan data kebudayaan untuk mendukung pengembangan kebijakan pelestarian budaya yang berbasis bukti	instruksional, dan pengembangan budaya kerja kolaboratif. e. Peningkatan sekolah inklusi dan ramah anak untuk menjamin hak pendidikan bagi semua, termasuk anak berkebutuhan khusus f. Pemantapan prasarana dan sarana kesehatan, baik layanan primer maupun lanjutan, terutama di wilayah yang masih terbatas aksesnya g. Pemantapan sistem distribusi tenaga kesehatan agar lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan wilayah h. Peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) i. Pemantapan Sistem Kesehatan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi j. Modernisasi peralatan layanan primer dan lanjutan, serta peningkatan kompetensi tenaga medis di wilayah terpencil k. Peningkatan Cakupan Pembiayaan Kesehatan	serta pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) d. Guru dan tenaga kependidikan dan berkompeten dan memiliki kapasitas, berintegritas, berkarakter sebagai inovator dan learning facilitator serta penggerak komunitas belajar; e. Guru memiliki kompetensi dalam pemanfaatan media pembelajaran digital dan platform pembelajaran daring untuk memperluas akses dan kualitas pembelajaran. f. Manajemen sekolah berkualitas dengan tata kelola kelembagaan, kepemimpinan instruksional, dan pengembangan budaya kerja kolaboratif dan berdaya saing. g. Perwujudan sekolah inklusi dan ramah anak untuk menjamin hak pendidikan bagi semua, termasuk anak berkebutuhan khusus h. Sarana Prasarana kesehatan baik layanan

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
	sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan o. Penguatan kapasitas pemuda, serta penguatan kewirausahaan pemuda p. Penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat q. Peningkatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar stakeholder, pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat; r. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan s. Penguatan pembangunan berbasis gender t. Penguatan ketahanan keluarga	pemetaan cabang olahraga unggulan n. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan. o. Peningkatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar stakeholder, pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat; p. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan q. Peningkatan pembangunan berbasis gender r. Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak s. Peningkatan ketahanan keluarga	j. Pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan seperti sanggar seni, balai budaya, dan ruang kreatif untuk generasi muda k. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter SDM yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya l. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan m. Optimalisasi peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. n. Pemerataan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan ke seluruh wilayah o. Peningkatan pembangunan berbasis gender p. Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak q. Peningkatan ketahanan keluarga	Milik Pemerintah dan Swasta l. Penguatan Jejaring Pelayanan Kesehatan Daerah dan Nasional m. Optiumalisasi Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya n. Peningkatan Peran SDM dan Lembaga Kebudayaan dalam Pemajuan Kebudayaan o. Penguatan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan p. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, pemerataan sarpras olahraga masyarakat, peningkatan kualitas SDM keolahragaan, peningkatan pembinaan atlet potensial; q. Peningkatan ekosistem literasi masyarakat melalui pemantapan sarpras literasi dan kualitas SDM perpustakaan yang berdaya saing r. Peningkatan daya saing pemuda. s. Penguatan pembangunan berbasis gender	primer maupun lanjutan yang Inklusif. i. Sistem distribusi tenaga kesehatan merata dan responsif terhadap kebutuhan wilayah j. Kapasitas sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan yang optimal dan inklusif. k. Kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merata dan berkeadilan. l. Cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang merata m. Sistem Kesehatan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi n. Jejaring Pelayanan Kesehatan Daerah dan Nasional o. Tata kelola kebudayaan dan ketersediaan data/informasi kebudayaan yang berkualitas p. Warisan budaya termamfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; q. Terciptanya Kerjasama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
				t. Penguatan Peran Perempuan dalam pembangunan. u. Peningkatan perlindungan terhadap hak Anak. v. Penguatan ketahanan keluarga;	r. Perwujudan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, pemerataan sarpras olahraga masyarakat, peningkatan kualitas SDM keolahragaan, pembinaan atlet potensial; s. Perwujudan ekosistem literasi masyarakat, sarpras literasi dan kualitas SDM perpustakaan yang berdaya saing t. Pemuda berdaya saing dan berperan dalam pembangunan. u. Perwujudan pembangunan berbasis gender v. Perwujudan ketahanan keluarga;
T1.S2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif	Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif
	a. Penguatan Pelayanan publik yang merata dan inklusif melalui digitalisasi layanan dan optimalisasi pelayanan berbasis kecamatan/desa.	a. Peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat secara daring dan terintegrasi dan optimalisasi pelayanan	a. Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi tinggi dan terintegrasi dengan digital service center untuk meningkatkan efisiensi dan	a. Pemantapan Layanan Publik Cepat Tanggap dan Inklusif b. Penerapan big data planning, pemodelan spasial, dan pendekatan foresight dalam	a. Pelayanan publik berkualitas prima b. Perwujudan kualitas perencanaan berbasis kinerja, risiko dan riset yang berkelanjutan

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
	b. Penguatan Perencanaan pembangunan berbasis satu data, riset, dan manajemen resiko dengan memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran c. Penguatan meritokrasi melalui pemetaan jabatan berbasis kompetensi dan kinerja, serta peningkatan kualitas data kepegawaian. d. Pemetaan dan pengembangan kompetensi ASN berbasis tujuan pembangunan daerah serta peningkatan integritas birokrasi. e. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, termasuk peningkatan kapabilitas APIP, pemetaan risiko, dan titik rawan korupsi. f. Penguatan integritas dan peran partai politik dalam memperkuat demokrasi lokal dan pembangunan berkelanjutan. g. Penguatan kelembagaan yang	hingga tingkat kecamatan/desa. b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja, riset dan manajemen risiko berbasis kinerja serta integritas c. Peningkatan tata kelola data yang terintegrasi dan berbasis sistem informasi. d. Penguatan ekosistem riset dan inovasi pada sektor unggulan daerah serta penguatan kolaborasi riset dan inovasi. e. Peningkatan kualitas manajemen ASN, asesmen kinerja dan kompetensi ASN sebagai dasar distribusi dan rotasi jabatan berbasis kebutuhan. f. Peningkatan kapasitas aparatur berbasis gap analysis antara kompetensi yang dimiliki dan kompetensi yang dibutuhkan, disertai nilai-nilai etika dan integritas g. Pemanfaatan teknologi dalam meminimalisir celah korupsi dan memperkuat akuntabilitas kinerja h. Peningkatan integritas dan peran partai politik dalam memperkuat demokrasi lokal dan pembangunan berkelanjutan.	aksesibilitas pelayanan Masyarakat b. Peningkatan kualitas keselarasan perencanaan berbasis kinerja, risiko, dan riset, terutama dalam menyusun program-program pembangunan desa dan Kawasan c. Penguatan perlindungan dan penegakan disiplin ASN dengan tetap menjamin kesejahteraan dan meningkatkan budaya kerja berbasis kinerja serta integritas d. Peningkatan kepatuhan pengawasan dan pengendalian berbasis risiko yang berorientasi kinerja e. Penguatan analisis evaluasi produk hukum daerah, termasuk pengawasan implementasinya dan pemutakhiran jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH) f. Penguatan integritas dan peran partai politik dalam pendidikan politik dan konsolidasi demokrasi. g. Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreartif daerah.	penyusunan dokumen perencanaan daerah c. Pemantapan eformasi manajemen ASN melalui mutasi dan promosi berbasis kinerja, kompetensi, dan integritas d. Penyediaan akses self-learning platform dan pelatihan berbasis kebutuhan unit kerja e. Pemantapan Sistem Pengawasan dan Pencegahan Korupsi f. Penyusunan kebijakan berbasis regulatory impact analysis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan efisiensi birokrasi g. Pemantapan penataan kelembagaan berbasis fungsi dan beban kerja serta penerapan governance framework yang kuat h. Peningkatan Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Daerah i. Perluasan Akses Layanan Jasa Keuangan Masyarakat j. Pemantapan peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta	c. Perwujudan manajemen ASN berbasis meritokrasi d. Perwujudan kompetensi yang mengedepankan profesionalitas dan nilai-nilai integritas e. Perwujudan pengawasan dan pengendalian berbasis risiko yang efektif, efisien serta rendah korupsi f. Perwujudan Regulasi yang efektif dan tidak tumpang tindih g. Perwujudan Kelembagaan daerah maju, berdaya saing dan berkelanjutan h. Regulasi yang inklusif, efektif dan berkelanjutan. i. Perwujudan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi j. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah k. Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
	efektif dan berdaya saing h. Penguatan landasan kebijakan berbasis data dan teknologi informasi. i. Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD serta peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja publik. j. Penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; serta mendorong inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. k. Penguatan pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan l. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik	i. Penguatan penyusunan kebijakan daerah berbasis analisis hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan aspirasi warga j. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi digitalisasi pajak dan retribusi serta pengelolaan aset daerah. k. Peningkatan kualitas kapasitas fiskal dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kualitas belanja daerah. l. Pemanfaatan dashboard monitoring kinerja dan keuangan yang real-time untuk mempercepat respons pengambilan Keputusan m. Eksplorasi pembiayaan kreatif seperti kerjasama publik-swasta, social finance, dan pendanaan berbasis hasil n. Peningkatan kualitas kelembagaan yang efektif dan berdaya saing o. Penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; serta mendorong inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	h. Peningkatan kualitas belanja daerah yang pro-rakyat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan i. Penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif, j. Peningkatan kualitas kelembagaan yang efektif dan berdaya saing k. Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta penguatan keamanan dan pemanfaatan data kependudukan. l. Peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi kearsipan.	penguatan keamanan dan pemanfaatan data kependudukan. k. Pemantapan kualitas pengelolaan digitalisasi kearsipan.	perekonomian yang merata dan berkualitas l. Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan yang berkualitas. m. Pengelolaan dan pemanfaatan kearsipan digital yang maju dan handal,

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
		p. Peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan q. Peningkatan kualitas aparatur daerah melalui pelatihan etika pelayanan publik, inovasi, dan keterbukaan informasi			
T1.S3. Terwujudnya perekonomian daerah yg berdaya saing dan berkelanjutan	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Peningkatan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Akselerasi Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Pemantapan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Perwujudan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
	a. Penguatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah b. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan melalui inovasi dan pemanfaatan sumber daya local c. Pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste) dari hulu ke hilir melalui edukasi, regulasi, dan inovasi teknologi pasca-panen d. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan	a. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal; b. Peningkatan produktivitas sektor perdagangan c. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif d. Peningkatan ekosistem investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif e. Peningkatan kolaborasi multipihak dalam pembangunan ekonomi f. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah	a. Akselerasi produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal; b. Akselerasi produktivitas sektor perdagangan c. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif d. Akselerasi penguatan pertumbuhan penanaman modal e. Pengembangan kolaborasi multipihak dalam pembangunan ekonomi f. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai	a. Pemantapan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal; b. Pemantapan produktivitas sektor perdagangan c. Pemantapan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif d. Optimalisasi pertumbuhan penanaman modal e. Pemantapan kolaborasi multipihak dalam pembangunan ekonomi f. Pemantapan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai	a. erwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, berbasis potensi dan sektor unggulan daerah; b. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan transparan c. Terciptanya kolaborasi multipihak dalam pembangunan ekonomi d. Pemantapan infrastruktur dan aksesibilitas keterhubungan antar daerah. e. Perwujudan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing f. Perwujudan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
	(irigasi, embung, konservasi air) untuk menjamin kontinuitas produksi pangan e. Penguatan sistem rantai pasok pangan lokal serta stabilisasi harga melalui penguatan kelembagaan distribusi dan pengawasan pasar f. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah. g. Penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah h. Penguatan sektor pariwisata unggulan daerah i. penguatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) j. Penguatan daya saing dan kapasitas UMKM serta wirausaha baru k. Penguatan nilai tambah dan pemasaran produk unggulan daerah l. Penguatan pondasi sektor industri pengolahan dengan	g. Peningkatan kerja sama dan pengembangan potensi pariwisata. h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah. i. Peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) j. Peningkatan daya saing wirausaha baru k. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk unggulan daerah l. Peningkatan pertumbuhan penanaman modal m. Pengembangan pariwisata sebagai motor ekonomi inklusif berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat seperti Situs Sangiran, Gunung Kemukus, Waduk Kedung Ombo, Desa Wisata Batik dan lainnya n. Penguatan digitalisasi sektor pariwisata untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta peningkatan daya saing destinasi o. Penguatan identitas destinasi wisata Sragen p. Peningkatan sinergi antar pelaku usaha, pemerintah,	tulang punggung ekonomi daerah g. Pengembangan potensi dan kerja sama pariwisata. h. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas keterhubungan antar daerah. i. Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan koperasi sehat, pembubaran koperasi tidak aktif, dan penguatan sistem manajemen berbasis akuntabilitas dan transparansi j. Peningkatan integrasi koperasi dengan industri dan UMKM dengan koperasi sebagai agregator produksi, distribusi, hingga pembiayaan k. Konsolidasi koperasi sektor strategis seperti koperasi pangan, koperasi petani, koperasi pekerja, dan koperasi pariwisata l. Optimalisasi potensi lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan darat, serta kerajinan rakyat dengan	tulang punggung ekonomi daerah g. Pemantapan potensi dan kerja sama pariwisata. h. Pemertaaan infrastruktur dan aksesibilitas keterhubungan antar daerah. i. Optimalisasi kelembagaan koperasi melalui pembinaan koperasi sehat, pembubaran koperasi tidak aktif, dan penguatan sistem manajemen berbasis akuntabilitas dan transparansi j. Optimalisasi integrasi koperasi dengan industri dan UMKM dengan koperasi sebagai agregator produksi, distribusi, hingga pembiayaan k. Pemantapan potensi lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan darat, serta kerajinan rakyat dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi l. Pemantapan hilirisasi sektor pertanian dan pangan, seperti pengolahan padi, jagung,	hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;) g. Perwujudan industri hijau dan efisiensi energi dalam proses produksi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan h. Perwujudan infrastruktur hijau dan adaptif terhadap perubahan iklim; i. Perwujudan kesesuaian rencana tata ruang dan rencana sektoral lainnya j. Perwujudan asesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan yang merata dan berkeadilan. k. Perwujudan Infrastruktur dan aksesibilitas merata dan berkeadilan. l. Perwujudan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana; m. Perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat dengan peningkatan peran

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
	pemetaan potensi maupun kelembagaan, dan peningkatan kapasitas dasar pelaku industri Penguatan pondasi sektor perdagangan m. Penguatan ekosistem investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif n. Penguatan kolaborasi multipihak dalam pembangunan ekonomi o. Penguatan akses layanan jasa keuangan masyarakat, terutama untuk petani, pelaku UMKM, dan komunitas, guna mendorong ekonomi yang merata dan inklusif. p. Penguatan kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam q. Penguatan upaya pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan r. Peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM s. Penguatan infrastruktur sanitasi air limbah	dan komunitas dalam tata kelola destinasi q. Penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan UMKM r. Peningkatan aksesibilitas menuju Sangiran dan integrasi dengan jalur wisata Solo–Karanganyar–Sragen untuk memperkuat kunjungan lintas daerah s. Digitalisasi promosi dan manajemen pariwisata melalui integrasi platform reservasi, informasi destinasi, dan media promosi digital t. Diversifikasi ekonomi lokal, UMKM halal, dan digitalisasi sistem keuangan u. Peningkatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital v. Penguatan kemitraan strategis dengan kampus melalui program magang mahasiswa, pelatihan SDM desa wisata (content creator), serta pendampingan tata kelola destinasi dan usaha pariwisata w. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui penguatan tata kelola persampahan dan pencegahan pencemaran.	peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi m. Pengembangan akses jalan produksi, pasar desa, dan balai ekonomi desa sebagai simpul kegiatan ekonomi produktif n. Diversifikasi produk berbasis potensi lokal dan riset terapan dari perguruan tinggi. o. Penguatan hilirisasi sektor pertanian dan pangan, seperti pengolahan padi, jagung, cabai, dan hortikultura menjadi produk turunan siap konsumsi (kemasan/olahan) p. Peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan; q. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui penguatan tata kelola persampahan	cabai, dan hortikultura menjadi produk turunan siap konsumsi (kemasan/olahan) m. Pemantapan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis Kawasan n. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui penguatan tata kelola persampahan dan pencegahan pencemaran. o. Optimalisasi kawasan industri terpadu skala kabupaten, dengan dukungan infrastruktur dasar, layanan perizinan terpadu, dan konektivitas logistik p. Penguatan keterkaitan hulu-hilir antara sektor pertanian dan industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk local q. Penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi energi dalam proses produksi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan	satlinmas, tokoh agama, dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat n. Perwujudan kondusivitas dan stabilitas wilayah melalui Penguatan sinergi lintas daerah, pemetaan daerah rawan, penegakan hukum daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
	domestikenguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air. t. Penguatan integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral lainnya u. Penguatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; v. Penguatan lembaga dan kapasitas institusi penanggulangan bencana serta kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana; w. Penguatan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat dengan peningkatan peran satlinmas, tokoh agama, dan pemuda x. Penguatan kondusivitas dan stabilitas wilayah.	x. Peninkkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestikenguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air. y. Penguatan integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral lainnya z. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan aa. Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku bb. Peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan cc. Peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana; dd. Penguatan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat dengan peningkatan peran satlinmas, tokoh agama, dan pemuda ee. Peningkatan kondusivitas dan stabilitas wilayah melalui sinergita lintas daerah, pemetaan daerah rawan, penegakan hukum	dan pencegahan pencemaran. r. Pengarusutamaan ekonomi sirkular dengan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam daur ulang limbah, serta pengembangan ekosistem pasar hijau berbasis produk daur ulang s. Akselerasi kawasan industri terpadu skala kabupaten, dengan dukungan infrastruktur dasar, layanan perizinan terpadu, dan konektivitas logistik t. Penguatan keterkaitan hulu-hilir antara sektor pertanian dan industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk local u. Penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi energi dalam proses produksi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan v. Peninkkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestikenguatan infrastruktur akses air	r. pengembangan infrastruktur hijau dan adaptif terhadap perubahan iklim; s. Optimalisasi integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral lainnya t. Pemerataan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku u. Optimalisasi pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan v. Pemerataan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; w. Pemantapan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana; x. Pemantapan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat dengan peningkatan peran satlinmas, tokoh agama, dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; y. Peningkatan kondusivitas dan stabilitas wilayah melalui Penguatan	

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
		daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban.	minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air. w. Peningkatan integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral lainnya x. Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku y. Peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan z. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; aa. Peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana; bb. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat dengan peningkatan peran satlinmas, tokoh agama, dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;	sinergi lintas daerah, pemetaan daerah rawan, penegakan hukum daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban;	

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
			cc. Peningkatan kondusivitas dan stabilitas wilayah melalui Penguatan sinergi lintas daerah, pemetaan daerah rawan, penegakan hukum daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban;		
T.2 : Terwujudnya Sragen yang Sejahtera dan Merata	Penguatan fondasi ketahanan pangan dalam mendukung perekonomian daerah	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ditopang SDM unggul, tata kelola dinamis dan pembangunan wilayah terintegrasi.	Peningkatan Pemerataan Ekonomi yang ditopang pelayanan dasar berkualitas tata kelola inklusif dan pemerataan infrastruktur	Menjadi episentrum ekonomi yang ditopang SDM berkarakter, tata kelola inovatif dan berdaya saing serta infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan	Terwujudnya Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera dan Merata
T2.S1. Terwujudnya Masyarakat yang semakin sejahtera	Penguatan Landasan Pembentukan Masyarakat yang Sejahtera	Peningkatan masyarakat yang sejahtera	Akselerasi Masyarakat yang Sejahtera	Pemantapan Masyarakat yang Sejahtera	Perwujudan Masyarakat yang Sejahtera
	a. Penyiapan transformasi desa melalui penyediaan akses pelayanan dasar yang merata dan inklusif. b. Pembentukan klaster ekonomi berbasis desa yang mengoptimalkan potensi lokal c. Mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar menjadi penggerak ekonomi lokal.	a. Peningkatan akses pelayanan dasar untuk mewujudkan transformasi desa. b. Peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa c. Peningkatan kualitas tata kelola dan kompetensi SDM Lembaga desa d. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan	a. Akselerasi peningkatan akses pelayanan dasar untuk mewujudkan transformasi desa. b. Akselerasi manajerial dan digitalisasi pengelolaan BUMDes agar mampu mengelola potensi ekonomi lokal secara profesional dan transparan c. Pengembangan unit usaha berbasis produk unggulan desa dan teknologi tepat guna	a. Pemantapan akses pelayanan dasar untuk mewujudkan transformasi desa. b. Pemantapan manajerial dan digitalisasi pengelolaan BUMDes agar mampu mengelola potensi ekonomi lokal secara profesional dan transparan c. Peningkatan kompetensi pengelola BUMDes dan pembentukan model	a. Perwujudan transformasi Desa. b. Perwujudan desa mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat c. Perwujudan perlindungan sosial inklusif d. Tata Kelola Pemerintahan desa dan berkualitas

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
	d. Penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan; e. Penguatan peran masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM f. Penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan profesionalisme aparatur desa. g. Pemberdayaan masyarakat desa melalui program kewirausahaan dan ekonomi lokal h. Penyediaan jaminan sosial bagi lansia, difabel, dan keluarga miskin i. Penguatan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial j. Memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin.	e. Peningkatan peran masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM f. Peningkatan profesionalisme aparatur desa melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, dan sertifikasi. g. Peningkatan penyediaan jaminan sosial bagi lansia, difabel, dan keluarga miskin h. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. i. Peningkatan produktivitas tenaga kerja. j. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja k. Pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa l. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas digital di seluruh wilayah Sragen untuk memudahkan akses informasi, pendidikan, dan pelayanan publik secara online	d. Peningkatan kualitas kelembagaan BUMDesma sebagai jejaring ekonomi antar desa dalam satu kawasan (misal: Kawasan Sragen Timur/Selatan) e. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. f. Pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. g. Akselerasi perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin. h. Akselerasi produktivitas tenaga kerja. i. Perluasan dan pemerataan cakupan bantuan sosial berbasis data kemiskinan terpadu (DTKS) untuk kelompok rentan: lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan anak j. Peningkatan akses pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha dan vokasi bagi masyarakat miskin dan perempuan, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan	bisnis BUMDes yang adaptif terhadap pasar d. Pendampingan pelaku ekonomi kreatif di desa dalam mengembangkan produk khas berbasis budaya lokal dan sumber daya desa e. Pemantapan kelembagaan BUMDesma sebagai wadah kerjasama antar desa dalam skala ekonomi dan logistik produksi f. Pemantapan Perlindungan Sosial Adaptif untuk Kelompok Rentan g. Pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan desa. h. Pemantapan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. i. Pemantapan jaminan sosial bagi lansia, difabel, dan keluarga miskin. j. Pemantapan peningkatan produktivitas tenaga kerja. k. Integrasi Program Lintas Perangkat Daerah dalam	e. Kualitas, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun global. f. Tingkat pengangguran menurun dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
	k. Penguatan produktivitas tenaga kerja. l. Penguatan kualitas dan daya saing tenaga kerja local m. Pemetaan kompetensi tenaga kerja pada sektor unggulan yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan penguatan kapasitas lembaga pelatihan dan kualitas instruktur. n. Peningkatan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa o. Peningkatan konektivitas digital di seluruh wilayah Sragen untuk memudahkan akses informasi, pendidikan, dan pelayanan publik secara online p. Penguatan Sistem Pendataan dan Basis Data Terpadu kemiskinan berbasis spasial/desa. q. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan,	m. Peningkatan Sistem Pendataan dan Basis Data Terpadu kemiskinan berbasis spasial/desa. n. Integrasi Data Sosial dengan Perencanaan Pembangunan o. Integrasi Program Lintas Perangkat Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan pengembangan inovasi desa sesuai potensi lokal. p. Mendorong inovasi desa sesuai potensi lokal. q. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. r. Peningkatan Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat Desa	k. Pengembangan rumah data kemiskinan desa dan dashboard monitoring kesejahteraan berbasis spasial l. Integrasi Data Sosial dengan Perencanaan Pembangunan dan Perumusan Kebijakan m. Peningkatan Integrasi Program Lintas Perangkat Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan n. Pengembangan inovasi desa sesuai potensi lokal. o. Peningkatan Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat Desa	Pengentasan Kemiskinan 1. Pemantapan Integrasi Program Lintas Perangkat Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan	

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
	pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. q. Penguatan Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat Desa				
Fokus Tematik	1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, peternakan, pangan, kehutanan, dan perikanan 2. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pendukung pertanian. 3. Diversifikasi Pangan dan Pertanian 4. Penguatan Kelembagaan Petani dan Kemitraan 5. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 6. Penguatan peran lembaga perekonomian desadalam mendukung ketahanan pangan desa 7. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi	1. Pengembangan UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui akses pembiayaan, pemasaran digital, dan pendampingan. 2. Mendorong investasi yang ramah lingkungan dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja lokal. 3. Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah 4. Mengembangkan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal seperti pertanian modern, pariwisata berkelanjutan, dan industri pengolahan. 5. Peningkatan daya tarik pariwisata berbasis karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga 6. Penguatan Sumber Daya Manusia Unggul melalui pelatihan berbasis	1. Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM pada sektor-sektor unggulan daerah yang berorientasi pada pemerataan pendapatan, peningkatan akses pasar bagi pelaku UMKM, serta pengembangan ekonomi lokal yang berbasis potensi desa. 2. Percepatan dan pemerataan kinerja produktivitas sektor-sektor unggulan daerah yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, koperasi dan UMKM, pertanian 3. Penguatan UMKM dan ekonomi lokal melalui akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan pemasaran. 4. Peningkatan dan pemerataan Pelayanan Dasar Berkualitas a. Pendidikan: peningkatan mutu	1. Pemantapan sektor unggulan industri pengolahan, pertanian modern, pariwisata berkelanjutan yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Pemantapan sektor pariwisata untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta peningkatan daya saing destinasi wisata. 3. Pemantapan UMKM dan koperasi melalui akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. 4. Pemantapan Sumber Daya Manusia Berkarakter melalui Peningkatan kualitas Pendidikan, penguatan literasi digital dan penguatan karakter berbasis nilai-nilai lokal akan diintegrasikan untuk menghasilkan generasi yang siap bersaing di era global.	

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
		kompetensi dan sertifikasi profesi untuk memperkuat daya saing tenaga kerja. 7. Memperkuat literasi digital, kewirausahaan, dan soft skills bagi angkatan kerja muda. 8. Mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis digital (e-government) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. 9. Memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan evidence-based policy. 10. Mendorong pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.	guru, penyediaan sarana prasarana sekolah yang merata, dan pemerataan akses Pendidikan. b. Kesehatan: penguatan layanan puskesmas dan rumah sakit, pemerataan tenaga medis, dan peningkatan layanan Kesehatan. c. Air bersih & sanitasi: perluasan jaringan air minum, pembangunan sarana sanitasi layak, dan pengelolaan lingkungan yang sehat. 5. Transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik. 6. Penguatan lembaga desa/kelurahan agar mampu mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. 7. Kebijakan pro-kelompok rentan yang memastikan penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berdaya saing a. Reformasi birokrasi berkelanjutan dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik berbasis digital. b. akselerasi ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas. c. Penerapan sistem pemerintahan inovatif dan adaptif yang berorientasi pada pelayanan publik prima 6. Pemerataan Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan difokuskan pada keberlanjutan fungsi infrastruktur yang sudah dibangun, perawatan berkala, dan pengembangan fasilitas baru yang ramah lingkungan.	

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi Daerah				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
			miskin mendapat prioritas layanan. 8. Pembangunan infrastruktur dasar secara merata dan berkelanjutan. 9. Mendorong keberlanjutan pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.		

Tabel 3. 4 Strategi dan arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.1 : Terwujudnya Sragen yang Berdaya Saing dan Maju	T1.S1. Terwujudnya SDM yg berkarakter tangguh, adaptif, dan berbudaya.	Peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas	a. Pemenuhan Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan peningkatan akses pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan serta pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) b. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS c. Penguatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang, mulai dari PAUD, dasar, menengah hingga pendidikan non formal/kesetaraan d. Perluasan layanan PAUD yang terintegrasi e. Penguatan pendidikan karakter termasuk pencegahan dan penanganan bullying. f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di sekolah negeri dan swasta secara proporsional g. Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya Sragen, termasuk pencegahan dan penanganan bullying h. Percepatan digitalisasi pendidikan terutama di sekolah yang belum terjangkau internet i. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan j. Pengembangan dan penerapan kurikulum adaptif berbasis potensi lokal seperti pertanian, batik, dan budaya tradisional k. Perbaikan tata kelola pendidikan daerah yang berbasis pada data perencanaan dan hasil evaluasi kinerja satuan Pendidikan l. Optimalisasi koordinasi lintas pemerintah dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan Pendidikan m. Penguatan akses pendidikan vokasi untuk peningkatan kompetensi SDM n. Pengembangan sekolah model transformatif, Sekolah Rakyat dan Unggulan o. Optimalisasi peran pendidikan
		Peningkatan pemajuan kebudayaan	a. Peningkatan ekspresi budaya berbasis nilai kearifan lokal dengan optimalisasi perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. b. Peningkatan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kesejahteraan Masyarakat. c. Penguatan tata kelola kebudayaan yang diarahkan pada ketersediaan data/informasi kebudayaan yang berkualitas; dan peningkatan kapasitas lembaga dan SDM kebudayaan. d. Penguatan internalisasi nilai budaya, keagamaan, dan kearifan lokal dengan pendidikan, keluarga maupun masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	a. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara promotif, preventif dan kuratif b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan c. Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia produktif dan lanjut usia, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan zoonosis d. Peningkatan pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria e. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi orang dengan HIV, Tuberkulosis dan malaria f. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit HIV/AIDS g. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian malaria h. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan isu Kesehatan i. Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau j. Pengendalian penduduk dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga k. Penanggulangan gizi makro dan mikro, percepatan permasalahan stunting dan kelebihan gizi l. Peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan/dukungan Universal Health Coverage
		Peningkatan pembangunan berbasis gender	a. Peningkatan pengarusutamaan gender b. Peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan
		Peningkatan ketahanan keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga melalui pengendalian pertumbuhan penduduk yang terencana, seimbang, dan berkelanjutan b. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan bagi Perempuan dan Anak c. Membangun lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya keluarga harmonis, sehat, dan sejahtera.
		Peningkatan budaya literasi	a. Penguatan ekosistem tata kelola literasi yang lebih baik b. Penyusunan regulasi dan kebijakan dukungan budaya literasi c. Penyusunan mekanisme koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi literasi d. Optimalisasi dana CSR dan Filantropi untuk pembudayaan literasi e. Pengarusutamaan literasi dalam kurikulum pendidikan atau pelatihan; f. Promosi dan publikasi literasi g. Penyediaan bahan dan koleksi literasi yang menarik, beragam, adaptif dan terjangkau h. Peningkatan kapasitas SDM perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			i. Pengembangan kerjasama perpustakaan
		Peningkatan daya saing pemuda	a. Peningkatan penyadaran pemuda dalam kewirausahaan; b. Peningkatan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda
		Peningkatan daya saing olahraga dan kebugaran	a. Peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga b. Peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga c. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang mudah murah dan menarik bagi masyarakat d. Penguatan sarana dan prasarana olahraga unggulan e. Pembinaan atlet potensial
	T1.S2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif	Peningkatan birokrasi yang berintegritas, responsif, transparan, dan akuntabel	a. Penguatan Reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah b. Penguatan kolaborasi antar OPD dan stakeholder pembangunan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah. c. Peningkatan akuntabilitas kinerja berbasis perencanaan berkualitas dan manajemen kinerja lintas sector d. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, berbasis risiko serta riset dan inovasi; e. Peningkatan Partisipasi dan Transparansi Publik dalam Perumusan Kebijakan melalui arah kebijakan yaitu peningkatan ruang partisipasi publik yang bermakna dalam pembangunan dan perumusan kebijakan f. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahapan perumusan kebijakan melalui forum konsultasi publik, musrenbang, dan mekanisme partisipatif lainnya. g. Peningkatan kualitas kebijakan daerah h. Optimalisasi mekanisme kolaborasi legislatif dan eksekutif dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. i. Memperkuat transparansi proses perumusan kebijakan dengan penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan tepat waktu j. Membangun budaya kerja aparatur yang berintegritas, melayani, responsif, dan adaptif. k. Pembangunan budaya kerja birokrasi yang dinamis, responsif, dan “work with society” l. Penguatan manajemen ASN berbasis meritokrasi m. Peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			n. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahapan perumusan kebijakan melalui forum konsultasi publik, musrenbang, dan mekanisme partisipatif lainnya. o. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan berbasis digital dan e-government p. Penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi; q. Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan berbasis pemantauan informasi dan data secara real time r. Penguatan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. s. Penataan sistem arsip dinamis dan statis sesuai standar nasional.
		Optimalisasi kapasitas fiskal dan kualitas belanja	a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan PAD dan peningkatan kualitas belanja daerah b. Peningkatan PAD berbasis optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan peningkatan kapasitas BUMD c. Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah
		Penguatan peran kecamatan sebagai simpul integrasi pembangunan lintas sektor	a. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan b. Peningkatan koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berkelanjutan d. Mendorong sinergi antara kecamatan, desa/kelurahan, serta lembaga masyarakat
	T1.S3. Terwujudnya perekonomian daerah yg berdaya saing dan berkelanjutan	Penguatan konektivitas ekonomi daerah	a. Revitalisasi sarana dan prasarana perekonomian, termasuk pasar multipurpose dan logistik desa b. Peningkatan akses jalan produksi, pasar desa, dan balai ekonomi desa sebagai simpul kegiatan produktif c. Pemerataan Pembangunan infrastruktur kawasan industri, pariwisata, dan sentra ekonomi lokal untuk menarik investasi. d. Peningkatan akses internet ke seluruh wilayah e. Peningkatan Kualitas Layanan Perhubungan f. Peningkatan aksesibilitas antarwilayah g. Peningkatan infrastruktur menuju destinasi wisata unggulan untuk memperkuat keterhubungan regional h. Penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi energi dalam pembangunan kawasan industri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan sumber daya alam	a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah b. Mendorong integrasi pengelolaan sampah dari hulu (rumah tangga) hingga hilir (TPA) c. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan RTH yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim d. Peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air; e. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; f. Peningkatan sanitasi aman sarana dan prasarana (IPLT, tangki septik kedap, penyedotan secara berkala) g. Memperkuat pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui pemantauan kualitas lingkungan h. Peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim melalui penguatan implementasi ekonomi hijau dan penurunan intensitas emisi GRK
		Penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah	a. Optimalisasi lumbung pangan daerah dan peningkatan cadangan pangan b. Penguatan cadangan pangan utama, diversifikasi pangan lokal, dan keamanan pangan c. Penguatan sistem informasi pangan untuk mendukung perencanaan berbasis satu data
		Penguatan kelembagaan pangan dan sistem distribusi daerah	a. Penguatan sistem rantai pasok pangan lokal serta stabilisasi harga melalui kelembagaan distribusi b. Peningkatan ketercukupan dan keberlanjutan sumber daya air untuk produksi pangan c. Integrasi kelembagaan pangan desa dengan BUMDes dan koperasi untuk memperkuat distribusi dan harga pangan d. Pemanfaatan potensi pangan lokal untuk mendukung kemandirian dan mengurangi ketergantungan impor e. Penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi energi dalam proses produksi pangan
		Pengembangan kawasan pertanian, Perternakan dan perikanan terpadu dan agroindustri berkelanjutan	a. Revitalisasi sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas (irigasi, embung, konservasi air) b. Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan budidaya c. Hilirisasi pada sektor pertanian (pertanian, perkebunan, peternakan, serta kelautan dan perikanan) d. Pengembangan kawasan pertanian terpadu, agroindustri, dan agrowisata e. Peningkatan daya saing komoditas melalui hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (pascapanen, pengolahan, pengemasan)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penguatan ekosistem UMKM, koperasi, dan industri kecil menengah	a. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta fasilitasi pembentukan koperasi sehat (termasuk Koperasi Merah Putih) b. Penguatan kualitas produk UMKM dari pengolahan sampai pengemasan c. Peningkatan akses permodalan, perizinan, dan marketplace digital untuk UMKM d. Penguatan sentra industri kecil dan menengah serta akselerasi kawasan industri terpadu e. Hilirisasi dan diversifikasi produk lokal berbasis riset dan kemitraan dengan perguruan tinggi f. Integrasi koperasi dengan industri dan UMKM sebagai agregator produksi, distribusi, hingga pembiayaan
		Peningkatan kondusivitas dan stabilitas wilayah	a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban umum. b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan peraturan daerah. c. Penguatan mitigasi bencana serta respon terhadap tanggap darurat bencana dan keselamatan masyarakat d. Memperkuat integritas dan peran partai politik dalam kemajuan demokrasi; e. Penguatan nilai-nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila
		Peningkatan iklim investasi dan akselerasi kawasan industri terpadu	a. Peningkatan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum b. Peningkatan layanan terpadu untuk memudahkan investor masuk ke kawasan industri dan agroindustri c. Peningkatan daya tarik investasi merata di berbagai sektor ekonomi
		Pengembangan pariwisata unggulan berbasis kearifan lokal	a. Revitalisasi destinasi wisata unggulan seperti Sangiran, Gunung Kemukus, Waduk Kedung Ombo, dan Desa Wisata Batik b. Digitalisasi promosi dan manajemen pariwisata melalui integrasi platform reservasi, informasi destinasi, dan media promosi c. Pengembangan pariwisata syariah dan wisata berbasis komunitas desa d. Pengembangan desa wisata e. Peningkatan konektivitas infrastruktur menuju dan sekitar kawasan wisata (jalan, transportasi, logistik) f. Penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya local g. Peningkatan identitas wisata Sragen melalui event budaya, kriya, dan makanan khas h. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			i. Dukungan kebijakan untuk ekonomi syariah dan wisata ramah muslim
T.2 : Terwujudnya Sragen yang Sejahtera dan Merata	T2.S1. Terwujudnya Masyarakat yang semakin sejahtera	Pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial	a. Mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial b. Meningkatkan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan social.
		Perluasan Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja	a. Penguatan sistem informasi pasar kerja (SIPK) b. Memperluas akses pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri. c. Memperluas akses dan kualitas pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. d. Mendorong sertifikasi kompetensi dan pengakuan keterampilan tenaga kerja. e. Menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri kecil, menengah, dan ekonomi kreatif. f. Mendorong investasi padat karya di sektor potensial. g. Memperkuat sinergi pemerintah, swasta, dan UMKM dalam penciptaan lapangan kerja baru.
		Peningkatan kemandirian desa	a. Pemenuhan kebutuhan layanan dasar desa b. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa; c. Peningkatan fasilitas publik desa: pusat perekonomian desa, ruang terbuka hijau, dan fasilitas olahraga d. Peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi unggulan local e. Penguatan peran dan pemberdayaan BUMDes sebagai penggerak ekonomi local f. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara kolaboratif dan multisector g. Pengembangan kawasan pedesaan berbasis potensi tematik yang terintegrasi dengan simpul pertumbuhan ekonomi
		Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia desa	a. Menyediakan program pelatihan kerja dan sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan pasar b. Menyediakan program beasiswa dan magang di luar negeri bagi KK miskin c. Mendorong pengembangan kewirausahaan muda berbasis UMKM dan industri kreatif d. Menumbuhkan sumber penghidupan masyarakat berkelanjutan melalui pelatihan berbasis teknologi dan sektor unggulan daerah
		Transformasi desa miskin	a. Pendampingan transformasi desa miskin dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sanitasi b. Fasilitasi percepatan bantuan sosial dan program perlindungan sosial di tingkat desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			c. Monitoring dan evaluasi langsung pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat d. Meningkatkan kolaborasi stakeholder dalam penyediaan bantuan sosial e. Menyediakan jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan berbasis data terpadu f. Mendorong integrasi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi mikro g. Kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman (air bersih, sanitasi, listrik) h. Sinkronisasi pengentasan kemiskinan desa dan rumah layak huni

3.3.1 Program Unggulan Daerah

Program Unggul daerah dalam dimensi politik berisi program-program politik yang menjadi kesatuan dalam rumusan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program tersebut merupakan janji politik yang harus diwujudkan dan dimulai dengan pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan. Program unggulan Kabupaten Sragen merupakan program unggulan Bupati Sragen dalam lima tahun kedepan yakni tahun 2025-2029, sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Program Program Unggulan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

Program Unggulan	Intervensi Program Unggulan	Nomenklatur Program / Program Prioritas
Pendidikan dan kesehatan universal	1. Perbaikan Sarana dan prasarana Sekolah	Program pengelolaan pendidikan
	2. Seragam Gratis untuk SD dan SMP	
	3. Program Sekolah Unggul (SD dan SMP) sampai ke Desa	
	4. Program Smart Class	
	5. Program Muatan Lokal Sekolah	Program Pengembangan Kurikulum
	6. Beasiswa Perguruan Tinggi dan Perguruan tinggi Vokasi.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
	7. Perluasan pelayanan dan penambahan Armada Bus Sekolah Gratis	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	8. Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	9. Jaminan BPJS bagi RT/RW	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Alokasi Dana Bagi Keagamaan, Olahraga Dan Pengembangan Budaya	Alokasi Dana Bagi Keagamaan, Olahraga Dan Pengembangan Budaya	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Program pengembangan kesenian tradisional
Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Responsif, Adaptif, Inovatif Dan Dinamis	1. Pemberian cuti ayah bagi ASN	Program Kepegawaian Daerah
	2. Sistem kerja work with society bagi ASN	
	3. Peningkatan kesejahteraan pegawai non-ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
	4. Peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5. Transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Revitalisasi Pusat	6. Penyediaan data realtime pembangunan dan Optimalisasi digital pelayanan publik terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	7. Pemerataan akses internet ke seluruh wilayah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	1. Pembangunan Pasar Multi Purpose	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Unggulan	Intervensi Program Unggulan	Nomenklatur Program / Program Prioritas
Perekonomian	2. Digitalisasi marketing	Program Pengembangan UMKM
	3. Sragen ramah investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
	4. Pengembangan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	5. Pengembangan sektor unggulan daerah berbasis potensi daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Sragen Berdikari Pangan	1. Bantuan Benih bagi Petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	2. Pembangunan/Rehabilitasi Bendung dan Embung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi	
	4. Pembangunan Sumur dalam/Sibel bagi Kelompok Tani.	
	5. Revitalisasi Peternakan Milik Pemda di Dusun Klero, Kecamatan Sambirejo	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	6. Optimalisasi Fungsi Lumbung Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
	7. Pengembangan integrated farming system	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
Sragen Super Regency	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan
	2. Penataan fasilitas pelayanan publik dan kawasan sekitar pusat kabupaten, kecamatan dan desa	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	3. Penyusunan Masterplan Beautifikasi Pusat Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	4. Pemerataan akses internet ke seluruh wilayah melalui CSR provider untuk pengembangan sarana utilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	5. Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	6. Pengembangan Kebudayaan sragen	Program Pengembangan Kebudayaan
	7. Pembangunan ruang publik serba guna sebagai sarana berkumpul dan beraktivitas masyarakat dengan fasilitas internet gratis dan ramah disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	8. City branding The Land of Java Man	Program Pemasaran Pariwisata
	9. Pengembangan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	10. Sedulur alam (setiap bayi lahir diberi bibit pohon untuk ditanam)	Program Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	11. Penataan PKL	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Peningkatan	1. Afirmasi Pajak bumi dan bangunan bagi guru Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Unggulan	Intervensi Program Unggulan	Nomenklatur Program / Program Prioritas
Kesejahteraan Bagi Masyarakat Rentan, Tenaga Pendidik Sekolah, Pendidik Agama, Pendidik Pesantren Dan Pengelola Tempat Ibadah	(MBR), pahlawan, masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya	
	2. Bantuan jatah hidup lansia, janda yang punya tanggungan, penyandang disabilitas.	Program Pemberdayaan sosial
		Program perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program rehabilitasi sosial
	3. Insentif bagi guru tk dan Paud	Program pengelolaan pendidikan
	4. Insentif bagi pendidik agama, pesantren dan pengelola tempat ibadah.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
Super Village	1. Beautifikasi Jalan Lingkungan Desa	Program Penyelenggaraan Jalan
	2. Penyediaan akses internet gratis pada fasilitas publik di desa	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	3. Perbaikan RTLH	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	4. Pendampingan dan Pemberdayaan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	5. Optimalisasi BUMDes	Program Penataan Desa
	6. Penyediaan Mobil Siaga	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	7. Program gratis magang di Luar Negeri bagi KK miskin	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tabel 3. 6 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan/Indikator	Sasaran	Strategi/Arah Kebijakan	Program Prioritas
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Manusia Berkarakter yang Adaptif dengan Kemajuan dan Disrupsi Sosial-Teknologi	T.1 : Terwujudnya Sragen yang Berdaya Saing dan Maju Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi	T1.S1. Terwujudnya SDM yg berkarakter tangguh, adaptif, dan berbudaya. Indikator : Indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas, melalui arah kebijakan : - Pemenuhan Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan peningkatan akses pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan serta pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) - Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS - Penguatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang, mulai dari PAUD, dasar, menengah hingga pendidikan non formal/kesetaraan - Perluasan layanan PAUD yang terintegrasi - Penguatan pendidikan karakter termasuk pencegahan dan penanganan bullying. - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di sekolah negeri dan swasta secara proporsional - Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya Sragen, termasuk pencegahan dan penanganan bullying - Percepatan digitalisasi pendidikan terutama di sekolah yang belum terjangkau internet - Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan - Pengembangan dan penerapan kurikulum adaptif berbasis potensi lokal seperti pertanian, batik, dan budaya tradisional - Perbaikan tata kelola pendidikan daerah yang berbasis pada data perencanaan dan hasil evaluasi kinerja satuan Pendidikan - Optimalisasi koordinasi lintas pemerintah dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan Pendidikan - Penguatan akses pendidikan vokasi untuk peningkatan kompetensi SDM - Pengembangan sekolah model transformatif, Sekolah Rakyat dan Unggulan - Optimalisasi peran pendidikan non-formal terintegrasi dengan pondok pesantren	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			Peningkatan pemajuan kebudayaan, melalui arah kebijakan:	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Misi	Tujuan/Indikator	Sasaran	Strategi/Arah Kebijakan	Program Prioritas
			a. Peningkatan ekspresi budaya berbasis nilai kearifan lokal dengan optimalisasi perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. b. Peningkatan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kesejahteraan Masyarakat. c. Penguatan tata kelola kebudayaan yang diarahkan pada ketersediaan data/informasi kebudayaan yang berkualitas; dan peningkatan kapasitas lembaga dan SDM kebudayaan. d. Penguatan internalisasi nilai budaya, keagamaan, dan kearifan lokal dengan pendidikan, keluarga maupun masyarakat	
			Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui arah kebijakan : a. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara promotif, preventif dan kuratif b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan c. Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia produktif dan lanjut usia, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan zoonosis d. Peningkatan pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria e. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi orang dengan HIV, Tuberkulosis dan malaria f. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit HIV/AIDS g. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian malaria h. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan isu Kesehatan i. Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau j. Pengendalian penduduk dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga k. Penanggulangan gizi makro dan mikro, percepatan permasalahan stunting dan kelebihan gizi l. Peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan/dukungan Universal Health Coverage	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Rogram Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
			Peningkatan pembangunan berbasis gender melalui arah kebijakan: a. Peningkatan pengarusutamaan gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan

Misi	Tujuan/Indikator	Sasaran	Strategi/Arah Kebijakan	Program Prioritas
			b. Peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengendalian Penduduk Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
			Peningkatan ketahanan keluarga, melalui arah kebijakan : a. Peningkatan kualitas keluarga melalui pengendalian pertumbuhan penduduk yang terencana, seimbang, dan berkelanjutan b. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan bagi Perempuan dan Anak c. Membangun lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya keluarga harmonis, sehat, dan sejahtera.	
			Peningkatan budaya literasi , melalui arah kebijakan : a. Penguatan ekosistem tata kelola literasi yang lebih baik b. Penyusunan regulasi dan kebijakan dukungan budaya literasi c. Penyusunan mekanisme koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi literasi d. Optimalisasi dana CSR dan Filantropi untuk pembudayaan literasi e. Pengarusutamaan literasi dalam kurikulum pendidikan atau pelatihan; f. Promosi dan publikasi literasi g. Penyediaan bahan dan koleksi literasi yang menarik, beragam, adaptif dan terjangkau h. Peningkatan kapasitas SDM perpustakaan i. Pengembangan kerjasama perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
			Peningkatan daya saing pemuda, melalui arah kebijakan : a. Peningkatan kesadaran pemuda dalam kewir ausahaan; b. Peningkatan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Peningkatan daya saing olahraga dan kebugaran, melalui arah kebijakan : a. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga b. Peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga c. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang mudah murah dan menarik bagi masyarakat d. Penguatan sarana dan prasarana olahraga unggulan e. Pembinaan atlet potensial	
Misi 2 : Menguatnya transformasi Tata Kelola Pemerintahan Gesit, Responsif dan Kolaboratif		T1.S2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif	Peningkatan birokrasi yang berintegritas, responsif, transparan, dan akuntabel, melalui arah kebijakan : a. Penguatan Reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian Dan Pembangunan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Misi	Tujuan/Indikator	Sasaran	Strategi/Arah Kebijakan	Program Prioritas
		Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat	b. Penguatan kolaborasi antar OPD dan stakeholder pembangunan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah. c. Peningkatan akuntabilitas kinerja berbasis perencanaan berkualitas dan manajemen kinerja lintas sector d. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, berbasis risiko serta riset dan inovasi; e. Peningkatan Partisipasi dan Transparansi Publik dalam Perumusan Kebijakan melalui arah kebijakan yaitu peningkatan ruang partisipasi publik yang bermakna dalam pembangunan dan perumusan kebijakan f. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahapan perumusan kebijakan melalui forum konsultasi publik, musrenbang, dan mekanisme partisipatif lainnya. g. Peningkatan kualitas kebijakan daerah h. Optimalisasi mekanisme kolaborasi legislatif dan eksekutif dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. i. Memperkuat transparansi proses perumusan kebijakan dengan penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan tepat waktu j. Membangun budaya kerja aparatur yang berintegritas, melayani, responsif, dan adaptif. k. Pembangunan budaya kerja birokrasi yang dinamis, responsif, dan “work with society” l. Penguatan manajemen ASN berbasis meritokrasi m. Peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan n. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahapan perumusan kebijakan melalui forum konsultasi publik, musrenbang, dan mekanisme partisipatif lainnya. o. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan berbasis digital dan e-government p. Penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi; q. Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan berbasis pemantauan informasi dan data secara real time	- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Riset Dan Inovasi Daerah - Program Kepegawaian Daerah - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Program Pengelolaan Profil Kependudukan - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik - Program Penyelenggaraan Statistik Sektor - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi - Program Pengelolaan Arsip

Misi	Tujuan/Indikator	Sasaran	Strategi/Arah Kebijakan	Program Prioritas
			r. Penguatan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. s. Penataan sistem arsip dinamis dan statis sesuai standar nasional.	
			Optimalisasi kapasitas fiskal dan kualitas belanja melalui arah kebijakan : a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan PAD dan peningkatan kualitas belanja daerah b. Peningkatan PAD berbasis optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan peningkatan kapasitas BUMD c. Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Penguatan peran kecamatan sebagai simpul integrasi pembangunan lintas sektor, melalui arah kebijakan : a. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan b. Peningkatan koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berkelanjutan d. Mendorong sinergi antara kecamatan, desa/kelurahan, serta lembaga masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Misi 4 : Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Mendukung Pemajuan Kebudayaan, Kelestarian Lingkungan dan Interaksi Sosial yang Humanis		T1.S3. Terwujudnya perekonomian daerah yg berdaya saing dan berkelanjutan Indikator : Indeks Infrastruktur, PDRB Perkapita, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan konektivitas ekonomi daerah, melalui arah kebijakan : a. Revitalisasi sarana dan prasarana perekonomian, termasuk pasar multipurpose dan logistik desa b. Peningkatan akses jalan produksi, pasar desa, dan balai ekonomi desa sebagai simpul kegiatan produktif c. Pemerataan Pembangunan infrastruktur kawasan industri, pariwisata, dan sentra ekonomi lokal untuk menarik investasi. d. Peningkatan akses internet ke seluruh wilayah e. Peningkatan Kualitas Layanan Perhubungan f. Peningkatan aksesibilitas antarwilayah g. Peningkatan infrastruktur menuju destinasi wisata unggulan untuk memperkuat keterhubungan regional h. Penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi energi dalam pembangunan kawasan industri	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan sumber daya alam, melalui arah kebijakan: a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengelolaan Persampahan

Misi	Tujuan/Indikator	Sasaran	Strategi/Arah Kebijakan	Program Prioritas
			b. Mendorong integrasi pengelolaan sampah dari hulu (rumah tangga) hingga hilir (TPA) c. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan RTH yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim d. Peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air; e. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; f. Peningkatan sanitasi aman sarana dan prasarana (IPLT, tangki septik kedap, penyedotan secara berkala) g. Memperkuat pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui pemantauan kualitas lingkungan h. Peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim melalui penguatan implementasi ekonomi hijau dan penurunan intensitas emisi GRK	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Misi 3 : Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan dan Pasar Global			Penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, melalui arah kebijakan : a. Optimalisasi lumbung pangan daerah dan peningkatan cadangan pangan b. Penguatan cadangan pangan utama, diversifikasi pangan lokal, dan keamanan pangan c. Penguatan sistem informasi pangan untuk mendukung perencanaan berbasis satu data	Rogram Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Penguatan kelembagaan pangan dan sistem distribusi daerah, melalui arah kebijakan : a. Penguatan sistem rantai pasok pangan lokal serta stabilisasi harga melalui kelembagaan distribusi b. Peningkatan ketercukupan dan keberlanjutan sumber daya air untuk produksi pangan c. Integrasi kelembagaan pangan desa dengan BUMDes dan koperasi untuk memperkuat distribusi dan harga pangan d. Pemanfaatan potensi pangan lokal untuk mendukung kemandirian dan mengurangi ketergantungan impor e. Penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi energi dalam proses produksi pangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Pengembangan kawasan pertanian, peternakan dan perikanan terpadu dan agroindustri berkelanjutan, melalui arah kebijakan: a. Revitalisasi sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas (irigasi, embung, konservasi air) b. Peningkatan produksi pertanian. peternakan dan perikanan budidaya	

Misi	Tujuan/Indikator	Sasaran	Strategi/Arah Kebijakan	Program Prioritas
			c. Hilirisasi pada sektor pertanian (pertanian, perkebunan, peternakan, serta kelautan dan perikanan) d. Pengembangan kawasan pertanian terpadu, agroindustri, dan agrowisata e. Peningkatan daya saing komoditas melalui hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (pascapanen, pengolahan, pengemasan)	
			Penguatan ekosistem UMKM, koperasi, dan industri kecil menengah melalui arah kebijakan : a. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta fasilitasi pembentukan koperasi sehat (termasuk Koperasi Merah Putih) b. Penguatan kualitas produk UMKM dari pengolahan sampai pengemasan c. Peningkatan akses permodalan, perizinan, dan marketplace digital untuk UMKM d. Penguatan sentra industri kecil dan menengah serta akselerasi kawasan industri terpadu e. Hilirisasi dan diversifikasi produk lokal berbasis riset dan kemitraan dengan perguruan tinggi f. Integrasi koperasi dengan industri dan UMKM sebagai agregator produksi, distribusi, hingga pembiayaan	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm) Program Pengembangan Ukm Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Peningkatan kondusivitas dan stabilitas wilayah melalui arah kebijakan : a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban umum. b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan peraturan daerah. c. Penguatan mitigasi bencana serta respon terhadap darurat bencana dan keselamatan masyarakat d. Memperkuat integritas dan peran partai politik dalam kemajuan demokrasi; e. Penguatan nilai-nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Peningkatan iklim investasi dan akselerasi kawasan industri terpadu, melalui arah kebijakan : a. Peningkatan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum b. Peningkatan layanan terpadu untuk memudahkan investor masuk ke kawasan industri dan agroindustri	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal

Misi	Tujuan/Indikator	Sasaran	Strategi/Arah Kebijakan	Program Prioritas
			c. Peningkatan daya tarik investasi merata di berbagai sektor ekonomi	
			Pengembangan pariwisata unggulan berbasis kearifan lokal, melalui arah kebijakan : - Revitalisasi destinasi wisata unggulan seperti Sangiran, Gunung Kemukus, Waduk Kedung Ombo, dan Desa Wisata Batik - Digitalisasi promosi dan manajemen pariwisata melalui integrasi platform reservasi, informasi destinasi, dan media promosi - Pengembangan pariwisata syariah dan wisata berbasis komunitas desa - Pengembangan desa wisata - Peningkatan konektivitas infrastruktur menuju dan sekitar kawasan wisata (jalan, transportasi, logistik) - Penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya local - Peningkatan identitas wisata Sragen melalui event budaya, kriya, dan makanan khas - Peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif; - Dukungan kebijakan untuk ekonomi syariah dan wisata ramah muslim	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Hidup Warga	T.2 : Terwujudnya Sragen yang Sejahtera dan Merata Indikator : Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio	T2.S1. Terwujudnya Masyarakat yang semakin sejahtera	Pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial, melalui arah kebijakan : - Mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial - Meningkatkan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan social.	Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Perluasan Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja, melalui arah kebijakan : - Penguatan sistem informasi pasar kerja (SIPK) - Memperluas akses pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri. - Memperluas akses dan kualitas pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. - Mendorong sertifikasi kompetensi dan pengakuan keterampilan tenaga kerja. - Menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri kecil, menengah, dan ekonomi kreatif. - Mendorong investasi padat karya di sektor potensial. - Memperkuat sinergi pemerintah, swasta, dan UMKM dalam penciptaan lapangan kerja baru.	Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja

Misi	Tujuan/Indikator	Sasaran	Strategi/Arah Kebijakan	Program Prioritas
			Peningkatan kemandirian desa, melalui arah kebijakan : - Pemenuhan kebutuhan layanan dasar desa - Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa; - Peningkatan fasilitas publik desa: pusat perekonomian desa, ruang terbuka hijau, dan fasilitas olahraga - Peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi unggulan local - Penguatan peran dan pemberdayaan BUMDes sebagai penggerak ekonomi local - Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara kolaboratif dan multisector - Pengembangan kawasan pedesaan berbasis potensi tematik yang terintegrasi dengan simpul pertumbuhan ekonomi	Program Penataan Desa Program Peningkatan Kerja Sama Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia desa, melalui arah kebijakan : - Menyediakan program pelatihan kerja dan sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan pasar - Menyediakan program beasiswa dan magang di luar negeri bagi KK miskin - Mendorong pengembangan kewirausahaan muda berbasis UMKM dan industri kreatif - Menumbuhkan sumber penghidupan masyarakat berkelanjutan melalui pelatihan berbasis teknologi dan sektor unggulan daerah	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)
			Transformasi desa miskin, melalui arah kebijakan : - Pendampingan transformasi desa miskin dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sanitasi - Fasilitasi percepatan bantuan sosial dan program perlindungan sosial di tingkat desa - Monitoring dan evaluasi langsung pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat - Meningkatkan kolaborasi stakeholder dalam penyediaan bantuan sosial - Menyediakan jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan berbasis data terpadu - Mendorong integrasi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi mikro - Kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman (air bersih, sanitasi, listrik) - Sinkronisasi pengentasan kemiskinan desa dan rumah layak huni	Croscutting

3.3.2 Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan dalam PRJMD memiliki peran penting dalam perencanaan berbasis spasial. Pembangunan kewilayahan dapat merujuk pada pembangunan kewilayahan yang ada pada dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi, maupun dokumen sektoral lainnya. Berikut beberapa pembangunan kewilayahan yang berkaitan dengan Pembangunan Kabupaten Sragen.

3.3.2.1 Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMN

Pembangunan kewilayahan dalam RPJMN tertuang dalam arah kebijakan kewilayahan yang ada pada lampiran IV RPJMN. Pada lampiran tersebut disajikan *highlight* indikasi intervensi pada masing-masing daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kabupaten Sragen masuk sebagai lokasi prioritas untuk 3 dari 5 Kawasan Prioritas anatra lain: Kawasan Pertumbuhan yaitu Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar, Kawasan Komoditas Unggulan yaitu Tebu di Pegunungan Kendeng (Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Sragen), Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi yaitu Bengawan Solo yang meliputi Kabupaten Blora, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri. Secara lebih rinci, berikut arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sragen dalam dokumen RPJMN

Tabel 3. 7 Indikasi Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMN Tahun 2025-2029

N o	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
1	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Solo - Sragen - Karanganyar	Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata, antara lain : Sangiran (termasuk revitalisasi Museum dan Sirus Purbakala Sangiran), Tawangmangu, Cetho-Sukuh
		Preservasi jalan ruas Solo-Sangiran, Solo-Tawangmangu
		Penyediaan layanan KA <i>commuter line</i> Surakarta Raya (Surakarta-Sukoharjo-Karanganyar-Sragen)
		Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya
		Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Tengah - Kab. Wonogiri - Kab. Sukoharjo - Kab. Klaten	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
		Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
		Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
		Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	- Kab. Boyolali - Kab. Sragen - Kab. Karanganyar - Kab. Blora	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada <i>catchment</i> area, terutama pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu, Waduk Gajahmungkur, Waduk Cengklik Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi melalui : penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pasca panen melalui peningkatan prasarana pascapanen Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan krenik lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani, peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang, pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama Pembangunan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
3	Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Pegunungan Kendeng : - Kab. Rembang - Kab. Pati - Kab. Blora - Kab. Sragen	Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi tebu Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tebu
4	Provinsi Jawa Tengah	Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: 1. Perluasan layanan pendidikan anak usia dini 2. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas 3. Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran 4. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah 5. Revitalisasi pendidikan non formal 6. Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: 1. Penurunan kematian ibu dan anak 2. Pencegahan dan penurunan stunting

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		3. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan Kespro 4. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat antara lain melalui: 1. Penuntasan TBC 2. Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa 3. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: 1. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan 2. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan Penguatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui : 1. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia 2. Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: 1. Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan 2. Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: 1. Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan 2. Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi 3. Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik 4. Penerapan internet of things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-time 5. Perluasan penggunaan kendaraan listrik Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: 1. Perluasan infrastruktur digital 2. Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital 3. Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: 1. Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital 2. Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN 3. Digitalisasi layanan publik prioritas 4. Pengembangan ekosistem layanan publik digital Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jawa Tengah, antara lain melalui: 1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) 2. Penanggulangan judi dan penyelundupan 3. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) Pendalaman sektor keuangan, antara lain melalui : 1. Penguatan peran perbankan

N o	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		2. Penguatan peran sektor keuangan nonbank
		3. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan
		Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah, antara lain melalui:
		1. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya
		2. Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
		3. Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat

Sumber : Lampiran IV RPJMN 2025-2029

3.1.1.1 Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Dalam Pembangunan kewilayahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen termasuk dalam Kawasan Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonosraten. Wilayah Pengembangan ini meliputi Program Unggulan dan Program Strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Program Unggulan pada WP Subosukawonosraten adalah pengembangan Solo Raya sebagai MICE (Event Tourism) dan wisata alam serta budaya yang terpadu dengan pengembangan pariwisata DIY. Sedangkan, Program Strategis pada WP Subosukawonosraten adalah pengembangan Industri Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Klaten (gula, susu, tembakau, kayu, tekstil dan alas kaki) dan peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, tebu daging, susu, dan perikanan budi daya). Secara lebih rinci, berikut penekanan indikasi intervensi untuk Kabupaten Sragen.

Tabel 3. 8 Penekanan Indikasi Intervensi di Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonosraten	Penekanan Indikasi Intervensi
- Kota Surakarta - Kab Boyolali - Kab Sukoharjo - Kab Karanganyar - Kab Wonogiri - Kab Sragen - Kab Klaten	Pengembangan Solo Raya Sebagai MICE (Event Tourism) dan Wisata Alam dan Budaya yang Terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY
	a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
	1) Mendorong peningkatan status Bandara Adi Soemarmo menjadi bandara internasional (pengembangan sebagai bandara umrah dan haji) dan sebagai generator aktivitas perekonomian global;

Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonosraten	Penekanan Indikasi Intervensi
	2) Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol ruas Solo – Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo;
	3) Mendorong pembangunan fasilitas integrasi transportasi antarmoda dan penyediaan layanan angkutan pemadu moda di Terminal Tipe A Tirtonadi Surakarta;
	4) Mendorong peningkatan layanan perkeretaapian, diantaranya: KRL Commuter Line Surakarta – Yogyakarta (rencana perpanjangan sampai ke Kutoarjo), KA Wisata Bhataras Kresna (Surakarta – Wonogiri), KA Bandara Adi Soemarmo (BIAS), KA Joglosemarkerto (loop) serta mendorong dan memfasilitasi perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta - Surabaya;
	5) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Surakarta – Sumberlawang via Sangiran dan Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri yang terkoneksi dengan Batik Solo Trans (BST) dan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata (pengembangan program integrasi edutrip dengan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata) serta perindustrian;
	6) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Sukoharjo dan Tawangmangu;
	7) Pemenuhan perlengkapan jalan provinsi pada ruas pendukung Kawasan pariwisata Tawangmangu dan Geopark Wonogiri.
	b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
	1) Mendorong pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) strategis regional dan nasional diantaranya: Sangiran, Umbul, Geopark Gunung Sewu, Tawangmangu, Candi Cetho-Sukuh;
	2) Fasilitasi penyelenggaraan event nasional dan internasional seni budaya, festival dan olahraga;
	3) Mengembangkan pola perjalanan yang mendukung perpanjangan tema wilayah pengembangan untuk mendukung pre dan post tour event;
	4) Menciptakan aktivitas wisata yang unik dalam MICE itineraries;
	5) Berkolaborasi dengan industri kreatif untuk menciptakan penawaran yang unik untuk mendukung kegiatan even yang berbeda dengan pesaing;
	6) Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan cagar budaya (urban renewal Kota Tua Surakarta, Keraton Surakarta dan Puri Mangkunegaran) untuk peningkatan daya saing sektor pariwisata;

Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonosraten	Penekanan Indikasi Intervensi
	7) Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya dan mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya/sejenisnya;
	8) Mendorong pembangunan dan pengembangan desa wisata;
	9) Digitalisasi promosi pariwisata dan penguatan sistem komunikasi berbasis teknologi informasi;
	10) Pengembangan Geopark melalui jelajah Geopark Gunung Sewu, peningkatan kapasitas pengelolaan geopark, serta perkuatan mitra kolaboratif ke jaringan geopark global;
	11) Pendampingan pengembangan Geoheritage Klaten;
	12) Peningkatan upaya promosi keberadaan Geopark Gunung Sewu sebagai DTW tingkat internasional diantaranya melalui: visibilitas di ruang publik strategis, dukungan teknologi informasi, dan lain-lain.
	Pengembangan Industri Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Klaten (gula, susu, tembakau, kayu, tekstil dan alas kaki)
	a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan sektor perindustrian, berupa:
	1) Pemantapan jaringan jalan Nasional pada ruas Boyolali - Surakarta - Palur - Sragen sampai dengan batas Jawa Timur;
	2) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Wonogiri Perbatasan (DIY dan Jatim), Geyer - Surakarta - Sukoharjo – Wonogiri;
	3) Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas jalan akses ke perbatasan provinsi (DIY dan Jatim); akses langsung ke jalan nasional (JJLS) dan penghubung antar jalan nasional (Boyolali -Klaten);
	4) Mendorong optimalisasi Dry-port Jebres dan Kalijambe Sragen.
	b. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, daging, susu, perikanan budi daya dan tebu).
	1) Pengembangan sentra industri hijau;
	2) Pengembangan ekspor produk unggulan;
	3) Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
	4) Pengaktifan kembali Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surakarta.
	Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, daging, susu, perikanan budi daya dan tebu)
	a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui :
	1) Fasilitasi sarana dan prasarana pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian;

Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonosraten	Penekanan Indikasi Intervensi
	2) Peningkatan produktivitas dan kualitas perkebunan tebu di Sragen;
	3) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu);
	4) Penyediaan benih/bibit berkualitas;
	5) Penjaminan kualitas pakan ternak;
	6) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
	7) Pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa;
	8) Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan;
	9) Fasilitasi kampung tematik perikanan (Kampung Lele Boyolali, Kampung Patin Sragen);
	10) Pengembangan broodstock center ikan nila di Klaten;
	11) Mendorong pemanfaatan lahan perkotaan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di perkotaan (urban farming);
	12) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Kepoh, Kwangsan dan Padakslorot Kabupaten Karanganyar; Klego Kabupaten Boyolali, Bapang dan Catgawen Kabupaten Sragen; Pundung dan Sidopangus Kabupaten Klaten;
	13) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian berupa peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung: Tirtosworo, Bangkan, Kedokan, Selur dan Salam (di Kabupaten Wonogiri) dan Embung Guworejo Sragen.
	b. Hilirisasi produksi pertanian (dalam arti luas), melalui :
	1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian;
	2) Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk;
	3) Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;
	4) Kontak bisnis jalinan rantai pasok antara UMKM multiproduk dengan buyer dari pemerintah, BUMN/D, swasta;
	5) Pelatihan Ketrampilan Usaha Produktif berbasis potensi lokal;

Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonosraten	Penekanan Indikasi Intervensi
	6) Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi Kelompok Masyarakat Produktif;
	7) Magang Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Produk UMKM sektor susu;
	8) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran;
	9) Pemberdayaan Aspek Produksi Koperasi (FGD KUD di Solo Raya, Bulog dan MBG tentang Hilirisasi dan ketahanan Pangan);
	10) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Gemolong - Sragen - Karanganyar, Karangwuni - Perbatasan DIY.
	Lingkup Sosial dan Kependudukan
	a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta program jambanisasi untuk mendukung penanganan kemiskinan di Subosukawonosraten;
	b. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di tingkat Kecamatan;
	c. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi lokal dan mendorong sekolah inklusif.
	Lingkup Perekonomian
	a. Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
	b. Optimalisasi keberadaan pintu tol yang cukup dan peningkatan daya tarik untuk mengurangi dampak jalan tol terhadap perekonomian serta meningkatkan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang;
	Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan
	a. Mengoptimalkan persebaran dan pertumbuhan kawasan PKW dan PKL yang persebarannya cukup merata untuk mengurangi ketimpangan wilayah;
	b. Mendorong dan memfasilitasi rencana penanganan/penataan permukiman yang termasuk kawasan kumuh perkotaan secara terpadu;
	c. Mendorong dan memfasilitasi kajian kelayakan inisiasi rencana pembangunan TPST Regional di Solo Raya;
	d. Mendorong dan memfasilitasi penanganan banjir di wilayah Solo Raya;
	e. Mendorong pemberian disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi (parkir progresif) dan insentif pengguna angkutan umum berupa penyediaan angkutan umum yang terintegrasi, berkualitas dan terjangkau;
	f. Pengembangan SPAM Regional Wosusokas;
	g. Mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana salah satunya dengan penuntasan penanganan jalan evakuasi;

Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonosraten	Penekanan Indikasi Intervensi
	h. Mendorong rehabilitasi/pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya;
	i. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan (20 persen) maupun wilayah desa;
	j. Pemantauan dan pengawasan Sungai Bengawan Solo;
	k. Konservasi Gunung Lawu;
	l. Memperkuat inisiatif imbal jasa lingkungan (payment for environmental services);
	m. Mendorong sinergisitas pengelolaan Cagar Biosfer Merapi-Merbabu Menoreh;
	n. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis Masyarakat;
	o. Mendorong Pembangunan infrastruktur PLTP Jenawi.

3.1.2 Dukungan Program RPJMD Sragen Tahun 2025-2029 terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

Dukungan terhadap implementasi Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJM Nasional 2025–2029 dilakukan dengan sinkronisasi program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025–2029. Langkah ini bertujuan untuk menjamin keterpaduan serta sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penyelarasan antara Kegiatan Prioritas Utama dan program prioritas daerah tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 3. 9 Dukungan Program RPJMD Sragen Tahun 2025-2029 terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

N o	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika
2	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Prioritas Nasional 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian

N o	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertanian
4	Pengembangan Pangan Hewani		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertanian
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pangan
			5	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
6	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan			
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pangan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian
7	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum
8	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika

N o	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu
10	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika
11	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup
12	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup
13	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lingkungan Hidup
14	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup
15	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Prioritas Nasional 3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika
17	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
18	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
19	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
20	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
21	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
22	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g.pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidikan

N o	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu
	kesejahteraan berbasis kinerja			
23	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian dan Pengembangan
24	Penurunan Kematian Ibu dan Anak		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
25	Pencegahan dan Penurunan Stunting		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
26	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
27	Penuntasan TBC		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
28	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
29	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
30	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
31	Investasi pelayanan kesehatan primer		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
32	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
33	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
34	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kebudayaan

N o	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kebudayaan
35	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan
36	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kepemudaan dan Olahraga
37	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Prioritas Nasional 5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian
38	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial
39	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perdagangan
40	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Prioritas Nasional 6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial
41	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
42	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum
43	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
44	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Prioritas Nasional 7	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kepegawaian
45	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika
46	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Keuangan

N o	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu
47	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Keuangan
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Keuangan
48	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Prioritas Nasional 8	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesatuan Bangsa dan Politik
49	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kebudayaan

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

3.1.3 Dukungan Program RPJMD Sragen Tahun 2025-2029 terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Dukungan ini diwujudkan melalui penyelarasan program dan kegiatan prioritas daerah dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025–2029 yang bersifat mendukung, memperkuat, atau mempercepat capaian sasaran strategis nasional. Berikut merupakan data dukungan program RPJMD Sragen Tahun 2025-2029 terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 10 Dukungan Program RPJMD Sragen Tahun 2025-2029 terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN Tahun 2025-2029

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
Makan Bergizi Gratis				
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	Badan Gizi Nasional (koordinator)	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat 3. Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 8. Program Penanganan Kerawanan Pangan 9. Program Rehabilitasi Sosial
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				
2	Revitalisasi Sarana dan	Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
	Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas		dan Menengah (koordinator)	
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
Swasembada Pangan				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	Nasional	Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
7	Layanan Irigasi Pendukung Pangan Nasional	Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Nasional	Kementerian Pertanian, Swasta	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Swasembada Energi				
9	Bioetanol (berbasis tebu)	Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan	Koordinasi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dengan Jawa Tengah	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
Hilirisasi, Industrialisasi, dan Transformasi Digital				
10	Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu	Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua	Kementerian Pertanian, Swasta	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
11	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Perumahan dan Permukiman				
12	Pembangunan 3 juta rumah	Nasional	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)	Program Pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

3.1.4 Dukungan Program RPJMD Sragen Tahun 2025-2029 terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tabel 3. 11 Dukungan Program RPJMD Sragen Tahun 2025-2029 terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
1	2	3	4	5	7		8
Indeks Reformasi Birokrasi							
	PP.	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa					
			Insentif pemungut Pajak dan Retribusi Daerah *)	Insentif pemungut Pajak dan Retribusi Daerah *)	Program Pengelolaan pendapatan daerah	Prosentase realisasi penerimaan pajak daerah	%
			Peningkatan TPP ASN	Pemberian TPP ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%
			Retret penyelarasan visi misi dan program Kepala daerah				
			Peningkatan Gaji Perangkat Desa	Pemberian Gaji Perangkat Desa	Program Pengelolaan keuangan daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%
			Pendidikan dan Pelatihan ASN	Pengembangan kompetensi ASN	Program pengembangan SDM	Persentase ASN yang MendapatkanPengembangan Kompetensi Teknis	%
			Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa	Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%
			Beasiswa kepada ASN		-	-	-
	PA.	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak		Penyusunan Perbup ttg Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) yang juga akan mengakomodir P4A di desa/kel dan kecamatan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
			Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Perlindungan bagi perempuan, anak, disabilitas dan kaum rentan.			
				Pendampingan penanganan kekerasan anak dan perempuan yang difasilitasi oleh kecamatan untuk ditindaklanjuti oke Kabupaten	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan KOMprehensif	%
					Program Rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan tuna sosial (PGOT) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di luar panti	%
					Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%
			Penyusunan regulasi tentang sister province atau Kerjasama Daerah (KSD)				
			Promosi kerjasama sister province				
			Pengembangan sister province pada sektor strategis (pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pariwisata, teknologi informasi)				
	PA.	Program Kerjasama Forkopimda					
			Koordinasi Hubungan Kerjasama Pembangunan Daerah melalui Forkopimda	Koordinasi Forkopinda	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase masyarakat yang paham cegah deteksi dini penanganan konflik sosial	%
	PT.	Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalannya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas,	Kerjasama dengan akademisi	Kerjasama Kajian dan Riset dengan Akademis	Program Riset dan Inovasi Daerah	Presentase inovasi yang dimanfaatkan	%

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
		Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan)					
			Kerjasama dengan Bisnis			Presentase kajian /riset yang ditindaklanjuti	%
			Kerjasama dengan Komunitas				
			Memperkuat Kerjasama Pemerintah				
			Kerjasama dengan Media				
	PT.	Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah					
			Memperkuat ekosistem riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Penguatan Riset dan Inovasi Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Presentase inovasi yang dimanfaatkan	%
						Presentase kajian /riset yang ditindaklanjuti	%
Indeks Integritas Nasional							
	PI.	Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD					
			Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas	Penguatan Pengawasan Daerah	Program penyelenggaraan pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen
			Evaluasi Zona Integritas				
	PI.	Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa		Penguatan Pengawasan Daerah	Program Perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai
			Penyusunan Pergub tentang kewenangan Inspektorat				
			Penambahan anggaran pengawasan				
			Penambahan SDM pengawasan				
			Sistem informasi pengawasan terintegrasi				

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
	PA.	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK		Penguatan Pengawasan Daerah	Program Perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai
			Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN	e-learning penyelenggaraan program pengendalian gratifikasi			
			Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa	Sosialisasi UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) dan anti korupsi			
Pertumbuhan Ekonomi							
	PP.	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim		Fasilitasi peningkatan kegiatan ekonomi melalui BPR Syariah Sukowati	Program Perekonomian dan Pembangunan		
			Penyusunan Regulasi Daerah terkait ekosistem ekonomi syariah				
			Mengembangkan wisata ramah muslim				
			Penyusunan lembaga masyarakat ekonomi syariah				
	PP.	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja		Pendataan dan fasilitasi pengiriman workshop bagi masyarakat gen Z	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	%
			Penyusunan Pergub Pemberdayaan Pemuda Jawa Tengah				
			Pendataan Pemuda (16 - 30 tahun)	Penyediaan data kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase akurasi data kependudukan skala Kabupaten	%

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
			Koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten/Kota (terkait dengan data pemuda)				
			Identifikasi Partner Kerjasama Pengembangan Cafe Berdaya di setiap Kecamatan				
	PI.	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)		Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang aktif Persentase sarana prasarana kelurahan kondisi baik	%
			Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas	Pembinaan dan Pendampingan.	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	%
			Pemberdayaan ekonomi bagi Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%
			Pemberdayaan ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif	Pembinaan, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif.	Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%
			Pengembangan sport center di setiap kecamatan				
	PI.	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru		Pemetaan potensi desa wisata	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%
			Pemetaan sasaran desa wisata	Pembentukan desa wisata			
				Pembinaan dan pemberdayaan desa wisata			
			Menyiapkan infrastruktur dan SDM pengelola				
	PI.	Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi		Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Obyek Cagar Budaya yang Dilestarikan	

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
		serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal					
		Pembinaan kebudayaan lokal bekerjasama dengan ISI Surakarta	Sekolah Wayang, Tari, Gamelan, dan Dalang				
			Penyusunan Peraturan gubernur tentang pemberian insentif budayawan				
			Pemberian insentif kepada budayawan				
			Identifikasi potensi pembiayaan kelembagaan BLUD sektor budaya dan cagar budaya				
	PA.	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis		Fasilitasi pelatihan pendampingan sertifikasi Halal HAKI dan P-IRT			
			Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM	Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan kualitas usahanya	%
			Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM	Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM			
			Pendampingan sertifikasi HAKI bagi UMKM	Pendampingan sertifikasi HAKI bagi UMKM			
					Pprogram Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%
			Pendampingan sertifikasi P-IRT bagi UMKM	Pendampingan sertifikasi P-IRT bagi UMKM	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	%
	PA.	Pemenuhan dan Peningkatan akses					

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
		internet di desa (102 desa blankspot)					
			Pemasangan jaringan FO, Wi-fi gratis berkapasitas 20 Mbps, bersifat stimulan selama 1 tahun anggaran dan, pelatihan penggunaan secara positif (usaha/bisnis)	Penyediaan Akses Internet gratis pada fasilitas publik di desa	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%
	PA.	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM					
			Subsidi Modal kepada UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa)	Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang mendapatkan Penilaian Kinerja Organisasi kategori Baik (Indikator Program Perekonomian dan Pembangunan)	%
			Pendampingan Usaha dan Promosi UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM yang bekerjasama dengan Diaspora	Pelatihan dan bantuan alat UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan kualitas usahanya	%
				Pembinaan UMKM Fasilitas pemasaran	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	%
	PA.	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa		Revitalisasi Peternakan milik Pemda di dusun Klero	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Presentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%
			Identifikasi dan Pemetaan Potensi Bibit Ternak Khas Jawa		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Presentase prasana pertanian yang dimanfaatkan	%
			Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Lokal				
			Pelatihan dan Pendampingan Peternak lokal				
			Penjaminan Kualitas Pakan Ternak				

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
	PA.	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa		Pelatihan, pembinaan dan pendampingan koperasi merah putih	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%
			Penguatan koperasi desa	Pelatihan, pembinaan dan pendampingan koperasi aktif	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%
	PA.	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau		Penyusunan peraturan Bupati Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%
			Menyusun Regulasi Daerah tentang Ekonomi Hijau				
			Menyusun RAD tentang Ekonomi Hijau				
	PA.	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata		Pelatihan konten kreator untuk promosi pariwisata	Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%
			Pelatihan dan pendampingan untuk menciptakan 1.000 konten kreator di desa wisata				
	PT.	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan		Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT)	Program Penyuluhan pertanian	Persentase SDM Petani yang ditingkatkan	%
			Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir				
			Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi petani perempuan				
	PT.	BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap BUMDes di Jateng)		Pemberdayaan BUMDes	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%
			Pendampingan pembentukan badan hukum untuk Bumdes	Pembinaan dan Pelatihan SDM BUMDes.			

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
			Penyusunan Regulasi Daerah tentang Bumdes				
			Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jawa Tengah				
	PT.	Revitalisasi embung		Revitalisasi dan Rehabilitasi Embung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas layanan Irigasi multikomoditas	%
			Pembangunan Embung Baru	Biaya Operasional dan Pemeliharaan			
			Rehabilitasi Embung eksisting				
			Biaya Operasional dan Pemeliharaan				
	PT.	Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan					
			Penguatan Urban Farming di Perkotaan				
			Pelatihan dan pembinaan kepada petani urban farming				
			Promosi hasil urban farming				
	PT.	Penyediaan benih yang berkualitas		Optimalisasi Balai Benih Pertanian (UPTD Benih Padi)	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Presentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%
				Penyediaan benih padi yang berkualitas			
	PT.	Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian		Bantuan alat pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Presentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%
					Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Presentase prasana pertanian yang dimanfaatkan	%
	PT.	Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha		Kemudahan perizinan	Program Pengembangan iklim penanaman modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
			Percepatan perizinan	Percepatan perizinan	Program Promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi skala menengah/besar	%
					Program Pelayanan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%
			Pemberian insentif bagi investor				
Tingkat Pengangguran Terbuka							
	PP.	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)					
			Kurikulum Pelatihan yang Sesuai Pasar Kerja				
			Bursa Kerja / Job Fair	Job Fair	Program Penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%
	PA.	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan		Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	0,5
			Pelatihan dan Sertifikasi juru sembelih halal	Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)			
			Standarisasi rumah pemotongan hewan				
	PT.	Perlindungan Hak Buruh melalui Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang Payung Hukum Ketenagakerjaan					

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
			Jaminan cuti hamil, melahirkan bagi pekerja perempuan dan laki-laki	Pemberian cuti melahirkan bagi ayah	Program Kepegawaian daerah	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%
			Perlindungan atas hubungan industrial	Perlindungan atas hubungan industrial	Program Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerjaan dialog sosial	Angka
			Jaminan keterlibatan kaum buruh dalam penetapan upah				
	PT.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila					
			Tambak Ikan Nila - Pantura				
			Tambak Udang - Pansela				
Indeks Demokrasi Indonesia							
	PP.	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Hibah FKUB	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi dan diimplementasi	%
			Menyusun Regulasi Daerah terkait kerukunan umat beragama				
		Penerapan pendidikan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di SMA/SMK	Peningkatan toleransi beragama kepada Masyarakat				
			Sosialisasi Wawasan kebangsaan kepada Masyarakat				
			Pembentukan Paskibraka dan Pembangunan Karakter dan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Purna Paskibraka Jateng				
			Pelatihan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan dalam organisasi kepemudaan				

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
			Pelatihan Pendidikan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di kalangan pesantren				
			Penyelenggaraan Jateng Bersholawat				
	PA.	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan		Mendorong Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		
			Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan	Mengaktifkan UTPD PPA di kecamatan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan KOMprehensif	%
			Pembentukan Rumah Perlindungan Disabilitas	Fasilitasi Perlindungan Disabilitas	Program Rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan tuna sosial (PGOT) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di luar panti	%
	PA.	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi dan diimplementasi	%
		Peningkatan kegiatan forum Kerukunan antar Umat Beragama		Fasilitasi FKUB			
			Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan				
			Rembug Jagong Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan				
			Hibah FKUB				
		Peningkatan kegiatan kepada forum pembauran kebangsaan		Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang paham penguatan ideologi dan karakter kebangsaan	%

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
			Penguatan Jawa Tengah Kampung Bhineka				
			Penguatan Kontra Radikalisme Ekstrimisme Bagi Masyarakat				
			Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Lintas Etnis				
			Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan				
			Dialog Pembauran Kebangsaan				
			Nguri-nguri Budaya pada Generasi Muda Guna Ketahanan Bangsa				
			Kemah Kebangsaan				
			Hibah FPK				
	PT.	Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan	Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	Dukungan terhadap Pengarusutamaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%
			Penguatan perempuan dalam pembangunan daerah berbasis organisasi			Tingkat Partisipasi (TPAK) Perempuan	%
	PT.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya					
			Event Budaya di spot kunjungan wisata				
			- Kraton Mangkunegaran - Solo				
			- Kota Lama - Semarang				
			- Kota Lama - Banyumas				
			Penggunaan baju adat daerah setiap 1 minggu sekali dan hari-hari besar nasional				
Indeks Modal Manusia							
	PP.	Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren		Hibah bagi keagamaan.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang mendapatkan	%

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
						Penilaian Kinerja Organisasi kategori Baik (Indikator Program Pemerintahan dan Kesra)	
			Hibah pesantren				
	PP.	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin		BPJS bagi masyarakat miskin.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan	%
			Asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin			
	PP.	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Insentif Guru	Peningkatan Kesejahteraan bagi tenaga pendidik GTT/PTT (PAUD,SD,SMP)	Program pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%
						Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	%
						Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	%
						Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	%
			Insentif pengajar agama	Insentif bagi pendidik agama, pesantren dan pengelola tempat ibadah.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang mendapatkan	%

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
						Penilaian Kinerja Organisasi kategori Baik (Indikator Program Pemerintahan dan Kesra)	
			Insentif penghafal kitab				
			Beasiswa luar dan dalam negeri untuk siswa miskin	Beasiswa bagi siswa miskin	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang mendapatkan Penilaian Kinerja Organisasi kategori Baik (Indikator Program Pemerintahan dan Kesra)	%
			Beasiswa luar dan dalam negeri untuk guru				
			Beasiswa luar dan dalam negeri untuk santri berprestasi				
	PI.	Percepatan penanganan stunting melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil		Balita	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan	%
			Balita	Pemberian PMT			
			Pemberian PMT	Pemberian Suplemen			
			Pemberian Suplemen				
	PI.	Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet)		Seragam Gratis untuk SD dan SMP Negeri	Program pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%
			Menyediakan Paket Pendidikan Seragam			Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%
			Menyediakan Paket Pendidikan Buku Pembelajaran			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	%
			Menyediakan Paket Pendidikan Akses Internet			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	%
						Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	%
	PA.	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa		Optimalisasi layanan Puskesmas	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan	%
			Spesialis keliling setiap desa	Penyediaan mobil siaga pada desa miskin prioritas			
			Pelayanan kesehatan keliling				
			Puskesmas pembantu setiap desa				
			Pelayanan kesehatan setiap desa				
	PA.	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu		Penyediaan tenaga kesehatan pada RSUD dan Puskesmas	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%
			Penyediaan 1 Dokter di setiap puskesmas pembantu				
			Penyediaan 1 Bidan di setiap Puskesmas Pembantu				
	PA.	Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit		Pelayanan Lansia, ibu hamil, disabilitas.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan	%
			Lansia				
			Ibu Hamil				
			Disabilitas				
			Pensiunan				
	PA.	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta		Penyiapkan Lahan untuk pembangunan SMK			
			Identifikasi SMA/SMK di setiap Kecamatan				
			Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah swasta				

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
	PA.	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga		Alokasi dana bagi Organisasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%
			Peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih	Pemberian insentif bagi atlit berprestasi			
			Peningkatan kualitas dan tata kelola manajemen olahraga	Peningkatan kualitas dan tata kelola manajemen olahraga			
			Meningkatkan alokasi anggaran KONI dan KORMI				
	PA.	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan		Sekolah unggul di semua desa	Program pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%
			Pemetaan dan Penetapan Sekolah Percontohan Inklusif	Sekolah Inklusif		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%
			Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	%
						Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	%
						Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	%
	PT.	Peningkatan operasional kader Posyandu		Operasional Kader Posyandu	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan	%
				Pemberian insentif untuk kader posyandu			
	PT.	Peningkatan kualitas hidup lansia		Fasilitasi Posyandu lansia	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan	%
			Peningkatan fasilitasi Posyandu lansia	Pemeriksaan kesehatan			

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
			Pemeriksaan kesehatan	Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi			
			Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi	Cek kesehatan lansia rutin (Posyandu lansia)			
	PT.	Cek kesehatan gratis		Pelayanan kesehatan di wilayah kerja pada semua Puskesmas (posyandu, lansia)	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan	%
			Balita	Optimalisasi fungsi posyandu			
			anak usia dua tahun	Pap smear gratis (skrining Ca Serviks)			
			Anak usia sekolah Kelas 7				
			skrining TB anak dan dewasa				
Angka Kemiskinan							
	PP.	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana		Pembinaan tim desa tanggap bencana	Penanggulangan bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	%
			Pembangunan lumbung kesejahteraan	Pembentukan Destana (FPRB)			
			Produk unggulan go internasional bekerjasama dengan diaspora				
			Sistem Informasi Desa (SID)				
			Penguatan Tim tanggap bencana				
	PP.	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional		Pembangunan RTLH	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
			Verifikasi dan Validasi RTLH	Bantuan RTLH/bedah rumah diarahkan ke 21 desa prioritas kemiskinan, Perbaikan PSU Perumahan, Sertifikasi Pengembang, Relokasi Rumah Program Pemerintah dan Program Layak Huni bagi Korban Bencana, Perbaikan Saluran Drainase, Perbaikan Jalan Lingkungan, Pemeliharaan RTH (Alun-alun, Taman Kota dan Makam)			
			Penyediaan Anggaran	Mendorong peran Kolaborasi dengan BUMD, Swasta, dan Dunia Usaha dalam menangani RTLH			
			Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan sebagai Etalase Jawa Tengah	Revitalisasi sarana prasarana olah raga bagi masyarakat			
			Mendorong terciptanya Kolaborasi dengan BUMD, Swasta, dan Dunia Usaha dalam Kawasan Pengembangan Potensi Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan				
	PI.	Jambanisasi 100%		Jambanisasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	%
	PI.	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari					
		Pembelian hasil panen petani	Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Mengoptimalkan Hasil Pertanian (Intensifikasi)				

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
			Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Panen	Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Panen	Program Penyuluhan pertanian	Persentase SDM Petani yang ditingkatkan	%
		Pembelian hasil panen nelayan	Pelatihan Penggunaan Teknologi GPS pada Nelayan				
			Pelatihan Petambak Garam untuk Peningkatan Kualitas Produksi Garam Industri				
			Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Panen				
	PI.	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida					
			Asuransi gagal panen bagi petani	Asuransi gagal panen bagi petani	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%
			Asuransi alat tangkap dan kapal bagi nelayan				
	PA.	Petani milenial gajian		Sosialisasi dan penyuluhan petani milenial	Program Penyuluhan pertanian	Persentase SDM Petani yang ditingkatkan	%
			Identifikasi dan pemetaan petani milenial				
			Pendampingan petani milenial				
			Koordinasi dan Integrasi dengan Pemerintah Pusat terkait Program Petani Milenial Gajian				
	PA.	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana		Penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	%
			Identifikasi wilayah rawan bencana di Jawa Tengah	Pembinaan masyarakat dalam mitigasi bencana			
			Sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi				
			Monitoring sistem peringatan bencana				

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
	PT.	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin		Kolaborasi Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%
			Penguatan anggaran dan perubahan manajemen Balai Rehabilitasi Sosial	Peningkatan pengelolaan rumah singgah			
			Kolaborasi Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Beasiswa bagi siswa miskin dan mendorong beasiswa sekolah vokasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang mendapatkan Penilaian Kinerja Organisasi kategori Baik (Indikator Program Pemerintahan dan Kesra)	%
			Penambahan Identitas bagi kaum marginal				
	PT.	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya					
			Menyusun Regulasi Daerah terkait Energi Baru Terbarukan				
			Identifikasi desa mandiri energi				
			Melakukan riset potensi mandiri energi berbasis desa				
			Kolaborasi pengembangan EBT dengan BUMN dan Swasta				
	PT.	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat		Penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	%
			Pelatihan dan sertifikasi Penanganan Bencana	Sosialisasi KIE Daerah Rawan bencana per jenis ancaman			
			- BPBD Provinsi				
			- Tagana				
			- Masyarakat				

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
			Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota				
IKLH							
	PA.	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa		Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	%
			RTH Perkotaan				
			RTH Perdesaan				
	PT.	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional		Pengelolaan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%
		Pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Penguatan tata kelola KSM	Penguatan tata kelola KSM	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%
			Peningkatan kapasitas KSM				
		Pengembangan tempat pengolahan sampah regional	Modernisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional (TPST Reg)		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/ TPST Regional	%
			Penguatan Tata kelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional (TPST Reg)				
Inflasi							
	PT.	Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok		Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%
PDRB per Kapita							

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis			KABUPATEN/KOTA			
				Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah	Program Nomenklatur	Indikator	Satuan
	PI.	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru		Mendorong pengembnagan Poltektar Solo Raya yang sudah dirintis sejak tahun 2021			
			Pembentukan Kelembagaan				
			Identifikasi Potensi Kawasan Aglomerasi				

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjabarkan indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Sragen yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta yang memenuhi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selain target program, bab ini juga memuat pagu indikatif yang merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan.

Rencana program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 - 2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (Lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) Unsur Kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

4.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program pengelolaan pendidikan

Diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, termasuk pembangunan sekolah dasar unggul yang dikembangkan berdasarkan kekhasan potensi ekonomi, sosial, dan budaya setempat, dengan lokasi prioritas pada 61 desa miskin prioritas di Kabupaten Sragen. Pembangunan sekolah dasar unggul ini meliputi peningkatan kualitas tenaga pengajar; penyusunan software kurikulum; peningkatan sarana dan prasarana; dan penyiapan dukungan anggaran. Program tersebut juga berkontribusi dalam penurunan stunting melalui kelas Orangtua pada satuan

PAUD yang melibatkan orangtua peserta didik dalam upaya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini dan memastikan bahwa terjadi kesinambungan pembiasaan PHBS di satuan PAUD dan di rumah peserta didik.

b. **Program pengembangan kurikulum**

Diarahkan pada Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Nonformal.

c. **Program pendidik dan tenaga kependidikan**

Diarahkan pada pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

d. **Program pengendalian perizinan pendidikan**

Diarahkan pada penerbitan izin Pendidikan Dasar, PAUD, dan Non formal (Kejar Paket) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

e. **Program pengembangan bahasa dan sastra**

Diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra daerah lokal Sragen.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. **Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**

Diarahkan pada Penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten serta jaminan kesehatan masyarakat. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu persentase hipertensi dalam pengendalian, cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), angka keberhasilan pengobatan TBC (TB success rate), persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat, persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional, persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna, persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar, persentase lanjut usia yang mandiri, persentase merokok penduduk 10-21 tahun, cakupan penemuan kasus TB, cakupan imunisasi bayi lengkap, cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN), persentase persalinan di

fasyankes, prevalensi wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita, dan persentase puskesmas memenuhi kualitas kesehatan lingkungan. Dengan program ini diharapkan optimalisasi penanganan kesehatan lansia bisa meningkat menjadi 100%. Selain itu diharapkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin cakupannya semakin luas dan tercapai target.

b. **Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan**

Diarahkan pada peningkatan kompetensi, pemerataan, dan ketersediaan tenaga kesehatan yang profesional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Program ini mencakup pelatihan teknis dan manajerial, sertifikasi profesi, pendidikan berkelanjutan, serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan fasilitas kesehatan prioritas. Selain itu, diharapkan pula terjadi peningkatan kapasitas layanan prioritas seperti penanganan stunting, penyakit menular, dan kesehatan ibu-anak.

c. **Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman**

Diarahkan pada penyediaan, pengawasan, dan pemerataan ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta pengamanan terhadap peredaran makanan dan minuman yang memenuhi standar mutu, keamanan, dan manfaat. Program ini mencakup pengadaan obat esensial dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, pengawasan distribusi dan penggunaan obat, serta pengendalian mutu makanan dan minuman melalui inspeksi dan edukasi kepada masyarakat.

d. **Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**

Diarahkan pada peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kader Kesehatan, serta forum-forum kesehatan berbasis komunitas. Program ini mencakup penguatan posyandu, pelatihan kader kesehatan, pembinaan desa siaga aktif, serta peningkatan literasi kesehatan melalui kampanye dan edukasi publik.

Dukungan Kabupaten Sragen terhadap program prioritas Gubernur Jateng di bidang Kesehatan antara lain:

- Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin;
- Percepatan penanganan *stunting* melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil;
- Spesialis keliling, puskesmas pembantu, dan pelayanan kesehatan di setiap Desa;
- Mendorong penyediaan 1 Dokter 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu;
- Pelayanan tanpa antri lansia dan klinik geriatri, ibu hamil, dan disabilitas; pensiunan di rumah sakit;
- Pap smear gratis (skrining Ca Serviks);
- Peningkatan operasional kader posyandu;
- Peningkatan kualitas hidup lansia;

e. **Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan**

Program akreditasi pelayanan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat. Selain itu juga meningkatkan tata Kelola organisasi dan tata Kelola pelayanan di Puskesmas, Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya, dengan indikator program adalah sebagai berikut:

- Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna
- Persentase Rumah Sakit pemerintah yang terakreditasi paripurna
- Persentase labkesmas yang terakreditasi

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan irigasi pertanian, air baku, konservasi lingkungan, serta pengendalian daya rusak air. Kegiatan dalam program ini mencakup rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, normalisasi sungai dan saluran, pembangunan embung dan sumur resapan, serta konservasi daerah aliran sungai (DAS).

Program ini juga bertujuan meningkatkan ketahanan air untuk mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko banjir dan kekeringan, serta memperkuat kelembagaan pengelolaan air berbasis masyarakat di Kabupaten Sragen.

b. **Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum**

Program diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota serta Akses Rumah Tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.

c. **Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional**

Program ini diarahkan pada pengelolaan persampahan baik pemerintah, swasta dan masyarakat dengan indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/ TPST regional.

d. **Program pengelolaan dan pengembangan Sistem air limbah**

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman serta Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman.

e. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase diarahkan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu presentase cakupan drainase dalam kondisi baik.

f. **Program penataan bangunan gedung**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik.

g. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungan**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini adalah persentase jumlah penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota yang lebih baik. Selain itu, program ini juga mencakup penataan lingkungan sekitar bangunan agar selaras dengan prinsip tata ruang, estetika kota, dan keberlanjutan lingkungan.

h. Program penyelenggaraan jalan

Program ini diarahkan pada peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas jalan di daerah Kabupaten. Bentuk kegiatan berupa rekonstruksi jalan, survey kondisi jalan/jembatan, pemeliharaan jembatan berkala, pembangunan jembatan dan pemeliharaan rutin jalan diharapkan mampu meningkatkan capaian indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase panjang jalan dalam kondisi baik.

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program pengembangan jasa konstruksi diarahkan untuk pelatihan tenaga terampil konstruksi. Indikator yang akan dicapai adalah Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis.

j. Program penyelenggaraan penataan ruang

Program ini diarahkan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengembangan perumahan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Rehabilitasi serta Pendistribusian dan serah terima Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program meliputi persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

b. Program kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan permukiman melalui penyediaan akses air minum, sanitasi layak, drainase lingkungan, jalan lingkungan, dan pengelolaan persampahan. Program ini juga mencakup penataan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan guna mendukung pengurangan kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sragen.

c. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh

Program ini diarahkan pada meningkatnya penyediaan Perumahan dan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu persentase rumah tangga dengan akses hunian layak.

d. Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)

Program ini diarahkan pada meningkatnya penyediaan PSU permukiman. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi persentase perumahan yang sudah dilengkapi prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) serta persentase PSU kondisi baik.

e. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu jumlah sertifikasi dan registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelesaian gangguan ketertiban umum serta penerbitan perda dan perkara.

b. Program penanggulangan bencana

Program ini diarahkan pada Pelayanan Informasi, dan pencegahan daerah rawan Bencana Kabupaten/Kota, serta Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Program ini diarahkan pada meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pemberdayaan sosial

Program ini diarahkan pada upaya penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan peningkatan potensi kesejahteraan sosial bagi kelompok-kelompok rentan dengan lokasi prioritas pada 21 desa miskin prioritas di Kabupaten Sragen.

b. Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan

Program ini diarahkan pada Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

c. Program rehabilitasi sosial

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, serta Penerima Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan tuna sosial (PGOT) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti.

d. Program perlindungan dan jaminan sosial

Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Anak-anak Terlantar serta Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten, dengan lokasi prioritas pada 21 desa miskin di Kabupaten Sragen. Program ini juga berkontribusi dalam upaya penurunan prevalensi stunting, karena apabila masyarakat miskin mendapat jaminan sosial maka kebutuhan dasar mereka yang meliputi pendidikan, kesehatan dan

ekonomi akan terpenuhi sehingga berpengaruh pada meningkatnya derajat kesehatan keluarganya.

e. Program penanganan bencana

Program ini diarahkan pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten serta Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

f. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

4.2 Urusan Wajib Bukan pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program perencanaan tenaga kerja

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan informasi perencanaan tenaga kerja, meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan mikro.

b. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan pelatihan tenaga kerja yang berkompeten dan pembinaan kepada Lembaga pelatihan kerja swasta.

c. Program penempatan tenaga kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan pelayanan informasi pasar kerja dan penempatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta pembinaan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.

d. Program hubungan industrial

Program ini diarahkan pada meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak agar tercipta hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan, serta

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.

b. Program perlindungan perempuan

Program ini diarahkan pada Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan peran serta keluarga dalam pengasuhan anak, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Fokus utama program meliputi pencegahan pernikahan usia anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pra-sejahtera melalui UPPKS, serta peningkatan kapasitas keluarga dalam upaya penurunan stunting dan perlindungan kelompok rentan. Program ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi peran kader serta kelembagaan lokal dalam mendampingi keluarga secara berkelanjutan.

d. Program pengelolaan sistem data gender dan anak

Program ini diarahkan pada pengelolaan, pengumpulan, dan pemanfaatan data terkait gender dan anak secara terintegrasi dan akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.

e. Program pemenuhan hak anak (PHA)

Program ini diarahkan pada Pelembagaan program pemenuhan hak anak, serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

f. Program perlindungan khusus anak

Program ini diarahkan pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dukungan terhadap program Gubernur Jawa Tengah antara lain: Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas di setiap Kecamatan.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

Program ini diarahkan pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

c. Program penanganan kerawanan pangan

Program ini diarahkan pada Peningkatan penanganan kawasan rawan pangan dan pembuatan peta kerentanan serta ketahanan pangan.

d. Program pengawasan keamanan pangan

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten.

4. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan untuk menyelesaikan sengketa tanah Garapan dengan indikator Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan bersengketa yang Dilakukan melalui Mediasi.

b. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan indikator persentase dokumen redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente yang tersusun.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan meningkatnya tata Kelola sistem informasi manajemen pertanahan dengan indikator persentase titik aset tanah Pemerintah Kabupaten yang terupdate ke sistem informasi aset pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program perencanaan lingkungan hidup

Program ini diarahkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten serta penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten.

b. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Program ini diarahkan pada Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten.

c. Program pengelolaan keanekaragaman hayati

Program ini diarahkan untuk Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten. Serta diarahkan pembuatan dokumen pengelolaan keanekaragaman hayati, optimalisasi ruang terbuka hijau (fungsi ekologis, sosial, estetika), dan perluasan atau penambahan unit ruang terbuka hijau.

d. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

Program ini diarahkan pada pengelolaan, pengendalian, dan pemantauan penggunaan serta pembuangan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kegiatan mencakup identifikasi sumber B3, pengawasan pengelolaan limbah B3 di industri dan fasilitas lainnya, serta edukasi dan penegakan peraturan terkait penanganan B3.

e. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

f. Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang berkelanjutan. Kegiatan meliputi sosialisasi tentang pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan adaptasi perubahan iklim.

g. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan pada Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Meningkatkan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

h. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

i. Program pengelolaan persampahan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pendaaurulan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Swasta dan pemberdayaan masyarakat serta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pendaftaran penduduk

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pendaftaran penduduk.

b. Program pencatatan sipil

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan catatan sipil.

c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Program ini diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

d. Program pengelolaan profil kependudukan

Program ini diarahkan pada Penyusunan dan peningkatan publikasi Profil Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa melalui kegiatan penyelenggaraan penataan

desa dan menitikberatkan pada penataan wilayah desa yang berkaitan dengan batas desa, perubahan status desa, penggabungan desa, penamaan dan kode desa.

b. Program peningkatan kerjasama desa

Program ini diarahkan pada Peningkatan Fasilitas Fasilitas Kerjasama Antar Desa.

c. Program administrasi pemerintah desa

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

d. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengendalian penduduk

Program ini diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk serta Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten.

b. Program pembinaan keluarga berencana (KB)

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi, serta Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR) dan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need). Program ini juga berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting. Dengan adanya pemakaian kontrasepsi, maka kehamilan akan lebih terencana dan pada akhirnya akan mengurangi resiko bayi lahir dengan kecacatan.

c. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, serta PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini meliputi persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah kegiatan pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi, lancar, dan aman, meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan. Program ini juga mencakup kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, manajemen keselamatan, pengujian kendaraan, pengelolaan terminal, kemitraan jalan.

b. Program pengelolaan pelayaran

Program ini diarahkan pada pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sektor pelayaran untuk mendukung keselamatan, kelancaran, dan efisiensi transportasi laut di wilayah perairan Kabupaten/Kota.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program aplikasi informatika

Program ini diarahkan pada pengelolaan e-government meliputi melalui kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten, dan pengelolaan e government di lingkup pemerintah daerah kabupaten .

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha simpan pinjam yang cepat, transparan, dan akuntabel di wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan meliputi proses penerbitan, pengawasan, dan pembinaan lembaga usaha simpan pinjam agar beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.

b. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi

Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

c. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

Program ini diarahkan pada Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program pendidikan dan latihan perkoperasian

Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Adapun salah tujuan program ini meningkatkan jumlah koperasi sehat dan aktif di Kabupaten Sragen.

e. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten. kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas.

f. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

g. Program pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengembangan iklim penanaman modal

Program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota serta pembuatan peta potensi investasi.

b. Program promosi penanaman modal

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program pelayanan penanaman modal

Program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan sebagai berikut.

a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda, Kepemudaan, serta Organisasi Pemuda terhadap Pemuda Pelopor di tingkat Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader di Kabupaten.

b. Program pengembangan daya saing keolahragaan

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga prestasi, Olahraga rekreasi, dan organisasi olahraga, serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat daerah. Program ini merupakan upaya dalam mengoptimalkan pembinaan cabang olahraga.

c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penyelenggaraan statistik sectoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral diarahkan pada Peningkatan ketersediaan data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten untuk mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Sragen yang akurat dan terarah dengan indikator kinerja yaitu Persentase data statistik Perangkat Daerah yang aktual dan yang akurat.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan persandian dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengembangan kebudayaan

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Kebudayaan dan pelestarian kesenian yang pelakunya adalah masyarakat daerah, serta pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pengenalan kesenian daerah. Dengan kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota mampu meningkatkan perlindungan Obyek Pemajuan Kebudayaan/OPK.

c. Program pembinaan sejarah

Program ini diarahkan pada Pembinaan, pengkajian, dan pendokumentasian sejarah lokal.

d. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Program ini diarahkan pada Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program pengelolaan permuseuman

Program ini diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan koleksi, serta sarana dan prasarana permuseuman.

17. Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten, kegiatan meliputi Pengembangan Perpustakaan, Pengembangan Layanan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga perpustakaan serta Pembinaan Perpustakaan sekolah, umum dan khusus di tingkat daerah kabupaten dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten, kegiatan meliputi Sosialisasi budaya baca dan Literasi serta pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.

b. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno

Program ini diarahkan pada upaya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan koleksi nasional serta naskah kuno sebagai warisan budaya dan sejarah daerah. Kegiatan meliputi inventarisasi, konservasi fisik, digitalisasi, serta penyediaan fasilitas penyimpanan yang memadai dan aman.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengelolaan arsip

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis daerah serta Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten.

b. Program perlindungan dan penyelamatan arsip

Program ini diarahkan pada Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Pemerintah Daerah, serta Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota.

c. Program perizinan dan penggunaan arsip

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengelolaan perikanan tangkap

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan nelayan kecil, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

b. Program pengelolaan perikanan budidaya

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil dan peningkatan penggunaan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.

c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Program ini diarahkan pada Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil serta Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta optimalisasi pengelolaan destinasi wisata.

b. Program pemasaran pariwisata

Program ini diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.

c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

Program ini diarahkan pada Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini diarahkan pada Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Program ini diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan prasarana pertanian.

c. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Program ini diarahkan pada Penjaminan dan pengawasan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah.

d. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

e. Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan kemandirian pangan daerah.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.

b. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan, Pengelolaan, serta Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan.

c. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penjaminan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di daerah.

d. Program pengembangan ekspor

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan.

e. Program standarisasi dan perlindungan konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan survey barang dan harga.

f. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program perencanaan dan pembangunan industri

Program ini diarahkan pada Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

b. Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

c. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Program ini diarahkan pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten.

6. Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program pembangunan kawasan transmigrasi, yang diarahkan pada koordinasi penempatan transmigran ke Kawasan Transmigrasi.

4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Program ini diarahkan pada Peningkatan Fasilitasi kerjasama hukum dan koordinasi daerah, serta Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

b. Program perekonomian dan pembangunan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

c. Program penunjang urusan pemerintahan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan menjadi bagian reformasi birokrasi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**

Program ini diarahkan pada Pembuatan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, peningkatan kapasitas DPRD, serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.

4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

Program ini diarahkan untuk Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD.

b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Program ini diarahkan untuk Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan dengan indikator persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program pengelolaan keuangan daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi pengelolaan keuangan daerah serta Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

b. Program pengelolaan barang milik daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang diharapkan dapat menjadi faktor pendukung dalam peningkatan PAD.

c. Program pengelolaan pendapatan daerah

Program ini difokuskan pada peningkatan dan optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan, perbaikan sistem dan prosedur pemungutan berbasis digital, penguatan kapasitas aparatur, serta perluasan kerjasama pelayanan. Upaya ini didukung dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat agar

penerimaan daerah meningkat, berkelanjutan, dan mampu membiayai pembangunan serta pelayanan publik.

3. Kepegawaian

Program Kepegawaian daerah

Program ini diarahkan pada pemenuhan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN yang efektif dan efisien, mencakup perencanaan, pengadaan, mutasi, promosi, kepangkatan, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, serta peningkatan disiplin dan kesejahteraan ASN.

4. Pendidikan dan pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Program pengembangan sumber daya manusia

Program ini diarahkan pada Pengembangan Kompetensi Teknis, serta Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5. Penelitian dan pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Program Riset dan Inovasi Daerah

Program ini diarahkan pada Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi dalam mendukung ekosistem inovasi daerah.

4.6 Unsur Pengawas Urusan Pemerintah

1. Inspektorat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penyelenggaraan pengawasan

Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta pendampingan dan asistensi.

4.7 Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan dan koordinasi pelayanan urusan publik.

b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan kegiatan pemberdayaan.

c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan pencegahan tindak kriminalitas.

d. Program penyelenggaraan urusan pemerintah umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

e. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

Program ini diarahkan peningkatan pada pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

4.8 Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Kesatuan bangsa dan politik

a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

b. Program peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan penghayat kepercayaan.

e. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan														
1	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota					625.324.522.784		637.831.013.240		650.587.633.504		663.599.386.175		676.871.373.898	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pendidikan
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	94,44	94,8		95,00		95,20		95,40		95,50		
1	1	2	Program pengelolaan pendidikan					211.376.379.687		215.603.907.281		219.915.985.426		224.314.305.135		228.800.591.238	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pendidikan
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	68,37	70		71,00		72,00		73,00		75,00		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/SDLB	Persen	99,38	99,5		100		100		100		100		
				Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persen	109,65	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				SMP/MTS/Paket B/SMPLB													
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	Persen	93,76	95		95,50		96,00		96,50		97,00		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	Persen	88,06	88,9		89,00		89,50		90,00		91,00		
				Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	Persen	98	98,3		98,40		98,50		98,60		100		
1	1	3	Program pengembanga n kurikulum					8.000.00 0		8.160.00 0		8.323.20 0		8.489.66 4		8.659.457	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pendidik an
			Meningkatnya kurikulum muatan lokal yang dikembangka n	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan muatan lokal daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
1	1	4	Program pendidik dan tenaga kependidikan					39.532.0 00		40.322.6 40		41.129.0 93		41.951.6 75		42.790.70 8	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pendidik an
			Meningkatnya mutu dan		Persen	95	97		98,00		99,00		100,00		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			distribusi pendidik dan tenaga pendidikan														
				Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik	Persen	N/A	89		90,00		91,00		92,00		93,00		
1	1	5	Program pengendalian dan perizinan pendidikan				9.000.00 0		9.180.00 0			9.363.60 0		9.550.87 2		9.741.889	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pendidik an
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	Persen	100	100		100		100		100		100		
1	1	6	Program Pengembang an Bahasa dan Sastra				100.000. 000		105.000. 000			110.000. 000		115.000. 000		120.000.0 00	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pendidik an
			Terlestarikann ya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persen	100	100		100		100		100		100		
1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan														
1	2	1	Program Penunjang Urusan				463.218. 090.309		472.482. 452.000			482.036. 127.000		491.570. 743.000		501.402.1 57.000	Perangk at Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota													Pengamp u Urusan Bidang Kesehata n	
			Meningkatnya ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	90.02	90,03		90,04		90,05		90,06		90,07		
1	2	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat					92.486.7 08.388		94.336.4 42.000		96.223.1 70.000		98.147.6 33.000		100.110.5 85.000	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kesehata n
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	Persen	20	25		30,00		35,00		40,00		45,00		
				Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	Persen	N/A	46		55,00		61,00		70,00		75,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB success rate)	Persen	88	89		90,00		91,00		92,00		93,00		
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	91	94		96,00		99,00		100,00		100,00		
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persen	66	68		71,00		73,00		75,00		77,00		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	67	70		72,00		76,00		78,00		80,00		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen	83	86		89,00		92,00		95,00		97,00		
				Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen	80	82		84,00		86,00		88,00		90,00		
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persen	14,2	13,2		12,20		11,20		10,20		9,20		
				Cakupan penemuan kasus TB	Persen	80	82		84,00		86,00		88,00		90,00		
				Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	97	97		98,00		99,00		99,00		99,00		
				Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persen	74,93	74,94		74,96		74,98		75,00		75,00		
				Persentase persalinan di fasyankes	Persen	88	89		91,00		93,00		95,00		95,00		
				Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	Persen	8	7,5		7,00		6,50		5,00		5,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Persentase Puskesmas memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	Persen	50	60		70,00		80,00		90,00		100,00		
1	2	3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan					1.696.874.500		1.730.811.000		1.765.426.000		1.800.733.000		1.873.481.000	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kesehata n
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDMK	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1.000 penduduk	3,81	3,43		3,44		3,45		3,46		3,47		
1	2	4	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman					27.511.600		28.061.000		28.621.000		29.192.000		29.775.000	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kesehata n
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	Persen	80	81		82		83		84		85		
1	2	5	Program pemberdayaan masyarakat					3.824.254.340		3.900.738.000		3.978.751.000		4.058.325.000		4.139.490.000	Perangk at Daerah Pengamp

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			bidang kesehatan													u Urusan Bidang Kesehata n	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaa n masyarakat bidang Kesehatan	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik cukup	Persen	N/A	40		60,00		80,00		100		100		
				Persentase Puskesmas yang mencapai Rumah Tangga Sehat	Persen	30	35		40,00		45,00		50,00		55,00		
			Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan					-	65.000.000		970.000.000		65.000.000		67.000.000	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kesehata n	
			Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Rumah Sakit pemerintah yang terakreditasi paripurna	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Persentase labkesmas yang terakreditasi	Persen	N/A	100		100		100		100		100		
1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang														
1	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten /Kota					22.101.535.176		22.543.565.880		22.994.437.197		23.454.325.941		23.454.325.941	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	Pekerjaa n Umum
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	89	89,1		89,20		89,30		89,40		89,50		
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					13.821.7 14.000		14.098.1 48.280		14.380.1 11.246		14.667.7 13.471		14.961.06 7.740	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pekerjaa n Umum
			Terwujudnya pengelolaan irigasi yang baik	Persentase luas layanan Irigasi multikomoditas	Persen	74,35	74,55		74,65		74,75		74,85		74,95		
1	3	3	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum					3.683.75 4.000		3.757.42 9.080		3.832.57 7.662		3.909.22 9.215		3.987.413 .799	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pekerjaa n Umum
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap system	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum	Persen	88,91	90,26		90,95		91,64		92,33		93,03		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penanggg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			penyediaan air minum	melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota													
				Akses Rumah Tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (IUP)	Persen	63,37	67,03		68,86		70,69		72,53		74,36		
1	3	4	Program Pengembang an Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					2.726.37 1.350		2.780.89 8.777		2.836.51 6.753		2.893.24 7.088		2.951.112 .029	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pekerjaa n Umum (Sub Bidang Persamp ahan)
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Sampah terolah di TPA/ TPST /TPS3R	Persen	10,8	11		11,20		11,30		11,40		11,50		
1	3	5	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah					3.086.24 6.000		3.147.97 0.920		3.210.93 0.338		3.275.14 8.945		3.340.651 .924	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pekerjaa n Umum

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Pengembangan		
								2026		2027		2028		2029			2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	88,39	89,26		89,86		90,64		91,70		93,07		
				pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	Persen	3,25	7,23		10,85		15,10		21,04		24,16		
1	3	6		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum
				Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	63,74	64,14		64,62		65,04		65,39		65,83		
1	3	8		Program Penataan Bangunan Gedung					729.003.000		743.583.060		758.454.721		773.623.816		789.096.292	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum
				Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	Persen	85,4	88,33		89,25		90,17		91,08		91,98		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	3	9	Program Pen ataan Bangunan dan Lingkungan					16.000.0 00		16.320.0 00		16.646.4 00		16.979.3 28		17.318.91 5	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pekerjaa n Umum
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase jumlah penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota yang lebih baik	Persen	75	76,52		76,54		76,56		76,58		76,60		
1	3	10	Program Penyelenggar aan Jalan					117.087. 312.000		119.429. 058.240		121.817. 639.405		124.253. 992.193		126.739.0 72.037	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pekerjaa n Umum
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik	Persen	82,91	83,48		83,76		84,08		84,32		84,60		
1	3	11	Program Pengembanga n Jasa Konstruksi					9.997.00 0		10.196.9 40		10.400.8 79		10.608.8 96		10.821.07 4	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pekerjaa n Umum

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	27,5	32		33,50		35,00		36,50		38,00		
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					870.000.000		887.400.000		905.148.000		923.250.960		941.715.979	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pekerjaa n Umum (Sub Bidang Tata Ruang)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pemenuhan NSPK bidang tata ruang	Persen	N/A	13,75		43,13		59,17		89,38		100,00		
				Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	Persen	N/A	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman														
1	4	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan					12.678.331.070		12.931.897.691		13.190.535.645		13.454.346.358		13.723.433.285	Perangk at Daerah Pengamp

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			n Daerah Kabupaten /Kota													u Urusan Bidang Perumah an dan Kawasan Permuki man dan Bidang Penataa n Ruang	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	91,51	91,53		91,54		91,55		91,56		91,57		
1	4	2	Program Pengembang an perumahan					861.448. 000		878.676. 960		896.250. 499		914.175. 509		932.459.0 19	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Perumah an dan Kawasan Permuki man dan Bidang Penataa n Ruang
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang	Persen	75,08	78,6		80,36		82,12		83,89		85,65		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			warga korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Memperoleh Rumah Layak Huni													
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	100	0		50,00		50,00		50,00		50,00		
1	4	3	Program Kawasan Permukiman					239.999. 850		244.799. 847		249.695. 844		254.689. 761		259.783.5 56	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Perumah an dan Kawasan Permuki man dan Bidang Penataa n Ruang
			Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10- 15 Ha yang Ditangani	Persen	85,12	85,12		88,26		91,40		95,70		100,00		
1	4	4	Program Perumahan dan Kawasan					2.775.35 0.000		2.830.85 7.000		2.887.47 4.140		2.945.22 3.623		3.004.128 .095	Perangk at Daerah Pengamp

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Permukiman Kumuh													Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Penataan Ruang	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	90,36	90,62		91,23		91,84		92,45		92,83		
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					15.647.623.932		15.960.576.411		16.279.787.939		16.605.383.698		16.937.491.372	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Penataan Ruang
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum)	Persen	6	8		8,00		8,00		8,00		8,00		
				Persentase PSU Kondisi Baik	Persen	72,08	72,68		72,93		73,19		73,44		73,65		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	4	6	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				20.000.000		20.400.000		20.808.000		21.224.160		21.648.643	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Perumah an dan Kawasan Permuki man dan Bidang Penataa n Ruang	
			Meningkatnya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Sertifikasi dan Registrasi bagi Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Lapora n	1	1		2,00		2,00		2,00		2,00		
1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat														
1	5	1	Program Penunjang Urusan					7.761.648.450		7.916.881.419		8.075.219.047		8.236.723.428		8.401.457.897	Perangk at Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pemerintah n Daerah Kabupaten /Kota sub Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Kebakaran													Pengamp u Urusan Bidang Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat sub Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum dan Kebakar an	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi sub Urusan Ketentraman ketertiban Umum dan Kebakaran	Nilai	89,23	89,43		89,53		89,63		89,73		89,83		
1	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah					2.736.74 6.163		2.791.48 1.086		2.847.31 0.708		2.904.25 6.922		2.962.342 .061	Perangk at Daerah Pengamp u

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Kabupaten /Kota sub Urusan Bencana													Urusan Bidang Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat sub urusan Bencana	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi sub Urusan Bencana	Nilai	89,25	89,35		89,40		89,45		89,50		89,60		
1	5	2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					1.472.35 2.550		1.501.79 9.601		1.531.83 5.593		1.562.47 2.305		1.593.721 .751	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Pengangg jawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	kat sub Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	71.43	90		95,00		100		100		100		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100	100		100		100		100		100		
1	5	3	Penanggulan gan bencana					1.056.96 3.615		1.180.18 0.890		1.359.75 3.196		1.252.35 4.224		1.146.100 .558	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	Perlindu ngan Masyara kat sub urusan Bencana
			Meningkatnya kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Persen	3,45	3,62		7,30		11,07		14,87		18,73		
			Meningkatkan kapasitas kabupaten/ko ta dalam penanganan bencana	Persentase pelayananan dalam penanganan bencana	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Meningkatnya kapasitas sistem informasi dan data kebencanaaan	Persentase Kegiatan Pasca Bencana yang tertanganani	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	5	4	Pencegahan, penanggulang an, penyelamata n kebakaran dan penyelamata n non kebakaran					983.253. 000		1.002.91 8.060		1.022.97 6.421		1.043.43 5.950		1.064.304 .669	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																ngan Masyara kat Sub Urusan Kebakar an	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi RawanKebakaran	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Menit	12,7	12,5		12,00		11,50		11,00		10,50		
1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial														
1	6	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten /Kota					6.480.62 0.197		6.610.23 2.601		6.742.43 7.253		6.877.28 5.998		7.014.831 .718	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Sosial
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	97,9	98		98,10		98,20		98,30		98,40		
1	6	2	Program Pemberdayaa n sosial					358.000. 000		365.160. 000		372.463. 200		379.912. 464		387.510.7 13	Perangk at Daerah Pengamp

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Pengang ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	u Urusan Bidang Sosial
			Meningkatnya pemberdayaa n sosial	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	Persen	65	70		71,00		72,00		73,00		74,00		
1	6	3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					90.000.000		91.800.000		93.636.000		95.508.720		97.418.894	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Sosial
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migan korban tindak kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang tertangani	Persen	70	75		76,00		77,00		78,00		79,00		
1	6	4	Program Rehabilitasi sosial					1.012.046.000		1.032.286.920		1.052.932.658		1.073.991.312		1.095.471.138	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Sosial
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan tuna sosial (PGOT) yang mendapatkan	Persen	18	18,3		20,00		25,00		30,00		35,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Rehabilitasi Sosial di luar panti													
1	6	5	Program Perlindungan dan jaminan sosial					8.494.77 9.012		8.664.67 4.592		8.837.96 8.084		9.014.72 7.446		9.195.021 .995	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Sosial
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jamianan Sosial	Persen	30	35		40,00		45,00		50,00		55,00		
1	6	6	Program Penanganan bencana					109.000. 000		111.180. 000		113.403. 600		115.671. 672		117.985.1 05	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Sosial
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pasca tanggap darurat Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		
1	6	7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)					40.000.0 00		40.800.0 00		41.616.0 00		42.448.3 20		43.297.28 6	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		
2			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
2	7		Urusan Tenaga Kerja														
2	7	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten /Kota					9.100.83 9.441		9.282.85 6.230		9.468.51 3.354		9.657.88 3.622		9.851.041 .294	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Tenaga kerja
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	79,55	80,36		80,66		80,76		80,86		80,96		
2	7	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja					23.927.0 00		24.405.5 40		24.893.6 51		25.391.5 24		25.899.35 4	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Tenaga kerja
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	11,11	33,33		44,44		55,55		66,66		77,77		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	7	3	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja					3.455.13 6.300		3.524.23 9.026		3.594.72 3.807		3.666.61 8.283		3.739.950 .648	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Tenaga kerja
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga Kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	98,78	98,78		98,79		98,83		98,86		98,86		
2	7	4	Program Penempatan tenaga kerja					274.752. 000		280.247. 040		285.851. 981		291.569. 020		297.400.4 01	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Tenaga kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	90,78	91,24		91,51		91,79		92,10		92,43		
2	7	5	Program Hubungan Industrial					109.697. 450		111.891. 399		114.129. 227		116.411. 812		118.740.0 48	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Tenaga kerja
			Meningkatnya pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang	Angka	52,26	54,08		55,98		57,96		60,01		62,12		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Indonesia yang terlindungi	menerapkan perlindungan hak-hak pekerjaan dialog sosial													
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak														
2	8	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten /Kota					5.467.53 6.632		5.576.88 7.365		5.688.42 5.112		5.802.19 3.614		5.918.237 .486	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pengend alian Pendudu k & Keluarga Berenca na, Bidang Pemberd ayaan Perempu an & Perlindu ngan Anak
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	77,62	77,7		77,75		77,80		77,85		78		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	8	2	Program Pengarusuta maan Gender dan Pemberdayaa n Perempuan				83.110.000		84.772.200		86.467.644		88.196.997		89.960.937	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pengend alian Pendudu k & Keluarga Berenca na, Bidang Pemberd ayaan Perempu an & Perlindu ngan Anak	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggara an PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	16,72	18,9	19,90		20,70		21,60		22,50			
				Tingkat Partisipasi (TPAK) Perempuan	Persen	N/A	59,18	59,45		59,72		59,99		60,26			
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan				58.450.000		59.619.000		60.811.380		62.027.608		63.268.160	Perangk at Daerah Pengamp u	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	Urusan Bidang Pengend alian Pendudu k & Keluarga Berenca na, Bidang Pemberd ayaan Perempu an & Perlindu ngan Anak
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					5.000.00 0		5.100.00 0		5.202.00 0		5.306.04 0		5.412.161	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pengend alian Pendudu k & Keluarga Berenca na, Bidang Pemberd

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	ayaan Perempu an & Perlindu ngan Anak
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pusat pembelajaran keluarga sejahtera (PUSPAGATRA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Persen	N/A	20		40		60		80		100,00		
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					35.000.0 00		35.700.0 00		36.414.0 00		37.142.2 80		37.885.12 6	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pengend alian Pendudu k & Keluarga Berenca na, Bidang Pemberd ayaan Perempu an & Perlindu

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	ngan Anak
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	N/A	18,9		19,90		20,70		21,60		22,50		
2	8	6	Program pemenuhan hak anak (PHA)					120.575. 000		122.986. 500		125.446. 230		127.955. 155		130.514.2 58	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pengend alian Pendudu k & Keluarga Berenca na, Bidang Pemberd ayaan Perempu an & Perlindu ngan Anak
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Skor	N/A	63,34		63,59		63,98		64,49		65,12		
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak					78.927.5 00		80.506.0 50		82.116.1 71		83.758.4 94		85.433.66 4	Perangk at Daerah Pengamp

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	u Urusan Bidang Pengend alian Pendudu k & Keluarga Berenca na, Bidang Pemberd ayaan Perempu an & Perlindu ngan Anak
			Meningkatnya pencegaham dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan KOMprehensif	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Skor	N/A	82,52		82,67		82,85		83,06		83,29		
2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan														
2	9	1	Program Penunjang Urusan Pemerintaha					22.568.2 51.011		23.019.6 16.031		23.480.0 08.352		23.949.6 08.519		24.428.60 0.689	Perangk at Daerah Pengamp

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			n Daerah Kabupaten /Kota													u Urusan Bidang Pangan	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	98,02	98,06		98,08		98,10		98,12		98,14		
2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan					-		-		125.000. 000		130.000. 000		135.000.0 00	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pangan
			Meningkatnya jumlah ketersediaan pangan pokok masyarakat	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	3,8	8,14		10,30		12,47		14,64		16,81		
2	9	3	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat					183.794. 700		187.470. 594		191.220. 006		195.044. 406		198.945.2 94	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pangan
			Meningkatnya panganekarag aman	Angka Kecukupan Energi (AKE)	kkal/k apita/ hari	2108	2106		2.105,0 0		2.104,00		2.103,00		2.102,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg jawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			konsumsi pangan yang berbasis sumber daya														
2	9	4	Program Penanganan kerawanan pangan					119.645. 000		122.037. 900		124.478. 658		126.968. 231		129.507.5 96	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pangan
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	2,88	2,4		2,40		1,92		1,92		1,44		
2	9	5	Program Pengawasan keamanan pangan					30.407.1 00		31.015.2 42		31.635.5 47		32.268.2 58		32.913.62 3	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pangan
			Meningkatnya pengawasan mutu dan kemanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	68	70		72,00		74,00		76,00		78,00		
2	1 0		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian														
2	1 0	4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					100.000. 000		102.000. 000		104.040. 000		106.120. 800		108.243.2 16	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	Perumah an dan Kawasan Permuki man, Bidang Pertanah an, dan Bidang Penataa n Ruang
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terelesaikannya Kasus Tanah Garapan bersengketa yang Dilakukan melalui Mediasi	Persen	20	20		40,00		60,00		80,00		100,00		
2	10	6	Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					125.000.000		127.500.000		130.050.000		132.651.000		135.304.020	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Perumah an dan Kawasan Permuki man, Bidang Pertanah an, dan Bidang Penataa n Ruang
			Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan	Persentase Dokumen Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian	Persen	20	20		40,00		60,00		80,00		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang Tersusun													
2	1 0	1 6	Penatagunaa n Tanah				50.000.0 00		50.000.0 00		55.000.0 00		55.000.0 00		60.000.00 0	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Perumah an dan Kawasan Permuki man, Bidang Pertanah an, dan Bidang Penataa n Ruang	
			Meningkatnya Titik Aset Tanah Pemerintah Kabupaten yang Terupdate ke Sistem Informasi Aset Pertanahan	Persentase Titik Aset Tanah Pemerintah Kabupaten yang Terupdate ke Sistem Informasi Aset Pertanahan	Persen	5,88	20		40,00		60,00		80,00		100,00		
2	1 1		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup														

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota				12.224.9 23.427		12.469.4 21.896		12.718.8 10.333		12.973.1 86.540		13.232.65 0.271	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	93,6	93,62		93,63		93,64		93,65		93,66		
2	1	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				180.400. 000		184.008. 000		187.688. 160		191.441. 923		195.270.7 62	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	100		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									Perangk at Daerah Penangg ungjawa b	
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2	1	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					1.160.34 0.138		1.183.54 6.941		1.207.21 7.880		1.231.36 2.237		1.255.989 .482	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Lingkun gan Hidup
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	prosentase pengendalian pencemaran sungai di wilayah perkotaan	Persen	100	100		100		100		100		100		
2	1	4	Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati (Kehati)					300.776. 786		306.792. 322		312.928. 168		319.186. 732		325.570.4 66	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Lingkun gan Hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaraga man hayati	Persentase RTH	Persen	15,89	15,90		15,92		15,93		15,94		15,95		
2	1	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan					69.054.6 12		70.435.7 04		71.844.4 18		73.281.3 07		74.746.93 3	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)													Lingkun gan Hidup	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	N/A	96		96,50		97,00		97,50		98,00		
2	1 1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					129.940. 450		132.539. 259		135.190. 044		137.893. 845		140.651.7 22	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Lingkun gan Hidup
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terjadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Tingkat ketaatan perijinan PPLH	Persen	N/A	47,06		50,56		53,76		56,70		61,86		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	1	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				19.613.500		20.005.770		20.405.885		20.814.003		21.230.283	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Lingkun gan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Jumlah desa yang memiliki Perdes PPLH	Persen	22,4	32,65		42,85		53,06		63,26		73,46		
2	1	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				103.342.750		105.409.605		107.517.797		109.668.153		111.861.516	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Lingkun gan Hidup	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase lembaga yang mendapat penghargaan bidang lingkungan hidup	Persen	N/A	23,38		25,38		27,38		29,38		31,38		
2	1	10	Program Penanganan Pengaduan				16.523.050		16.853.511		17.190.581		17.534.393		17.885.081	Perangk at Daerah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Lingkungan Hidup														Pengamp u Urusan Bidang Lingkun gan Hidup
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kas us tindak pisana lingkungan hidup	Persentase Pengaduan yang terselesaikan di tingkat Kabupaten	Persen	N/A	70		70,00		75,00		75,00		80,00		
2	1	1	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Nilai Indeks Kualit as Pengel olaan Sampa h (IPKS)	48,5	48,7		48,80		48,90		49,00		49,50		Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Lingkun gan Hidup
2	1	2	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2	1	2	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota					6.149.18 5.500		6.272.16 9.210		6.397.61 2.594		6.525.56 4.846		6.656.076 .143	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Administ rasi Kependu dukan dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	Pencatat an Sipil
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	88,38	88,75		88,95		89,15		89,35		89,60		
2	1 2	2	Program pendaftaran penduduk					907.116. 000		925.258. 320		943.763. 486		962.638. 756		981.891.5 31	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
			Meningkatnya kepemilikan Dokumen Kependuduka n atas pelaporan peristiwa kependuduka n	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persen	99,44	99,50		99,55		99,60		99,65		99,70		
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	66,79	72		74,00		76,00		78,00		80,00		
2	1 2	3	Program pencatatan sipil					265.713. 000		271.027. 260		276.447. 805		281.976. 761		287.616.2 97	Perangk at Daerah Pengamp

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	u Urusan Bidang Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
			Meningkatnya kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-18 Tahun	Persen	98,51	98,6		98,70		98,80		98,90		99,00		
				Persentase Akta Pencatatan Sipil yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100		100		100		100		100		
2	1 2	4	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan					103.826. 000		105.902. 520		108.020. 570		110.180. 982		112.384.6 01	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
				Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persen	72,73	81,82		90,91		100,00		100,00		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penang ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	1 2	5	Program pengelolaan profil kependuduka n					35.262.500		35.967.750		36.687.105		37.420.847		38.169.264	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
			Meningkatnya kualitas data kependuduka n skala Kabupaten	Persentase akurasi data kependudukan skala Kabupaten	Persen	96,97	99,9		99,91		99,92		99,93		99,94		
2	1 3		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
2	1 3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten /Kota					5.294.617.790		5.400.510.146		5.508.520.349		5.618.690.756		5.731.064.571	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Perangkat Daerah	keuangan Perangkat Daerah													
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	89,72	89,74		89,75		89,76		89,77		89,78		
2	1 3	2	Penataan Desa					1.074.96 9.000		1.096.46 8.380		1.118.39 7.748		1.140.76 5.703		1.163.581 .017	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		
2	1 3	3	Peningkatan Kerja Sama Desa					1.884.99 9.918		1.922.69 9.916		1.961.15 3.915		2.000.37 6.993		2.040.384 .533	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
			Meningkatnya efektivitas Kerjasama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya efektivitas kerjasama	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			antar desa dengan Pihak Ketiga														
2	1 3	4	Program administrasi pemerintaha n desa					5.702.56 5.000		5.816.61 6.300		5.932.94 8.626		6.051.60 7.599		6.172.639 .750	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pemberdayaan. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminsitiasi Pemerintahan Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Bantuan Keuangan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		
2	1 3	5	Program pemberdayaa n lembaga kemasyaraka					611.134. 000		623.356. 680		635.823. 814		648.540. 290		661.511.0 96	Peramg at Daerah Pengamp

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			tan Lembaga adat dan masyarakat hukum adat													u Urusan Bidang Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyaraka tan dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	100	100		100		100		100		100		
2	1 4		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
2	1 4	2	Program pengendalian penduduk					643.944. 250		656.823. 135		669.959. 598		683.358. 790		697.025.9 65	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pengend alian Pendudu k & Keluarga Berenca na, Bidang Pemberd ayaan Perempu an & Perlindu ngan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Nilai	10,4	10,4		10,40		10,40		10,40		10,40		
2	1 4	3	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)				5.833.54 7.900		5.950.21 8.858		6.069.22 3.235		6.190.60 7.700		6.314.419 .854	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pengend alian Pendudu k & Keluarga Berenca na, Bidang Pemberd ayaan Perempu an & Perlindu ngan Anak	
			Meningkatnya pemberdayaa n dan peran serta Masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	68	69,62		70,40		71,19		71,98		72,00		
				Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	9,1	8,8		8,70		8,70		8,60		8,50		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	14	4	Program pemberdayaa n dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)				5.241.80 0.000		5.346.63 6.000		5.453.56 8.720		5.562.64 0.094		5.673.892 .896	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pengend alian Pendudu k & Keluarga Berenca na, Bidang Pemberd ayaan Perempu an & Perlindu ngan Anak	
			Meningkatnya pemberdayaa n dan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	N/A	36		36,20		36,40		36,60		36,80		
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan														
2	15	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan n Daerah				10.117.3 41.801		10.319.6 88.637		10.526.0 82.410		10.736.6 04.058		10.951.33 6.139	Perangk at Daerah Pengamp u	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Kabupaten /Kota													Urusan Bidang Perhubu ngan	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	91,74	91,84		91,89		91,94		91,99		92,04		
2	1 5	2	Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					25.960.3 28.900		26.479.5 35.478		27.009.1 26.188		27.549.3 08.711		28.100.29 4.886	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Perhubu ngan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	67,24	67,75		68,10		68,84		68,95		69,13		
2	1 5	3	Pengelolaan Pelayaran					7.491.25 0		7.641.07 5		7.793.89 7		7.949.77 4		8.108.770	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Perhubu ngan
			Meningkatnya kualitas	Persentase peralatan keselamatan kapal	Persen	29,17	35,79		38,24		40,70		43,16		45,62		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			layanan transportasi laut														
2	1	6	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika														
2	1	6	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota				6.024.732.478		6.145.227.128		6.268.131.670		6.393.494.304		6.521.364.190	Perangk at Daerah Pengampu Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	85,31	85,79		86,29		86,79 (baik)		87,29(Baik)		87,79 (baik)		
2	1	6	2	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik				1.355.000.000		1.382.100.000		1.409.742.000		1.437.936.840		1.466.695.577	Perangk at Daerah Pengampu Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya Badan Publik	Persentase Badan Publik yang informatif	Persen	59,6	80		82		84		90		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			yang informatif														
2	1 6	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				2.638.26 9.544		2.691.03 4.935		2.744.85 5.634		2.799.75 2.746		2.855.747 .801	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Komunik asi dan Informati ka	
			Meningkatnya peneglolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	50	60	70	80	90	100						
2	1 7		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah														
2	1 7	1	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota				20.776.0 88.299		21.191.6 10.065		21.615.4 42.266		22.047.7 51.112		22.488.70 6.134	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Koperasi , Usaha Kecil & Menenga h	
			Meningkatnya ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100							

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Perangkat Daerah														
				Nilai/kategori penilaian kinerja organisasi	Nilai	94,62 (Baik)	94,72		94,77		94,82		94,87		94,92		
2	17	2	Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam				4.999.900		5.099.898		5.201.896		5.305.934		5.412.053	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase pelayanan ijin usaha simpan pinjam	Persen	N/A	0,88		1,32		1,75		2,19		2,63		
2	17	3	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi				55.000.000		56.100.000		57.222.000		58.366.440		59.533.769	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	
			Meningkatnya pembinaan dan	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	N/A	1,71		2,56		3,42		4,27		5,13		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			pengawasan koperasi														
2	1 7	4	Program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi				55.000.0 00		56.100.0 00		57.222.0 00		58.366.4 40		59.533.76 9	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Koperasi , Usaha Kecil & Menenga h	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif yang dinilai kesehatannya	Persen	N/A	55		55,24		55,45		56,52		56,67		
2	1 7	5	Program Pendidikan dan latihan perkoperasi n				80.000.0 00		81.600.0 00		83.232.0 00		84.896.6 40		86.594.57 3	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Koperasi , Usaha Kecil & Menenga h	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	N/A	91,23		91,23		91,23		91,23		91,23		
2	1 7	6	Pemberdayaa n dan perlindungan koperasi				75.000.0 00		76.500.0 00		78.030.0 00		79.590.6 00		81.182.41 2	Perangk at Daerah Pengamp	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	u Urusan Bidang Koperasi , Usaha Kecil & Menenga h
			Meningkatnya produktiviat s koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	N/A	35,09		35,96		36,86		37,72		38,60		
2	1 7	7	Program Pemberdayaa n Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)					1.800.76 0.000		1.836.77 5.200		1.873.51 0.704		1.910.98 0.918		1.949.200 .536	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Koperasi , Usaha Kecil & Menenga h
			Terlaksanany a pemberdayaa n Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang ditingkatkan kualitas usahanya	Persen	0.66	1.67		2.15		2.64		3.12		3.61		
2	1 7	8	Program Pengembang an UMKM					550.000. 000		561.000. 000		572.220. 000		583.664. 400		595.337.6 88	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	Koperasi , Usaha Kecil & Menenga h
			Berkembangn ya UMKM menjadi wirausaha baru	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Persen	12,5	12,5		12,50		12,50		12,50		12,50		
2	1	8	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal														
2	1	8	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten /Kota				5.947.30 0.221		6.066.24 6.225		6.187.57 1.150		6.311.32 2.573		6.437.549 .024	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Penana man Modal
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	98,5	98,51		98,52		98,53		98,54		98,55		
2	1	8	2	Program Pengembang an iklim penanaman modal				105.000. 000		107.100. 000		109.242. 000		111.426. 840		113.655.3 77	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	Penana man Modal
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	137	100		100		100		100		100		
2	1 8	3	Program Promosi penanaman modal					80.000.0 00		81.600.0 00		83.232.0 00		84.896.6 40		86.594.57 3	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Penana man Modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi skala menengah/ besar	Persen	27	21		22		23		24		25		
2	1 8	4	Program Pelayanan penanaman modal					273.000. 000		278.460. 000		284.029. 200		289.709. 784		295.503.9 80	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Penana man Modal
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	N/A	96		97,00		98,00		99,00		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawab
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	18	5	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal					87.000.000		88.740.000		90.514.800		92.325.096		94.171.598	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Penana man Modal
			Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase realisasi LKPM	Persen	7	8,5		9		9,50		10,00		10,50		
2	18	6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		27.060.804	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Penana man Modal
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100		100		100		100		100		
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang kepemudaan dan Olahraga														
2	19	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten /Kota					6.985.802.867		7.125.518.924		7.268.029.303		7.413.389.889		7.561.657.687	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Pengang jawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	Kepemu daan & Olahraga
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	80,29 (Baik)	80,5		81,00		81,50		82,00		82,50		
2	1 9	2	Program Pengembanga n Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					256.500. 000		261.630. 000		266.862. 600		272.199. 852		277.643.8 49	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kepemu daan & Olahraga
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Angka	N/A	10		11,00		12,00		13,00		14,00		
2	1 9	3	Program Pengembanga n Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					5.564.99 5.000		5.676.29 4.900		5.789.82 0.798		5.905.61 7.214		6.023.729 .558	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kepemu daan & Olahraga
			Meningkatnya pembudayaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	56	60,8		63,20		65,60		68,63		69,25		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			dan prestasi olah raga														
2	1	4	Program pengembanga n kapasitas kepramukaan				400.000. 000		408.000. 000		416.160. 000		424.483. 200		432.972.8 64		Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kepemu daan & Olahraga
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	25	10		11,00		12,00		13,00		14,00		
2	2	0	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik														
2	2	2	Program penyelenggar aan statistik sektoral				330.000. 000		340.000. 000		385.000. 000		415.000. 000		440.000.0 00		Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Komunik asi dan Informati ka
			Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sektoral	Persentase data sektoral Perangkat Daerah yang aktual dan yang akurat	Persen	80	85		85,00		90,00		90,00		90,00		
2	2	1	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian														
2	2	2	Program penyelenggar aan				153.516. 000		153.516. 000		156.586. 320		159.718. 046		162.912.4 07		Perangk at Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penang ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			persandian untuk pengamanan informasi													Pengamp u Urusan Bidang Komunik asi dan Informati ka	
			Meningkatnya keamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan Prinsip Manajemen keamanan informasi	Persen	N/A	20		40,00		60,00		80,00		100,00		
2	2	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan														
2	2	2	Program Pengembang an Kebudayaan				2.292.97 0.200		2.338.82 9.604		2.385.60 6.196		2.433.31 8.320		2.481.984 .686	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kebuday aan	
			Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pengembang an kebudayaan	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang Dilestarikan	Persen	N/A	40		40,00		40,00		45,00		45,00		
2	2	3	Pengembang an Kesenian Tradisional				144.799. 800		147.695. 796		150.649. 712		153.662. 706		156.735.9 60	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	Kebudaya aan
			Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pengembanga n kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilindungi dan Dikembangkan	Persen	N/A	30		35,00		35,00		40,00		40,00		
2	2 2	4	Program Pembinaan Sejarah					433.000. 000		441.660. 000		450.493. 200		459.503. 064		468.693.1 25	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kebudaya aan
			Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infromasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	N/A	20		25,00		25,00		30,00		30,00		
2	2 2	5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya					768.775. 295		784.150. 801		799.833. 817		815.830. 493		832.147.1 03	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kebudaya aan
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Obyek Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	N/A	30		35,00		35,00		40,00		40,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	2 2	6	Pengelolaan Permuseuma n					139.512. 400		142.302. 648		145.148. 701		148.051. 675		151.012.7 08	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kebuday aan
			Meningkatnya tata Kelola museum	Persentase SDM Permuseuman yang diberdayakan	Persen	N/A	60		60,00		70,00		70,00		80,00		
2	2 3		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan														
2	2 3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota					5.095.09 3.503		5.196.99 5.373		5.300.93 5.281		5.406.95 3.986		5.515.093 .066	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Arsip dan Bidang Perpusta kaan
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	88,65	88,7		88,75		88,80		88,90		89,10		
2	2 3	2	Program pembinaan perpustakaan					418.850. 000		427.227. 000		435.771. 540		444.486. 971		453.376.7 10	Perangk at Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	Pengamp u Urusan Bidang Arsip dan Bidang Perpusta kaan
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	66,06	67,5		68,00		68,50		69,00		69,60		
2	2 3	3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno					20.000.0 00		20.400.0 00		20.808.0 00		21.224.1 60		21.648.64 3	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Arsip dan Bidang Perpusta kaan
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	0	2		2,50		2,75		3		3,25		
2	2 4		Urusan pemerintahan bidang kearsipan														
2	2 4	2	Program Pengelolaan arsip					222.400. 000		226.848. 000		231.384. 960		236.012. 659		240.732.9 12	Perangk at Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	Pengamp u Urusan Bidang Arsip dan Bidang Perpusta kaan
			Meningkatnya tata eseha arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Angka	10	12		13		14		15		16		
2	2 4	3	Program Perlindungan dan Penyelamata n Arsip					15.000.0 00		15.300.0 00		15.606.0 00		15.918.1 20		16.236.48 2	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Arsip dan Bidang Perpusta kaan
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	50	75		75		75		75		75		
2	2 4	4	Program Perizinan Penggunaan Arsip					25.000.0 00		25.500.0 00		26.010.0 00		26.530.2 00		27.060.80 4	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	Arsip dan Bidang Perpusta kaan
			Meningkatnya akses Masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persen	100	100		100		100		100		100		
3			Urusan Pemerintahan Pilihan														
3	2	5	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan														
3	2	5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					20.000.000		20.400.000		20.808.000		21.224.160		21.648.643	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kelautan & Perikana n
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.693	2.733		2.747,00		2.761,00		2.774,00		2.787,00		
3	2	5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					601.963.600		614.002.872		626.282.929		638.808.588		651.584.760	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	Kelautan & Perikana n
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	44.276 ,52	45.170 ,95		46.101, 70		46.581,16		47.070,26		47.517,4 4		
3	2	5	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan					11.597.0 00		11.828.9 40		12.065.5 19		12.306.8 29		12.552.96 6	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Kelautan & Perikana n
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Angka	25,11	22,14		22,36		22,58		22,81		23,04		
3	2	6	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata														
3	2	6	2	Program Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata				381.498. 690		389.128. 664		396.911. 237		404.849. 462		412.946.4 51	Pengamp u Urusan Bidang Pariwisat a
				Meningkatnya daya Tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	0.24	0.55		0.7		0.86		1.01		1.02	
3	2	6	3	Program Pemasaran Pariwisata				1.220.19 0.000		1.244.59 3.800		1.269.48 5.676		1.294.87 5.390		1.320.772 .897	Pengamp u Urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Bidang Pariwisat a	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	40	42		44,00		46,00		48,00		50,00		
3	2 6	4	Pprogram Pengembanga n Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan hak Kekayaan Intelektual					575.000. 000		586.500. 000		598.230. 000		610.194. 600		622.398.4 92	Pengamp u Urusan Bidang Pariwisat a
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	N/A	14,5		19,00		23,50		28,00		32,00		
3	2 6	5	Program Pengembanga n sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif					200.000. 000		200.000. 000		200.000. 000		300.000. 000		300.000.0 00	Pengamp u Urusan Bidang Pariwisat a
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persen	N/A	14.5		19,00		23.5		28,00		32,00		
3	2 7		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	2	2	Program Penyediaan dan pengembang an sarana pertanian				8.587.12 1.000		8.758.86 3.420		8.934.04 0.688		9.112.72 1.502		9.294.975 .932	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pertania n	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	0,03	0,17		0,26		0,37		0,48		0,59		
				Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	0,002	0,056		0,084		0,112		0,14		0,16		
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Persen	0,010	0,01		0,010		0,010		0,010		0,010		
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	Persen	0,001	0,002		0,006		0,0072		0,0077		0,0082		
3	2	3	Program Penyediaan dan pengembang an prasarana pertanian				3.959.73 8.439		4.038.93 3.208		4.119.71 1.872		4.202.10 6.109		4.286.148 .232	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pertania n	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase prasana pertanian yang dimanfaatkan	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	2	4	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner				87.783.600		89.539.272		91.330.057		93.156.659		95.019.792	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pertania n	
			Meningkatnya pengendalian esehatan hewan dan esehatan masyarakat veteriner	Tingkat Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	5	5		5,00		5,00		5,00		5,00		
				Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	50	50		50,00		50,00		50,00		50,00		
3	2	5	Program Pengendalian dan penanggulang an bencana pertanian				196.956.000		200.895.120		204.913.022		209.011.283		213.191.509	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pertania n	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulang an bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	2,37	2,29		2,18		2,14		2,10		2,05		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Pengang jawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	27	7	Program Penyuluhan pertanian					5.557.69 1.500		5.668.84 5.330		5.782.22 2.237		5.897.86 6.681		6.015.824 .015	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Pertania n
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Petani yang ditingkatkan	Persen	20	20		20,00		20,00		20,00		20,00		
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan														
3	30		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					30.000.0 00		30.600.0 00		31.212.0 00		31.836.2 40		32.472.96 5	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Perdaga ngan
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	1,43	4,17		4,83		5,48		6,12		6,76		
3	30	3	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan					2.042.78 6.000		2.083.64 1.720		2.125.31 4.554		2.167.82 0.845		2.211.177 .262	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	Perdaga ngan
			Meningkatnya fasilitas distribusi perdagangan yang siap mengelola pasar dengan optimal	Persentase pasar dalam kondisi baik	Persen	60	62,22		64,44		66,67		68,89		0,69		
3	30	4	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting					37.220.000		37.964.400		38.723.688		39.498.162		40.288.125	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Perdaga ngan
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	N/A	81,13		83,02		83,02		84,91		86,79		
3	30		Program Pengembanga n Ekspor					20.000.000		20.400.000		20.808.000		21.224.160		21.648.643	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Perdaga ngan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Nilai	N/A	2		1,94		1,94		1,94		1,88		
3	30	6	Program Standardisasi dan perlindungan konsumen					105.000. 000		107.100. 000		109.242. 000		111.426. 840		113.655.3 77	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Perdaga ngan
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	99,56	99,64		99,73		99,82		99,91		100,00		
3	30		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					910.000. 000		928.200. 000		946.764. 000		965.699. 280		985.013.2 66	Perangk at Daerah Pengamp u Urusan Bidang Perdaga ngan
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persen	N/A	60		80,00		80,00		80,00		80,00		
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian														
3	31	2	Program Perencanaan dan					1.035.08 8.000		1.055.78 9.760		1.076.90 5.555		1.098.44 3.666		1.120.412 .540	Dinas Koperasi , Usaha

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			pembangunan industri													Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	N/A	4		4,25		4,50		4,75		5,00		
3	31	3	Program Pengendalian izin usaha Industri					50.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	N/A	100		100		100		100		100		
3	31		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		27.060.804	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persentase data industri yang tersedia dan terintegrasi dengan SIINas	Persen	100	100		100		100		100		100		
3	3	2	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi														
3	3	2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Tenaga Kerja	
			Meningkatnya kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigrasi yang difasilitasi Transmigrasi	Persen	100	100		100		100		100		100		
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan														
4	1		Sekretariat Daerah														
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota				36.745.310.395		37.480.216.603		38.229.820.935		38.994.417.354		39.774.305.701	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																Pemerint ahan Sekretari at Daerah	
			Terwujudnya kinerja PD di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang prima, efektif dan efisien	Persentase Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang mendapatkan Penilaian Kinerja Organisasi kategori Baik dan Istimewa	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan tamu serta pimpinan di Sekretariat Daerah	Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	87,09	87,15		87,25		87,35		87,45		87,45		
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	1	2	Program Pemerintaha n dan Kesejahteraa n Rakyat					17.314.8 46.600		17.661.1 43.532		18.014.3 66.403		18.374.6 53.731		18.742.14 6.805	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan Pemerint ahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
																	Sekretari at Daerah
			Meningkatnya kualitas kebijakan dalam penyelenggara an tata kelola pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang mendapatkan Penilaian Kinerja Organisasi kategori Baik dan istimewa	Persen	91,3	93		94,00		95,00		100,00		100,00		
4	1	3	Program Perekonomia n dan Pembanguna n					2.224.99 9.200		2.269.49 9.184		2.314.88 9.168		2.361.18 6.951		2.408.410 .690	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan Pemerint ahan Sekretari at Daerah
			Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang mendapatkan Penilaian Kinerja Organisasi kategori Baik dan Istimewa	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	2		Sekretariat DPRD														
4	2	1	Program Penunjang Urusan					42.114.9 63.739		42.957.2 63.014		43.816.4 08.274		44.692.7 36.440		45.586.59 1.168	Perangk at Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota													Pengampu unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	82,4	82,6		82,80		83		83,20		83,40		
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				25.646.842.000		26.159.778.840		26.682.974.417		27.216.633.905		27.760.966.583	Perangkat daerah Pengampu unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD	
			Meningkatnya dukungan guna pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi penyusunannya	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Persentase fasilitasi terhadap fungsi	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b			
								2026		2027		2028		2029			2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
					penganggaran dan pengawasan DPRD														
					Persentase dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD	Persen	100	100		100			100		100				
					Persentase fasilitasi terhadap tugas DPRD	Persen	100	100		100			100		100				
5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
5	1			Perencanaan															
5	1	1		Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten /Kota					7.061.57 2.872		7.287.23 3.022			7.867.39 6.823		7.958.11 8.359		7.700.811 .846	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan Pemerint ahan Perencan aan
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100			100		100		100		
					Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	90,28	90,30		90,31			90,32		90,33		90,35		
5	1	2		Program perencanaan, pengendalian , dan evaluasi pembanguna n daerah					661.744. 500		675.006. 000			688.500. 000		965.800. 000		1.223.963 .000	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	Pemerint ahan Perencan aan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	85,28	100		100		100		100		100		
5	1	3	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembanguna n daerah					862.915. 447		1.014.10 7.150		897.777. 231		915.732. 776		1.038.637 .202	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan Pemerint ahan Perencan aan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100		100		100		100		100		
5	2		Keuangan														
5	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota					23.192.692.485		23.656.546.335		24.129.677.261		24.612.270.807		25.104.516.223	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	96	96,5		96,75		97,00		97,25		97,50		
5	2	2	Program Pengelolaan keuangan daerah					424.677.559.300		433.171.110.486		441.834.532.696		450.671.223.350		459.684.647.817	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	ahan Keuanga n
			Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran keuangan daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen	38,9	38		30,00		30,00		30,00		30,00		
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	23,27	32		40,00		40,00		40,00		40,00		
			Meningkatnya kualitas penatausahaa n keuangan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan	Persen	90	90		92,00		95,00		97,00		100		
			Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah	Persentase laporan Perangkat Daerah tepat waktu serta sesuai dengan standar SAP	Persen	100	100		100		100		100		100		
5	2	3	Program Pengelolaan barang milik daerah					1.363.50 0.000		1.390.77 0.000		1.418.58 5.400		1.446.95 7.108		1.475.896 .250	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan Pemerint ahan Keuanga n
				Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengumpulan laporan BMD dan penatausahaan barang milik daerah	Persen	100	100		100		100		100		100	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
5	2	4	Program Pengelolaan pendapatan daerah				5.595.61 4.500		5.875.40 3.625		6.169.17 3.809		6.477.63 2.498		6.801.514 .120	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan Pemerint ahan Keuanga n	
			Meningkatnya efektivitas penagihan pajak serta pembinaan dan pengawasan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	Persen	108,81	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya efektivitas pendaftaran, pendataan potensi, serta pengembang an dan penyuluhan pajak daerah	Persentase wajib pajak baru yang terdaftar dibandingkan potensi wajib pajak	Persen	97,2	100		100		100		100		100		
			Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pembinaan retribusi	Persentase ketertiban pelaporan penerimaan retribusi dari OPD pemungut retribusi	Persen	100	100		100		100		100		100		
5	3		Kepegawaian														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
5	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten /Kota				8.014.46 8.180		8.174.75 7.544		8.338.25 2.694		8.505.01 7.748		8.675.118 .103	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan Pemerint ahan Kepegaw aian	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	96,43	96,5		96,60		96,75		96,85		97,00		
5	3	2	Program Kepegawaian daerah				1.844.31 0.000		1.881.19 6.200		1.918.82 0.124		1.957.19 6.526		1.996.340 .457	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan Pemerint ahan Kepegaw aian	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penanggg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya pengembanga n kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengembangkan Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan	Persen	60	61		62,00		63,00		64,00		65,00		
			Meningkatnya tata kelola pengembanga n karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	28	28		28,25		28,50		28,75		29,00		
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	97	97,5		98,00		98,50		99,00		99,50		
5	4		Pendidikan dan Pelatihan														
5	4	2	Program pengembanga n SDM					986.532. 900		1.006.26 3.558		1.026.38 8.829		1.046.91 6.606		1.067.854 .938	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan Pemerint ahan Kepegaw aian & Urusan Pemerint ahan Pendidik an & Pelatiha n
			Meningkatnya layanan pengembanga n kompetesin	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar,	Persen	14	14,2		14,50		14,70		15,00		15,20		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			dasar, kader, manajerial, dan fungsional	Manajerial, dan Fungsional													
			Meningkatnya layanan pengembanga n kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	48	48,5		49,00		49,50		50,00		50,50		
5	5		Penelitian dan Pengembangan														
5	5	3	Riset dan Inovasi Daerah					1.478.35 3.300		1.507.92 0.366		1.538.07 8.773		1.568.84 0.349		1.600.217 .156	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan Pemerint ahan Perencan aan, Urusan Pemerint ahan Penelitia n & Pemb angan
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase inovasi yang dimanfaatkan	Persen	66,2	66,67		69,33		74,67		77,33		80,00		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatka n sebagai	Persentase kajian /riset yang ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			kebijakan pembangunan daerah dalam pengembanga n potensi unggulan														
6			Unsur Pengawasan Pemerintahan Daerah														
6	1		Inspektorat Daerah														
6	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota				9.580.08 1.229		9.771.68 2.854		9.967.11 6.511		10.166.4 58.841		10.369.78 8.018	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan Pemerint ahan Inspekto rat Daerah	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100,00		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	93	93		93,10		93,20		94,30		94,40		
6	1	2	Program penyelenggara an pengawasan				732.582. 000		747.233. 640		762.178. 313		777.421. 879		792.970.3 17	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	Pemerint ahan Inspekto rat Daerah
			Menurunnya terjadinya penyelewenga n/penyimpan gan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses atau kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	N/A	80		82,00		84,00		85,00		86,00		
6	1	3	Program Perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi					1.015.34 6.500		1.035.65 3.430		1.056.36 6.499		1.077.49 3.829		1.099.043 .705	Perangk at Daerah Pengamp u Unsur Penduku ng Urusan Pemerint ahan Inspekto rat Daerah
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3		3		3		3		3		
7			Unsur Kewilayahan														
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan					2.767.13 5.511		2.822.47 8.221		2.878.92 7.786		2.936.50 6.341		2.995.236 .468	Kecamat an

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pemerintah an Daerah Kabupaten /Kota													Kalijamb e	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100,00		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Persen	85,67	85,69		85,72		85,75		85,77		85,79		
		2	Program Penyelenggar aan pemerintah an dan pelayanan publik					8.500.00 0		8.670.00 0		8.843.40 0		9.020.26 8		9.200.673	Kecamat an Kalijamb e
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100,00		100		100		100		
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan					5.500.00 0		5.610.00 0		5.722.20 0		5.836.64 4		5.953.377	Kecamat an Kalijamb e
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100,00		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			desa dan kelurahan														
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum				21.000.000		21.420.000		21.848.400		22.285.368		22.731.075	Kecamatan Kalijambe	
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100,00		100		100		100		
			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				311.700.000		317.934.000		324.292.680		330.778.534		337.394.104	Kecamatan Kalijambe	
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100		100,00		100		100		100		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.000.000		20.400.000		20.808.000		21.224.160		21.648.643	Kecamatan Kalijambe	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100,00		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			pemerintahan desa														
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota					2.509.47 0.928		2.559.66 0.347		2.610.85 3.553		2.663.07 0.625		2.716.332 .037	Kecamat an Plupuh
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	83,24	84		84,25		84,50		84,75		85		
		2	Program Penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik					20.000.0 00		20.400.0 00		20.808.0 00		21.224.1 60		21.648.64 3	Kecamat an Plupuh
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program pemberdayaa n masyarakat					-		1000000 0		1200000 0		1300000 0		15000000	Kecamat an Plupuh

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			desa dan kelurahan														
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100	100,00		100		100			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				26.300.0 00		26.826.0 00		27.362.5 20		27.909.7 70		28.467.96 6	Kecamat an Plupuh	
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program penyelenggar aan urusan pemerintaha n umum				332.297. 600		338.943. 552		345.722. 423		352.636. 872		359.689.6 09	Kecamat an Plupuh	
			Meningkatnya penyelenggara an pemerintahan umum yang terkoordinasik an dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa				15.999.8 00		16.319.7 96		16.646.1 92		16.979.1 16		17.318.69 8	Kecamat an Plupuh	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota					2.456.863.797		2.506.001.073		2.556.121.094		2.607.243.516		2.659.388.387	Kecamat an Masaran
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	87,72	88		88,25		88,45		88,73		89		
		2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					88.751.000		90.526.020		92.336.540		94.183.271		96.066.937	Kecamat an Masaran
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b			
							2026		2027		2028		2029			2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
			standar pelayanan															
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan					10.000.0 00		10.200.0 00			10.404.0 00		10.612.0 80		10.824.32 2	Kecamat an Masaran
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100			100			100		100			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum					25.140.0 00		25.642.8 00			26.155.6 56		26.678.7 69		27.212.34 5	Kecamat an Masaran
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100			100			100		100			
			Program penyelenggar aan urusan pemerintah an umum					503.388. 000		513.455. 760			523.724. 875		534.199. 373		544.883.3 60	Kecamat an Masaran
			Meningkatnya penyelenggara an pemerintahan umum yang terkoordinasik an dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100			100			100		100			

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa					24.188.800		24.672.576		25.166.028		25.669.348		26.182.735	Kecamat an Masaran
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100,00		100		
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota					2.778.766.313		2.834.341.639		2.891.028.472		2.948.849.041		3.007.826.022	Kecamat an Kedawu ng
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	97,92	97,94		97,96		97,98		98,00		98,10		
		2	Program Penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik					7.261.500		7.406.730		7.554.865		7.705.962		7.860.081	Kecamat an Kedawu ng

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan					12.750.0 00		13.005.0 00		13.265.1 00		13.530.4 02		13.801.01 0	Kecamat an Kedawu ng
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum					21.000.0 00		21.420.0 00		21.848.4 00		22.285.3 68		22.731.07 5	Kecamat an Kedawu ng
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Program penyelenggar aan urusan pemerintah n umum					135.899. 500		138.617. 490		141.389. 840		144.217. 637		147.101.9 89	Kecamat an Kedawu ng
			Meningkatnya penyelenggara	Persentase penyelenggaraan	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			an pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik													
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					20.400.000		20.808.000		21.224.160		21.648.643		22.081.616	Kecamat an Kedawu ng
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota					2.894.536.997		2.952.427.737		3.011.476.292		3.071.705.818		3.133.139.934	Kecamat an Sambirej o
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	86,84	87,06		87,27		87,49		87,71		87,93		
		2	Program Penyelenggaraan					7.950.000		8.109.000		8.271.180		8.436.604		8.605.336	Kecamat an

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			pemerintah n dan pelayanan publik													Sambirej o	
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan					5.550.00 0		5.661.00 0		5.774.22 0		5.889.70 4		6.007.498	Kecamat an Sambirej o
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					24.620.0 00		25.112.4 00		25.614.6 48		26.126.9 41		26.649.48 0	Kecamat an Sambirej o
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program penyelenggar aan urusan					244.871. 000		249.768. 420		254.763. 788		259.859. 064		265.056.2 45	Kecamat an

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			pemerintah n umum													Sambirej o	
			Meningkatnya penyelenggara an pemerintahan umum yang terkoordinasik an dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah n Desa				13.500.0 00	13.770.0 00		14.045.4 00	14.326.3 08	14.612.83 4				Kecamat an Sambirej o	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten /Kota				2.490.95 5.839	2.540.77 4.956		2.591.59 0.455	2.643.42 2.264	2.696.290 .709				Kecamat an Gondang	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	84,21	84,51		84,81		85,11		85,41		85,71		
		2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					15.327.000		15.633.540		15.946.211		16.265.135		16.590.438	Kecamat an Gondang
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan					0		10000000		12000000		13000000		15000000	Kecamat an Gondang
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum					21.000.000		21.420.000		21.848.400		22.285.368		22.731.075	Kecamat an Gondang
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			ketertiban Umum														
			Program penyelenggar aan urusan pemerintah an umum				294.813. 600		300.709. 872		306.724. 069		312.858. 551		319.115.7 22	Kecamat an Gondang	
			Meningkatnya penyelenggara an pemerintahan umum yang terkoordinasik an dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa				12.432.0 00		12.680.6 40		12.934.2 53		13.192.9 38		13.456.79 7	Kecamat an Gondang	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten /Kota				2.406.01 7.108		2.454.13 7.450		2.503.22 0.199		2.553.28 4.603		2.604.350 .295	Kecamat an Sambun gmacan	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan	Persentase ketercapaian pelayanan umum,	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah													
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	80,66	81		81,66		82		82,66		83		
		2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					151.895.000		154.932.900		158.031.558		161.192.189		164.416.033	Kecamat an Sambun gmacan
			Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan					12.510.000		12.760.200		13.015.404		13.275.712		13.541.226	Kecamat an Sambun gmacan
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					26.738.000		27.272.760		27.818.215		28.374.580		28.942.071	Kecamat an Sambun gmacan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					221.059.000		225.480.180		229.989.784		234.589.579		239.281.371	Kecamatan Sambungmacan
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					18.000.000		18.360.000		18.727.200		19.101.744		19.483.779	Kecamatan Sambungmacan
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.681.795.172		2.735.431.075		2.790.139.697		2.845.942.491		2.902.861.341	Kecamatan Ngrampal

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Kabupaten /Kota														
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	88,69	89,13		89,57		90,02		90,46		90,9		
		2	Program Penyelenggar aan pemerintah n dan pelayanan publik				107.140. 200		109.283. 004		111.468. 664		113.698. 037		115.971.9 98	Kecamat an Ngrampa 1	
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan				11.080.0 00		11.301.6 00		11.527.6 32		11.758.1 85		11.993.34 8	Kecamat an Ngrampa 1	
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penanggg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					21.000.000		21.420.000		21.848.400		22.285.368		22.731.075	Kecamat an Ngrampa 1
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program penyelenggar aan urusan pemerintaha n umum					126.638.000		129.170.760		131.754.175		134.389.259		137.077.044	Kecamat an Ngrampa 1
			Meningkatnya penyelenggara an Pemerintahan umum yang terkoordinasik an dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa					16.021.600		16.342.032		16.668.873		17.002.250		17.342.295	Kecamat an Ngrampa 1
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
7	1		Kecamatan														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten /Kota					4.464.02 1.033		4.553.30 1.454		4.644.36 7.483		4.737.25 4.832		4.831.999 .929	Kecamat an Karangm alang
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	94,5	94,75		94,90		95,10		95,30		95,50		
		2	Program Penyelenggar aan pemerintah n dan pelayanan publik					810.408. 200		826.616. 364		843.148. 691		860.011. 665		877.211.8 98	Kecamat an Karangm alang
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan					3.843.78 0.300		3.920.65 5.906		3.999.06 9.024		4.079.05 0.405		4.160.631 .413	Kecamat an Karangm alang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase sarpras kelurahan kondisi baik	Persen	100	100		100		100		100				
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum					22.382.8 00	22.830.4 56		23.287.0 65		23.752.8 06	24.227.86 3	Kecamat an Karangm alang		
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100				
			Program penyelenggar aan urusan pemerintah n umum					175.362. 500	178.869. 750		182.447. 145		186.096. 088	189.818.0 10	Kecamat an Karangm alang		
			Meningkatnya penyelenggara an pemerintahan umum yang terkoordinasik an dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100		100		100		100				
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah n Desa					28.000.0 00	28.560.0 00		29.131.2 00		29.713.8 24	30.308.10 0	Kecamat an Karangm alang		
			Meningkatnya pembinaan	Persentase desa yang menyelesaikan	Persen	100	100		100		100		100				

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			dan pengawasan pemerintahan desa	RKPDesa dan APBDesa tepat waktu													
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota				8.564.66 5.534		8.735.95 8.845		8.910.67 8.022		9.088.89 1.582		9.270.669 .414	Kecamat an Sragen	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	88,63	89,13		89,63		90,13		90,63		91,13		
		2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				2.298.49 5.199		2.344.46 5.103		2.391.35 4.405		2.439.18 1.493		2.487.965 .123	Kecamat an Sragen	
			Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan					9.004.61 6.905		9.184.70 9.243		9.368.40 3.428		9.555.77 1.497		9.746.886 .926	Kecamat an Sragen
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase sarpras kelurahan kondisi baik	Persen	100	100			100		100		100			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					21.000.0 00		21.420.0 00		21.848.4 00		22.285.3 68		22.731.07 5	Kecamat an Sragen
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100			100		100		100			
			Program penyelenggar aan urusan pemerintaha n umum					654.631. 000		667.723. 620		681.078. 092		694.699. 654		708.593.6 47	Kecamat an Sragen
			Meningkatnya penyelenggara an pemerintahan umum yang terkoordinasik an dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100			100		100		100			
			Program Pembinaan dan					13.160.0 00		13.423.2 00		13.691.6 64		13.965.4 97		14.244.80 7	Kecamat an Sragen

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pengawasan Pemerintaha n Desa														
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota				2.921.68 6.698		2.980.12 0.432		3.039.72 2.841		3.100.51 7.297		3.162.527 .643	Kecamat an Sidoharj o	
			Meningkatnya ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	92,08	92,58		93,08		93,58		94,08		94,58		
		2	Program Penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik				134.865. 060		137.562. 361		140.313. 608		143.119. 881		145.982.2 78	Kecamat an Sidoharj o	
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan														
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan				6.000.000		6.120.000		6.242.400		6.367.248		6.494.593	Kecamat an Sidoharj o	
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				21.000.000		21.420.000		21.848.400		22.285.368		22.731.075	Kecamat an Sidoharj o	
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program penyelenggara an urusan pemerintah a n umum				214.645.500		218.938.410		223.317.178		227.783.522		232.339.192	Kecamat an Sidoharj o	
			Meningkatnya penyelenggara an Pemerintahan umum yang terkoordinasik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			an dengan baik														
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa					30.500.0 00		31.110.0 00		31.732.2 00		32.366.8 44		33.014.18 1	Kecamat an Sidoharj o
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota					2.675.44 0.554		2.728.94 9.365		2.783.52 8.352		2.839.19 8.919		2.895.982 .898	Kecamat an Tanon
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	84,92	85,17		85,42		85,67		85,92		86,17		
		2	Program Penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik					2.771.60 0		2.827.03 2		2.883.57 3		2.941.24 4		3.000.069	Kecamat an Tanon

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100				
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan				5.229.00 0		5.333.58 0		5.440.25 2		5.549.05 7		5.660.038	Kecamat an Tanon	
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum				22.463.8 00		22.913.0 76		23.371.3 38		23.838.7 64		24.315.54 0	Kecamat an Tanon	
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program penyelenggar aan urusan pemerintah n umum				268.404. 000		273.772. 080		279.247. 522		284.832. 472		290.529.1 21	Kecamat an Tanon	
			Meningkatnya penyelenggara	Persentase penyelenggaraan	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			an pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik													
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					12.977.200		13.236.744		13.501.479		13.771.508		14.046.939	Kecamat an Tanon
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota					5.369.971.480		5.477.370.910		5.586.918.328		5.698.656.694		5.812.629.828	Kecamat an Gemolon g
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	88,02	88,27		88,52		88,77		89,02		89,25		
		2	Program Penyelenggaraan					1.173.681.496		1.197.155.126		1.221.098.228		1.245.520.193		1.270.430.597	Kecamat an

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			pemerintahan dan pelayanan publik													Gemolongan	
			Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				5.666.248.000		5.779.572.960		5.895.164.419		6.013.067.708		6.133.329.062	Kecamatan Gemolongan	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase sarpras kelurahan kondisi baik	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				21.000.000		21.420.000		21.848.400		22.285.368		22.731.075	Kecamatan Gemolongan	
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program penyelenggaraan urusan				313.182.000		319.445.640		325.834.553		332.351.244		338.998.269	Kecamatan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	87,63	88,88		89,38		89,88		90,38		90,88		
		2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					7.199.900		7.343.898		7.490.776		7.640.591		7.793.403	Kecamat an Miri
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan					5.999.800		6.119.796		6.242.192		6.367.036		6.494.376	Kecamat an Miri
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					22.000.000		22.440.000		22.888.800		23.346.576		23.813.508	Kecamat an Miri
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			ketertiban Umum														
			Program penyelenggar aan urusan pemerintah an umum				144.883. 200		147.780. 864		150.736. 481		153.751. 211		156.826.2 35	Kecamat an Miri	
			Meningkatnya penyelenggara an Pemerintahan umum yang terkoordinasik an dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa				15.681.5 00		15.995.1 30		16.315.0 33		16.641.3 33		16.974.16 0	Kecamat an Miri	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten /Kota				2.648.75 0.980		2.701.72 6.000		2.755.76 0.520		2.810.87 5.730		2.867.093 .245	Kecamat an Sumberl awang	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan	Persentase ketercapaian pelayanan umum,	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah													
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	85,37	85,5		85,75		85,80		86		86		
		2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				8.000.000		8.160.000		8.323.200		8.489.664		8.659.457	Kecamat an Sumberl awang	
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan				6.000.000		6.120.000		6.242.400		6.367.248		6.494.593	Kecamat an Sumberl awang	
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum				22.000.000		22.440.000		22.888.800		23.346.576		23.813.508	Kecamat an Sumberl awang	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					323.356.000		329.823.120		336.419.582		343.147.974		350.010.934	Kecamatan Sumberlawang
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					18.521.000		18.891.420		19.269.248		19.654.633		20.047.726	Kecamatan Sumberlawang
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.226.973.873		2.271.513.350		2.316.943.617		2.363.282.490		2.410.548.140	Kecamatan Mondokan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Kabupaten /Kota														
			Meningkatnya ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	88,5	88,75		89		89,25		89,5		89,75		
		2	Program Penyelenggar aan pemerintah n dan pelayanan publik					9.188.00 0		9.371.76 0		9.559.19 5		9.750.37 9		9.945.387	Kecamat an Mondoka n
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan					10.000.0 00		10.200.0 00		10.404.0 00		10.612.0 80		10.824.32 2	Kecamat an Mondoka n
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					22.430.000		22.878.600		23.336.172		23.802.895		24.278.953	Kecamat an Mondoka n
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program penyelenggara an urusan pemerintaha n umum					259.147.000		264.329.940		269.616.539		275.008.870		280.509.047	Kecamat an Mondoka n
			Meningkatnya penyelenggara an pemerintahan umum yang terkoordinasik an dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					14.150.500		14.433.510		14.722.180		15.016.624		15.316.956	Kecamat an Mondoka n
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
7	1		Kecamatan														

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota				2.294.69 7.122		2.340.59 1.064		2.387.40 2.886		2.435.15 0.943		2.483.853 .962	Kecamat an Sukodon o	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	95,06	95,31		95,56		95,81		96,06		96,31		
		2	Program Penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik				11.577.0 00		11.808.5 40		12.044.7 11		12.285.6 05		12.531.31 7	Kecamat an Sukodon o	
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan				7.264.00 0		7.409.28 0		7.557.46 6		7.708.61 5		7.862.787	Kecamat an Sukodon o	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					27.228.0 00		27.772.5 60		28.328.0 11		28.894.5 71		29.472.46 3	Kecamat an Sukodon o
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program penyelenggar aan urusan pemerintah n umum					307.969. 000		314.128. 380		320.410. 948		326.819. 167		333.355.5 50	Kecamat an Sukodon o
			Meningkatnya penyelenggara an Pemerintahan umum yang terkoordinasik an dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah n Desa					20.436.0 00		20.844.7 20		21.261.6 14		21.686.8 47		22.120.58 4	Kecamat an Sukodon o
			Meningkatnya pembinaan	Persentase desa yang menyelesaikan	Persen	100	100		100		100,0		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			dan pengawasan pemerintahan desa	RKPDesa dan APBDesa tepat waktu													
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota				2.408.784.118		2.456.959.800		2.506.098.996		2.556.220.976		2.607.345.396	Kecamatan Gesi	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	88,62	89,12		89,37		89,62		89,87		90,12		
		2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				12.246.000		12.490.920		12.740.738		12.995.553		13.255.464	Kecamatan Gesi	
			Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									Perangk at Daerah Penangg ungjawa b	
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan					6.000.00 0		6.120.00 0		6.242.40 0		6.367.24 8		6.494.593	Kecamat an Gesi
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100			100	100		100		100		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum					21.425.0 00		21.853.5 00		22.290.5 70		22.736.3 81		23.191.10 9	Kecamat an Gesi
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100			100		100		100		100	
			Program penyelenggar aan urusan pemerintah n umum					296.757. 000		302.692. 140		308.745. 983		314.920. 902		321.219.3 21	Kecamat an Gesi
			Meningkatnya penyelenggara an pemerintahan umum yang terkoordinasik an dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persen	100	100			100	100		100		100		
			Program Pembinaan dan					11.804.0 00		12.040.0 80		12.280.8 82		12.526.4 99		12.777.02 9	Kecamat an Gesi

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pengawasan Pemerintaha n Desa														
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota					2.155.01 4.720		2.198.11 5.014		2.242.07 7.315		2.286.91 8.861		2.332.657 .238	Kecamat an Tangen
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	89,23	89,73		90,48		91,23		91,98		92,73		
		2	Program Penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik					5.432.00 0		5.540.64 0		5.651.45 3		5.764.48 2		5.879.771	Kecamat an Tangen
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			an dengan baik														
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa				13.999.800		14.279.796		14.565.392		14.856.700		15.153.834	Kecamat an Tangen	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100,0		100		
7	1		Kecamatan														
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota				2.139.832.955		2.182.629.614		2.226.282.206		2.270.807.851		2.316.224.008	Kecamat an Jenar	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	85,91	86,41		86,91		87,41		87,91		88,41		
		2	Program Penyelenggar aan pemerintaha n dan pelayanan publik				5.111.000		5.213.220		5.317.484		5.423.834		5.532.311	Kecamat an Jenar	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	Persen	100	100		100		100		100				
			Program pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan					13.435.000		13.703.700		13.977.774		14.257.329		14.542.476 Kecamat an Jenar	
			Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa yang aktif	Persen	100	100		100		100		100				
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum					23.000.000		23.460.000		23.929.200		24.407.784		24.895.940 Kecamat an Jenar	
			Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Persen	100	100		100		100		100				
			Program penyelenggar aan urusan pemerintah n umum					267.410.000		272.758.200		278.213.364		283.777.631		289.453.184 Kecamat an Jenar	
			Meningkatnya penyelenggara	Persentase penyelenggaraan	Persen		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			an Pemerintahan umum yang terkoordinasik an dengan baik	Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik													
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa					19.757.000		20.152.140		20.555.183		20.966.286		21.385.612	Kecamat an Jenar
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	Persen	100	100				100		100		100		
8			Unsur Pemerintahan Umum														
8	1		Kesatuan Bangsa dan Politik														
8	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten /Kota					4.469.012.691		4.558.392.945		4.649.560.804		4.742.552.020		4.837.403.060	Unsur Pemerint ahan Umum Badan Kesatua n Bangsa dan Politik
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100			100		100		100		100	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Hasil Penilaian Kinerja Organisasi	Nilai	87,83	88,33		90,00		90,50		91,00		91,50		
8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2.069.147.700		2.110.530.654		2.152.741.267		2.195.796.092		2.239.712.014	Unsur Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya Pemahaman dan Penguatan Ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	N/A	83		85,00		88,00		90,00		95,00		
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					1.308.362.800		1.334.530.056		31.361.20.657		91.988.445.070		93.828.213.972	Unsur Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya pemahaman Teknis dan Pemantapan	Persentase Pendidikan Politik pada masyarakat	Persen	N/A	1,7		1,80		1,90		2,00		2,10		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik														
8	1	4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				5.500.64 1.800		5.610.65 4.636		5.722.86 7.729		5.837.32 5.083		5.954.071 .585	Unsur Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	N/A	27,33		28,44		29,55		30,66		31,77		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangk at Daerah Penangg ungjawa b		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
8	1	5	Program Pembinaan dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				344.025. 800		350.906. 316		357.924. 442		365.082. 931		372.384.5 90	Unsur Pemerint ahan Umum Badan Kesatua n Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembang an ketahanan ekososbud	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	N/A	100		100		100		100		100		
8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				2.196.70 4.000		2.240.63 8.080		2.285.45 0.842		2.331.15 9.858		2.377.783 .056	Unsur Pemerint ahan Umum Badan Kesatua n Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas	Persentase potensi Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penanganan Konflik Sosial														

4.9 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sub bab ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sragen untuk lima tahun ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. ‘

4.9.1 Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kabupaten Sragen.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,39	5,50-5,86	5,5-6,0	6,50-7,08	7,10-7,63	7,60-8,12	7,90-8,34
2	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	75,53	76	76,71	77,21	77,43	78,57	78,63
3	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	87,14	87,29	87,67	88,17	88,77	89,47	90
4	Indeks Infrastruktur	Angka	76,18	76,97	77,51	78,05	78,61	79,08	79,67
5	Tingkat kemiskinan	Persen	12,41	12,07-11,65	11,50-11,18	11,10-10,92	10,85-10,35	10,30-9,77	9,50-9,20
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,53	3,55-3,17	3,41-3,11	3,30-3,00	3,18-2,88	3,06-2,76	2,95-2,65

4.9.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	89,37	89,57	89,87	90,37	90,87	91,37	91,87	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Kelautan & Perikanan
										Target 2025 ditetapkan berdasarkan realisasi 2024 serta hasil Ra kortekwil Jateng	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	8,12	8,05	8,0	7,47	6,74	5,94	4,8	IUP	
										Target 2025 ditetapkan berdasarkan realisasi 2024 serta hasil Rakortekwil Jateng	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	68,29	72,63	72,67	72,72	72,76	72,80	72,85	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	3,25	5,04	7,23	10,85	15,10	21,04	24,16	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	63,37	65,21	67,03	68,86	70,69	72,53	74,36	IUP	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	26,36	26,54	26,72	27,81	28,91	30,02	32,54	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang pekerjaan Umum (Sub Bidang Persampahan)
7	Kontribusi Penurunan Emisi GRK	Ton CO2eq	55.883,04	2.128.928,11	2.235.374,52	2.347.143,24	2.464.500,40	2.587.725,42	2.717.111,69	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
8	Indeks Risiko Bencana	Persen	102,93	100,93	99,93	98,93	97,93	96,93	95,93	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Bidang Kebencanaan)
9	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,61	0,63	0,64	0,66	0,68	0,7	0,76		
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,75	0,7	0,67	0,64	0,61	0,58	0,55		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
11	Rasio Penduduk	Persen	99,26	99,21	99,18	99,12	99,06	98,97	98,92		
12	Kepadatan penduduk	Persen	1045	1023,39	1014,82	1006,24	997,66	989,08	980,51		
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,39	5,60-5,86	5,5-6,0	6,50-7,08	7,10-7,63	7,60-8,12	7,90-8,34		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan,

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Urusan Pemerintahan Penelitian & Pengembangan
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	12,41	12,07-11,65	11,50-11,18	11,10-10,92	10,85-10,35	10,30-9,77	9,50-9,20	IUP	
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	52,19	56,37	61,37	69,37	79,37	84,66	86,61	IUP	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,53	3,55-3,17	3,41-3,11	3,30-3,00	3,18-2,88	3,06-2,76	2,95-2,65	IUP	
5	Indeks Gini	angka	0,309	0,308	0,307	0,306	0,305	0,304	0,303		
6	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	NA	20,63	21,17	21,52	21,87	22,22	22,57	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
7	Indeks Pembangunan Manusia	angka	75,53	76	76,71	77,21	77,43	78,57	78,63		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan, Urusan Pemerintahan Penelitian & Pengembangan
8	Usia Harapan Hidup	tahun	76,18	76,23	76,6	76,78	76,94	76,99	77,1	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kesehatan
9	Jumlah Kasus Kematian ibu	Kasus	16	14	14	13	13	12	12	IUP	
10	Prevalensi Stunting	Persen	15,8	14,87	14,29	13,71	13,13	12,55	12,14	IUP	
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus	Persen	64,28	90	90,5	91	91,5	92	92,5	IUP	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	tuberkulosis (treatment coverage)										
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	87,8	90	90,25	90,5	90,75	91	91,25	IUP	
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98	98,83	98,86	98,88	98,89	98,9	98,95	IUP	
14	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,93	13,61	13,75	13,89	14,04	14,18	14,33	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pendidikan
15	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,88	9,33	9,51	9,68	9,86	10,03	10,21	IUP	
16	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):										
	Literasi jenjang SD	Persen	64,99	66,76	67,21	67,66	68,11	68,56	69,01	IUP	
17	Literasi jenjang SMP	Persen	77,3	82,2	82,47	82,74	83,01	83,28	83,55	IUP	
18	Numerasi jenjang SD	Persen	50,92	52,49	50	50,6795	52,439	54,1985	55,958	IUP	
19	Numerasi jenjang SMP	Persen	65,55	66	66,6	67,2	67,8	68,4	69	IUP	
20	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	NA	7,2	7,4	7,61	7,81	8,01	8,21	IUP	
21	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	100	IUP	
22	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Persen	NA	5,25	5,42	5,59	5,75	5,92	6,09	IUP	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
23	Cakupan pelestarian warisan budaya	Persen	80,6	44	44	54	54	66	66		
24	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen	NA	19,38	20,14	20,91	21,67	22,43	23,19	IUP	
25	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	NA	91000	91100	91200	91300	91400	91500	IUP	
26	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	Persen	NA	19,99	20,44	20,89	21,34	21,79	22,24	IUP	
27	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Persen	0,16	0,16	0,26	0,36	0,56	0,72	0,75	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perpustakaan
28	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	72.91	72,93	72.95	73.01	73.05	73.09	73.15		
29	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	39,72	43,13	46,66	49,06	51,58	54,24	56,94	IUP (Target ditetapkan berdasarkan capaian 2024)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Tenaga Kerja
30	Indeks Perlindungan Anak	angka	NA	66,48	67,22	67,24	67.26	67.29	67.33		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
31	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	0-100	63,45	64,50	65,70	66,80	67,90	69,10	70,30	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
32	Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	Persen	11	10,7	10,4	10,1	9,9	9,6	9,3		
33	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	69,44	69,5	69,6	69,7	69,8	69,9	70		
34	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,377	0,375	0,372	0,369	0,365	0,362	0,359	IUP	Daerah Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
35	Indeks Pembangunan Gender	angka	92,62	92,75	92,88	93,01	93,14	93,27	93,4		
36	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,73	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Indeks Infrastruktur	Angka	76,18	76,97	77,51	78,05	78,61	79,08	79,67		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Pekerjaan Umum
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	39.89	42.02	42.08	42.11	42.14	42.16	42.18	IUP	Pengampu Urusan Bidang Perindustrian
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,52	3,57	3,64	3,82	4,00	4,18	4,36	IUP	Pengampu Urusan Bidang Pariwisata
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	900	940	968	997	1027	1058	1090	IUP	
4	Rasio Kewirausahaan	Persen	NA	2,89	3,09	3,34	3,38	3,5	3,62	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan
5	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	NA	1,82	1,88	1,89	1,93	1,99	2,02	IUP	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	2,88	2,9	3,01	3,11	3,22	3,32	3,43	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
7	Disparitas Harga	Persen	NA	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74.54	74,81	75,07	75,98	76,89	77,97	78,7		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Tenaga kerja
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	58,98	65,3	66,13	66,8	67,06	67,99	68,1	IUP	
10	Indeks Inovasi Daerah	Skor Indeks	93,98	94,12	94,32	94,49	94,66	94,83	95		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Pemerintahan penelitian dan pengembangan
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDRB	5.96	24.27	25,05	25,83	26,60	27,38	28,16	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,3	0,47	0,48	0,49	0,5	0,52	0,53	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Keuangan
13	Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Persen	4,64	4,68	4,7	4,72	4,75	4,77	4,78		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
14	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB *)	Persen	5,4	7,13	7,27	7,42	7,56	7,7	7,85	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
15	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB *)	Persen	2,77	2,90	3,03	3,17	3,30	3,43	3,57	IUP	
16	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	NA	78,51	79,32	80,12	80,91	81,69	82,45	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
17	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	NA	90,5	90,62	91,23	91,84	92,45	92,83	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	88,36	88,36	88,56	88,66	88,76	88,86	88,96	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum
										Target 2025 ditetapkan berdasarkan realisasi 2024	
19	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen	67,24	67,41	67,75	68,1	68,44	68,95	69,13	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perhubungan
20	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	68,7	69,1	69,5	69,9	70,3	70,7	71,1	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Bidang Pekerjaan Umum
21	Indeks Desa	Indeks	39	39	42	45	48	53	56		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Persentase Desa Mandiri	Persen	27,55	33,67	35,71	37,76	39,8	42,35	44,84	IUP	
										Target 2025 ditetapkan berdasarkan realisasi 2024	
23	Tingkat Inflasi	Persen	1,77	1,76	1,75	1,74	1,73	1,72	1,71		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
24	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0	0	0	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25	Kapabilitas Inovasi	Angka	NA	2,58	2,62	2,67	2,72	2,77	2,82	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan
IV ASPEK PELAYANAN UMUM											
1	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	87,14	87,29	87,67	88,17	88,77	89,47	90	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretarian Daerah (Bagian Organisasi)
2	Nilai AKIP	Nilai	65,52	66,47	67,52	68,47	69,52	70,47	71,52		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Indeks Reformasi Hukum	angka	98,94	98,99	99,04	99,09	99,14	99,19	99,24	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretarian Daerah (Bagian Hukum)
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poin	4	4,26	4,27	4,28	4,29	4,3	4,31	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
5	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	NA	2,00	2,10	2,30	2,50	2,60	2,70		
6	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,1	4,15	4,19	4,24	4,28	4,32	4,36	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretarian Daerah (Bagian Organisasi)
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	87	88,31	89,4	90	91	92		
8	Indeks Integritas Nasional	angka	80,8	82,42	83,23	84,05	84,86	85,68	86,49	IUP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah
9	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	71,43	80	90	95	100	100	100		Pengampu Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
10	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	NA	65,25	65,5	65,75	66	66,25	66,5		
11	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,59	3,64	3,69	3,74	3,79	3,84	3,89		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Perencanaan, Urusan Pemerintahan Penelitian & Pengembangan
12	Indeks Harmoni	Nilai	NA	6,9	7,1	7,3	7,5	7,7	7,9		Unsur Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
V INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH											
1	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,93	13,61	13,75	13,89	14,04	14,18	14,33		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pendidikan
2	Rata-rata lama sekolah	tahun	7,88	9,33	9,51	9,68	9,86	10,03	10,21		
3	Skor Literasi SD	Nilai	63,22	64,57	65,05	67,55	70,05	72,55	75,05		
4	Skor Literasi SMP	Nilai	74,33	75,59	77,12	79,32	82,50	84,2	85,5		
5	Skor Numerasi SD	Nilai	48,35	57,75	59,18	62,08	64,98	67,88	70,78		
6	Skor Numerasi SMP	Nilai	65,33	65,77	66,13	67,63	69,13	70,63	71,50		
7	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
8	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat (APS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
9	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat (APS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
10	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
11	Cakupan pelestarian warisan budaya	Persen	80,6	44	44	54	54	66	66		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
12	Jumlah OPK yang rekomendasikan untuk ditetapkan	Obyek	18	18	19	19	20	20	21		Perangkat Daerah Pengampu Bidang Kebudayaan
13	Jumlah Cagar Budaya yang yang direkomendasikan untuk ditetapkan	Obyek	12	12	14	14	16	16	18		
14	Usia Harapan Hidup	tahun	76,18	76,23	76,6	76,78	76,94	76,99	77,1		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kesehatan
15	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	16	14	14	13	13	12	12		
16	Angka Kematian Balita	Kasus	144	144	139	134	129	124	119		
17	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	Persen	N/A	10	25	50	65	80	80		
18	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	Persen	N/A	50	52	54	56	58	58		
	Prevalensi Stunting	Persen	15,8	14,87	14,29	13,71	13,13	12,55	12,14		
19	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	N/A	59,52	59,52	59,52	69,05	69,05	78,57		
20	Cakupan Kepesertaan JKN	Persen	N/A	98,83	98,84	98,86	98,88	98,9	98,92		
21	NDR (Net Death Rate) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	permil	42,4	40,5	38,7	37,5	37	36,5	36		
22	NDR (Net Death Rate) RSUD dr. Soeratno Gemolong	permil	10,7	10,14	9,96	9,14	9,14	9,08	9,08		
23	NDR (Net Death Rate) RSUD Sukowati Tangen	permil	1,2	1,85	1,85	1,62	0,93	0,77	0,77		
24	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	79,43	79,9	80,36	80,83	81,33	81,72	82,26		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum
25	Indeks Bina Marga	Indeks	88,36	88,36	88,56	88,66	88,76	88,86	88,96		
26	Indeks Keciptakarya	Indeks	81,94	82.23	83.03	83.94	84.93	85.61	86.71		
27	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	68,7	69,1	69,5	69,9	70,3	70,7	71,1		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
28	Indeks Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	Indeks	NA	50,03	54,92	67,1	77,07	89,59	98,81		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Sub Bidang Bidang Penataan Ruang
29	Indeks Penyelenggaraan Tata Ruang	Indeks	NA	52,29	56,88	71,57	79,59	94,69	100		
30	Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	NA	87,81	87,87	89,75	91,62	94,08	96,42		
31	Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks	NA	10	20	40	60	80	100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pertanahan
32	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	NA	65,25	65,5	65,75	66	66,25	66,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
33	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal sub urusan trantibum	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
34	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
35	Indeks Resiko Bencana	Indeks	109,76	108,76	107,76	106,76	105,76	104,76	103,76		
36	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,61	0,63	0,64	0,66	0,68	0,7	0,76		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Sosial
37	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang diberdayakan	Persen	1,78	1,92	2,36	2,82	3,25	3,69	4,13		
38	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Mendapat Layanan dan Penanganan	Persen	2,95	3,8	5,38	6,97	8,56	10,15	11,75		
39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	74.54	74,81	75,07	75,98	76,89	77,97	78,7		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Tenaga kerja
40	Tingkat Produktifitas tenaga kerja	Rp Juta/orang	53,9	55,64	55,7	55,76	55,83	55,89	55,95		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
41	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	92,62	92,75	92,88	93,01	93,14	93,27	93,4		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
42	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	indeks	N/A	66,48	67,22	67,24	67,26	67,29	67,33		
43	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	Angka	0,377	0,375	0,372	0,369	0,365	0,362		
44	Kabupaten Layak Anak (KLA)	skor	N/A	811	829	838	847	856	865		
45	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks	63,45	64,50	65,70	66,80	67,90	69,10	70,30		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
46	Total fertility Rate /TFR	Anak	1,97	1,98	1,98	1,99	1,99	2	2,01		
47	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	89,37	89,57	89,87	90,37	90,87	91,37	91,87		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pangan
48	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	95,8	96,1	96,3	96,4	96,7	96,8	96,9		
49	Presentase Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Persen	1,53	1,55	1,57	1,59	1,61	1,63	1,65		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kelautan & Perikanan
50	a. Produksi Pertanian b. Produksi Perikanan c. Produksi Peternakan	Ton	a. 930,766 b. 18.418,96 c. 567.000	a. 931.487 b. 18.602,22 c. 630.000	a. 932.282 b.18.775,05 c. 693.000	a. 933.143 b. 18.949,47 c. 708.750	a. 934.092 b. 19.125,49 c. 724.500	a. 935.086 b. 19,302,13 c. 740.250	a. 936.154 b. 19,480,41 c. 756.000		
51	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	2,75	2,76	2,77	2,78	2,79	2,8	2,81		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pertanian
52	Indeks Kualitas Air	Persen	51,05	69,99	70,09	70,19	70,29	70,39	70,49		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
53	Indeks Kualitas Udara	Persen	91,05	86,4	86,41	86,42	86,43	86,44	86,45		
54	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	55,78	51,69	51,7	51,71	51,72	51,73	51,74		
55	Indeks Pencemaran air	Nilai	2,57	2,56	2,55	2,54	2,53	2,52	2,52		
56	Kualitas udara pada konsentrasi SO2 dan NO3	Nilai	0,3448	0,34462	0,34444	0,34426	0,34408	0,3439	0,3439		
57	Luas tutupan lahan	Ha	15805	15814,95	15834,84	15844,78	15854,73	15864,67	15868,67		
58	Persentase Sampah yang ditangani	Persen	43,1	43,12	43,14	43,15	43,17	43,18	43,2		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
59	Persentase Sampah Terkelola	Persen	43,28	43,3	43,32	43,34	43,36	43,38	43,4		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang pekerjaan Umum (Sub Bidang Persampahan)
60	Persentase sampah yang dikurangi	Persen	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,2	0,2		
61	Indeks pelayanan publik layanan administrasi kependudukan	Nilai	4,02	4,03	4,04	4,05	4,06	4,07	4,08		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
62	Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan, meliputi kepemilikan KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak, dan Akta Kelahiran Anak Umur 0-18 Tahun	Persen	88,25	89,27	90,03	90,75	91,47	92,18	92,9		
63	Persentase Desa Mandiri	Persen	27,55	33,67	35,71	37,76	39,8	42,35	44,84		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
64	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	n/a	66,67	6,06	5,71	5,41	6,41	6,02		
65	Persentase Desa dengan status WTP Desa	Persen	0,1224	0,2551	0,3061	0,3571	0,4082	0,4592	0,5102		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perhubungan
66	Indeks Pelayanan Transportasi	Indeks	0,469	0,506	0,518	0,53	0,541	0,553	0,564		
67	Rasio ketersediaan sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rasio	62,08	65,22	66,08	66,95	67,81	68,67	69,53		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
68	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	NA	2,00	2,10	2,30	2,50	2,60	2,70		
69	Indeks Keterpaduan layanan Digital Pemerintah	Indeks	NA	2,10	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70		
70	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	69,65	80	84	86	88	92	95		
71	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,45	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
72	Indeks Satu Data Indonesia	Indeks	58,52	59,72	60,92	61,12	62,32	63,52	64,72		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Statistik
73	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	I+	I+	I+	II	II	II+	III		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Persandian
74	Persentase Koperasi sehat	Persen	NA	34,67	36,67	38,67	40,13	42,21	43,59		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
75	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	94,03	94,95	95,74	96,42	97,01	97,51	97,93		
76	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	NA	42,68	42,69	42,7	42,71	42,72	42,73		
77	Persentase Usaha Mikro yang Berkualitas	Persen	NA	19,38	19,48	19,93	20,4	20,7	20,79		
78	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	4,46	4,47	4,48	4,49	4,5	4,51	4,52		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
79	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Persen	48,39	51,18	52,23	53,02	53,81	54,59	55,38		
80	Tingkat stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	81,13	81,13	83,02	83,02	83,02	84,91	84,91		
81	Persentase UMKM yang difasilitasi kegiatan promosi produk unggulan di dalam dan di luar negeri	Persen	15	15,5	15,71	16,19	16,67	17,14	17,62		
82	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	Persen	4,9	4,91	4,92	4,93	4,94	4,95	4,96		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perindustrian
83	Persentase Pertumbuhan Industri	Persen	2,8	2,82	2,84	2,86	2,86	2,88	2,88		
84	Persentase peningkatan Investasi	Persen	4,26	4,27	4,28	4,29	4,3	4,31	4,33		Perangkat Daerah Pengampu Urusan

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
85	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Predikat	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)		Bidang Penanaman Modal
86	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	Persen	NA	4,27	4,28	4,29	4,3	4,31	4,33		
87	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Persen	77,35	77,65	78,01	78,34	78,67	79	79,5		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kepemudaan & Olahraga
88	persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	Persen	NA	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00		
89	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan Minum	Persen	NA	3,57	3,62	3,79	3,95	4,12	4,28		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pariwisata
90	Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	NA	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35		
91	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	72.91	72,93	72.95	73.01	73.05	73.09	73.15		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perpustakaan
92	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Persen	0,16	0,16	0,26	0,36	0,56	0,72	0,75		
93	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	indeks	78,23	78,5	79	80	80,1	80,2	80,3		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Arsip
94	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	Persen	60	65	70	73	76	79	82		
95	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Nilai	65,52	66,47	67,52	68,47	69,52	70,47	71,52		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
96	Persentase PD yang mendapatkan Penilaian Kinerja Organisasi kategori Baik dan istimewa	Persen	91,3	92	93	94	95	100	100		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
97	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD
98	Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	70	70	71	72	73	74	75		
99	Nilai perencanaan kinerja daerah	Nilai	22,44	22,76	23,08	23,40	23,72	24,04	24,36		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan
100	Persentase ketercapaian program pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
101	Indeks inovasi daerah	Skor Indeks	93,98	93,98	93,99	94	94,01	94,02	94,03		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan
102	Persentase riset dan inovasi yang diimplementasikan	Persen	89,67	90	90,75	91,5	92,5	93	93,75		
103	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	NA	75,01	75,23	75,55	75,99	76,53	77,18		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan
104	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	2,78	4,01	4,03	4,05	4,07	4,11	4,12		
105	Opini BPK	Indeks	NA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
106	Indeks Sistem Merit	Indeks	282,5	282,5	285	290	295	300	305		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kepegawaian
107	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	71,97	73	73,5	74	74,5	75	75,5		
108	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81	81,15	81,5	82	82,5	83	83,5		
109	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	29,27	29,27	29,37	29,5	29,75	30	30,25		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan
110	Maturitas SPIP	Indeks	3,147	3,147	3,15	3,155	3,16	3,165	3,17		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
111	Presentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Rekomendasi BPK RI	Persen	75	76	76	77	78	79	80		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah
	Indek Efektifitas Penanggulangan Korupsi	Persen	3	3,01	3,02	3,04	3,06	3,1	3,11		
112	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,75	85,5	86,25	87	87,75	88,5	89,25		Kecamatan Kalijambe
113	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
114	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	63,2	63,35	63,5	63,65	63,8	63,95	64,1		
115	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,25	87,75	88,25	88,75	89,25	89,75	90,25		Kecamatan Plupuh
116	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
117	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	61,3	61,35	62,4	63	63,5	64	69,5		
118	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,25	88,75	89,25	89,75	90,25	90,75	91,25		Kecamatan Masaran
119	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
120	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	62,25	62,75	63	63,25	64	64,25	65		
121	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	92,5	92,7	92,9	93,1	93,3	93,5	93,7		Kecamatan Kedawung
122	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
123	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	71,05	71,15	71,2	71,25	71,3	71,35	71,4		
124	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88	88,2	88,4	88,6	88,8	89	89,2		Kecamatan Sambirejo

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
125	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Gondang
126	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	63,5	64,1	64,7	65,3	65,9	66,5	67,1		
127	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,5	86	86,5	87	87,5	88	88,5		
128	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
129	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	65,85	66	66,5	67	67,5	67,25	68		Kecamatan Sambungmacan
130	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,25	84,75	85,25	85,75	86,25	86,75	87,25		
131	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
132	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	66,75	67,15	67,55	67,95	68,35	68,75	70,05		
133	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,5	90,7	90,9	91,1	91,3	91,5	91,7		Kecamatan Ngrampal
134	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
135	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	63,35	64,3	65,25	66,2	67,15	68,1	69,05		
136	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,4	84,3	85,2	86,1	87	87,9	88,8		
137	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Karangmalang
138	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	71,5	71,55	71,6	71,65	71,7	71,75	71,8		
139	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	90,5	91	91,5	92	92,5	93		
											Kecamatan Sragen

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
140	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Sidoharjo
141	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	61,10	61,6	62,1	62,6	63,1	63,6	64,1		
142	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	94,25	94,35	94,45	94,55	94,65	94,75	94,85		
143	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
144	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	67,20	67,7	68,2	68,7	69,2	69,65	70,1		Kecamatan Tanon
145	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,75	85,25	85,75	86,25	86,75	87,25	87,75		
146	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
147	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	62,1	63	63,9	64,8	65,7	66,6	67,5		
148	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	87,5	88	88,5	89	89,5	90		Kecamatan Gemolong
149	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
150	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	66,75	67,1	67,5	67,9	68,2	68,6	70,05		
151	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,88	88,38	88,88	89,38	89,88	90,38	90,88		
152	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Miri
153	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	64,8	65,1	65,4	65,7	66	66,3	66,6		
154	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	86,5	87	87,5	88	88,5	89		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
155	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Mondokan
156	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	62,1	62,8	63,5	64,2	64,9	65,6	66,3		
157	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	86,5	87	87,5	88	88,5	89		
158	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
159	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	66,45	66,75	67,7	68,05	68,4	68,75	69		Kecamatan Sukodono
160	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,75	85,5	86,25	87	87,75	88,5	89,25		
161	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
162	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	71,95	72,15	72,3	72,45	72,6	72,75	72,9		
163	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,05	84,8	85,55	86,3	87,05	87,8	88,55		Kecamatan Gesi
164	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
165	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	68,1	68,25	68,4	68,55	68,7	68,85	69		
167	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,25	85,75	86,25	86,75	87,25	87,75	88,25		
168	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Tangen
169	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	68,1	68,35	70,05	70,1	70,2	70,25	70,35		
170	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,75	89,85	89,95	90,05	90,15	90,25	90,35		
											Kecamatan Jenar

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
171	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau oleh Layanan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa Politik
172	Nilai Akip Kecamatan	Nilai	65,4	65,7	66	66,3	66,7	67	67,3		
173	Indeks harmoni	indeks	N/A	6,9	7,1	7,3	7,5	7,7	7,9		
174	Presentase Konflik yang yang ditangani	Persen	N/A	55,6	66,7	77,8	88,9	100	100		
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI										
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan										
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pendidikan (catatan target SPM sesuai permendagri 100%)
2	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat (APS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
3	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat (APS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
4	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
5	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	dalam pendidikan kesetaraan (APS)										
6	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,22	64,57	65,05	67,55	70,05	72,55	75,05		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pendidikan
7	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	48,35	57,75	59,18	62,08	64,98	67,88	70,78		
8	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	74,33	75,59	77,12	79,32	82,50	84,2	85,5		
9	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65,33	65,77	66,13	67,63	69,13	70,63	71,50		
10	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	87	87,03	87,72	88	88,05	88,82	89		
11	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persen	90	90,54	91,02	91,52	92	92,20	92,50		
12	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	73,59	76,53	78,20	79,52	81,30	82,20	84,50		
13	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	70,54	70,65	70,95	71,30	71,80	72,20	72,80		
14	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	74,31	72,68	73,2	74,02	75,01	75,5	76		
15	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	70,1	70,98	71,20	71,50	72,00	72,20	72,50		
16	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	56,54	60,42	61,15	62,05	63,20	64,00	65,50		
17	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	57,36	58,78	59,01	59,98	60,25	61,30	62,50		
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan										

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	16	14	14	13	13	12	12		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kesehatan
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	15,8	14,87	14,29	13,71	13,13	12,55	12,14		
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita	Persen	100	100	100	100	100	100	100		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	diabetes melitus sesuai standar										
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Persen	-	-	-	-	-	-	-		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum
2	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	Persen	74,35	74,45	74,55	74,65	74,75	74,85	74,95		
3	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Persen	78.78	78.83	78.88	78.98	79.08	79.18	79.28		(Kabupaten Sragen bukan merupakan Kawasan Pesisir sehingga tidak memiliki Kawasan rawan abrasi dan banjir rob)
4	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum	Persen	88,91	89,59	90,26	90,95	91,64	92,33	93,03		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota										
5	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	88,39	88,78	89,26	89,86	90,64	91,7	93,07		
6	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	85,40	87,4	88,21	90,57	91,6	92,66	94,12		
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	88,36	88,36	88,56	88,66	88,76	88,86	88,96		
8	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	27,5	30,5	32	33,5	35	36,5	38		
9	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	-	-	-	-	-	-	-		
10	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	22	20	19	18	17	16	15		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
11	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	-	76,84	78,6	80,36	82,12	83,89	85,65		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, dan Bidang Penataan Ruang
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen	-	0	0	50	50	50	50		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, dan Bidang Penataan Ruang
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	85,12	85,12	85,12	88,26	91,4	95,7	100		
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	4,21	4,29	4,6	4,82	5,06	5,33	5,64		
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Ketentraman

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	dilaksanakan oleh Satpol PP										dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	71,43	80	90	95	100	100	100		
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	7	7	7	7	7	7	7		
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	67	68	69	70	71	72	73		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	N.A	20	25	30	35	40	45		
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	100	80	100	100	100	100	100		
11	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
12	Persentase penanganan pasca bencana	Persen									
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	%	20	20	20	20	20	100		
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	%	71.63	72	72,5	73	73,5	74	74,5	
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial											
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Sosial
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persen	65	70	71	72	73	74	75		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Sosial
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban	Persen	65	70	71	72	73	74	75		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar										
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	30	35	40	45	50	55	60		
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persen	65	70	71	72	73	74	75		
12	Presentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	70	71	72	73	74	75	76		
13	Presentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	70	71	72	73	74	75	76		
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Tenaga kerja
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	89,11	89,15	89,44	89,74	90,03	90,32	90,61		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp Juta/Orang	53,9	55,64	55,7	55,76	55,83	55,89	55,95		
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	52,26	52,26	54,08	55,98	57,96	60,01	62,12		
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	90,78	91	91,24	91,51	91,79	92,1	92,34		
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak											
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,62	92,75	92,88	93,01	93,14	93,27	93,4		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,377	0,375	0,372	0,369	0,365	0,362	0,359		
3	Persentase ARG Daerah	Persen	16,72	18	18,9	19,8	20,7	21,6	22,5		
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan										
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	3,8	5,97	8,14	10,3	12,47	14,64	16,81		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pangan
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai 0-100	95,8	96,1	96,3	96,4	96,7	96,8	96,9		
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	2,88	2,88	2,4	2,4	1,92	1,92	1,44		
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	68	69	70	72	74	76	78		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan										
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	Persen	-	-	-	-	-	-	-		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pertanahan,
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	Persen	0	0	100	100	100	100	100		
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran										
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	Persen	0	0	100	100	100	100	100		
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen	0	0	100	100	100	100	100		
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	Persen	56,73	65,38	74,04	82,69	91,35	100	100		
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	99,07	96,42	97,08	98,36	100	100	100		
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah	Persen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB										
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup											
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	68,29	72,63	72,67	72,72	72,76	72,8	72,85		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Nilai	48,5	48,6	48,7	48,8	48,9	49	49,1		
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Persen	100	68	70	78	80	85	88		
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
4	Persentase kepemilikan Akta kelahiran	Persen	98,51	98,55	98,6	98,7	98,8	98,9	99		
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	66,79	70	72	74	76	78	80		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6	Persentase profil data kependudukan skala kabupaten yang disusun	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	1,72	4,00	12,50	18,50	24,50	30,50	36,50		
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	n/a	66,67	6,06	5,71	5,41	6,41	6,02		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	n/a	n/a	40%	40%	60%	60%	80%		
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	-	-	-	-	-	-	-		
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	1,97	1,98	1,98	1,99	1,99	2	2,01		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	68	68,83	69,62	70,40	71,19	71,98	72		
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	9,1	8,9	8,8	8,7	8,7	8,6	8,5		
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4		
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,45	64,50	65,70	66,80	67,90	69,10	70,30		
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan											
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,45	0,45		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perhubungan
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	Persen	67,24	67,41	67,75	68,1	68,44	68,95	69,13		
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Persen	-	-	-	-	-	-	-		
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika											
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah											
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen		42.68	42.69	42.70	42.71	42.72	42.73		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	94,03	94,95	95,74	96,42	97,01	97,51	97,93		
3	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	51,54	19,38	19,48	19,93	20,4	20,7	20,79		
Urusan Penanaman Modal											
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	4,26	4,27	4,28	4,29	4,3	4,31	4,33		
	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	N.A	100	100	100	100	100	100		
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga											
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Persen	0.19	0.20	0.21	0.23	0.24	0.25	0.26		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kepemudaan

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											& Olahraga, Bidang Pariwisata
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Persen	1.42	1,54	1,65	1,77	1,88	2.00	02.06		
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik											
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.45	2.45	2,6	2,7	2,8	2,9	3		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian											
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	N.A	39,07	59,07	59,27	59,67	59,87	60		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan											
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	-	-	-	-	-	-	-		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kebudayaan
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Persen	57,14	57,14	66,67	66,67	76,19	76,19	85,71		
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	Persen	-	-	-	-	-	-	-		
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan											
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	66,06	66,22	67,5	68	68,5	69	69,6		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Arsip dan Bidang Perpustakaan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	72,91	72,93	72,95	73,01	73,05	73,09	73,15		
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan											

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	78,23	78,5	79	80	80,1	80,2	80,3		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Arsip dan Bidang Perpustakaan
	1. Urusan Pilihan										
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan										
1	Produksi Perikanan Tangkap	Persen	1	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kelautan & Perikanan
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Persen	1,01	1,01	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata										
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	11,28	11,5	12	12,5	13	13,5	14		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pariwisata
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Persen	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5		
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	NA	10	14,5	19	23,05	28	32		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian										
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	0	0,08	0,088	0,095	0,105	0,11	0,117		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pertanian
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028		
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	Persen	5	5	5	5	5	5	5		
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	Persen	0	0.20	0.18	0,15	0,12	0,1	0,08		
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan	Persen	195,97	189,25	188,98	187,92	187,48	186,26	185,63		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	bencana DPI & OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan										
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan											
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Persen	100,01	100,01	100,5	100,5	101,05	101,55	101,55		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	99,56	99,56	99,64	99,73	99,82	99,91	100		
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian											
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:	Persen	37,99	38,4	38,8	39,2	39,6	40	40		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perindustrian
	a. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	0,18	0,44	0,31	0,27	0,24	0,22	0,19		
	b. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	Persen	39,75	42,02	42,06	42,09	42,13	42,16	42,18		
	c. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	jiwa	70.883	48.071	48.574	49.665	51.406	53.018	54.949		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	d. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	milyar	-439	-109	-48	-7	0	12	66		
	e. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	milyar	1.982	1.933	1.883	1.833	1.782	1.732	1.682		
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Persen	22,3	22,8	23,3	23,8	24,3	24,8	25,3		
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	Persen	100	100	100	100	100	100	100		

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
	Perencanaan										
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan
	Keuangan										
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	Persen	NA	41	38	30	30	30	30		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	NA	21,41	21,54	22,02	22,52	23,03	23,55		
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	94,41	94,73	94,98	95,15	95,37	95,52	95,68		
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	4,36	4,13	4,09	4,58	4,32	4,09	3,88		
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	NA	32	40	40	40	40	40		
6	Persentase Penurunan SILPA	Persen	-45,46	-10	-10	-10	-10	-10	-10		
	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan										
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	indeks	N/A	73	73,5	74	74,5	75	75,5		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kepegawaian & Urusan Pemerintahan

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Pendidikan & Pelatihan.
	Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan, Urusan Pemerintahan Penelitian & Pengembangan
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	66,2	66,4	66,67	69,33	74,67	77,33	80		
	Fungsi Pengawasan										
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	3,147	3,148	3,150	3,155	3,160	3,165	3,170		
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	3	3	3	3	3	3	3		
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	2,96	2,97	2,98	2,99	3	3,01	3,02		
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	80	80	80	81	82	83	84		
	Fungsi Pengadaan										

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET	OPD KOORDINATOR/ PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	22,3	22,3	22,3	22,31	22,32	22,33	22,34		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	19,2	19,2	19,2	19,25	19,3	19,35	19,4		
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	40	40	40	40	40	40	40		
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	tidak tepat	tepat	tepat	tepat	tepat	tepat	tepat		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD
2	Persentase Penetapan RaPerda Tahun N	Persen	70	75	80	85	90	95	100		
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	98,64	98,68	98,72	98,76	98,8	98,84	98,86		Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memiliki peran strategis sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sragen. RPJMD ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman yang solid bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat dalam berpartisipasi aktif mewujudkan Kabupaten Sragen yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Dengan RPJMD, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sragen dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Visi RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029 bisa terwujud ketika adanya komitmen, kolaborasi, dan partisipasi seluruh stakeholders pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan kaidah pelaksanaan sebagai ketentuan umum yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJMD. Berikut kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut.

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen pembangunan 5 tahun yang harus dipedomani bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta wajib berpedoman dan turut mendukung seluruh kebijakan yang termuat dalam dokumen tersebut, seperti visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak;
2. Setiap Perangkat Daerah (PD) atau unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen wajib berpedoman dalam setiap perumusan kebijakan yaitu RKPD, Renstra, Renja, dan kebijakan lainnya;
3. Peningkatan sinkronisasi substansi antara RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, RPJMN 2025-2029, dan dokumen lainnya.
4. Peningkatan konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen RPJMD dengan kebijakan pendanaan harus dilakukan dalam rangka meningkatkan perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran;
5. Pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD semata, namun dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan pembiayaan alternatif-inovatif melalui perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pembiayaan yang baru, peningkatan kelembagaan pembiayaan yang adaptif, pemanfaatan TIK dalam proses bisnis, dan optimalisasi peran sektor keuangan daerah;
6. Penerapan kaidah pelaksanaan ini harus didukung oleh pemanfaatan TIK melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh siklus pembangunan.
7. Dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029 didesain secara adaptif. Oleh karena itu, memuat mekanisme perubahan yang memastikan adanya ruang penyesuaian terhadap berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan.

Mekanisme perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan *force majeure*, yaitu perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Setiap penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029 harus dengan prinsip, yaitu akuntabel, transparan, efektif, dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi;

8. Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029 dapat berjalan baik, maka dibutuhkan penerapan manajemen risiko pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
9. Dokumen RPJMD ini mengintegrasikan Pembangunan berperspektif gender/pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang dilakukan secara holistik.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah; dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
2. Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan bertanggungjawab melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029;
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan setiap tahun; dan

4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan Tingkat Perangkat Daerah, dilakukan oleh masing- masing Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh Unit Kerja Bidang Perencanaan.

Semoga dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dalam lima tahun ke depan.

SRAGEN, 20 Agustus 2025

